



# PENYULUHAN PERTANIAN

**FAKTA, TEORI DAN APLIKASINYA  
BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



**Ir. MUKTASAM, M. Agr. Sc., Ph.D.**



**Ir. MUKTASAM, M. Agr. Sc., Ph.D.**

**PENYULUHAN PERTANIAN  
FAKTA, TEORI DAN APLIKASINYA BAGI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**





**Ir. MUKTASAM, M. Agr. Sc., Ph.D.**

**PENYULUHAN PERTANIAN  
FAKTA, TEORI DAN APLIKASINYA BAGI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia (Anggota IKAPI)

ISBN 978-623-427-083-9

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)*

MUKTASAM;

PENYULUHAN PERTANIAN: FAKTA, TEORI DAN  
APLIKASINYA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/  
Muktasam. –Ed. 1, --23.—Yogyakarta: Penerbit Yayasan  
Sahabat Alam Rafflesia, 2023

xxix, 448 hlm, 23 cm

Bibliografi: hlm 431

ISBN 978-623-427-083-9

1. Penyuluhan Pertanian: Fakta, Teori dan  
Aplikasinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat I. Judul  
II. Muktasam

Hak Cipta © 2023, pada penulis

---

Dilarang mengutip Sebagian atau seluruh isi buku dengan cara  
apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi,  
tanpa izin dari penerbit.

---

**Ir. Muktasam, M.Agr. Sc., Ph.D.**

PENYULUHAN PERTANIAN: FAKTA, TEORI DAN  
APLIKASINYA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

---

Cetakan ke- 01, Februari 2023

---

Hak penerbitan pada Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia  
(Anggota IKAPI)

Distributor:

PT Salam Literabaca Nusantara

DI Yogyakarta | email: literabaca@gmail.com

---

## KATA PENGANTAR

Tujuan akhir yang hendak dicapai melalui kegiatan pembangunan adalah terwujudnya *masyarakat yang sejahtera dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang lestari*. Indikator dari tercapainya tujuan ini adalah kondisi kehidupan yang lebih baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan dari masyarakat. Hidup dalam ketenangan, kedamaian, adil, harmonis, saling menghargai, religius, saling mendukung dan berbagi, jauh dari konflik dan kemiskinan, dan semacamnya (*Sosial*). Hidup yang produktif dengan pendapatan yang cukup dan memadai untuk memenuhi semua kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan lainnya (*Ekonomi*). Hidup dalam lingkungan dan sumber daya alam yang bersih, tertata, indah, dan menyenangkan, dan lestari yang layak untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang (*Lingkungan*).

**Penyuluhan** sebagai suatu proses *pendidikan, pembelajaran*, dan atau *komunikasi* menjadi salah satu alternatif kegiatan yang perlu dan mutlak ada guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut. Karena dengan penyuluhan diharapkan akan terjadi *perubahan perilaku*, yang mencakup perubahan dalam aspek *pengetahuan (knowledge)*, *sikap (attitudes)*, dan *keterampilan (skills)*. Perubahan-perubahan ini menjadi prasyarat bagi terjadinya perubahan berikutnya, yaitu perubahan *tindakan* atau *praktik* dari seseorang atau sekelompok orang, atau masyarakat, yang dalam konsep *Ilmu Penyuluhan (extension science)* dikenal sebagai *adopsi* dan *difusi inovasi*. Perubahan-perubahan ini belum menjadi jaminan bagi terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas serta perubahan pada pendapatan, kesejahteraan dan lingkungan. Ada banyak faktor lain yang turut mempengaruhi perubahan setelah proses adopsi dan difusi inovasi, antara lain

kebijakan harga, faktor lingkungan, pasar, ketersediaan inovasi dan teknologi serta faktor lingkungan sosial dan budaya lainnya.

Tulisan dalam buku ini memberi gambaran yang cukup komprehensif kepada pembaca tentang berbagai hal dalam penyuluhan pertanian. **Bagian awal** buku dibuka dengan uraian dan fakta tentang *kondisi kehidupan yang tidak memuaskan* pada semua subsektor pertanian, yang salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya kualitas *Sumber daya Manusia (SDM)* dan kualitas *Sumber daya Sosial (SDS)*. Kedua persoalan ini akan dapat diselesaikan dengan baik melalui proses *pendidikan, pembelajaran, komunikasi -penyuluhan*, yang pada akhirnya akan merubah keadaan ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik.

**Bagian kedua** dari buku ini menyajikan teori-teori dasar tentang penyuluhan, yang meliputi antara lain tentang pengertian atau definisi penyuluhan, ruanglingkup penyuluhan, teori komunikasi dan komunikasi dalam penyuluhan, adopsi dan difusi inovasi, metode penyuluhan, pengembangan dan evaluasi program penyuluhan, kelembagaan penyuluhan, dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh penyuluh.

**Bagian ketiga** dari buku ini menyajikan bagaimana konsep atau teori penyuluhan diterapkan dalam mendukung pembangunan pertanian dan peningkatan penghidupan petani. Tulisan yang disajikan pada bagian ketiga ini adalah tulisan yang dikembangkan atas dasar hasil dari beberapa kegiatan penelitian, pelatihan, penyuluhan dan pengembangan masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan dan pengelolaan sumber daya alam – seperti sumber daya hutan, perikanan, kelautan dan pesisir. Tujuan utama dari disajikannya tulisan-tulisan ini dalam bagian ketiga adalah untuk memberi gambaran kepada pembaca bagaimana konsep atau teori penyuluhan diterapkan dalam pembangunan. Bagaimana peran penyuluhan dalam membantu petani meningkatkan penghidupan petani (*livelihood improvement*), dan menghadapi perubahan iklim

*(climate changes)* juga menjadi bagian yang dibahas dalam bagian ketiga dari buku ini.

Semoga buku ini menjadi pegangan yang bermanfaat bagi para pembaca, khususnya para pencinta, peminat, dan praktisi ilmu dan kegiatan penyuluhan serta pengembangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung bagi kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas guna mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan, amien!

Mataram, 19 Agustus 2022

Penulis,

**Ir. MUKTASAM, M.Agr.Sc., Ph.D.**

## DAFTAR ISTILAH

ACIAR	:	Australian Center for International Agricultural Research
Adopsi	:	Proses mental yang dilalui oleh seseorang dari sejak mendengar atau sadar akan adanya inovasi, tertarik, menilai, mencoba hingga menerapkan inovasi
AIPD-Rural	:	Australian Indonesia Partnership for Development
Bakorluh	:	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian - Tingkat Provinsi
Bappeluh	:	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian – Tingkat Kabupaten (BP4K)
Bottom-up	:	Pendekatan dari Bawah ke Atas (oleh masyarakat)
BP3K	:	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan – Tingkat Kecamatan
BP4K	:	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BPP	:	Balai Penyuluhan Pertanian
Bumdes	:	Badan Usaha Milik Desa
CBCF	:	Community-based Commercial Forestry
CIFOR	:	Center for International Forestry Research
CSIRO	:	Commonwealth Science Industrial Research Organisation - Australia
Difusi	:	Menyebarnya inovasi dalam sistem sosial atau masyarakat
EI-ADO	:	Eastern Indonesia - Agribusiness Development Opportunities
F2FM	:	Farmers to Farmers Mentoring
Financial Capital	:	Sumber daya Keuangan - SDK
Gapoktan	:	Gabungan Kelompok Tani
HKm	:	Hutan Kemasyarakatan
Human Capital	:	Sumber daya Manusia - SDM
ICRAF	:	International Center for Research on Agroforestry
IFSCA	:	<i>Innovative Farm Systems and Capability for Agribusiness</i>
Kanoppi	:	Kayu, non-kayu produksi dan pemasaran terintegrasi

KASA	: Knowledge, Attitudes, Skills and Aspiration
Koptan	: Koperasi Pertanian
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
LAKU	: Latihan dan Kunjungan (Training and Visit System)
MFP-DFID	: Multistakeholder Forestry Program – Department for International Development
Money	: Monitoring dan Evaluasi
MTG	: Master TreeGrower
Natural Capital	: Sumber daya Alam - SDA
NZ Aid	: New Zealand Aid
Penyuluh THL-TB	: Penyuluh Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu
Physical Capital	: Sumber daya Fisik/Fasilitas - SDF
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Poktan	: Kelompok Tani
PPL	: Penyuluh Pertanian Lapangan
RDKK	: Rencana Definitif Kegiatan Kelompok
SDA	: Sumber daya Alam
SDF	: Sumber daya Fisik
SDK	: Sumber daya Keuangan
SDM	: Sumber daya Manusia
SDS	: Sumber daya Sosial
SEE	: Social Economy and Environment
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SMCR	: Source Message Channel and Receiver
Social Capital	: Sumber daya Sosial atau Modal Sosial - SDS
Stakeholder	: Pemangku Kepentingan
T4T	: Trees for Trees – LSM base di Semarang dan Beoperasi di Pati
TNF	: The Nippon Foundation
TOP Model	: Model Targetted Outcome Project
Top-down	: Pendekatan dari Atas ke Bawah
ToT	: Transfer of Technology
TOT	: Training of Trainers
WHO	: World Health Organisation
WWF	: World Wildlife Fondation

## LINGKUP ISI BUKU DAN SUMBER TULISAN

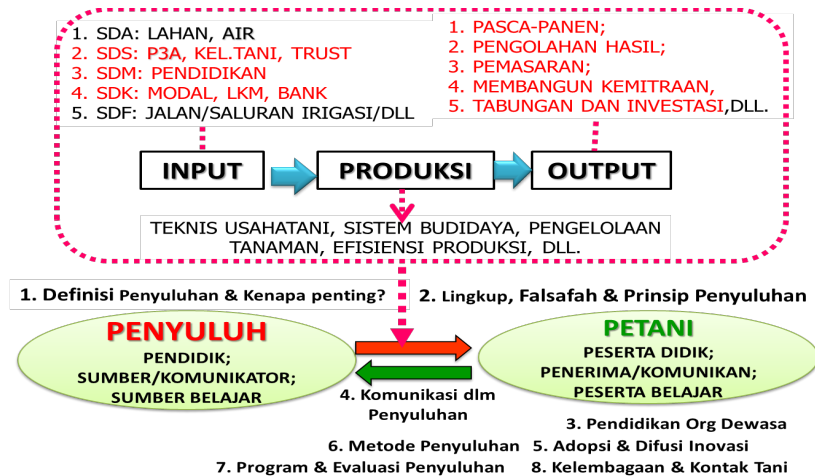
### Lingkup Isi Buku

Buku ini memuat tiga bagian penting, yaitu:

- (1) *Bagian pertama* mengungkap fakta yang akan menegaskan tentang pentingnya penyuluhan atau dalam rangka menjawab pertanyaan *Kenapa penyuluhan penting?* Bagian ini sekaligus menjadi latar belakang bagi penulisan buku ini dan menegaskan tentang posisi strategis penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian pada semua subsektor, yaitu pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan – pertanian dalam arti luas. Bagian ini memuat fakta tentang berbagai *kondisi yang tidak memuaskan* pada semua subsektor pertanian, perikanan dan kehutanan (antara lain tentang kerusakan sumber daya hutan yang terjadi secara masif di Indonesia, persoalan ketahanan dan keamanan pangan, konversi lahan pertanian yang terus berlanjut, dan kerusakan sumber daya laut dan perikanan).
- (2) *Bagian kedua* memuat berbagai teori dasar dalam penyuluhan pertanian, mulai dari pengertian atau *definisi penyuluhan, ruang lingkup, prinsip dan falsafah penyuluhan, prinsip pendidikan orang dewasa, komunikasi dalam penyuluhan, konsep inovasi/adopsi/difusi inovasi, metode penyuluhan, penyusunan program, evaluasi program, dan kelembagaan penyuluhan* – Lihat Gambar di bawah ini!
- (3) *Bagian ketiga* memuat tentang fakta-fakta terkait kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dikaji dalam perspektif konsep dan teori dasar penyuluhan. Atas dasar hasil kajian dan analisis kritis dengan menggunakan konsep dan teori dasar penyuluhan, maka diajukan opsi atau strategi peningkatan efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.



Gambar berikut memperlihatkan kerangka dalam penulisan buku ini, yang menunjukkan posisi dari setiap pokok bahasan atau bab-bab yang disajikan dan dibahas dalam buku ini. Penyuluhan sebagai proses *pendidikan non-formal* atau *proses pembelajaran* atau *proses komunikasi* digambar dengan keberadaan PENYULUH di satu sisi dan PETANI di sisi lain yang keduanya dihubungkan oleh arus komunikasi dua arah. Hubungan kedua pelaku utama dalam sistem penyuluhan ini memberikan gambaran tentang pentingnya kajian dan pembahasan tentang (1) Definisi penyuluhan; (2) Lingkup, falsafah dan prinsip penyuluhan, yang ditunjukkan oleh sistem agribisnis pada bagian atas dari gambar, yaitu *“substansi pesan-pesan yang disampaikan oleh penyuluh dalam proses penyuluhan atau isu dan persoalan pertanian yang diungkapkan oleh petani di sisi lain”*; (3) Karakteristik petani dan keluarganya sebagai orang dewasa, dan bagaimana prinsip pendidikan orang dewasa. Setelah memahami definisi penyuluhan, lingkup penyuluhan/falsafah/prinsip pendidikan orang dewasa, maka pembahasan berikutnya adalah (4) Komunikasi dalam penyuluhan, (5) Adopsi dan difusi inovasi, dan (6) Metode penyuluhan. Ketiga pokok bahasan ini menjadi pokok bahasan inti dalam ilmu penyuluhan untuk dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan secara yang efektif dan efisien. Penguasaan terhadap pokok-pokok teori penyuluhan, komunikasi, adopsi dan difusi inovasi menjadi dasar untuk kemudian mampu merumuskan program penyuluhan dan evaluasi program penyuluhan, sebagaimana disajikan pada Bab 10 dan Bab 11 dalam buku ini. Bagian akhir dari substansi ilmu penyuluhan adalah tentang peran kelembagaan penyuluhan dan pemuka pendapat atau *opion leaders*, dan ini menjadi pokok bahasan terakhir dalam ilmu penyuluhan.



Bab-bab setelah pokok-pokok ilmu penyuluhan sebagaimana diuraikan di atas adalah fakta dan hasil penelitian tentang pelaksanaan penyuluhan dalam kenyataannya, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di tempat lain, termasuk juga di Australia dan Thailand, yang pernah dilakukan oleh penulis dalam tiga dekade terakhir sebagaimana diuraikan dalam bagian berikut – sumber tulisan.

## Sumber Tulisan

Proses penulisan buku ini tidak mudah karena telah dimulai sejak tahun 1990an ketika penulis mulai mendapat tugas untuk mengasuh mata kuliah *Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian* yang kemudian berubah nama menjadi *Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian* seiring dengan perubahan kurikulum. Buku ini baru digarap secara serius di tahun 2019. File draf buku telah berpindah dari satu laptop ke laptop berikutnya sesuai dengan selesainya masa tugas sebuah laptop – karena rusak. Rentang waktu yang panjang dalam penyelesaian buku ini selain menjadi kelemahan, tetapi juga menjadi kekuatan karena akumulasi dari *ilmu, pengalaman dan pembelajaran* yang penulis peroleh dalam periode dan rentang waktu tersebut menjadi pelajaran berharga yang layak untuk ditulis dan di *share* dengan para pembaca.

Keterlibatan penulis dalam berbagai proyek kerjasama *penelitian, pengembangan masyarakat, pengembangan dan implementasi kebijakan* menjadi *ajang uji dan aplikasi teori dan konsep penyuluhan* yang ada, dan atas dasar itu maka dapat diajukan saran dan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya penyuluhan, dan khususnya penyuluhan pertanian dilakukan. Pengalaman dan lessons learned dari *penelitian-aksi kolaboratif multiyears* yang penulis lakukan bersama Tim Peneliti dari Australia, New Zealand, para peneliti dan praktisi kebijakan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, CIFOR, ICRAF, WWF, T4T, Treat of Life, dan lainnya menjadi sumber berharga dalam penulisan buku ini.

Penelitian-aksi yang dilakukan oleh penulis dari awal tahun 2000an hingga tahun 2022 meliputi antara lain tentang agroforestry, keuangan mikro, Flu Burung, Hog Colera, pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan pembangunan pedesaan di Malaysia dan Thailand menjadi arena riel penerapan konsep dan teori penyuluhan, sekaligus memberi pengalaman berharga kepada penulis untuk lebih memahami posisi strategis dan peran ***Penyuluhan sebagai Ilmu dan Seni*** dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan.

Kerja ilmuwan penyuluhan ternyata tidak saja dalam lingkup penyuluhan pertanian dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pertanian dalam arti luas. Bahkan, Ilmu Penyuluhan ternyata penting dan strategis dalam keseluruhan aspek dan bidang kegiatan serta sektor kehidupan. Sempat muncul keheranan pada beberapa pihak yang awam tentang Ilmu Penyuluhan sebagai sebuah ilmu dan seni dalam mendorong perubahan ketika suatu saat *Proposal Penelitian-Aksi* dalam penanganan Flu Burung lolos untuk didanai, tidak saja oleh satu lembaga pendanaan seperti ACIAR, tetapi juga oleh WHO. Keterlibatan penulis dalam riset-aksi ini memastikan bahwa upaya-upaya pengendalian penyakit bukan *an-sich* masalah dan persoalan teknis medis tentang penyakit, tetapi lebih kompleks dan salah satunya adalah persoalan perilaku masyarakat dan penerapan konsep

*biosecurity*. Di dalamnya ada permasalahan *pengetahuan, persepsi, sikap, motivasi, keterampilan, dan praktik atau tindakan* dari individu, kelompok, dan masyarakat, dan ini menjadi wilayahnya Ilmuwan Penyuluhan untuk memperjelas kenapa penyakit seperti Flu Burung dapat menjadi persoalan. Salah satu dari kegiatan penelitian ini adalah misalnya “*petani peternak akan cenderung menjual unggas atau ayamnya yang terindikasi sakit atau tertular*”. Perilaku ini bertentangan dengan anjuran untuk menerapkan inovasi sosial *biosecurity* dalam pengelolaan peternakan dan menghadapi penularan penyakit Flu Burung.

Tulisan terbaru tentang “*Analisis Rantai Nilai dan Penyuluhan*”, “*Penyuluhan dan Agribisnis*”, “*Penyuluhan dan Perubahan Iklim*”, dan “*Pendekatan Master TreeGrower dalam Penyuluhan*”, yang disajikan dalam bagian ketiga dari buku ini adalah pembelajaran berharga dari proyek-proyek penelitian-aksi kolaboratif yang dilakukan penulis dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, yang layak untuk ditulis dan dishare dalam buku ini. Semua tulisan dari hasil kegiatan riset-aksi kolaboratif ini kembali mempertegas bahwa *penyuluhan sebagai ilmu, konsep atau teori* memiliki posisi dan peran strategis dalam mendukung keberhasilan program-program pengembangan masyarakat, termasuk dalam pengentasan kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan atau lestari.

Program AIPD Rural yang dimotori oleh Ausaid, diawali dengan penelitian dengan menggunakan analisis rantai nilai (*value chain analysis*) dalam menentukan komoditas yang memiliki daya ungkit bagi pengentasan kemiskinan. Penelitian dengan menggunakan analisis rantai nilai tidak saja penting dalam *menentukan komoditas*, tetapi juga dalam *identifikasi proses-proses utama, aktor atau pelaku di sepanjang rantai nilai, gap pengetahuan/sikap/keterampilan/dan tindakan, kendala, peluang, dan alternatif intervensi*. Persoalan “*gap pengetahuan/sikap/keterampilan/dan tindakan*” adalah inti persoalan yang harus diselesaikan melalui kegiatan dan ilmu penyuluhan.

Keterlibatan penulis dalam beberapa proyek *riset-aksi kolaboratif multi-years* (internasional) seperti ACIAR Community-based

Commercial Forestry; ACIAR Kanoppi Phase 1 and 2; ACIAR for Ausaid AIPD-Rural; CSIRO – Climate Change; CaRED Programme - Community Resilience and Economic Development Programme - Pengembangan Beras Analog (Unram bersama UGM & Massey University – New Zealand); dan Proyek IFSCA bersama Massey University – New Zealand memberi pelajaran bahwa perbaikan *penghidupan petani kecil dan pengentasan kemiskinan* melalui *Pengembangan Agribisnis* tidak mungkin untuk mencapai tujuan dengan baik tanpa terjadinya adopsi inovasi secara luas oleh anggota sistem sosial – petani. Konsep **Kemitraan Bisnis** yang ditawarkan dalam proyek-proyek ini sebagai solusi mengatasi persoalan teknis *budidaya, produksi, dan pemasaran* tidak dapat diwujudkan atau diterapkan tanpa terjadinya adopsi dan difusi inovasi sosial dan inovasi teknis. Sebuah kemitraan bisnis akan dapat berjalan ketika petani atau kelompok tani mampu untuk memproduksi suatu komoditas dalam *jumlah yang cukup dan layak, dengan kualitas yang sesuai standar industri, dan dapat diproduksi secara berkesinambungan, serta dengan kesepakatan harga yang sesuai*. Semua syarat bagi berlangsungnya kemitraan bisnis ini mengharuskan terlibatnya praktisi dan ilmuwan penyuluhan untuk mendukung bagi terjadinya adopsi dan difusi inovasi sosial dan inovasi teknis oleh petani dan masyarakat.

Persoalan atau isu yang mengemuka tentang *Pertambangan Emas Tanpa Ijin* (PETI) yang juga penulis terlibat di dalam proses fasilitasi pengembangan *Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri* (RAD-PPM) di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, atas dukungan UNDP, menjadi pengalaman lain yang mempertegas tentang posisi strategis Ilmu Penyuluhan dalam menghadapi berbagai isu pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

Buku ini disusun juga berdasarkan sejumlah buku referensi utama bidang ilmu penyuluhan, antara lain dari hasil karya Rogers berjudul *“Diffusion of Innovations”* (1983, Edisi ke 3), Van den Ban dan Hawkins berjudul *“Agricultural Extension”* (1996, Edisi ke 2),

Hawkins, Dunn, and Carry berjudul “*Agricultural and Livestock Extension*”.vol.2 “*The Extension Process*” (1982, Australian Universities’ International Development Program – AUIDP, 1982), Kirpatrick berjudul “*Evaluating Training Programs*” (1998, Edisi ke 2), Burns berjudul “*The Adult Learner at Work*” (1995), Klat berjudul “*The Ultimate Training Workshop Handbook*” (1999), dan buku karya Justice and Jamieson berjudul “*The Facilitator’s Field Dook*” (1999).

Sejalan dengan arah pengembangan proses pembelajaran di perguruan tinggi – *Project and Case-based learning*, Ilustrasi dan pembahasan dalam buku ini diperkaya melalui penggunaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan dalam bidang penyuluhan dan pengembangan masyarakat, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Penelitian kerjasama yang mendapat dukungan dana dari ACIAR, MFP-DFID, WHO, The Nippon Foundation, NZ Aid, CSIRO, DP2M Dikti, dan lainnya memperkaya ilustrasi dan pembahasan dalam buku ini. Lessons learned dari *penelitian-aksi-tahun ganda (multi-years action-research)* dalam bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat yang terakumulasi dalam 20an tahun terakhir, termasuk kegiatan penelitian yang dilakukan di Malaysia dan Thailand yang didukung oleh The Nippon Foundation memperkaya pembahasan dan uraian dalam buku ini.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan penulis, baik sebagai penelitian individual maupun kerjasama dengan tim peneliti antara lain (1) *A Longitudinal Study of Group Roles in Indonesian Rural Development: An Analysis of Policy Formulation, Implementation and Learning Outcomes* (Muktasam & Chamala, 2000); (2) *A Study of Rural Development in Two Asian Countries: A Benchmarking Process for Best Practices*; (3) *Perubahan Struktur Organisasi Industri Pedesaan : Studi di Desa Banyumulek Lombok Barat – NTB* (Nurjannah, 2004), dan (4) *Sistem Nilai yang Mempengaruhi Perilaku dan Interaksi Masyarakat dengan Hutan: Studi Kasus di Tiga Desa Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara - Kabupaten Lombok Tengah – NTB* (Muktasam dan Nurjannah, 2004). (5) *Analisis Kritis atas Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber daya Alam: Studi Kasus pada Tiga Desa di Pulau Lombok* (Muktasam dan

Nurjannah, 2006), (6) Kajian Kritis terhadap Kemiskinan di Lombok Barat (Muktasam dan Nurjannah, 2009), dan (7) Kajian Kritis terhadap Kemiskinan di Pulau Lombok (Muktasam dan Nurjannah, 2011).

Penelitian lain yang dilakukan oleh penulis dalam 10 tahun terakhir antara lain “Analisis Kritis Peran Kelompok Tani Ternak dalam Pembangunan Pedesaan: Studi Kasus Pada Dua Kelompok Tani Ternak Di Pulau Lombok – Nusa Tenggara Barat” (PNBP 2015), “Analisis Peran dan Kapasitas Kelompok Tani Ternak dalam Mendukung Penciptaan Nilai Tambah Produk Peternakan di Pulau Lombok: Aplikasi Pendekatan Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat” (MP3EI, 2012/2014), dan “Development of Timber and Non-timber Forest Products’ Production and Market Strategies for Improvement of Smallholders’ Livelihoods in Indonesia” (ACIAR Project Number FST/2012/039, tahun 2013 - 2016); Smallholder Livelihood Improvement through Small Scale Functional Analog Rice Food-Base Processing Enterprise: An Action-Research Approach to Smallholder Agribusiness and Food Processing Industrial Development in East Lombok – West Nusa Tenggara Province (Perbaikan Penghidupan Petani melalui Usaha Pengolahan Pangan Skala Kecil - Beras Analog Fungsional), pada NZ & UGM Community Resilience and Economic Development (CaRED) Programme July 2016 – June 2019; Melakukan riset aksi pada proyek “*Innovative Farm Systems and Capability for Agribusiness (IFSCA) Project*”, a Collaborative Action-Research between Massey University – New Zealand & The University of Mataram, July 2015 – December 2020; Mendukung “Landscape-Lifescape Analysis (LLA) untuk Desain, Kepatuhan, dan Implementasi Proyek (Laporan Penelitian) yang Dibuat Sebagai Bagian dari Proyek “Pemanfaatan Berkelanjutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang berjudul “Pembangunan Ekonomi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Lanskap Gunung Rinjani Lombok”, yang didukung oleh *Millennium Challenge Account-Indonesia - Green Prosperity Project, dengan Tema “Community-Based Natural Resources Management (CBNRM)”*. Kerjasama Antara

Yayasan WWF Indonesia *dengan* Koperasi Maju Bersama – Santong, Kabupaten Lombok Utara & Koperasi Serba Usaha Mele Maju – Lantan, Kabupaten Lombok Tengah, Desember 2016.

Penelitian terbaru yang dilakukan antara lain adalah “*Enhancing Community-Based Commercial Forestry in Indonesia*”, ACIAR Projects No. FST/2015/040 (1 July 2016 – 30 Juni 2021) – penelitian kerjasama antara Fakultas Pertanian Unram dengan beberapa lembaga penelitian lainnya seperti P3SEKPI Bogor, dan Pusat Penelitian Kehutanan Makassar. Penelitian yang saat ini masih berlangsung adalah “*Developing and promoting market-based agroforestry options and integrated landscape management for smallholder forestry in Indonesia*” yang pendanaannya dari ACIAR Projects No. FST/2016/14 (1 July 2016 – 30 December 2021) – kerjasama antara LPPM Unram dengan CIFOR, ICRAF, dan lembaga penelitian kehutanan atau P3SEKPI - Bogor. Penelitian lain yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah (1) *Studi Kritis Adopsi Inovasi Hortikultura oleh Petani Peserta Program IFSCA di Kabupaten Lombok Utara* (2020); (2) *Studi Preferensi Petani Hortikultura terhadap Sistem Penyuluhan Pertanian pada Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara* (2021); dan (3) *Critical Studies on the Socio Economic and Environmental Impacts of Lamtoro-Based Agrosilvopasture for Drylot System in Dompu Districts – West Nusa Tenggara, Indonesia* - 2021.

\*\*\*



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>viii</b>
<b>LINGKUP ISI BUKU DAN SUMBER TULISAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxvii</b>
<b><i>BAGIAN I: FAKTA dan TANTANGAN.....</i></b>	<b>1</b>
<b>1. PERTANIAN: ANTARA FAKTA, CITA-CITA, DAN TANTANGAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. PENGANTAR.....	1
1.2. PERTANIAN TANAMAN PANGAN .....	3
1.3. PERIKANAN DAN KELAUTAN .....	6
1.4. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN .....	9
1.5. PETERNAKAN.....	19
1.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN LAINNYA .....	22
1.7. PENYULUHAN PENTING .....	26
1.8. RINGKASAN .....	27
<b>2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: DEFINISI DAN STRATEGI .....</b>	<b>28</b>
2.1. PENGANTAR.....	28
2.2. PEMBERDAYAAN: PENGERTIAN .....	28
2.3. STRATEGI PEMBERDAYAAN.....	31
2.4. KEGAGALAN DALAM PEMBERDAYAAN .....	33
2.5. MODAL DALAM PEMBERDAYAAN .....	35
2.6. PERAN MODAL DALAM PEMBERDAYAAN.....	43
2.7. RINGKASAN .....	46

<b>BAGIAN II: TEORI DASAR PENYULUHAN.....</b>	<b>48</b>
<b>3. PENYULUHAN PERTANIAN: DEFINISI DAN IMPLIKASINYA.....</b>	<b>49</b>
3.1. PENGANTAR.....	49
3.2. DEFINISI PENYULUHAN.....	50
3.3. PROSES PENYULUHAN.....	52
3.4. TUJUAN PENYULUHAN .....	56
3.5. PELAKSANA DAN SASARAN PENYULUHAN .....	58
3.6. RINGKASAN .....	59
<b>4. LINGKUP, FALSAFAH DAN PRINSIP-PRINSIP PENYULUHAN.....</b>	<b>60</b>
4.1. PENGANTAR.....	60
4.2. LINGKUP PENYULUHAN.....	60
4.3. FALSAFAH PENYULUHAN .....	65
4.4. ASAS PENYULUHAN .....	68
4.5. PRINSIP PENYULUHAN .....	70
4.6. RINGKASAN .....	70
<b>5. PRINSIP PENDIDIKAN ORANG DEWASA .....</b>	<b>72</b>
5.1. PENGANTAR.....	72
5.2. BELAJAR, MENGAJAR DAN FASILITASI.....	73
5.3. ANDRAGOGI DAN PEDAGOGI.....	74
5.4. PRINSIP BELAJAR ORANG DEWASA DAN IMPLIKASINYA .....	75
5.5. PENDEKATAN-PENDEKATAN POKOK DALAM PEMBELAJARAN ORANG DEWASA.....	81
5.6. METODE-METODE PEMBELAJARAN ORANG DEWASA .....	83
5.7. RINGKASAN .....	85
<b>6. TEORI-TEORI DASAR PENYULUHAN.....</b>	<b>86</b>
6.1. PENGANTAR.....	86
6.2. KONSEP PERSEPSI.....	86
6.3. SIKAP DAN PENDEKATAN DALAM SIKAP .....	88
6.4. ORIENTASI NILAI BUDAYA DAN TINDAKAN SOSIAL .....	90
6.5. KAITAN ANTARA SISTEM NILAI DAN PERILAKU INTERAKSI MANUSIA .....	91

6.6. RINGKASAN .....	103
<b>7. KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN .....</b>	<b>105</b>
7.1. PENGANTAR .....	105
7.2. DEFINISI DAN TUJUAN KOMUNIKASI.....	105
7.3. TINGKATAN KOMUNIKASI.....	110
7.4. MODEL-MODEL DAN UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI.....	113
7.5. EFEKTIFITAS KOMUNIKASI .....	128
7.6. RINGKASAN .....	130
<b>8. ADOPSI DAN DIFUSI INOVASI.....</b>	<b>132</b>
8.1. PENGANTAR .....	132
8.2. INOVASI.....	133
8.3. ADOPSI INOVASI .....	134
8.4. TEORI KEPUTUSAN INOVASI.....	136
8.5. KATEGORI ADOPTER .....	138
8.6. DIFUSI INOVASI .....	140
8.7. TELAAH KRITIS STRATEGI ADOPSI DAN DIFUSI AGROFORESTRY.....	143
8.8. RINGKASAN .....	164
<b>9. METODE PENYULUHAN.....</b>	<b>166</b>
9.1. PENGANTAR .....	166
9.2. METODE DAN PENGGOLONGAN METODE PENYULUHAN.....	167
9.3. METODE PENYULUHAN, TUJUAN PENYULUHAN DAN PROSES ADOPSI.....	174
9.4. PERTIMBANGAN DALAM PEMILIHAN METODE PENYULUHAN.....	176
9.5. FAKTA DAN TANTANGAN DALAM PENDEKATAN KELOMPOK .....	179
9.6. RINGKASAN .....	193
<b>10.PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN.....</b>	<b>195</b>
10.1.PENGANTAR.....	195
10.2.PENGERTIAN PROGRAM.....	195
10.3.PENGEMBANGAN PROGRAM.....	197
10.4.IMPLEMENTASI DAN KINERJA PROGRAM .....	207
10.5.PARTISIPASI DALAM PENGEMBANGAN & IMPLEMENTASI PROGRAM	

10.6.RINGKASAN .....	214
<b>11.EVALUASI PROGRAM PENYULUHAN .....</b>	<b>215</b>
11.1.PENGANTAR .....	215
11.2.PENGERTIAN EVALUASI .....	215
11.3.JENIS DAN TUJUAN EVALUASI .....	216
11.4.BEBERAPA KONSEP PENTING DALAM EVALUASI .....	218
11.5.PELAKSANA EVALUASI .....	222
11.6.TOP DAN MODEL LOGIC DALAM EVALUASI.....	224
11.7.BIAS DAN RANCANGAN EVALUASI.....	227
11.8.VARIABEL, INDIKATOR, DAN PENGUKURAN DALAM EVALUASI .....	241
11.9.CONTOH INSTRUMEN EVALUASI PROGRAM PENYULUHAN .....	253
11.10. RINGKASAN .....	255
<b>12.KELEMBAGAAN PENYULUHAN DALAM SISTEM PENYULUHAN.....</b>	<b>256</b>
12.1.PENGANTAR.....	256
12.2.PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN .....	256
12.3.KELEMBAGAAN PENYULUHAN MENURUT PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	260
12.4.KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN.....	265
12.5.PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN .....	266
12.6.RINGKASAN .....	267
<b>13.KETRAMPILAN YANG DIBUTUHKAN OLEH PENYULUH.....</b>	<b>268</b>
13.1.PENGANTAR.....	268
13.2.PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MERANCANG PROSES .....	269
13.3.FASILITASI PERKENALAN.....	271
13.4.FASILITASI PENJELASAN TUJUAN, PROSES DAN OUTPUT .....	273
13.5.FASILITASI KONTRAK BELAJAR .....	274
13.6.FASILITASI CURAH PENDAPAT.....	277
13.7.FASILITASI DALAM MEMIMPIN DISKUSI .....	279
13.8.KETERAMPILAN LAIN YANG RELEVAN.....	280
13.9.RINGKASAN .....	286

**BAGIAN III: PENYULUHAN dalam PRAKTIK ..... 287**

**14. ANALISIS RANTAI NILAI: PENGEMBANGAN PROGRAM PENYULUHAN & AGRIBISNIS ..... 287**

14.1. PENGANTAR .....	287
14.2. KONSEP RANTAI NILAI.....	288
14.3. MANFAAT DAN KEGUNAAN ANALISIS RANTAI NILAI.....	292
14.4. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS.....	296
14.5. RANTAI NILAI HASIL HUTAN KAYU: ILUSTRASI KEGUNAAN ANALISIS RANTAI NILAI BAGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS.....	307
14.6. RENCANA BISNIS.....	324
14.7. KEMITRAAN BISNIS .....	326
14.8. RINGKASAN .....	336

**15. PENYULUHAN DALAM ERA PERUBAHAN IKLIM ..... 337**

15.1. PENGANTAR .....	337
15.2. PERUBAHAN IKLIM DAN PERTANIAN .....	339
15.3. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERTANIAN DAN PESISIR .....	341
15.4. INFORMASI IKLIM DAN TINDAKAN ADAPTASI .....	342
15.5. KOMUNIKASI DAN DISSEMINASI INFORMASI IKLIM.....	343
15.6. SISTEM PENYULUHAN DAN PERUBAHAN IKLIM.....	345
15.7. PERSEPSI, SIKAP, DAN TINDAKAN ADAPTASI PETANI .....	347
15.8. RINGKASAN .....	348

**16. PENYULUHAN PERTANIAN DAN PENINGKATAN EKONOMI PETANI MELALUI AGRIBISNIS..... 350**

16.1. PENGANTAR .....	350
16.2. BEBERAPA INISIATIF PENINGKATAN EKONOMI PETANI MELALUI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS.....	351
16.3. PENDEKATAN ANALISIS RANTAI NILAI DALAM PROYEK AGRIBISNIS.....	356
16.4. POSISI DAN PERAN PENYULUHAN DALAM SISTEM AGRIBISNIS.....	360
16.5. KASUS GAGAL PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BAGI PENINGKATAN EKONOMI PETANI .....	364
16.6. RINGKASAN .....	368

<b>17.PENDEKATAN MASTER TREEGROWER DALAM PENYULUHAN KEHUTANAN .....</b>	<b>369</b>
17.1.PENGANTAR .....	369
17.2.PENDEKATAN MASTER TREEGROWER: PENGERTIAN, MODEL KONSEPTUAL, & PELAKSANAANNYA .....	370
17.3.PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN MASTER TREEGROWER .....	378
17.4.HASIL EVALUASI PENDEKATAN MTG DI INDONESIA.....	380
17.5.ADOPSI PENDEKATAN MTG OLEH SEKTOR LAINNYA.....	407
17.6.PENDEKATAN FARMERS TO FARMERS MENTORING: KOMPLEMENTER.....	407
17.7.PELAJARAN YANG DIPETIK DARI PENDEKATAN MTG DAN F2FM .....	409
17.8.RINGKASAN .....	410
<b>18.JALAN MENUJU PROFESIONALISASI PENYULUHAN PERTANIAN .....</b>	<b>411</b>
18.1.PENGANTAR .....	411
18.2.DINAMIKA SISTIM PENYULUHAN.....	413
18.3.PENYULUHAN DI PERSIMPANGAN JALAN .....	415
18.4.TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN REFLEKSI DUNIA PENYULUHAN.....	416
18.5.PERMASALAHAN PENYULUHAN .....	420
18.6.MENUJU PROFESIONALISME PENYULUHAN .....	424
18.7.RINGKASAN .....	427
<b>19.PENUTUP.....</b>	<b>429</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>431</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>442</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>445</b>
<b>SINOPSIS .....</b>	<b>447</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Permasalahan yang Dihadapi Petani Rumput Laut.....	8
Tabel 1.2.	Permasalahan Sistem Agribisnis Peternakan Sapi di Kabupaten Dompu .....	21
Tabel 2.1.	Pendapat Para Ahli tentang Strategi Pemberdayaan.....	33
Tabel 2.2.	Entitas Modal Sosial di Desa Sapit – Kecamatan Suela, Lombok Timur .....	41
Tabel 2.3.	Entitas Modal Sosial di Desa Ekas Buana – Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.....	42
Tabel 4.1.	Lingkup Penyuluhan dalam Subsektor Kehutanan.....	62
Tabel 5.1.	Perbedaan Pedagogi dan Andragogi .....	75
Tabel 5.2.	Kondisi Belajar Orang Dewasa dan Implikasinya bagi Penyuluhan ....	81
Tabel 6.1.	Sistem Nilai yang Melandasi Interaksi Masyarakat dengan Hutan .....	95
Tabel 6.2.	Upacara Bebangar – Ritual saat Membuka Hutan.....	99
Tabel 6.3.	Acara Bao Daya – Ritual di Mata Air.....	100
Tabel 9.1.	Metode Penyuluhan menurut Jumlah Sasarannya .....	169
Tabel 9.2.	Strategi dan Metode untuk Mencapai Tujuan Penyuluhan.....	176
Tabel 10.1.	Contoh Rencana Operasional Penyuluhan.....	205
Tabel 10.2.	Tahapan Pengembangan dan Implementasi Program Penyuluhan (FAO).....	206
Tabel 10.3.	Kisah Sukses Pengembangan Masyarakat.....	211
Tabel 11.1.	Pelaksana Evaluasi – Kelebihan dan Kekurangannya .....	222
Tabel 11.2.	Pengukuran Reaksi pada Program Penyuluhan .....	244
Tabel 11.3.	Pengukuran Pembelajaran pada Program Penyuluhan .....	246
Tabel 11.4.	Pertanyaan Kunci FGD dan Wawancara Mendalam (CBCF, 2021) ..	254
Tabel 14.1.	Tantangan & Peluang Implementasi Model Bisnis Kayu/HHBK di Sumbawa.....	306
Tabel 14.2.	Jenis Kayu Penting yang Diidentifikasi untuk Desa Batudulang dan Pelat .....	307
Tabel 14.3.	Analisis Marjin Laba Kayu Bukan Jati di Batudulang - Sumbawa....	310
Tabel 14.4.	Analisis Marjin Laba Jati - Kasus Pedagang Kayu di Sumbawa.....	313
Tabel 14.5.	Hambatan dan Alternatif Intervensi untuk Meningkatkan Kinerja Rantai Nilai Kayu .....	319
Tabel 14.6.	Kendala dan Alternatif Intervensi untuk Meningkatkan Rantai Nilai Kayu.....	320
Tabel 14.7.	Matriks Deskripsi Rencana Bisnis Usaha tani Kayu Jati.....	325
Tabel 14.8.	Analisa Kelayakan Usaha Tanaman Jati.....	326
Tabel 16.1.	Kendala dan Solusi pada Rantai Nilai Jagung di NTB & Jawa Timur	360
Tabel 17.1.	Rancangan Isi dan Kegiatan Pelatihan MTG.....	371

Tabel 17.2.	Lokasi dan Jumlah Peserta Pelatihan MTG Periode 2018-2020 .....	375
Tabel 17.3.	Usia Peserta Pelatihan MTG – Rata-rata dan Kisaran Umur.....	377
Tabel 17.4.	Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan karena Pelatihan MTG (%).....	382
Tabel 17.5.	Persepsi Peserta tentang Nilai Pelatihan MTG (N=298) .....	387
Tabel 17.6.	Perubahan <i>Praktik Usaha tani</i> Peserta & Non-peserta Pelatihan MTG.....	390
Tabel 17.7.	Perubahan <i>Praktik Usaha tani</i> Peserta Pelatihan MTG – Jepitu .....	391
Tabel 17.8.	Perubahan <i>Praktik Usaha tani</i> Peserta Pelatihan MTG – Benjala.....	393
Tabel 17.9.	Perubahan <i>Praktik Usaha tani</i> Peserta Pelatihan MTG - Sidomulyo & Duren Sawit .....	395
Tabel 17.10.	Perubahan <i>Praktik Usaha tani</i> Peserta Pelatihan MTG - Rumbia.....	398
Tabel 17.11.	Perubahan <i>Praktik Usaha tani</i> Peserta Pelatihan MTG – Rumbia Boalemo .....	399
Tabel 17.12.	Perubahan <i>Praktik Usaha tani</i> Peserta Pelatihan MTG –Malleleng...	401
Tabel 17.13.	Perubahan <i>Praktik Usaha tani</i> Peserta pelatihan MTG– Desa Budi Lestari. ....	403
Tabel 17.14.	Pembelajaran dari Pendekatan MTG dan F2FM .....	409
Tabel 18.1.	Permasalahan Penyuluhan Pertanian .....	421



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kondisi Sumber daya Pertanian: Antara Fakta dan Harapan .....	4
Gambar 1.2.	Kondisi Sumber daya Perikan: Antara Fakta dan Harapan .....	7
Gambar 1.3.	Kondisi Sumber daya Hutan: Antara Fakta dan Harapan.....	11
Gambar 1.4.	Kondisi Sumber daya Hutan: Fakta yang Mencemaskan .....	18
Gambar 1.5.	Peran Penyuluhan dalam Mencapai Visi Pembangunan .....	19
Gambar 1.6.	Kondisi Sumber daya Peternakan: Antara Fakta dan Harapan.....	20
Gambar 1.7.	Pendekatan dalam Pembangunan – Paralel, Top-down & Disintegrated.....	22
Gambar 2.1.	Modal dalam Mencapai Visi Pengembangan Masyarakat.....	36
Gambar 2.2.	Pengelolaan Modal bagi Pengembangan Masyarakat .....	44
Gambar 2.3.	Ketersediaan & Kualitas Modal - Petani Singkong, Jagung, Lebui & Rumput Laut.....	46
Gambar 3.1.	Komponen dalam Sistem Penyuluhan.....	52
Gambar 3.2.	Tingkatan Tujuan Penyuluhan.....	58
Gambar 4.1.	Lingkup Penyuluhan dalam Sistem Agribisnis.....	64
Gambar 6.1.	Ilustrasi tentang Persepsi .....	88
Gambar 7.1.	Role Play – Pentingnya Komunikasi .....	107
Gambar 7.2.	Tujuan Komunikasi ( <i>Informasi, Persuasi &amp; Hiburan</i> ).....	108
Gambar 7.3.	Persepsi tentang “Model” .....	114
Gambar 7.4.	Model Komunikasi Intrapersonal .....	115
Gambar 7.5.	Model Komunikasi Interpersonal .....	119
Gambar 7.6.	Model Komunikasi Kelompok .....	122
Gambar 7.7.	Model Komunikasi Dua Tahap (Two-step Flow Model) .....	125
Gambar 7.8.	Model Komunikasi Lintas Budaya .....	128
Gambar 7.9.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Komunikasi.....	129
Gambar 8.1.	Model Teori Keputusan Inovasi .....	138
Gambar 8.2.	Kategori Adopter .....	140
Gambar 8.3.	Difusi Inovasi.....	142
Gambar 8.4.	Kurva Difusi Inovasi.....	143
Gambar 8.5.	Interaksi Lima Komponen Utama dalam Sebuah Agroforestry .....	149
Gambar 8.6.	Model Keputusan Inovasi .....	156
Gambar 9.1.	Hubungan Metode Penyuluhan dengan Tahapan Adopsi.....	176
Gambar 9.2.	Posisi Modal Sosial diantara Lima Asset Pengelolaan HKm & HHBK .....	189
Gambar 9.3.	Peran Kelompok dalam Penyuluhan.....	191
Gambar 10.1.	Pengembangan dan Implementasi Program.....	199
Gambar 10.2.	Pohon Masalah.....	202
Gambar 10.3.	Pohon Tujuan.....	203
Gambar 10.4.	TOP Model Pengembangan dan Implementasi Program.....	209

Gambar 11.1.	TOP dalam Evaluasi Program Penyuluhan.....	219
Gambar 11.2.	TOP dalam Evaluasi Program Penyuluhan.....	227
Gambar 11.3.	Rancangan <i>One-shot Case Study</i> .....	233
Gambar 11.4.	Rancangan <i>Pre-test Post-Test One Group</i> .....	235
Gambar 11.5.	Rancangan <i>Two Group Comparison</i> .....	236
Gambar 11.6.	Rancangan <i>Two Group Comparison Pre-test Post-test</i> .....	237
Gambar 11.7.	Rancangan <i>Four Group Comparison</i> .....	239
Gambar 11.8.	Rancangan <i>Time Series</i> .....	241
Gambar 11.9.	Logic Model & Targetted Outcomes Project (TOP) Model.....	243
Gambar 11.10.	Tingkatan Pengetahuan -Taksonomi Bloom .....	247
Gambar 12.1.	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian .....	260
Gambar 14.1.	Model Konseptual & Analisis Rantai Nilai Beras Analog di Lombok Timur.....	291
Gambar 14.2.	Rantai Nilai Rumput Laut di Sumba Timur .....	294
Gambar 14.3.	Rantai Nilai Kemiri.....	296
Gambar 14.4.	Model Komunikasi Interpersonal (Berlo's SMCR Model).....	302
Gambar 14.5.	Rantai Pemasaran Jenis Kayu yang Dijual di Sumbawa - Batudulang.....	309
Gambar 14.6.	Rantai Pemasaran Jati di Pelat.....	311
Gambar 15.1.	Iklim menjadi bagian dari Modal Sumber daya Alam.....	340
Gambar 15.2.	Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Ruang Perubahan Iklim.....	346
Gambar 16.1.	Fungsi Pendapatan dalam Agribisnis Sapi pada Proyek IFSCA di Dompu .....	354
Gambar 16.2.	Model Konseptual Proyek Agribisnis Proyek IFSCA di Dompu .....	355
Gambar 16.3.	Rantai Nilai Jagung di NTB dan Jawa Timur.....	359
Gambar 16.4.	Posisi dan Peran Penyuluhan dalam Fasilitasi Kemitraan Bisnis Pertanian .....	363
Gambar 16.5.	Fasilitasi Kemitraan Bisnis Pertanian – Beras Analog Fungsional.....	367
Gambar 17.1.	Model Pelaksanaan Evaluasi MTG .....	380
Gambar 17.2.	Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan .....	382
Gambar 17.3.	Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan - Peluang Pasar383	
Gambar 17.4.	Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan - Pengukuran Pohon.....	383
Gambar 17.5.	Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan - Pemilihan Jenis Pohon.....	384
Gambar 17.6.	Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan - Penanaman Pohon.....	384
Gambar 17.7.	Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan - Pengelolaan Pohon.....	385

Gambar 17.8. Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan – Pemanenan/Pemasaran .....	385
Gambar 17.9. Perubahan Praktik yang Akan Dilakukan setelah Pelatihan MTG .....	386
Gambar 17.10. Persepsi Peserta terhadap Nilai Pelatihan MTG di Semua Lokasi .....	387
Gambar 17.11. Persepsi Peserta tentang Nilai Pelatihan MTG untuk Diri Mereka Sendiri.....	388
Gambar 17.12. Persepsi Peserta tentang Nilai Pelatihan MTG bagi Peserta Lain 388	
Gambar 17.13. Persepsi Peserta tentang Nilai Pelatihan MTG bagi Masyarakat Lain .....	389
Gambar 18.1. Dinamika Sistim Penyuluhan di Indonesia.....	414



# BAGIAN I FAKTA DAN TANTANGAN

## 1. PERTANIAN: ANTARA FAKTA, CITA-CITA, DAN TANTANGAN

### 1.1. Pengantar

Pertanian masih dan akan tetap menjadi sektor penting bagi perekonomian suatu masyarakat, desa, kota, negara, dan bangsa-bangsa di dunia (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021; FAO, 2022). Betapa tidak, tanpa pertanian maka manusia akan berhadapan dengan krisis pangan, dan bahkan kepunahan, karena pangan yang menjadi kebutuhan dasar manusia dihasilkan melalui proses produksi pertanian. Tanpa pertanian, maka kebutuhan akan pangan dan gizi tidak akan dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pertanian dalam arti luas masih tetap menjadi sektor penting dalam perekonomian dan bahkan kehidupan manusia – pertanian dalam arti luas yang mencakup sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian tanaman pangan menghasilkan tanaman pangan seperti biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, gandum dan lainnya, dan juga menghasilkan sayur dan buah - hortikultura; sektor perikanan dan peternakan menghasilkan produk perikanan dan peternakan – guna untuk memenuhi kebutuhan akan protein, dan sektor perkebunan serta kehutanan akan menghasilkan produk buah-buahan dan hasil hutan yang menjadi kebutuhan manusia seperti kopi, kakao, kemiri, madu, dan lainnya.

Sejalan dengan posisi penting dan strategisnya sektor pertanian tersebut, maka penyuluhan sebagai profesi dan ilmu juga tetap memiliki peran penting dan strategis yang tidak dapat diabaikan. Tanpa penyuluhan, maka upaya-upaya pengembangan pertanian kearah

pertanian berkelanjutan dan berdaya saing tidak akan dapat diwujudkan. Menyadari posisi dan peran penyuluhan dalam rangka menjaga keberlanjutan sektor pertanian, tidaklah keliru ketika ada pakar yang menyatakan bahwa penyuluhan adalah organisasi dan profesi masa depan (Miller, 1993; Patton, 1993). Sementara itu, para pakar lain sepakat tentang perubahan arah penyuluhan pertanian sejalan dengan perkembangan pertanian, ilmu dan teknologi serta perubahan teknologi komunikasi dan informasi, dan perubahan iklim (Van den Ban & Samanta, 2006; Kamal, et al., 2022; Fan, Ge, & Niu, 2022; Ozkan, Dube, & Reed, 2022).

Bab ini menyajikan sejumlah fakta sekaligus tantangan serta keyakinan bahwa kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan yang ada saat ini, dan yang diharapkan di masa yang akan datang tidak terlepas dari peran dan keterlibatan penyuluhan sebagai profesi dan sebagai ilmu. Walau sebagian orang yang awam terhadap eksistensi dan peran penyuluhan menyatakan bahwa “penyuluhan sudah tidak diperlukan, karena petani sudah pintar dan mampu untuk mencari informasi sendiri”, uraian dalam bab ini memberi gambaran bahwa penyuluhan bukan sekedar memberi informasi kepada petani, tetapi lebih dari itu bagaimana memfasilitasi kerjasama antara petani dengan para pihak dalam rangka peningkatan produktivitas melalui pengelolaan sumber daya yang bijaksana, lestari, dan menguntungkan semua pihak. Petani sebagai individu atau perorangan boleh saja memiliki kemampuan untuk mencari informasi, tetapi di sisi lain, lembaga penyuluhan atau pelayanan atau pemerintah hendaknya mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan petani, tidak saja bagi petani perorangan tetapi petani dalam entitas kelompok dan kelembagaannya. Persoalan dalam pengelolaan barang publik atau *public-goods* adalah persoalan lain yang mengharuskan profesi dan ilmu penyuluhan pertanian memainkan peran penting dan strategisnya. Ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan pada bab ini dimaksudkan untuk menggugah kesadaran tentang peran penyuluhan dalam merubah perilaku bermasalah – kekurangan wawasan dan pengetahuan, rendahnya keterampilan, dan tidak yang tidak positif, yang kemudian

dapat merubah tindakan dan praktik orang-orang, yang pada akhirnya mampu membawa setiap orang dan atau kelompok orang kepada kondisi yang lebih baik dan yang diharapkan (kehidupan yang lebih baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan).

Selain itu, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi komunikasi, definisi dan lingkup penyuluhan ditantang untuk melakukan perubahan. Jika selama ini penyuluhan dipersepsikan sebagai pihak atau lembaga atau orang-orang yang melakukan pelayanan penyuluhan kepada para petani biasa atau awam, maka redefinisi penyuluhan diperlukan karena sesungguhnya penyuluh dan penyuluhan mengalami transisi dan transformasi petani karena perannya sebagai fasilitator, konsultan, dan penyedia jasa yang dibutuhkan tidak saja oleh petani secara perorangan, tetapi juga petani sebagai kelompok dalam bentuk korporasi usaha tani, dan bahkan industri-industri pertanian komersial. Tenaga-tenaga teknis dan lapangan pada industri perunggasan, perikanan, peternakan, dan lainnya adalah para penyuluhan yang telah keluar dari makna penyuluhan konvensional (Madan & Mare dia, 2021; Rivera & Schram, 2022)

## **1.2. Pertanian Tanaman Pangan**

Gambar 1.1 berikut menunjukkan dua sisi dari sektor pertanian tanaman pangan yang dihadapi. Kondisi pertama adalah kondisi yang mencemaskan dan menghawatirkan semua pihak, tidak saja manusia sebagai individu, tetapi juga sebagai masyarakat dan bangsa. Kondisi ini antara lain terkait dengan degradasi sumber daya alam, sumber daya pertanian, dan konversi lahan pertanian. Lahan-lahan pertanian mengalami penurunan, tidak saja dalam hal jumlah dan ketersediaannya, tetapi juga dalam hal kualitasnya. Lahan-lahan produktif semakin berkurang karena berkurang dan hilangnya mata air sebagai akibat dari rusaknya sumber daya hutan. Lahan-lahan produktif juga berkurang karena beralihnya penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan pembangunan infrastruktur (Viana, Freire, Abrantes, Rocha, & Pereira, 2022)

Bagian kedua dari Gambar 1.1 adalah gambaran tentang kondisi pertanian yang ideal, yang seharusnya dapat diwujudkan melalui berbagai program pembangunan, termasuk dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan global atau Sustainable Development Goals (SDGs), yang salah satunya adalah “Zero Hunger” atau “Kelaparan Nol” - SDG no.2 (Viana, Freire, Abrantes, Rocha, & Pereira, 2022). Pertanian yang ideal yang diharapkan adalah pertanian yang produktif, unggul dan lestari, yang mendukung bagi tercapainya swasembada, kecukupan, dan keamanan pangan dalam berbagai proses produksi primernya – pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, hortikultura, dan lainnya.



Gambar 1.1. Kondisi Sumber daya Pertanian: Antara Fakta dan Harapan

Pertanyaan kritis yang muncul dari membandingkan kedua keadaan ini adalah: (1) Kenapa kondisi yang tidak memuaskan ini terjadi? Kenapa ada gap antara fakta dengan cita-cita? Apa sesungguhnya yang terjadi? Apa yang harus dilakukan agar kondisi ideal dapat diwujudkan?

Jawaban atas semua pertanyaan ini akan membawa pembaca pada pemikiran tentang perlunya pendekatan multidimensi dalam mengatasi permasalahan yang ada, karena penyebab dari adanya gap antara fakta dan kondisi ideal tersebut adalah multidimensi atau berdimensi banyak. Mengacu pada konsep Sedman tentang “Analisis Perilaku Bermasalah”, maka permasalahan ini dapat dianalisis dengan



menggunakan pendekatan ROCCIPI atau *Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology*. Permasalahan atau gap antara fakta dan kondisi ideal dapat terjadi karena salah satu atau kombinasi dari faktor-faktor *Rules* atau aturan, *Opportunities* atau kesempatan, *Capacity* atau kapasitas, *Communication* atau komunikasi, *Interest* atau kepentingan, *Process* atau proses, dan *Ideology* atau ideologi. Sebagai ilustrasi, kerusakan hutan yang masih di beberapa daerah seperti di NTB (Bima, Dompu, dan Sumbawa) dan Gorontalo (Boalemo) dapat terjadi karena tidak adanya aturan yang mengatur tentang perilaku orang atau lembaga, atau ada aturan tetapi tidak dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya, atau aturan memang tidak ada untuk mengatur orang-orang atau lembaga. Permasalahan juga dapat terjadi karena adanya kesempatan atau peluang, misalnya tingginya permintaan terhadap jagung sebagai bahan pakan ternak, yang kemudian menyebabkan orang-orang berperilaku merambah hutan untuk menanam jagung, dan pada saat yang sama tidak ada penegakkan hukum untuk mengamankan pihak-pihak yang melanggar dalam pemanfaatan hutan.

Gap antara kondisi ideal dengan fakta dalam sektor pertanian juga dapat disebabkan oleh faktor kapasitas, kepentingan, komunikasi, proses, dan ideologi. Petani atau masyarakat atau pihak terkait melakukan tindakan-tindakan yang tidak mendukung bagi terwujudnya pertanian yang produktif dan berkelanjutan disebabkan oleh rendahnya kapasitas (*pengetahuan, sikap dan keterampilan*), komunikasi dan proses yang salah atau tidak sesuai, dan adanya dorongan kepentingan ekonomi yang kuat dibanding dengan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara lestari atau berkelanjutan.

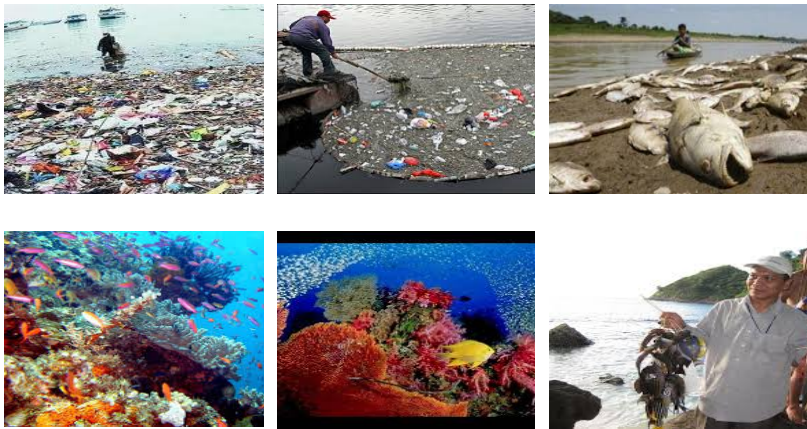
Uraian tentang faktor-faktor penyebab ini akan memberi arah dan jawaban terhadap alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) pendekatan “pengaturan” melalui peraturan dan perundang-undangan, dan (2) pendekatan non-pengaturan, yaitu melalui proses peningkatan

kapasitas, perbaikan komunikasi dan proses, peningkatan ekonomi, dan lainnya. *Pendekatan dalam penguatan kapasitas, komunikasi, dan proses menjadi bagian yang dapat dimainkan oleh penyuluhan*, karena sesuai dengan definisi, penyuluhan adalah proses pendidikan, pembelajaran dan komunikasi – akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya.

### **1.3. Perikanan dan Kelautan**

Fakta yang sama dihadapi dalam sektor perikanan dan kelautan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2. Kondisi kehidupan yang tidak memuaskan dalam pengelolaan sumber daya perairan, perikanan dan kelautan dapat diamati di banyak tempat di pedesaan, perkotaan, dan dimana pun berada. Polusi darat, perairan, laut dan pesisir telah terjadi dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kehidupan biota darat, perairan, laut dan pesisir terancam dan bahkan punah. Tingkat keanekaragaman hayati terus menurun hingga ke tingkat yang sangat mencemaskan. Tidak ditemukan lagi sejumlah jenis atau sepsis tanaman, hewan, tumbuhan, dan lainnya sebagai akibat dari kerusakan lingkungan di darat, perairan, laut dan udara.

Bagian kedua dari Gambar 1.2 menunjukkan kondisi ideal yang menjadi cita-cita banyak orang dan bahkan semua pemerintahan yang ada. Kondisi perairan, laut dan pesisir yang bersih, nyaman, dan bebas dari sampah atau polusi. Kondisi yang memungkinkan biota laut dan perairan tumbuh dan berkembang, yang pada akhirnya akan mampu memberikan dukungan bagi pemenuhan kebutuhan manusia akan pangan dan gizi.



Gambar 1.2. Kondisi Sumber daya Perikanan: Antara Fakta dan Harapan

Penggunaan bom dan bahan kimia untuk menangkap ikan telah memunculkan persoalan dan isu kelestarian sumber daya perikanan. Perusakan kawasan mangrove dan terumbu karang oleh berbagai pihak adalah juga menjadi persoalan penting di sektor perikanan. Di sisi lain, fakta juga menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, dan bahkan dimaklumi bahwa daerah-daerah pesisir menjadi kantong-kantong kemiskinan. Usaha untuk mengembangkan mangrove dan budidaya rumput laut adalah juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, namun demikian upaya ini belum memberikan hasil yang cukup bermakna bagi perbaikan kondisi kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir. Hal menunjukkan betapa strategi penyuluhan yang efektif masih tetap diperlukan guna merubah perilaku dan tingkat kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Universitas Mataram dalam hal pengembangan rumput laut menunjukkan adanya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dan nelayan , khususnya dalam pengembangan rumput laut (Muktasam A. , Suadnya, Aluh, Rosmilawati, & Mursal, 2013) – lihat Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1. Permasalahan yang Dihadapi Petani Rumput Laut

<b>Permasalahan yang dihadapi petani rumput laut</b>	
(1)	<b>Petani dan petugas belum memiliki visi yang jelas tentang pengelolaan rumput laut dan pengelolaan kelompok masyarakat</b> (baik pengelola produksi maupun pengolah hasil rumput laut). Proses brainstorming atau curah pendapat di awal kegiatan menunjukkan bahwa peserta TOT tidak mampu mengungkapkan secara rinci “Apa impian mereka dari pengelolaan rumput laut dan kelompok petani rumput laut”. Ketiadaan visi yang jelas ini kemudian menyebabkan tidak jelasnya program dan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan rumput laut dan kelembagaan petani.
(2)	<b>Produksi rumput laut menurun dan bahkan tidak tersedia insentif yang cukup untuk menggairahkan produksi.</b> Menurut peserta hal ini disebabkan oleh terjadinya kegagalan panen yang berulang-ulang karena berbagai sebab seperti penyakit ice-ice, adanya serangan hama dan penyakit, pengaruh ombak dan gelombang, perubahan cuaca dan kondisi air laut, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kesulitan dalam mendapatkan bibit rumput laut.
(3)	<b>Pemasaran rumput laut yang tidak jelas.</b> Pengalaman petani rumput laut menunjukkan bahwa sebagian petani rumput laut mengalami kerugian karena tidak dibayar oleh pembeli atau tengkulak. Pada saat awal rumput laut dibayar sesuai kesepakatan, namun belakangan terjadi pengingkaran pada pihak pedagang yang menyebabkan petani rugi (rumpul laut yang dibawa ke Surabaya tidak dibayar dan atau dipermainkan dengan berbagai alasan seperti kualitas yang rendah dan bahkan pembeli menghilang – sebagaimana dialami oleh Amaq Toni di Desa Ekas Buana dimana sekitar 30 ton rumput lautnya tidak dibayar oleh pengusaha di Surabaya/dibawa kabur, diangkut dengan 4 Truk Fuso).
(4)	<b>Belum terjadi proses nilai tambah di tingkat desa dan bahkan di tingkat kabupaten karena belum berkembangnya kegiatan pengolahan rumput laut.</b> Menurut peserta, beberapa kegiatan pelatihan pernah dilakukan dalam rangka mendukung upaya pengolahan rumput laut menjadi beberapa jenis produk olahan seperti pembuatan dodol, kerupuk dan lainnya, namun belum tumbuh dan berkembang usaha untuk mengolah rumput laut sebagai kegiatan produktif yang mendatangkan keuntungan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Persoalan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan diakui sebagai salah satu penyebab dari belum adanya tindak lanjut pada masyarakat untuk mengembangkan usaha pengolahan rumput laut.
(5)	<b>Lemahnya kelembagaan petani rumput laut adalah permasalahan lain yang disebutkan oleh peserta TOT.</b> Menurut peserta, belum ada kelompok petani rumput laut yang terbentuk dan bertahan sebagai sebuah wadah bersama dalam mendukung proses produksi, pemasaran dan pengolahan rumput laut. Kelompok yang ada selama ini hanya merupakan kelompok pelatihan dan kelompok penerima bantuan. Keadaan ini menyebabkan tidak adanya kemampuan masyarakat pengelola rumput laut untuk menghadapi permainan para tengkulak dan juga pengusaha besar.

Pertanyaan yang sama juga muncul: Kenapa kondisi ideal tidak terwujud? Apa sebenarnya yang terjadi sehingga kondisi ideal tidak dapat terwujud atau kondisi yang tidak memuaskan terwujud dan masif terjadi tanpa mampu untuk dihentikan?

Uraian mendalam tentang faktor-faktor penyebab dengan pendekatan alat analisis ROCCIPI akan dapat mengurai semua kemungkinan faktor penyebab, dan juga mengidentifikasi alternatif intervensi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan atau situasi. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah melalui kegiatan peningkatan kapasitas, perbaikan komunikasi, dan perbaikan dalam proses-proses perencanaan program atau pengembangan dan implementasi kebijakan publik.

#### 1.4. Kehutanan dan Perkebunan

Gambar 1.3 memberi ilustrasi tentang kondisi yang juga tidak memuaskan pada subsektor kehutanan dan perkebunan. Fakta tentang telah terjadinya kerusakan sumber daya hutan secara masif dapat disaksikan pada banyak tempat di daerah-daerah di Indonesia dan di negara lain. Sementara ini, hampir semua orang, lembaga dan pemerintahan menyadari tentang pentingnya sumber daya dan ekosistem hutan bagi kehidupan. Kutipan-kutipan berikut menjelaskan tentang peran dan fungsi hutan bagi umat manusia:

*Pentingnya hutan tidak dapat diremehkan.*

*Kita bergantung kepada hutan untuk kelangsungan hidup kita, dari udara yang kita hirup hingga kayu yang kita gunakan. Selain menjadi habitat dan ruang bagi hewan dan penghidupan manusia, hutan juga menjadi pelindung bagi daerah aliran sungai, mencegah erosi dan menjadi solusi bagi perubahan iklim. Namun demikian, walau kita tergantung pada hutan, kita masih saja membiarkan hutan untuk punah (WWF, 2020).*

*“Hutan juga memberikan jasa-jasa ekosistem yang sangat dibutuhkan bagi penghidupan manusia, yang antara lain meliputi (1) Menyerap gas rumah kaca yang berbahaya yang menyebabkan perubahan iklim. Pada hutan tropis saja, sekitar seperempat triliun ton karbon pada biomassa di bawah dan di atas tanah; (2) Memberikan air bersih yang dibutuhkan oleh rumah tangga*

sebagai air minum, keperluan mandi dan cuci dan kebutuhan lainnya; (3) Melindungi daerah aliran sungai atau menahan erosi dan bahan kimia lainnya mengalir dan mencapai sungai; (4) Memberikan makanan dan obat-obatan; (5) Menjadi penyangga bagi bencana alam seperti banjir karena curah hujan yang tinggi; dan (6) Menjadi habitat atau tempat hidup bagi lebih dari setengah spesies makhluk/hewan daratan (WWF, 2020)

*“The importance of forests cannot be underestimated.*

*We depend on forests for our survival, from the air we breathe to the wood we use. Besides providing habitats for animals and livelihoods for humans, forests also offer watershed protection, prevent soil erosion and mitigate climate change. Yet, despite our dependence on forests, we are still allowing them to disappear.” (WWF, 2020)*

*They provide ecosystem services that are critical to human welfare. These include: (1) Absorbing harmful greenhouse gasses that produce climate change. In tropical forests alone, a quarter of a trillion tons of carbon is stored in above and below ground biomass; (2) Providing clean water for drinking, bathing, and other household needs; (3) Protecting watersheds and reducing or slowing the amount of erosion and chemicals that reach waterways; (4) Providing food and medicine; (5) Serving as a buffer in natural disasters like flood and rainfalls; (6) Providing habitat to more than half of the world’s land-based species” (WWF, 2020).*

Berbagai tulisan menjelaskan tentang fungsi hutan bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi, baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung meliputi (1) membantu manusia dan makhluk lainnya untuk bernapas karena hutan memompa oksigen yang dibutuhkan untuk hidup dan menyerap CO<sub>2</sub> yang dihasilkan dari proses pembakaran – dalam tubuh dan proses lainnya, (2) Menjadi daerah atau lokasi tempat tinggal bagi sebagian manusia, (3) Menjadi sumber bagi pemenuhan kebutuhan manusia –pangan dan obat-obatan, (4) Menahan angin, dan (5) Mencegah banjir.

Manfaat tidak langsung antara lain: (1) Penyejuk suasana, (2) Mendinginkan suhu bumi, (3) Sebagai habitat bagi banyak makhluk,

(4) Membuat hujan, (5) Menyimpan air.<sup>1</sup>. Secara umum manfaat hutan ini dapat dikelompokkan menjadi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan.

Manfaat-manfaat ini, langsung maupun tidak langsung hanya dapat terwujud ketika hutan dikelola dengan baik dan menghasilkan hutan yang lestari sebagaimana digambarkan pada bagian kedua dari Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Kondisi Sumber daya Hutan: Antara Fakta dan Harapan

Fakta menunjukkan bahwa sumber daya alam, termasuk hutan, terus mengalami kerusakan atau degradasi. Kerusakan hutan bahkan telah memunculkan permasalahan dan persoalan lain yang menyita perhatian banyak pihak, tidak saja di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat dunia atau global – permasalahan perubahan iklim dan pemanasan global. Beberapa fakta penting yang menunjukkan terus terdegradasinya sumber daya hutan antara lain:

<sup>1</sup> Web – Lingkungan Hidup “10 Manfaat Hutan bagi Manusia dan Lingkungan Hidup”

- (1) Laju pengurangan luas areal hutan sebagai akibat konversi untuk berbagai kegiatan dan penggunaan lainnya seperti untuk kegiatan penambangan, kegiatan dan pemanfaatan hutan untuk pertanian, dan untuk pemukiman.
- (2) Penurunan areal tutupan hutan.
- (3) Penurunan dan bahkan punahnya spesies-spesies flora dan fauna tertentu yang berada di hutan – keanekaragaman hayati, dan
- (4) Peningkatan areal kritis di kawasan hutan.

Degradasi sumber daya hutan tersebut disebabkan oleh banyak faktor (Wiradinata, 2012; Yembise, Cabuy, & Wanma, 2020), antara lain:

- (1) Illegal logging atau pembalakan liar, baik yang dilakukan oleh penduduk sekitar dan atau bekerjasama dengan jaringan pencuri kayu.
- (2) Perambahan hutan untuk berbagai keperluan seperti perladangan liar, pemukiman, kepentingan ekonomi jangka pendek (penebangan dan pemanfaatan kayu untuk bahan bakar rumah tangga dan industri batu bata, tembakau, dan kapur), dan bahkan oleh keserakahan dalam “menambah asset”
- (3) Kebakaran hutan
- (4) Kegiatan penambangan, baik penambangan tradisional dan atau penambangan rakyat, maupun penambangan oleh usaha pertambangan komersial, dan
- (5) Proses konversi hutan untuk keperluan-keperluan lain yang dilakukan secara legal maupun secara ilegal seperti menebang hutan untuk menanam tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai (konversi kawasan hutan untuk keperluan produksi pertanian), pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan fasilitas umum perkantoran, pasar, dan pemukiman.
- (6) Penebangan oleh pemilik HPH



Proses degradasi hutan yang terus berlangsung sebagaimana yang diuraikan di atas telah berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan lain yang mengancam dan menghawatirkan kehidupan, tidak saja kehidupan pada masyarakat di sekitar hutan, tetapi juga kehidupan masyarakat lain yang berada jauh dari hutan, bahkan di tingkatan Global. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah:

- (1) Berkurangnya jumlah dan debit mata air. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah mata air di suatu kawasan berkurang drastis dalam 10 tahun terakhir, dan bahkan mata air yang tersisa mengalami penurunan debit (volume air yang keluar per detik). Berkurangnya jumlah dan debit mata air ini kemudian berdampak pada penurunan kemampuan sumber daya hutan dalam menyediakan air untuk keperluan irigasi di sektor pertanian, dan untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga – air minum dan lainnya.
- (2) Berubahnya sungai atau kali menjadi saluran dan bahkan mengeringnya sejumlah sungai dan kali yang menjadi sumber pengairan untuk kegiatan di sektor pertanian.
- (3) Berkurangnya jumlah curah hujan. Hutan memainkan peranan penting dalam siklus hidrologi karena hutan dengan kekayaan vegetasinya akan menciptakan iklim makro dan mikro yang mendukung bagi proses pembentukan awan dan hujan.
- (4) Terjadinya banjir bandang yang menyebabkan kerusakan sumber daya lainnya, dan bahkan menelan korban jiwa. Hutan yang sudah tidak memiliki pohon tidak mampu lagi menyerap, menahan dan menampung air hujan (berfungsi sebagai daerah tangkapan air), dan kemudian menjadi air permukaan atau run-off, yang kemudian menjadi banjir.
- (5) Peningkatan emisi gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan iklim mikro maupun makro – termasuk pemanasan Global yang kemudian memunculkan persoalan lain seperti naiknya permukaan air laut, tenggelamnya sejumlah pulau kecil, musim kering yang berkepanjangan, menurunnya tingkat keanekaragaman hayati, dan lainnya.

- (6) Berubahnya sistem pertanian, dari pertanian intensif menjadi pertanian kurang intensif sebagai akibat kekurangan air.
- (7) Terus berlangsungnya konversi lahan dari lahan sawah produktif ke penggunaan lain seperti pemukiman dan perdagangan – konversi lahan sawah.
- (8) Dampak lanjut dari perubahan-perubahan tersebut adalah menurunnya kemampuan sumber daya alam untuk memproduksi bahan-bahan makanan.
- (9) Meningkatnya kemiskinan. Rusaknya hutan, tidak saja berakibat langsung kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari kegiatan pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan kayu maupun bukan kayu (madu, buah-buahan, sayur mayur, bambu, dan lainnya.), tetapi juga masyarakat yang mengelola usaha pada sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan. Intensitas tanam dan panen menurun karena menurunnya tingkat ketersediaan air untuk berbagai kegiatan ini.

Sebagaimana dipertanyakan pada subsektor pertanian dan perikanan, pertanyaan kritis juga perlu diajukan terkait dengan fakta tersebut adalah: ***Kenapa terus terjadi degradasi sumber daya hutan?***

Fakta yang terungkap dari berbagai studi, kajian, diskusi pada berbagai seminar dan konferensi menunjukkan adanya sejumlah faktor yang menjadi penyebab penting terus berlangsung *illegal logging atau pembalakan liar; perambahan hutan* untuk berbagai keperluan seperti perladangan liar, pemukiman, kepentingan ekonomi jangka pendek, dan bahkan oleh keserakahan dalam “menambah asset”; *kebakaran hutan; kegiatan penambangan; dan proses konversi hutan untuk keperluan-keperluan lain yang dilakukan secara legal* (konversi hutan lindung ke hutan produksi dan lainnya) antara lain adalah:

- (1) Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan hutan
- (2) Ada peraturan tetapi tidak efektif mengatur perilaku yang terkait dengan interaksi manusia dengan sumber daya hutan

- (3) Kebijakan yang tidak mendukung bagi terjadinya pengelolaan sumber daya hutan yang lestari atau berkelanjutan
- (4) Tidak adanya penegakan hukum yang efektif terhadap pihak-pihak yang merusak hutan
- (5) Kerjasama atau kolusi antara “oknum” kehutanan (termasuk polisi khusus kehutanan), kepolisian, dan pihak-pihak lainnya yang memungkinkan bagi terus berlangsungnya pembalakan liar
- (6) Kemiskinan pada masyarakat di sekitar hutan
- (7) Keterbatasan lapangan kerja di sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya
- (8) Terbatasnya pengetahuan, sikap, dan ketrampilan pada semua pihak yang terlibat dalam perusakan sumber daya hutan
- (9) Perubahan orientasi nilai, dari nilai sosial dan ekologis kepada nilai ekonomi jangka pendek
- (10) Terbatasnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyuluhan di sektor kehutanan
- (11) Dan lain-lainnya.

Jika semua faktor di atas dipilah-pisahkan, maka sesungguhnya dapat dirumuskan dengan jelas bahwa sesungguhnya permasalahan degradasi sumber daya hutan (masalah umum) terjadi karena faktor-faktor berikut:

- (1) Peraturan (Rules)
- (2) Kesempatan (Opportunity)
- (3) Kapasitas (Capacity)
- (4) Komunikasi (Communication)
- (5) Kepentingan (Interest)
- (6) Proses (Process)
- (7) Ideologi (Ideology)

### **ROCCIPI: Alat Analisis Perilaku Bermasalah/Menyimpang**

ROCCIPI - akronim dari *Rule, Opportuniry, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* - merupakan salah satu alat analisa yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang, baik pada tingkat aparat maupun pada masyarakat (Ann, Robert dan Nalin, 2001).

ROCCIPI juga menjadi instrumen untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan intervensi dalam merubah *perilaku* menyimpang melalui pendekatan legislasi (*legislative approaches*) maupun non-legislasi (*non-legislative approaches*).

Dalam kajian ROCCIPI, perilaku menyimpang (gap antara “*apa yang seharusnya*” dan “*apa kenyataannya*”) pada aparat pelaksana atau *Implementing Agencies* (IAs) dan pada masyarakat atau *Role Occupants* (ROs) dapat terjadi karena tujuh hal, yaitu:

- (1) *Rule (peraturan)*: Masyarakat maupun aparat tidak berperilaku sesuai yang dikehendaki karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan hutan, atau peraturan ada tetapi tidak jelas dan membingungkan, peraturan ada tapi belum disosialisasikan, atau peraturan ada tetapi tidak ditegakkan.
- (2) *Opportunity (Kesempatan)*: Masyarakat maupun aparat berperilaku menyimpang karena ada peluang atau kesempatan untuk menyimpang. Pengawasan yang terbatas dapat membuka peluang lebih besar kepada masyarakat untuk menebang kayu dan merusak hutan. Seorang polisi khusus kehutanan dapat berperilaku menyimpang karena tidak ada pengawasan yang baik dari atasannya atau karena diberi peluang oleh “pengusaha kayu ilegal”.
- (3) *Capacity (Kemampuan)*: Ketidak mampuan menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang atau tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini mencakup ketidak mampuan secara fisik (fasilitas terbatas, dukungan dana kurang, dan lainnya) dan non-fisik (pengetahuan dan ketrampilan terbatas, sikap dan persepsi negatif, motivasi rendah, dan lainnya), yang kesemuanya menyebabkan terbatasnya kemampuan dalam pengelolaan hutan.
- (4) *Communication (Komunikasi)*: Komunikasi yang tidak jalan dan kurang efektif menjadi salah satu aspek yang dapat menjelaskan kenapa seseorang berperilaku menyimpang. Walaupun ada “Aturan yang mengatur tentang pelarangan penebangan hutan secara tidak bertanggung jawab”, kegagalan dalam mengkomunikasikan aturan menjadi penyebab orang menebang hutan semauanya. Seorang atasan yang tidak pernah berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya

akan tetap berperilaku menyimpang karena tidak ada proses *feedback* sebagai suatu mekanisme koreksi atas perilaku menyimpang.

- (5) *Interest (Kepentingan)*: Masyarakat atau aparat berperilaku menyimpang karena ada interest atau kepentingan untuk melakukan itu. Kepentingan ini dapat berupa faktor ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Seorang penyuluh lapangan kehutanan membentuk kelompok secara “paksa” (melalui pertemuan sehari) karena suatu kepentingan implementasi “proyek”. Seorang calon kepala desa bermain “money politic” karena ingin memenangkan pemilihan kepala desa. Karena kepentingan untuk mempertahankan kebutuhan keluarganya, seorang polisi hutan rela mengabaikan “aturan untuk tidak menerima suap” dari pengusaha kayu yang mendukung atau melakukan kegiatan “illegal logging”.
- (6) *Process (Proses)*: Proses menunjuk pada berbagai langkah, mekanisme atau upaya yang ditempuh untuk mewujudkan suatu perilaku yang diharapkan, termasuk dalam penyusunan dan perancangan peraturan dan perundang-undangan. Pemberian hak pengelolaan hutan kepada pihak tertentu atau masyarakat harus melibatkan proses yang jelas dan partisipatif. Jika tidak, maka perilaku ideal dalam pengelolaan hutan tidak akan pernah terwujud.
- (7) *Ideology (Ideologi)*: Suatu nilai, kepercayaan dan sikap yang ada pada diri seseorang atau lembaga dapat menjadi penyebab bagi munculnya perilaku menyimpang. Pandangan seperti “*setiap orang berhak atas pekerjaan*” atau “*kerja adalah hak asasi setiap orang*” atau “*hutan adalah karunia Tuhan dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan semua masyarakat*”, ketika salah dipahami, maka akan muncul perilaku menyimpang seperti kesemrawutan yang disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima, dan eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya.

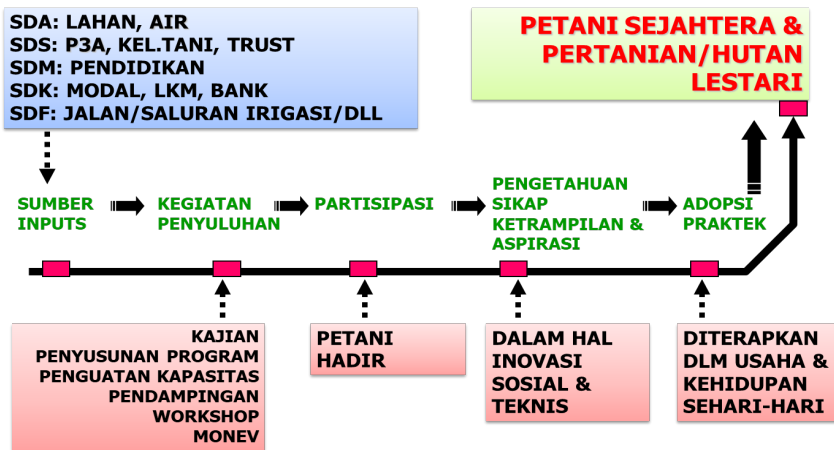
Kajian terhadap tujuh kategori aspek yang menyebabkan penyimpangan perilaku seperti yang disajikan di atas memberi arah pada identifikasi solusi-solusi alternatif dalam merubah perilaku menyimpang pada pengelolaan hutan. ROCCIPI, yang memberi perhatian pada pendekatan partisipasi dan keterlibatan multi-pihak, membantu menjawab

pertanyaan apakah suatu perubahan perilaku yang menyimpang harus dilakukan melalui *pendekatan legislasi (legislative approaches)* atau non-legislasi (*non-legislative approaches*).

Atas dasar penggolongan “faktor penyebab” ini, maka PENYULUHAN dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi persoalan degradasi sumber daya hutan, karena merupakan pendekatan dalam merubah perilaku menyimpang melalui proses Pendidikan, pembelajaran dan komunikasi. Sejalan dengan pengelompokan sumber permasalahan di atas, pernyataan bahwa “PENYULUHAN dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi persoalan degradasi sumber daya hutan” mengandung makna bahwa persoalan kehutanannya tidak cukup diatasi melalui PENYULUHAN, tetapi harus pula dilakukan pendekatan-pendekatan lain seperti “peraturan”, “penegakan hukum”, “penciptaan lapangan kerja”, “pembangunan ekonomi”, dan lainnya. Sebagai sebuah sistem, upaya mengatasi persoalan degradasi sumber daya hutan menghendaki adanya pendekatan yang komprehensif dan pelibatan multipihak (multistakeholders).



Gambar 1.4. Kondisi Sumber daya Hutan: Fakta yang Mencemaskan



Gambar 1.5. Peran Penyuluhan dalam Mencapai Visi Pembangunan

## 1.5. Peternakan

Sektor peternakan juga menjadi sektor yang berkontribusi pada munculnya persoalan-persoalan yang mengkhawatirkan, termasuk pada rusaknya sumber daya alam dan perubahan iklim. Pengelolaan sektor peternakan belum optimal melalui sistem peternakan yang ekstensif dihadapkan pada kondisi keterbatasan lahan dan ketidak mampuan lahan dalam mendukung penyediaan pakan yang mencukupi bagi tumbuh dan berkembangnya usaha peternakan. Di banyak tempat lahan-lahan penggembalaan ternak mulai terbatas dan bahkan telah mengalami kegagalan dalam mendukung penyediaan pakan yang cukup untuk populasi ternak yang ada. Keadaan ini mengharuskan adanya pengaturan pemanfaatan lahan penggembalaan, dan pada sisi lain perlunya mendukung petani dalam mengembangkan usaha peternakan secara intensif melalui kegiatan pengandangan, pengembangan dan penyediaan tanaman pakan, penggemukan, pengelolaan limbah, pengolahan dan pemasaran produk-produk peternakan. Gambar 1.6 berikut menunjukkan fakta yang kurang

memuaskan pada sektor peternakan, dan kondisi ideal yang menjadi cita-cita dalam pembangunan sektor peternakan.



Gambar 1.6. Kondisi Sumber daya Peternakan: Antara Fakta dan Harapan

Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten telah menganalisis berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan peningkatan produksi dan produktivitas usaha peternakan sapi, dan merumuskan upaya serta strategi yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi (BAPPEDA Dompu, 2022) – Tabel 1.1.



Tabel 1.2. Permasalahan Sistem Agribisnis Peternakan Sapi di Kabupaten Dompu

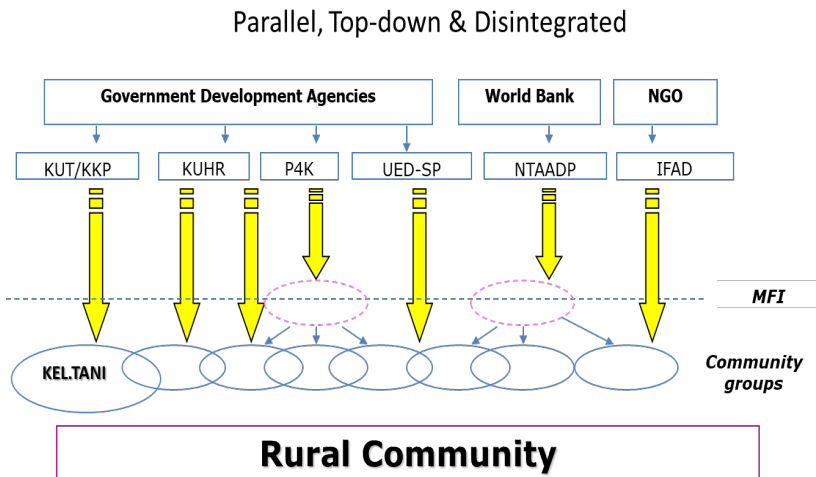
Masalah	Upaya Pemecahan
(1) Sistem pemeliharaan yang masih dilakukan secara tradisional - ekstensif	<i>Penerapan sistem pemeliharaan secara intensif melalui penyediaan hijauan makanan ternak, pengandangan, dan pengelolaan penyakit - penerapan ilmu dan teknologi peternakan; peningkatan kapasitas petani peternak; promosi pelaksanaan program inseminasi buatan (IB) dan peningkatan kapasitas petugas IB.</i>
(2) Kelembagaan peternakan yang masih lemah	<i>Penguatan kelembagaan peternakan – kelompok tani ternak dan gabungan kelompok tani ternak (penguatan kapasitas petani, kelompok tani &amp; pendampingan.</i>
(3) Pengusahaan ternak dilakukan dalam skala kecil karena keterbatasan modal	Pengaturan tata niaga ternak; penyuluhan tentang pengelolaan peternakan; pemberian bantuan akses terhadap sumber-sumber pendanaan atau permodalan.
(4) Kurangnya penguasaan dan penerapan teknologi peternakan, menyebabkan produksi dan produktivitas ternak belum optimal	Pemberian bimbingan teknis penerapan teknologi peternakan kepada para petugas dan kelompok tani ternak; peningkatan kemampuan adaptasi terhadap setiap perubahan dan kemajuan teknologi.
(5) Masih kurangnya hijauan makanan ternak unggul dan pemanfaatan limbah pertanian	Penyediaan pakan yang berkualitas; Peningkatan pakan ternak berkualitas seperti lamtoro (lamtoronisasi) dan pakan ternak berkualitas lainnya baik berupa hijauan makanan ternak ataupun limbah pertanian.
(6) Masih terbatasnya akses permodalan	Pemberian bantuan akses permodalan al. melalui fasilitasi akses terhadap program KUR

Sumber: Dokumen Road-Map JARAPASAKA

Atas dasar kajian analisis rantai nilai sapi di Kabupaten Dompu, teridentifikasi permasalahan dan kendala dalam produksi dan pemasaran sapi oleh para petani peternak, antara lain terkait keberlanjutan padang penggembalaan Doro Ncanga, perilaku kurang baik dari pedagang hewan dengan tidak melunasi pembayaran kepada petani peternak, ulah petani peternak yang tidak benar saat penjualan sapi - misalnya dengan memberi minum untuk menaikkan berat timbangan (Muktasam & Nonong Parta Tanaya, 2021).

## 1.6. Permasalahan Pembangunan Lainnya

Banyak penelitian yang mencoba mendalami berbagai faktor penyebab kegagalan sejumlah program pembangunan, dan hasil penelitian ini menunjukkan adanya faktor-faktor penyebab kegagalan pembangunan atau pengembangan masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain pendekatan pembangunan yang bersifat (1) top-down, (2) parallel dimana setiap lembaga dan agen pembaharu berjalan sendiri-sendiri dengan pendekatan dan programnya masing-masing, (3) disintegrative atau tidak terkoordinasi, (4) dominasi proyek – sekedar mengejar dan menyelesaikan target (Gambar 1.7).



Gambar 1.7. Pendekatan dalam Pembangunan – Parallel, Top-down & Disintegrated

Berbagai dokumen dan analisis tentang pembangunan pertanian menunjukkan bahwa pembangunan pertanian dan ekonomi berhadapan dengan sejumlah tantangan, yang juga sekaligus menjadi peluang. Tantangan dan peluang ini antara lain adalah proses Globalisasi informasi dan ekonomi, proses otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah, proses perubahan sosial yang berlangsung cepat, dan dinamika perubahan kebijakan yang menyertainya. Dalam *Naskah*

*Akademik* yang dikembangkan sebagai dasar pengembangan “Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian”, tantangan ini diungkapkan sebagai perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi pengembangan penyuluhan pertanian, yang meliputi (1) globalisasi; (2) berlakunya otonomi daerah; (3) kebijaksanaan pembangunan pertanian; (4) perkembangan kondisi petani; dan (5) pergeseran paradigma pembangunan pertanian<sup>2</sup>:

- (1) **Globalisasi** ternyata telah membawa pengaruh besar bagi terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di sektor pertanian dan penyuluhan pertanian. Seorang pakar penyuluhan menyatakan bahwa perubahan akibat Globalisasi telah memunculkan paling tidak tiga isu penting di bidang pertanian (Miller, 1993), yaitu:
  - Isu tentang *penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan* - bagaimana agar sumber daya alam, lahan, air, hutan dan lainnya. dapat digunakan sedemikian rupa sehingga menjamin bagi keberlanjutan sektor pertanian untuk masa yang akan datang. Kenyataan menunjukkan betapa petani berusaha menggunakan teknologi apa pun demi meningkatkan produksi dan mengabaikan berbagai risiko seperti degradasi lahan, polusi air dan udara, dan dampak negatif lainnya.
  - Isu tentang *kompetisi internasional* - telah terjadi persaingan yang sengit di pasar lokal maupun pasar internasional untuk produk-produk pertanian. Produk-produk pertanian luar negeri dan luar daerah seperti bawang putih, jeruk, apel, beras, dan lainnya bersama hasil olahannya (buah dan sayuran kaleng, dan juga dalam bentuk tepung, dan jeli), kini hadir di pasar-pasar lokal di Indonesia, termasuk juga NTB, dan ini menjadi pesaing bagi produk yang dihasilkan oleh petani di daerah ini. Di luar negeri para eksportir produk pertanian juga bersaing dengan eksportir produk pertanian

---

<sup>2</sup> DPR RI(2005).“Naskah Akademik Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian ”.

dari negara lain yang sukses menghasilkan komoditi-komoditi pertanian dengan biaya murah dan sehat. Kita dapat mengamati betapa orang mulai beralih pada produk-produk organik, tidak menggunakan bahan-bahan kimia dalam porsi yang berlebihan. Termasuk juga dalam isu persaingan internasional ini adalah berlakunya skema *common effective preferential tariff* (CEPT) bagi kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area - AFTA)<sup>3</sup>. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam memacu produksi dan produktivitas sektor pertanian telah memunculkan isu lain di sektor pertanian, yaitu isu keamanan pangan. Kontaminasi produk-produk pertanian, pangan dan hortikultura oleh karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan telah menyebabkan muncul isu lain seperti kesehatan dan lingkungan. Berbagai jenis penyakit degeneratif muncul sebagai akibat dari konsumsi bahan pangan yang terkontaminasi oleh bahan kimia. Petani berusaha untuk menjaga produktivitas dan preferensi konsumen dengan terus menggunakan bahan kimia dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran. Penggunaan bahan kimia seperti rodamin B, formalin, sacarin, dan bahkan pestisida dalam proses pengolahan dan pemasaran (menjadikan makanan tampak menarik, manis dan awet) menjadi persoalan lain yang dihadapi dunia pertanian dan penyuluhan.

- Isu tentang *perubahan dalam proses-proses sosial* - petani kini memperoleh informasi dari mana saja dengan menggunakan perangkat terbaru di bidang teknologi informasi seperti antena parabola, komputer dan lain sebagainya. Mobilitas petani juga cukup tinggi, termasuk juga di Lombok Selatan dan Lombok Timur, tidak saja antar daerah, tetapi juga antara negara. Dalam kondisi demikian terjadi perubahan dalam hal akses terhadap informasi dan sumber-sumber informasi.
2. **Otonomi Daerah** ternyata juga membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek pembangunan di daerah, termasuk sektor pertanian (dalam arti luas) serta penyuluhan. Usaha untuk menggali dan

---

<sup>3</sup> Pengurangan tarif/bea masuk untuk sejumlah produk hingga 0-5%.

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah melahirkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang sebagian besar bertujuan “menarik retribusi”. Lemahnya koordinasi dan kuatnya ambisi untuk meningkatkan PAD ternyata telah membebani masyarakat dan lembaga terkait, yang pada akhirnya mengurangi daya saing sejumlah produk. Lebih ironis, kesalahan pemahaman akan esensi Otonomi Daerah dengan berbagai konsekuensinya telah menyebabkan munculnya gagasan untuk melebur dan membubarkan sejumlah lembaga yang tidak memiliki kemampuan memberi kontribusi pada perolehan PAD, dan salah satu yang menjadi korban adalah “Lembaga Penyuluhan Pertanian”.

3. **Kebijakan Pembangunan Pertanian** telah mengalami pergeseran dari “pembangunan pertanian” ke “pembangunan sistem dan usaha agribisnis”, yang mencakup Program Agribisnis dan Program Ketahanan Pangan. Perubahan ini membawa konsekuensi pada perlunya perubahan pendekatan, lingkup, sasaran, materi dan metode penyuluhan.

Selain tantangan-tantangan dan permasalahan tersebut di atas, pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan dan pertanian (termasuk pendekatan dalam penyuluhan pertanian) menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan mendasar yang menyebabkan kurang berhasilnya program atau bahkan gagalnya sejumlah program pembangunan pertanian dan pedesaan (Burkey, 1993: Patton, 1993; Hammer, 1994: Rouse, 1994: Muktasam, 2000; Muktasam, et.al, 2003). Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

- (1) Pendekatan dalam pembangunan lebih bersifat “top-down” (sentralistik)
- (2) Lebih kepada pencapaian “target” yang tidak realistis, baik dalam hal waktu (realisasi, implementasi) dan jumlah
- (3) Pendekatan “proyek”
- (4) Tidak berkelanjutan
- (5) Kurang partisipatif
- (6) Bias “out-siders” - ilusi investasi dan “turis pembangunan”
- (7) Pendekatan paralel, disintegratif dan tidak terkoordinasi dengan baik.

## 1.7. Penyuluhan Penting

Uraian dan ilustrasi di atas menunjukkan tentang posisi dan peran penyuluhan sebagai proses *pendidikan non-formal*, *proses pembelajaran*, dan *proses komunikasi* dalam mewujudkan kondisi-kondisi pertanian yang ideal melalui perubahan perilaku pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang kemudian mendorong terjadinya perubahan praktik, dan pada gilirannya meningkatkan kondisi *sosial, ekonomi, dan lingkungan* atau dalam istilah lain terwujudnya kehidupan yang lebih sejahtera dalam lingkungan yang terkelola secara lestari.

Badan Pangan Dunia atau *Food and Agricultural Organisation* (FAO) menjelaskan posisi strategis penyuluhan dalam mendukung peningkatan pertanian dan meningkatkan penghidupan petani dan keluarganya (FAO, 2019).melalui pernyataan berikut:

*“Penyuluhan adalah alat yang paling penting dalam menyampaikan pengetahuan dan ide-ide baru kepada masyarakat pedesaan dalam rangka menciptakan perubahan dan perbaikan penghidupan petani dan keluarganya. Oleh karena itu, penyuluhan menjadi sangat penting. Tanpa penyuluhan, petani akan menghadapi kesulitan dalam akses terhadap berbagai dukungan dan pelayanan lain yang dibutuhkannya bagi peningkatan sistem usaha tani dan kegiatan-kegiatan produktif. Pentingnya penyuluhan dapat dimengerti dengan lebih baik jika ketiga elemen pokok berikut diperhatikan: Pengetahuan – Komunikasi – Keluarga Petani”* – “Extension is essentially the means by which new knowledge and ideas are introduced into rural areas in order to bring about change and improve the lives of farmers and their families. Extension, therefore, is of critical importance. Without agricultural extension, farmers would lack access to the support and services required to improve their agriculture and other productive activities. The critical importance of extension can be understood better if its three main elements are considered: Pengetahuan – Komunikasi – Keluarga Petani” (FAO, 2019; p.1).

## 1.8. Ringkasan

Bab ini mengungkap dengan jelas tentang adanya gap atau distorsi antara *fakta* yang ada dalam masyarakat dengan *cita-cita* atau *impian* pembangunan. Kondisi real yang tampak kurang dan bahkan sangat tidak memuaskan sebagaimana ditampilkan secara visual sesungguhnya adalah hasil dan buah dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditempuh selama ini. Perjalanan pembangunan yang kini dilalui tampaknya masih akan terus menghasilkan fakta-fakta yang serupa dengan yang telah ada.

Di sisi lain, fakta tentang kondisi ideal yang ditampilkan adalah juga hasil atau buah dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, tetapi bukan di Indonesia melainkan di beberapa negara yang pernah penulis datangi, yaitu Jepang, Australia, dan New Zealand. Respon dari para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pengembangan masyarakat dan penyuluhan pertanian, dan siapa pun yang pernah melihat visualisasi hasil pembangunan di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa mereka rindu dengan kondisi seperti yang digambarkan, dan mereka berucap *memang kondisi seperti itulah yang menjadi cita-cita dan impian*.

Uraian dalam bab ini sampai pada kesimpulan bahwa *penyuluhan memiliki posisi dan peran yang penting dan strategis dalam mengatasi gap yang ada*, dan penjelasan menyeluruh bagaimana peran penyuluhan dalam mengatasi persoalan ini akan disajikan pada bab-bab berikut dari buku ini. Tantangannya adalah bagaimana *penyuluhan sebagai ilmu dan pendekatan dalam mewujudkan perubahan* dapat secara riil membuktikan perannya.

\*\*\*

## **2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: DEFINISI DAN STRATEGI**

### **2.1. Pengantar**

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah dan banyak pihak, lokal maupun internasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah sejak jaman orde baru telah meluncurkan program-program pembangunan pertanian melalui Bimas, Inmas, Insus, Supra Insus, SLPTT, dan lainnya. Program-program khusus bagi pengentasan kemiskinan juga tidak sedikit yang telah dilakukan, pada semua subsektor pertanian, dan non-pertanian. Sekedar untuk disebutkan, ada program *Inpres Desa Tertinggal* (IDT), program bantuan beras buat keluarga miskin, program pengembangan pertanian lahan kering, program PNPM, dan lainnya. Dalam masa tahun 2000 an juga ada *Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil* (P4K), program peningkatan produksi sapi, jagung dan rumput laut (PIJAR), *Program Bumi Sejuta Sapi* (BSS), program AIPD Rural, dan lainnya. Esensi dari semua program ini adalah untuk pemberdayaan, tetapi mengapa masih menyisakan persoalan kemiskinan dan ketidak berdayaan? Angka kemiskinan masih dua digit atau berada di atas 10% dan bahkan lebih tinggi lagi. Ada apa dengan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tengah dan pernah dilakukan? Adakah kesalahan-kesalahan yang berulang? Dimana posisi dan peran penyuluh dan lembaga penyuluhan dalam proses pemberdayaan masyarakat? Bab ini mencoba mengurai konsep dan strategi pemberdayaan serta menyajikan hasil evaluasi tentang kegagalan pada sejumlah program dan kegiatan pemberdayaan.

### **2.2. Pemberdayaan: Pengertian**

Jim Ife (2002) mendefinisikan “pemberdayaan” sebagai “usaha-usaha untuk meningkatkan kekuatan - power - dari pihak-pihak yang tidak



beruntung” (*“Empowerment aims to increase the power of the disadvantaged over personal choice and life, chances, need definition, ideas, institutions, resources, economic activity, and reproduction through policy and planning, social and political action, and education”*). Konsep ini memiliki dua poin penting, yaitu “kekuatan” atau “power”, dan “tidak beruntung” atau “disadvantaged”, yang harus mendapatkan perhatian dalam setiap pembahasan tentang pemberdayaan, sebagai bagian dari perspektif keadilan sosial.

Dalam perspektif yang hampir sama, Fawcett, White, et al. (1994) menggunakan “pemberdayaan” atau “empowerment” sebagai proses untuk meningkatkan pengaruh atas “kejadian-kejadian” dan hasil-hasil penting (“...the process of gaining influence over events and outcomes of importance”). Proses ini dapat berlangsung pada tingkatan yang berbeda dan saling berkaitan, individu, kelompok dan organisasi, dan juga masyarakat. Karena itu, “pemberdayaan dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu proses untuk meningkatkan pengaruh atas kondisi-kondisi yang menjadi persoalan bersama pada kelompok orang-orang yang tidak beruntung.

Rappaport (1987) menjelaskan pemberdayaan sebagai suatu “mekanisme dimana seseorang, organisasi, dan masyarakat menambah “penguasaan” atas apa-apa yang menyangkut hidupnya”. Pemberdayaan tercapai melalui perubahan perilaku, konsep-diri, dan perbaikan-perbaikan aktual dari kondisi-kondisi yang ada pada seseorang, kelompok dan masyarakat. Perubahan dapat dilakukan pada tingkatan makro tetapi perubahan yang real juga terjadi jika dilakukan pada tingkatan mikro.

Lyons, M., Smuts, C., dan Stephens, A. (2001) mendefinisikan “pemberdayaan masyarakat” sebagai suatu proses meningkatkan kontrol atas penghidupannya dan meningkatkan inisiatif untuk menggapai tujuan hidupnya sendiri”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lyons, M., Smuts, C., dan Stephens, A. (2001). Participation, Empowerment and Sustainability: (How) Do the Links Work? Urban Studies Journal, 28, p.1233.

*Empat bentuk “pemberdayaan”:*

- (1) *Formal empowerment* (diciptakan ketika institusi pemerintah atau swasta memberikan mekanisme kepada publik untuk mempengaruhi keputusan)
- (2) *Intrapersonal empowerment* (adalah rasa percaya diri akan kompetensi pada suatu situasi tertentu. Ini menjadi dasar bagi munculnya partisipasi dalam proses keputusan.
- (3) *Instrumental empowerment* (menunjuk pada kapasitas aktual seseorang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Ini terkait dengan faktor-faktor seperti pengetahuan, sumber daya material, dan lainnya).
- (4) *Substantive empowerment* (menunjuk pada kemampuan untuk mencapai keputusan yang mampu memberikan pemecahan terhadap masalah atau menghasilkan keputusan yang atau hasil yang dikehendaki.

Dalam perspektif “power”, Jim Ife melihat dalam beberapa hal berikut:

- (1) Dalam menentukan pilihan dan kesempatan hidup
- (2) Pendefinisian kebutuhan
- (3) Atas ide dan gagasan
- (4) Atas lembaga
- (5) Atas sumber-sumber
- (6) Aktivitas ekonomi
- (7) Reproduksi

Dalam hal pihak yang “tidak beruntung” - *the disadvantaged*, Jim Ife melihatnya dalam tiga kelompok atau kategori, yaitu:

- (1) *Kelompok yang tidak beruntungan karena struktural*, yang di dunia barat dikenal dalam tiga kelompok, yaitu *kelas* (kelompok miskin, tidak bekerja, berpendapatan rendah, penerima kesejahteraan), *gender* (wanita) dan *etnis atau ras* (penduduk lokal atau asli, kelompok etnis dan budaya minoritas - Aborigin di Australia atau Negro di AS dan Mauri di Selandia Baru).

- (2) *Kelompok yang kedua adalah mereka yang tergolong pada usia lanjut, anak-anak dan pemuda, tidak mampu secara fisik dan intelektual, terisolasi (secara geografis dan sosial), gays dan lesbians. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini bukanlah karena ketidak beruntungan karena operasi kelas, etnis dan gender. Ketidak beruntungan mereka akan semakin bertambah jika mereka juga miskin, indigenous dan perempuan.*
- (3) *Kelompok yang tidak beruntung secara personal, yaitu ketidak beruntungan karena faktor-faktor pribadi seperti persoalan yang terkait dengan pribadi dan hubungan dalam keluarga, krisis identitas, kesendirian, malu dan lainnya yang menyebabkan seseorang tidak berdaya (terjerumus pada obat-obatan, narkotik, dan lainnya).*

### **2.3. Strategi Pemberdayaan**

*Jim Ife (2002) menegaskan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui:*

- (1) *Perubahan kebijakan dan perencanaan:* pemberdayaan melalui perubahan kebijakan dan perencanaan dicapai melalui pengembangan perubahan struktur dan kelembagaan yang ditujukan untuk meningkatkan dan pemeratakan akses terhadap sumber daya dan pelayanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan ekonomi, peraturan perundang-undangan yang mendorong distribusi sumber daya secara seimbang dapat dipandang sebagai strategi pemberdayaan
- (2) *Aksi sosial dan politik:* menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan “power” atau kekuatan. Terbentuknya asosiasi dan keikutsertaan kelompok-kelompok yang tidak beruntung dalam arena politik adalah beberapa alternatif dalam pemberdayaan.
- (3) *Pendidikan dan penyadaran:* menekankan pentingnya pendidikan sebagai upaya kearah peningkatan kekuatan atau power.

Mengembangkan kemampuan kelompok-kelompok yang tidak beruntung untuk memahami bagaimana merubah keadaan, dan meningkatkan kekuatan.

Glenn Laverack (2001) menunjukkan bahwa sesungguhnya proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui konteks program (Tabel 2.1). Beberapa domain operasional dari pemberdayaan masyarakat adalah:

- (1) *Partisipasi* (individu dalam kelompok dan organisasi)
- (2) *Kepemimpinan* (pada kelompok yang beruntung dan tidak beruntung - formal & informal leaders)
- (3) *Struktur organisasi*
- (4) *Identifikasi dan penilaian atas masalah*
- (5) *Kemampuan dalam mobilisasi sumber daya*
- (6) *Kerjasama dan networking dengan pihak lain* (organisasi atau individu)
- (7) *Peran pihak luar*
- (8) *Pengelolaan program* - termasuk kegiatan perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi

Lyons, M., Smuts, C., dan Stephens, A. (2001) menemukan bahwa jika di dalam proses pembangunan partisipatif, orang-orang menerima pelatihan yang memungkinkan mereka meningkatkan ketrampilan, maka pemberdayaan akan terjadi pada tiga tingkatan, yaitu *individu, proyek dan masyarakat*. Ketiga pemberdayaan ini kemudian pada gilirannya akan mendukung tercapainya keberlanjutan proyek dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Namun juga ditemukan, walaupun program pembangunan memberi tekanan pada pengembangan kapasitas, melalui pelatihan dan inisiatif-inisiatif pemberdayaan lainnya, hasil pemberdayaan akan sangat tergantung pada kemauan politik lokal dan struktur masyarakat.

Tabel 2.1. Pendapat Para Ahli tentang Strategi Pemberdayaan

Sumber & pandangannya tentang pemberdayaan	Strategi
(1) Jim Ife (2002)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan kebijakan dan perencanaan</li> <li>• Aksi sosial dan politik</li> <li>• Pendidikan dan penyadaran</li> </ul>
(2) Fawcett, et. al., (1995)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi dan pengalaman</li> <li>• Meningkatkan kapasitas dan struktur kelompok</li> <li>• Meningkatkan dukungan lingkungan dan sumber daya</li> </ul>
(3) Glenn Laverack (2001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi (individu dalam kelompok dan organisasi)</li> <li>• Kepemimpinan (pada kelompok yang beruntung dan tidak beruntung - formal &amp; informal leaders)</li> <li>• Struktur organisasi</li> <li>• Identifikasi dan penilaian atas masalah</li> <li>• Kemampuan dalam mobilisasi sumber daya</li> <li>• Kerjasama dan networking dengan pihak lain (organisasi atau individu)</li> <li>• Peran pihak luar</li> <li>• Pengelolaan program - termasuk kegiatan perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi</li> </ul>
(4) Bond and Keys (1993) <sup>5</sup> - “...to the extent to which community member groups affect the functioning of the organisation’s board”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan dapat dilakukan melalui kelompok dan ketika kelompok-kelompok berkolaborasi maka akan semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan kemampuan dalam mempengaruhi perubahan.</li> </ul>

## 2.4. Kegagalan dalam Pemberdayaan

Berbagai program pemberdayaan telah banyak dilakukan, tetapi tidak semua program tersebut memberikan hasil yang memuaskan. Bahkan pada beberapa kasus dilaporkan bahwa program-program yang diniatkan untuk memberdayakan masyarakat justru merusak tatanan sosial yang ada dan muncul sebagai proses yang melemahkan – **disempowerment** (Muktasam A. , A Longitudinal Study of Group Roles in Indonesian Rural Development: An Analysis of Policy Formulation, Implementation and Learning Outcomes (Ph. D Thesis),

<sup>5</sup> Bond, M. A., and Keys, C. B. (1993)“Empowerment, diversity, and collaboration: promoting synergy on community boards. American Journal of Community Psychology, 21, 37-58.

2000) (Flewelling, Fox, Puspadi, & Adar, 2013) (Muktasam A. , 2000) (Pretty J. , Social Capital and the Collective Management of Resources, 2003). Masalah-masalah tersebut antara lain, pendekatan yang *paralel dan kurang terkordinasi, bersifat top-down yang kurang partisipatif (konsep Transfer of Technology), pendekatan dengan pemberian insentif (tidak efektif), dan upaya-upaya pencapaian target tanpa memperhatikan kondisi objektif*. Selain faktor-faktor eksternal tersebut, faktor-faktor internal dan lingkungan masyarakat juga turut mempengaruhi ketidakberdayaan masyarakat.

*Pendekatan paralel*, parsial dan kurang koordinasi seringkali berdampak pada *duplikasi pelayanan, pemborosan dana dan tenaga*. Tidak ada proses konvergensi sumber daya yang seharusnya dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi penting ketika program atau proyek diarahkan kepada sasaran yang juga menjadi sasaran pihak lain atau yang menghendaki koordinasi dan pendekatan sistem.

*Pendekatan "top-down"* tampak jelas pada beberapa kasus di atas, yang berakibat pada *kurangnya partisipasi dalam proses-proses kelompok, dari perencanaan hingga pengawasan dan penikmatan hasil*. Padahal disadari bahwa partisipasi menjadi dasar bagi tumbuh dan berkembangnya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan. Beberapa alasan bagi munculnya pendekatan 'atas-bawah' ini antara lain sifat program yang 'segera', dan usaha-usaha untuk mencapai 'target' dalam jumlah dan batas waktu.

Selain itu, kekeliruan persepsi terhadap penyuluhan dan pelaksanaan program pembangunan sebagai suatu proses *transfer teknologi dan penyampaian program* menyebabkan kita memperlakukan masyarakat sebagai pihak yang menerima program, dan kelompok sebagai alat untuk mentransfer teknologi dan program. Akibatnya, terbentuk persepsi bahwa kelompok menjadi milik instansi tertentu, dan bukan menjadi miliki petani. Kelompok yang demikian karenanya akan mengadakan kegiatan atau pertemuan kalau memang dikehendaki oleh instansi yang bersangkutan.

*Pendekatan insentif* - misalnya dengan menyediakan uang saku atau transpor - dalam beberapa hal cukup berarti dalam mendorong 'partisipasi', paling tidak untuk menghadirkan anggota kelompok dalam suatu pertemuan. Hal ini berlaku khususnya bagi instansi-instansi yang memiliki dana cukup. Di sisi lain, pendekatan ini menjadi sangat antagonis bagi instansi lain yang kurang memiliki banyak dukungan dana. Bagi mereka, mengumpulkan anggota untuk pertemuan kelompok merupakan masalah tersendiri.

## **2.5. Modal dalam Pemberdayaan**

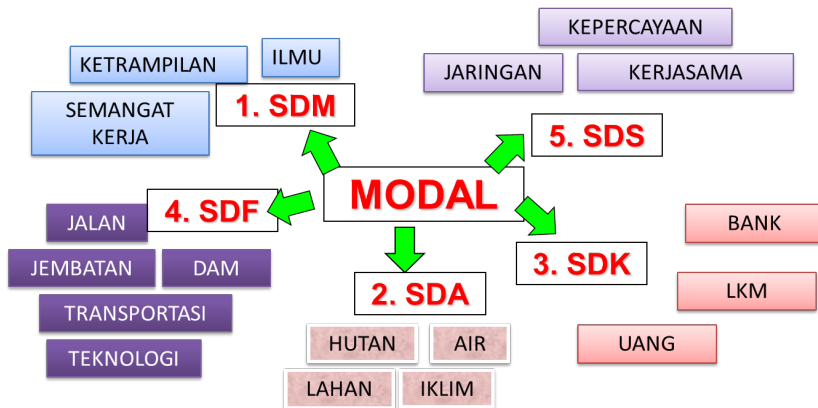
Pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa kata “modal” seringkali dan selalu diartikan atau dikonotasikan sebagai “modal dalam bentuk uang”. Ketika suatu pertanyaan diajukan kepada sekelompok masyarakat pedesaan, misalnya *“Apa permasalahan yang dihadapi sehingga tidak sanggup untuk merubah situasi alias tetap miskin dan atau tingkat pengangguran masih tetap tinggi?”*, secara spontan orang-orang atau masyarakat akan menjawab *“tidak ada modal atau kekurangan modal Pak”*. Harapan mereka dengan jawaban ini adalah “perlu bantuan modal” melalui pemberian “hibah” atau “bantuan uang secara cuma-cuma”.

Reaksi atau persepsi atau konotasi masyarakat tersebut mungkin tidak salah atau bahkan dapat dimaklumi karena selama ini yang lebih umum dibicarakan sebagai modal adalah modal *keuangan*. Seorang pedagang bakulan tidak mampu untuk melakukan mobilitas sosial vertikal atau meningkatkan status sosial dan ekonominya karena tidak memiliki modal keuangan yang cukup. Namun fakta juga menunjukkan bahwa ketika *“modal keuangan sudah dibantu dan diberikan secara cuma-cuma”*, maka juga tidak ada jaminan bahwa seorang pedagang bakulan akan dapat merubah kondisi sosial ekonominya atau meningkat pendapatan dan kesejahteraannya.

Uraian di atas menunjukkan adanya persoalan lain yang menjadi dasar dan sumber dari ketidak mampuan dan ketidak berdayaan seseorang

atau masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial vertikal atau melakukan gerak sosial lintas lapisan sosial ke atas atau bergerak dari lapisan sosial “bawah” ke lapisan sosial di atasnya atau lapisan “menengah” atau “atas”.

Dalam konteks ini, ketika berbicara tentang modal, maka sesungguhnya paling tidak ada lima jenis modal yang seharusnya dimiliki oleh seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat agar dapat memproduksi dan merubah kondisi penghidupannya. Kelima modal yang dimaksud adalah modal *sumber daya alam* (SDA, *natural capital*), modal *sumber daya manusia* (SDM, *social capital*), modal *sumber daya keuangan* (SDK, *financial capital*), modal *sumber daya fisik* (SDF, *physical capital*), dan modal *sumber daya sosial* (SDS, *social capital*) – Gambar 2.1. Kelima modal ini sering juga dikenal sebagai *Livelihood Assets* atau *Asset Penghidupan*.



Gambar 2.1. Modal dalam Mencapai Visi Pengembangan Masyarakat

### 2.5.1. Sumber daya Alam

*Modal Sumber daya Alam (Natural Capital)* yang meliputi lahan, air, laut, hutan, iklim, dan lainnya, yang dalam konteks produksi pertanian seringkali dianggap sebagai modal pokok atau modal utama. Seorang petani dianggap betul-betul sebagai petani jika memiliki modal lahan



yang dapat dikelola untuk proses produksi pertanian. Kemiskinan pada sebagian besar masyarakat tani disebabkan oleh kepemilikan dan atau penguasaan lahan yang relatif sempit yang umumnya kurang dari 0,5 ha sehingga tidak mampu memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Dalam kenyataan, modal lahan tidak saja dapat dikuasai karena kepemilikan, tetapi juga karena adanya proses sewa-menyewa (status sewa), pinjam-meminjam (gadai), atau kesepakatan kerjasama bagi hasil (sakap). Ini berarti bahwa seseorang atau suatu masyarakat masih tetap dapat memproduksi walau tidak “memiliki sendiri modal sumber daya alam” karena adanya alternatif lain dalam “menguasainya”. Dalam konteks makro dan ekonomi global, proses ini menjadi justifikasi kenapa misalnya “Singapura” yang tidak memiliki lahan yang cukup dapat memproduksi atau menghasilkan surplus ekonomi melalui penguasaan sumber daya alam di luar singapura, atau misalnya Amerika dapat menguasai sumber daya alam di negara lain seperti di Indonesia (khususnya usaha pertambangan seperti Free Port, dan PT. New mont Nusa Tenggara).

Kualias sumber daya alam atau natural capital dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Di suatu tempat dimana curah hujan tinggi, maka sumber daya alamnya akan lebih baik dibanding dengan suatu tempat dengan tingkat curah hujan yang rendah. Dalam konteks pertanian, maka kualitas dan pola penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi “lahan kering atau lahan tadah hujan” dan “lahan basah atau lahan sawah berpengairan”. Kedua jenis lahan ini juga mencerminkan tingkat intensitas tanam dan produktivitas yang berbeda dan juga tingkat dinamika sosial ekonomi yang juga relatif berbeda. Pada lahan sawah berpengairan umumnya produksi pertanian lebih tinggi dibanding dengan lahan sawah tadah hujan atau lahan kering atau tegalan.

Sumber daya alam atau Natural capital menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa lingkungan dan menjadi sumber pangan (baik yang dilakukan melalui proses produksi atau budidaya maupun yang dipanen atau ditangkap dari alam – liar), kayu dan serat, air dan

regulasi, asimilasi dan dekomposisi limbah, siklus dan fiksasi hara, pembentukan tanah, pengendalian biologis hama, regulasi iklim, habitat dari satwa liar, dan lainnya (Pretty J. , *Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence*, 2007).

### **2.5.2. Sumber daya Manusia**

Modal Sumber daya Manusia atau Modal SDM (Human Capital) mengacu kepada kualitas personal atau individual suatu masyarakat dan jumlah keseluruhan populasi dalam suatu daerah atau wilayah. Modal sumber daya manusia berada pada posisi yang tinggi ketika kualitas individual orang-orang dalam masyarakat atau sistem sosial berada pada posisi yang tinggi, misalnya tingkat pendidikannya rata-rata tamat perguruan tinggi, atau pengetahuan dan keterampilannya tinggi, sikap terbuka terhadap perubahan, memiliki etos kerja yang tinggi, mentalitasnya dalam pembangunan positif – tidak malas, dan lainnya. Modal sumber daya manusia juga mengacu kepada jumlah populasi dalam suatu daerah atau kawasan. Modal sumber daya manusia akan bernilai rendah ketika jumlah populasi dalam suatu daerah atau Kawasan hanya terdiri dari 15 orang dengan usia yang sudah renta dan tidak produktif lagi, walau pendidikan mereka adalah tamat dari perguruan tinggi.

Oleh karena itu, status individual warga masyarakat seperti pendidikan, pengetahuan, ketrampilan, kesehatan, gizi, adalah bagian dan inti dari modal SDM atau human capital (Orr 1992; Byerlee Q8 1998; Leeuwis 2004; Lieblin et al. 2004). Kualitas SDM dapat ditingkatkan melalui peningkatan layanan publik seperti ketersediaan lembaga pendidikan seperti sekolah, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga pelatihan, lembaga penyuluhan, dan lainnya. Kapasitas dan produktivitas seseorang dapat ditingkatkan melalui kemampuannya berinteraksi dengan orang lain dan kemampuannya mengakses informasi dan teknologi. Kemampuannya dalam mempengaruhi orang dan keterampilan berorganisasi akan menjadinya sebagai modal SDM yang sangat bermakna bagi pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat (Pretty J. , *Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence*, 2007)..

### **2.5.3. Sumber daya Keuangan**

Modal Sumber daya Keuangan (Financial Capital) mengacu kepada antara lain stok atau ketersediaan uang, tabungan, akses terhadap kredit, hibah, dan subsidi. Modal keuangan lebih dari sekedar uang dalam konsep akuntansi, karena perannya dalam memfasilitasi ketimbang sebagai sumber dari produktivitas. Modal keuangan merepresentasikan akumulasi dari barang dan jasa, terbangun melalui sistem keuangan yang menghimpun tabungan dan melayani penyaluran uang seperti pembayaran pensiun, dana bagi masyarakat miskin, hibah, subsidi, dan lainnya (Pretty J. , *Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence*, 2007). Modal keuangan yang sering menjadi pembicaraan dalam pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani antara lain ketika petani membutuhkan uang sebagai modal operasional, modal kerja, dan modal untuk membangun Gedung sebagai modal tetap. Petani tidak akan menghasilkan produk pertanian dengan baik tanpa dukungan kredit untuk membeli sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan. Ketersediaan lembaga keuangan dan jaringannya juga menjadi bagian penting dari modal sumber daya keuangan.

### **2.5.4. Sumber daya Fisik**

Modal Sumber daya Fisik (Physical Capital) meliputi antara lain ketersediaan dan kualitas sumber daya seperti sarana/prasarana, fasilitas, pasar, jalan, transportasi, komunikasi, dan teknologi. Jule Pretty menjelaskan bahwa “Modal fisik kumpulan dan sumber daya buatan manusia seperti Gedung, rumah, pabrik, infrastruktur jalan, jaringan irigasi, jalan dan jembatan, alat pertanian dan traktor, sistem informasi dan komunikasi, yang semuanya menjadikan sumber daya manusia menjadi lebih produktif (Pretty J. , *Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence*, 2007).

### 2.5.5. Sumber daya Sosial

Sumber daya sosial adalah aksi kolektif yang terjadi dalam masyarakat yang saling menguntungkan, yang memberi kontribusi pada kekompakan sosial. Modal sosial dalam bentuk aksi bersama muncul dari adanya norma atau aturan, nilai, sikap yang disepakati dan diterima bersama, saling percaya, memberi dan menerima, dan semacamnya. Modal semacam ini muncul sebagai *kelompok dan organisasi dalam masyarakat* (Flora & Flora 1996; Fukuyama, 2002; Cramb & Culasero 2003; Pretty 2003; Pretty J. , 2007). Coleman (1988), modal sosial sebagai “beragam entitas yang berbeda, dengan dua elemen yang umum: memiliki aspek *struktur sosial*, dan *memfasilitasi tindakan tertentu* dari pelakunya – secara individu maupun kolektif – di dalam struktur”. SC meliputi *asosiasi vertikal & horizontal dengan tujuan positif atau negatif* (green peace, terrorist). Putnam (1993), mendefinisikan modal sosial sebagai “a set of *‘horizontal associations’* between people”: SC consist of “*social network*” & “*associated norms*” that have an effect on the productivity of the community. Dua asumsi yang mendasarinya adalah bahwa (1) ‘network’ & ‘norma’ berhubungan, (2) keduanya memiliki konsekuensi ekonomi yang penting.

Mengacu pada definisi modal sosial yang diungkapkan oleh Fukuyama (2002) dan Pretty (2007), berikut contoh dari entitas modal sosial yang ada di masyarakat tani di Desa Sapit dan masyarakat pesisir di Desa Ekas Buana, Lombok Timur pada tahun 2022.

Tabel 2.2. Entitas Modal Sosial di Desa Sapit – Kecamatan Suela, Lombok Timur

MS – Laki2	MS – yang pengelola, anggota, dan kegiatannya melibatkan perempuan
(1) <b>Kelompok tani tanaman pangan</b> (kelompok bagi petani-petani yang mengelola dan mengusahkan usaha tani tanaman pangan, <i>aktif no.1</i> ).	(1) <b>Kelompok wanita tani</b> – Dusun Tetajen, produksi serbat
(2) <b>Kelompok tani hutan</b> – kelompok petani-petan yang mendapat hak kelola atas hutan.	(2) Kelompok simpan pinjam perempuan
(3) <b>Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) - aktif no.2</b>	(3) Kelompok usaha Bersama Untung Surapati (Ketuanya sudah ke Arab Saudi)
(4) <b>Kelompok tani ternak</b> – pengelolaan ternak sapi secara berkelompok (kendang kolektif)	(4) Kelompok pengrajin – tenun songket
(5) <b>Kelompok sadar wisata</b> (Pokdarwis)	(5) Kelompok guru PAUD
(6) <b>Kelompok pengajian</b> – pada setiap masjid di Desa Sapit	(6) Kelompok usaha bersama simpan pinjam (KUSP) – didukung oleh Dinas Koperasi
(7) <b>Kelompok kayu bakar</b> – kaum lelaki secara spontan bergerak mencari dan mengumpulkan untuk kemudian disampaikan dan disumbangkan ke keluarga dari warga yang terkena musibah.	(7) <b>Kelompok piring</b> – menyiapkan piring dan berbagai peralatan lainnya, yang dapat digunakan oleh anggota dan luar anggota (disewakan, <i>Aktif no.3</i> )
(8) Kelompok sanggar seni gendang ble	(8) Kelompok arisan
(9) Kelompok pemakai air minum	(9) Kelompok senam
(10) Kelompok remaja masjid	(10) Kelompok ibu-ibu PKK
(11) Kelompok bank sampah – <i>tidak aktif atau pingsan</i>	(11) Kelompok sekolah perempuan
(12) Pembangunan dan perbaikan masjid, perbaikan saluran dan jaringan irigasi, perbaikan jalan usaha tani, gotong royong pada acara-acara keagamaan dan musibah kematian, acara syukuran, dan lainnya.	

Sumber: Data primer diolah (Hasil FGD).

Selain keberadaan kelembagaan atau kelompok sosial sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2, keberadaan modal sosial dalam bentuk kekompakan masyarakat, *terbentuk dari hubungan saling percaya, memberi & menerima, dan mempertukarkan antar individu, yang memfasilitasi kerjasama* (Pretty & Hugh, 1999) juga teridentifikasi di Desa Sapit dalam bentuk nilai-nilai kegotong royongan pembangunan dan perbaikan masjid, saluran air dan jalan-jalan usaha tani.

Tabel 2.3. Entitas Modal Sosial di Desa Ekas Buana – Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur

MS – Laki2	MS – yang pengelola, anggota, dan kegiatannya melibatkan perempuan2
(1) Kelompok Nelayan – beranggota antara 10 – 25 orang nelayan (Media belajar, pelatihan, dan penyaluran bantuan, <i>Aktif no.1</i> )	(1) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) – (Kelompok SPP Mawar Berduri, dukungan dari Bank BTPN Syari'ah, <i>Aktif no.2</i> )
(2) Kelompok Tani – beranggota 10 – 25 petani, aktif pada saat penanaman jagung	(2) Kelompok Arisan ( <i>Aktif no.3</i> )
(3) Kelompok pengajian – di setiap dusun, anggotanya bapak2 dan ibu2, tersendat sendat.	-
(4) Kelompok Remaja Masjid	-
(5) Karang Taruna	-
(6) Kelompok Banjar ( <i>Aktif no.4</i> )	-
(7) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) – tidak jelas, tidak aktif.	-
(8) Ustadz/tuan guru	-
(9) Plangar – beras, air, uang, dan lainnya.	-
(10) Penyuluh Pertanian Lapangan - nelayan	-
(11) Gotong royong ( <i>Aktif no.5</i> ) – pembangunan dan kebersihan masjid, panen lobster (saling bantu, tetapi juga dapat upah yang sesuai), kebersihan, dan gotong royong pengumpulan kayu bakar.	-
(12) Kelompok Banjar – kelompok mengelola kegiatan-kegiatan penggunaan dan penyewaan alat masak seperti piring, panci, ember, kompor, ponjor, dan lainnya. Anggota tidak bayar, dan non anggota bayar 100k per kk.	-

Catatan: Teridentifikasi 14 entitas modal sosial, baik dalam bentuk organisasi atau kelompok maupun bentuk aksi kolektif seperti kebersamaan dalam banjar dan gotong royong. Atas dasar keaktifan dan perannya, teridentifikasi paling tidak 5 modal sosial yang dianggap sebagai modal sosial yang masih aktif dan berperan dalam mendukung pengembangan masyarakat – lihat Tabel!

## 2.6. Peran Modal dalam Pemberdayaan

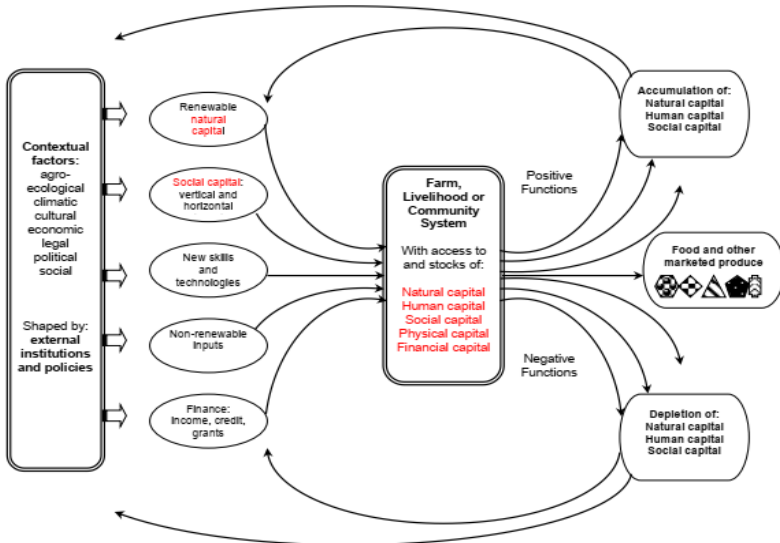
Setelah mengetahui atau paham tentang kelima jenis modal atau asset bagi penghidupan seseorang, rumah tangga, desa, suatu masyarakat, daerah, dan bahkan sebuah negara, maka pertanyaan mendasar adalah “*Apa hubungan antara asset atau modal dengan kehidupan orang-orang, masyarakat atau sebuah negara?*”. Jawabannya tentu sangat jelas, bahwa kepemilikan dan kualitas asset sangat menentukan tingkat kehidupan atau penghidupan seseorang, rumahtangga, desa, dan bahkan suatu negara sekalipun. Seseorang atau rumahtangga atau suatu desa atau suatu negara yang miskin dapat diduga bahwa kondisi kehidupan atau penghidupannya dicirikan oleh adanya persoalan dalam kelima jenis modal atau asset tersebut.

Suatu desa atau masyarakat miskin identik dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya. Bayangkan dan bandingkan kondisi sosial ekonomi antara masyarakat desa dengan sumber daya alam yang cukup baik, air tersedia untuk mengairi lahan hingga dapat berproduksi sepanjang tahun untuk berbagai jenis komoditas pertanian – pertanian lahan basah, dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dengan jumlah lahan pertanian yang terbatas dan dengan kondisi ketersediaan air yang minim atau hanya tergantung dari air hujan – pertanian lahan kering. Tingkat penghidupan kedua masyarakat ini jelas akan sangat berbeda, yang pertama kondisi penghidupannya akan lebih sejahtera dibandingkan dengan yang kedua dengan keterbatasan sumber daya alamnya, kondisi hidup yang kurang, dicirikan oleh produktivitas rendah, lapangan kerja rendah, pendapatan rendah dan kemiskinan.

Ilustrasi di atas baru dalam konteks *kualitas sumber daya alam* atau *natural capital* atau *natural asset*. Bagaimana jika sumber daya alamnya tidak ada (petani atau rumah tangga petani tidak berlahan), atau desa atau negara dengan sumber daya alam yang terbatas – tidak memiliki lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan atau kawasan hutan, lahan tambang, dan lainnya -seperti Singapura? Keterbatasan stok atau ketersediaan sumber daya alam tentu akan mempengaruhi

kemampuan desa atau negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, tetapi fakta bahwa Singapura mampu untuk mencapai kondisi hidup yang lebih sejahtera adalah karena kelebihanannya dalam modal sumber daya manusia, dan modal-modal lainnya. Tingkat Pendidikan yang tinggi, etos kerja, kelembagaan sosial dan ekonomi yang mendukung, kemampuan keuangan dan teknologi yang lebih dari rata-rata menjadikan negara ini memiliki akses untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam di negara lain seperti di Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.

Kesadaran tentang pentingnya ketersediaan dan kualitas semua sumber daya bagi penghidupan seseorang, rumahtangga, desa, daerah, dan bahkan negara, maka adalah penting untuk dapat mengelola semua sumber daya dengan bijak sehingga dapat berkelanjutan – terjadi rekapitalisasi dan tidak terjadi pengurangan jumlah dan atau kualitasnya, sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.1 berikut (Pretty J. , 2007).



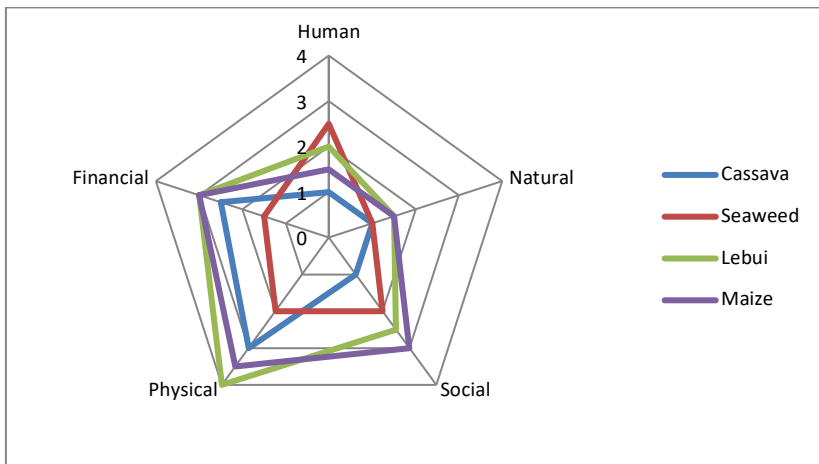
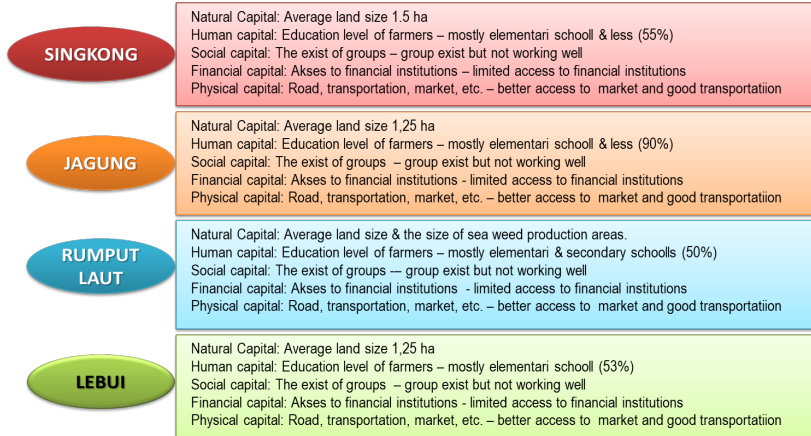
Gambar 2.2. Pengelolaan Modal bagi Pengembangan Masyarakat



Gambar 2.2 menunjukkan bahwa faktor lingkungan – internal (agro-ecological climatic, cultural, economic, legal, political and social) maupun eksternal (kelembagaan dan kebijakan) mempengaruhi pengelolaan kelima sumber daya yang ada. Jika semua faktor ini berfungsi dengan baik atau positif, maka akan terjadi akumulasi modal, tetapi jika semua faktor ini berfungsi negatif atau tidak baik, maka jumlah dan kualitas modal akan berkurang dan bahkan hilang, dan akan sangat mempengaruhi kemampuan dalam pencapaian visi atau cita-cita pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Gambar 2.3 menunjukkan ilustrasi bagaimana mengetahui dan mengukur ketersediaan dan kualitas aset atau modal penghidupan suatu masyarakat yang pernah dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis (Muktasam A. , 2015). Pengukuran dengan menggunakan skala pengukuran ordinal untuk kesemua modal menghasilkan gambaran tentang kondisi kelima modal pada petani yang mengelola usaha kelima komoditas – Gambar 2.3.

## HASIL STUDI LIVELIHOOD ASSETS



Gambar 2.3. Ketersediaan & Kualitas Modal - Petani Singkong, Jagung, Lebui & Rumput Laut

### 2.7. Ringkasan

Perbaikan penghidupan petani dan keluarganya serta masyarakat secara keseluruhan adalah cita-cita dan tujuan akhir dari semua program pemberdayaan dan pembangunan. Kondisi penghidupan yang baik ini ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan yang tinggi, yang ditunjukkan oleh pendapatan rumahtangga yang cukup untuk

memenuhi semua kebutuhan dasarnya, yang meliputi *pangan, sandang, dan papan*. Kehidupan yang lebih baik juga ditunjukkan oleh kehidupan yang *harmonis, saling menghargai, saling membantu, tenang, damai, aman, dan dalam suasana yang bersih jauh dari polusi, dan dalam kondisi sumber daya alam yang berkelanjutan atau lestari*. Kondisi hidup seperti ini hanya dapat dicapai dengan mudah ketika semua sumber daya yang ada dapat dikelola secara bijaksana melalui kerja dan peran kebijakan dan kelembagaan. Terjadi rekapitalisasi modal atau sumber daya atau dengan kata lain stok atau ketersediaan dan kualitas *sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya sosial* berada pada kondisi layak dan bahkan meningkat.

*Penyuluhan pertanian* memiliki posisi dan peran strategis dalam rangka menguatkan kapasitas *sumber daya manusia dan sumber daya sosial*, yang kemudian akan mempengaruhi ketersediaan dan kualitas *sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya fisik*. Uraian dalam bab-bab berikut menjelaskan konsep atau teori pokok penyuluhan pertanian, dan pada bab-bab terakhir menjelaskan posisi dan peran penyuluhan sebagai ilmu dan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis, analisis rantai nilai dan penguatan kapasitas petani pengelola hutan atau agroforestry.

\*\*\*



## BAGIAN II TEORI DASAR PENYULUHAN

### 3. PENYULUHAN PERTANIAN: DEFINISI DAN IMPLIKASINYA

#### 3.1. Pengantar

Guna memberikan dasar pijakan tentang penyuluhan pertanian pada masa kini, berbagai definisi penyuluhan pertanian yang pernah dirumuskan dan dikembangkan oleh para pakar akan disampaikan dalam Bab ini. Sangat mungkin definisi penyuluhan pada masa awal munculnya penyuluhan sebagai ilmu berbeda dengan definisi penyuluhan dimasa kini, yang lingkup dan tantangannya berbeda. Dulu ketika teknologi komunikasi masih berupa radio dan televisi atau koran, metode penyuluhan boleh jadi hanya sebatas penggunaan media radio, televisi dan koran yang ditujukan kepada petani di pedesaan, namun kini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media dan konteks penyuluhan sudah berubah, bahkan ada yang menganggap “penyuluhan” tidak diperlukan lagi karena petani dapat secara mandiri mencari informasi melalui berbagai media yang ada, khususnya melalui media sosial. Petani atau masyarakat pada umumnya dapat mengakses berbagai jenis informasi yang dibutuhkannya hanya dengan menggunakan hand phone, melalui website, Google, Yahoo, Youtube, dan lainnya. *Apakah ini bermakna bahwa penyuluhan tidak dibutuhkan lagi?*

Uraian dalam Bab ini akan menjelaskan tentang konsep atau definisi penyuluhan dan implikasinya, proses dan tujuan penyuluhan, dan pada akhirnya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat meyakinkan bahwa penyuluhan masih tetap diperlukan! Proses pematangan mental dan fisik (belajar) seseorang dapat terjadi dengan sendirinya seiring bertambahnya umur dan pengalaman, namun

pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk keperluan aksi bersama dan kemasyarakatan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya publik, masih tetap membutuhkan kegiatan-kegiatan yang disebut penyuluhan.

### **3.2. Definisi Penyuluhan**

Dalam dunia penyuluhan pertanian, kata *penyuluhan* didefinisikan sebagai “*proses pendidikan nonformal bagi petani dan keluarganya agar terjadi perubahan perilaku, yang pada akhirnya membantu mencapai kesejahteraannya*”. Perubahan perilaku yang dimaksud dalam definisi ini adalah yang menyangkut perubahan *pengetahuan* (domain kognitif), perubahan *sikap* (domain afektif), dan perubahan *keampilan* (domain psikomotorik). Dalam bahasa lain, penyuluhan dimaksudkan agar dapat merubah petani *dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak setuju atau tertarik menjadi setuju atau tertarik, dan merubah mereka dari tidak mampu atau terampil menjadi lebih mampu atau terampil*.

Definisi lain dari penyuluhan adalah “*extension involves the conscious use of communication of information to help people form sound opinions and make good decisions*” – “*proses yang secara sadar memanfaatkan komunikasi informasi untuk membantu orang-orang membangun atau membentuk pikiran dan membuat keputusan terbaiknya*” (Van den Ban & Hawkins, 1996).

Organisasi Pangan Dunia (FAO) mendefinisikan penyuluhan sebagai “*proses pendidikan informal yang ditujukan kepada masyarakat pedesaan. Proses ini menawarkan saran dan informasi untuk membantu mereka memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Penyuluhan juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dari usaha tani keluarga, meningkatkan produksi dan meningkatkan standar hidup dari keluarga petani*” – “*Extension is an informal educational process directed toward the rural population. This process offers advice and information to help them solve their problems. Extension also aims to increase the efficiency of the family farm,*

increase production and generally increase the standard of living of the farm family” (FAO, 2019).

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, kata PENYULUHAN didefinisikan sebagai berikut:

*“Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.”*

Sedangkan Sistem Penyuluhan didefinisikan sebagai berikut:

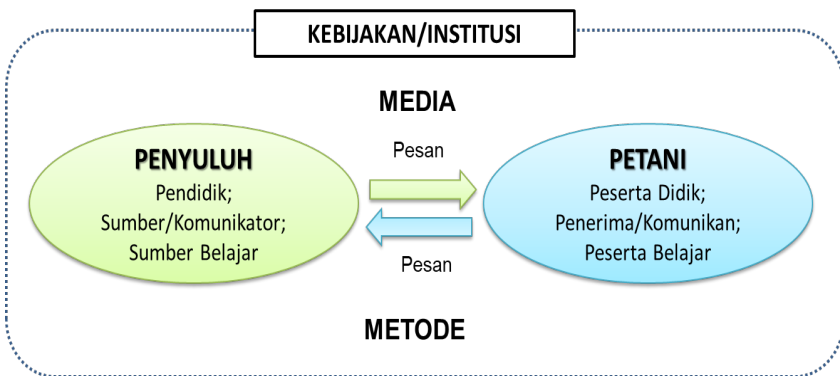
*“Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.”*

Atas dasar beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan bahwa sesungguhnya penyuluhan melibatkan unsur-unsur atau komponen-komponen pokok sebagai berikut:

- (1) Proses PENDIDIKAN (non-formal) atau proses KOMUNIKASI atau proses PEMBELAJARAN: Proses-proses ini melibatkan “pendidik” & “peserta didik” atau “sumber/komunikator” & “penerima/komunikan” atau “sumber belajar” & “peserta belajar”. Dalam konteks penyuluhan kehutanan, maka komponen ini melibatkan “PENYULUH kehutanan” (Penyuluh Kehutanan Lapangan atau PKL) dan “SASARAN penyuluhan kehutanan” (petani dan keluarganya).
- (2) Tujuan dari proses PENDIDIKAN/KOMUNIKASI/PEMBELAJARAN adalah terjadinya PERUBAHAN PERILAKU pada sasaran penyuluhan, yang meliputi PENGETAHUAN (*knowledge*), SIKAP (*attitudes*), KETRAMPILAN (*skills*) dan TINDAKAN (*practice*).

- (3) Tujuan akhirnya adalah peningkatan PRODUKSI dan PENDAPATAN - kesejahteraan

Gambar berikut memperlihatkan keseluruhan komponen dalam definisi penyuluhan sebagaimana diuraikan di atas.



Gambar 3.1. Komponen dalam Sistem Penyuluhan

### 3.3. Proses Penyuluhan

Selain beberapa definisi di atas, berikut disajikan beberapa definisi lain dari perspektif penyuluhan sebagai proses yang disarikan dari sejumlah publikasi bidang penyuluhan dalam 50 tahun terakhir:

- (1) **1949:** *The central task of extension is to help rural families help themselves by applying science, whether physical or social, to the daily routines of farming, homemaking, and family and community living.*<sup>[1]</sup>
- (2) **1965:** *Agricultural extension has been described as a system of out-of-school education for rural people.*<sup>[2]</sup>
- (3) **1966:** *Extension personnel have the task of bringing scientific knowledge to farm families in the farms and homes. The object of the task is to improve the efficiency of agriculture.*<sup>[3]</sup>
- (4) **1973:** *Extension is a service or system which assists farm people, through educational procedures, in improving farming methods and techniques, increasing production efficiency and income,*



- bettering their levels of living and lifting social and educational standards.*<sup>[4]</sup>
- (5) **1974:** *Extension involves the conscious use of communication of information to help people form sound opinions and make good decisions.*<sup>[5]</sup>
- (6) **1982:** *Agricultural Extension: Assistance to farmers to help them identify and analyse their production problems and become aware of the opportunities for improvement.*<sup>[6]</sup>
- (7) **1988:** *Extension is a professional communication intervention deployed by an institution to induce change in voluntary behaviours with a presumed public or collective utility.*<sup>[7]</sup>
- (8) **1997:** *Extension [is] the organized exchange of information and the purposive transfer of skills.*<sup>[8]</sup>
- (9) **1999:** *The essence of agricultural extension is to facilitate interplay and nurture synergies within a total information system involving agricultural research, agricultural education and a vast complex of information-providing businesses.*<sup>[9]</sup>
- (10) **2004:** *Extension [is] a series of embedded communicative interventions that are meant, among others, to develop and/or induce innovations which supposedly help to resolve (usually multi-actor) problematic situations.*<sup>[10]</sup>

Selain definisi-definisi di atas, berikut beberapa pernyataan tentang penyuluhan:

- (1) *“Penyuluhan pada dasarnya adalah sistem pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa dan remaja”* (Extension is fundamentally a system of out of school education for adults and youths alike).
- (2) *“Ini adalah sistem di mana orang termotivasi melalui pendekatan yang tepat untuk membantu diri mereka sendiri dengan menerapkan sains dalam kehidupan sehari-hari, dalam bertani, berumah tangga, dan kehidupan bermasyarakat”* (It is a system where people are motivated through a proper approach to help themselves by applying

- science in their daily lives, in farming, home making and community living).
- (3) *“Penyuluhan merupakan pendidikan bagi seluruh masyarakat desa”* (Extension is education for all village people).
  - (4) *“Penyuluhan membawa perubahan yang diinginkan dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan orang”* (Extension is bringing about desirable changes in the knowledge, attitudes and skills of people).
  - (5) *“Penyuluhan membantu orang untuk membantu diri mereka sendiri”* (Extension is helping people to help themselves).
  - (6) *“Penyuluhan bekerja dengan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, untuk menjawab kebutuhan dan keinginan yang mereka rasakan”* (Extension is working with men and women, boys and girls, to answer their felt needs and wants).
  - (7) *“Penyuluhan mengajarkan orang apa yang diinginkan, (yaitu, mengubah kebutuhan yang tidak dirasakan menjadi kebutuhan yang dirasakan) serta bagaimana mencari cara untuk memuaskan keinginan ini dan menginspirasi mereka untuk mencapai keinginan mereka”* [Extension is teaching people what to want, (i.e., converting unfelt needs into felt needs) as well as how to work out ways of satisfying these wants and inspiring them to achieve their desires].
  - (8) *“Penyuluhan adalah mengajar melalui 'belajar dengan melakukan' dan 'melihat adalah percaya”* (Extension is teaching through ‘learning by doing’ and ‘seeing is believing’).
  - (9) *“Penyuluhan bekerja selaras dengan budaya masyarakat”* (Extension is working in harmony with the culture of the people).
  - (10) *“Penyuluhan adalah saluran dua arah; membawa informasi ilmiah kepada masyarakat desa dan juga membawa permasalahan masyarakat desa ke lembaga ilmiah untuk*
-

*dicarikan solusinya*” (Extension is a two – way **channel**; it brings scientific information to village people and it also takes the problems of the village people to the scientific institution for solution).

- (11) *“Penyuluhan adalah bekerja sama (berkelompok) untuk memperluas kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat dengan keluarganya sendiri, desanya sendiri, negaranya sendiri dan dunia”* (Extension is working together (in groups) to expand the welfare and happiness of the people with their own families, their own villages, their own country and the world).
- (12) *“Penyuluhan adalah hubungan yang hidup antara pekerja desa dengan masyarakat desa. Saling menghormati dan saling percaya, berbagi suka dan duka, menghasilkan persahabatan yang melaluinya pekerjaan penyuluhan desa berlanjut”* (Extension is a living relationship between the village workers and the village people. Respect and trust for each other, sharing of joys and sorrows, results in friendship through which village extension work continues).
- (13) *“Penyuluhan adalah pengembangan individu dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan pemimpin mereka, masyarakat mereka dan dunia mereka secara keseluruhan”* (Extension is development of individual in their day to day living, development of their leaders, their society and their world as a whole).
- (14) *“Penyuluhan adalah proses pendidikan berkelanjutan di mana baik pembelajar maupun pengajar saling memberi dan menerima”* (Extension is a continuous educational process in which both learner and teacher contribute and receive).

Semua definisi dan pernyataan di atas secara umum menegaskan tentang proses membantu atau mendukung petani dan keluarganya atau masyarakat pedesaan melalui *proses pertukaran informasi atau komunikasi atau proses pendidikan dan pembelajaran, dengan memanfaatkan informasi dan teknologi* yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan pengembangan atau dari sumber-sumber lainnya.

### 3.4. Tujuan Penyuluhan

Gambar berikut menunjukkan beberapa tingkatan tujuan dari penyuluhan, yaitu dari *perubahan perilaku* sebagai hasil atau output langsung dari proses penyuluhan hingga tujuan akhir dari sebuah proses penyuluhan, yaitu tercapainya kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang diharapkan (masyarakat yang sejahtera dan dengan kondisi lingkungan yang lestari). Dalam hal perubahan perilaku, maka tiga domain berikut menjadi domain utama yang sering menjadi perhatian:

- (1) ***Pengetahuan (cognitive domain)***, yaitu perubahan pada tataran kognitif yang ditunjukkan oleh munculnya kesadaran terhadap adanya sesuatu, kemampuan untuk mengingat dan menyebutkan kembali, adanya kemampuan untuk memahami apa yang dipelajari atau stimuli yang diterimanya. Dalam konteks tujuan pembelajaran, Bloom (1965) menjelaskan bahwa domain kognitif memiliki beberapa tingkatan, yaitu mengingat kembali (*recall*), memahami (*understanding*), analisa, sintesa, evaluasi dan aplikasi (*application*).
- (2) ***Sikap (affective domain)***, didefinisikan sebagai “sebuah penilaian terhadap suatu objek sikap” atau “suatu predisposisi atau kecenderungan untuk berespons, positif atau negatif terhadap sesuatu ide, objek, orang, situasi”. Sikap mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan dan respons terhadap tantangan, insentif dan penghargaan – semuanya disebut sebagai stimuli. Dalam penyuluhan, perubahan sikap adalah perubahan pada diri petani dan keluarganya, dari tidak mau menjadi mau untuk melakukan sesuatu, dari tidak tertarik menjadi tertarik, atau dari tidak setuju menjadi setuju terhadap sesuatu atau untuk tetap bertahan pada sikap-sikap tertentu.
- (3) ***Ketrampilan (psycomotoric domain)***, adalah perubahan pada “kemampuan petani” dalam melakukan sesuatu dalam periode waktu dan atau energi tertentu. Ketrampilan dapat dikelompokkan menjadi ketrampilan teknis (*technical skills* atau *hard skills*) dan

keampilan lunak (*soft skills*, seperti kemampuan dalam mengelola waktu, kerjasama team, kepemimpinan, komunikasi, membangun jaringan, memimpin diskusi, dan lainnya).

Perubahan yang akan terjadi setelah terjadinya perubahan pada ketiga domain di atas adalah terjadinya perubahan dalam tindakan nyata yang terjadi pada sasaran penyuluhan. Perubahan inilah yang kemudian disebut sebagai perubahan praktik (*practice*) atau dalam bahasa yang umum adalah terjadinya adopsi terhadap inovasi atau rekomendasi teknologi.

Perlu untuk dipahami bahwa perubahan dalam ketiga domain di atas bukan merupakan jaminan bagi terjadinya perubahan praktik atau terjadinya adopsi. Boleh jadi bahwa seseorang yang ikut dalam kegiatan penyuluhan telah berubah pengetahuan, sikap dan keterampilannya, namun tidak melakukan sesuatu terkait dengan apa yang dianjurkan atau tidak merubah praktiknya. Hal ini dapat terjadi jika lingkungan tidak mendukung (faktor sosial dan lingkungan) atau tidak tersedia teknologi sebagaimana yang direkomendasikan atau tidak memiliki modal yang cukup untuk menerapkan apa yang dianjurkan.

Fakta ini menegaskan bahwa penyuluhan sebagai sebuah proses untuk merubah perilaku tidaklah cukup untuk menciptakan sebuah perubahan. Diperlukan dukungan lain agar proses perubahan sosial dapat berlangsung, seperti adanya dukungan kebijakan, dukungan modal dan teknologi, termasuk juga dukungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya – mengacu pada ketersediaan lima asset atau modal dalam proses produksi, yaitu modal sumber daya alam, modal sumber daya manusia, modal sosial, modal keuangan dan modal fisik atau fasilitas.

Gambar berikut juga menunjukkan tingkatan perubahan lain setelah terjadinya perubahan dalam hal praktik, yaitu perubahan dalam dal produksi, pendapatan, dan akhirnya kesejahteraan. Seperti halnya perubahan perilaku yang tidak menjamin bagi terjadinya perubahan praktik, perubahan praktik juga tidak merupakan jaminan bagi

terjadinya perubahan produksi, pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Banyak faktor yang akan dan turut mempengaruhi perubahan-perubahan dalam hal produksi, pendapatan dan kesejahteraan, dan faktor ini antara lain lingkungan alam, hama dan penyakit, dukungan harga dan ketersediaan pasar.



Gambar 3.2. Tingkatan Tujuan Penyuluhan

### 3.5. Pelaksana dan Sasaran Penyuluhan

Uraian di atas menunjukkan secara sekilas tentang siapa pelaksana dan kelompok sasaran (*target groups*) dari suatu program penyuluhan. Mengacu kepada UU No. 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, kehutanan dan perikanan, pelaksana penyuluhan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- (1) Penyuluhan pertanian yang berstatus pegawai negeri
- (2) Penyuluh pertanian swadaya, dan
- (3) Penyuluh swasta – yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan agribisnis seperti perusahaan tembakau, perusahaan unggas, perusahaan jamu, dan lainnya. Termasuk juga dalam kategori ini adalah perusahaan jasa konsultan agribisnis pertanian.

Dalam hal sasaran penyuluhan, maka secara umum penyuluhan pertanian, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan ditunjukkan kepada kelompok-kelompok sasaran sebagai berikut:

- (1) *Pelaku utama dalam sistem agribisnis* pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
- (2) *Keluarga dari pelaku utama* yang seringkali berpengaruh dalam pembuatan keputusan dan adopsi inovasi pertanian, kehutanan dan lainnya.
- (3) *Pelaku lain dalam system dan rantai nilai agribisnis* – dari subsistem input, proses produksi, pengolahan, dan pemasaran.

### **3.6. Ringkasan**

Pemahaman yang benar dan tepat tentang definisi *penyuluhan* menjadi dasar untuk dapat berpikir dan bertindak benar dalam menempatkan posisi dan peran penyuluhan sebagai *ilmu dan pendekatan* yang akan mendukung setiap usaha untuk mewujudkan tingkat hidup yang lebih baik secara *sosial, ekonomi dan lingkungan*. Kegagalan dalam memahami definisi *penyuluhan* sering menjadikan orang menganggap remeh posisi dan peran strategis penyuluhan dalam berbagai sektor kehidupan.

*Penyuluhan* sebagai proses *pendidikan, pembelajaran, dan komunikasi* memiliki misi yang sama dengan para *pendakwah*, karena hakikat pekerjaannya adalah *mengajak orang-orang* ke arah kebaikan melalui *peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan merubah sikap untuk mau atau tidak mau melakukan sesuatu*. Jika ini dibawa dalam konteks *petani dan pertanian*, maka ini bermakna bahwa penyuluhan adalah bagian dari *dakwah* atau *mengajak* orang-orang untuk meningkatkan derajat hidupnya, termasuk para petani dan keluarganya, dan menjadikan sektor pertanian lebih produktif, mampu memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, dan dalam kondisi sumber daya alam yang lestari.

\*\*\*

## 4. LINGKUP, FALSAFAH DAN PRINSIP-PRINSIP PENYULUHAN

### 4.1. Pengantar

Sesuai dengan definisi penyuluhan yang diuraikan pada Bab terdahulu bahwa penyuluhan adalah proses Pendidikan non-formal, proses komunikasi, dan proses pembelajaran, yang kesemuanya ditujukan untuk *merubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan*, yang disebut juga perubahan perilaku. Perubahan-perubahan ini kemudian akan berujung pada terjadinya *perubahan tindakan atau praktik*, yang kemudian akan menghasilkan perubahan lain, yang jika dalam sistem usaha tani berarti *peningkatan produksi, pendapatan, dan ujungnya kesejahteraan*. Jika ini yang menjadi inti atau makna atau tujuan dari kegiatan penyuluhan, maka sesungguhnya kegiatan seperti ini juga menjadi kegiatan yang berlangsung tidak saja pada sektor pertanian, tetapi dalam sektor kehidupan lainnya. Mengingat bahwa buku ini khusus membahas tentang penyuluhan pada sektor pertanian, maka bab ini akan secara khusus membahas tentang lingkup penyuluhan dalam sektor atau bidang pertanian.

### 4.2. Lingkup Penyuluhan

Lingkup Penyuluhan atau *Scope of Extension* menjawab pertanyaan “Apa saja sebenarnya yang menjadi fokus atau materi penyuluhan? Apakah hanya berurusan dengan bagaimana meningkatkan produksi pertanian? Ataukah juga membantu petani dan keluarganya dalam hal-hal yang lain seperti bagaimana mengolah hasil-hasil pertanian sehingga menghasilkan nilai tambah, bagaimana memasarkan hasil-hasil pertanian?”



Secara tradisional, lingkup atau cakupan kegiatan penyuluhan dapat dirumuskan dengan ketiga ungkapan berikut ini:

- (1) ***Bertani lebih baik*** (better farming) – penguasaan terhadap teknik produksi tanaman, pepohonan, ternak, ikan, kesuburan tanah, pengelolaan SDA, dan lainnya.
- (2) ***Berusaha tani lebih menguntungkan*** (better business) – penguasaan terhadap aspek ekonomi & pemasaran
- (3) ***Hidup lebih sejahtera*** (better living) – penguasaan terhadap aspek gizi, kesehatan, kebersihan, pendidikan, dan lainnya.

Ungkapan ini menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya terbatas pada upaya-upaya membantu dan mendukung petani untuk meningkatkan produksi melalui pemberian materi penyuluhan dalam hal teknologi produksi, tetapi juga memberikan materi yang terkait dengan bagaimana menghitung keuntungan dan biaya dalam usaha tani sehingga petani memiliki kemampuan dalam mengelola usahanya secara ekonomi dan menguntungkan. Selain itu, penyuluhan juga belum cukup jika hanya mendukung petani dalam meningkatkan pendapatan dan keuntungan dalam mengelola usaha taninya, tetapi juga seharusnya mendidik petani untuk mampu memanfaatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan petani dan keluarganya, termasuk dalam mengelola pendapatannya bagi upaya-upaya investasi dan peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya. Saran-saran atau anjuran-anjuran tentang pengelolaan pendapatan bagi investasi yang menjanjikan di masa depan juga menjadi bagian dari kegiatan penyuluhan.

Dalam konteks penyuluhan di sektor kehutanan, maka beberapa pertanyaan berikut memberikan arah terhadap lingkup kegiatan penyuluhan:

- (1) Konservasi hutan?
- (2) Pemanfaatan & pengelolaan hutan?
- (3) Prosesing & pemasaran hasil hutan?
- (4) Pemanfaatan jasa lingkungan?

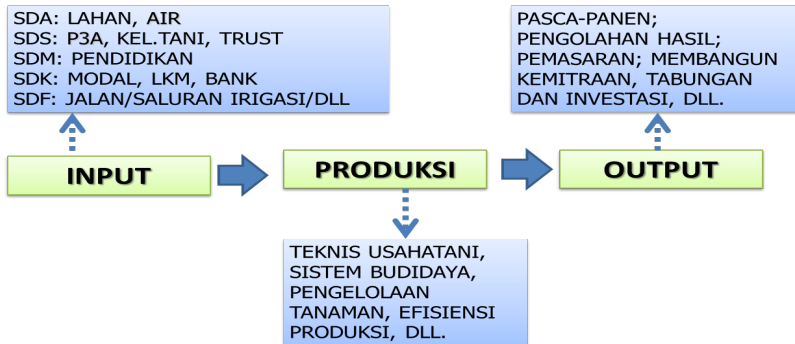
Tabel 4.1. Lingkup Penyuluhan dalam Subsektor Kehutanan

Rumusan dalam PP.No 6 Tahun.... yang mencerminkan lingkup kegiatan penyuluhan dalam sektor kehutanan
Pasal 17
(1) Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
(2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
a. pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasa lingkungan;
c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
Bagian Ketiga Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung Paragraf 1 Umum Pasal 23
(1) Pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui kegiatan:
a. pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau
c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
(2) Dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 2 Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Lindung Pasal 24
(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:
a. budidaya tanaman obat;
b. budidaya tanaman hias;
c. budidaya jamur;
d. budidaya lebah;
e. penangkaran satwa liar;
f. rehabilitasi satwa; atau
g. budidaya hijauan makanan ternak.
Paragraf 3 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung Pasal 25
(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:
a. pemanfaatan jasa aliran air;
b. pemanfaatan air;
c. wisata alam;
d. perlindungan keanekaragaman hayati;
e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
(2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:
a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
b. mengubah bentang alam; dan
c. merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.

Lingkup penyuluhan juga dapat dijelaskan melalui sistem agribisnis berikut ini:

- (1) **Sistem inputs** (searching & managing inputs) – penangkaran & industrinya, pengelolaan SDA/lahan & air, pengadaan & bisnis saprodi, dan lainnya.
- (2) **Sistem produksi** (production process) – teknik produksi tanaman, pohon, ikan, ternak
- (3) **Sistem pasca panen** (processing & marketing) – pengolahan dan pemasaran hasil, informasi pasar, kemitraan.

Ketiga komponen dalam sistem agribisnis ini menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan tidak cukup memberi perhatian hanya pada bagaimana cara untuk meningkatkan produksi dengan meningkatkan ketrampilan petani dalam hal budidaya, tetapi seharusnya juga mencakup bagaimana mendapatkan dan mengembangkan sistem input, dan bagaimana aspek pengolahan dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan. Kegagalan yang terjadi dalam kegiatan penyuluhan selama ini juga disinyalir karena ketidakmampuan sistem penyuluhan dalam mendukung petani dalam mengelola kegiatan sebelum dan setelah proses produksi (di luar sistem usaha tani). Petani seringkali kehilangan semangat dan motivasinya karena produksinya tidak mampu dijual dengan harga yang layak dan tidak mampu untuk diolah untuk mendapatkan nilai tambah. Oleh karena itu, maka yang menjadi tugas penyuluh adalah bagaimana mendukung petani agar menguasai tidak saja aspek budidaya, tetapi juga aspek pemasaran, pasca panen dan sistem inputnya. Gambar 4.1 menunjukkan lingkup penyuluhan dalam perspektif sistem agribisnis.



Gambar 4.1. Lingkup Penyuluhan dalam Sistem Agribisnis

Konsep analisis rantai nilai juga dapat memberikan gambaran yang utuh tentang lingkup kegiatan penyuluhan, dan akan dibahas dalam Bab lain dalam buku ini.

### **Perspektif lain dari lingkup penyuluhan**

Menyadari kompleksitas kegiatan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, maka belakangan muncul konsep-konsep yang menempatkan pentingnya pendekatan sistem dan terintegrasi dalam pembangunan. Konsep yang dikembangkan oleh Team Peneliti ACIAR misalnya menunjukkan tentang pentingnya upaya-upaya pendekatan yang terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu dalam *rentangan hulu, tengah dan hilir*. Kegiatan pembangunan dan aktivitas apapun yang dilakukan di posisi hulu seringkali membawa dampak yang kurang baik pada kondisi sosial ekonomi dan lingkungan di kawasan tengah dan hilir. Ini berimplikasi pada pentingnya pendekatan penyuluhan pada keseluruhan sub-sistem, yaitu di lingkungan hulu, tengah dan hilir. Penyuluhan yang efektif di kawasan hulu, seperti kegiatan penyuluhan kehutanan, akan dapat menjamin keberlanjutan sistem pengelolaan hutan, dan ini pada gilirannya akan menjadi jaminan bagi keberlangsungan suplai sumber daya air untuk keperluan irigasi pertanian, dan kebutuhan akan air bersih bagi penghidupan masyarakat (Muktasam A. , 2017).

Lingkup penyuluhan lebih luas ketika dipahami bahwa penyuluhan dibutuhkan untuk menyadarkan orang dan merubah perilakunya serta merubah praktiknya melalui proses komunikasi informasi dan Pendidikan. Kelsey and Hearne (1967) mengidentifikasi 9 lingkup program, yang juga menjadi lingkup program penyuluhan, yaitu:

- (1) Efisiensi dalam produksi pertanian
- (2) Efisiensi pemasaran, distribusi dan pemanfaatan
- (3) Konservasi, pengembangan dan penggunaan sumber daya alam
- (4) Pengelolaan usaha tani dan rumah tangga
- (5) Kehidupan keluarga petani
- (6) Pengembangan pemuda tani
- (7) Pengembangan kepemimpinan
- (8) Pengembangan masyarakat dan daerah pedesaan
- (9) Hubungan publik.

#### **4.3. Falsafah Penyuluhan**

Falsafah didefinisikan sebagai *anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup*. Jika definisi ini dibawa dalam konteks penyuluhan, maka falsafah penyuluhan ditafsirkan sebagai suatu ekspresi atau ungkapan sesuatu yang ideal (prinsip-prinsip), maksud dan tujuan dari penyuluhan. Falsafah membantu menginspirasi dan memberi pedoman kepada mereka yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Demikian pula halnya dengan masyarakat petani. Petani dan pelaku usaha pertanian lain, pada umumnya tinggal dan berusaha di desa dengan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Mereka merupakan pelaku utama pembangunan pertanian yang perlu mendapatkan perhatian dan pelayanan prima dari pemerintah dan penyelenggara penyuluhan pertanian lainnya.

Petani dan pelaku usaha pertanian lain harus diberikan peluang dan kesempatan untuk mengembangkan usaha tani yang berdaya saing melalui peningkatan kompetensi, penyediaan informasi dan teknologi serta fasilitas permodalan, dengan filosofi dasar *menolong orang agar dapat menolong dirinya, keluarga dan masyarakatnya*.

- (1) "MENOLONG ORANG AGAR MEREKA DAPAT MENOLONG DIRINYA SENDIRI" (HELPING PEOPLE TO HELP THEMSELVES)
- (2) "TIDAK MEMBERI IKAN TETAPI MENGAJARKAN BAGAIMANA Mencari IKAN – MEMBERI PANCING"
- (3) "BEKERJA BERSAMA" PETANI & BUKAN "BEKERJA UNTUK" PETANI

- (1) Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab *فلسفة*, yang juga diambil dari bahasa Yunani; *Φιλοσοφία* philosophia. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata (*philia* = persahabatan, cinta dsb.) dan (*sophia* = "kebijaksanaan"). Sehingga arti harafiahnya adalah seorang "pencinta kebijaksanaan" atau "ilmu". Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya. Dalam bahasa Indonesia seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut "filsuf". Definisi kata filsafat bisa dikatakan merupakan sebuah problem falsafi pula. Tetapi, paling tidak bisa dikatakan bahwa "filsafat" adalah *studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis*. [1] ini didalami tidak dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan problem secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, serta akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektik. Dialektik ini secara singkat bisa dikatakan merupakan sebuah bentuk dialog. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa.
- (2) Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, dan *couriosity* 'ketertarikan'.
- (3) Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis,

konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesien adalah benar atau berguna.

- (4) Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah pelbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut.
- (5) Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki; yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Ini lah yang disebut potensi untuk menindaki.

Beberapa falsafah penyuluhan antara lain (As'ari, P.):

- (1) *Falsafah mendidik/pendidikan* (bukannya klien “dipaksa-terpaksa terbiasa”)
 

Ki Hajar Dewantoro (Syarif Tayeb, 1977) menyebutkan bahwa dalam proses pendidikan digunakan falsafah: “hing ngarsa sung tulada (memberi/menunjukkan arah akan perubahan), hing madya mangan karsa (merangsang terjadinya perubahan), tut wuri handayani (mengembangkan dan mewujudkan potensi klien).
- (2) *Falsafah pentingnya individu*: Pentingnya individu ditonjolkan dalam pendidikan/penyuluhan pada umumnya, sebab potensi diri pribadi seseorang merupakan hal yang tiada taranya untuk berkembang dan dikembangkan.
- (3) *Falsafah Demokrasi*: Klien diberi kebebasan untuk berkembang agar mereka dapat mandiri sekaligus dapat bertanggungjawab sesuai dengan perkembangan intelektualnya.
- (4) *Falsafah Bekerjasama*: Falsafah Ki Hadjar Dewantoro “hing madya mangan karsa” mengandung makna adanya kerjasama antara penyuluh/agen pembaruan dengan klien. Penyuluh bekerjasama dengan klien agar klien aktif berprakarsa (dalam proses belajar) mengembangkan usaha bagi dirinya.
- (5) *Falsafah “Membantu Klien Membantu Diri Sendiri.”* Thompson Repley Bryant (Vines dan Anderson, 1976 :81 dalam Asngari, 2001), seorang penyuluh kawakan Amerika Serikat, menggaris

bawahi falsafah ini dengan mengatakan: Makna falsafah ini menunjukkan landasan orientasi pentingnya individu membantu diri sendiri. Dari falsafah ini pula dikembangkan landasan kegiatan "dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka."

- (6) *Falsafah Kontinyu/berkelanjutan*: Dunia berkembang, manusia berkembang, ilmu berkembang, teknologi berkembang, sarana berkembang, usaha berkembang, jadi harus sesuai dengan perkembangan: 1) materi yang disajikan, 2) cara penyajian, dan 3) alat bantu penyajian.
- (7) *Falsafah Membakar Sampah* (secara tradisional, baik individual, maupun berkelompok).
  - a. Ini analogi; kemungkinan sampahnya "basah semua" siram dengan minyak tanah (jangan sekali-kali dengan bensin) lalu dibakar (kadang-kadang perlu beberapa kali disiram minyak tanah dan dibakar sampai ada yang kering dan merambat mempengaruhi kekeringan yang lain), ini pendekatan kelompok yang semuanya belum membangun.
  - b. Bagi seorang individu, falsafah ini pun berlaku, dengan bertahap penuh kesabaran menunggu perkembangan. Falsafah ini memang harus dilandasi adanya kesabaran menunggu perkembangan individu klien. Inilah kunci proses mendidik/menyuluh untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi individu lebih berdaya dan mandiri. Individu lebih berdaya sebagai hasil mendinamiskan diri, sehingga individu mampu berprestasi prima secara mandiri

#### **4.4. Asas Penyuluhan**

Penyuluhan pertanian diselenggarakan berasaskan demokrasi, kesetaraan, manfaat, keberlanjutan, keterpaduan, keseimbangan, kebersamaan dan berkeadilan.

- (1) *Penyuluhan pertanian berasaskan demokrasi* dimaksudkan bahwa penyuluhan pertanian harus diselenggarakan secara demokratis antara pemerintah, swasta, petani, pelaku usaha pertanian lainnya serta warga masyarakat lainnya.



- (2) *Penyuluhan pertanian berasaskan kesetaraan* dimaksudkan bahwa hubungan antara penyuluh pertanian, petani dan pelaku usaha pertanian lainnya harus merupakan mitra sejajar.
- (3) *Penyuluhan pertanian berasaskan manfaat* dimaksudkan bahwa penyuluhan pertanian harus memberikan manfaat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, pendapatan dan kesejahteraan petani.
- (4) *Penyuluhan pertanian berasaskan keberlanjutan* merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan dan perilaku petani semakin baik guna terwujudnya kemandirian petani.
- (5) *Penyuluhan pertanian berasaskan berkeadilan* yaitu petani dan pelaku usaha pertanian lainnya harus mendapatkan pelayanan yang sama secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi dan kebutuhan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.
- (6) *Penyuluhan pertanian berasaskan keterpaduan* yaitu penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus dilaksanakan secara terpadu antara kepentingan program nasional, program daerah, sektoral, dan kepentingan masyarakat.
- (7) *Penyuluhan pertanian berasaskan keseimbangan* yaitu agar setiap penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus memperhatikan keseimbangan antara inovasi dengan kearifan masyarakat setempat, kesetaraan gender, keseimbangan pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan dan keseimbangan antara kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif masih tertinggal.
- (8) *Penyuluhan pertanian berasaskan kebersamaan* yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus diselenggarakan secara sinergis bersama dengan kegiatan pembangunan pertanian dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis.

## 4.5. Prinsip Penyuluhan

**Prinsip** adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Bagi orang penyuluhan, prinsip penyuluhan adalah sebagai berikut:

(1) **Penyuluhan adalah kegiatan pendidikan:**

- Penyuluhan bersifat demokrasi, sukarela & tanpa paksaan
- Informal/non-formal
- Kurikulum disusun bersama
- Metode demonstrasi menjadi pilihan

(2) **Penyuluhan berbasas kegunaan:**

- Penyuluhan dilaksanakan atas dasar keadaan nyata
- Sesuai kepentingan & kebutuhan sasaran
- Rencana kerja disusun & disepakati bersama
- Penilaian hasil sesuai dengan kemajuan/perubahan perilaku sasaran

(3) **Penyuluhan ditujukan langsung kepada pribadi-pribadi maupun kepada masyarakat:**

- Pendekatan penyuluhan – perorangan maupun kelompok
- Kunjungan usaha tani atau demonstrasi & studi banding

## 4.6. Ringkasan

*Penyuluhan* sebagai proses pendidikan non-formal, proses pembelajaran, dan proses komunikasi memiliki lingkup yang cukup luas, baik menyangkut pertanian maupun non-pertanian. Hal ini dapat dimengerti karena esensi dari setiap kegiatan penyuluhan adalah kegiatan untuk merubah perilaku orang-orang agar meningkat *pengetahuan, keterampilan, dan berubah sikapnya*, yang kemudian bermuara pada terjadinya *perubahan tindakan (Adopsi)*. Sejalan dengan ini, maka ada yang menamai *penyuluhan* dengan *penyuluhan pembangunan* dan bukan *penyuluhan pertanian*.

Buku ini memberi fokus pada *sektor pertanian*, dan oleh karena itu diberi judul *Penyuluhan Pertanian*, karena kegiatan merubah perilaku yang banyak disorot dalam buku ini adalah kegiatan merubah perilaku *petani dan keluarganya*. Bab ini telah membahas dengan rinci *lingkup atau scope dari kegiatan penyuluhan*, yaitu penyuluhan pertanian dalam arti luas yang mencakup semua subsektor pertanian, dari *tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan*. Lingkup penyuluhan pertanian yang dibahas dalam bab ini juga mencakup keseluruhan *sistem agribisnis*, dari subsistem *inputs, proses produksi, pengolahan, dan pemasaran*. Lingkup penyuluhan juga dibahas dalam konteks *better farming (bertani lebih baik), better business (berbisnis lebih baik), dan better living (hidup lebih baik)*. Istilah-istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pesan-pesan penyuluhan tidak saja bagaimana *meningkatkan produksi (better farming)*, tetapi juga bagaimana agar usaha atau bisnis pertanian *menguntungkan (better business)*, dan *kehidupan keluarga petani menjadi lebih baik dan sejahtera (better living)*.

\*\*\*

## 5. PRINSIP PENDIDIKAN ORANG DEWASA

### 5.1. Pengantar

Mengingat bahwa *sasaran penyuluhan pertanian* adalah *petani dan keluarganya* serta *masyarakat pada umumnya* – di desa maupun di kota (*rural and urban agriculture*), yang terdiri dari orang-orang dewasa - *bapak, ibu dan anaknya*, maka penting untuk memahami proses-proses pendidikan yang berlaku bagi orang dewasa – Andragogi (Burns, 1998; Justice & Jamienson, 1999; Klatt, 2000). Pemahaman ini akan menjadi pedoman bagi seorang *penyuluh pertanian* atau *agen pembaharu (change agents)* untuk dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan yang berhasil dan efektif.

Perubahan lingkungan di era informasi dan ekonomi global mengharuskan setiap orang *yang tidak mau tertinggal* untuk selalu *belajar*, menambah *pengetahuan, wawasan, dan keterampilan*. Era informasi dan globalisasi telah berpengaruh sangat nyata dalam proses perubahan sosial, interaksi sosial, pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam, komunikasi, dan lainnya. Arus informasi yang menembus semua batas wilayah, negara dan pedesaan, telah menjadi sumber perubahan sosial yang besar. Globalisasi ekonomi, pun telah mendorong ke arah proses persaingan internasional dalam proses jual-beli barang dan jasa. Barang-barang impor, termasuk dalam bidang agribisnis, menjadi pesaing yang berat bagi produk-produk agribisnis dalam negeri. Kemampuan untuk berbenah diri melalui proses belajar, karenanya menjadi sangat penting dan mutlak untuk dilakukan, dan ini harus dilakukan pada semua lapisan sosial, dari aparat birokrasi (pembuat kebijakan), swasta hingga masyarakat - petani dan pedagang. Pendekatan-pendekatan yang sesuai seharusnya menjadi perhatian penting guna menciptakan proses belajar efektif di kalangan *orang dewasa* yang tidak mau tertinggal oleh jaman dan kemajuan.

## 5.2. Belajar, Mengajar dan Fasilitasi

Berlo (1960) mendefinisikan ‘belajar’ dalam perspektif ‘komunikasi intrapersonal’ - stimulus - respons. Dalam perspektif ini, ‘belajar’ diartikan sebagai “*a change in the stable relationship between (a) a stimulus that the individual organism perceives and (b) a response that the organism makes, either covertly or overtly*” (p.76). Mengacu kepada definisi ini, Berlo lebih lanjut menegaskan bahwa proses belajar terjadi jika salah satu dari yang berikut ini terjadi:

- (1) Jika seseorang terus membuat sejumlah respons yang sama terhadap stimulus yang berbeda, atau
- (2) Jika seseorang terus membuat sejumlah respons yang berbeda terhadap stimulus yang sama.

Paul Leagans (1961) mendefinisikan ‘*learning experience*’ (pengalaman belajar) sebagai “*the mental and or physical reaction a learner makes to seeing or hearing or doing the things to be learned, through which he gains meanings and understandings useful in solving new problems*” (p.186) (Leagans, 1961).

Belajar seringkali diartikan sebagai proses merubah pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Seseorang yang terlibat dalam proses belajar akan meningkat pengetahuannya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dsb. Orang yang belajar juga dapat merubah sikapnya dari tidak tertarik menjadi tertarik, tidak setuju menjadi setuju. Belajar juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan.

Bagaimana proses belajar dirancang sering menentukan kegunaan suatu pengetahuan yang dipelajari (Klatt, 2000). Sebagian orang percaya bahwa hanya proses belajar yang didasarkan atas pengalaman yang akan menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Akan tetapi belajar melalui pengalaman, tanpa dilaksanakan dalam proses pendidikan yang *terstruktur* atau ‘*pelatihan*’, adalah suatu proses lamban dan kurang bermakna. Tanpa suatu proses yang terstruktur dan terarah, seperti halnya dalam program-program workshop dan pelatihan, maka tidak ada jaminan bahwa ‘*pengalaman*’ akan

memberikan semua kebutuhan dalam proses belajar. Tentu saja ada masalah efisiensi. Proses belajar dari pengalaman adalah suatu proses yang butuh waktu. Walau proses belajar melalui program-program *workshop* dan *pelatihan* merupakan pengganti dan bentuk sederhana dari proses belajar melalui pengalaman, keduanya akan sangat bermanfaat ketika dikombinasikan dengan pendekatan ‘magang’, yang mendorong proses belajar. Keduanya membantu dalam mengontrol dan menciptakan situasi lingkungan yang aman, dan melalui pemberian umpan balik yang cepat kepada peserta.

*Mengajar*, di sisi lain diartikan sebagai suatu proses mentransfer pengetahuan dan ketrampilan kepada sasaran belajar (murid), yang cenderung menunjukkan peran dominan seorang pengajar atau ‘guru’. Mengajar cenderung menempatkan ‘pelajar’ dalam posisi pasif, menerima dan tergantung. Materi yang dipelajari lebih banyak ditentukan oleh pengajar dan bukan pelajar. Prinsip-prinsip pendidikan pada lembaga pendidikan formal seperti sekolah umumnya menggunakan pendekatan ini, yang lebih dikenal sebagai ‘Pedagogi’ (lihat Tabel 1).

*Fasilitasi*, didefinisikan sebagai perancangan dan pengelolaan proses dan struktur dalam suatu proses belajar guna membantu ‘pelajar’, individu maupun kelompok, untuk melakukan sesuatu (termasuk menambah pengetahuan dan ketrampilan) guna mencapai kesuksesan (Burns, 1998; Justice & Jamienson, 1999).

### **5.3. Andragogi dan Pedagogi**

Istilah “Andragogi” diperkenalkan oleh Knowles (1978) sebagai ilmu yang mengkaji tentang proses belajar orang dewasa, sebagai lawan dari “Pedagogi” sebagai ‘the art and science of teaching children (proses belajar anak-anak). Kedua konsep ini berbeda dalam beberapa hal, seperti terangkum dalam Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Perbedaan Pedagogi dan Andragogi

Aspek	Pedagogi	Andragogi
Konsep 'pelajar'	Pelajar tergantung penuh pada pengajar.	Peserta 'menentukan arahnya sendiri dan tidak tergantung pada fasilitator.
Peran 'pengalaman pelajar'	Pelajar memiliki pengalaman terbatas tentang apa yang dipelajari. Karena itu, pengajaran adalah proses transmisi langsung dari pengajar kepada pelajar.	Peserta memiliki pengalaman yang banyak, berkualitas dan relevan untuk dimanfaatkan dalam proses belajar. Mereka datang ke pelatihan membawa banyak 'prasangka' dan 'konsep-diri' yang telah dibangun dalam proses panjang kehidupannya.
Peran 'pengajar'	Pengajar sebagai 'guru'	'Fasilitator'
Kesiapan 'pelajar' untuk belajar	Pelajar akan belajar ketika diminta untuk belajar.	Peserta hanya belajar ketika mereka difasilitasi untuk merasakan kebutuhan untuk 'tau' dan 'mengerjakan' sesuatu. Kesiapan mereka untuk belajar seringkali dimunculkan ketika situasi atau suasana dirubah.
Orientasi belajar 'pelajar'	Orientasi belajar pada materi pelajaran.	Peserta berorientasi pada issue, kebutuhan dan masalah nyata yang dihadapi.
Motivasi 'pelajar' untuk belajar	Pelajar termotivasi untuk belajar karena tekanan dari luar.	Peserta umumnya termotivasi untuk belajar karena tekanan-tekanan dari dalam dirinya seperti kepercayaan diri, penghargaan, dan kualitas hidup.

#### 5.4. Prinsip Belajar Orang Dewasa dan Implikasinya

Malcolm Knowles (1980) dikenal sebagai 'the father of adult-learning theory', yang berjasa memperkenalkan istilah 'andragogi' (sebagai proses belajar anak-anak) dari pedagogi (sebagai proses belajar anak-anak). Memahami kerangka logis dari pembedaan ini, tiga prinsip berikut ini akan sangat membantu dalam memfasilitasi proses belajar dalam program-program penyuluhan.

- (1) Orang dewasa membawa ‘setumpuk pengalaman’ ke dalam workshop dan pelatihan, dan karenanya memiliki banyak hal untuk disumbangkan dan dipertukarkan.
- (2) Orang dewasa menginginkan workshop dan pelatihan yang terfokus pada isu dan masalah kehidupan nyata ‘disini dan sekarang’ dari pada situasi akademik formal dan kaku.
- (3) Orang dewasa sudah terbiasa dalam suasana bebas, aktif dan ‘self-directed learning’.

Ketiga prinsip ini terkait namun dapat dibedakan. Asumsi-asumsi dan praktik yang dapat dikembangkan atas dasar ketiga prinsip tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Orang dewasa membawa ‘setumpuk pengalaman’ ke dalam kegiatan penyuluhan (termasuk workshop dan pelatihan), dan karenanya memiliki banyak hal untuk disumbangkan dan dipertukarkan

*Asumsi-asumsi di balik prinsip ini adalah:*

- (1) Proses belajar orang dewasa adalah unik untuk masing-masing individu. Setiap orang belajar sesuai dengan keinginannya dan dengan caranya sendiri.
- (2) Orang dewasa telah ‘menginvestasikan’ banyak hal untuk pengalamannya.
- (3) Sangat sedikit orang dewasa mau atau berharap untuk merubah ‘konsep-dirinya’ (self-concept). Jika pun mereka mau merubah sesuai yang paling dalam dari unsur kepribadiannya/kebiasaannya, ini harus terjadi atas kesadarannya sendiri. Bukan menjadi tugas pelatih atau fasilitator untuk memaksa terjadinya perubahan.



*Dalam praktik pembelajaran, prinsip ini merekomendasikan:*

- (1) Orang dewasa akan selalu menguji atau mengaitkan ‘materi’ yang diperoleh dalam workshop atau pelatihan dengan apa yang telah mereka tahu. Dorong peserta untuk menjawab pertanyaan atas dasar pengalaman mereka.
- (2) Agar proses belajar berlangsung, fasilitator perlu mendorong agar peserta bertanya dan menghargai perbedaan. Peserta workshop dan pelatihan tidak akan ‘membeli’ jawaban anda; yang mereka perlukan adalah menemukan jawaban dari kalangan mereka sendiri.
- (3) Orang dewasa tidak mau mengambil resiko dengan seolah-olah tampak ‘bodoh’ atau sejenisnya. Karena adalah penting untuk selalu mempertahankan ‘kepercayaan diri’ mereka selama pelatihan.
- (4) Kembangkan iklim pelatihan dan workshop yang mendukung dan menantang. Jangan persoalkan kesalahan dan melakukan hal-hal yang menghukum. Belajar hanya dapat difasilitasi dan tidak dipaksakan. Kadang-kadang dalam proses belajar orang dewasa, kesalahan-kesalahan sengaja didorong dan tidak sekedar muncul secara kebetulan. Ingat statemen, “jangan takut salah, kita belajar dari kesalahan”. Kesalahan-kesalahan menciptakan perbedaan, dan perbedaan memfasilitasi belajar. Sementara orang dewasa perlu berusaha keras untuk belajar pada tingkatan yang lebih bermakna, mereka juga perlu dukungan, dihargai dan diterima. Mereka akan selalu terlibat dan berkonsentrasi apabila situasi pelatihan mendukung. Mereka akan selalu bertahan jika situasi mengancam dan menakutkan.
- (5) Agar proses belajar efektif, materi harus disampaikan dalam tahapan-tahapan yang bisa dikelola dengan baik. Dalam hal ini, orang dewasa akan menambah pemahamannya ketika mereka belajar, dan lama kelamaan menguasai materi secara lengkap dan utuh.
- (6) Orang dewasa ingin umpan balik, misalnya bagaimana mereka memperoleh kemajuan dalam pelatihan, dan bagaimana mereka dapat lebih baik. Reinforcemen positif juga diperlukan,

misalnya ketika mereka belajar ketrampilan baru (beri tepu tangan untuk grup A...”).

Orang dewasa menginginkan penyuluhan (workshop dan pelatihan) yang terfokus pada isu dan masalah kehidupan nyata 'disini dan sekarang' dari pada situasi akademik formal dan kaku

*Asumsi-asumsi dibalik prinsip ini:*

- (1) Orang dewasa melihat 'belajar' sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir, ketimbang belajar sebagai tujuan akhir.
- (2) Belajar adalah sukarela. Belajar harus memiliki arti bagi dirinya dan memiliki nilai langsung. Orang dewasa hanya akan mau belajar apa yang mereka mau dan mengerjakan apa yang mereka mau.

*Dalam praktik, prinsip ini menganjurkan:*

- (1) Yakinkan bahwa pelatihan dan workshop memberi informasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan nyata peserta. Orang dewasa ingin sesuatu dalam perspektif 'di sini dan sekarang' dan bukan sesuatu yang dapat digunakan untuk waktu yang masih jauh ke depan.
- (2) Jelaskan kepada peserta pelatihan maksud dan keuntungan dari pelatihan, dan proses yang akan dilalui. Orang dewasa akan merasa tidak tertarik ketika mereka atau waktunya terbuang percuma. Mereka harus tahu apa yang ada "di dalamnya - pelatihan" untuk mereka "bawa pulang".
- (3) Selalu lakukan evaluasi kemajuan dan review. Orang dewasa senang melihat kemajuan yang telah mereka perbuat.

Orang dewasa sudah terbiasa dalam suasana bebas, aktif dan 'self-directed learning'

*Asumsi dibalik prinsip ini adalah:*

- (1) Belajar terbaik adalah dilakukan atas dasar pengalaman
- (2) Kebanyakan orang dewasa senang untuk bekerjasama dengan lainnya. Fasilitasi agar terjadi kerjasama yang kondusif bagi proses berbagi pengalaman diantara peserta.

*Dalam praktik, prinsip ini menganjurkan:*

- (1) Orang dewasa harus diberi kesempatan lebih dari sekedar hanya partisipasi. Partisipasi perlu didorong, didukung, dan diminta, khususnya ketika peserta membayar untuk hadir dan ikut dalam suatu pelatihan. Jangan mempermalukan mereka dan jangan juga menyebabkan mereka 'sembunyi'. Bertindaklah seakan-akan 'partisipasi aktif merupakan norma', walaupun terkadang ini tidak mudah. Walaupun dalam beberapa jam pertama kegiatan orang dewasa tidak aktif, beberapa waktu kemudian biasanya mereka akan 'mendekat', berpartisipasi aktif dan lebih menikmati suasana pelatihan.
- (2) Agar proses belajar sukses, orang dewasa perlu melakukan sesuatu. Mereka harus dilibatkan untuk melakukan sesuatu - latihan. Orang dewasa perlu 'belajar sambil berbuat' (*learning by doing*), dan melakukan kesalahan-kesalahan. Mereka perlu menemukan solusi atas dasar pencarian oleh mereka sendiri. Tidaklah cukup kalau orang dewasa sekedar mendengar, membaca dan melihat presentasi film atau slide.
- (3) Orang dewasa perlu untuk di dengar dan diajak bicara. Walaupun fasilitator dalam sebuah pelatihan perlu mengarahkan dan mengelola waktu secara efektif, 'mengarahkan' seharusnya merupakan 'pengecualian' ketimbang 'aturan'.

Menambah ketiga prinsip tersebut, penulis lain menyatakan beberapa prinsip berikut dalam pembelajaran orang dewasa (Burns, 1998):

- (1) Kesiapan belajar seseorang dewasa tergantung dari jumlah pengalaman yang dimilikinya. Semakin banyak pengalaman

- seseorang, maka semakin mudah dia menyesuaikan diri dengan informasi baru yang ada dalam suatu proses belajar.
- (2) Semakin beragam pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin mudah dia menyesuaikan diri dengan keragaman pembelajaran yang dilaluinya.
  - (3) Guna memaksimalkan pembelajaran, informasi harus disajikan dalam pola yang terorganisasi secara baik, berproses dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, atau diorganisir dalam suatu konsep. Titik awal dari pengorganisasi pengetahuan bagi orang dewasa adalah terkait dengan pengetahuan dan pengalamannya.
  - (4) Materi atau bahan pembelajaran yang bermakna dan dibutuhkan akan lebih mudah dipelajari dan lama untuk diingat dibanding dengan bahan yang kurang penting atau kurang bermakna.
  - (5) Motivasi belajar yang bersumber dari dalam – intrinsik akan menghasilkan pembelajaran yang permanen – tantangannya adalah bagaimana menemukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan orang dewasa.
  - (6) Penghargaan atau pujian yang positif dalam pembelajaran orang dewasa lebih efektif dibandingkan hukuman atau pengabaian. Merasa berhasil dan meningkatnya rasa percaya diri adalah penting bagi keberlanjutan pembelajaran orang dewasa. Umpan balik terhadap kesuksesan seseorang perlu untuk disampaikan.
  - (7) Partisipasi aktif lebih menguatkan pembelajaran ketimbang partisipasi pasif. Mendorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar menghasilkan pembelajaran yang efektif dan permanen.
  - (8) Belajar melalui pengulangan akan lebih menguatkan dalam mencapai hasil, khususnya dalam hal peningkatan atau pengembangan keterampilan.
  - (9) Faktor-faktor seperti kelelahan, tekanan, kritik, konteks pembelajaran, dan hubungan pribadi dengan pengajar atau sumber mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran.

Tabel 5.2. Kondisi Belajar Orang Dewasa dan Implikasinya bagi Penyuluhan

Kondisi belajar	Implikasi bagi Penyuluh atau fasilitator
1. Orang dewasa membawa "kebutuhannya" dalam suatu situasi belajar	• Belajar harus memperhatikan kebutuhan individu & relevansi materi dengan kebutuhan
2. Orang dewasa perlu merasakan bahwa mereka diperlakukan sebagai orang dewasa	• Fasilitator tidak boleh menganggap dirinya "serba bisa", tetapi mendorong terjadinya proses belajar partisipatif
3. Orang dewasa datang dengan "pengalaman" masing-masing ke dalam suatu situasi belajar	• Fasilitator harus memanfaatkan "pengalaman" ini sebagai sumber belajar
4. Orang dewasa belajar dengan baik ketika dirinya tidak terancam	• Fasilitator harus menciptakan situasi dimana tidak muncul rasa takut dan terancam; kerjasama & bukan persaingan
5. Orang dewasa belajar dalam kecepatan yang berbeda	• Fasilitator harus menggunakan metode yang sesuai dengan kemampuan peserta belajar
6. Orang dewasa belajar dengan cara yang berbeda	• Fasilitator harus mengetahui cara belajar peserta dan harus fleksibel dalam menentukan pendekatan
7. Orang dewasa datang ke dalam suatu situasi belajar dengan membawa kepercayaan & persepsi diri masing-masing	• Fasilitator harus memiliki kemampuan "empati" & sensitif terhadap kondisi psikologis pelajar

### 5.5. Pendekatan-Pendekatan Pokok dalam Pembelajaran Orang Dewasa

Ada tiga pendekatan dalam proses belajar orang dewasa, yaitu (1) Self-directed learning, (2) Self-paced learning, dan (3) Contract learning. Rincian tentang ketiga pendekatan ini diuraikan dalam bagian berikut (Burns, 1998).

### ***Self-directed learning:***

- (1) Muncul sebagai respons terhadap keragaman PENGALAMAN orang dewasa, & kebutuhan untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi orang dewasa.
- (2) Membantu mengembangkan kemampuan untuk meneliti & menerapkan pengetahuan baru dalam situasi nyata.
- (3) Banyak orang dewasa lebih menyukai kebebasan terhadap apa yang dilakukannya
- (4) Memiliki tiga komponen penting:
  - tidak ada “materi khusus” yang menurut PENGAJAR harus disampaikan.
  - isi & proses ditentukan atas dasar minat dan kebutuhan semua peserta termasuk pengajar.
  - keberhasilan belajar diukur dengan pencapaian tujuan belajar dari masing-masing pelajar.

### ***Self-paced learning:***

- (1) Pemberian STRUKTUR dari aktivitas belajar yang memungkinkan PELAJAR belajar bahan-bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kenyamanannya.
- (2) Mengembangkan kemandirian pelajar
- (3) Efisien dalam penggunaan waktu dan sumber daya
- (4) Pelajar belajar dalam suatu “lokasi belajar” (dilengkapi sumber atau fasilitas belajar, secara perorangan atau kelompok kecil)
- (5) Kemajuan belajar dicek & pengajar dijadwalkan untuk suatu “lokasi belajar” untuk memfasilitasi, bertindak sebagai sumber & “mentes” pelajar sesuai keperluan.

### ***Contract learning:***

- (1) Konsep baru yang memungkinkan diterapkannya kedua pendekatan di atas.
- (2) Menggantikan proses belajar pasif.
- (3) Pelajar menentukan TOPIK atau kompetensi yang ingin dipelajari.

- (4) Pelajar menentukan tujuan, cara mencapai tujuan, apa yang diperlukan dan rancangan evaluasi.
- (5) Sebuah kontrak adalah sebuah kesepakatan dengan antara PENGAJAR & PELAJAR.
- (6) Kontrak biasanya tertulis dan meliputi:
  - Diagnosis awal dari kebutuhan belajar
  - Kebutuhan belajar harus diterjemahkan kedalam daftar tujuan belajar yang spesifik
  - Sumber & strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
  - Bukti atau cara pengukuran pencapaian tujuan harus ditunjukkan
  - Kriteria yang digunakan untuk menilai bukti & oleh siapa harus dijelaskan
  - Kontrak harus direview bersama dengan pengajar/fasilitator.

## 5.6. Metode-Metode Pembelajaran Orang Dewasa

### *Metode yang terfokus pada PENGAJAR*

- (1) Demonstrasi (yaitu dengan cara menunjukkan kepada peserta tentang cara atau hasil dari suatu inovasi atau teknologi; maka dikenal dua jenis metode demonstrasi, yaitu *demonstrasi cara dan demonstrasi hasil*).
- (2) Diskusi Kelompok Terarah atau Focus Group Discussion atau lebih dikenal sebagai FGD. Sumber belajar atau penyuluh mengendalikan proses diskusi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kunci yang telah dipersiapkan terlebih dahulu guna mengarahkan jalannya diskusi.
- (3) Kuliah atau dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan disebut juga sebagai “mini lecture” atau “kuliah singkat”, yang seringkali mengacu pada proses penyampaian materi secara singkat kepada peserta, yang disampaikan pada sesi khusus “teori”. Umumnya hanya berlangsung singkat yang kemudian diikuti oleh sesi praktik. Kuliah dimaksudkan sebagai bagian dalam memberikan pengetahuan awal sebelum kegiatan praktik.
- (4) Tutorial
- (5) Studi Kasus

### ***Metode KELOMPOK Berfokus PELAJAR***

- (1) *Brainstorming atau curah pendapat* yaitu sebuah metode yang umum digunakan dalam rangka mengumpulkan gagasan atau pendapat sebanyak-banyaknya, yang dilakukan oleh penyuluh atau fasilitator. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses curah pendapat ini, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada sesi pleno atau kelompok besar dan setiap peserta akan menyampaikan pendapat atau gagasannya secara lisan. Mengingat bahwa penyampaian secara lisan juga sering membatasi setiap orang untuk mengungkapkan gagasan atau pendapatnya, maka cara kedua yang digunakan oleh penyuluh atau fasilitator adalah dengan meminta setiap peserta untuk menuliskan ide atau pendapat atau gagasannya pada kertas metaplan, yang kemudian dikumpulkan atau ditempelkan pada tempat yang telah disediakan. Ide atau gagasan atau pendapat yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara bersama untuk melihat pola, struktur dan intensitas pendapat, yang kemudian dapat dikelompok-kelompokkan dan disepakati bersama. Dalam pelaksanaan brainstorming berlaku aturan “tidak ada pendapat yang benar atau salah...yang penting semua yang terpikirkan diungkapkan”.
- (2) Debat
- (3) Diskusi Kelompok Bebas
- (4) Interview
- (5) Panel
- (6) Proyek
- (7) Seminar
- (8) Workshop
- (9) Permainan, Simulasi & Main Peran
- (10) Kunjungan (Lapangan/Kantor)



## 5.7. Ringkasan

*Perubahan sosial* yang cepat di era informasi dan globalisasi ekonomi sekarang ini menuntut respons yang cepat dan terarah dari semua kalangan, individu, kelompok, organisasi dan semua pihak. Ketidakmampuan untuk memberikan respons berarti *ketertinggalan*, dan ketertinggalan berarti *stagnasi*. Salah satu bentuk respons ini adalah adanya kegiatan untuk terus menambah *wawasan, pengetahuan, dan keterampilan - belajar*, yang dalam kenyataannya ditempuh melalui kegiatan-kegiatan seperti *pelatihan, kursus, workshop, diskusi*, dan lainnya.

*Orang dewasa*, sebagai peserta belajar memiliki keunikan tersendiri dalam proses belajarnya, yang berbeda dengan *proses belajar anak-anak*. Orang dewasa belajar untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi persoalan-persoalan nyata dalam kehidupannya. Orang dewasa memiliki *banyak pengalaman*, yang juga dibawa dalam suatu situasi belajar. Oleh karena itu, proses belajar orang dewasa harus difasilitasi sedemikian rupa sehingga *pengalaman* dapat menjadi *sumber belajar* yang amat bermakna dalam kerangka perubahan perilaku (*pengetahuan, sikap dan ketrampilan*). Metode-metode yang relevan dengan karakteristik pendidikan orang dewasa juga menjadi ketrampilan yang harus dikuasai oleh para *penyuluh, pelatih atau fasilitator* dalam pendidikan orang dewasa.

\*\*\*

## 6. TEORI-TEORI DASAR PENYULUHAN

### 6.1. Pengantar

Selain pemahaman yang cukup tentang konsep *pengetahuan (knowledge)*, *keterampilan (skills, hard & soft skills)*, *sikap (attitudes)*, *aspirasi (aspiration)* dan *tindakan (practice)*, maka dalam bab ini disajikan beberapa konsep penting yang terkait dengan konsep-konsep tersebut, yaitu *persepsi*, *sikap*, *nilai* dan *orientasi nilai budaya*. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini dapat membantu menjelaskan tentang perilaku teramati (*observable behavior*) dari seseorang, khususnya petani dan keluarganya sebagai sasaran penyuluhan. Bagian akhir dari bab ini menyajikan hasil studi tentang sistem nilai dan budaya lokal yang mempengaruhi interaksi masyarakat dengan hutan, diawali dengan tinjauan teoritis dan fakta empiris tentang persepsi dan sikap masyarakat yang mempengaruhi perilakunya dalam berinteraksi dengan hutan. Tinjauan ini berguna sebagai landasan teoritis dan empiris dalam menganalisis fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan pola interaksi masyarakat dengan lingkungannya, termasuk terhadap sumber daya alam seperti hutan.

### 6.2. Konsep Persepsi

Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi adalah penginderaan, dan alat untuk memahami adalah kesadaran atau kognisi. Persepsi seseorang terhadap sesuatu objek akan sangat menentukan sikap dan tindakannya terhadap obyek itu – dalam kajian ini yang menjadi objek adalah “hutan”. Seseorang yang menganggap bahwa suatu obyek sangat menguntungkan, sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat, maka ada kecenderungan bahwa orang tersebut akan mengembangkan sikap dan tindakan yang positif terhadap obyek tersebut. Sebaliknya jika seseorang memandang suatu obyek kurang menguntungkan, rumit dan tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, maka ada kecenderungan untuk membentuk sikap dan tindakan yang negatif (Sarwono, 1999).

Selain itu persepsi dapat diartikan sebagai “bagaimana seseorang menginterpretasikan stimuli yang diterimanya” (Hawkins dan Van den Ban, 1999). Verderberg (1990) menyatakan bahwa persepsi terbentuk melalui beberapa tahapan yaitu: (1) penerimaan stimuli, (2) seleksi stimuli, (3) organisasi stimuli, dan (4) interpretasi stimuli.

**Penerimaan terhadap stimuli** dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain panca indera (melihat, meraba, mendengar, merasa, dan mencium), dan tingkat ekspose atau ketersediaan stimuli. Orang yang kelima inderanya berfungsi dengan baik tentu akan menerima lebih banyak stimuli dibanding dengan yang inderanya kurang berfungsi. Hal yang sama juga berlaku bahwa di daerah-daerah yang tingkat ketersediaan informasinya tinggi, maka ada kecenderungan bahwa orang-orang yang berada pada daerah tersebut menerima stimuli yang lebih banyak dibanding dengan daerah yang tertutup dan terisolir.

Tidak semua stimuli akan dipilih oleh seseorang. **Seleksi terhadap stimuli** dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan dan kepentingan. Petani yang merasa butuh akan teknologi konservasi akan cenderung memilih stimuli-stimuli yang terkait dengan teknologi konservasi, dan sebaliknya.

**Organisasi stimuli** dipengaruhi oleh kebiasaan dan suasana internal/psikologis seseorang. Seseorang yang terbiasa dengan suatu stimuli dalam suatu wilayah akan cenderung mengorganisir stimuli itu dengan cara yang sama walaupun berada pada lingkungan yang berbeda (terjadi dalam konteks komunikasi lintas budaya). Selain itu, seorang yang berada dalam suasana stress dan tergesa-gesa akan cenderung mengorganisir stimuli secara berbeda dengan orang yang berada dalam suasana rileks.

**Interprestasi terhadap stimuli** dipengaruhi oleh pengalaman seseorang. Pengalaman buruk yang berulang-ulang pada seorang petani dalam menerapkan suatu inovasi akan menjadi dasar dalam menginterpretasi secara negatif inovasi-inovasi pertanian berikutnya, termasuk dalam hal teknologi usaha tani konservasi. Pemberian makna yang berbeda atas suatu stimuli mampu menjelaskan tentang terjadinya

perubahan “persepsi” seseorang atau masyarakat atas obyek persepsi. Muktasam (2003) misalnya mengidentifikasi tentang berkembangnya “image” dan “persepsi” negatif masyarakat pedesaan tentang pembangunan pedesaan. Kebiasaan atau perilaku berulang-ulang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga luar (outsiders’ organizations) dalam melakukan pembangunan di pedesaan, yang cenderung membawa “dana” dan bersifat “proyek”, ternyata kemudian memunculkan “image” dan “persepsi” baru tentang “pembangunan”. “Pembangunan” kemudian analog dan bermakna “proyek” dan “pembagian uang”.

Hal yang sama dapat terjadi dan berlaku dalam persepsi manusia terhadap hutan. Jika semula hutan dipandang sebagai “karunia Tuhan yang perlu **dijaga** kelangsungan dan kelestariannya” maka boleh jadi pandangan ini berubah menjadi “hutan sebagai karunia Tuhan yang harus **dieksploitir** untuk sebesar-besarnya kepentingan ekonomi masyarakat”. Perubahan ini jelas akan terwujud pada tindakan sosial yang beda, dari “menjaga dan memelihara” kepada tindakan “merusak dan mengeksploitir” hutan.



Gambar 6.1. Ilustrasi tentang Persepsi

### 6.3. Sikap dan Pendekatan dalam Sikap

Fishbein (1990) menyatakan sikap sebagai suatu predisposisi yang dipelajari untuk memberikan respons secara konsisten, baik positif maupun negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap sesuatu yang menjadi obyek sikap. Ahli lain mencoba membahas sikap dalam tiga komponen yaitu kognitif (*pikiran*), afektif (*perasaan*) dan tingkah laku atau tindakan (*action*). Komponen kognitif mengacu pada sistem kepercayaan yang dimiliki seseorang. Komponen afektif

menunjuk pada arah atau intensitas penilaian seseorang atau reaksi emosi terhadap sesuatu yang menjadi obyek sikap. Komponen tindakan mengacu pada kecenderungan bertindak dengan cara tertentu terhadap obyek sikap (Sarwono, 1999).

Selain definisi di atas, L.L Thurstone (1946) menyatakan bahwa sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan obyek sikap (Sarwono, 1999). Menurut Hawkins (1982), sikap merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan respons terhadap sesuatu yang menjadi obyek sikap dalam cara tertentu. Hawkins mengatakan bahwa sikap tidak dapat dilihat, disentuh atau didengar. Sikap diketahui dari apa yang dikatakan atau dilakukan orang.

Beberapa ahli mengungkapkan teori tentang sikap, Heider (1958), yang dikenal dengan teori keseimbangannya menyatakan bahwa tekanan konsistensi didalam sistem kognitif sederhana, dimana afek positif dan negatif seseorang akan seimbang dengan afek positif dan negatif orang lain terhadap obyek tertentu. Leon Festinger (1957) yang dikenal dengan teori ketidaksesuaian menyatakan bahwa sikap akan berubah demi mempertahankan konsistensi dengan perilaku nyatanya. Teori ini difokuskan pada dua sumber pokok yaitu ketidakkonsistenan sikap dan perilaku, akibat pengambilan keputusan dan akibat dari perilaku yang bertentangan dengan sikap. Fishbein (1967) dan Ajzen (1975) mengembangkan teori *Reasoned Action*, berusaha mengungkapkan latar belakang atau alasan (*reason*) dari suatu tindakan (*action*) (Sarwono, 1999; Sears D, Freedman J.L, Peplau A.L, 1988).

Teori ini diawali dengan kritik terhadap teori dan pengukuran sikap yang seringkali tidak tepat dan tidak dapat memperkirakan perilaku yang timbul. Penyimpulan sikap tidak dapat dibuat hanya berdasarkan suatu tindakan pada satu saat saja, dan peramalan perilaku yang khusus pada suatu waktu dan situasi tertentu tidak dapat ditetapkan berdasarkan sikap yang umum. Cara yang lebih tepat adalah dengan menggunakan kriteria observasi ulang, apakah perilaku tertentu berulang pada waktu yang berbeda atau dengan menggunakan kriteria

tindakan berganda (berbagai perilaku berbeda yang timbul pada situasi tertentu dengan berulang-ulang).

Perubahan sikap merujuk pada pernyataan tidak setuju menjadi setuju, tidak mau menjadi mau, tidak senang menjadi senang, tidak tertarik menjadi tertarik dan seterusnya. Fokus pembahasan sikap mengacu pada komponen-komponen dalam proses komunikasi yang terdiri dari sumber, pesan, media atau saluran dan penerima, dan perubahan sikap akan sangat ditentukan oleh kredibilitas sumber, ketrampilan sumber, struktur pesan, karakteristik penerima (Triandis, 1971; Hawkins, 1982; Feldman, 1985).

#### **6.4. Orientasi Nilai Budaya dan Tindakan Sosial**

Tindakan sosial meliputi setiap jenis perilaku manusia yang diorientasikan kepada perilaku orang lain. Salah satu orientasi tindakan menurut Weber adalah tindakan tradisional yang meliputi batas perilaku yang berarti maupun tidak berarti. Tindakan tradisional dilakukan di bawah pengaruh adat dan kebiasaan, yang berkaitan dengan kebiasaan orang sehari-hari. Arti tindakan berasal dari lambang yang tidak mempunyai bentuk logis tertentu yang dilakukan dalam rasionalitas nilai. Sepanjang nilai tradisional di rasionalisasikan maka tindakan tradisional bergabung dengan tindakan rasional nilai (Giddens, 1986).

Nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu memberi kontribusi terhadap perilaku dari individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dalam suatu bentuk kebudayaan. Menurut Ember dan Ember (1990) Kebudayaan merujuk pada berbagai aspek kehidupan manusia yang meliputi cara bertingkah laku, kepercayaan-kepercayaan, sikap, dan hasil kegiatan manusia yang khas dalam suatu masyarakat atau kelompok individu tertentu. Pada intinya kebudayaan merupakan proses terus menerus menyimak kadar dinamika dari sistem nilai dan sistem kepercayaan yang mapan dalam masyarakat.

Sistem nilai budaya merupakan bagian dari sistem budaya yang merupakan aspek dari gagasan. Sistem nilai budaya adalah sejumlah

pandangan yang menyangkut soal yang paling, berharga dan bernilai dalam hidup. Sebagai inti dari sistem kebudayaan, sistem nilai budaya menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku tersebut adalah adat istiadat, sistem norma, aturan etika, aturan moral, aturan sopan santun, pandangan hidup dan ideologi pribadi. Masalah yang paling tinggi nilainya dalam hidup manusia dan yang secara universal terdapat dalam kebudayaan terdiri dari lima hal yaitu (1) makna hidup manusia, (2) makna pekerjaan, karya dan amal perbuatan, (3) persepsi manusia, (4) hubungan manusia dengan alam sekitar (5) hubungan manusia sesama manusia (Daeng, 2000).

### **6.5. Kaitan antara Sistem Nilai dan Perilaku Interaksi Manusia**

Mengacu pada kondisi yang tidak memuaskan pada sektor pertanian sebagaimana diuraikan di Bab 1, maka diperlukan pemahaman yang mendalam tentang “sistem nilai” dan “kearifan lokal” yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Masyarakat Indonesia yang dikenal religius, *jelas memiliki dan kaya dengan pengakuan-pengakuan spiritual tentang perlunya hubungan yang serasi antara setiap makhluk dan penghargaan atas alam ciptaan Tuhan. Ini menjadi dasar bagi munculnya kearifan dalam bertindak dan berhubungan dengan alam.* Gerakan kearah kesadaran akan keterkaitan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya juga menunjukkan akan pentingnya pemahaman tentang sistem dan keterpaduan antara berbagai komponen sistem sosial yang merupakan hasil integrasi segenap aktivitas manusia, pranata sosial dan unsur-unsur budaya dan sistem sosial ini selanjutnya berintegrasi dengan sistem ekologi (ekosistem) (Rambo, 1989; Ife 2002).

Penghargaan atas nilai-nilai spiritual sama-sama menjadi perhatian Ife dan Kothari. Ife (2002) menyatakan pentingnya mengikutsertakan aspek spiritual dalam pembangunan “*there is a strong need for community development to incorporate spiritual development*”. Nilai-

nilai spiritual tidak sekedar dalam arti keberagamaan tetapi lebih luas dari itu. Ife mengungkapkan misalnya keterikatan spiritual antara manusia dengan alam, juga nilai-nilai spiritual dalam konteks budaya dan seni. Hal ini sejalan dengan pandangan Kothari (1990) ketika memberikan ilustrasi tentang tradisi masyarakat India yang percaya dengan nilai-nilai spiritual/intrinsik pada pohon, sungai, tanaman dan gunung. Dalam perspektif Kothari, keterikatan spiritual ini menjadi pembatas etik yang mengatur perilaku manusia dengan lingkungannya.

Hasil penelitian Pranowo (1985) tentang persepsi masyarakat Kawastu terhadap lingkungan alam menyatakan bahwa masyarakat ini masih menganut falsafah *memayu hayuning bawono* yang mengandung arti menjaga keselamatan dunia, dan juga ungkapan atau dongeng-dongeng yang masih hidup dalam masyarakatnya. Oleh karena itu mereka selalu menjaga kehidupan yang selaras dengan lingkungan alam sekitarnya dan ini tidak berarti mereka mengubah alam sama sekali. Koentjaraningrat (1974) menyatakan bahwa Kebiasaan dari individu mencari keselarasan dengan lingkungan alam sekitarnya merupakan mentalitet individu yang sering kita jumpai. Sementara itu sikap masyarakat Kawastu terhadap hutan sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup mereka sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram di beberapa kawasan hutan di pulau Lombok menunjukkan adanya gejala perubahan nilai dalam masyarakat di sekitar kawasan hutan. Masyarakat kini memandang bahwa "*hutan sebagai karunia Tuhan*" harus dimanfaatkan untuk meningkat ekonomi. Kesadaran ini terinduksi dan semakin menguat ketika mereka mengamati ada pihak lain dari luar komunitas mereka yang mengeksploitir hutan - pengusaha pemegang HPH. Perubahan lain yang juga teridentifikasi adalah "luntarnya nilai-nilai kegotongroyongan", termasuk dalam rangka memelihara dan menjaga lingkungan. Nilai "ekonomi" baru yang dilekatkan masyarakat terhadap "lingkungan hutan" tampaknya menjadi salah satu penjelasan yang mungkin terhadap perilaku destruktif masyarakat dalam merusak hutan.



Nilai-nilai spiritual yang dipegang secara konsisten oleh para pemeluk agama dapat menjadi sumber penggerak sekaligus sebagai pengarah perilaku dari setiap anggota sistem sosial dalam hubungannya dengan alam, sesama manusia, dan dengan tuhannya. Seorang muslim yang taat seharusnya dapat menjadi panutan ketika secara konsisten menerapkan nilai-nilai Islam yang diyakininya seperti “Jangan berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan”, “telah terjadi kerusakan di darat dan di laut sebagai akibat dari ulah tangan manusia...sebagai cobaan bagi manusia untuk merakan akibat dari perbuatannya, agar mereka kembali ke perilaku yang baik...”, “kebersihan adalah bagian dari iman...”, dan nilai-nilai lainnya. Seorang penganut Hindu juga meyakini nilai-nilai hubungan dengan alam, manusia dan tuhannya, dan nilai-nilai ini menjadi acuan ketika berinteraksi dengan ketiganya. Ketika nilai-nilai ini diyakini dan dijadikan sebagai acuan dalam berinteraksi, maka fakta-fakta yang tidak memuaskan sebagaimana diuraikan pada bagian awal Bab ini tidak akan menjadi kenyataan, dan sebaliknya yang akan muncul adalah fakta-fakta yang memuaskan tentang pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang dicita citakan.

Persoalan interaksi manusia dengan hutan dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi semakin kompleks dan mencemaskan. Manusia berperilaku merusak hutan dengan melakukan eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan dan mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian. Perilaku manusia dalam merusak hutan juga tampak pada penyerobotan sejumlah kawasan hutan untuk kemudian dijadikan sebagai areal pertanian, ladang berpindah, lahan perkebunan, dan bahkan untuk dialihkan sebagai areal pemukiman. Areal hutan yang dirambah tidak saja pada hutan-hutan produksi, tetapi juga pada kawasan hutan lindung dan taman nasional. Hasil penelitian menunjukkan terus berlangsungnya proses degradasi hutan, yang berakibat pada berkurangnya debit air serta hilangnya sejumlah mata air (Muktasam, et.al., 2003).

Dalam perspektif psikologis dan sosiologis, perilaku individual dan kolektif masyarakat ini sesungguhnya dapat mencerminkan sistem nilai yang dianutnya. Pemahaman akan keterkaitan antara *sistem nilai* dengan *tingkah laku* dari “masyarakat” adalah penting untuk membangun pemahaman tentang fenomena interaksi manusia dengan hutan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami hubungan antara sistem nilai dengan pola dan bentuk interaksi masyarakat dengan hutan.

Penelusuran atas nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya yang terkait dengan ketiga bentuk interaksi masyarakat dengan hutan menunjukkan adanya sejumlah nilai yang menjadi dasar dan pendorong bagi munculnya ketiga bentuk interaksi tersebut - Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Sistem Nilai yang Melandasi Interaksi Masyarakat dengan Hutan

Bentuk interaksi	Sistem nilai
Memanfaatkan dan mengelola hutan	Hutan sebagai karunia tuhan yang perlu dimanfaatkan Hutan jika dikelola dan digunakan untuk bercocok tanam akan dapat menjadi sumber pendapatan baru Pemanfaatan lahan hutan mampu meningkatkan keadaan ekonomi, dan kemudian mendukung pendidikan anak-anak
Merusak hutan	Pohon-pohon yang ada di hutan menjadi sumber ekonomi yang bersifat segera. Kalau “orang lain” (mengacu pada oknum dinas kehutanan, dan pengusaha kayu) bisa masuk menebang pohon untuk kepentingan ekonomi, kenapa “kami” tidak boleh? Saya ikut menanam “mahoni” karena itu juga berhak untuk menebang
Menjaga hutan	Hutan menjaga kita dan kita menjaga hutan Hutan perlu diwariskan kepada anak cucu Di hutan ada kekuatan lain selain manusia - “mahluk halus” – dan karenanya tidak boleh sembarangan masuk dan mengganggu hutan Di pohon-pohon besar seperti beringin dan sumber-sumber mata air ada kekuatan supernatural yang menjaga, oleh karena itu pohon dan sumber mata air harus dijaga Jika manusia berperilaku sembarangan terhadap hutan (khususnya kawasan yang dianggap dijaga makhluk halus) maka akan ada peristiwa aneh yang akan menimpa – sakit, tersesat, pohon tidak tumbang walau sudah terpotong, manusia akan terbawa ke alam supernatural. <i>Mangku</i> adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus penjaga hutan, dan karenanya interaksi manusia dengan hutan harus melalui persetujuan seorang “mangku”

**Hutan Sebagai Sumber Ekonomi:** Masyarakat yang memegang nilai “hutan sebagai sumber ekonomi” tampaknya mengembangkan ketiga bentuk interaksi masyarakat-hutan sebagaimana dirangkum pada tabel di atas. Perbedaannya adalah bahwa ketika ada nilai lain yang dianut dan juga menjadi pegangan, maka bentuk interaksi kemudian menjadi berbeda. Masyarakat yang tindakannya hanya semata-mata didorong oleh nilai ekonomi yang kuat dan dominan, dan tanpa memiliki nilai lain seperti “keharusan untuk memelihara dan menjaga hutan” atau

“adanya kekuatan lain yang menjaga hutan”, maka perilaku mereka dalam berinteraksi dengan hutan akan cenderung membentuk interaksi yang destruktif terhadap hutan. Mereka yang termasuk dalam kategori ini bahkan mengembangkan nilai-nilai baru yang digunakan sebagai pembenaran atas bentuk interaksi mereka. Pada Tabel 6.1, interaksi mengeksploitir hutan juga didasarkan pada adanya kecemburuan terhadap adanya pihak lain yang masuk dan mengeksploitir hutan dengan menyatakan “Kalau ‘orang lain’ (mengacu pada oknum dinas kehutanan, dan pengusaha kayu) bisa masuk menebang pohon untuk kepentingan ekonomi, kenapa ‘kami’ tidak boleh?” atau “Saya ikut menanam ‘mahoni’ karena itu juga berhak untuk menebang”.

**Hutan Sebagai Karunia Tuhan yang Perlu Dimanfaatkan dan Dijaga:** Masyarakat yang menganggap bahwa “hutan adalah karunia Tuhan” dan “hutan menjaga kita dan kita menjaga hutan” cenderung untuk mengembangkan pola interaksi yang menjaga keseimbangan hutan, baik secara ekologis maupun ekonomis. Mereka yang memegang nilai dan keyakinan ini akan berperilaku memanfaatkan dan mengelola hutan, tidak saja untuk generasi kini tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Selain untuk meraih keuntungan ekonomi dan ekologis masa kini, mereka juga berperilaku untuk menjaga agar keuntungan yang sama akan dirasakan oleh anak dan cucu mereka di masa yang akan datang. Nilai sosial ini seharusnya ditumbuh kembangkan pada anggota masyarakat yang berada di sekitar hutan sehingga mereka kemudian mengembangkan perilaku dan interaksi positif dan seimbang dengan hutan.

Nilai lokal ini memberi indikasi bahwa bagi masyarakat, hutan merupakan sumber penghidupan yang tak ternilai, sehingga harus dijaga. Masyarakat percaya bahwa hutan adalah titipan *Nenek Kaji* (Tuhan Yang Maha Esa). Ungkapan masyarakat bahwa “*Gawah jaga ite, Ite jaga gawah*” (hutan menjaga kami, maka kami juga harus menjaga hutan) menjadi norma yang menjadi standar dalam berinteraksi dengan hutan. Ungkapan ini juga menegaskan bahwa dengan menjaga hutan sesungguhnya mereka menjaga dirinya sendiri. Sebagai perwujudan dari pemahaman tersebut, masyarakat percaya

bahwa selama ini hutan telah memberikan kehidupan bagi diri dan keluarganya, sehingga hutan harus dijaga kelestariannya dengan tidak melakukan penebangan.

Upaya masyarakat dalam melestarikan hutan dilakukan dengan penanaman kembali jika ada pohon-pohon di dalam hutan yang rusak. Jenis tanamannya merupakan tanaman yang dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakat, misalnya tanaman buah-buahan. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan hidup masyarakat dapat dipenuhi dari kegiatan di hutan. Ungkapan “*Mate aku, lamun te sugulan le gawah sa ni*” (mati saya kalau dikeluarkan/tidak diberi hak bekerja di hutan lagi), merupakan suatu ungkapan betapa bersyukur masyarakat terhadap hasil yang diperoleh dari hutan, sehingga kalau ada kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat membuka hutan maka akan menciptakan kemelaratan bagi semua penduduk.

**Di Hutan Ada “Mahluk Halus” yang Perlu Diwaspadai:** Penelitian ini mengidentifikasi adanya nilai-nilai sosial budaya lama yang sesungguhnya menjadi “penahan” laju interaksi destruktif antara masyarakat dengan hutan. Masyarakat di ketiga desa yang diteliti menyatakan bahwa mereka percaya dan yakin bahwa di hutan ada “makhluk lain” yang juga hidup dan “menjaga hutan”. Keyakinan dan kepercayaan ini sudah terbangun secara turun temurun, baik melalui cerita-cerita yang diwariskan maupun melalui pengalaman langsung yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Menurut responden dan informan kunci, cukup banyak kejadian “aneh” yang dialami masyarakat yang mendukung dan menguatkan kepercayaan dan keyakinan akan adanya makhluk halus yang menjaga dan berdiam di hutan. Diantara kejadian-kejadian tersebut adalah:

- (1) Adanya warga yang sakit ketika melakukan penebangan kayu hutan tanpa melalui konsultasi dan persatuan orang pintar di desa – *mangku* hutan
- (2) Adanya kejadian dimana sejumlah warga menghilang dan tersesat beberapa saat, bahkan berhari-hari ketika berada di dalam hutan. Mereka yang pernah mengalami peristiwa ini

mengakui tentang adanya kekuatan “makhluk halus” yang kemudian membawa mereka “mengarungi” dan “berpetualang” di alam “supranatural”

- (3) Sejumlah warga dari ketiga desa menceritakan hal yang sama tentang adanya pohon “ajaib” yang walaupun sudah habis ditebang, tetapi pohon itu tidak tumbang.
- (4) Sejumlah masyarakat mengungkapkan adanya kekuatan dan keanehan yang terjadi di sekitar lokasi mata air dan pohon-pohon besar seperti pohon beringin. Di tempat-tempat ini dipercaya tentang adanya makhluk “jadi-jadian” yang terkadang menampakkan diri dalam bentuk “ular” atau “ikan”, terkadang dalam ukuran yang teramat besar, muncul pada saat-saat tertentu, dan hanya orang-orang tertentu yang mampu menemuinya.

Dengan berbagai “kejadian aneh” yang dialami oleh masyarakat dalam interaksi mereka dengan hutan, baik yang dialami sendiri maupun didengar dari pengalaman orang lain, maka di dalam masyarakat juga berkembang perilaku yang mengarah kepada usaha-usaha untuk menjaga keharmonisan interaksi manusia – hutan dan interaksi manusia dengan makhluk halus – perhatikan Tabel 6.2 dan Tabel 6.3.

Tabel 6.2. Upacara Bebangar – Ritual saat Membuka Hutan

Upacara *Bembangar* yaitu acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Batukliang Utara ketika mulai membuka hutan. Upacara ini menjadi keharusan jika mau masuk hutan dan menebang pohon dengan aman. *Bangar* dipimpin oleh seorang *mangku*, yaitu seseorang yang dipercaya mempunyai kelebihan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus yang juga dipercaya berada dan menjaga hutan. Pada masa-masa awal peran mangku sebagai pemegang “kunci masuk hutan” diakui sangat kuat dan strategis, dan setiap orang yang mau menebang pohon dan membuka hutan untuk bertanam harus mengajak mangku. Kalau tidak, maka dipercaya mereka akan sakit dan ini disebabkan oleh ulah makhluk halus yang merasa “terganggu” kehidupannya.

Sebelum upacara *bebangar* dimulai, maka sang *mangku* akan mengucapkan “*Insan basanak sire*” yang berarti “*kami atau kita bersaudara semua*”, dan ini dipercaya sebagai *ucapan salam* kepada makhluk-makhluk halus yang ada dan tinggal di *gawah* (hutan). Ucapan “salam” ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan upacara *bebangar* tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya anggota masyarakat yang sakit, hilang atau tersesat “terbawa oleh makhluk halus”, dan menemukan keanehan-keanehan di hutan (menurut cerita beberapa informan kunci di ketiga desa, pernah sekali waktu ada seorang penduduk hendak menebang pohon, dan anehnya pohon itu tidak mau tumbang walaupun telah tuntas terpotong).

Untuk acara *bebangar* ini, setiap anggota masyarakat yang akan melakukan kegiatan penanaman di hutan harus menyediakan seekor *manuk* (ayam) dan *penyawe* (daun enau). Kemudian *mangku* akan menyembelih ayam tersebut, dan darahnya ditorehkan pada *penyawe*, yang kemudian *penyawe* tersebut ditancapkan pada lahan masing-masing anggota masyarakat. Upacara ini mempunyai makna bahwa anggota masyarakat dapat bekerja dengan tenang di hutan tanpa gangguan karena semua makhluk halus yang tadinya dipercaya menghuni hutan sudah dipindahkan oleh mangku ke lokasi hutan yang lain.

Ritual lain yang mencerminkan adanya kepercayaan untuk tidak semena-mena terhadap alam adalah acara *Bao Daya*, yang dimaksudkan untuk tidak sembarangan menebang pohon di sekitar mata air dan menangkap ikan “tuna” yang ada di dalamnya. Seperti halnya dengan kepercayaan pada acara *bebangar*, kesalahan dalam berinteraksi dengan “makhluk” yang mendiami kawasan sekitar mata air, juga akan membawa petaka bagi siapa pun yang melakukan kesalahan.

Tabel 6.3. Acara Bao Daya – Ritual di Mata Air

Acara Bao Daya adalah acara atau ritual yang terkait dengan sumber atau mata air. Masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan Batukliang Utara masih sering melakukan upacara *Bao daya*, memohon keselamatan atas pertanian, agar air selalu tersedia untuk mengairi lahan pertanian saat petani mulai melakukan penanaman. Upacara dilakukan pada berbagai sumber mata air dengan membawa *sesajen* yang terdiri dari beberapa jenis makanan. Pada kesempatan tersebut masyarakat memohon agar air dapat mengalir terus sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasilnya melimpah. Upacara yang dilakukan masyarakat mengandung nilai spiritual yang bermuara pada bagaimana mereka berhubungan/ memohon pada sang pencipta.

Kepercayaan lain yang mempengaruhi interaksi masyarakat dengan sumber mata air (agar air tetap terjaga) adalah kepercayaan agar masyarakat tidak menebang kayu yang tumbuh di sekitar mata air, terutama pohon beringin atau jenis pohon-pohon besar lainnya yang tumbuh di sekitar mata air. Masyarakat percaya bahwa di pohon tersebut banyak “penunggunya”, bahkan mangkupun melarang untuk melakukan penebangan karena akibatnya bisa fatal bagi yang melakukannya. Selain itu, pada sumber air juga dipercaya terdapat *ulah Blae* (sejenis ular kobra) yang berwarna hijau, berekor putih, berleher kuning, dan lidahnya berwarna biru. Selain itu pada mata air dipercaya terdapat *ikan tuna* besar yang terkadang menampakkan diri dan juga kadang-kadang tidak. Kedua makhluk tersebut dipercaya sebagai *penunggu mata air*, dan jika habitatnya diganggu maka makhluk ini akan marah dan membalas perbuatan manusia. Kepercayaan masyarakat yang masih dipegang teguh dan dipatuhi, memberikan pengaruh terhadap kelestarian hutan dan terjaganya sumber air. “*Kende badung kayu tie, nde kanggu, laun ngkah tu bau nginum, mate ai*” jangan tebang kayu itu, tidak boleh, nanti kita tidak bisa minum, air mati), merupakan ungkapan yang selalu dipegang masyarakat sebagai *awiq-awiq* (aturan) yang mengontrol dirinya dalam berinteraksi dengan hutan.

Secara teoritis, jika pohon-pohon di sekitar sumber air ditebang maka sumber air akan menjadi kering karena hilangnya akar-akar pohon yang mampu menyerap air. Oleh karena itu, nilai budaya tersebut harus dipertahankan, karena mempunyai makna positif. Proses pembelajaran diperlukan agar terjadi pemahaman tentang hubungan antara kemampuan tanaman dalam menjaga keseimbangan alam – menahan air, tanpa harus mempermasalahkan “kepercayaan” masyarakat tentang peran makhluk halus dalam konservasi sumber air.



Kepercayaan-kepercayaan yang diyakini oleh sebagian masyarakat Batukliang dalam interaksinya dengan hutan, yang teridentifikasi melalui penelitian ini, juga menegaskan bahwa nilai-nilai spiritual tidak sekedar dalam arti keberagaman tetapi lebih luas dari itu. Ife (2002) mengungkapkan misalnya keterikatan spiritual antara manusia dengan alam, juga nilai-nilai spiritual dalam konteks budaya dan seni. Hal ini sejalan dengan pandangan Kothari (1990) ketika memberikan ilustrasi tentang tradisi masyarakat India yang percaya dengan nilai-nilai spiritual/intrinsik pada pohon, sungai, tanaman dan gunung. Dalam perspektif Kothari, keterikatan spiritual ini menjadi pembatas etik yang mengatur perilaku manusia dengan lingkungannya.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, fakta di atas sejalan dengan konsep Bruce (1994) yang menelaah pembangunan berkelanjutan dari sudut kelestarian sumber daya alam, budaya dan proses produksi. Namun demikian, Bruce juga melihat adanya peran strategis yang harus dimainkan oleh kelembagaan dan kelompok tradisional di desa dalam rangka perlindungan sumber daya alam, pengembangan budaya dan perbaikan kesempatan ekonomi. Dalam analisisnya di beberapa desa di Bali, Bruce (1994) menyatakan bahwa dalam melakukan pembangunan berkelanjutan masyarakat Bali tidak terlepas dari kepercayaan Hindu Bali dalam beberapa konsep kehidupan yaitu (1). ***Konsep Tri Hita Karana***, yang menetapkan adanya keseimbangan yang terdapat pada tiga level yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungan, (2) ***Konsep Desa Kala Patra*** yang menekankan pentingnya keharmonisan antara ruang, waktu dan kondisi. Jadi konsep kehidupan dan budaya tradisional yang lebih menekankan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan telah memberi prospek terhadap keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

**Kenapa Orang Lain Masuk Hutan dan Kita Tidak?** Terungkap melalui penelitian ini bahwa sesungguhnya kerusakan hutan tidak saja terjadi oleh masyarakat di sekitar kawasan tetapi sesungguhnya juga oleh pihak yang berada jauh dari desa dan kawasan hutan. Masyarakat sadar betul bahwa “oknum pemerintah” dan “pengusaha kayu” memiliki andil yang besar pada terjadinya kerusakan hutan. Dalam perspektif masyarakat (sebagaimana diungkapkan dalam wawancara mendalam, FGD dan workshop), kerusakan hutan terjadi pada tahun 1950an.

Sejak tahun 1950an, pemerintah secara berturut-turut menerapkan program tebang pilih, tebang lelesan, dan tebang habis di areal hutan yang berada di ketiga desa. Setelah itu kawasan hutan kemudian berubah menjadi padang alang-alang dan semak belukar. Kemudian pada tahun 1960an program reboisasi dan rehabilitasi lahan diperkenalkan dengan menanam tanaman suren dan mahoni. Pada saat bersamaan masyarakat diperbolehkan untuk menanam tanaman pangan di sela-sela pepohonan. Hal yang sama juga berlangsung pada masa dimulainya program HKM di tahun 2000.

Ketika tanaman hasil reboisasi mulai menunjukkan keberhasilan, tanaman mahoni layak untuk dipanen, masyarakat kemudian menjadi “penonton” keberhasilan reboisasi. Menurut pengakuan responden dan informan kunci, penebangan mahoni ternyata didukung oleh “oknum Dinas Kehutanan” dan melibatkan “pengusaha kayu”. Kecemburuan muncul karena di satu sisi masyarakat merasa bahwa merekalah yang menanam dan menjaga mahoni selama program reboisasi, sedangkan di sisi lain mereka tidak mendapatkan hasilnya dan bahkan dalam sejumlah kesempatan “masyarakat dianggap sebagai kelompok utama perusakan hutan”.

Kecemburuan sosial atas perilaku destruktif “pihak luar” (menunjuk pada oknum Dinas kehutanan dan pengusaha kayu), tidak saja menciptakan bentuk interaksi baru antara masyarakat dengan hutan, yang merusak dan mengeksploitir hutan, tetapi juga dianggap sebagai titik balik kehancuran “kewibawaan” aparat. Sejumlah warga

masyarakat mengembangkan bentuk interaksi yang tidak harmonis dengan hutan, dengan menebang pohon-pohon mahoni yang pernah mereka tanam. Perilaku ini bahkan dalam beberapa hal berani melanggar kepercayaan dan keyakinan yang ada – misalnya keberadaan makhluk halus yang menjaga hutan.

### **Persepsi dan Sikap terhadap Pengelolaan Hutan**

Masyarakat memiliki persepsi dan sikap yang positif terhadap pengelolaan hutan. Hal ini ditunjukkan oleh respons yang diberikan oleh masyarakat terhadap “pertanyaan persepsi”, yaitu tentang “kondisi hutan saat ini?”, “bagaimana sebaiknya perilaku masyarakat terhadap hutan?” dan “bagaimana sikap masyarakat jika ada pihak yang mengganggu hutan?”. Masyarakat memandang bahwa hutan seharusnya dijaga, dikelola dan dimanfaatkan. Hasil wawancara mendalam dan workshop menegaskan bahwa tidak ada dari masyarakat yang berpandangan dan berharap untuk memiliki hutan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya “menjaga hutan” tidak lepas dari kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan.

### **6.6. Ringkasan**

Konsep-konsep yang dijelaskan dalam bab ini penting untuk dipahami oleh mereka bekerja sebagai penyuluh karena konsep-konsep seperti persepsi, sikap, dan orientasi nilai akan menentukan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat secara keseluruhan. Interpretasi atas aksi atau tindakan seseorang dapat dilakukan dengan baik jika konsep-konsep ini dapat dipahami dengan baik. Pendekatan yang efektif dalam menghentikan tindak perusakan hutan atau perusakan terhadap sumber daya alam dapat dilakukan dengan efektif ketika agen pembaharu paham tentang nilai, sikap atau persepsi yang ada di balik tindakan itu.

Persepsi yang salah terhadap “ayam mati tidak apa-apa, dan aman untuk dikonsumsi” akan sangat berbahaya ketika terjadi wabah flu

burung, dan ini harus diluruskan. Persepsi ini terbentuk dari pengalaman selama ini yang dilakukan, karena selama ini aman-aman saja, dan akan fatal akibatnya ketika ayam yang sakit disebabkan oleh penyakit yang zoonosis, penyakit ternak yang dapat menular kepada manusia.

\*\*\*

## 7. KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN

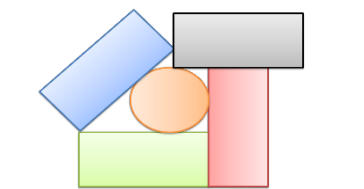
### 7.1. Pengantar

Sebagaimana diuraikan dalam definisi penyuluhan, ada yang mendefinisikan penyuluhan sebagai proses komunikasi, yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan dari sumber kepada penerimanya atau sebaliknya, dan bab ini akan membahas secara mendalam konsep atau teori komunikasi ini dalam konteks penyuluhan pertanian. Pembahasan tentang teori komunikasi ini akan dilakukan dengan mendalami setiap tingkatan komunikasi yang ada agar dengan pemahaman itu terbentuk kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif dalam penyuluhan pertanian. Masing-masing tingkatan komunikasi berkembang modal-model komunikasi, yang pada intinya ditujukan untuk memahami proses komunikasi yang berlangsung dengan melibatkan komponen-komponen atau elemen-elemen komunikasi. Model SMCR dari David Berlo misalnya memberikan gambaran tentang bagaimana suatu proses komunikasi interpersonal berlangsung antara dua orang. Pemahaman tentang elemen-elemen dalam setiap modal komunikasi ini penting dalam mengatur dan merancang suatu proses komunikasi yang efektif.

### 7.2. Definisi dan Tujuan Komunikasi

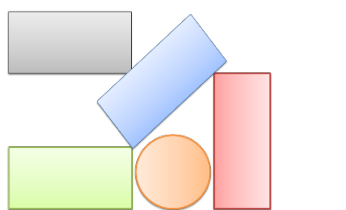
Secara konotatif kata “Komunikasi” bermakna sebagai suatu proses “pengiriman” dan “penerimaan” pesan dari seorang atau suatu “Sumber” kepada “seorang atau sekelompok” Penerima sehingga dicapai suatu kesamaan pengertian antara keduanya (*Sumber atau Source atau Komunikator dan Penerima atau Receiver atau Komunikan*). Definisi ini sejalan dengan definisi komunikasi yang dirumuskan oleh Frank E. X. Dance (1967) dalam Applbaum, et al. (1973) dengan rumusan “*Komunikasi adalah sebuah proses melalui mana pengirim dan penerima berinteraksi dalam suatu konteks sosial tertentu*” – “*Communication is a process by which senders and*

*receivers of messages interact in given social contacts*” (Applbaum, et al., 1973); juga sejalan dengan definisi yang dirumuskan oleh George A. Miller (1951) bahwa “Komunikasi bermakna informasi diteruskan dari satu tempat ke tempat lain” – “*Communication means that information is passed from one place to another*” (dalam Applbaum, et al., 1973). Komunikasi juga didefinisikan sebagai “*Pertukaran symbol antar orang-orang*” – “*Human communication is the exchange of symbols between people*” (Dodd & Lewis, 1989). Dalam perspektif tujuan komunikasi, maka definisi ini lebih cenderung pada pengertian komunikasi sebagai proses “komunikasi informasi”. Perhatikan 2 ilustrasi berikut ini!



Gambar asli

1. Pilih salah satu yang mengaku memiliki kemampuan komunikasi yang baik! Beri tahu dia “apa yang harus dilakukan”! Tunjukkan padanya “pesan” untuk berkomunikasi
2. Tempatkan dia di belakang kelas dan minta dia untuk memulai komunikasi setelah kelas siap! Lakukan komunikasi dua kali, yang pertama “tanpa interaksi – tidak ada pertanyaan dari yang lain” & yang kedua “dengan interaksi – komunikasi dua arah”
3. Setelah komunikasi selesai, lihat hasilnya!
4. Lakukan refleksi dengan menanyakan kepada partisipan tentang apa yang terjadi pada proses komunikasi tersebut .



Hasil komunikasi

1. Apa yang anda rasakan?
2. Minta peserta untuk mengungkapkan “pandangan dan perasaannya sebagai penerima pesan komunikasi - komunikasi”
3. Minta “komunikator” untuk mengungkapkan perasaan sebagai komunikator!
4. Apa perbedaan dari kedua komunikasi yang dilakukan? One-way & two way communication?
5. Apa tujuan dari komunikasi?
6. Jika membandingkan antara “pesan asli” dengan “pesan yang diterima oleh komunikasi”, apa kesimpulan anda?
7. Kenapa terjadi demikian? Apa faktor-faktor yang menentukan kualitas komunikasi?

8. *Role play ini mengilustrasikan komunikasi yang mana?*

- Intrapersonal communication – pada diri komunikator & komunikan?
  - Interpersonal communication between individuals communicator and communicant?
  - Group communication?
  - Mass communication?
  - Intercultural communication?
- 

Gambar 7.1. Role Play – Pentingnya Komunikasi<sup>6</sup>

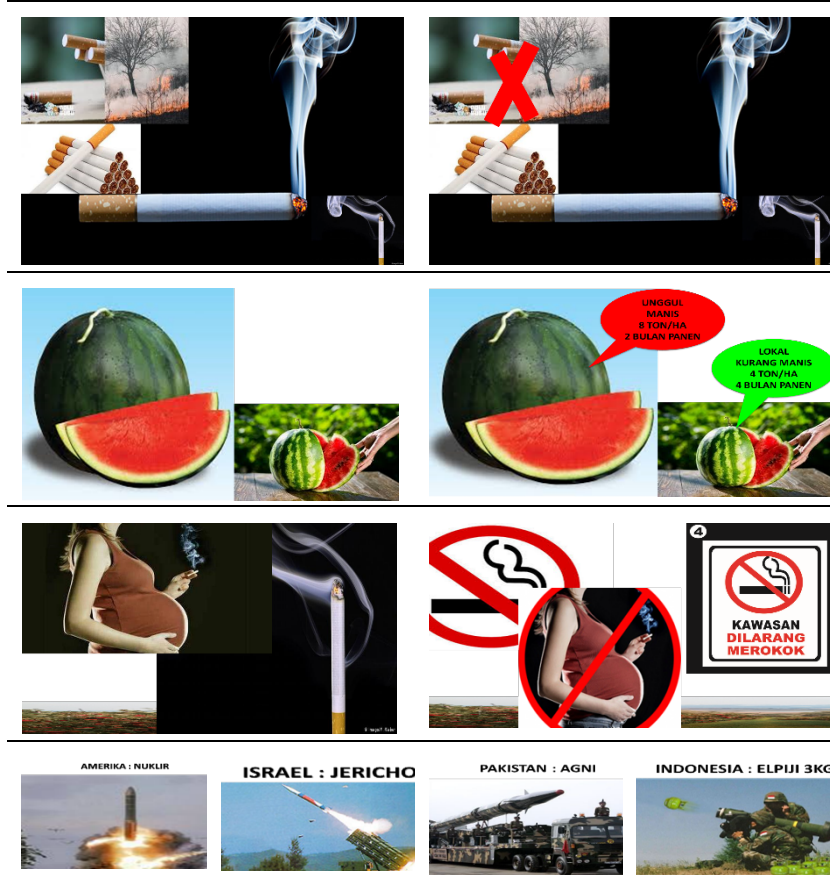
Gambar 7.1 menjadi instrumen untuk menunjukkan dan memberi pengalaman berharga kepada setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi tentang “sulitnya berada dalam suatu situasi komunikasi”, yang tidak melibatkan proses komunikasi dua arah, dan menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang tidak lajim atau kompleks.

Komunikasi dalam penyuluhan juga dijelaskan sebagai “*berbagi ide dan informasi – ini menjadi proporsi terbesar dari pekerjaan penyuluh. Pembagian informasi dan rekomendasi ini diharapkan akan mempengaruhi keputusan petani. Penyuluh juga dapat mendorong petani untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi yang sama kepada petani lain dan ini menjadi tahan penting dalam kegiatan kelompok dan kegiatan di desa. Penyuluh juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang mungkin dihadapi petani*” – “the sharing of ideas and information - forms a large part of the extension agent's job. By passing on ideas, advice and information, he/she hopes to influence the decisions of farmers. He/she may also wish to encourage farmers to communicate with one another; the sharing of problems and ideas is an important stage in planning group

---

<sup>6</sup> Keterampilan komunikator untuk “mengekode” pesan dengan tepat agar dapat diterima persis sama oleh komunikan – tidak multi interpretasi! Jika terjadi beda interpretasi, maka terjadi miskomunikasi!

or village activities. The agent must also be able to communicate with superior officers and research workers about the situation faced by farmers in his area” (FAO, 2019).



Gambar 7.2. Tujuan Komunikasi (*Informasi, Persuasi & Hiburan*)

Gambar 7.2 menunjukkan tiga jenis tujuan komunikasi, yang masing-masing pesannya dirancang secara khusus. Semua gambar pada kolom 1 menunjukkan pesan-pesan informatif, dan semua gambar pada kolom 2 menunjukkan pesan-pesan persuasif. Penambahan tanda



silang “X” pada gambar menambah pesan “Larangan” untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Penambahan tanda “Larangan” pada gambar ibu hamil bermakna bahwa pesan ini melarang ibu hamil untuk merokok atau berada di ruangan yang ada asap rokoknya. Kedua perubahan pada visualisasi ini menunjukkan bagaimana transisi dari proses komunikasi dengan tujuan informatif ke proses komunikasi dengan tujuan persuasif atau mempengaruhi.

Sementara itu, deretan 4 gambar pada baris paling bawah pada Gambar 7.2 adalah deretan gambar atau pesan yang ditujukan dan dirancang untuk tujuan komunikasi hiburan. Unsur hiburannya akan terasa ketika ke 4 gambar ini disajikan satu per satu kepada para audiens dengan menggunakan presentasi “power point”. Tiga senjata pemusnah massal pertama adalah hal-hal yang wajar dalam perkembangan ilmu dan teknologi persenjataan, dan begitu gambar ke 4 ditampilkan, maka akan muncul rasa terhibur karena peristiwa “ledakan tabung gas LPG” di masa awal uji coba konversi dari penggunaan minyak tanah ke LPG ada banyak kasus ledakan tabung gas LPG dan memakan korban jiwa. Peristiwa ini lah yang kemudian diilustrasikan dalam “Foto ke 4” pada Gambar 7.2. Komunikasi hiburan juga dapat dilakukan dengan pembuatan karikatur atau juga dengan media audio-visual seperti acara lawak yang ada di televisi.

Seorang penyuluh berkomunikasi dengan petani tidak saja untuk menyampaikan informasi (*informative communication*) sehingga *bertambah pengetahuan petani*, tetapi juga berkomunikasi dengan tujuan untuk mempengaruhi petani agar melakukan sesuatu – *merubah sikap petani*. Dalam konteks ini, maka yang dilakukan oleh penyuluh adalah komunikasi persuasi (*persuasive communication*).

Pada sisi lain, seorang penyuluh yang terampil, sering kali menyampaikan sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan tidak juga untuk mempengaruhi petani, tetapi untuk menghibur petani-petani yang sudah mulai merasa jenuh dan bosan dengan proses atau pertemuan yang sudah berlangsung beberapa jam. Penyuluh menyampaikan guyonan atau permainan atau apa saja yang

dapat menghibur petani. Dalam perspektif tujuan komunikasi, maka sesungguhnya penyuluh sedang melakukan apa yang dikenal sebagai “komunikasi hiburan” (*entertainment communication*). Ketiga jenis tujuan komunikasi ini dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut ini.

- (1) *Menginformasikan* (To inform) or Komunikasi Informasi → Meningkatkan pengetahuan
- (2) *Mempengaruhi* (To persuade) or Komunikasi Persuasi → Merubah sikap
- (3) *Menghibur* (To entertain) or Komunikasi Hiburan – menghibur

Penelusuran terhadap beberapa referensi menemukan bahwa selain ketiga tujuan ini, ada juga orang berkomunikasi bukan untuk ketiga tujuan di atas, tetapi untuk tujuan lain, antara lain sebagai kebutuhan psikologis, melepaskan stres, dan untuk kesehatan mental atau untuk ketenangan batin. Komunikasi dengan Tuhan juga berada dalam tujuan komunikasi yang lain di luar ketiga tujuan komunikasi di atas. Kedua tujuan komunikasi ini mungkin masuk dalam tujuan lain yang mungkin oleh sebagian orang disebut sebagai komunikasi dengan tujuan “Spirituality” – yang di dalamnya akan memperoleh rasa percaya diri dan ketenangan, kekuatan jiwa dan salah satu diantaranya proses komunikasi dengan pasien (Wittenberg, Ragan, & Ferrell, 2017).

### **7.3. Tingkatan Komunikasi**

Dalam perspektif komunikasi, penyuluhan pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi dalam keseluruhan tingkatannya. Ketika seorang penyuluh mulai memikirkan apa yang hendak disampaikannya kepada petani sasarnya, maka ketika itu dia sudah mulai melakukan komunikasi internal dengan dirinya sendiri. Dalam diri seorang penyuluh boleh jadi berlangsung diskusi atau tanya jawab (lihat kotak 1). Setelah memutuskan apa yang hendak disampaikannya kepada petani, seorang penyuluh kemudian pergi ke desa dan bertemu dengan seorang pengurus kelompok tani. Pada tahapan ini, maka yang terjadi adalah proses komunikasi antara “seorang penyuluhan” dengan “seorang kontak tani”. Pada tahapan atau tingkatan berikutnya,

penyuluh dan kontak tani kemudian bertemu dengan anggota kelompok tani dan melakukan diskusi kelompok. Dalam tahapan ini, maka sesungguhnya seorang penyuluh sudah melibatkan dirinya dalam sebuah komunikasi kelompok.

Selain melakukan komunikasi yang sifatnya personal atau pribadi, seorang penyuluh juga memiliki pilihan untuk melakukan komunikasi dengan massanya (petani dan keluarganya), yang tersebar secara geografis. Komunikasi dengan sasaran yang besar dan menyebar secara geografis ini dapat dilakukan oleh seorang penyuluh atau suatu lembaga penyuluhan dengan menggunakan media massa seperti koran, radio, dan televisi.

- *Mau ngomong apa yah dengan petani di balai desa nanti?*
- *Oh, ngomong tentang perubahan iklim saja?*
- *Apa iya kalau bahan tentang perubahan iklim ini cocok untuk mereka?*
- *Ah mungkin cocok dan penting untuk disampaikan kepada mereka!*
- *Ok, kalo gitu, saya akan membahas tentang isu ini bersama petani, karena ini penting!*
- *Setahun yang lalu, petani-petani itu tidak mendapatkan hasil panen yang bagus karena hujan sepanjang tahun. Pohon banyak yang tidak menghasilkan buah dan petani kacang banyak yang gagal karena tanaman kacang tidak bisa dipanen karena busuk dan bertunas sebelum dipanen.”*

Dalam perspektif teori komunikasi, uraian di atas menjelaskan tentang adanya beberapa tingkatan komunikasi yang terjadi (Applbaum, et al., 1973), termasuk dalam dunia penyuluhan. Beberapa tingkatan komunikasi dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) ***Komunikasi intrapersonal*** (*komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang*): Proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Seringkali terjadi “dialog” dalam diri kita, yang sesungguhnya merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi ketika seseorang menerima stimuli atau

stimulus dari lingkungannya. Ketika seseorang hendak keluar dari rumahnya dan melihat bahwa suasana sedang “mendung”, maka muncul reaksi internal berupa pertanyaan “apakah perlu bawa payung?”, dan pada saat yang bersamaan muncul respons “tidak usah ah membawa payung, paling sekedar mendung dan tidak jadi hujan”; “payungnya ada dimana yah? Jangan-jangan hilang”; “sudah...tidak usah bawa payung saja...lagian repot menyimpannya nanti”. Proses komunikasi intrapersonal sering juga disebut sebagai “proses belajar” karena sifatnya.

- (2) ***Komunikasi interpersonal*** (*komunikasi antar pribadi atau juga dikenal sebagai “dyadic communication”*): Komunikasi yang melibatkan dua orang atau juga disebut sebagai *Dyadic Communication* atau *Komunikasi Antarpribadi*. Model komunikasi yang digambarkan di atas merupakan salah satu model dari proses komunikasi antarpribadi atau interpersonal ini. Model komunikasi ini misalnya melibatkan seorang penyuluh dengan seorang petani atau anggota kelompok tani hutan ketika keduanya bertemu di jalan, di kawasan hutan atau di rumah petani. Model komunikasi interpersonal yang cukup terkenal adalah Model SMCR dari Berlo (Berlo, 1960).
- (3) ***Komunikasi kelompok dan organisasi*** (*komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok atau organisasi*): Proses komunikasi yang terjadi antara seorang sumber dengan sekelompok sasaran dalam suasana kelompok dan atau organisasi. Seseorang bertindak sebagai SUMBER atau KOMUNIKATOR dan dua atau lebih orang bertindak sebagai PENERIMA pesan.
- (4) ***Komunikasi massa*** (*komunikasi yang terjadi dengan menggunakan media massa*): Proses komunikasi yang berlangsung antara SUMBER dengan sejumlah besar PENERIMA yang tidak teridentifikasi, menyebar dan luas. Biasanya proses komunikasi massa melibatkan MEDIA MASSA dan oleh karena itu disebut juga sebagai PROSES KOMUNIKASI MEDIA MASSA (Mass media communication). Media yang digunakan dalam komunikasi

massa dapat berupa *media cetak* seperti koran dan majalah, dan *media elektronik* seperti radio dan televisi.

- (5) ***Komunikasi lintas budaya*** (*komunikasi yang melibatkan pihak-pihak yang berbeda latar belakang budayanya*): Proses komunikasi yang melibatkan pihak sumber dan penerima pesan dengan latar belakang budaya yang berbeda – Budaya sebagai akumulasi dari *pengetahuan, pengalaman, sikap, makna, tingkatan status, agama, waktu, peran harapan, relasi spasial, konsep diri* yang diperoleh seseorang dalam hidupnya dan kemudian termanifestasi dalam *pola bahasa, pola pikir dan pola tindaknya*. Perbedaan ini seringkali menjadi kendala dalam menciptakan proses komunikasi yang efektif karena adanya perbedaan dalam budaya, pengalaman, dan persepsi terhadap simbol-simbol komunikasi. Kemampuan berempati diperlukan guna untuk memberikan interpretasi yang tepat terhadap simbol-simbol komunikasi yang terjadi. Baik sumber maupun penerima perlu untuk “belajar” bagaimana suatu pikiran dan perasaan diekspresikan dalam perilaku nyata. Ekspresi *kemarahan, penghormatan, penghargaan*, dan lainnya sangat boleh jadi berbeda antara kedua budaya.

#### **7.4. Model-model dan Unsur-unsur Komunikasi**

Kata “Model” sering digunakan dalam komunikasi dan kehidupan sehari-hari. Ketika kata “model” digunakan untuk berkomunikasi dengan para selebritas, maka model akan langsung dimaknai sebagai seseorang yang memperagakan busana atau pakaian. Tetapi ketika kata model digunakan dalam proses komunikasi dengan para peneliti ilmu matematika dan biologi, maka kata-kata model akan langsung menunjuk pada model atau persamaan matematika -



#### 4. Fungsi tujuan

hasil penjualan yang di peroleh jika membuat x meter persegi pagar jenis 1 dan y meter persegi pagar jenis 2 adalah

$$f(x,y) = 50.000x + 75.000y$$

Jadi **model matematikanya** adalah :

maksimumkan :  $f(x,y) = 50.000x + 75.000y$

Gambar 7.3. Persepsi tentang “Model”

Kata model bagi penulis atau ahli ilmu komunikasi adalah penyederhanaan dari suatu keadaan atau proses dalam komunikasi sehingga dapat diketahui unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada dalam suatu proses komunikasi. Pengertian inilah yang tergambar dari model-model komunikasi yang dibahas dalam buku ini.

Sesuai dengan definisi komunikasi pada masing-masing tingkatan komunikasi, maka model-model proses komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### (1) Model Komunikasi Intrapersonal

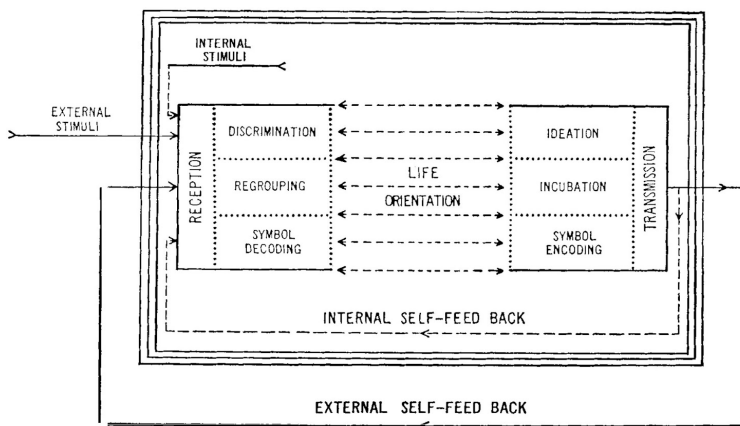
**Komunikasi** intrapribadi atau komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara diri sendiri dengan suatu subyek yang tidak tampak (misalkan Tuhan). Komunikasi intrapersonal menjadi awal dari semua

proses komunikasi karena proses komunikasi ini terjadi dalam diri seseorang sebelum seseorang memulai komunikasi dengan orang lain, baik sebagai individu atau pun sebagai kelompok dan masyarakat.

Seseorang yang terbangun dari tidurnya seringkali akan melalui tahapan proses mental dengan pikiran dan atau dialog dalam dirinya, seperti misalnya *“lapar rasanya, makan dulu atau kah shalat dulu ya? Kalau ndak makan, ntar shalat ndak khusuk, tetapi kalua makan dulu, maka waktu shalat akan lewat – shalat jadi ndak sempat. Ah...shalat dulu”*. Pikiran seperti ini juga sering muncul sebelum seseorang keluar dari rumahnya, sejak dia memikirkan mau ketemu siapa, apa yang harus dipersiapkan, kemudian apa yang harus diomongkan, dan nanti mau keluar rumah jam berapa dan menggunakan sepatu yang mana dan kendaraan apa? Proses komunikasi dalam diri juga dapat terjadi satu arah atau dua arah, antara tidak terjadi dialog dan terjadi dialog.

Banyak orang tertarik untuk mengetahui apa yang tengah terjadi “dalam diri sendiri” & “dalam diri orang lain”, bagaimana kita mengamati apa yang sedang terjadi di sekitar kita, dan bagaimana kita memberi makna, dan inilah yang kemudian memunculkan model-model komunikasi intrapersonal – Gambar 7.4.

### INTRAPERSONAL COMMUNICATION MODEL



Gambar 7.4. Model Komunikasi Intrapersonal

Gambar 7.4 menunjukkan bahwa proses komunikasi intrapersonal yang terjadi dalam diri seseorang. Pesan atau stimuli dapat datang dari luar dirinya, yang disebut sebagai *stimuli eksternal* atau juga datang dari dalam dirinya atau disebut sebagai *stimuli internal*. Stimuli eksternal dapat berupa cahaya terang yang masuk menembus jendela, suara kucing, nyanyian tetangga, suara orang mengetuk pintu, suara petir karena hujan atau suara hujan itu sendiri, rasa sakit digigit nyamuk, atau bau sedap masakan di dapur, atau lainnya. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa boleh jadi stimuli eksternal yang diterima seseorang adalah banyak, dan secara otomatis dalam diri seseorang terjadi usaha-usaha pemilahan, pengelompokan dan pemilihan stimuli mana yang mau direspon. Jika petir dan hujan yang mau direspon, maka akan muncul tindakan untuk keluar rumah dan mengangkat pakaian yang ada di jemuran, tetapi jika yang lain yang direspon, maka tindakannya juga akan lain. – Gambar 7.4.

Stimuli internal juga boleh jadi banyak dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh muncul rasa lapar, dan pada saat bersamaan kepikiran belum shalat, atau juga ada rasa pusing, atau sakit perut ma uke belakang. Stimuli mana yang harus dipilih untuk direspon? Pada saat-saat seperti ini seringkali muncul dialog dalam diri seperti misalnya “makan dulu atau shalat dulu atau ke kamar mandi dan buang hajat dulu?” Respon terhadap semua pertanyaan ini dapat terjadi dalam diri dan itulah proses komunikasi intrapersonal – internal self-feed back, tetapi ketika seseorang mengambil tindakan untuk memasak dan teramati oleh orang lain, maka inilah yang disebut sebagai feed-back eksternal (external self feed-back).

## **(2) Model Komunikasi Interpersonal**

Model komunikasi interpersonal yang cukup terkenal adalah model SMCR dari David Berlo – Gambar 7.5. Model ini menggambarkan bahwa suatu proses komunikasi interpersonal atau komunikasi antara pribadi yang melibatkan dua orang atau disebut juga sebagai komunikasi “Dyadic” melibatkan 4 (empat) elemen utama, yaitu



**Sumber** (Source), **Pesan** (Message), **Saluran** (Channel), dan **Penerima** (Receiver).

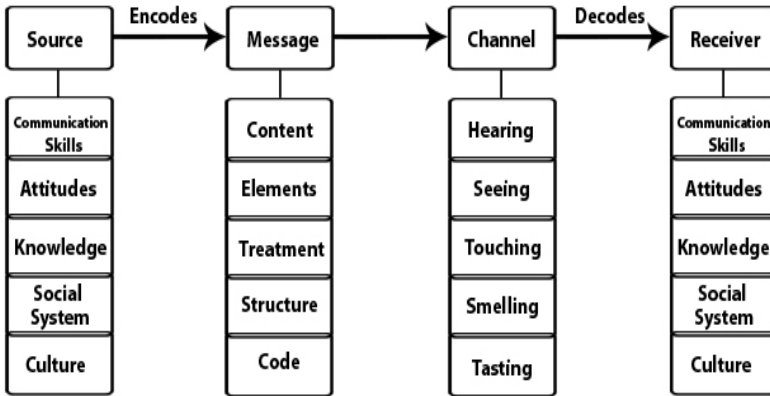
- (1) **Sumber:** Seseorang yang memulai atau mengambil inisiatif untuk berkomunikasi. Sumber juga disebut sebagai “komunikator”. Sebagaimana tampak pada Gambar 6.4, pada masing-masing elemen atau komponen komunikasi terdapat faktor atau unsur-unsur yang juga mempengaruhi proses dan efektifitas komunikasi. Berlo menunjukkan bahwa ada 5 (lima) unsur atau faktor pada diri sumber atau penerima yang akan menentukan efektifitas komunikasi, yaitu *keterampilan komunikasi* (communication skills), *sikap* (attitudes), *pengetahuan* (knowledge), *sistem sosial* (social system), dan *budaya* (culture).

Jika kelima unsur ini dibawa dalam konteks penyuluhan pertanian, dan sedang terjadi komunikasi antara seorang penyuluh dengan seorang petani, maka kelima unsur yang ada pada kedua pelaku komunikasi dapat menentukan efektivitas komunikasi keduanya. Penyuluh yang terlatih dan paham dengan kelima unsur tentu akan memilih waktu yang pas untuk berkomunikasi, menggunakan Bahasa yang cocok untuk berkomunikasi, bersikap baik dalam berkomunikasi – yang tercermin dari ucapan, intonasi dan gaya bicaranya. Penyuluh yang baik juga paham bagaimana Bahasa yang harus digunakan ketika mengetahui petani yang dihadapinya tidak mengerti Bahasa Indonesia. Penyuluh ini juga akan mengerti pakaian apa yang seharusnya dipakainya ketika mau berkomunikasi dengan petani yang sudah diketahuinya.

- (2) **Pesan:** Sesuatu yang disampaikan oleh sumber atau yang diterima oleh penerima dalam suatu proses komunikasi. Sesuai dengan tiga tujuan pokok dari suatu proses komunikasi (komunikasi informasi, komunikasi persuasif, dan komunikasi hiburan), maka pesan-pesan dalam proses komunikasi dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu (i) berupa fakta-fakta

yang dimaksudkan untuk diinformasikan (pesan informatif), yang tujuannya agar penerima bertambah informasinya atau pengetahuannya; (ii) pesan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi (pesan persuasif) agar penerima berubah atau mempertahankan sikapnya seperti menjadi mau, menjadi tertarik atau menjadi setuju sesuai yang dikehendaki sumber; dan (iii) pesan-pesan yang dimaksudkan untuk menghibur (pesan hiburan) yang dimaksudkan agar penerima menjadi terhibur yang ditunjukkan oleh reaksi tertawa, merasa rileks, dan senang. Sesuai dengan Gambar 7.5, ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi pada unsur atau elemen pesan komunikasi, yaitu *isi* (content), *elemen* (element), *perlakuan* (treatment), *struktur* (structure), dan *kode* (code). Proses komunikasi akan efektif jika isi pesan sesuai dengan kebutuhan penerima, volume pesan tidak terlalu banyak, dengan elemen pesan yang jelas, pesan penting diperlakukan beda dengan pesan-pesan yang tidak penting (mungkin perlu diulang atau diperjelas), struktur pesan disampaikan dengan struktur yang jelas, misalnya mulai dengan pengantar singkat dan lanjutkan dengan isi dan penutup, serta gunakan kode yang jelas ketika menyampaikan pesan – simbol-simbol visual yang sesuai atau kata serta kalimat yang dapat dimengerti.

## Berlos's SMCR Model of communication



Gambar 7.5. Model Komunikasi Interpersonal

- (3) **Saluran:** Saluran dalam proses komunikasi seringkali disebut media komunikasi, dimana pesan-pesan komunikasi diantarkan kepada penerima. Saluran komunikasi dapat berupa media cetak seperti koran/majalah/poster/brosur/leaflet/booklet/spanduk/buku, juga media elektronik seperti komputer yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan akses internet, HP, dan lainnya. Media dalam komunikasi interpersonal boleh jadi juga dalam bentuk benda asli seperti “Semangka tanpa biji yang sedang mau diperkenalkan” atau “Miniatur Sapi Bunting” yang digunakan untuk menjelaskan tentang anatomi sapi. Ketika media-media ini digunakan dalam konteks komunikasi interpersonal, maka efektivitas komunikasi interpersonal akan ditentukan oleh unsur-unsur seperti kemampuan untuk *didengar*, *dilihat*, *dicum*, *disentuh*, *dicip*, dan *dirasakan*- Gambar 7.5.
- (4) **Penerima:** Seseorang yang menerima pesan-pesan komunikasi. Penerima seringkali juga disebut sebagai orang yang diajak berkomunikasi atau “komunikasikan”. Seperti halnya sumber dalam

proses komunikasi interpersonal, pada diri penerima pesan ada faktor atau unsur-unsur penting yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, yaitu *keterampilan komunikasi* (communication skills), *sikap* (attitudes), *pengetahuan* (knowledge), *sistem sosial* (social system), dan *budaya* (culture). Seorang petani yang memiliki keterampilan berkomunikasi cenderung disukai oleh penyuluh karena kemampuannya berbicara secara terstruktur, tode point, memiliki sikap dewasa, dan etika berkomunikasi yang baik. Sebaliknya, seseorang yang kurang memiliki kemampuan berkomunikasi tentu tidak akan dapat melakukan komunikasi interpersonal yang efektif.

Sebagaimana tampak pada Gambar 7.5, pada diri penerima ada kegiatan “pengkodean kembali” (decode) pesan yang diterimanya dari sumber. Kata-kata atau pesan audio yang diterima oleh penerima melalui inderanya (didengar) akan dirubah kedalam bentuk lain -dalam bentuk visual seperti ketika terjadi kedua pelaku komunikasi membicarakan tentang hama “kutu loncat” pada lamtoro. Penyuluh menyebutkan dan mendeskripsikan kutu loncat dalam telepon dan petani sebagai penerima mencoba membayangkan bahwa “oh kutu loncat itu seperti belalang...atau kutu busuk atau yang lainnya”. Inilah proses dekode yang terjadi di pihak penerima. Ketika penyuluh atau komunikator berusaha untuk mendeskripsikan “hama kutu loncat”, maka sesungguhnya dia sedang melakukan proses “pengkodean” (encode), yaitu mentransfer pesan visual menjadi pesan audio, yang kemudian ditangkap oleh penerima atau komunikasi menurut interpretasinya.

Dalam perkembangannya, ada yang menambahkan unsur efek pada model komunikasi interpersonal David Berlo.

- (5) **Efek:** Sesuatu yang terjadi pada diri penerima setelah menerima pesan yang disampaikan sumber. Efek komunikasi dapat dikelompokkan menjadi efek yang dikehendaki dan efek yang tidak dikehendaki. Efek yang dikehendaki misalnya

meningkatnya pengetahuan, berubahnya sikap, dan terhiburnya penerima pesan sesuai dengan harapan sumber atau pengirim pesan, misalnya mempraktikkan “Sistim Tanam Legowo”. Efek yang tidak dikehendaki adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan yang sesungguhnya tidak menjadi tujuan dari proses komunikasi. Sebagai contoh, suatu proses komunikasi yang pada awalnya dimaksudkan untuk menginformasikan kepada “penerima” tentang modus-modus operandi kejahatan, dimanfaatkan oleh “penerima” yang tidak bertanggung jawab untuk belajar tentang bagaimana melakukan kejahatan. Setelah menerima pesan, penerima pesan bertambah wawasan dan pengetahuannya tentang cara melakukan kejahatan.

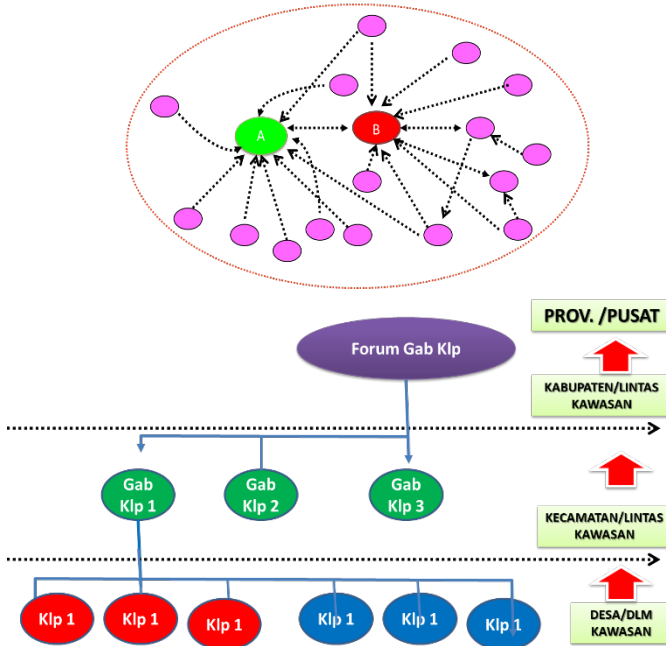
### **(3) Model Komunikasi Kelompok**

Komunikasi dalam kelompok melibatkan lebih dari 2 orang, dan bentuk komunikasinya dapat berlangsung (i) antara anggota dengan anggota, (ii) antara anggota dengan pengurus atau sebaliknya antara seorang atau beberapa pengurus dengan semua anggota (rapat, diskusi atau musyawarah), (iii) dan antara pengurus dengan pihak luar secara horizontal (pengurus kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, dan atau antar pengurus kelompok secara vertikal dengan pengurus gabungan kelompok tani. Memperhatikan bentuk-bentuk komunikasi yang mungkin terjadi di dalam kelompok, maka elemen-elemen pokok dalam komunikasi kelompok adalah *pengurus kelompok (sumber)*, *pesan (message)*, *saluran (channel)*, *anggota kelompok (penerima)*.

Ketika komunikasi yang terjadi di dalam kelompok berlangsung antara seorang anggota kelompok dengan seorang anggota kelompok lainnya atau antara seorang pengurus dengan seorang anggota, maka elemen-elemen komunikasinya sama dengan elemen komunikasi dalam komunikasi interpersonal karena melibatkan dua orang atau dyadic communication. Jika proses komunikasinya berlangsung antara pengurus dengan sejumlah anggota, maka komunikator dan

komunikasikan berjumlah lebih dari seorang. Efektivitas komunikasi kelompok seperti ini, selain ditentukan oleh elemen komunikator, komunikan, pesan dan saluran, maka elemen lain yang turut mempengaruhi efektivitas proses komunikasi adalah (i) *ukuran kelompok* – semakin besar ukuran kelompok atau anggota kelompok makin banyak, maka semakin kurang efektif komunikasi dalam kelompok itu, dan sebaliknya jika ukuran kelompok kecil, maka ada kecenderungan komunikasi kelompok dapat berlangsung efektif; (ii) *kepemimpinan* dalam kelompok; (iii) *norma kelompok* – aturan atau norma kelompok; (iv) *suasana kelompok*.

### MODEL KOMUNIKASI KELOMPOK



Gambar 7.6. Model Komunikasi Kelompok

#### (4) Model Komunikasi Massa

Model komunikasi massa melibatkan lembaga yang memproduksi dan mengirimkan pesan dengan audiens atau khalayak yang jumlahnya besar dan sering tidak teridentifikasi. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa sebagai saluran. Ada dua model komunikasi massa yang penting untuk dibahas dalam konteks penyuluhan pertanian, yaitu model Jarum Suntik dan model komunikasi 2 tahap.

*Model jarum suntik* (dikenal *hypodermic needle model*) juga dikenal sebagai “*model peluru magik*” (*Magic Bullet Theory*) berasumsi bahwa pesan media adalah disuntikkan atau diinjeksi secara keseluruhan kepada alam kesadaran audiens atau khalayak dan kemudian diterima seluruhnya. Perang Dunia adalah satu ilustrasi atau contoh klasik dari teori media ini. Pendengar radio diinformasikan tentang invasi Alien sedang terjadi, dan mendadak audiens panik dan secepatnya beraksi tanpa mencari klarifikasi tentang kebenaran informasi dan sumber pesan.

Lasswell menjelaskan bahwa teori peluru ini bermakna bahwa pemilik pesan atau sumber dapat secara langsung mempengaruhi atau memanipulasi persepsi dari pihak audiens. Teori bersandar pada ide bahwa audiens adalah pasif dan hanya bertindak sebagai penerima pesan., yang memungkinkan lebih mudah bagi sumber informasi untuk mempengaruhi audiens.

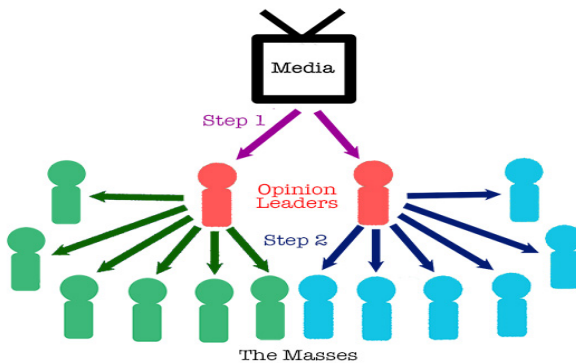
Penggunaan istilah “peluru” (“bullet”) dan “Jarum” (“needle”) menunjukkan kuatnya pengaruh atau dampak dari pesan komunikasi pada audiens atau penerima dan kekuatan yang dimiliki oleh sumber pesan. Boleh jadi model ini masih relevan dan benar untuk saat ini, tetapi model ini berkembang sangat pesat di tahun 1930s, 1940s, dan 1950s dengan pengaruh dan kekuatan yang luar biasa hingga mempengaruhi keyakinan dan perilaku audiens. Konsekuensinya adalah bahwa audiens tidak dapat menolak pengaruh dari pesan media. Kondisi peran media yang dominan dalam mempengaruhi khalayak

tampaknya masih berlaku untuk saat ini, terlebih ketika semua media dikuasai oleh pemilik modal – capitalist oligarchy.

**Efek:** Para peneliti menentukan dua hal kritis dari model “peluru atau jarum suntik”, yaitu: (1) efek atau pengaruh pesan media adalah sama bagi setiap orang, artinya bahwa audiens diperlakukan sebagai organisme tunggal, yang menjadikan mudah bagi media untuk memanipulasi audiens. Audiens seperti ini tidak resisten terhadap pesan, dan menjadikan sumber atau pengelola media mengendalikan audiens. (2) Makna dari pesan seragam bagi setiap orang, yang berarti bahwa audiens akan bereaksi dengan dan dalam cara yang sama sekalipun mereka memiliki persepsi dan kepercayaan yang berbeda. Ini berarti bahwa audiens tidak berusaha untuk melawan atau menentang apapun yang mereka dengar.

**Model dua tahap (Two-Step Model):** Pencetus teori model alir dua tahap - *Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, and Hazel Gaudet* berpikiran bahwa pengaruh langsung media sangat kecil terhadap pikiran dan perasaan audiens, dan banyak fakta membuktikan bahwa seseorang tidak langsung bertindak ketika mendengar pesan dari radio atau televisi atau koran. Pengaruh yang besar sesungguhnya ada pada tokoh-tokoh lokal, dan merekalah yang menjadi sasaran dari pesan media. Oleh karena itu, muncul konsep bahwa pengaruh media kepada audiens adalah melalui dua tahapan. **Tahap pertama** pesan-pesan dari media diterima atau ditangkap oleh para tokoh masyarakat atau dikenal sebagai **Opinion Leaders** (pemuka pendapat), yang cenderung memiliki akses terhadap media karena posisinya yang tinggi secara sosial dan ekonomi. **Tahap kedua**, pesan yang diterima oleh para tokoh ini kemudian diteruskan kepada orang-orang kebanyakan yang ada di sekitarnya seperti keluarganya, tetangga dan kenalannya sesuai dengan interpretasinya – Gambar 7.7.





Gambar 7.7. Model Komunikasi Dua Tahap (Two-step Flow Model)

Model alir dua tahap boleh jadi tidak relevan lagi saat ini ketika teknologi komunikasi dan informasi sudah sangat maju dan berkembang, dan setiap orang memiliki kemampuan untuk mencari dan memburu sendiri informasi yang diperlukannya melalui media massa dan media internet dan web-site, juga melalui group whach-upp dan lainnya. Fakta ini sejalan dengan teori lain yang menyatakan bahwa pesan komunikasi dari media massa dapat melalui tahapan yang lebih kompleks – multiple flow theory of mass communication.

### (5) Model Komunikasi Lintas Budaya

Model komunikasi lintas budaya sebenarnya perspektif lain dari proses dan tingkatan komunikasi. Pelaku atau aktor komunikasi, yaitu komunikator dan komunikan dapat berasal dari dua budaya yang berbeda, dan boleh jadi karena perbedaan budaya ini akan menjadi penghambat dalam mewujudkan komunikasi yang efektif. Model komunikasi lintar budaya dapat saja berlangsung pada tingkatan komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa, dan ini berarti bahwa faktor-faktor atau elemen-elemen komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan komunikasi

massa masih berlaku dalam menelaah atau mengkaji efektivitas komunikasi.

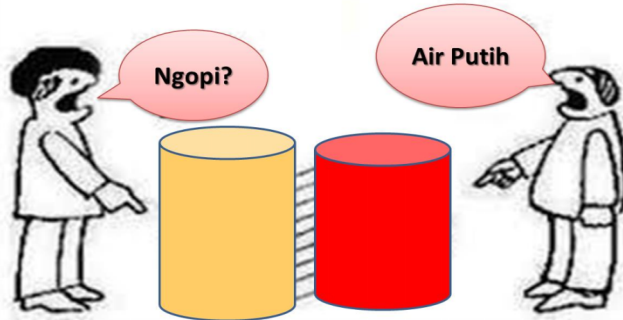
Perhatian ekstra perlu diberikan kepada konteks budaya dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, apa pun tingkatan komunikasi yang terjadi. Relevan dengan pemikiran ini, maka ada beberapa konsep yang perlu dipahami agar proses komunikasi lintas budaya dapat berlangsung efektif, yaitu:

***Konsep diri (self-concept):*** Proses tumbuh kembang seseorang akan membentuk “dirinya” sesuai dengan nilai dan budaya yang ada di lingkungannya. Ketika seseorang tumbuh dalam masyarakat yang religius, maka sosok orang seperti ini akan muncul sebagai pribadi atau diri yang “religius, suka membantu, penolong, dan bersih dari dosa dan kesalahan”. Baginya hidup adalah “berbuat kebajikan”. Inilah yang kemudian terwujud dan muncul sebagai “konsep diri” atau “self-concept” dari orang ini. Persoalan akan muncul dalam proses komunikasi lintas budaya ketika seseorang yang tumbuh dan besar dalam masyarakat yang egois, sulit, dan tidak ada budaya saling tolong menolong. Ketika konsep diri seperti ini yang terbawa dalam proses komunikasi, maka akan muncul permasalahan yang kemudian mempengaruhi efektivitas komunikasi. Pasangannya berkomunikasi mungkin akan menghindari ketika berhadapan dengan seseorang dengan konsep diri yang tidak mendukung.

***Konsep empathy (role taking theory and inferential theory of empathy):*** Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengerti pikiran dan perasaan orang lain. Kemampuan ini dapat bersumber dari dua cara, yang *pertama* bersumber dari pengalaman yang dilaluinya selama proses tumbuh dan berkembang. Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat membentuk kemampuan untuk memberi makna terhadap perilaku orang-orang. Bagi masyarakat di pedesaan atau perkotaan Lombok, menyajikan kopi adalah tanda penghargaan terhadap kehadiran tamu. Setiap tamu yang datang, yang pertama disajikan adalah kopi. Kebiasaan ini kemudian membentuk konsep diri bahwa setiap tamu yang datang harus ditawarkan dan dilayani dengan

kopi sebagai tanda penghormatan terhadap tamu. Ketika suatu saat terjadi bahwa seseorang yang bertamu tidak disodori kopi, maka ini dapat dimaknai bahwa kehadirannya tidak diharapkan. Kemampuan memahami pikiran dan perasaan orang lain melalui cara seperti ini dikenal sebagai proses inferensi, yaitu mengacu kepada pengalaman sendiri. Teori inferensi dari konsep empati menegaskan bahwa seseorang akan mampu memahami pikiran dan perasaan orang lain ketika dia sendiri mengalaminya. Seorang ibu hanya akan mengerti bagaimana sakitnya ketika melahirkan ketika dia memiliki pengalaman melahirkan. Belakangan teori ini dibantah karena orang lain dapat belajar dari pengalaman orang dan tidak harus mengalaminya sendiri.

*Cara kedua* untuk mengerti pikiran dan perasaan orang lain adalah melalui proses belajar yang dikenal dengan “Role Taking theory of Emphaty”. Seseorang yang melakukan komunikasi lintas budaya perlu memahami dan belajar tentang budaya dan konsep diri orang lain. *Menunjuk dengan tangan kiri* bukan berarti sebuah tindakan yang tidak sopan pada komunitas tertentu, tetapi menjadi tindakan tidak sopan dalam masyarakat lain. Suara keras dan muka merah dapat bermakna marah dalam suatu masyarakat, tetapi tidak demikian dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, ketika ada rencana untuk melakukan komunikasi lintas budaya, *perlu untuk mencari tahu dan mendalami budaya dari setiap orang atau masyarakat agar setiap orang yang terlibat di dalam proses komunikasi* sehingga dapat memberi interpretasi dan bertindak yang benar terhadap simbol atau perilaku yang muncul. Suara rebut dalam suatu kegiatan seminar atau ceramah dapat menjadi isyarat bahwa pembicaraan membosankan atau tidak relevan atau sudah terlalu lama atau bahkan sudah tidak menarik. Pembicara yang mengerti empati akan segera mengakhiri pertemuan jika kondisi seperti ini terjadi.

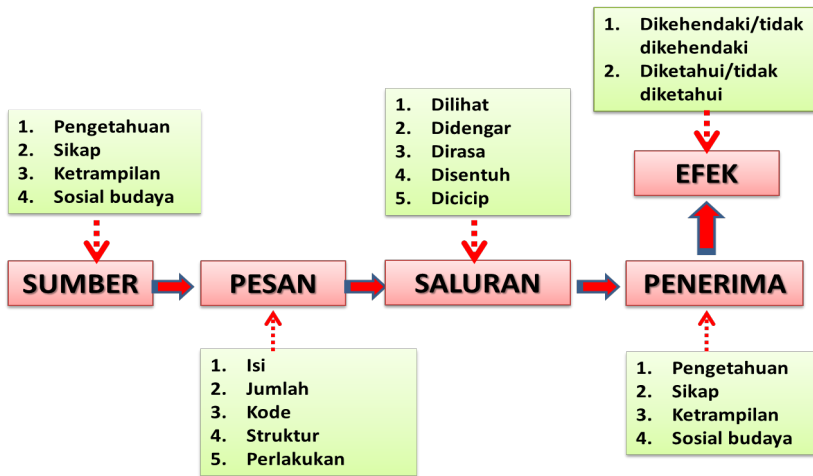


Gambar 7.8. Model Komunikasi Lintas Budaya

## 7.5. Efektivitas Komunikasi

Suatu proses komunikasi dianggap efektif ketika pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh penerima dan terjadi perubahan pada diri penerima sesuai dengan yang dikehendaki oleh sumber. Pesan “A” yang dikirimkan oleh sumber akan ditangkap “A” oleh penerima. Sebaliknya, jika terjadi penyimpangan (distorsi) pesan, misalnya menjadi “B”, maka komunikasi dianggap tidak berlangsung efektif.

Atas dasar model-model yang dikembangkan oleh para ahli tentang model proses komunikasi, dari model komunikasi intrapersonal hingga model komunikasi massa dan lintas budaya, maka sesungguhnya semua model ini sudah secara langsung menunjuk elemen-elemen atau faktor-faktor penentu efektivitas komunikasi. Ketika Berlo merumuskan SMCR model untuk komunikasi interpersonal, maka empat faktor utama yang mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal adalah sumber, pesan, saluran, dan penerima. Sebagaimana diuraikan di atas, pada masing-masing elemen ada lagi faktor-faktor yang menentukan efektivitas suatu komunikasi. Pada elemen sumber dan penerima ada lima faktor yang menjadi penentu efektivitas komunikasi yaitu keterampilan komunikasi, pengetahuan, sikap, lingkungan sosial, dan budaya – Gambar 7.9.



Gambar 7.9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Komunikasi

Gambar 7.9 menunjukkan beberapa komponen pada proses komunikasi yang menentukan efektivitas proses komunikasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sumber:** Pada isi “sumber”, baik sebagai individu, kelompok atau lembaga, ada beberapa faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Faktor-faktor tersebut adalah (i) *pengetahuan*; (ii) *sikap*; (iii) *ketrampilan*, dan (iv) *konteks sosial budaya*. Suatu proses komunikasi akan cenderung efektif apabila sumber memiliki *pengetahuan yang cukup dan memadai* tentang “penerima”, “pesan”, “media”, dan “dirinya”. Pengetahuan yang memadai pada diri sumber tentang penerima dapat ditelusuri antara lain melalui beberapa pertanyaan berikut: Apakah penerima mengerti bahasa Indonesia? Apakah penerima bisa membaca/melihat/mendengar? Apakah pendidikan penerima cukup memadai? Apakah tingkat ekonomi penerima memungkinkannya untuk mengakses televisi/radio/koran? Apakah penerima telah memiliki pengetahuan awal tentang pesan yang hendak dikomunikasikan? Apakah penerima memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan pesan-pesan yang hendak disampaikan?

Ketika sumber memiliki jawaban yang lengkap terhadap semua pertanyaan ini, maka sumber akan dapat menentukan strategi yang tepat dalam berkomunikasi dengan penerima yang memiliki kondisi atau ciri-ciri yang diketahuinya.

Pengetahuan yang baik terhadap pesan yaitu sejauh mana sumber menguasai materi yang hendak disampaikan. Penguasaan yang baik terhadap materi pesan akan memberi kepercayaan diri pada sumber dan sebaliknya jika sumber kurang menguasai apa yang hendak dikomunikasikannya, maka sumber akan tampil tidak percaya diri di hadapan penerima. Hal ini akan menjadi hambatan dalam menciptakan komunikasi yang efektif.

Sumber juga seharusnya memiliki pengetahuan yang baik dalam hal produksi dan penggunaan media dalam penyuluhan. Media dalam penyuluhan dapat berupa media yang sudah jadi dan disiapkan, dan media yang belum jadi dan belum tersedia. Dalam kondisi media tidak tersedia, maka seharusnya sumber mempunyai kemampuan dalam merancang dan memproduksi media seperti poster, spanduk, leaflet, booklet, dan lainnya. Selain memiliki pengetahuan dalam produksi media, sumber juga harus mampu menentukan media yang sesuai dengan kondisi sasarannya.

Faktor *pesan* dan *saluran* juga menjadi faktor penentu efektivitas komunikasi. Seorang komunikator dan komunikan perlu memahami semua faktor ini ketika terlibat dalam proses komunikasi pada tingkat mana pun, baik komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa maupun komunikasi lintas budaya.

## **7.6. Ringkasan**

Uraian pada bab ini memberi gambaran tentang definisi, tujuan, dan tingkatan komunikasi. Atas dasar uraian ini, maka dapat dipahami bahwa dalam rangka penyuluhan pertanian tersedia pilihan alternatif komunikasi yang dapat dilakukan dalam rangka mendorong terjadi proses adopsi dan difusi inovasi secara efektif. Masing-masing

tingkatan komunikasi, dari komunikasi intrapersonal hingga komunikasi lintas budaya, memiliki posisi dan perannya masing-masing dalam penyuluhan pertanian. Komunikasi massa boleh jadi digunakan dalam masa-masa awal penyampaian informasi dan pesan karena sifatnya yang cepat dan luas pengaruhnya. Penggunaan media massa efektif untuk memperkenalkan program atau inovasi dan mempengaruhi audiens atau sasaran komunikasi atau dengan kata lain, komunikasi massa akan menjadi pilihan pertama dalam mensosialisasikan program – tentu jika sasarannya adalah massa atau masyarakat luas.

Tingkatan komunikasi berikutnya yang jadi pilihan adalah komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal. Kedua tingkatan komunikasi ini akan efektif dalam memberikan informasi rinci dan mendalam kepada sasaran yang terbatas seperti salam kelompok tani atau kepada individu petani. Sementara itu, model komunikasi lintas budaya memberi peringatan bahwa seorang penyuluh perlu memperhatikan kondisi dan latar belakang budaya ketika berkomunikasi dengan petani binaannya. Pemahaman tentang budaya pada kelompok sasaran akan membantunya dalam menciptakan komunikasi yang efektif, karena dengan pemahaman ini penyuluh akan memiliki kemampuan untuk berempati – mampu memberi interpretasi terhadap perilaku petani atau sasaran komunikasi sehingga dapat merancang komunikasi yang lebih efektif.

## 8. ADOPSI DAN DIFUSI INOVASI

### 8.1. Pengantar

Adopsi dan difusi inovasi menjadi teori atau konsep inti dari ilmu penyuluhan. Hal ini dapat dimaklumi karena tujuan utama dari kegiatan penyuluhan adalah agar petani atau sasaran penyuluhan menerapkan inovasi, yang kemudian akan meningkatkan produktivitas usaha taninya, yang pada akhirnya adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan. Adopsi sebagai sebuah proses mental harus dipahami oleh setiap orang yang belajar ilmu penyuluhan. Para pakar penyuluhan dan pengembangan masyarakat berusaha memahami proses mental yang terjadi, dari sejak seseorang mendengar atau terekspose oleh informasi tentang suatu inovasi baru hingga pada akhirnya menerapkan inovasi ini dalam kehidupannya. Untuk kepentingan dalam memahami proses adopsi, maka dalam bab ini akan dibahas dua teori pokok adopsi yang berkembang dalam ilmu penyuluhan, yaitu *Teori Adopsi* dan *Teori Keputusan Inovasi*. Kedua teori ini dibahas dengan sangat baik dan komprehensif dalam buku karya Rogers edisi ketiga (Rogers E. M., 1983).

Sejalan dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan penyuluhan, peningkatan kesejahteraan petani melalui penerapan inovasi dan teknologi unggul, uraian dalam bab ini juga akan memberi gambaran utuh tentang hal-hal yang perlu diperhatikan agar proses adopsi dapat terjadi secara efektif, dan ketika setiap orang terpengaruh untuk menerapkan inovasi dan teknologi, maka itu bermakna bahwa inovasi dan teknologi itu telah menyebar dalam sistem sosial atau dalam masyarakat. Penyebaran inovasi dalam sistem sosial atau masyarakat inilah yang dalam bab ini disebut sebagai Difusi Inovasi. Seperti halnya dengan teori adopsi, pembahasan tentang teori Difusi Inovasi juga akan memberikan gambaran dan petunjuk tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan penyebaran inovasi atau difusi inovasi (Diederer, Van Meijl, & Wolters, 2003).



Sebagai bahan pendukung dan memberikan fakta tentang konsep dan teori adopsi dan difusi inovasi, maka di bagian akhir disampaikan fakta tentang kasus adopsi dan difusi inovasi yang ada dalam masyarakat, sesuai dengan bahan yang penulis miliki atau hasil kajian lainnya (Feder, Just, & Zilberman, 1985). Atas dasar fakta ini, akan dapat dipahami hubungan antara adopsi dan difusi inovasi dengan perbaikan penghidupan masyarakat setelah terjadinya adopsi inovasi. Perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan terjadi karena inovasi diadopsi dan menyebar dalam masyarakat (Feder & Umali, 1993). Kegagalan dalam pengembangan masyarakat sering kali terjadi karena kegagalan masyarakat dalam menerima dan menerapkan inovasi, dan ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Bab ini menguraikan secara komprehensif tentang inovasi, adopsi dan difusi, yang ketiganya menjadi konsep kunci dalam ilmu penyuluhan.

## **8.2. Inovasi**

*Inovasi* adalah konsep kunci dalam penyuluhan, karena inovasi inilah yang dikomunikasikan oleh penyuluh untuk disampaikan kepada petani atau sasaran penyuluhan. *Inovasi* diartikan sebagai “*sesuatu ide, metode atau obyek yang dianggap baru oleh seseorang, tetapi tidak selalu merupakan hasil dari kegiatan penelitian terbaru*” (Van den Ban & Hawkins, 1996). Sejalan dengan ini, ada juga yang mendefinisikan inovasi sebagai “*suatu cara baru dalam mengerjakan sesuatu (An innovation is a new way of doing something)*” atau juga “*Mengacu kepada munculnya perubahan radikal/revolusioner dlm pemikiran, produk, proses atau organisasi (It may refer to incremental and emergent or radical and revolutionary changes in thinking, products, processes, or organizations)*”.

Jika mengacu kepada fakta tentang cara baru atau sesuatu yang baru dalam bidang pertanian, maka definisi tersebut dapat menunjuk pada inovasi misalnya sistim tanam jajar legowo, sistim atau cara tanam dengan menggunakan mulsa plastik, sistim bedengan dan pemangkasan pada sub sektor hortikultura, atau sistim kredit pertanian

“Grameen Bank” yang dikembangkan di Banglades, atau sistim satu pintu dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau sistim kerjasama melalui jaringan seperti Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) yang mampu membangun dan mengembangkan kemitraan bisnis dengan PT.Dian Niaga dalam produksi dan pemasaran madu hutan Sumbawa (Muktasam A. , 2017). Jika dicermati, contoh-contoh inovasi ini dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu sesuatu yang kongkrit dan teknis dan ini dikenal sebagai inovasi teknis atau *Technical Innovations* seperti mulsa plastik sistim bedengan, dan yang lainnya dikenal sebagai inovasi sosial atau *Social Innovations* seperti Grameen Bank dan LKM.

### 8.3. Adopsi Inovasi

Ketika bicara tentang adopsi inovasi, maka ada 2 (dua) konsep yang berkembang dan dibahas dalam banyak diskusi penyuluhan, yaitu teori adopsi inovasi konvensional, dan teori keputusan inovasi (Rogers & Shoemaker, 1987; Rogers E. M., 1983). Kedua teori ini akan dibahas secara lebih komprehensif pada bagian berikut.

Adopsi adalah *proses mental yang terjadi dalam diri seseorang dari sejak dia mendengar atau sadar akan adanya suatu inovasi hingga pada akhirnya menerapkan inovasi itu dalam kehidupannya*. Van den Ban dan Hawkins (1996) menjelaskan dalam bukunya bahwa dibutuhkan waktu antara ketika seseorang mendengar adanya inovasi baru dengan tindakannya dalam menerapkan inovasi itu dalam kehidupannya. Dibutuhkan waktu sekitar 4 (empat) tahun oleh petani-petani di Amerika Tengah-Barat untuk menerapkan rekomendasi-rekomendasi praktik pertanian terbaru (Rogers E. M., 1983). Para peneliti berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam rentang waktu tersebut dengan menjelaskan lima tahapan dalam proses adopsi sebagai berikut:

- (1) **Kesadaran (*Awareness*)** – tahapan seseorang mulai atau baru mendengar tentang adanya sesuatu yang baru, baik melalui temannya atau melalui media massa. Pada tahap ini seseorang

baru mendengarkan tentang Namanya dan mungkin juga tentang keunggulannya.

- (2) **Minat (Interest)** – tahapan ini seseorang mulai *mencari informasi lebih banyak tentang inovasi*, yang dapat dilakukannya dengan bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau menghubungi penyuluh atau juga mencoba mencari informasi lebih banyak melalui penelusuran pada media-media yang ada, termasuk melalui media sosial.
- (3) **Menilai (Evaluation)** – setelah mendapatkan banyak informasi tentang inovasi, maka pada tahapan ini seseorang *mulai menilai atau menghitung-hitung keuntungan atau kelebihan dari inovasi baru* yang didengar dan diketahuinya, dan membandingkan dengan apa yang dilakukan dan diperolehnya selama ini. Boleh jadi pada tahapan ini seseorang akan merasa atau menilai inovasi yang baru diketahuinya menguntungkan, dan dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Jika ini terjadi maka orang ini akan menempuh langkah berikutnya, yaitu mencoba inovasi tersebut dalam skala terbatas.
- (4) **Mencoba (Trial)** – guna memastikan hasil penilaiannya tentang inovasi, *maka tindakan untuk mencoba dalam skala kecil adalah pilihan yang harus diambil*. Pada tahapan ini seseorang akan memulai dengan langkah-langkah sesuai petunjuk dan informasi yang diterimanya, mengamati bagaimana proses dan hasilnya. Tahapan ini juga akan memberikan kesempatan kepada orang yang mencoba inovasi merasakan dan membuktikan bahwa inovasi yang dicobanya mudah atau rumit atau hasilnya sesuai dengan harapannya.
- (5) **Menerapkan (Adoption)** – buah dari kegiatan mencoba inovasi dalam skala kecil adalah tindakan untuk *menerapkan dalam skala yang lebih luas*. Sebagai contoh. Seseorang yang mencoba untuk menanam semangka tanpa biji dengan hasil yang memuaskan pada luasan lahan 100 m<sup>2</sup>, akan memutuskan untuk kemudian menanam lagi dalam luasan yang lebih besar sesuai

dengan kemampuannya, tenaga, luas lahan dan dana yang tersedia.

Kritik terhadap konsep atau proses adopsi ini antara lain bahwa (1) *prosesnya tidak selalu berurutan* seperti yang diungkapkan oleh para ahli tersebut, tetapi boleh jadi melompat dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Sebagai contoh, tidak mungkin untuk membangun suatu bangunan baru di lahan pertanian dalam skala atau ukuran yang kecil. Dalam kasus lain, boleh jadi tahapan minat menjadi tahapan yang lebih awal dari tahapan kesadaran atau awareness, atau misalnya ketika petani berhadapan dengan suatu jenis penyakit batu dalam budidaya tanaman, yang belum dikenalnya (Van den Ban & Hawkins, 1996). (2) Kritik lain terhadap konsep atau tahapan adopsi ini adalah bahwa *proses atau tahapan adopsi tersebut seakan-akan berakhir dengan adopsi atau menerapkan inovasi*, pada hal banyak fakta yang menunjukkan bahwa petani tidak sampai pada tahap menerapkan inovasi dalam kegiatan usaha taninya. (3) Tahapan adopsi boleh jadi lompat atau tidak melalui tahapan mencoba, tetapi petani menerapkan atau mengadopsi inovasi (Rogers E. M., 1983).

#### **8.4. Teori Keputusan Inovasi**

Sebagai respons dan koreksi terhadap kritik terhadap teori adopsi tersebut, maka Rogers (1983) mengembangkan teori baru yang dikenal sebagai *Teori Keputusan Inovasi*, dan salah satunya adalah *Keputusan Inovasi Opsional* atau *Optional Decision Making* – proses keputusan yang dibuat oleh seseorang. Selain *keputusan inovasi opsional*, juga ada *keputusan otoritas* yang dibuat oleh seseorang pada posisi atasan atau lebih tinggi, dan *keputusan kolektif* – proses keputusan yang dilakukan oleh individu-individu yang ada dalam sistem sosial melalui konsensus.

Keputusan inovasi opsional adalah tahapan yang dilalui oleh seseorang sejak mendengar adanya inovasi baru hingga memutuskan untuk menerima atau menolak suatu inovasi dan kemudian menerapkannya

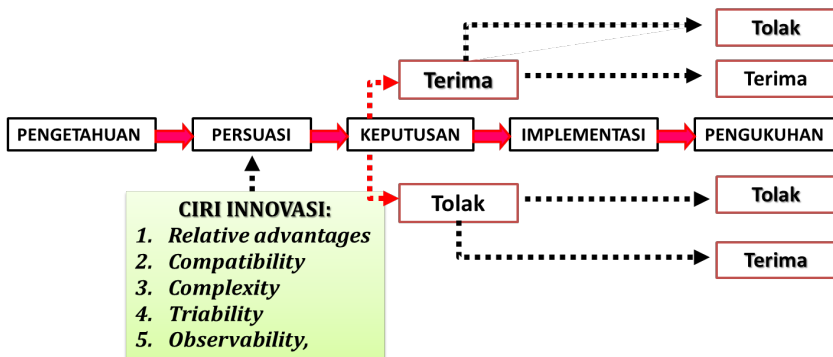
dalam kehidupannya hingga terkonfirmasi. Lima tahapan dalam keputusan inovasi opsional adalah sebagai berikut:

- (1) ***Pengenalan atau Pengetahuan (Knowledge)*** – ini adalah tahapan dimana seseorang mulai mendengar adanya suatu inovasi atau sesuatu yang baru, tetapi belum cukup informasi tentang inovasi tersebut, dan belum juga tertarik untuk mencari atau memburu informasi lebih banyak dan lebih dalam tentang inovasi tersebut.
- (2) ***Persuasi (Persuasion)*** – ini adalah tahapan dimana seseorang tertarik untuk mencari informasi lebih banyak tentang inovasi yang baru diketahuinya, dengan bertanya kepada teman-temannya atau mencari informasi lebih rinci tentang inovasi tersebut melalui media yang ada. Tahapan persuasi dikenal juga dengan tahapan *pembentukan sikap* yang ditunjukkan oleh kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Ekspresi-ekspresi seperti *tertarik, mau, setuju* adalah ekspresi yang menunjukkan sikap, baik positif berupa mau atau tertarik maupun negatif seperti tidak mau atau tidak tertari. Tahapan persuasi sangat dipengaruhi oleh *sifat atau ciri inovasi*, yang dalam pandangan Rogers dijelaskan dalam 5 (lima) ciri dari suatu inovasi atau Innovation Characteristics (Rogers E. , 1983), yaitu sebagai berikut:
  - a. ***Keuntungan Relatif (Relative Advantage)*** – Dibanding yang sebelumnya
  - b. ***Kompatibilitas (Compatibility)*** – Kesesuaian dengan teknologi & kebiasaan lokal
  - c. ***Kompleksitas (Complexity)*** – Tingkat kerumitan
  - d. ***Triabilitas (Triability)*** – Kemampuan untuk diuji coba
  - e. ***Observabilitas (Observability)*** – Kemampuan untuk diamati
- (3) ***Keputusan (Decision)*** - the individual takes the concept of the innovation and weighs the advantages/disadvantages of using

the innovation and decides whether to adopt or reject the innovation.

- (4) **Implementasi (Implementation)** - the individual employs the innovation to a varying degree depending on the situation; the individual determines the usefulness of the innovation and may search for further information about it.
- (5) **Konfirmasi (Confirmation)** - the individual finalizes their decision to continue using the innovation and may use the innovation to its fullest potential.

Kelima tahapan proses dalam keputusan inovasi di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



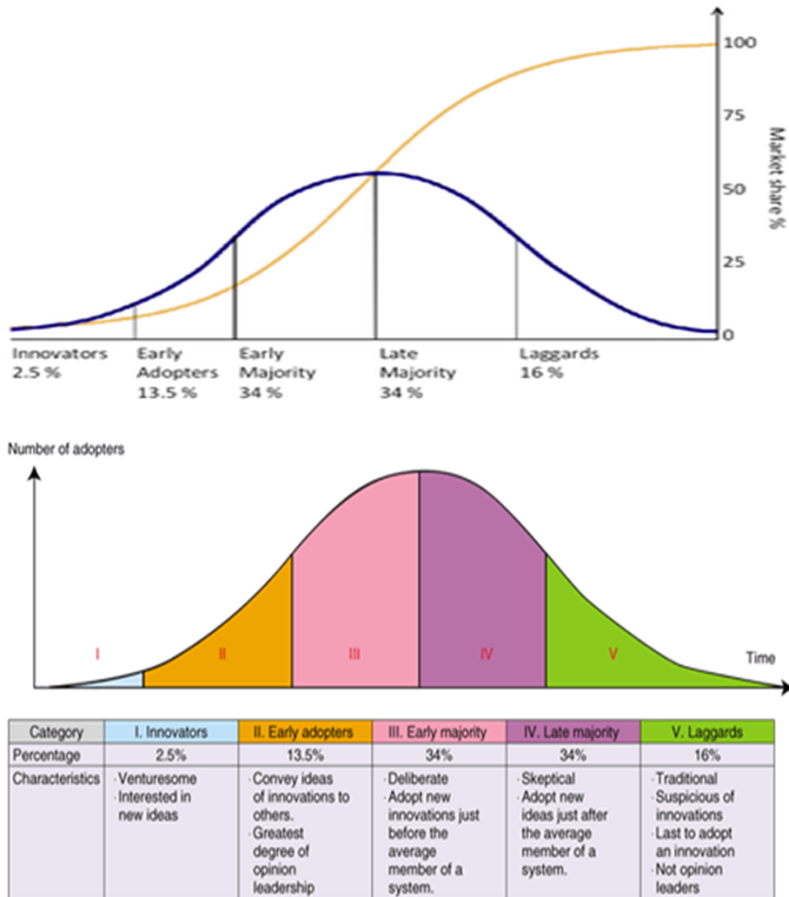
Gambar 8.1. Model Teori Keputusan Inovasi

### 8.5. Kategori Adopter

Atas dasar cepat atau lambarnya seseorang mengadopsi suatu inovasi, maka para adopter atau orang yang menerapkan inovasi dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu:

- (1) *Inovator or petualang (innovator)* – 2.5% of the social system: Gemar mencoba ide/gagasan baru, membangun hubungan dengan pihak luar, berani mengambil risiko, posisi ekonomi & pendidikan relatif lebih baik dari anggota sistem sosial pada umumnya

- (2) *Adopter awal or pelopor* - Si Teladan (Early Adopters) – 13.5%: Berorientasi ke dalam sistem sosial, meneliti lebih dulu sebelum adopsi, para pemuka pendapat, menjadi teman kerja penyuluh.
- (3) *Adopter awal terbanyak* (Early Majority) – 34%: Pengikut dini, penuh pertimbangan, mengadopsi setelah rata-rata mengadopsi, jarang yang menjadi pemimpin, bukan yang pertama & bukan juga yang terakhir.
- (4) *Adopter akhir terbanyak* (Late Majority) – 34%: Skeptis, mengadopsi setelah rata-rata anggota sistem sosial mengadopsi.
- (5) *Kolot (lagards)* – 16%: Tradisional, paling akhir mengadopsi, hampir tidak ada yang menjadi pemuka pendapat (opinion leader), berpandangan sempit, tidak berani mengambil resiko, terasing.



Gambar 8.2. Kategori Adopter

## 8.6. Difusi Inovasi

**Pengertian Difusi Inovasi:** Difusi inovasi didefinisikan sebagai proses menyebarnya suatu inovasi ke dalam suatu sistem sosial.

**Unsur-unsur Difusi Inovasi:** Unsur-unsur difusi adalah adanya INOVASI (sosial maupun teknik) yang DIKOMUNIKASIKAN kepada suatu SISTEM SOSIAL dalam WAKTU atau PERIODE

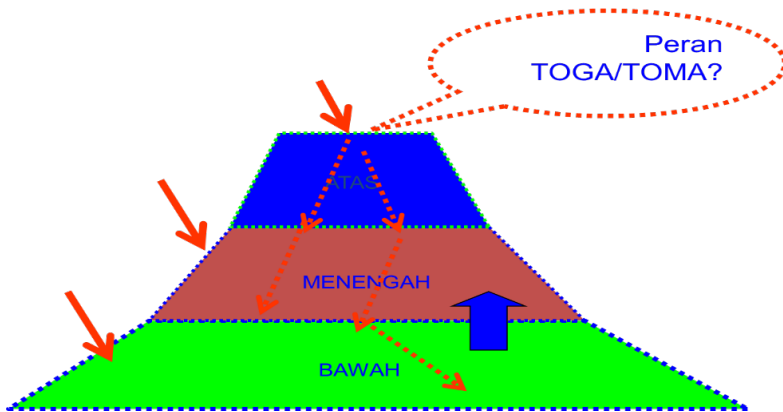


TERTENTU. Cepat atau lambat suatu inovasi (ide, teknologi, metode, cara atau sistim kerja baru) menyebar dalam sistem sosial atau masyarakat akan ditentukan oleh semua unsur ini! Dalam hal inovasi, maka ada faktor CIRI INOVASI yang akan menentukan yaitu tingkat keuntungan relatif, kesesuaian dengan kondisi sosial ekonomi & budaya lokal, tingkat kemudahan atau kerumitannya, kemampuan untuk dicoba, dan kemampuan untuk diamati. Makin menguntungkan suatu inovasi, makin mudah untuk dicoba dan dilihat serta makin sesuai dengan kondisi sosial ekonomi & lingkungan, maka makin cepat inovasi itu menyebar dalam sistem sosial! Demikian sebaliknya! Makin sulit inovasi untuk dicoba, diamati hasilnya, makin rumit, dan tidak sesuai dengan kondisi lokal dan makin rendah keuntungan yang diperoleh, maka akan makin sulit untuk menyebar dalam sistem sosial.

Unsur kedua dari difusi adalah KOMUNIKASI! Pilihan metode atau jenis komunikasi, intensitas komunikasi & unsur-unsur komunikasi akan mempengaruhi difusi atau penyebaran inovasi! Komunikasi massa akan dengan mudah merubah pengetahuan dan sikap anggota sistem sosial dalam jumlah yang banyak & luas dibanding dengan komunikasi kelompok dan interpersonal! Ini bermakna bahwa keberadaan inovasi akan cepat diketahui ketika komunikasi massa dipilih dalam menyebarkan inovasi! Makin sering dikomunikasikan via media maka akan semakin cepat inovasi itu menyebar dalam sistem sosial! Begitu sebaliknya! Faktor-faktor lain penentu efektivitas komunikasi juga akan mempengaruhi cepat atau lancarnya suatu sistem sosial menerima inovasi - seperti faktor sumber, pesan, saluran dan penerima.

Faktor lain yang mempengaruhi difusi adalah CIRI SISTEM SOSIAL. Suatu masyarakat yang tertutup tentu akan lama menerima inovasi dibanding dengan sistem sosial yang terbuka. Peran pemimpin atau tokoh masyarakat di dalam sistem sosial juga penting dalam proses difusi inovasi. Komponen lain dalam difusi adalah WAKTU yang diperlukan dalam menyebarkan inovasi. Inovasi perlu waktu untuk dapat menyebar dalam masyarakat. Ada inovasi yang butuh waktu

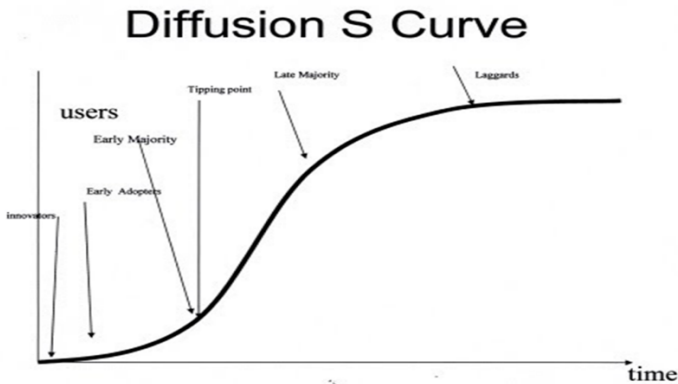
lama untuk menyebar dan ada yang butuh waktu singkat untuk menyebar.



Gambar 8.3. Difusi Inovasi

**Strategi Mempercepat Difusi Inovasi:** Pemahaman tentang unsur-unsur difusi memberikan gambaran tentang strategi bagaimana agar suatu inovasi dapat menyebar dengan cepat dalam suatu sistem sosial, yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan bermakna dalam sistem sosial itu - peningkatan kondisi sosial ekonomi & lingkungan. Sebagai contoh inovasi tentang agroforestry (pengelolaan lahan dengan kombinasi tanaman hutan atau pohon dengan tanaman pertanian), pertanian organik, usaha budidaya lele, biogas, pupuk cair, sistim tanam legowo, dan lainnya. Sebagai agen pembaharu atau pendorong perubahan sosial, maka langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana menginisiasi agar inovasi itu "*dipandang menguntungkan, mudah, sesuai, dapat dilihat hasilnya & dapat dicoba dalam skala kecil*" untuk ini penyuluh perlu memikirkan strategi komunikasi yang sesuai agar sistem sosial atau petani menjadi yakin dengan inovasi yang disampaikan. Pendekatan massa dapat menjadi pilihan strategi komunikasi di bagian awal-jika "sasaran" cukup luas, se provinsi atau se Indonesia misalnya. Setelah itu dilakukan pendekatan kelompok dan perorangan. Pemahaman tentang sifat atau

ciri sistem sosial juga penting. Jika suatu sistem sosial masih relatif tertutup & peran tokoh informal masih kuat (struktur sosial), maka pendekatan komunikasi interpersonal dengan para tokoh menjadi kunci bagi efektivitas adopsi & difusi inovasi dalam sistem sosial.



Gambar 8.4. Kurva Difusi Inovasi

### 8.7. Telaah Kritis Strategi Adopsi Dan Difusi Agroforestry

*“Ada dua hal yang mungkin menjadi latar belakang kenapa “agroforestry” menjadi sesuatu hal yang penting untuk dibicarakan dan dibahas. Pertama, agroforestry dianggap sebagai sebuah inovasi yang memiliki keunggulan relatif dibanding dengan praktik-praktik pengelolaan sumber daya lahan yang kini ada. Keunggulan ini berupa keuntungan ekonomi, lingkungan dan juga sosial. Kedua, agroforestry sebagai inovasi belum atau bahkan tidak diterapkan atau diadopsi secara luas oleh masyarakat, sehingga ini dianggap sebagai sebuah masalah yang harus dipecahkan. Adalah tidak berguna untuk membicarakan sesuatu yang tidak menjadi masalah – gap antara kondisi ideal dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Atas dasar dua asumsi ini, maka tulisan ini mencoba membahas alternatif pendekatan penyuluhan yang dapat dipertimbangkan dalam rangka mendorong proses adopsi dan difusi inovasi agroforestry, yang pada gilirannya menghasilkan perubahan ekonomi, sosial dan lingkungan pada masyarakat pengelola sumber daya alam, baik di areal hutan maupun di luar kawasan hutan. Atas dasar tinjauan teoritis maupun empiris, usaha kearah pemberdayaan masyarakat (dalam perspektif sosial, ekonomi dan lingkungan) melalui agroforestry merupakan usaha yang menghendaki keterlibatan banyak pihak, dan berjangka panjang.*”

Keberadaan jasa penyuluhan sebagai bagian strategis dalam proses pembangunan mulai dipertanyakan relevansinya, dan bahkan di beberapa tempat muncul keinginan untuk terus memarginalkan peran penyuluhan - khususnya dalam masa pasca otonomi daerah. Penyuluhan dianggap tidak mampu memberikan peran yang bermakna bagi proses pembangunan dan mobilisasi dana pembangunan, dan karenanya tidak diperlukan. “Penyuluhan” dalam perspektif kelompok yang pesimis ini tidak lebih sebagai kegiatan yang memang tidak diperlukan.

Kegagalan pelaksanaan peran strategis dari lembaga penyuluhan dalam batas-batas tertentu dapat dimengerti, dan bisa diterima. Muktasam (1996; 2000) menemukan bahwa petani memiliki persepsi yang negatif terhadap penyuluhan. Mereka menganggap penyuluhan tidak berfungsi, dan bahkan stagnan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir tidak ada “perubahan” bermakna dalam sistem produksi, khususnya di sistem usaha tani lahan sawah. Petani hanya melaksanakan kegiatan usaha tani seperti apa yang mereka lakukan 10 tahun yang lalu. Varietas padi yang mereka gunakan masih IR 64, pola tanam juga masih seperti dulu - padi-padi-palawija. Sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) walau secara formal masih dianggap sebagai satu sistem kerja yang pantas untuk diterapkan, juga tidak bisa secara efektif dilaksanakan. Hal ini tidak lepas dari terbatasnya dinamika teknologi di lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan dan terbatasnya persepsi penyuluh terhadap “penyuluhan”.

Stagnasi penyuluhan terjadi karena kesalahan persepsi penyuluh terhadap konsep “penyuluhan” - penyuluhan sebagai “proses transfer teknologi” (*Transfer of Technology* - TOT), dari lembaga penelitian kepada petani. Ketika tidak tersedia teknologi di lembaga penelitian dan pengembangan, maka tidak ada teknologi yang akan ditransfer oleh penyuluh dan karenanya tidak ada lagi penyuluhan. Persoalan penyuluhan, juga tidak lepas dari tidak efektifnya kelembagaan penyuluhan, baik kelembagaan aparat maupun kelembagaan petani.

Perubahan kelembagaan penyuluhan, yang tercermin dari terjadinya perubahan kebijakan, menjadi bukti kurang efektifnya lembaga penyuluhan - termasuk tidak berfungsinya sebagian besar kelompok tani. Persoalan lain dari penyuluhan di Indonesia (selain kesalahan persepsi tentang penyuluhan sebagai TOT) adalah pendekatan penyuluhan yang lebih bersifat “top-down”, “parsial” dan “tidak terkoordinasi” (Muktasam, 2000). Akibatnya adalah munculnya proses marginalisasi peran penyuluhan, sebagaimana dikemukakan di atas.

Di sisi lain, Patton (1993) dan Miller (1993) menganggap bahwa penyuluhan menjadi organisasi masa depan. Bagaimana masyarakat pertanian di masa yang akan datang ditentukan oleh bagaimana lembaga penyuluhan memainkan peranannya. Dalam perspektif mereka penyuluhan harus mengalami pergeseran paradigma, kalau peran strategis itu mau diwujudkan. Beberapa pergeseran itu adalah:

- (1) Penyuluhan bergeser dari pendekatan top-down kepada pendekatan partisipatif
- (2) Dari parsial kepada holistik dan sistem
- (3) Dari “pengajaran dan training” kepada “pembelajaran dan fasilitasi”
- (4) Dari pendekatan disiplin kepada multidisiplin

Kegagalan penyuluhan dalam mewujudkan perannya kemudian dapat diidentifikasi dari lambannya perubahan sosial di dalam masyarakat pedesaan, termasuk rendahnya dinamika sosial ekonomi masyarakat desa – termasuk juga masyarakat sekitar hutan. Banyak masyarakat desa atau petani jatuh dan hidup di bawah garis kemiskinan dan bahkan meninggalkan sektor pertanian. Terjadi degradasi sumber daya lahan dengan produktivitas juga terus menurun. Di sektor kehutanan, kenyataan menunjukkan semakin parahnyanya kerusakan hutan sebagai akibat dari perambahan dan kegagalan dalam membantu usaha pertanian di kawasan perbatasan hutan - daerah-daerah pertanian penyangga hutan.

Atas dasar berbagai permasalahan di atas, maka pencarian “inovasi” (seperti model agroforestry sebagai alternatif pengelolaan sumber daya lahan) dan model alternatif dalam pendekatan penyuluhan bagi pemberdayaan masyarakat menjadi sangat strategis – termasuk yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Dengan “agroforestry” dan “pendekatan penyuluhan yang spesifik”, maka dapat diharapkan bahwa petani-petani yang selama ini hanya mengandalkan usaha tanaman pangan atau hanya menggantungkan diri pada produksi tanaman perkebunan (buah-buahan dan kayu-kayuan), akan dapat mengadopsi dan mengembangkan jenis tanaman baru dalam sistem usaha taninya, yang kemudian menjadi pengelola suatu sistem agroforestry yang kompleks.

Penyuluhan tanaman pangan (sebagaimana yang dilakukan selama ini dan mengacu pada sistem Latihan dan Kunjungan atau LAKU atau Training and Visit System), sangat berbeda dengan penyuluhan yang seharusnya dilakukan dalam konteks pengembangan sistem agroforestry. Perbedaan pokok materi dan metode penyuluhan antara tanaman pangan dengan sistem agroforestry terletak pada adanya komponen “pohon” dalam sistem agroforestry. Jika mengacu pada konsep “ciri inovasi” (Rogers, 1995) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi, “pohon” sebagai sebuah inovasi teknis yang akan diperkenalkan pada sistem usaha tani pangan/ternak/ikan, memiliki ciri yang has dalam hal “observabilitas”, “triabilitas”, “kompatibilitas”, “kompleksitas”, dan “keuntungan relatif”. Pohon berbeda dengan tanaman pangan atau inovasi teknis lain seperti obat-obatan, pupuk kimia dalam hal kemudahan untuk dicoba dan diamati hasilnya. Pohon memerlukan waktu yang relatif lama (tahunan) hingga dapat dilihat dan dirasakan hasilnya, khususnya pohon-pohon yang ditujukan untuk dimanfaatkan kayu atau buahnya. Merubah perilaku petani untuk dapat mengadopsi dan mengembangkan pohon sebagai komponen khas dalam sistem agroforestry memerlukan pendekatan penyuluhan yang berbeda dengan pendekatan penyuluhan yang umum digunakan dalam penyuluhan sistem usaha tani non-agroforestry – jika mengembangkan

agroforestry di luar kawasan hutan. Reid (1997) melihat perlunya penyuluhan model lain bagi difusi pertanian kehutanan dan agroforestry (Farm forestry and agroforestry). Isu yang paling mendasar adalah meyakinkan petani akan manfaat dari sistem agroforestry, sebagaimana dinyatakan berikut ini:

*“getting the message across to landowners regarding the long term benefits of farm forestry”* (Lyons, A and Jervis, T., 1995, quoted by Reid, 1997).

Model penyuluhan khas agroforestry dikatakan efektif ketika model itu mampu merubah perilaku petani dan keluarganya, yang kemudian memutuskan untuk menerapkan/mengadopsi sistem agroforestry kedalam sistem usaha taninya. Perbaikan pengelolaan sistem produksi pada gilirannya dapat mendukung berkembangnya fungsi ekologis lahan dari kerusakan, dan mengonservasi areal yang telah terdegradasi melalui penerapan pengelolaan agroforestry yang lebih baik pada wilayah batas hutan dan sistem pertanian lahan kering (miring) melalui partisipasi masyarakat (*stakeholders*). Bersamaan dengan itu, adopsi sistem agroforestry akan dapat meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan pengembangan agroforestry (pemberdayaan) - petani peserta penyuluhan, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pengelolaan areal secara produktif dan berkelanjutan.

### **Sistem Agroforestry sebagai Inovasi**

Agroforestry adalah “suatu nama kolektif untuk *sistem penggunaan tanah dan teknologi dimana tanaman tahunan berkayu* (pohon, palm, bambu, dsb) yang secara sengaja ditanam pada unit pengelolaan lahan yang sama dengan tanaman pertanian dan atau ternak, baik dalam bentuk pengaturan tempat tanam maupun waktu tanam (spatial arrangement or temporal sequence) - **International Council for Research in Agroforestry** - ICRAF (dalam Reid dan Wilson, 1986).

Sebagai sistem, agroforestry terdiri dari lima komponen atau sub-sistem yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

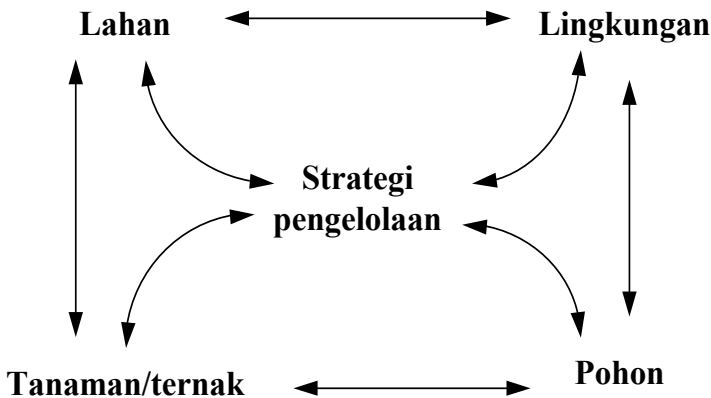
- (1) *Lahan (Land)*: Pilih lahan yang sangat sesuai bagi pengembangan agroforestry, dan beberapa hal berikut ini perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu posisi relatifnya dalam sistem usaha tani - aksesibilitasnya, topografi, jenis tanah, status manajemen sekarang, drainase.
- (2) *Iklm (Climate)*: Tumbuh dan perkembangan tanaman/pohon sangat dipengaruhi oleh iklim. Semua tanaman memiliki kondisi iklim yang spesifik penentu pertumbuhan maksimal. Suhu, kelembaban, radiasi, panjang hari, tingkat besarnya angin, dan lainnya adalah beberapa aspek iklim yang sangat terkait dengan efektivitas pengembangan agroforestry.
- (3) *Komponen pertanian (Agricultural component)*: menyangkut pemilihan tanaman yang cocok bagi pemilik lahan guna memenuhi kebutuhan pangan dan permintaan pasar - tanaman yang dapat tumbuh dengan baik dan dapat dikembangkan diantara pepohonan, tanpa adanya efek negatif terhadap tanaman maupun terhadap pepohonan.
- (4) *Komponen hutan (Forestry component)*: Pemilihan pepohonan yang memiliki banyak manfaat (multipurpose trees - MPTS). Selain itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis pohon adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, tingkat pertumbuhan, kemampuan untuk menghasilkan daun sebagai pakan ternak, daya tahan terhadap kekeringan dan situasi yang kurang menguntungkan, kemampuan untuk memelihara dan melindungi kesuburan tanah, kemampuan untuk tumbuh dan bertahan dengan baik pada berbagai pola pengelolaan agroforestry, penampilan dan produktivitas, siklus hara dan fiksasi nitrogen, daya tahan terhadap hama dan penyakit, jenis kulit yang dimiliki, bahan kimia yang dihasilkan/getah, dan daya tahan terhadap api/kebakaran.



(5) *Strategi pengelolaan (Management strategy)*: Persoalan terakhir setelah pemilihan komponen pertanian dan kehutanan adalah strategi pengelolaan agroforestry yang mampu memberikan hasil maksimal. Faktor yang paling penting dalam strategi pengelolaan agroforestry adalah sifat hubungan antara pepohonan (di atas) dengan tanaman pertanian (di bawah). Dalam pengelolaan agroforestry, beberapa hal berikut perlu diperhatikan:

- berapa banyak pohon dan jumlah tanaman?
- optimalisasi pengaturan tanaman/jarak tanam - tiga faktor perlu diperhitungkan, yaitu manajemen, konservasi air dan tanah, dan aspek-aspek teoritis bagi optimalisasi produksi.

Hubungan kelima komponen agroforestry ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 8.5. Interaksi Lima Komponen Utama dalam Sebuah Agroforestry

Selain batasan di atas, agroforestry sebagai suatu sistem, agroforestry dipandang sebagai suatu “praktik” dan juga “teknologi” (Rudebjer, Taylor, dan castillo, 2001). Sebagai suatu praktik, agroforestry menunjuk pada kegiatan yang dilakukan oleh petani dalam suatu sistem agroforestry seperti dengan menanam lamtoro di dalam

bedengan atau di sepanjang batas lahan, atau menanam tanaman karet dalam sistem agroforestry multistrata. Dalam perspektif teknologi, agroforestry mengacu pada upaya perbaikan sistem usaha tani yang ada melalui temuan pengetahuan baru dan mentransfer pengetahuan dan ketrampilan atau input lainnya. Hal ini dapat dari temuan petani maupun dari lembaga penelitian dan pengembangan. Sebagai contoh adalah penyebaran varietas unggul jagung atau tanaman multiguna (multipurpose tree species - MPTS), dan rekomendasi tingkat aplikasi pemupukan.

### **Kenapa Perlu Mengadopsi dan Mengembangkan Sistem Agroforestry?**

Dengan memperhatikan uraian di atas, khususnya keterkaitan antara kelima komponen di dalam sistem agroforestry, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi dasar kenapa sistem agroforestry menjadi pilihan untuk diadopsi oleh petani dalam pengelolaan usaha tani secara berkelanjutan, yang pada saat bersamaan mendukung pencapaian tujuan “pemberdayaan masyarakat”. Beberapa alasan tersebut antara lain:

- (1) Dengan sistem agroforestry, interaksi lahan, tanaman/ternak, dan pohon dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan dampak yang positif dalam aspek Bio-fisik (pengelolaan lahan, tanaman dan pohon) dan sosial ekonomi.
- (2) Dalam aspek bio-fisik, interaksi yang positif ini dapat dilihat pada terciptanya kondisi lahan yang “sehat dan stabil”, yang menjamin keberlangsungan hidup vegetasi dan organisme lain di dalam sistem. Kesuburan lahan dapat dipertahankan, tingkat erosi dikurangi dan tidak terjadi degradasi lahan. Terciptanya iklim mikro yang sesuai di dalam kawasan (seperti suhu, kelembaban, penyiangan) juga merupakan dampak positif yang diharapkan dari diterapkannya sistem agroforestry.
- (3) Manfaat jangka panjang dari pengembangan agroforestry adalah kembalinya fungsi lahan sebagai areal “tangkapan air” dan

“penghasil O<sub>2</sub>”. Pada beberapa tempat di pulau Lombok telah dikeluhkan berkurangnya sejumlah mata air yang selama ini menjadi andalan masyarakat sebagai sumber air minum dan pengairan.

- (4) Implementasi sistem agroforestry juga dapat memberikan manfaat *sosial ekonomi* bagi masyarakat di kawasan. Dengan optimalnya penggunaan lahan, produktivitas lahan akan meningkat dan produk yang dihasilkan juga beragam. Pendapatan masyarakat akan naik dan secara ekonomi akan lebih baik dan terjamin. Perbaikan ekonomi pada gilirannya akan berpengaruh pada berkurangnya masalah-masalah sosial seperti pengangguran, pencurian, termasuk pencurian terhadap kayu di hutan sekitar perkampungan.
- (5) Dalam perspektif pariwisata, pengembangan agroforestry akan dapat berperan dalam menunjang pengembangan “eko-tourism” dan “agrowisata”, yaitu wisata yang memanfaatkan nilai-nilai lingkungan dan pertanian sebagai daya tarik. Melalui diversifikasi produk pertanian dan lingkungan alam yang “kembali tertata”, lokasi sekitar kawasan yang dikembangkan melalui agroforestry akan memiliki daya tarik tersendiri.

Dengan memperhatikan beragam manfaat yang dapat diperoleh melalui sistem agroforestry di atas, maka perlu dilakukan usaha-usaha yang efektif agar petani mengetahui secara baik, dan mau mengembangkan sistem agroforestry sebagai salah satu alternatif terbaik dalam proses produksi. Oleh karena itu pendekatan penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik sistem agroforestry juga perlu untuk ditemu kembangkan.

### **Beberapa Tantangan bagi Adopsi dan Pengembangan Sistem Agroforestry**

Walau agroforestry bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat petani, pengembangan agroforestry yang sengaja dilakukan dengan mempertimbangkan “strategi pengelolaan” yang

sesuai masih menghadapi beberapa tantangan untuk dapat diadopsi dengan baik oleh petani. Tantangan-tantangan ini meliputi:

- (1) Kemauan atau sikap petani untuk mengembangkan “pohon” sebagai penghasil “kayu” (bahan bangunan, perabot rumah tangga, kayu bakar, dan lainnya) dan atau “daun” (sebagai bahan makanan ternak) cenderung rendah atau negatif. Hal ini dapat dimaklumi karena sifat dari investasi “pohon” yang memberikan nilai ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang.
- (2) Terbatasnya penguasaan tentang “strategi pengelolaan” yang sesuai pada tingkat petani dan petugas lapangan oleh dinas instansi terkait.
- (3) Derasnya arus yang mengarah pada usaha-usaha penguasaan dan konversi penggunaan sumber daya lahan, termasuk kawasan hutan, bagi penggunaan untuk sektor non-pertanian dan perusakan terhadap vegetasi yang ada.
- (4) Tidak adanya kesamaan persepsi dan tindakan dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya pertanian dan kawasan sekitarnya.
- (5) Tidak adanya koordinasi yang efektif dalam implementasi program-program yang terkait dengan pengelolaan sistem usaha tani, masyarakat sekitar kawasan, termasuk dalam konservasi sumber daya alam lainnya (kawasan taman nasional, kawasan sumber mata air).

### **Keterlibatan Multipihak dalam Adopsi dan Pengembangan Sistem Agroforestry**

Sejalan dengan kenyataan bahwa agroforestry merupakan suatu sistem (*natural system*), yang di dalamnya terdiri dari paling tidak lima komponen yang saling terkait (Reid dan Wilson, 1986), maka pengembangan agroforestry pun menghendaki adanya perhatian yang seimbang kepada keseluruhan komponen sistem. Di luar sistem

agroforestry, sebagai sebuah sistem alam, juga terdapat sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen atau sub-sistem, antara lain ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, dan lainnya.

Konsekuensi logis dari keberadaan dan interaksi dari semua komponen dalam sistem agroforestry dan interaksi sistem agroforestry dengan sistem sosial yang lebih luas adalah perlunya keterpaduan semua pihak yang terkait dengan sistem, misalnya Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Universitas, Dinas Pekerjaan Umum (PU Pengairan), Masyarakat sekitar kawasan serta pihak-pihak terkait lainnya (stakeholders). *Keterpaduan ini juga seharusnya menjadi ciri penting pendekatan penyuluhan bagi proses adopsi dan pengembangan sistem agroforestry.*

Introduksi komponen pertanian pada sistem usaha kebun monokultur (kelapa atau coklat misalnya), menghendaki pemahaman yang mendalam tentang kesesuaian dan kesuburan lahan, iklim mikro, pola-pola pengelolaan yang sesuai, perilaku anggota sistem sosial, keberadaan lembaga lokal (lembaga sosial ekonomi seperti kelompok tani, pasar dan lembaga perkoperasian). Perlunya keterkaitan dan kerja sama multipihak juga berlaku ketika komponen-komponen lain dalam sistem “dirubah” atau “dipengaruhi”. Keberhasilan dalam produksi kayu seperti “Albisia” tidak merupakan jaminan bagi terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat. Perlunya pasar bagi hasil-hasil produksi menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dari awal sebelum menganjurkan petani untuk mengadopsi dan mengembangkan tanaman seperti albisia. Pentingnya pemikiran yang komprehensif ini dapat dimengerti dengan adanya fenomena kesulitan pemasaran produk-produk pertanian pada sejumlah lahan Hutan Kemasyarakatan (HKM).

Pengalaman pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam pembangunan sektor pertanian dan kehutanan, menunjukkan bahwa banyak kegagalan program pembangunan disebabkan oleh pendekatan yang bersifat top-down, parsial dan tidak terintegrasi (Harrison, et.al, 1995; Hammer, 1994; Burkey, 1993; Rouse, 1994; Rouse, 1995; Oakley,

1994). Masing-masing pihak menyusun dan melaksanakan programnya sendiri-sendiri secara terpisah tanpa adanya koordinasi. Sebagai konsekuensinya adalah adanya duplikasi program, pemborosan sumber, tidak efektif dan berkembangnya image negatif terhadap pembangunan (pendekatan terhadap pelaksanaan program dapat beragam, dari yang “membawa ikan” hingga kepada yang “mengajari bagaimana cara menangkap ikan” - sehingga ada pihak mampu menumbuhkan kembangkan partisipasi nyata dan pemberdayaan dan ada pihak yang memunculkan partisipasi semu dari masyarakat).

Atas pertimbangan di atas, maka pendekatan dalam mendorong proses adopsi dan pengembangan sistem agroforestry harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan sistem agroforestry. Sebagai sebuah ilustrasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh *Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram* menunjukkan perlunya keterlibatan sejumlah pihak yang terkait dalam rangka perbaikan pengelolaan kawasan agroforestry (HKm) di Batukliang Utara - Lombok Tengah yaitu:

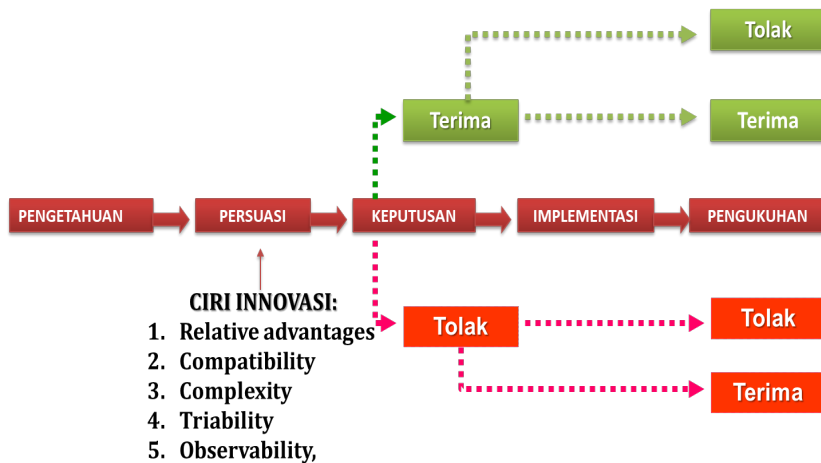
- (1) Pemda Lombok Tengah
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- (3) Dinas Penanaman Modal Daerah dan Lingkungan Hidup
- (4) Pondok Pesantren Darus Shiddiqien
- (5) Bappeda
- (6) DPRD
- (7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- (8) Dinas Pertanian dan Peternakan
- (9) Perusahaan Daerah Air Minum
- (10) Dinas Kimpraswil
- (11) Dinas Kehutanan Provinsi NTB
- (12) P3P Universitas Mataram

## **Proses Keputusan Inovasi bagi Pengembangan Sistem Agroforestry**

Memperhatikan karakteristik sistem agroforestry di atas, maka upaya penyuluhan yang dilakukan untuk mendorong proses adopsi sistem agroforestry dapat mengacu pada “proses keputusan inovasi” (Rogers, 1983) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 8.6 berikut ini.

Perbedaan mendasar antara sistem agroforestry dengan sistem usaha tani tanaman pangan adalah adanya komponen “pohon” di dalam sistem. Pohon merupakan tanaman tahunan, yang memiliki ciri khas dibanding dengan tanaman semusim dan tanaman setahun. Ciri khas tanaman tahunan dibanding dengan jenis tanaman non-tahunan dapat dikaji dalam konteks ciri inovasi, seperti gambarkan pada Gambar 2. Dari segi *keuntungan relatif*, menanam pohon tidak dapat memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek - misalnya dalam tiga bulan. Menanam pohon untuk keperluan dipanen kayunya dapat memakan waktu lebih dari lima tahun dan bahkan belasan tahun. Menanam pohon untuk keperluan “buah” dan “daun” relatif lebih cepat dibanding dengan penanaman pohon untuk keperluan kayu (misalnya rambutan, nangka, salak, lamtoro, dan lainnya). Penundaan manfaat ekonomi ini dapat mempengaruhi sikap petani terhadap inovasi. Telaahan yang sama juga dalam konteks kemudahan inovasi untuk dicoba (triabilitas) dan dilihat (observabilitas) hasilnya. Menanam pohon tidak dapat dicoba dan dilihat hasilnya juga dalam jangka pendek seperti halnya tanaman semusim. Hal ini berimplikasi pada rendahnya daya tarik petani untuk memutuskan mengadopsi “pohon” kedalam sistem usaha taninya. Hal serupa berlaku pada ciri tingkat kerumitan (kompleksitas) dan kesesuaian (kompatibilitas) inovasi. Inovasi yang relatif sederhana akan lebih mudah diadopsi dibanding dengan inovasi yang rumit, dan inovasi yang secara teknis dan sosial budaya sudah sesuai dengan kondisi petani akan lebih mudah membentuk sikap positif petani dibanding dengan inovasi yang sama sekali asing bagi mereka.

Kekhasan ciri sistem agroforestry ini hendaknya dicermati dalam merumuskan pendekatan yang efektif dalam proses penyuluhan bagi pengembangan sistem agroforestry. Ketika uji coba sistem agroforestry tidak dapat dilakukan (untuk merubah sikap petani), maka pilihan yang mungkin dilakukan adalah mengajak petani untuk melihat “praktik terbaik” (*the best practice*) dari sistem agroforestry yang ada di tempat lain, dan ini dapat menjadi bagian dari sebuah model penyuluhan bagi pengembangan sistem agroforestry.



Gambar 8.6. Model Keputusan Inovasi

### Perjalanan Panjang Menuju Perubahan

“Perjalanan menuju” perubahan sosial ekonomi dan lingkungan dari masyarakat sekitar hutan yang diharapkan melalui adopsi agroforestry (sebagai suatu inovasi) adalah perjalanan panjang dan melelahkan. Ketika hasil akhir yang diharapkan adalah perubahan sosial ekonomi dan lingkungan (Socio Economic and Environment – SEE), maka rentetan pertanyaannya adalah:

- (1) Apa yang diperlukan agar terjadi perubahan SEE ini? Jawabannya tentu adalah terjadinya perubahan praktik dalam pengelolaan



- lahan – diadopsinya agroforestry, masih dengan asumsi ada jaminan pasar bagi produk yang dihasilkan;
- (2) Perubahan apa yang diperlu agar praktik pengelolaan sumber daya lahan berubah? Jawabannya perlu perubahan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan aspirasi (Knowledge, Attitudes, Skills, dan Aspiration – KASA);
  - (3) Bagaimana agar perubahan KASA dapat terjadi? Jawabannya adalah bahwa petani perlu bereaksi positif terhadap penyuluhan, penyuluh dan inovasi. Selain itu mereka perlu berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan;
  - (4) Kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai perubahan-perubahan di atas?
  - (5) Apa sumber daya yang tersedia guna mendukung kegiatan-kegiatan dimaksud?

Perjalanan panjang menuju perubahan sosial ekonomi dan lingkungan melalui adopsi dan difusi agroforestry tidak saja ditunjukkan oleh rangkaian perubahan seperti yang dijelaskan di atas, tetapi juga pengalaman yang diperlihatkan oleh “cerita sukses agroforestry di Thailand” sebagaimana kutipan di bawah ini.

### **Cerita Sukses “Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat” di Thailand** *(Success Story of Community Forest Management in Thailand)*<sup>7</sup>

Berikut ini kisah sukses pengelolaan hutan oleh masyarakat di Thailand, yang pada intinya menunjukkan adanya titik balik dari gerak pengelolaan hutan. Pengalaman buruk pengelolaan hutan yang diprakarsai oleh pemerintah telah melahirkan kesadaran kolektif

---

<sup>7</sup> Disarikan dari laporan penelitian tentang “A STUDY OF RURAL DEVELOPMENT IN TWO ASIAN COUNTRIES: A Benchmarking Process for Best Practices”, yang dilaksanakan atas dukungan program Asian Public Intellectual (API) Fellowship – Nippon Foundation. Tulisan ini dibuat untuk kepentingan “*Share learning*”, *learning from the others’ best practices*.

masyarakat di sekitar kawasan untuk mencari alternatif lain dalam pengelolaan hutan.

Kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan “menderita” dengan “kebijakan/program *monoculture cash crops* yang diprakarsai pemerintah”. Penderitaan ini kemudian memunculkan kesadaran kolektif untuk memulai kembali kehidupan baru yang lebih bermakna dengan “menggali kembali pengetahuan lokal” (*reflective learning*) secara bersama yang difasilitasi oleh seseorang yang datang dan tinggal bersama mereka.

Semoga cerita sukses ini dapat menjadi renungan sekaligus cermin buat kita!

## **Praktik Agroforestri – Sebuah Kasus dari Thailand<sup>8</sup>**

### ***Inpeng***

“Inpeng” berarti “Indra telah menciptakan” (Indra adalah Dewa Hindu). Itu adalah nama jaringan organisasi berbasis komunitas yang terletak di sekitar kaki Gunung Phu Phan di Timur Laut Thailand. Hingga tahun 1999 jaringan ini terdiri dari 84 komunitas desa di tujuh distrik di Provinsi Sakon Nakhon, Udon Thani dan Kalasin. Pada tahun 2000, jaringan diperluas untuk mencakup 10 distrik Sakon Nakhon lainnya, dengan total lebih dari 150 komunitas desa. Nama “Inpeng” diberikan oleh seorang bijak yang pernah mengunjungi Pusat Inpeng dari dekat Mahasarakham, yang terletak di Ban Bua, distrik Kudbark, Provinsi Sakon Nakhon. Ia begitu terpesona dengan pemandangan indah daerah itu sehingga ia menyamakannya dengan ciptaan Tuhan. Kisah Inpeng kembali ke tahun 1987 ketika seorang lulusan baru dari Sakon Nakhon Teachers College dikirim ke Ban Bua sebagai sukarelawan dari program bersama pengembangan masyarakat yang diluncurkan oleh Teachers College dan Village Foundation. Atasannya menginstruksikan dia untuk tidak memberi tahu masyarakat tentang proyek pembangunan apa pun selama setidaknya satu tahun. Sebaliknya, ia harus tinggal di desa sebagai orang desa dan belajar tentang budaya masyarakat, pandangan

---

<sup>8</sup>“Kisah sukses” ini diambil dari “PEOPLE’S DEVELOPMENT: A COMMUNITY GOVERNANCE TOOL” (ditulis oleh Dr. SERI PHONGPHIT - Village Foundation, Thailand), diterbitkan oleh UNDP South East Asia HIV and Development Project, Juli 2001

hidup, nilai-nilai, kekuatan dan kelemahan, aspirasi dan kebutuhan, serta kesulitan dan potensi, untuk memecahkan masalah mereka.

*Thawatchai*, demikian panggilan relawan muda ini, mengikuti instruksi ini. Awalnya, ia dicurigai sebagai mantan Komunis atau agen polisi rahasia. Perlahan, masyarakat menerimanya sebagai anggota. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di desa membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Dia secara bertahap menjadi fasilitator dalam diskusi komunitas. Dia tahu bagaimana mengajukan pertanyaan dan berdebat dengan orang-orang. Itu adalah tahun pembelajaran bagi Thawatchai dan penduduk desa yang mengingat cerita mereka sendiri sambil menjawab banyak pertanyaannya. Dia mempertanyakan, misalnya, bagaimana komunitas itu muncul, dari mana para pendiri desa berasal, berapa banyak keluarga yang awalnya ada di komunitas itu dibandingkan dengan hari ini, bagaimana orang-orang hidup pada awalnya dan bagaimana hal-hal berkembang, sumber daya alam apa yang ada di masa lalu. hutan dan sungai, apa yang ditemukan orang sebagai makanan di hutan, masalah apa yang dihadapi, bagaimana orang memecahkan masalah mereka, dan lainnya.

Hingga sekitar 40 tahun lalu, lingkungan masih sangat kaya. Orang dapat dengan mudah menemukan makanan di hutan, sungai atau waduk. Mereka tidak membutuhkan banyak untuk kehidupan sehari-hari. Karena mereka tinggal di daerah pegunungan dengan lahan terbatas untuk menanam padi, mereka mengumpulkan hasil hutan untuk barter beras dengan desa lain. *Perubahan dimulai pada tahun 1964 ketika rami pertama kali diperkenalkan dan ditanam di komunitas mereka di Ban Bua.* Pada tahun-tahun berikutnya banyak keluarga bergabung dalam produksinya hanya untuk menemukan bahwa harga yang tinggi turun. *Singkong diperkenalkan lima tahun kemudian tetapi sejarah terulang kembali.* Satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak uang adalah dengan meningkatkan produksi. *Oleh karena itu, mereka menebang pohon dan menyerbu hutan rakyat untuk mengklaim lebih banyak lahan untuk menanam singkong.*

Ketika mode produksi berubah, mode konsumsi dan cara hidup juga berubah. Orang berusaha mendapatkan uang untuk membeli makanan dan barang-barang lain yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa mampu membeli makanan dari pasar memberikan simbol "status". Mereka yang mengumpulkan makanan dari hutan untuk dijual di desa atau ke pedagang dianggap orang miskin. Keluarga yang lebih baik memperoleh uang dari perkebunan dan dari anggota keluarga yang bekerja di pusat kota atau provinsi lain. Pada tahun 1982 listrik masuk ke masyarakat, menandakan perubahan konsumsi yang signifikan oleh penduduk desa. Tiba-tiba setiap rumah tangga harus membeli kipas angin listrik, kulkas, dan televisi. Hingga saat itu, satu-satunya simbol kekayaan adalah memiliki TV, baterai, dan sofa atau sofa untuk

menampung pengunjung, meskipun kebanyakan orang masih lebih suka duduk di lantai – cara tradisional di pedesaan.

*Orang-orang mulai meminjam uang dari bank setelah perkebunan goni dan singkong diperkenalkan.* Pengajuan pinjaman tidak sulit karena hanya membutuhkan “pengesahan” dari kepala desa. Penduduk desa menggunakan pinjaman untuk pertanian dan untuk membeli makanan dan peralatan rumah tangga. Pada akhir tahun, karena dana tidak mencukupi untuk membayar kembali bank, mereka beralih ke kreditor swasta untuk pinjaman tambahan. Pinjaman baru digunakan untuk membayar bank, terutama *Bank Pertanian dan Koperasi Pertanian (BAAC)* untuk menjaga "status klien yang baik" mereka. Peringkat yang baik ini kemudian memungkinkan mereka untuk meminta pinjaman bank lain, yang lebih besar, dengan sebagian uang untuk membayar kreditor swasta dan sisanya untuk kebutuhan keluarga. Ini berulang dari tahun ke tahun, menciptakan lingkaran setan utang yang berputar ke atas. Misalnya, jika pinjaman pertama mereka berjumlah 10.000 Baht, 5.000 diinvestasikan untuk menanam singkong dan setengahnya lagi untuk kebutuhan keluarga. Pada akhir tahun, mereka tidak dapat membayar kembali karena hasil panen yang buruk atau harga yang rendah. Mereka harus mencari kredit pribadi sebesar 10.000 Baht untuk membayar BAAC. Setelah pelunasan, mereka meminjam 20.000 Baht lagi dari bank: 10.000 Baht untuk membayar kreditor swasta (ditambah setidaknya 3-5% dan dalam banyak kasus tingkat bunga hingga 10% per bulan) dan sisanya untuk investasi dan kebutuhan keluarga mereka. *Ini berlanjut sampai sebagian besar petani berhutang hampir 100.000 Baht tanpa ada tanda-tanda keringanan. Mereka harus menjual tanah mereka untuk membayar hutang dan pindah untuk merambah hutan, lahan publik, atau daerah kumuh di pusat kota.* Ini tidak persis terjadi pada Ban Bua tetapi mirip dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak banyak orang yang pindah ke tempat lain tetapi kebanyakan dari mereka menderita. Mereka tidak punya uang untuk menyekolahkan anak-anak mereka, untuk dirawat di rumah sakit bila diperlukan atau bahkan untuk tetap di rumah dan membeli makanan. Mereka harus menghabiskan hari mencari makan di hutan dan sungai untuk konsumsi rumah tangga dan dijual di pasar untuk beberapa Baht. Hasil hutan yang sebelumnya dianggap cukup untuk konsumsi rumah tangga tidak mencukupi secara komersial. Menjadi lebih sulit untuk mencari makanan di hutan. Dalam perbincangan yang difasilitasi oleh Thawatchai, penduduk desa bertanya pada diri sendiri bagaimana nenek moyang mereka bisa hidup berkecukupan pangan dan kebutuhan pokok tanpa berhutang dan bagaimana mereka juga bisa. Penduduk desa membagikan apa yang mereka ketahui tentang orang tua dan kakek nenek mereka. Mereka menyadari bahwa gaya hidup baru mereka menyebabkan masalah. Mereka menemukan bahwa mereka menghabiskan banyak uang tetapi hanya mendapatkan sedikit. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengurangi pengeluaran, yaitu memproduksi

pangan sendiri di tanah sendiri dengan tangan sendiri seperti yang biasa mereka lakukan bertahun-tahun yang lalu. Tapi apa cara terbaik?

Di tahun kedua, Thawatchai mengajak sekelompok penduduk desa untuk mengunjungi distrik terdekat. Mereka mengunjungi para petani dan tukang kebun yang menanam berbagai macam sayuran dan pepohonan, terutama pohon buah-buahan. Beberapa terlibat dengan pertanian terpadu. Penduduk desa Ban Bua terkesan dengan contoh menanam rotan karena mereka masih bisa menemukan bibit rotan di hutan yang dulu tumbuh subur. Mereka memutuskan untuk menanam rotan dan beternak babi. Yang terakhir dipilih karena babi hitam lokal digunakan dalam upacara keluarga dan masyarakat. Namun, ketika desa mengonsumsi sebagian besar babi di desa pada saat dibutuhkan, mereka membuat “proyek babi” atau “dana babi”.

Yayasan Desa memberi Ban Bua 10.000 Baht. Lima ribu Baht untuk Proyek Pabrik Lokal dan 5.000 Baht lainnya untuk Proyek Babi. 5.000 Baht pertama dialokasikan untuk membeli kantong plastik hitam untuk rotan dan bibit tanaman lokal. Seorang anggota kelompok mengambil 100 kantong, mengembalikan 10 kantong berisi bibit kepada kelompok, yang kemudian menjual bibit tersebut untuk mendapatkan uang, sehingga menjadi dana bergulir bagi anggota pada setiap akhir panen. Dana bergulir dari 5.000 Baht awal untuk tas hitam menghasilkan lebih dari satu juta Baht beberapa tahun kemudian. Keuntungannya digunakan untuk membeli sebidang tanah dan mendirikan Inpeng Center. Pusat ini tidak sebesar dan mengesankan seperti yang diharapkan banyak orang karena merupakan pusat pengembangan manusia dengan fokus pada manusia dan bukan pada bangunan. Dari tahun 1988 hingga 1999, diperkirakan *kelompok Inpeng yang beranggotakan 84 desa menghasilkan 20 juta bibit tanaman lokal, terutama rotan, dengan nilai estimasi 100 juta Baht*. Penduduk desa belajar untuk memperbaiki metode pembibitan. Misalnya, meskipun mereka belajar dari seorang petani selama **perjalanan studi pertama** bahwa butuh delapan bulan untuk membudidayakan rotan, melalui banyak percobaan mereka **berhasil membudidayakan bibit dalam dua minggu**. Ini adalah terobosan dalam teknik budidaya benih.

Proyek Babi dimulai dengan 5.000 Baht untuk 20 anak babi kecil yang dibagikan kepada anggota kelompok pertama. Tiga tahun kemudian, penduduk desa menilai proyek mereka: 6.000 babi kecil senilai 1,2 juta Baht dijual kepada pedagang dari Bangkok yang membelinya untuk membuat babi panggang. Akibatnya, investasi sebesar 10.000 Baht menghasilkan lebih dari 100 juta Baht untuk masyarakat. Namun, Yayasan Desa yang memprakarsai program pengembangan masyarakat ini memiliki biaya terkait lainnya: gaji satu tahun untuk Thawatchai, biaya untuk koordinasi dan dokumentasi Sekolah Keguruan dan biaya untuk kunjungan penduduk desa ke distrik lain dengan total sekitar 100.000 Baht.

Pengembalian ekonomi dari investasi ini tidak terhitung. Banyak **kegiatan menghasilkan pendapatan lainnya** diperkenalkan dalam 12 tahun terakhir. Penghasilan tahunan penduduk desa berasal dari pertanian terpadu mereka sendiri untuk menanam rotan, segala jenis sayuran, pohon buah-buahan, beternak ikan, ayam, itik dan babi. Mereka mendirikan pabrik dengan dana investasi sendiri untuk memproduksi jus dari buah-buahan lokal bernama Mak Mao, Mak Ngeo, Mak Fai, Mak Khor dan lain-lain. Mereka juga memiliki pabrik kecil untuk mengolah jamu. Anggota Inpeng membawa jamu, yang diolah dan dibawa kembali ke masyarakat. Penduduk desa ingin membuktikan bahwa mereka mampu mendirikan dan mengelola usaha mereka sendiri sebagai bagian dari program pembangunan mereka. Dari tahun 1996 hingga 1999, Grup Inpeng diberikan proyek senilai 5 juta Baht dari Dana Lingkungan Nasional untuk melaksanakan proyek pelestarian lingkungan alam. Keanggotaan mereka bertambah dari 40 komunitas menjadi 84 dan dari empat menjadi tujuh kabupaten di tiga provinsi. Proyek ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat untuk merehabilitasi hutan dengan mengembangkan hutan di lahan milik sendiri. Sekitar 685 keluarga bergabung dalam proyek ini untuk menanam ribuan tanaman, sayuran, dan pohon di lahan mereka sendiri. Proyek ini berakhir pada Oktober 1999 dan dinilai sangat berhasil oleh Kementerian Sains, Teknologi, dan Lingkungan. Kementerian juga mencatat bahwa Provinsi Sakon Nakhon, di mana proyek ini dilaksanakan, adalah satu-satunya di Thailand Timur Laut yang luas hutannya meningkat.

*Grup Inpeng bekerja dengan orang dewasa dan anak-anak.* Mereka menyadari bahwa sekolah tidak dapat mengajarkan anak-anak mereka cara hidup, bekerja dan mencari nafkah. Setelah enam tahun sekolah dasar atau tiga tahun pertama sekolah menengah, anak-anak mereka hanya dapat melakukan satu hal: mencari pekerjaan di pusat kota. Kaum muda tidak dapat membantu orang tua mereka dan tidak mau tinggal di rumah. Oleh karena itu, *Grup Inpeng mengumpulkan anak-anak di akhir pekan dan hari libur untuk belajar bagaimana hidup dan bekerja, tentang warisan mereka, orang tua mereka, komunitas mereka, dan kearifan lokal.* Kelompok **pemuda** ini bernama *Dek Hak Thin* atau Anak-anak Cinta Komunitas Aslinya. *Mereka belajar bagaimana beternak ikan, ayam dan pertanian terpadu. Mereka mendaki gunung ke hutan bersama orang tua untuk belajar tentang pohon, tumbuhan, tumbuh-tumbuhan, dan alam. Mereka menabung setiap bulan dari hasil penjualan bibit, sayuran dan buah-buahan yang mereka hasilkan.* Misalnya, sekelompok *Dek Hak Thin* di Kud Herd dekat Ban Bua, meminjamkan simpanan mereka sekitar 60.000 Baht kepada masyarakat. Pada akhir tahun, hasil tabungan kelompok digunakan untuk membeli sepeda bagi setiap anggota dan sejumlah uang untuk dibawa pulang kepada orang tua mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Kelompok Inpeng di komunitas Ban Bua melaksanakan proyek penelitian dengan Yongyut Trinuchkorn, seorang pekerja LSM yang aktif di

Kelompok tersebut. Yongyut membantu Grup dalam masalah kesehatan dan lingkungan dengan jaringan penyembuh tradisional.

Dibantu oleh Yongyut, penduduk desa di Ban Bua melakukan pendataan tentang kesehatan dan isu-isu terkait. Mereka mengidentifikasi 42 sumber makanan alami dalam jarak 14 kilometer di sekitar desa, termasuk hutan alam, sungai, dan waduk air. Mereka mengumpulkan 62 jenis hewan air (ikan, katak, dan lainnya) yang dikonsumsi di masa lalu. Mereka juga mengidentifikasi 46 satwa liar yang sebelumnya diburu sebagai makanan, serta 26 spesies burung dan 36 jenis serangga sebagai sumber makanan lainnya. Mereka mengumpulkan ratusan tanaman, pohon, buah-buahan dan sayuran di hutan dan masyarakat. Di antara 33 varietas beras lokal, 32 beras ketan dan hanya satu beras putih. Misalnya, Pak Khien, ketua komunitas Kud Herd dan wakil ketua Inpeng, menemukan di lahan seluas satu hektar miliknya sekitar 175 jenis tanaman, termasuk pohon besar, pohon buah-buahan, sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai ukuran dan kegunaan. *Pak Khien mempersonifikasikan anggota Inpeng yang "membawa pulang hutan" dengan menanam hutan di tanah mereka sendiri.* Dia bekerja selama tiga tahun untuk melunasi pinjaman 50.000 Baht yang dia terima dari BAAC. Dia kembali menumbuhkan hutan lain di lahan tambahan yang dibeli dalam tiga tahun ke depan. Antara 1996 dan 1999, ia mendapat untung dari delapan dari 175 varietas tanaman di lahannya. Orang hanya bisa membayangkan potensi keuntungan jika dia memanfaatkan semua tanaman lainnya.

Penduduk desa juga mengidentifikasi makanan yang mereka makan di masa lalu dan hari ini, dan mempelajari efek positif dan negatifnya terhadap kesehatan baik dari tetua desa maupun ilmuwan peneliti. Mereka mengingat apa yang secara tradisional mereka makan, makanan apa yang harus mereka hindari dan mengapa.

Semua itu merupakan bagian dari proses identifikasi potensi modal dan sumber daya bagi masyarakat untuk menjadi dasar pengembangan kemandirian. Orang Inpeng belajar tentang masa lalu dan sekarang, dan merencanakan masa depan untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Sistem pertanian terpadu yang terencana dan dilaksanakan dengan baik dapat menjadi salah satu bentuk jaminan sosial ketika mereka sudah terlalu tua untuk bekerja. Sebagai contoh, selain kelompok simpanan, menanam pohon mewakili investasi 25-30 tahun, di mana investasi awal 500 pohon dengan 10.000-20.000 Baht per pohon tumbuh hingga 5 to 10 jutaan Baht dalam 30 tahun. Ini mewakili pensiun atau jaminan sosial. Jika dibutuhkan, sebagian dari pohon dapat dijual untuk biaya rumah sakit, jasa pembuatan atau untuk perjalanan. Alih-alih bekerja setelah usia pensiun, ia bisa mengandalkan lahan berbasis pertanian terpadu yang diterapkan 30 tahun lalu. Saat ini anggota Kelompok Inpeng berperan sebagai nara sumber dengan menceritakan kisah mereka tentang bagaimana mereka menjadi mandiri dan mengajarkan pembangunan berkelanjutan. Banyak orang mengunjungi Inpeng

Center dan komunitas anggota untuk mempelajari pelajaran kemandirian secara langsung.

Model agroforestry and alternatif pendekatan penyuluhan dalam mendorong proses adopsi dan difusi agroforestry adalah dua hal strategis dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan – baik dalam mengelola kawasan hutan maupun dalam mengelola lahan di luar kawasan hutan. Namun demikian, tinjauan teoritis maupun empiris menunjukkan bahwa jalan menuju pemberdayaan melalui adopsi dan difusi agroforestry adalah perjalanan panjang dan berliku, yang menghendaki keterlibatan multipihak, komitmen dan kesabaran. Ini pula yang ditunjukkan oleh kasus dan cerita sukses agroforestry di Thailand, sebagaimana yang dikutip di atas.

## **8.8. Ringkasan**

Adopsi adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sejak dari dia mendengar dan sadar akan adanya inovasi hingga menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Usaha-usaha dilakukan orang untuk memahami proses mental ini, dan kemudian muncul dua teori pokok adopsi, yaitu teori adopsi yang menyatakan bahwa proses adopsi melalui 5 tahapan pokok, yaitu kesadaran, minat, menilai, mencoba dan adopsi atau menerapkan.

Rogers (1983) merespons atas kritik terhadap konsep atau teori adopsi dengan lima tahapan tersebut dengan mengajukan konsep atau teori baru yang disebutnya sebagai teori keputusan inovasi. Konsep teori keputusan inovasi meliputi lima tahapan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, dari sejak mengenal atau mengetahui adanya inovasi hingga pada akhirnya menerima atau menolak inovasi itu pada tahap pengukuhan. Kelima tahapan keputusan inovasi yang diajukan Rogers meliputi tahap pengenalan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi atau pengukuhan.

Kecepatan orang dalam merespons suatu inovasi berbeda-beda, dan para pakar penyuluhan berusaha untuk mengelompokkan orang-orang yang menerapkan inovasi (adopter) dalam lima kelompok adopter,



yaitu orang yang paling awal menerima inovasi (1) *Inovator or petualang (innovator)* – 2.5% dari warga masyarakat; (2) *Adopter awal or pelopor - Si Teladan (Early Adopters)* – 13.5% dari warga masyarakat; (3) *Adopter awal terbanyak (Early Majority)* – 34% dari warga masyarakat; (4) *Adopter akhir terbanyak (Late Majority)* – 34% dari warga masyarakat; (5) *Kolot (lagards)* – 16% dari warga masyarakat. Kelima kelompok ini memiliki ciri dan sifat masing-masing.

## 9. METODE PENYULUHAN

### 9.1. Pengantar

Penyuluhan sebagai sebuah proses Pendidikan non-formal, pembelajaran, dan komunikasi hanya akan dapat berjalan efektif jika menggunakan cara atau metode penyuluhan yang tepat. Metode atau cara pelaksanaan penyuluhan dapat berupa pendekatan perorang, kelompok, dan massa. Uraian dan penjelasan dalam bab ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang metode penyuluhan yang dapat dipilih dalam rangka mendukung efektivitas penyuluhan pertanian.

Penggolongan metode penyuluhan dan jenis metode penyuluhan kedalam tiga kelompok metode adalah penggolongan yang sudah umum digunakan dalam berbagai referensi penyuluhan pertanian. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, penggolongan metode dan jenis metode penyuluhan dapat lebih kompleks. Penggunaan media sosial dan web-site sebagai bagian dari metode komunikasi dan penyuluhan pertanian telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir, dan ini bagi dunia penyuluhan pertanian menjadi sesuatu yang baru dan tidak terpikirkan sebelumnya. Telah banyak kajian tentang fakta bahwa penyuluh dan petani dan parapihak yang terkait dengan pembangunan pertanian dan pengembangan masyarakat aktif mencari sendiri informasi, teknologi dan inovasi pada berbagai jenis sumber seperti youtube dan lainnya. Fakta ini menunjukkan perlunya pemikiran tentang bagaimana penggolongan, jenis, dan pemanfaatan media dan metode penyuluhan dalam mencapai dan mewujudkan efektivitas penyuluhan (Shanmuka, et al., 2022).

## 9.2. Metode dan Penggolongan Metode Penyuluhan

### Metode Penyuluhan

Van den Ban dan Hawkins menjelaskan bahwa metode penyuluhan adalah teknik atau cara untuk mempengaruhi perilaku orang-orang, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok metode penyuluhan, yaitu metode penyuluhan dengan pendekatan massa, kelompok dan individu atau perorangan (Van den Ban & Hawkins, 1996).

Berikut beberapa definisi metode penyuluhan (*extension methods*) yang dirumuskan oleh beberapa pakar atau ahli penyuluhan, dan lembaga yang bergerak dalam penyuluhan dan pengembangan masyarakat:

*“Metode penyuluhan menunjuk pada semua teknik atau kegiatan yang digunakan oleh penyuluh untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Teknik atau kegiatan-kegiatan ini merepresentasikan cara-cara dimana sumber-sumber penyuluhan terhubung dengan penerimanya dalam rangka pengiriman atau transmisi pesan-pesan penyuluhan”* – “Extension methods refer to all the techniques and activities used by extension workers to communicate with people. They represent the ways in which extension sources are linked with their receivers for the transmission of messages” (Hawkins, Dunn, & Cary, 1982)

*“Metode penyuluhan didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk menciptakan situasi dimana komunikasi dapat berlangsung antara instruktur dengan pelajar atau antara guru dengan murid atau antara penyuluh dengan petani atau masyarakat di pedesaan”* – “Extension teaching Methods may be defined as the devices used to create situations in which communication can take place between the instructor and the learner or Teacher and student or Extension worker and the rural people etc.” (IST: Instructional Technology, 2023),  
<http://ecoursesonline.iasri.res.in/mod/page/view.php?id=80665>).

“Metode Penyuluhan Pertanian adalah *cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha* agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong, dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup” (Kementerian Pertanian Republik, 2023)

Ketiga definisi ini menunjukkan kesamaan sudut pandang para penulis bahwa metode penyuluhan adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan penyuluhan kepada sasaran penyuluhan.

### **Penggolongan metode penyuluhan**

Banyak upaya untuk mengelompokkan metode penyuluhan, namun yang umum digunakan adalah pengelompokan metode penyuluhan atas dasar (1) jumlah sasaran, yaitu metode penyuluhan dengan *pendekatan perorangan, pendekatan kelompok* dan *pendekatan massal* (Van den Ban & Hawkins, 1996), dan (2) bentuk komunikasinya. Tabel berikut memberikan ilustrasi tentang jenis-jenis metode penyuluhan yang termasuk pada ketiga kategori metode dimaksud.

Tabel 9.1. Metode Penyuluhan menurut Jumlah Sasarannya

Kelompok Metode	Jenis Metode
(1) Perorangan	Kunjungan usaha tani dan kunjungan rumah, kontak via telpon, surat menyurat, sms, wa message, demonstrasi hasil dan demonstrasi cara
(2) Kelompok	Diskusi dan pertemuan kelompok, demonstrasi cara dan hasil, studi banding, pelatihan dan pelatihan, workshop/lokakarya, karya wisata, pelatihan tokoh tani, kursus tani, magang, studi banding, dan lainnya.
(3) Massa	Siaran pedesaan melalui media elektronik, koran masuk desa, pameran atau field days, program televisi, bulletins, leaflets, poster, web-site, youtube, dan lainnya.

Catatan: Metode-metode ini juga dapat dikelompokkan sesuai dengan bentuk komunikasinya seperti bentuk tulisan (bulletin, leaflets, artikel koran, surat pribadi, surat edaran), audio atau diucapkan (pertemuan dalam banyak bentuknya, kunjungan rumah dan usaha tani, panggilan atau telpon kantor, radio, dan lainnya.), dan audio-visual (film, televisi, demonstrasi hasil dan demonstrasi cara, pameran, poster, grafik, slides, dan lainnya.).

**Metode penyuluhan dengan pendekatan perorangan:** Metode ini digunakan ketika penyuluh bermaksud untuk mengkomunikasikan pesan dengan petani atau pengelola hutan secara perorangan atau ketika penyuluh diminta oleh seorang petani untuk menjelaskan sesuatu yang menyangkut kegiatan usaha tani. Termasuk dalam kelompok metode penyuluhan dengan pendekatan perorangan antara lain sebagai berikut:

- (1) **Kunjungan usaha tani:** Seringkali pekerjaan penyuluhan dapat dilakukan dengan mudah ketika seorang penyuluh dapat menemui petani di lahan usaha taninya. Kunjungan usaha tani memiliki kelebihan karena penyuluh dapat secara langsung menjelaskan tentang sesuatu hal yang terkait dengan usaha tani. Suasana dalam kegiatan kunjungan usaha tani akan terasa lebih

rileks dan santai karena pada saat itu petani dan penyuluh berada di areal terbuka, di sela-sela tanaman dan atau duduk-duduk di “saung” atau tempat peristirahatan petani. Ketika melakukan kunjungan usaha tani sedapat mungkin penyuluh tidak mengajukan banyak pertanyaan saat petani sedang konsentrasi melakukan kegiatan di usaha taninya. Penyuluh harus pintar menentukan kapan sebaiknya mengajak “ngobrol” petani. Kunjungan usaha tani dapat dilakukan dengan paling tidak 3 alasan, yaitu (1) penyuluh berkepentingan untuk menyampaikan sesuatu kepada petani, (2) petani pengajak atau mengundang penyuluh untuk datang ke lahan usaha tani, dan (3) petani dan penyuluh sama-sama menyepakati untuk melakukan pertemuan di usaha tani.

- (2) **Kunjungan rumah:** Metode ini dipilih ketika penyuluh bermaksud mengkomunikasikan sesuatu kepada petani ketika petani sedang berada di rumahnya. Kunjungan rumah umumnya dilakukan ketika petani sudah tidak memiliki kegiatan di usaha tani. Kunjungan biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu dimana kebanyakan petani berada di rumahnya (misalnya pada hari Jum’at, karena di hari Jum’at pada komunitas muslim biasanya bersiap-siap untuk Jum’atan). Selain itu, penyuluh juga dapat berkunjung di sore hari setelah seorang petani kembali berada di rumahnya. Dalam rangka melakukan kunjungan rumah secara lebih efektif, seorang penyuluh perlu mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami kebiasaan dari petani di wilayah kerjanya (jam berapa petani umumnya ke usaha tani, dan berada di rumah).
- (3) **Metode dengan pendekatan perorangan lainnya,** seperti telepon, sms, dan surat menyurat: Pendekatan lain yang dapat dilakukan oleh penyuluh ketika hendak menyampaikan pesan dengan seorang petani adalah dengan menggunakan telepon. Penyuluh dapat menelepon petani secara langsung untuk menyampaikan sesuatu pesan atau untuk menanyakan keadaan

petani dan usaha taninya. Telepon juga digunakan untuk mengajak atau mengundang petani untuk hadir pada suatu kegiatan atau acara. Dengan perkembangan teknologi informasi, penyuluh dapat dengan mudah menggunakan berbagai fasilitas HP untuk mengkomunikasikan teknologi pertanian dan informasi secara visual dan verbal – pengiriman foto atau gambar atau skema atau pesan-pesan lainnya seperti informasi harga dan permintaan pasar untuk produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani. Seiring dengan berkembangnya IT seperti HP, penggunaan surat menyurat sudah semakin jarang dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

**Metode penyuluhan dengan pendekatan kelompok:** Beberapa pertanyaan penting terkait dengan metode penyuluhan melalui pendekatan kelompok adalah: (1) kenapa penyuluh menggunakan pendekatan kelompok, (2) contoh-contoh metode kelompok? (3) bagaimana menggunakan pendekatan kelompok agar lebih efektif?

*Sekolah Lapang (farmer field school):* Pendekatan Partisipasi dalam Penyuluhan

Sejalan dengan terus meningkatnya pendidikan para petani dan mengikuti prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa dan dilatar belakangi oleh banyaknya kegagalan dalam program penyuluhan dan pengembangan masyarakat, maka berkembang pendekatan “Sekolah Lapang” sebagai sebuah pendekatan dalam metode penyuluhan. Metode ini awalnya berkembang dalam upaya pemberantasan hama dan penyakit tanaman dimana para petani difasilitasi untuk secara bersama mengidentifikasi gejala serangan hama dan penyakit, kemudian menghitung dan memperkirakan besarnya populasi serta merumuskan solusi terhadap persoalan hama penyakit (Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman atau SLPHT), namun belakangan juga berkembang untuk berbagai kegiatan dan komoditi pertanian seperti SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu), dan Sekolah Lapang Iklim (SLI).

Prinsip dasar yang digunakan dalam pendekatan sekolah lapang adalah “petani belajar pada petani” atau petani belajar secara bersama dengan saling mempertukarkan informasi. Peran penyuluh dalam sekolah lapang lebih sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses pembelajaran dalam sekolah lapang.

**Metode penyuluhan dengan pendekatan massa:** Ketika seorang penyuluh atau lembaga penyuluhan hendak menyampaikan informasi secara cepat kepada sasaran atau audiens yang luas, maka pilihan metode dengan pendekatan massal adalah lebih sesuai. Pendekatan massal umumnya dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran bahwa “ada sesuatu yang baru atau program atau kebijakan” yang hendak disampaikan oleh pemerintah atau siapapun kepada masyarakat. Informasi akan menyebar dengan cepat hanya dalam hitungan hari untuk menjangkau audiens yang luas dan tersebar di pelosok-pelosok suatu kawasan atau daerah. Pendekatan massal juga mampu untuk membangkitkan daya tarik atau minat audiens untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang baru yang diketahuinya melalui radio atau televisi atau koran. Ketika ini terjadi, maka pendekatan kelompok dan atau perorangan akan menjadi pendekatan lanjutan untuk melayani petani – memenuhi keinginan petani untuk mengetahui lebih dalam dan detail.

### **Rapid Rural Appraisal dan Participatory Rapid Appraisal: Pendekatan Baru dalam Prose Belajar Petani dan Masyarakat**

Pretty dan Vodouhê (1997) dalam tulisannya berjudul “*Using rapid or participatory rural appraisal*” atau Penggunaan Penilaian Desa secara Cepat atau Partisipatif” (Pretty & Vodouhê, 1997) menjelaskan bahwa cara pembelajaran konvensional melalui pelaksanaan survei untuk memahami kebutuhan petani seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan fakta yang sebenarnya karena adanya faktor-faktor bias. Pelaksanaan survei untuk memahami permasalahan dan kebutuhan petani seringkali dilakukan dengan hanya mengunjungi petani dalam waktu singkat, mewawancarai petani yang lebih maju dan tinggal di tempat-tempat yang mudah dijangkau, dan dikunjungi pada saat-saat



yang enak (sejuk, musim hujan, siang hari, dst). Cara ini disebut oleh Chamber (1983) sebagai pendekatan “turis pembangunan desa” (*rural development tourism*), yang hanya mengunjungi desa dalam waktu singkat dan oleh karena itu tidak mampu untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang permasalahan dan kebutuhan petani atau masyarakat desa yang sesungguhnya. Paling tidak ada empat bias atau ketidak tepatan dari pendekatan ini, yaitu (1) **bias tempat** dimana data yang diperoleh hanya diperoleh dari mereka yang lebih kaya yang tinggal di pinggir jalan besar di desa dan tidak dari mereka yang miskin dan tinggal di pelosok desa; (2) **bias waktu**, yaitu bias karena petugas atau penyuluh hanya mengunjungi petani pada musim tanam, saat sejuk dan hujan dan tidak pada musim kering dan panas; (3) **bias orang**, yang mengacu pada terjadinya bias karena penyuluh hanya berbicara dengan tokoh masyarakat atau kontak tani yang hanya merepresentasikan tokoh atau elit desa yang umumnya dominan dan menjadi kelompok yang lebih baik perekonomiannya; dan (4) **bias proyek**, yaitu suatu keadaan dimana penyuluh mengunjungi desa yang sukses atau praktik-praktik terbaik – sebagai akibat dari adanya proyek, dan menjadi lokasi yang selalu ditunjukkan dan atau dikunjungi oleh orang luar sehingga orang luar memperoleh kesan bahwa inilah “apa yang terjadi di desa itu” (Chambers, 1983).

Atas dasar persoalan di atas, maka Pretty dan Vodouhê (1997)<sup>9</sup> berpendapat tentang pentingnya penggunaan PRA atau RRA sebagai alternatif pendekatan dalam pembelajaran masyarakat dan petani. Dalam konsepnya, Pretty (1994) menjelaskan bahwa pendekatan PRA paling tidak mengikuti beberapa prinsip dasar berikut ini:

- (1) Metodologi yang jelas dan proses pembelajaran sistemik: Fokus pada proses pembelajaran yang kumulatif pada semua peserta karena sifat dari pendekatan ini sebagai pembelajaran sistem dan interaksi, dan penggunaannya pun harus partisipatif.

---

<sup>9</sup> Dalam buku “IMPROVING AGRICULTURAL EXTENSION: A REFERENCE MANUAL” yang diedit oleh Burton E. Swanson, Robert P. Bentz, dan Andrew J. Sofranko, 1997. Publikasi: Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome

- (2) Multi-perspektif: Tujuan utamanya adalah mencari dan menghargai keragaman dan bukan membuat rata-rata dari sebuah fenomena dan fakta yang kompleks. Asumsinya adalah bahwa setiap orang atau kelompok memiliki penilaian dan interpretasi terhadap suatu situasi yang kemudian dapat menghasilkan tindakan yang berbeda. Oleh karena itu dapat terjadi bahwa satu situasi diinterpretasi dan dijelaskan secara berbeda.
- (3) Proses belajar kelompok: Memungkinkan para pihak, ahli dan masyarakat lokal saling berinteraksi dan bertukar informasi dalam kelompok (pihak luar dan dalam).
- (4) Konteks spesifik (*context specific*): Pendekatan ini cukup fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi lokal dan orang dan pihak-pihak yang berbeda.
- (5) Memfasilitasi ahli dan stakeholders: Peran para ahli adalah memfasilitasi proses pembelajaran masyarakat lokal atau petani untuk dapat mengkaji situasi dan kondisi mereka dan mencapai sesuatu.
- (6) Mendorong ke arah tindakan: Proses pembelajaran dalam kelompok melalui interaksi yang intensif antara para pihak (ahli dan penduduk lokal) menyebabkan mereka berpikir untuk melakukan sesuatu guna mengatasi persoalan serta mewujudkan suatu perubahan.

### **9.3. Metode Penyuluhan, Tujuan Penyuluhan dan Proses Adopsi**

Ada hubungan antara metode penyuluhan dengan tujuan penyuluhan dan tahapan dalam proses adopsi. Metode penyuluhan dengan pendekatan massa akan sangat efektif dalam membangkitkan kesadaran, mendorong minat dan bahkan membantu audiens untuk mengevaluasi. Hal ini mudah dilakukan melalui pendekatan massa karena melalui komunikasi massa disampaikan informasi (*communication to inform*), dan dilakukan usaha-usaha untuk mempengaruhi (*to persuade*). Pada proses komunikasi massa dapat disampaikan informasi secara lengkap dan komprehensif tentang suatu

inovasi dan teknologi, kemudian juga dapat ditunjukkan bentuk visual dari inovasi atau teknologi itu, dan bahkan dapat disampaikan juga tentang berbagai kelebihan dan kekurangannya. Ketika sumber memberikan informasi tentang kelebihan dan atau kekurangan suatu inovasi atau teknologi, maka sesungguhnya yang dilakukan adalah membantu audiens atau penerima untuk menilai tentang kelebihan dan kekurangan dari inovasi atau teknologi itu.

Ketika pada diri sasaran atau penerima sudah muncul rasa tertarik dan “kesimpulan awal tentang suatu inovasi” (minat dan menilai), maka yang dibutuhkan oleh penerima atau sasaran penyuluhan adakah untuk membuktikan bahwa yang dinilainya itu benar. Pada tahapan ini, maka yang dilakukan oleh penerima adalah mencobanya. Dalam konteks metode penyuluhan, maka pendekatan yang pas dan cocok untuk membuktikan adalah melalui pendekatan kelompok. Pada tahap ini, maka yang dapat dilakukan oleh penyuluh adalah memfasilitasi proses diskusi dalam kelompok atau proses-proses yang mampu menunjukkan tentang kelebihan dan keunggulan dari suatu inovasi atau teknologi. Metode studi banding atau demonstrasi dapat menjadi pilihan dalam mendukung proses mental pada diri sasaran penyuluhan. Ketika pendekatan kelompok mampu meyakinkan sasaran atau penerima, maka yang akan terjadi adalah diterapkannya teknologi atau inovasi itu oleh sasaran atau penerima (tahap adopsi).

Jika pendekatan kelompok masih dirasakan sulit untuk membimbing sasaran secara pribadi, maka penyuluh dapat menindak lanjutinya dengan melakukan pembinaan secara intensif melalui pendekatan perorangan atau individual melalui proses-proses seperti kunjungan usaha tani atau kunjungan rumah. Pada pendekatan ini penyuluh dapat membantu petani secara perorangan untuk lebih memahami dan terampil dalam hal menerapkan inovasi dan teknologi pada kondisi usaha taninya.

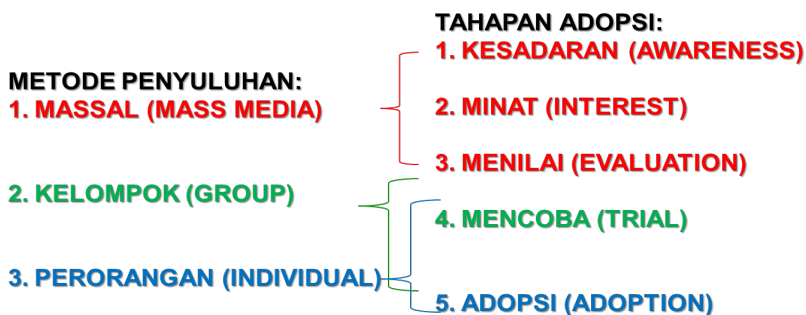
Hubungan antar tujuan penyuluhan - *perubahan perilaku Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan (hard skills: Mencangkok dan okulasi tanaman; & soft skills: Komunikasi, memimpin diskusi,*

bekerja dalam Tim, membangun jaringan, dan lainnya) dan proses adopsi dengan metode penyuluhan dapat disajikan pada Tabel 9.2 dan Gambar 9.1 berikut ini.

Tabel 9.2. Strategi dan Metode untuk Mencapai Tujuan Penyuluhan

Tujuan penyuluhan	Strategi	Metode yang disukai
(1) Pengetahuan (Cognitive)	Transfer informasi	Publikasi dan rekomendasi melalui media massa, kuliah, leaflets, dialog, pertemuan kelompok
(2) Sikap (Affective)	Belajar melalui pengalaman – “Observing”	Demostrasi hasil, pertemuan dan diskusi kelompok, simulasi, film, kunjungan ke petani sukses,
(3) Keterampilan (Psychomotoric)	Latihan dalam keterampilan “Learning by doing”	Pelatihan, magang, diskusi kelompok/bermain peran

Sumber: Van den Ban & Hawkins (1996)



Gambar 9.1. Hubungan Metode Penyuluhan dengan Tahapan Adopsi

#### 9.4. Pertimbangan dalam Pemilihan Metode Penyuluhan

Penyuluhan yang efektif ditentukan oleh penggunaan metode penyuluhan yang sesuai. Untuk itu, maka seorang penyuluh perlu melakukan langkah-langkah awal dalam menentukan dan memilih

metode penyuluhan yang cocok untuk digunakannya. Untuk mendukung penyuluh atau lembaga penyuluhan dalam membuat keputusan terbaik tentang metode penyuluhan, maka diperlukan sejumlah data pendukung yang menjadi dasar dalam membuat keputusan. Data-data yang dibutuhkan antara lain tentang kondisi sosial ekonomi dan lingkungan dari sasaran penyuluhan. Data ini antara lain misalnya mencakup tingkat pendidikan, kondisi pengetahuan awal atau saat ini, kondisi ekonomi yang juga akan memperlihatkan tingkat pemilikan pesawat televisi, akses terhadap media cetak, dan lainnya. Ketika semua informasi ini tersedia, maka dapat diputuskan apakah menggunakan pendekatan massa atau pendekatan kelompok. Adalah keliru ketika penyuluh memilih untuk menggunakan pendekatan massa ketika fakta membuktikan bahwa sasaran penyuluhan tidak memiliki pesawat televisi atau tidak memiliki akses terhadap media cetak seperti koran dan majalah.

Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan dan memilih metode penyuluhan, yaitu antara lain: (1) Tujuan penyuluhan, (2) Karakteristik sasaran penyuluhan, (3) Ketersediaan sumber daya penyuluh, (4) Waktu dan dana yang tersedia, dan (5) Faktor lingkungan.

**Tujuan penyuluhan:** Program penyuluhan biasanya terdiri dari beberapa kegiatan atau aktivitas atau tingkatan tujuan. Tujuan penyuluhan meliputi *peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan menciptakan atau mendorong perubahan sikap*. Setiap tujuan ini dapat dicapai dengan pendekatan atau metode penyuluhan yang berbeda. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan misalnya dengan diskusi kelompok, ceramah, pemberian hand-out, atau presentasi singkat dengan menggunakan power point presentation, dan lainnya. Tujuan peningkatan keterampilan dicapai melalui kegiatan praktik, sedangkan perubahan sikap dapat dicapai melalui proses kunjungan ke petani-petani yang sukses. Pertimbangan “tujuan penyuluhan” tidak terpisah dari pertimbangan lainnya, misalnya jumlah sasaran penyuluhan. Jika jumlah sasarnya cukup banyak atau masyarakat luas, maka tujuan untuk mencapai perubahan

pengetahuan akan lebih efektif dengan penggunaan media massa seperti televisi, radio dan atau koran.

**Karakteristik sasaran penyuluhan:** Karakteristik sosial ekonomi dan lingkungan perlu menjadi pertimbangan dalam penentuan metode penyuluhan. Jika petani sasaran memiliki pendidikan yang rendah, dan dengan kondisi sosial ekonomi yang juga rendah, sangat tidak mungkin untuk menggunakan metode penyuluhan massa yang menggunakan Bahasa-bahasa yang teknis dan media televisi atau radio.

**Ketersediaan sumber daya penyuluhan:** Penentuan metode penyuluhan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya penyuluhan seperti sumber daya manusia dan sumber daya keuangan dan sumber daya fisik dan fasilitas. Jika jumlah tenaga penyuluh terbatas untuk melayani petani yang jumlahnya banyak, maka akan tidak mungkin dan akan lama kalau menggunakan kunjungan usaha tani atau kunjungan rumah. Maka metode yang dapat dipikirkan dan dipilih adalah metode dengan pendekatan kelompok seperti pertemuan dan diskusi kelompok. Jika fasilitas dan peralatan serta media seperti poster dan leaflets untuk sebuah kegiatan dengan tujuan menginformasikan tentang sebuah program kepada masyarakat luas, maka pilihan dalam penggunaan media massa seperti radio dan televisi adalah memungkinkan.

**Waktu dan dana yang tersedia:** Penentuan metode penyuluhan juga dipengaruhi oleh ketersediaan waktu dan anggaran. Jika waktu terbatas atau pencapaian tujuan penyuluhan harus segera untuk jumlah sasaran yang luas dan banyak, maka metode penyuluhan yang efektif untuk dipilih dalam metode dengan pendekatan massa – penggunaan siaran radio dan atau televisi. Sebaliknya jika dana tersedia dan waktu cukup untuk mencapai tujuan peningkatan keterampilan, maka pelatihan atau magang dapat menjadi pilihan. Metode magang atau studi banding juga dapat dipilih untuk sebuah kegiatan penyuluhan dengan tujuan untuk merubah sikap dan keterampilan.

**Faktor lingkungan:** Penentuan metode penyuluhan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kondisi geografis yang tidak memungkinkan penggunaan media-media atau peralatan elektronik seperti untuk pemutaran film dan penggunaan presentasi menggunakan LCD atau slide – tidak ada jaringan listrik. Boleh jadi suatu masyarakat memiliki akses yang terbatas terhadap media televisi atau internet karena lokasinya tidak terjangkau oleh sinyal atau terencil. Penggunaan media televisi dan radio tidak memungkinkan untuk kondisi seperti ini.

### **9.5. Fakta dan Tantangan dalam Pendekatan Kelompok**

“Kelompok” sebagai salah satu topik kajian dalam Psikologi Sosial, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses interaksi sosial dalam masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dalam perspektif pembangunan, dianggap sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi sosial, memfasilitasi proses belajar, dan bahkan sebagai wadah bersama dalam penyaluran aspirasi. Sejalan dengan pandangan ini, kenyataan menunjukkan bahwa di setiap desa terdapat banyak jenis dan jumlah kelompok, seperti kelompok tani, kelompok pencapir, kelompok masyarakat - Inpres Desa Tertinggal (pokmas IDT), dan perkumpulan petani pemakai air (P3A). Selain itu ada lagi yang disebut sebagai kelompok petani kecil yang terbentuk melalui Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) dan lain-lainnya. Di NTB, pada tahun 1996 terdapat lebih dari 12.000 kelompok pada empat jenis kelompok yang pertama - kelompok tani, P3A, kelompok pencapir, dan pokmas. Sementara itu, di Lombok Barat sendiri terdapat sekitar 1.150 untuk keempat jenis kelompok tersebut. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut belum mampu berperan sebagaimana diharapkan, dan bahkan seringkali kelompok hanya eksis di atas kertas dan laporan, saat akan diperlombakan, lomba desa maupun lomba kelompok. Seorang petugas mengungkapkan "biasanya kelompok itu ada saat ada proyek saja".

Tulisan ini ditujukan selain dalam rangka pemahaman konsep “kelompok” dalam Psikologi Sosial, tetapi juga ditujukan untuk melihat sisi-sisi strategis upaya revitalisasi dan pemberdayaan kelompok dengan harapan agar kelompok tidak sekedar digunakan sebagai sekedar alat untuk melaksanakan program atau proyek pembangunan, tetapi lebih sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.

### **Kelompok dan Perannya dalam Pembangunan**

“Kelompok” didefinisikan sebagai “kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, berinteraksi dan saling mempengaruhi guna mencapai tujuan bersama” (Worchel dan Cooper, 1983: Johnson dan Johnson, 1991). Mengacu pada definisi ini, maka sesungguhnya kehidupan seseorang dalam keseharian tidak terlepas dari lingkungan kelompok, baik kelompok primer (keluarga) dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Di pedesaan misalnya, seorang petani dapat berada dalam lebih dari satu kelompok seperti kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pengajian, kelompok arisan, dan kelompok-kelompok lainnya. Keberadaan kelompok-kelompok ini, terlepas dari bagaimana kelompok itu terbentuk, menunjukkan beberapa elemen penting dalam suatu kelompok, yaitu: kumpulan orang-orang, yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam waktu atau periode tertentu, untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks pembangunan, kelompok dapat berperan dalam banyak hal antara lain:

- (1) Pembuatan keputusan
- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- (3) Wadah dalam penyaluran jasa, informasi dan teknologi
- (4) Merubah perilaku melalui proses belajar dan penyuluhan
- (5) Wadan penyaluran aspirasi kepada pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya.



## Fenomena Kegagalan Kelompok: Kajian atas Beberapa Kasus Hasil Penelitian

Walau pun pada beberapa kasus penelitian ditemukan bahwa masih ada kelompok yang berperan efektif dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, kasus-kasus berikut paling tidak dapat memberikan sedikit ilustrasi tentang kondisi mayoritas kelompok yang ada di pedesaan (kelompok tani, kelompok pencapir, P3A, dan Pokmas IDT), yang hidup segan mati tak mau.

Penelitian kasus di dua desa di Lombok Barat ditemukan hanya satu kelompok tani yang aktif dari 16 kelompok tani yang tercatat oleh Balai Penyuluhan Pertanian - BPP. Kelompok tani dengan 30 anggota aktif ini berperan tidak saja dalam hal *transfer teknologi*, tetapi juga cukup berperan dalam *pelayanan saprodi* dan *kebutuhan pokok*, bahkan mampu *menghimpun dana* hampir 1,5 juta rupiah (Muktasam, 1998).

Sementara itu, penelusuran terhadap kelompok tani yang tidak aktif menunjukkan hal yang cukup menarik untuk bahan refleksi dalam tulisan ini. Wawancara dengan pengurus kelompok tidak saja memperlihatkan bahwa kelompok tidak memiliki kegiatan yang diprakarsai secara mandiri, tetapi bahkan ada pengurus yang merasa sudah bukan pengurus lagi.

Cerita tentang dinamika Kelompok Pencapir memberikan nuansa lain tentang kelompok. Gaung kelompok pencapir memang lebih terasa saat-saat menjelang perlombaan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pada saat-saat seperti ini, intensitas pembinaan meningkat dan setiap instansi terkait dilibatkan. Gaung itu sedikit demi sedikit mereda begitu perlombaan berlalu dan kelompok bahkan mencapai tahap berhenti.

Walau diakui bahwa ada beberapa kelompok pencapir yang mampu "*bertahan dan mungkin berkembang*" paska perlombaan, studi kasus tentang persepsi anggota terhadap kelompok menunjukkan bahwa kelompok dibentuk dengan tujuan untuk meraih juara dalam lomba

kelompok atau lomba desa, daripada sebagai *wadah penyebar informasi*.

Kasus yang juga menarik untuk dijadikan sebagai bahan refleksi adalah tentang Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Studi menunjukkan bahwa P3A begitu berat untuk berjalan menuju perkumpulan yang *matang* dan *mandiri*. Beberapa permasalahan penting yang teridentifikasi antara lain:

(1) *Jumlah anggota yang tidak jelas dan dinamis* seiring dengan dinamisnya pola penguasaan lahan serta mobilitas usaha tani,

(2) *Dualisme kelembagaan*, antara P3A sebagai suatu kelembagaan formal baru yang diperkenalkan dengan kelembagaan tradisional - *kesubakan* di Lombok dan Bali. Dualisme ini ternyata pada beberapa kasus memunculkan kecemburuan sosial, khususnya ditingkat pengurus.

(3) *Proses pengesahan AD/ART yang berlarut-larut*. Studi kasus ini menunjukkan bahwa sebuah AD/ART dapat disahkan oleh Bupati dan dicatat di Pengadilan setelah lebih dari dua tahun. Menurut pengurus, permasalahan ini berdampak pada terbatasnya proses sosialisasi dan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam AD/ART. Ironinya, kepengurusan pun berganti sebelum sempat melaksanakan AD/ART (Muktasam, 1998; Muktasam, 2000).

Studi kasus pada dua desa penerima dana IDT menunjukkan bahwa semua *pokmas* di kedua desa belum mampu berperan banyak dalam *program pengentasan kemiskinan*. Pokmas-pokmas ini bahkan berada pada kondisi yang stagnan, hidup segan mati tak mau. Workshop pada tingkat pokmas menunjukkan bahwa stagnasi kelompok dapat dimaklumi karena sesungguhnya peran satu-satunya yang dilaksanakan oleh pokmas adalah *sekedar penyalur dana IDT*.

Diakui oleh pengurus maupun anggota pokmas, *selama dibentuknya kelompok belum ada upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan para anggota kelompok dalam rangka peningkatan kemampuan berusaha*. Hal ini menjadi penjabar kenapa anggota

pokmas tidak sanggup untuk memberdayakan diri dan kelompoknya. Penelitian kasus ini juga menunjukkan bahwa pokmas lebih dipandang sebagai wadah penyaluran dana IDT ketimbang sebagai wadah pemberdayaan masyarakat miskin.

Sekitar 75 persen anggota pokmas kasus memanfaatkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang non-produktif, seperti untuk membeli beras dan barang konsumsi lainnya. Penelusuran terhadap proses pembentukan pokmas dapat menjelaskan kenapa hal-hal tersebut muncul. Dua masalah pokok yang diidentifikasi sebagai sumber masalah adalah (1) *proses pembentukan pokmas yang dominan "top-down"*, (2) *penggunaan kriteria "miskin" yang kurang pas*. Atas dasar kriteria fakir miskin dari Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (*Bazis*), pada pokmas kasus teridentifikasi sejumlah anggota yang termasuk sebagai orang-orang yang berusia lanjut (lebih dari 60 tahun), yang secara konseptual memiliki orientasi terbatas dalam peningkatan produktivitas.

### **Kenapa Kelompok Gagal?**

Ringkasan kasus-kasus di atas memberikan beberapa indikasi akan adanya masalah penting dalam upaya pemanfaatan kelompok bagi kepentingan pembangunan. Masalah-masalah tersebut antara lain, pendekatan yang *paralel dan kurang terkoordinasi, bersifat top-down yang kurang partisipatif (konsep Transfer of Technology)*, pendekatan dengan *pemberian insentif (tidak efektif)*, dan *upaya-upaya pencapaian target tanpa memperhatikan kondisi objektif*. Selain faktor-faktor eksternal tersebut, faktor-faktor internal dan lingkungan kelompok juga turut mempengaruhi penampilan kelompok, keduanya tidak akan dibahas dalam tulisan ini.

*Pendekatan paralel, parsial dan kurang koordinasi* seringkali berdampak pada *duplikasi pelayanan, pemborosan dana dan tenaga*. Tidak ada proses konvergensi sumber daya yang seharusnya dapat dilakukan untuk pemberdayaan kelompok. Hal ini menjadi penting ketika program atau proyek diarahkan kepada sasaran yang juga

menjadi sasaran pihak lain atau yang menghendaki koordinasi dan pendekatan sistem.

Pendekatan "top-down" tampak jelas pada beberapa kasus di atas, yang berakibat pada kurangnya partisipasi dalam proses-proses kelompok, dari perencanaan hingga pengawasan dan penikmatan hasil. Padahal disadari bahwa partisipasi menjadi dasar bagi tumbuh dan berkembangnya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan kelompok. Beberapa alasan bagi munculnya pendekatan 'atas-bawah' ini antara lain sifat program yang 'segera', dan usaha-usaha untuk mencapai 'target' dalam jumlah dan batas waktu.

Selain itu, kekeliruan persepsi terhadap penyuluhan dan pelaksanaan program pembangunan sebagai suatu proses transfer teknologi dan penyampaian program menyebabkan kita memperlakukan kelompok sebagai pihak yang menerima program, dan kelompok sebagai alat untuk mentransfer teknologi dan program. Akibatnya, terbentuk persepsi bahwa kelompok menjadi milik instansi tertentu, dan bukan menjadi milik petani. Kelompok yang demikian karenanya akan mengadakan kegiatan atau pertemuan kalau memang dikehendaki oleh instansi yang bersangkutan.

Pendekatan insentif - misalnya dengan menyediakan uang saku atau transpor - dalam beberapa hal cukup berarti dalam mendorong 'partisipasi', paling tidak untuk menghadirkan anggota kelompok dalam suatu pertemuan. Hal ini berlaku khususnya bagi instansi-instansi yang memiliki dana cukup. Di sisi lain, pendekatan ini menjadi sangat antagonis bagi instansi lain yang kurang memiliki banyak dukungan dana. Bagi mereka, mengumpulkan anggota untuk pertemuan kelompok merupakan masalah tersendiri.

### **Ke Arah Pemberdayaan Kelompok**

Kelompok tidak sekedar instrumen untuk implementasi kebijakan, tetapi merupakan wadah pemberdayaan masyarakat pedesaan. Menilik pada konsep pemberdayaannya Ife (1995) dalam bukunya berjudul "Community Development", pemberdayaan sebagai suatu proses

untuk meningkatkan kekuatan pihak-pihak yang kurang beruntung, hanya dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang mampu melibatkan mereka dalam proses pengembangan kebijakan, perencanaan, aksi sosial politik, dan proses Pendidikan (Ife, 1995).

Esensi proses pemberdayaan yang digariskan oleh Ife (1995) tersebut menjadi argumentasi bahwa upaya revitalisasi peran kelompok hanya dapat dilakukan melalui proses-proses yang partisipatif, dari tahap pembentukan atau inisiasi, perencanaan, aksi, pengawasan atau evaluasi, hingga pada sharing hasil yang diperoleh kelompok. Chamala (1995) dengan konsepnya tentang *Participative Action Management* (PAM) menggaris bawahi bahwa suatu kelompok yang efektif terbentuk minimal dalam waktu enam bulan, sejak tahap *Inisiasi* hingga tahap *pengembangan fungsi kelompok*. Pada tahap *inisiasi* misalnya, diperlukan suatu kesadaran bersama akan eksistensi masalah dan kebutuhan (Chamala, 1995).

Melibatkan anggota dan pengurus kelompok dalam proses *inisiasi* hingga *pengembangan fungsi kelompok*, menurut Chamala (1995) menjadi bagian sentral dari proses pemberdayaan kelompok, yang pada gilirannya munculnya kepercayaan akan kemampuan diri (*self-empowerment*), tanggung jawab, dan komitmen.

Fase-fase berikut memberikan satu ilustrasi praktis tentang proses pembentukan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat (Chamala, 1995).

### **FASE 1:**

#### **INISIASI**

Tahap 1: *Kesadaran tentang adanya masalah internal & eksternal* (oleh pemimpin lokal, warga, petugas atau pihak-pihak lainnya).

Tahap 2: *Penyatuan perhatian terhadap masalah* (diskusi informal diantara pihak-pihak yang sadar akan adanya masalah).

Tahap 3: *Testing tentang adanya perhatian yang lebih luas* (diskusi informal dengan tokoh masyarakat atau instansi terkait).

Tahap 4: *Mencari dukungan lebih lanjut* (khususnya dari tokoh masyarakat, agen pembaharu, dinas, dan lainnya).

## **FASE 2:**

### **PEMBENTUKAN**

- Tahap 1: *Undang untuk pertemuan* (meliputi staf dari instansi terkait dan tokoh masyarakat. Hal yang pokok yang ingin dicapai dalam tahap ini adalah pemilihan panitia pengarah, yang kemudian bertugas menyusun draf rencana umum dan struktur kelompok).
- Tahap 2: *Mengembangkan struktur kelompok sementara dan rencana umum* (dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah, dan mencari informasi serta bantuan dari pihak-pihak terkait).
- Tahap 3: *Pengesahan struktur dan rencana umum kelompok dalam suatu rapat umum* (biasanya panitia pengarah terpilih sebagai pengurus kelompok).

## **FASE 3:**

### **AKSI**

- Tahap 1: *Memeriksa rencana umum guna merumuskan tujuan jangka pendek* (fokuskan pada satu proyek yang viable).
- Tahap 2: *Mengembangkan rencana kerja dan menetapkan program kerja* (misalnya memutuskan apa yang perlu dilakukan, sumber daya, waktu, koordinasi, dan lainnya).
- Tahap 3: *Implementasi rencana kerja* (pelatihan, demonstrasi, dan lainnya).
- Tahap 4: *Evaluasi dan dokumentasi kemajuan*.

## **FASE 4:**

### **PENGEMBANGAN/PEMBUBARAN ATAU RESTRUKTURISASI**

- Tahap 1: *Mengembangkan fungsi yang sudah ada* (tangani lebih banyak masalah, capai sasaran atau target yang lebih luas, perbanyak inisiatif. Dalam hal kelompok tani, tingkatkan jumlah penyaluran saprodi, kurangi kredit macet, dan lainnya).

Tahap 2: *Kembangkan fungsi baru* (tidak saja memperbanyak pelayanan buat anggota, tetapi juga kembangkan fungsi "berperan ke atas dan atau ke samping", menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang lebih luas.

Tahap 3: *Perluasan kelompok* (mengembangkan jangkauan lokasi atau membentuk subkelompok baru yang sesuai).

Penggunaan metode penyuluhan dengan pendekatan kelompok hanya akan efektif ketika ada komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Pendekatan-pendekatan yang selama ini kurang efektif perlu untuk dipertimbangkan kembali, seperti pemberian insentif yang berlebihan, kejar target menurut jumlah dan batas waktu, pendekatan paralel dan "top-down", dan sebagainya. Pendekatan-pendekatan ini pada dasarnya berlawanan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan serta filosofi pendidikan orang dewasa, "*jangan memberi ikan, tetapi berilah pancing, atau berilah ilmu tentang cara menangkap ikan*". Seperti telah diungkapkan, pendekatan-pendekatan tersebut di atas merupakan sumber dari ketidak berdayaan dan ketergantungan kelompok. Kelompok hanya akan melaksanakan pertemuan kalau dikehendaki oleh pihak luar. Kelompok tampak sebagai kerakap yang hinggap di batu "*hidup segan mati tak mau*".

### **Kelompok Sebagai Salah Satu Modal Sosial**

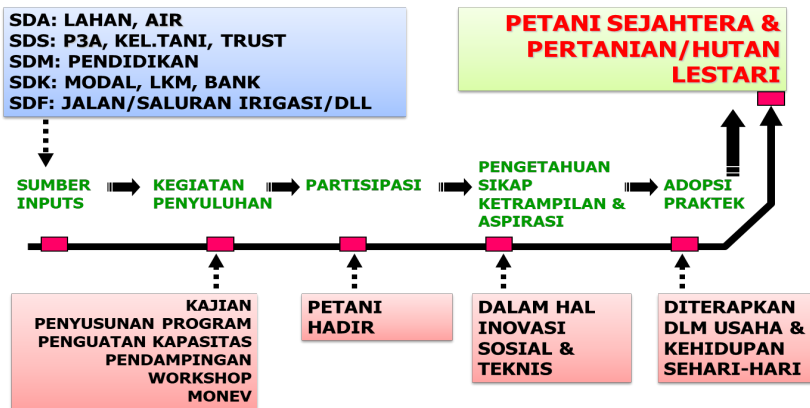
Ada paling tidak lima modal dasar dalam sistem usaha tani, termasuk dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dan HHBK, yaitu modal sumber daya alam (SDA), modal sumber daya manusia (SDM), modal sarana dan prasarana fisik (SDF), modal sumber daya keuangan (SDK), dan modal sumber daya sosial atau modal sosial (SDS). Ketersediaan dan kecukupan modal-modal ini akan menentukan sejauh mana pemerintah dan masyarakatnya mampu mewujudkan cita-cita pembangunannya, yaitu mencapai masyarakat yang sejahtera dan kondisi sumber daya alam yang lestari.

Dalam konteks pengelolaan hutan kemasyarakatan dan HHBK, *modal sumber daya alam* mencakup kondisi biofisik hutan, yang meliputi

lahan, air, iklim, kelembaban, suhu, dan lainnya, sedangkan *modal sumber daya manusia* merujuk pada jumlah dan kualitas orang-orang yang mengelola hutan dan HHBK. *Modal sumber daya fisik atau sarana dan prasarana* adalah tingkat ketersediaan dan kualitas sarana jalan, pasar, saluran air, bendungan, dan fasilitas pendukung lainnya. *Modal sumber daya keuangan* meliputi keberadaan dan ketersediaan uang dan lembaga keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat pengelola hutan. *Modal yang kelima adalah modal sosial*, yaitu *keberadaan dan kualitas kelompok, jaringan, lembaga masyarakat dan hubungan kepercayaan* antara orang di dalam masyarakat (Fukuyama, 1995: Pretty, 1999: Pretty & Hugh Ward, 2001).

Semua modal ini tidak dapat menghasilkan apa-apa ketika tidak dikelola dengan baik melalui proses dan pengaturan - kebijakan. Oleh karena itu, pada tingkatan usaha tani, seorang petani pengelola hutan atau usaha pertanian harus mengelolanya dengan baik untuk dapat menghasilkan output yang diharapkan. Tidak saja untuk jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Jika dalam proses produksi, seorang pengelola tidak memperhatikan keberlanjutan dari sumber daya alamnya (karena menggunakan bahan kimia yang berlebihan, dan menebang hutan yang menjadi daerah tangkapan air), maka akan terjadi kerusakan terhadap sumber daya alam yang menjadi salah satu modal penting dalam sistem usaha taninya. Modal-modal lainnya seperti modal keuangan, fasilitas, SDM, dan modal sosial, juga dapat mengalami pengurangan atau degradasi dan oleh karena itu harus dikelola secara baik. Dalam tingkatan yang lebih tinggi, adalah peran kelompok dan lembaga pemerintah untuk mengatur agar semua modal dapat dikelola dengan baik melalui proses pengaturan dan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan - terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan pada saat bersamaan sumber daya alam yang lestari atau berkelanjutan (*sustainable natural resources*) – Lihat Gambar 9.2 berikut ini.





Gambar 9.2. Posisi Modal Sosial diantara Lima Asset Pengelolaan HKm & HHBK

## Peran Kelompok dalam Pengelolaan Hutan & HHBK Berkelanjutan

Kelompok masyarakat sebagai suatu modal sosial memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya cita-cita pengelolaan hutan dan pengelolaan/pemanfaatan produk-produk hasil hutan bukan kayu (HHBK). Secara teoritis, kelompok sebagai sebuah modal sosial dapat memainkan tiga kelompok peran, yaitu:

- (1) **Peran ke bawah**, yaitu peran-peran yang terkait dengan upaya penguatan dan peningkatan kualitas anggota atau masyarakat di sekitarnya. Termasuk dalam peran ini antara lain peran kelompok dalam merubah perilaku anggota dan masyarakat di sekitarnya, yaitu meningkatkan *pengetahuan (knowledge)*, *ketrampilan (skills)*, merubah *sikap (attitudes)* dan *tindakan (action)* atau *praktik (practices)*. Perubahan-perubahan ini dapat dilakukan oleh kelompok melalui proses-proses yang dilakukan oleh kelompok seperti diskusi kelompok, fasilitasi kegiatan penyuluhan bersama dan oleh petugas, studi banding, kegiatan demonstrasi plot atau demplot – demonstrasi cara (untuk memperlihatkan cara kerja atau proses) dan demonstrasi hasil

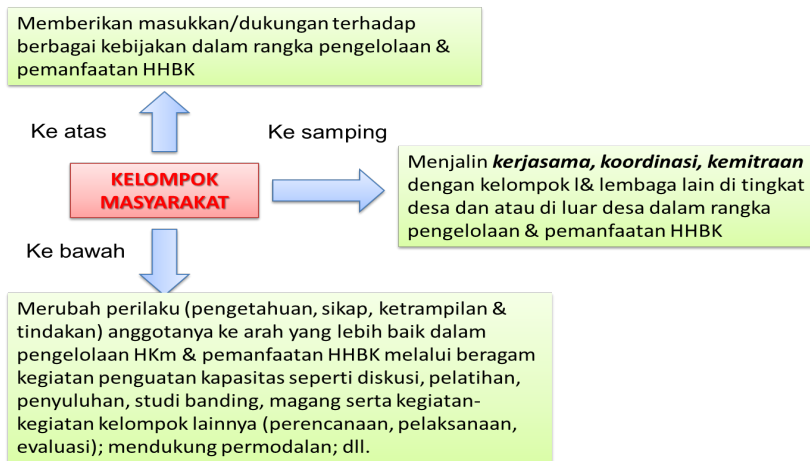
(untuk menunjukkan hasil atau capaian dari suatu praktik atau teknologi atau inovasi), karyawisata, pelatihan, magang, dan lainnya. Selain peran dalam merubah perilaku, kelompok juga dapat berperan dalam mendukung proses penyediaan input produksi, proses produksi dan pasca panen (a.l. pengolahan dan pemasaran hasil secara bersama – memperkuat posisi tawar petani). Melalui kelompok, masyarakat dapat menyusun rencana bersama dalam pengelolaan hutan dan HHBK, melaksanakan rencana secara efektif dan efisien, dan melaksanakan pengawasan (pemantauan dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan bersama. Semua ini tidak lain adalah fungsi manajemen yang diperankan oleh kelompok.

- (2) ***Peran ke samping***, yaitu dengan menjalin ***kerjasama, koordinasi, kemitraan, dan membangun jaringan*** dengan kelompok dan lembaga lain di tingkat desa dalam kawasan dan atau di luar desa atau di luar kawasan dalam rangka pengelolaan & pemanfaatan HHBK. Pengembangan peran ke samping dapat memperkuat peran kelompok dalam melayani anggota dan atau masyarakat di sekitarnya (peran ke bawah), dan juga memperkuat peran kelompok dalam proses pengembangan dan implementasi kebijakan (peran ke atas). Dalam pengelolaan HHBK boleh jadi kelompok antar kawasan memiliki produk HHBK unggulan yang sama, dan kelompok dapat bekerjasama dalam meningkatkan kualitas dan memasarkan produk secara bersama – salah satu yang diprasyarkan dalam kemitraan dengan industri pengolahan adalah jaminan kualitas, ketersediaan/tepat waktu dan kuantitas..
- (3) ***Peran ke atas***, yaitu peran yang dilakukan oleh kelompok dalam rangka mengkomunikasikan gagasan, ide, dan harapan dalam proses pengembangan dan pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Banyak hal yang dapat dimainkan oleh kelompok dalam rangka pengelolaan hutan dan HHBK, yang termasuk pada pelaksanaan peran ke atas ini, antara lain pada proses pengajuan ijin untuk mendapatkan penetapan kawasan kelola

(kepada Menteri), mengajukan ijin pengelolaan (kepada Bupati), menyampaikan rencana pengelolaan kepada Pemerintah Daerah, dan berpartisipasi pada berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan HHBK (termasuk dalam pengembangan kebijakan harga, pemasaran, pengolahan, dan proteksi).

Ketiga peran kelompok masyarakat di atas dapat digambarkan seperti tampak pada Gambar berikut ini.

### PERAN “KELOMPOK MASYARAKAT” DALAM PENGELOLAAN HKm & HHBK



Gambar 9.3. Peran Kelompok dalam Penyuluhan

### Peran Kelompok dalam Mendapatkan IUPHKm & IUPHH BK

Pasal 8 dari Peraturan Menteri Kehutanan No. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan menegaskan bahwa dalam penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan, “Kelompok Masyarakat” mengajukan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota (Ayat [1] huruf “b”). Ketika mengajukan pemohon izin, kelompok harus menyertakan “sketsa areal kerja”, dan “Surat Keterangan Kelompok” yang memuat

data dasar kelompok dari kepala desa (Ayat [2]). Ketentuan ini kemudian dirubah lagi melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.52/Menhut-II/2011 tentang perubahan ketiga atas Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Dalam Pasal 8 P.52 ditegaskan bahwa yang dilampirkan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan adalah “Sketsa lokasi areal yang dimohon”, dan “Daftar nama-nama masyarakat setempat calon anggota kelompok hutan kemasyarakatan yang diketahui oleh camat dan Kepala Desa/Lurah.”

Sesuai dengan P.52 tahun 2011, atas dasar permohonan masyarakat dan atau hasil penentuan calon areal kerja hutan kemasyarakatan, Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada Menteri dengan dilengkapi “(a) Peta digital lokasi areal kerja hutan kemasyarakatan dengan skala kecil 1: 50.000; (b) Deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan (c) Daftar nama-nama masyarakat setempat calon anggota kelompok hutan kemasyarakatan yang diketahui oleh camat dan Kepala Desa/Lurah.” Pada Ayat (6) Pasal 8 P.53 ditegaskan bahwa “Dalam proses pengusulan areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur atau Bupati/Walikota memfasilitasi *pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat setempat.*”

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 Permenhut RI Nomor: P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, bahwa proses verifikasi terhadap usulan Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Menteri dengan Penanggung jawab Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan). Sebagaimana ditegaskan pada ayat (3) Pasal 9 P.13 Tahun 2010, “verifikasi dilakukan dengan cara konfirmasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota terhadap hal-hal antara lain kepastian hak/izin, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.”

### **Mekanisme penetapan areal HKm**

Setelah penetapan areal kerja HKm diperoleh, maka dilakukan kegiatan fasilitasi dan perijinan untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Mekanisme dalam mendapatkan IUPHKm sebagaimana diuraikan dalam Permenhut No. 37 Tahun 2007 digambarkan sebagai berikut. Gambar ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pengelolaan areal HKm, dan oleh karena itu salah satu persyaratan bagi dikeluarkannya izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan adalah diperlukannya kegiatan fasilitasi. Idealnya kelompok masyarakat yang telah mendapatkan IUPHKm telah memiliki kemampuan dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mengelola kelompok secara mandiri
- (2) Menyusun rencana kerja HKm
- (3) Menguasai teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan
- (4) Memiliki kemampuan dalam melakukan pelatihan
- (5) Memiliki kemampuan dalam mengakses permodalan dan pasar, dan
- (6) Memiliki kegiatan usaha

Ketika kelompok masyarakat telah mendapatkan IUPHKm, maka wajib membentuk koperasi, dan dengan kelembagaan ini kelompok masyarakat dapat mengajukan IUPHHK HKm – pada hutan produksi.

### **9.6. Ringkasan**

Salah satu faktor penentu efektivitas suatu kegiatan penyuluhan penggunaan metode penyuluhan yang sesuai. Uraian dalam bab ini sudah cukup untuk memberi gambaran tentang tiga kelompok metode penyuluhan pertanian, yaitu metode penyuluhan dengan pendekatan perorangan atau individu, metode penyuluhan dengan pendekatan kelompok, dan metode penyuluhan dengan pendekatan massa.

Masing-masing kelompok dan jenis metode penyuluhan memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan penyuluhan – meningkatkan *pengetahuan dan keterampilan, dan merubah sikap* kearah yang positif. Metode penyuluhan pertanian dengan pendekatan massa efektif untuk menyadarkan dan meningkatkan pengetahuan, dan menarik minat audiens terhadap suatu program atau inovasi – jumlah sasaran yang banyak. Metode dengan pendekatan perorangan dan kelompok efektif untuk merubah keterampilan dan sikap, dan bahkan untuk mendorong petani sampai pada tahapan mencoba dan adopsi.

Penentuan dan penggunaan metode dan media penyuluhan yang cocok atau pas juga menjadi hal penting yang harus dilakukan dalam suatu program atau kegiatan penyuluhan. Bab ini telah menyajikan faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam memilih dan menentukan metode penyuluhan yang sesuai dan efektif, antara lain *tujuan penyuluhan, jumlah dan karakteristik sasaran, ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan, kondisi geografis, dan ketersediaan waktu.*

\*\*\*

## **10. PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN**

### **10.1. Pengantar**

Pengembangan atau perencanaan program menjadi salah satu tahapan penting dalam keseluruhan proses dan sistem penyuluhan. Program yang direncanakan atau dikembangkan secara baik akan dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik. Berbagai studi dan pengalaman menunjukkan bahwa program penyuluhan atau juga program pembangunan yang gagal seringkali disebabkan oleh proses pengembangan program atau perencanaan yang tidak dilakukan dengan baik. Perencanaan atau program yang kurang berhasil atau gagal seperti ini seringkali disebabkan oleh prosesnya yang tidak partisipatif, dominasi top-down, dan tidak terintegrasi dengan baik dengan apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sasaran. Sebaliknya, keberhasilan sebuah program disebabkan oleh prosesnya yang partisipatif, melalui pelibatan petani dalam proses perencanaan atau pengembangan program (Chambers, 1983; Cernea, 1991; Whitla & Bruce, 1993; Oakley, 1994; Rouse J., 1995; Rouse J. , 1994; Muktasam & Chamala, 1998; Muktasam & Chamala, 2000; Muktasam A. , 2000). Uraian dalam Bab ini memberi perhatian tentang pelibatan petani atau pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan atau pengembangan program penyuluhan.

### **10.2. Pengertian Program**

Program adalah seperangkat kegiatan yang terorganisir secara sistematis yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. *Program penyuluhan pada dasarnya meliputi, pernyataan keadaan, pernyataan masalah, perumusan tujuan dan metode atau cara untuk mencapai tujuan.* Sebagai suatu ilustrasi, capaian hasil produksi oleh petani peserta program Supra Insus pada musim tanam 1987/1988 adalah 5.2 ton/ha, sedangkan uji coba di Balai

Penyuluhan Pertanian menunjukkan capaian produksi per hektar adalah 7 ton. Evaluasi menunjukkan bahwa rendahnya capaian produksi di tingkat petani adalah sebagai akibat tidak diterapkannya paket teknologi sesuai yang dianjurkan, misalnya tidak dilakukan pemupukan berimbang (oleh 50 % petani), pemberian sitozim yang tidak tepat dalam dosis (oleh 60 % petani) maupun waktu (40 % petani). Atas dasar pernyataan keadaan ini, maka tujuan program penyuluhan dapat dirumuskan misalnya, “agar petani mau menerapkan paket teknologi yang dianjurkan, yaitu pemupukan berimbang dan penggunaan sitozin sesuai dosis dan tepat waktu”. Penetapan target secara kuantitatif dalam perumusan tujuan harus dilakukan secara hati-hari sesuai dengan kemampuan dan tersedianya faktor-faktor pendukung. Boleh jadi program penyuluhan tidak menargetkan agar 100 % dari 50 % petani yang belum menerapkan pemupukan berimbang untuk berubah, karena diketahui bahwa petani yang 50 % sangat menolak rekomendasi untuk melakukan pemupukan berimbang - kenaikan hasil karena menggunakan pupuk Kcl tidak nyata, dan bahkan rugi. Penetapan tujuan yang tidak objektif, tidak achievable harus dihindari dalam penyusunan program.

Setelah rumusan tujuan sudah ditetapkan secara objektif dan beralasan, maka langkah berikutnya adalah menetapkan cara atau metode untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya dengan melakukan demonstrasi lapangan di beberapa lokasi, yang melibatkan petani. Selain itu juga dilakukan kunjungan kelompok, misalnya ke lokasi kelompok tani yang berhasil meningkatkan produksi secara nyata sebagai akibat dari penerapan paket teknologi yang dianjurkan.



### 10.3. Pengembangan Program

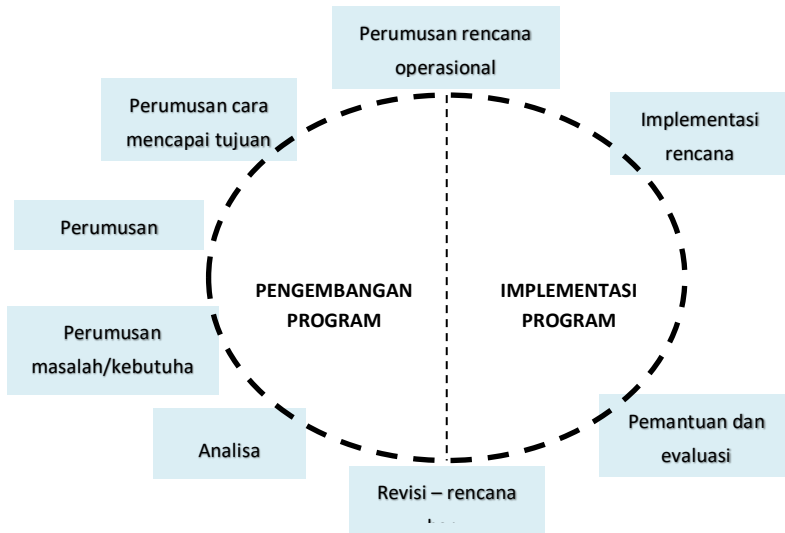
Secara umum, sebuah program penyuluhan (termasuk juga program pengembangan masyarakat) yang baik disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut (Laird 1985; Phillips 1991; Delahaye and Smith 1998; Klatt 1999):

- (1) **Analisa situasi dan keadaan** – menghimpun data aktual dan potensial tentang kondisi pertanian, penyuluhan, dan masyarakat dan ketenagakerjaan, kepemudaan (pengangguran, pendidikan, kapasitas dalam lingkup “cognitive, affective dan psychomotoric” yang dikenal sebagai unobservable behaviours, tindakan, motivasi, aspirasi, dan lainnya), pasar kerja, pasar barang dan jasa, termasuk gambaran umum tentang penawaran dan permintaan atas barang dan jasa.
- (2) **Identifikasi masalah** (termasuk faktor penyebabnya), kebutuhan, potensi dan peluang – yang dilakukan atas dasar data situasi dan keadaan yang dikumpulkan pada poin 1. Masalah dan kebutuhan diidentifikasi dengan membandingkan data “actual” (what is or fact) dengan data “potensial atau ideal” (what should be). Ketika terjadi “distorsi atau gap” antara “fakta” dan “ideal”, maka sesungguhnya yang teridentifikasi adalah adanya masalah dan kebutuhan. Bagi lembaga pendidikan atau Training Provider, permasalahan dan kebutuhan ini perlu dirumuskan dalam bentuk “rumusan perilaku” (misalnya “rendahnya pengetahuan para pemuda...”; “terbatasnya ketrampilan pemuda...”; “sikap negatif pemuda terhadap pengembangan usaha...”).
- (3) **Perumusan tujuan** – yang dikembangkan sejalan atau konsisten dengan “fakta”, rumusan masalah sebagaimana yang diidentifikasi pada poin 1 dan 2. Oleh karena itu, tujuan pendidikan atau pelatihan harus dirumuskan secara jelas,

yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan dan aspirasi (knowledge, attitudes, skills, and aspiration atau KASA). Rumusan tentang tujuan ini harus “spesifik, terukur, sesuai dengan masalah, realistis, dan jelas waktu pencapaiannya” (“Specific, Measurable, Appropriate, Realistic, and Time-bound” atau “SMART”).

- (4) **Perumusan metode untuk mencapai tujuan** – yaitu pilihan-pilihan strategi atau kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi. Hal ini akan berkaitan dengan “proses” (kegiatan klasikal, studi banding, praktik, magang, demonstrasi, dan lainnya) dan “substansi” (kurikulum, materi pembelajaran – pengetahuan teknis dan non teknis). Rancangan “proses” dan “substansi” harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga relevan dengan tujuan proses pelatihan yang diarahkan pada terjadinya perubahan perilaku atau KASA.
- (5) **Pengembangan rencana operasional penyuluhan** – yang berisi rincian kegiatan, siapa melakukan apa, dimana, kapan, berapa sering, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan lainnya, yang ke semuanya dirancang untuk memudahkan pencapaian tujuan pelatihan.

Model Proses Penyusunan Program Penyuluhan di atas sejalan dengan model penyusunan program menurut Kelsey dan Hearne (1962), yang menggambarkan kegiatan penyuluhan sebagai suatu siklus yang terdiri atas tujuh tahapan, yaitu (1) *analisis situasi*, (2) *organisasi perencanaan*, (3) *proses perencanaan program*, (4) *program yang telah direncanakan*, (5) *rencana kerja*, (6) *pelaksanaan rencana kerja*, dan (7) *evaluasi* – Gambar 10.1.



Gambar 10.1. Pengembangan dan Implementasi Program

### 10.3.1. Analisa Situasi

Beberapa pertanyaan penting dalam analisa situasi adalah sebagai berikut:

- (1) *Data apa yang dikumpulkan?* (Sosial, Ekonomi, Lingkungan; Produksi; Praktik; Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan, Aspirasi; Reaksi; Partisipasi; Kegiatan; Sumber daya - **“Aktual” & “Potensial”**)
- (2) *Jenis dan sumber data?* Data sekunder dan primer; dari petani biasa, petani maju/kontak tani, PPL/BP3K, Lembaga Penelitian, dan lainnya.
- (3) *Cara atau proses pengumpulan data?* Survei, RRA/PRA (pengamatan, wawancara mendalam, FGD, pemetaan partisipatif, dan lainnya.)
- (4) *Analisa data & penggunaan data?* Sebagai data dasar? Deskriptif statistik

- (5) *Dasar perumusan masalah* – Identifikasi gap; identifikasi gap dalam hal pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan aspirasi/motivasi.
- (6) *Dasar perumusan tujuan?*

---

### Contoh Analisa Situasi

---

1. 100% kebun jati petani tidak dikelola dengan baik: Populasi jati sangat tinggi per ha
  2. 90% petani tidak melakukan penjarangan
  3. 90% petani tidak melakukan pemangkasan
  4. 95% petani menjual kayu jati di kebunnya dengan sistim borongan
  5. 90% petani tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menghitung volume kayu yang dijualnya
  6. 100% petani tidak tertarik untuk melakukan penjarangan
  7. 100% petani tidak tertarik dalam melakukan pemangkasan
  8. 100% petani tidak enggan untuk menghitung volume kayu jati yang dijualnya – petani tidak mau repot.
  9. Ada 10% petani melakukan penjarangan dan pemangkasan
  10. Ada petani sukses yang mengelola kebun jatinya dan memberikan hasil yang memuaskan
- 

### 10.3.2. Perumusan Masalah

- (1) *Rumusan masalah dalam program penyuluhan: Menyangkut perilaku: Pengetahuan, sikap dan ketrampilan*
- (2) Rumusan masalah harus *jelas, spesifik & terukur (Apa, siapa, dimana, kapan)* – dan ini menjadi dasar untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan program.

Gambar 10.2 berikut menunjukkan “Pohon Masalah”, yang menunjukkan hubungan permasalahan, konsekuensi, dan hasil atau outcomes dan impactnya. Gambar pada pohon masalah ini memperlihatkan fakta yang tampak tidak memuaskan di permukaan. Ibarat sebatang pohon yang tampah buahnya kurang banyak atau

bahkan tidak berbuah. Kondisi ini kemudian dicermati dan dianalisa, dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa pohon ini kekurangan hara nitrogen dan NPK. Selain itu, pohon ini juga berdampingan sangat dekat dengan pohon lain sehingga sistem perakaran tanaman Bersatu dan kanopinya pun saling menutup. Pendalaman lebih lanjut menemukan bahwa petani pemilik pohon tidak pernah melakukan pemupukan dan tidak mengelola pohonnya dengan pemangkasan dan penjarangan. Penelusuran terhadap fakta ini menemukan bahwa petani pemiliknya tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang positif untuk dapat melakukan hal-hal yang seharusnya dalam mengelola pohonnya.

Gambar ini menunjukkan fakta bahwa petani memiliki posisi tawar rendah, dan pendapatannya rendah. Pendalaman terhadap faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan menemukan bahwa para petani (1) menjual kayu dengan harga rendah dan dalam bentuk gelondongan; (2) petani tidak memiliki kemampuan dalam mengestimasi volume atau kubikasi kayunya; dan (3) petani belum maksimal melakukan tindakan-tindakan silviculture. Sebagaimana tampak pada Gambar, ketiga kondisi tentang praktik ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap dari para petani pengelola hutan. Demikianlah hubungan sebab akibat yang hendak ditampilkan melalui penggunaan grafik atau gambar dalam bentuk “Pohon Masalah”.

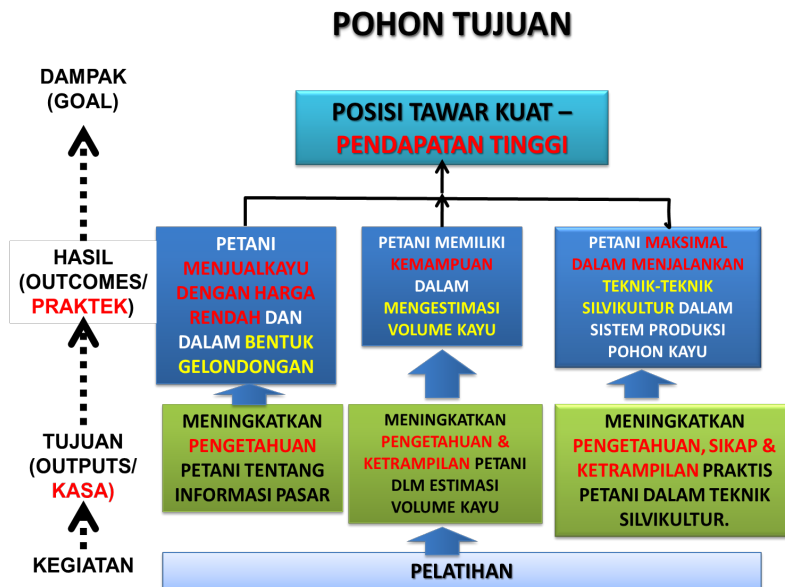


Contoh (Petani, Desa Pelat – Sumbawa, Tahun 2014)

- (1) Sekitar 100% petani di Desa Pelat tidak menerapkan teknik silvikultur dalam pengelolaan kebun kayu jati miliknya – pada tahun 2014.
- (2) Sekitar 100% petani tidak paham tentang penting dan manfaat dari penjarangan (*thinning*), pemangkasan (*prunning*), dan pentingnya pengukuran volume kayu.
- (3) Sekitar 90% petani tidak mau atau tertarik untuk melakukan penjarangan, pemangkasan, dan pengukuran volume kayu.
- (4) Sekitar 90% petani tidak memiliki ketrampilan dalam melakukan penjarangan, pemangkasan, dan pengukuran volume kayu yang dijualnya.

### 10.3.3. Perumusan Tujuan

- (1) Rumusan tujuan dalam program penyuluhan: Menyangkut perilaku: Pengetahuan, sikap dan ketrampilan
- (2) Tujuan masalah harus **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time bound – Spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan jelas waktunya*).



Gambar 10.3. Pohon Tujuan

CONTOH: Kegiatan penyuluhan dilakukan agar:

- (1) 50% petani di Desa Pelat menerapkan teknik silvikultur dalam pengelolaan kebun kayu jati miliknya pada tahun 2015.
- (2) 80% petani di Desa Pelat meningkat pemahaman tentang penjarangan (*thinning*), pemangkasan (*prunning*), dan pentingnya pengukuran volume kayu.

- (3) 70% petani di Desa Pelat mau atau tertarik untuk melakukan penjarangan, pemangkasan, dan pengukuran volume kayu.
- (4) 65% petani di Desa Pelat terampil dalam melakukan penjarangan, pemangkasan, dan pengukuran volume kayu yang dijualnya.

#### **10.3.4. Perumusan Cara Mencapai Tujuan**

Sejalan dengan rumusan masalah, maka rumusan tujuan adalah pernyataan yang menunjukkan kondisi ideal yang hendak dicapai jika permasalahan dapat diatasi, misalnya dengan pernyataan “*meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam hal pengelolaan kebun*”. Pernyataan ini adalah lawan dari rumusan masalah yang menyatakan rendahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap para petani di Desa Pelat dalam hal pengelolaan pohon. Cara Mencapai Tujuan dalam Program Penyuluhan:

- (1) *Meningkatkan pemahaman* tentang penjarangan (*thinning*), pemangkasan (*prunning*), dan pentingnya pengukuran volume kayu. CARANYA: Presentasi narasumber di ruangan/kelas
- (2) *Petani mau atau tertarik* untuk melakukan penjarangan, pemangkasan, dan pengukuran volume kayu. CARANYA: Kunjungan usaha tani ke petani sukses
- (3) *Petani terampil* dalam melakukan penjarangan, pemangkasan, dan pengukuran volume kayu yang dijualnya. CARANYA: Praktik penjarangan, pemangkasan dan pengukuran volume kayu
- (4) *Petani menerapkan teknik silvikultur* dalam pengelolaan kebun kayu jati miliknya. CARANYA: Pendampingan petani



### 10.3.5. Perumusan Rencana Operasional

Berikut contoh rencana operasional kegiatan penyuluhan dalam rangka mewujudkan perubahan-perubahan yang dirumuskan dalam tujuan penyuluhan – Tabel 10.1.

Tabel 10.1. Contoh Rencana Operasional Penyuluhan

Tujuan	Kegiatan	Lokasi	Waktu	Peserta	Narasumber
(1) Pengetahuan	Presentasi	Balai Desa	Sabtu, 2 Oktober 2021; 09.00 – 10.00	Pengurus & anggota kelompok tani; Tim Kanoppi	Tim Kanoppi
(2) Sikap	Kunjungan usaha tani	Kebun petani sukses - Juraidin	Sabtu, 3 Oktober 2021; 09.00 – 12.00	Pengurus & anggota kelompok tani; Tim Kanoppi	Juraidin Tim Kanoppi
(3) Keterampilan	Praktik lapangan	Kebun petani sukses - Juraidin	Sabtu, 3 Oktober 2021; 09.00 – 12.00	Pengurus & anggota kelompok tani; Tim Kanoppi	Juraidin Tim Kanoppi
(4) Praktik	Pendampingan	Desa Pelat	Oktober – Desember 2021	Pengurus & anggota kelompok tani; Tim Kanoppi	Juraidin Tim Kanoppi

Perencanaan dan implementasi program penyuluhan di tingkat kabupaten dapat dilakukan dengan menggunakan paling tidak 15 tahapan berikut ini - modifikasi dari proses pengembangan rencana tahunan program penyuluhan yang dikembangkan oleh FAO:

Tabel 10.2. Tahapan Pengembangan dan Implementasi Program Penyuluhan (FAO)

Kegiatan utama	Rincian kegiatan
(1) Penilaian kebutuhan petani akan informasi – oleh masing-masing BPP	Bekerja dengan petani laki-laki dan perempuan, yang mengelola usaha tani sempit dan luas, identifikasi permasalahan dan kebutuhan, menggunakan teknik musyawarah dan PRA.
(2) Pertemuan koordinasi penyuluhan tingkat kecamatan - BPP	Sharing informasi tentang permasalahan dan kebutuhan petani, sumber daya yang tersedia dan ide tentang kemungkinan kerjasama lintas lembaga pemerintah dan non-pemerintah
(3) Penyatuan atau kompilasi informasi kebutuhan penyuluhan tingkat kecamatan - BPP	Menggabungkan informasi-informasi latar belakang, data hasil pemantauan dan evaluasi, data tentang kondisi pengetahuan, keterampilan, sikap dan praktik (results of <i>Knowledge, Attitude and Practices</i> or KAP), hasil survei dan audit teknis untuk kepentingan perencanaan.
(4) Workshop perencanaan penyuluhan kabupaten	Pengembangan rencana penyuluhan atas dasar data yang telah terkumpul dari semua kecamatan dengan melibatkan semua staf penyuluhan, dan juga lembaga lain yang terkait.
(5) Penyiapan dokumen program kecamatan dan anggarannya	Menulis dan menyelesaikan dokumen hasil workshop
(6) Rapat komisi perencanaan penyuluhan kabupaten	Membahas dan menyetujui rencana penyuluhan kecamatan - BPP
(7) Penyiapan jadwal pelatihan dan dukungan media	Menyiapkan permintaan keterlibatan media massa, dan program pelatihan penyuluhan dan staf lainnya
(8) Penyiapan rencana tahunan kecamatan dan dukungan anggaran	Penyiapan kegiatan penyuluhan tingkat kecamatan dan mengirimkannya ke komisi perencanaan kabupaten
(9) Pertemuan komisi teknis/rapat teknis dinas	Melaksanakan review teknis rencana penyuluhan kecamatan di tingkat kabupaten dengan mengundang pakar atau ahli
(10) Penyesuaian penyuluhan kabupaten	Menyesuaikan rencana atau program penyuluhan kecamatan dan kabupaten sesuai masukkan pada pertemuan komisi teknis.
(11) Penyiapan dan konsolidasi penyuluhan dan anggaran penyuluhan kabupaten	Konsolidasi dan persetujuan rencana dan anggaran penyuluhan kecamatan dan kabupaten

---

(12) Melaksanakan pelatihan – inservis training	Pelatihan penyuluh dan staf penyuluhan sesuai rencana dan kebutuhan sebelum pelaksanaan atau implementasi program penyuluhan.
(13) Implementasi program dan pemantauan	Implementasi program penyuluhan, pelaksanaan pemantauan program dengan menggunakan sistem pemantauan yang ada, dan pelaksanaan audit teknis.
(14) Evaluasi program penyuluhan tahun lalu	Evaluasi program penyuluhan dengan mendalami perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap dan praktik – survei dan PRA. Analisa hasil audit teknis.
(15) Penyusunan anggaran program penyuluhan tahun ini dan pelaporan hasil evaluasi program tahun ini.	Perkiraan anggaran untuk pelaksanaan penyuluhan tahun yang akan datang dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan tahun lalu.

---

Sumber: (FAO, 2019).

Rencana atau program ini direview tiap 4 bulan untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

#### 10.4. Implementasi dan Kinerja Program

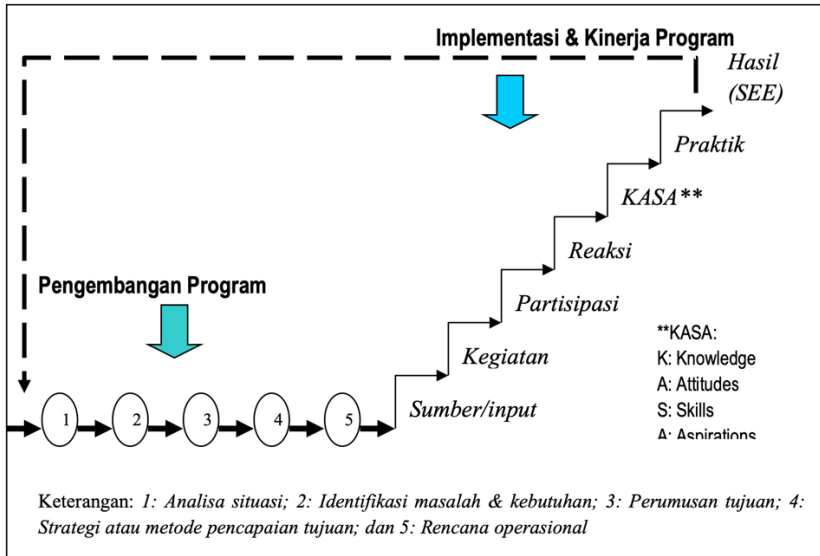
Mengikuti konsep “Targeting Outcomes of Programs” (TOP) dari Bennett/Rockwell (1996), implementasi suatu program akan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- (1) **Identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber** – meliputi tenaga (instruktur pelatihan atau tutor, warga belajar, tim pengendali, sarana dan prasarana, dana, waktu, lembaga penyedia “on-the-job-training”, ATK, dan lainnya).
- (2) **Kegiatan atau proses pembelajaran** – learning process, yang meliputi kegiatan klasikal dan praktik atau magang. Mengikuti konsep proses belajar dari Paul Leagans (1980), efektivitas proses belajar dipengaruhi oleh paling tidak lima komponen sistem belajar, yaitu (i) warga belajar – pemuda pengangguran; (ii) pengajar atau pelatih dan lembaganya – training providers; (iii) materi yang dipelajari – kurikulum; (iv) media dan metode; dan (v) lingkungan belajar – kelas dan perusahaan dimana peserta melakukan on-the job training. Menurut Leagans (1980) kelima komponen ini akan mempengaruhi efektivitas proses belajar (terjadinya perubahan perilaku pada ketiga domain, yaitu

“cognitive”, “affective”, dan “psycomotoric” – ketiganya merupakan tujuan pokok dari proses belajar). Suatu proses belajar yang efektif hendaknya mempertimbangkan keseluruhan komponen tersebut (Burns 1998; Foley 2000). Ketika salah satu komponen tidak mendapat perhatian yang memadai maka akan dapat dipastikan bahwa proses belajar tidak berlangsung maksimal atau efektif.

- (3) **Partisipasi** – keikutsertaan peserta didik atau warga belajar dalam keseluruhan kegiatan belajar, yang dapat ditelusuri dan dihitung dari frekuensi kehadiran dalam masing-masing jenis kegiatan
- (4) **Reaksi** - mencerminkan kesetujuan dan ketertarikan peserta pelatihan pada topik, materi (sesuai dengan yang dibutuhkan), metode (ceramah, praktik, diskusi, menarik, dan lainnya), tutor (terampil, memiliki pengetahuan cukup, ahli dan menguasai materi) dan fasilitas atau lokasi pelatihan (sesuai dan menyenangkan karena didekat tempat tinggal peserta)
- (5) **Perubahan KASA** - meliputi perubahan pada aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan dan aspirasi (knowledge, attitudes, skills, and aspiration atau KASA).
- (6) **Perubahan Praktik (adopsi)** – dengan perubahan pada aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan dan aspirasi, diharapkan akan terjadi perubahan pada tindakan nyata atau praktik dari para peserta didik (mengembangkan usaha mandiri atau bekerja pada lembaga formal).
- (7) **Perubahan SEE** – perubahan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks pelatihan bagi pemuda pengangguran, diharapkan bahwa kegiatan pelatihan akan menyebabkan perubahan keadaan ekonomi para pemuda dengan diperolehnya pekerjaan dan pendapatan.

Tahapan-tahapan di atas dapat digambarkan seperti Gambar 10.4 berikut ini.



Gambar 10.4. TOP Model Pengembangan dan Implementasi Program

Berbagai studi tentang *adopsi* dan *difusi inovasi* menegaskan bahwa perubahan semua komponen *perilaku* atau KASA sebagaimana yang tergambar di atas (*knowledge, attitudes, skills, aspiration*) ternyata tidak menjamin bagi terjadinya perubahan *tindakan nyata* atau *praktik* (*practice*). Dengan kata lain, bahwa perubahan *pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan aspirasi* tidak menjamin terjadinya perubahan *praktik dan kehidupan* warga belajar. Walaupun warga belajar (pemuda putus sekolah dan pengangguran) telah bertambah pengetahuannya, berubah sikap dan keterampilannya, belum tentu mereka berubah tindakan atau praktiknya (*observable behaviours*) seperti mengadopsi teknologi atau inovasi atau melakukan sesuatu di lapangan, seperti *bekerja pada lembaga formal* atau *membuka usaha sendiri* dengan menerapkan ilmu serta ketrampilan yang diperolehnya.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini di lapangan, misalnya tidak tersedianya modal, tidak tersedianya bahan dan teknologi, terbatasnya dukungan masyarakat dan pemerintah, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, selain diperlukan perubahan perilaku (*pengetahuan, sikap dan ketrampilan*), maka diperlukan juga perubahan praktik atau mendorong terjadinya perubahan tindakan di lapangan, yang pada gilirannya menyebabkan perubahan produktivitas dan meningkatnya pendapatan.

### **10.5. Partisipasi dalam Pengembangan & Implementasi Program**

Partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat dalam suatu kegiatan, termasuk dalam kegiatan perencanaan atau pengembangan program dan implementasi program penyuluhan. Keterlibatan atau partisipasi dapat dipilah dalam bentuk partisipasi yang pasif hingga partisipasi aktif, dan tingkatan partisipasi ini akan juga berpengaruh terhadap kualitas hasil pengembangan dan implementasi program. Partisipasi pasif dapat berupa keikutsertaan hanya dalam bentuk kehadiran, dan partisipasi aktif dapat dalam bentuk kehadiran dan aktif memberikan masukan terhadap program.

Berbagai kajian telah membuktikan bahwa program-program pemberdayaan masyarakat yang sukses adalah program-program yang melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses pengembangan masyarakat, dari tahapan Analisa situasi hingga tahapan evaluasi dan revisi – sesuai dengan tahapan pengembangan dan implementasi program penyuluhan. Keterlibatan petani atau masyarakat perlu didorong tidak saja karena pengetahuan dan informasi yang mereka miliki tentang kondisi lokal dan kebutuhannya, tetapi juga penting untuk memunculkan rasa memiliki terhadap program dan kegiatan. Ketika rasa memiliki ini muncul dalam diri masyarakat, maka komitmen dan tanggung jawab akan muncul dalam pelaksanaan atau implementasi program.

Cerita sukses pengembangan agroforestry dan pengembangan masyarakat pesisir di Thailand adalah contoh dari kesuksesan pengembangan masyarakat dengan pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan implementasi program (Muktasam A. , 2004). Tabel 10.3 menyajikan ringkasan dari dua cerita sukses pengembangan masyarakat di Thailand yang disebabkan oleh adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan, implementasi dan evaluasi program.

Tabel 10.3. Kisah Sukses Pengembangan Masyarakat

<b>Praktik Agroforestri Inpeng</b>	<b>Pengelolaan Mangrove oleh Masyarakat Pred-Nai</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dahulu masyarakat mendapatkan kebutuhannya dari hutan sekitar – sudah pada tahap “swasembada” dengan tingkat produksi subsisten.</li> <li>(2) Perkebunan goni (1964) dan ubi kayu diperkenalkan (1969) kepada masyarakat dan masyarakat mulai lebih banyak mengadopsi pertanian komersial dan gaya hidup konsumtif.</li> <li>(3) Petani jute dan singkong mulai mengambil pinjaman dari bank dan pemberi pinjaman uang swasta.</li> <li>(4) Masyarakat menemukan bahwa mereka berada dalam situasi yang buruk karena mereka menumpuk hutang – terjebak dalam “lingkaran setan kemiskinan” – mengalami hidup pada tahap Human Insecurity.</li> <li>(5) Seorang agen perubahan sukarela dan lembaganya mengidentifikasi adanya isu Ketidakamanan Manusia dan mereka mengambil tindakan untuk <i>memulihkan kebebasan dari rasa takut</i>.</li> <li>(6) Fasilitasi dan pembelajaran masyarakat terjadi untuk memahami pergeseran dari <i>swasembada masyarakat ke ketidakamanan manusia</i>.</li> <li>(7) Praktik agroforestri diperkenalkan kembali dan diadopsi, dan kelompok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Awalnya masyarakat hidup nyaman dan aman dengan menangkap ikan, kepiting, udang di wilayah pesisir sekitar desa mereka.</li> <li>(2) Konsesi hutan mangrove diberikan kepada pengusaha dan tambak komersial mulai dibuka.</li> <li>(3) Pembersihan mangrove - Tambak udang dan fasilitas pendukung lainnya dibangun → Hilangnya keanekaragaman hayati → Penangkapan dan produksi perikanan → yang rendah pendapatan masyarakat yang rendah – kerawanan ekonomi dan ekologi</li> <li>(4) Kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu kemiskinan (Human Insecurity) muncul dan menguat.</li> <li>(5) Refleksi masyarakat dengan mengingat tahap kehidupan “swasembada” masa lalu dan membandingkannya dengan situasi yang ada</li> <li>(6) Tindakan kolektif masyarakat untuk mengatasi masalah ketidakamanan manusia – menghancurkan tambak udang dan fasilitasnya</li> </ol>

<p>masyarakat serta jaringan mulai memainkan peran mereka.</p> <p>(8) Industri agribisnis berkembang, pengelolaan hutan rakyat yang lebih baik dipulihkan, dan “kebebasan dari rasa takut” dan “kebebasan dari keinginan” tercapai.</p>	<p>(7) Penanaman kembali bakau - Kembalinya →keanekaragaman hayati – berbagai jenis ikan, kepiting dan kelahiran kembali ke habitatnya</p> <p>(8) Meningkatkan produksi, penangkapan dan pendapatan – memulihkan Keamanan Manusia</p> <p>(9) Wilayah Pred-Nai menjadi ajang pembelajaran Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.</p>
---	---

Sumber: Muktasam (2004). Catatan: (“Inpeng adalah nama jaringan organisasi berbasis masyarakat yang berada di sekitar kaki Gunung Phu Phan di Utara Timur Laut Thailand”) mencakup 17 districts & 150 masyarakat desa di tahun 2000; Pred Nai Community Forest – Mangrove (Huang Nam Khao district - Trad province Thailand).

Kedua kasus atau cerita sukses yang ditampilkan pada Tabel di atas menunjukkan dengan sangat jelas hubungan antara keberhasilan dan kegagalan program pengembangan masyarakat dengan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat yang awalnya hidup baik dan nyaman terganggu oleh adanya program yang datang dari luar untuk pengembangan komoditas pertanian berupa jute, singlong dan tambak udang (program yang top-down, oleh pemerintah dan pengusaha). Masyarakat tidak terlibat dalam merancang dan membahas program ini dan mereka hanya menjadi penerima dan peserta program. Kondisi kehidupan yang sulit muncul setelah program jalan dan kesulitan ini memunculkan kesadaran kolektif bahwa “hidup sebelumnya lebih baik dari hidup sekarang”. Kesadaran kolektif muncul dan menguat, kemudian muncul tindakan kolektif untuk kembali kepada keadaan semula. Tanaman MPTS dan mangrove kembali ditanam, dan kondisi berangsur pulih serta kehidupan kembali membaik. Kedua lokasi kemudian menjadi lokus pembelajaran tentang bagaimana mengelola hutan dan mangrove. Tabel dan cerita sukses ini menggaris bawahi lima poin berikut:

- (1) Peran strategis masyarakat dalam perencanaan dan menghadapi kesulitan hidup setelah gagal dalam program pembangunan yang menggunakan pendekatan top-down.
- (2) Beralih dari pendekatan dengan dominasi pemerintah kepada peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



- (3) Ada dan pentingnya kesadaran kolektif dalam masyarakat tentang kondisi kehidupan yang ada – sebelum dan setelah proyek.
- (4) Peran dari proses fasilitasi dan pembelajaran.
- (5) Keberhasilan masyarakat dalam merubah situasi yang sulit kepada situasi yang lebih baik melalui kebersamaan dan peran **modal sosial/inovasi sosial/inovasi teknis**.
- (6) Uraian ini menjadi bahan pemikiran kembali terhadap semua program pembangunan yang selama ini ada, dan memikirkan kembali tentang pentingnya partisipasi murni dari masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Cerita sukses pengembangan masyarakat ini sesungguhnya sejalan dengan berbagai tulisan tentang prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, yang antara lain mencakup (1) partisipasi dan kepemilikan oleh masyarakat, (2) pemberdayaan, (3) pembelajaran – *livelong learning*, (4) pelibatan atau terintegrasi – *inclusion*, (5) akses dan kesetaraan – termasuk masyarakat lapisan bawah, (6) aksi sosial dan kolektif, (7) advokasi, (8) jaringan – *networking*, dan (9) menolong dirinya sendiri (Ife, 1995).

Selain itu, kedua cerita sukses menunjukkan berlakunya prinsip-prinsip (1) **Ekologis** - *holism, sustainability, diversity, organic development, balance development*); (2) **Keadlian dan hak asasi manusia** - *addressing structural disadvantages, addressing discourses disadvantages, human right, need definitions*); (3) **Penghargaan terhadap nilai-nilai local** - *value local knowledge, value local culture, value local resources, value local skills, value local proses, participation*; (4) **Proses** - *the integrity process, consciousness rising, cooperatiotion and concensus, the pace of development, peace & non-violence, inclusiveness; dan community building*; dan (5) **Hubungan global & local** - *linking the global and the local, anti-colonialism practices* (Ife, 1995).

## **10.6. Ringkasan**

Pengembangan dan implementasi program penyuluhan adalah dua kegiatan yang tidak terpisahkan dan berlangsung secara terus menerus, dan idealnya mengikuti konsep action-learning. Sebuah organisasi pembelajar dan sukses melakukan kegiatan pengembangan dan implementasi program secara berkesinambungan hingga mereka mencapai puncak kejayaannya. Budaya pembelajar seperti inilah yang seharusnya berlaku dalam organisasi penyuluhan, termasuk juga pada organisasi dan kelembagaan petani, juga pada level petani sebagai individu dan rumah tangga. Rangkaian kegiatan dalam perencanaan atau pengembangan program yang bermula dari analisis situasi, berlanjut pada perumusan masalah dan identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, dan perumusan cara mencapai tujuan, dan kemudian pengembangan rencana operasional, dan setelah itu implementasi, monitoring dan evaluasi.

Uraian dalam bab ini juga dilengkapi dengan pengalaman pembangunan yang menunjukkan pentingnya partisipasi dalam pengembangan dan implementasi program, dan ini menjadi inspirasi untuk dapat diterapkan dalam pengembangan dan implementasi program penyuluhan dan pembangunan pertanian.

\*\*\*

## 11. EVALUASI PROGRAM PENYULUHAN

### 11.1. Pengantar

Evaluasi dapat dilakukan secara sekilas dan sederhana oleh para penyuluh, tetapi juga dapat dilakukan secara serius dengan menggunakan kaidah-kaidah penelitian sebagai penelitian evaluasi yang dilakukan oleh ahlinya (Phillips, 1991; Van den Ban & Hawkins, 1996; Kirkpatrick, 1998). Evaluasi terhadap suatu program atau kegiatan pelatihan dan atau juga penyuluhan dapat dilakukan dalam hal pengukuran kepuasan peserta terhadap program, penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam pekerjaan, penilaian terhadap kinerja usaha tani atau organisasi, penilaian peningkatan dan perubahan pengetahuan/keterampilan/sikap di akhir kegiatan pelatihan atau penyuluhan, atau tidak sama sekali melakukan kegiatan evaluasi yang sistematis (Phillips, 1991).

### 11.2. Pengertian Evaluasi

Beberapa definisi dari “Evaluasi” antara lain:

*“Defnisi yang sederhana dari evaluasi, atau penelitian evaluasi (kami akan menggunakan kedua istilah ini secara bergantian) adalah penerapan secara sistematis dari prosedur-prosedur penelitian sosial untuk menilai konsepsualisasi, merancang, implementasi, dan penggunaan dari program-program intervensi sosial”-“A simple definition of evaluation, or valuation research (we will use the terms interchangeably) is the systematic application of social research procedures for assessing the conceptualizations, design, implementation, and utility of social intervention programs” (Rossi & Freeman, 1989)*

*“Proses memberi informasi yang dirancang untuk membantu pembuatan keputusan tentang sesuatu objek yang sedang dievaluasi. Istilah ‘evaluand’ atau sesuatu yang menjadi objek evaluasi telah digunakan sebagai alternatif istilah generic bagi objek. Dalam praktiknya, evaluand atau objek evaluasi dapat berupa sebuah program, kebijakan, kegiatan, atau sebuah manual pelatihan atau buku teks” - “The Process of*

providing on information designed to assist decision making about the object being evaluated. The term 'evaluand' has been used as an alternatif generic term to 'object'. In practice the evaluand could be a program, a policy, an event, or a training manual or text book" (Owen, 1993).

*"Kami menggunakan kata evaluasi untuk menentukan apakah sebuah program penyuluhan telah berhasil mencapai tujuannya secara lebih efektif melalui cara yang berbeda" – "We use evaluation to determine whether an extension programme has achieved its goals and whether these goals could have been achieved more effectively in a different way" (Van den Ban & Hawkins, 1996).*

Ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa suatu kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang ditujukan untuk (1) menilai ***apakah suatu program atau kegiatan telah berhasil*** mencapai tujuan atau tidak; (2) dilakukan secara ***sistematis*** – mengikuti kaidah-kaidah ilmiah untuk mendapatkan hasil yang representatif dan dapat dipercaya; (3) dilakukan dalam kerangka ***mengetahui dan memperbaiki performance atau kinerja suatu "objek"*** evaluasi – yang mengacu pada suatu kebijakan, program, kegiatan, teknologi, kebutuhan, dan lainnya.

Definisi lain menjelaskan "Evaluasi" sebagai "*suatu proses untuk menentukan secara sistematis dan objektif tentang relevansi, efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Evaluasi adalah langkah terorganisir sebagai bagian dari usaha untuk memperbaiki rencana dan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.*"

### **11.3. Jenis dan Tujuan Evaluasi**

Tujuan pokok dari suatu kegiatan evaluasi adalah "***memberikan informasi atau umpan balik***" kepada semua pihak (*key stakeholders*) yang terkait dengan objek evaluasi yang akan menjelaskan tentang efektivitas pelaksanaan dan atau efektivitas pencapaian tujuan. Informasi ini kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan untuk memperbaiki kinerja di kesempatan berikutnya, melanjutkan pendanaan dan dukungan, dan lainnya.

Atas dasar jenisnya, evaluasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- (1) *Evaluasi Awal*: yaitu proses pengumpulan fakta atau data tentang keadaan yang dilakukan di awal program dapat dipandang sebagai EVALUASI AWAL atau PRE-PROGRAM EVALUATION.
- (2) *Evaluasi Proses* atau evaluasi yang dilakukan pada saat implementasi program– evaluasi dilakukan selama proses berlangsung (ONGOING EVALUATION). Evaluasi ini juga disebut sebagai pemantauan. Evaluasi proses juga dapat dilakukan setelah program selesai dilaksanakan, yaitu dengan mendalami tentang pelaksanaan program melalui pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak tentang pelaksanaan program. Hasil evaluasi proses seperti ini digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang, yang berbeda dengan pelaksanaan evaluasi proses yang dilakukan ketika program dilaksanakan (pemantauan) yang hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan program yang sedang berjalan.
- (3) *Evaluasi Akhir* atau evaluasi yang dilakukan setelah suatu proyek atau program berakhir (TERMINAL atau RESULT EVALUATION) atau setelah beberapa lama program berakhir (EX POST EVALUATION).

Evaluasi dapat juga dipilah menjadi “Evaluasi Formatif” (*formative evaluation*) dan “Evaluasi Summative” (*summative evaluation*). Evaluasi formatif ditujukan untuk memperkuat atau memperbaiki objek yang dievaluasi – melalui telaahan atas pelaksanaan program, penyampaian teknologi, kualitas pelaksanaan atau implementasi, menilai hal-hal yang terkait dengan konteks dan dukungan organisasi, staf, prosedur, input, dan lainnya. Di sisi lain, evaluasi summatif, dimaksudkan sebagai proses untuk menelaah atau mengkaji efek atau hasil dari suatu objek – menjelaskan apa yang terjadi setelah suatu objek dilaksanakan, apakah suatu objek telah mencapai hasil dan atau dampak seperti yang diharapkan.

Evaluasi juga dapat dipilah menjadi lima bentuk utama evaluasi, yaitu *evaluasi dampak, evaluasi pengelolaan program, evaluasi proses, evaluasi rancangan, dan evaluasi untuk pengembangan*. Kelima jenis bentuk evaluasi ini dapat dianalisis atau ditelaah dengan menggunakan lima dimensi, yaitu orientasi atau tujuan evaluasi, posisi program saat mau dievaluasi, fokus evaluasi, waktu – jarak antara pelaksanaan program dengan kegiatan evaluasi, dan pendekatan dalam evaluasi (Owen, 1993).

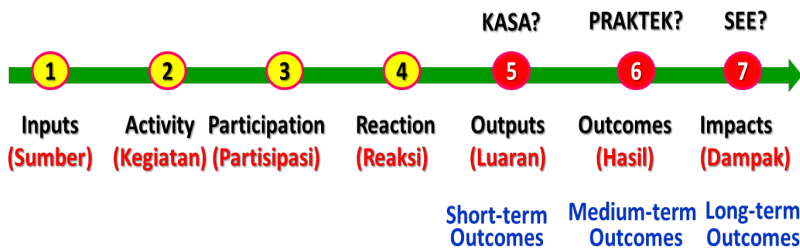
#### **11.4. Beberapa Konsep Penting dalam Evaluasi**

Evaluasi dan Pemantauan adalah dua kegiatan penting dalam pelaksanaan suatu program, katakanlah program pengentasan kemiskinan atau Inpres Desa Tertinggal, program penyuluhan pertanian, dan lainnya. Berhasil atau gagalnya suatu program dapat diketahui dari evaluasi ataupun pemantauan yang dilakukan. Melalui evaluasi dapat diketahui telah terjadi perubahan perilaku sasaran, misalnya terjadi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap atau perubahan ketrampilan, dst. Sebaliknya evaluasi dapat membantu meningkatkan efektivitas suatu program, karena melalui evaluasi akan dapat diketahui efektif atau tidaknya ‘proses’ dan metode atau pendekatan yang digunakan dalam implementasi program.

Pemantauan sebagai suatu kegiatan untuk menilai program yang sedang berlangsung dapat menjadi sumber informasi penting dalam memperbaiki atau meninjau kembali proses pelaksanaan suatu program. Pemantauan pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk ‘melihat’ kemungkinan terjadinya ‘penyimpangan’ dalam pelaksanaan program yang dilakukan dari waktu ke waktu. Ketika pemantauan melihat terjadi penyimpangan ‘pelaksanaan’ dari ‘rencana’ program - misalnya lokasi, waktu, intensitas pelaksanaan tidak sesuai yang semula direncanakan - maka penanggung jawab program dapat segera melakukan usaha-usaha untuk kembali ke rencana atau memang diperlukan penyesuaian dalam rencana (rencana juga perlu fleksibel).

Untuk memahami berbagai aspek dalam pelaksanaan evaluasi dan pemantauan, beberapa konsep berikut perlu dijelaskan:

- (1) Tujuan dan khierarkinya
- (2) Program
- (3) Input
- (4) Kegiatan
- (5) Partisipasi
- (6) Output
- (7) Outcomes - hasil
- (8) Impacts - dampak



Gambar 11.1. TOP dalam Evaluasi Program Penyuluhan

### Tujuan dan hierarkinya

Tujuan; adalah sesuatu yang diinginkan dalam pelaksanaan suatu program. Dalam program penyuluhan pertanian misalnya, yang menjadi tujuan adalah merubah perilaku petani dan keluarganya, yang meliputi aspek pengetahuan (*cognitive*) sikap (*affective*), dan ketrampilan (*psychomototric*). Dalam program IDT misalnya, tujuan yang diinginkan misalnya selain terjadinya perubahan perilaku, juga peningkatan produktivitas dan pendapatan sehingga peserta program keluar dari kemiskinan - naik di atas garis kemiskinan.

Jika kegiatan penyuluhan dipandang sebagai INPUT dalam implementasi suatu program, maka perubahan perilaku yang terjadi pada diri sasaran dapat dipandang sebagai OUTPUT, atau TUJUAN

LANGSUNG atau TUJUAN JANGKA PENDEK dari pelaksanaan program. Jika dalam tahap berikutnya petani mampu untuk meningkatkan produksi sebagai akibat dari perubahan perilakunya, maka perubahan dalam hal produksi ini dikategorikan sebagai EFFECT atau TUJUAN MENENGAH dari program. Dengan adanya jaminan harga dari pemerintah melalui penetapan harga dasar, peningkatan produksi kemudian dapat meningkatkan pendapatan, maka peningkatan pendapatan ini dapat dikategorikan sebagai TUJUAN JANGKA PANJANG suatu program.

Pelaksana evaluasi perlu mengetahui secara jelas apa yang menjadi tujuan suatu program, apakah perubahan perilaku, produktivitas, pendapatan, dan lainnya, sesuai dengan yang tertulis dalam rencana program. (masukkan konsepnya Benett). Gambar 11.2 berikut menunjukkan hierarki tujuan yang diilustrasikan oleh Bennet (1975) melalui konsepnya *Target Outcomes of Program* atau dikenal juga sebagai TOP Model (Bennett, 1975).

### **Program**

Suatu program berisi rumusan dari keadaan, permasalahan dan kebutuhan, tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi, strategi untuk mencapai tujuan, dan rencana operasional. Program juga berisi siapa-siapa yang akan menjadi sasaran atau target suatu program, siapa yang terlibat dan bertanggung jawab, lokasi kegiatan, dan anggaran yang diperlukan. Program adalah hasil dari proses perencanaan atau penyusunan program.

### **Input**

Semua sumber daya yang diperlukan dalam suatu program atau kegiatan dikenal sebagai input. Jenis-jenis input dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu, SDM, SDA, SDS, SDK dan SDF. Jumlah dan kualitas input akan mempengaruhi dan menentukan volume dan intensitas kegiatan. Jika input memadai dan cukup, maka kegiatan-kegiatan yang dirumuskan dalam program atau rencana penyuluhan



akan dapat dilakukan sebagaimana direncanakan, dan sebaliknya kegiatan akan terbatas jika input yang ada dan tersedia terbatas.

### **Kegiatan**

Kegiatan adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program penyuluhan. Sebuah program penyuluhan dapat terdiri dari beberapa kegiatan yang saling mendukung. Program penyuluhan untuk meningkatkan pendapatan petani kayu boleh jadi terdiri dari beberapa kegiatan seperti pelatihan pemangkas, kunjungan ke industri kayu, dan juga diskusi kelompok.

### **Partisipasi**

Peran serta petani dalam kegiatan penyuluhan adalah bentuk dari partisipasi. Partisipasi dapat bersifat pasif dan bersifat aktif. Partisipasi pasif artinya hanya hadir dalam sebuah kegiatan tanpa memberikan masukan, dan partisipasi aktif adalah keikutsertaan dan aktif memberikan ide dan gagasan.

### **Output**

Luaran dari suatu kegiatan dikenal sebagai outputs. Output langsung dari kegiatan penyuluhan adalah terjadinya peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan perubahan sikap.

### **Outcomes – hasil**

Perubahan setelah terjadinya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan adalah perubahan praktik, yang dalam penyuluhan dikenal sebagai adopsi atau menerapkan suatu inovasi teknis dan inovasi sosial. Perubahan ini juga akan menghasilkan perubahan berikutnya, yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas dan ini dapat dikelompokkan sebagai hasil antara.

### **Impacts – dampak**

Perubahan yang terjadi setelah peningkatan produksi adalah meningkatnya pendapatan, dan ini dapat disebut sebagai dampak dari suatu program atau capaian akhir dari suatu program. Perubahan-

perubahan berikutnya seperti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar karena adanya kenaikan pendapatan adalah juga dampak dari program – hidup lebih sejahtera secara sosial, ekonomi dan lingkungan – Lihat Gambar 11.2.

### 11.5. Pelaksana Evaluasi

Evaluator atau pelaksana evaluasi penting untuk dipilih atau ditentukan sebelum suatu kegiatan evaluasi dilaksanakan. Hal ini terkait dengan tingkat objektivitas dan atau subjektivitas dari pelaksanaan evaluasi. Salah dalam menentukan “siapa” yang pas untuk melakukan evaluasi akan berakibat kurang baik pada kinerja program. Pada dasarnya ada empat kemungkinan sumber dari pelaksana evaluasi dalam suatu kegiatan evaluasi, yaitu:

- (1) Evaluator dari kalangan pelaksana program (internal or “in-house” evaluator)
- (2) Evaluator dari kalangan yang tidak terlibat dalam program (external evaluator)
- (3) Evaluator dari kalangan dalam dan luar dari program (internal dan external evaluator), dan
- (4) Evaluator dari kalangan masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam program (stakeholder participatory evaluation).

Keempat jenis evaluator ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana dirumuskan pada Tabel berikut.

Tabel 11.1. Pelaksana Evaluasi – Kelebihan dan Kekurangannya

Evaluator	Kelebihan	Kekurangan
<b>(1) Internal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui dengan baik segala seluk beluk program yang akan dievaluasi</li> <li>• Dapat secara langsung belajar tentang kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat bersikap subjektif terhadap keberhasilan program</li> <li>• Memiliki kepentingan untuk menyatakan keberhasilan program</li> <li>• Cenderung tidak menerima kegagalan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan program</li> <li>• Ada kesempatan bagi pihak yang terlibat dalam program untuk menyuarakan aspirasi dan keinginannya pada tahap evaluasi</li> <li>• Menguasai atau familiar dengan lokasi kegiatan, masyarakat, permasalahan, dan sumber-sumber yang terkait dengan program dan proyek</li> <li>• Memahami tujuan pelaksanaan evaluasi dengan baik</li> <li>• Hasil evaluasi akan dapat digunakan langsung untuk memperbaiki kinerja program atau proyek</li> </ul>	
<b>(2) External</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenderung bersikap <i>objektif</i></li> <li>• Tidak memiliki <i>kepentingan</i> (vested interest) terhadap program</li> <li>• Memiliki <i>kredibilitas lebih</i> dalam melakukan evaluasi (dipercaya oleh pihak yang mendanai program dan proyek)</li> <li>• Memiliki <i>keahlian lebih</i> dalam melakukan evaluasi (dibandingkan dengan pihak pelaksana program)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki pengetahuan dan kesan yang terbatas tentang program yang dilaksanakan</li> <li>• Belum memiliki hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam program</li> <li>• Hasil evaluasi tidak dapat digunakan langsung untuk memperbaiki kinerja program atau proyek – menunggu hasil atau laporan evaluasi</li> </ul>
<b>(3) Internal &amp; External</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguasaan terhadap seluk beluk projek dapat ditingkatkan</li> <li>• Objektivitas evaluasi dapat dipertanggung jawabkan</li> <li>• Terjadi proses pembelajaran yang baik pada pelaksana program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana evaluasi menjadi lebih banyak</li> <li>• Perlu dana yang cukup</li> </ul>

(4) <b>Stakeholder participatory evaluation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami dan mengetahui cakupan program</li> <li>• Melahirkan rasa memiliki terhadap program dan evaluasinya</li> <li>• Proses belajar – refleksi, sehingga akan dapat mengembangkan program yang lebih baik untuk masa yang akan datang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan wawasan yang terbatas terhadap teknik dan metode evaluasi</li> <li>• Perlu fasilitator agar proses evaluasi dapat dilaksanakan</li> </ul>
---	--	--

Penentuan “siapa” yang akan melakukan evaluasi akan dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan berikut:

- (1) Ketersediaan waktu
- (2) Ketersediaan dana atau anggaran
- (3) Tujuan pelaksanaan evaluasi
- (4) Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pelaksana evaluasi sebagaimana diuraikan pada tabel di atas.

### 11.6. TOP dan Model Logic dalam Evaluasi

Model TOP (*Targeting Outcomes of Program*) yang dikembangkan oleh Bennet (1975) dapat dijadikan acuan dalam pengembangan dan implementasi suatu program penyuluhan – Gambar 11.2. Bagian sebelah kiri dari model ini menunjukkan hierarki proses pengembangan program, dan bagian kiri menunjukkan hierarki proses dalam menilai atau mengevaluasi program.

Pengembangan program dapat dimulai dengan mengukur kondisi sosial ekonomi dan lingkungan saat ini (SEE – social, economic and environmental components) suatu masyarakat atau petani. Dua kemungkinan kondisi yang akan terbaca dari data yang ada, kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang kurang baik atau sebaliknya. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam benak penyuluh atau penyusun program adalah “Kenapa kondisi sosial ekonomi dan lingkungan kurang memuaskan atau belum sesuai dengan harapan? Tingkat kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, dan lingkungan rusak – mengapa terjadi?” Jawaban terhadap pertanyaan ini kemudian

ditelusuri pada hierarki di bawahnya dengan mengajukan pertanyaan “Apa praktik yang ada dalam masyarakat saat ini – yang menyebabkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang buruk atau belum memuaskan?” Data yang dikumpulkan akan memberi jawaban terhadap pertanyaan ini. Boleh jadi dari data yang terkumpul akan menunjukkan bahwa petani atau masyarakat tidak memelihara tanamannya dengan baik sesuai dengan teknik-teknik budidaya yang seharusnya, petani tidak menggunakan pupuk dan benih unggul, petani dan masyarakat tidak menjaga hutan, atau sebaliknya melakukan perusakan terhadap hutan, dan lainnya.

Pertanyaan berikutnya adalah “*kenapa praktik atau tindakan petani masih seperti itu?*” Hal ini dapat disebabkan oleh karena petani belum memiliki *pengetahuan* yang cukup tentang keunggulan suatu teknologi, atau *tidak tertarik* untuk menerapkan teknologi atau tidak memiliki *keterampilan* dalam menerapkan teknologi atau *aspirasinya* masih belum sesuai dengan yang seharusnya – tidak berpikir untuk lebih maju dan meningkat kondisi sosial, ekonomi dan lingkungannya. Kemungkinan-kemungkinan ini disingkat dengan akronim KASA pada hirarki Bennet, yaitu *Knowledge (Pengetahuan)*, *Attitudes (Sikap)*, *Skills (Keterampilan)*, dan *Aspiration (Aspirasi)*.

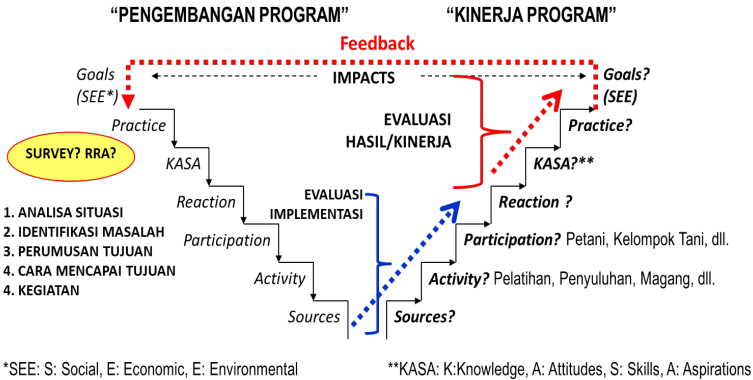
Hirarki berikutnya pada tangga menurun adalah *reaksi (reaction)*, *partisipasi (participation)*, *kegiatan (activity)*, dan *sumber (resources)*. Tangga-tangga menurun ini akan menjelaskan kondisi atau sebab-sebab dari permasalahan rendahnya *knowledge (pengetahuan)*, *attitudes (sikap)*, *skills (keterampilan)*, dan *aspiration (aspirasi)*. Data boleh jadi menunjukkan bahwa petani atau masyarakat tidak berpartisipasi pada kegiatan yang ada, atau tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan aspirasi. Terbatasnya kegiatan juga sangat boleh jadi disebabkan oleh terbatasnya sumber daya yang tersedia.

Rangkaian analisis dari anak tangga paling atas di bagian kiri hierarki *Goals atau Tujuan akhir (SEE)* hingga anak tangga paling bawah yaitu *Sumber daya (resources)* akan membawa perencanaan program pada

*rumusan-rumusan masalah, rumusan penyebab, rumusan tujuan, rumusan cara mencapai tujuan, dan rumusan sumber daya ideal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan akhir dari program penyuluhan. Proses atau pendekatan ini hampir sama dengan proses identifikasi permasalahan dan perumusan kegiatan dan tujuan program sebagaimana yang digambarkan melalui Pohon Masalah dan Pohon Tujuan – lihat Bab 10.*

Tangga bagian kanan dari hierarki Bennet menunjukkan kerangka analisis dan evaluasi kinerja program. Tangga naik dari kanan bawah ke kanan atas menunjukkan proses dari penyediaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan hingga terjadinya perubahan KASA, praktik, dan kondisi SEE. Kerangka ini mengisyaratkan bahwa evaluasi akhir dari suatu program akan mengukur perubahan kondisi SEE. Jika kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan sudah dapat tercapai sesuai dengan target atau direncanakan, maka tidak ada masalah. Fakta yang sering terjadi adalah bahwa program sering kali tidak sampai pada perbaikan yang nyata pada kondisi SEE, dan jika ini yang terjadi, maka seorang pelaksana evaluasi (evaluator) dapat menggunakan kerangka ini untuk menduga dan menelusuri faktor penyebabnya dengan berbalik arah melihat kembali “*apa yang terjadi dengan praktik? KASA? Reaksi? Partisipasi? Kegiatan? Dan Sumber daya?*” Kegagalan dan meningkatkan kondisi SEE akan dapat dijelaskan dengan penelusuran terhadap semua variabel ini.

## TOP MODEL dalam PENGEMBANGAN & EVALUASI PROGRAM



Gambar 11.2. TOP dalam Evaluasi Program Penyuluhan

### 11.7. Bias dan Rancangan Evaluasi

#### 11.7.1. Bias Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi suatu program, program penyuluhan maupun program pembangunan lainnya, ada kemungkinan seorang atau sekelompok evaluator menarik kesimpulan yang keliru tentang efektivitas program, yang sebenarnya tidak mencerminkan kinerja program yang seharusnya. Penarikan kesimpulan yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya ini dikenal sebagai Bias Evaluasi.

Sebagai sebuah ilustrasi, seorang evaluator mengidentifikasi telah terjadi perubahan pengetahuan atau perubahan sikap serta ketrampilan, atau lebih jauh telah terjadi peningkatan produktivitas dan pendapatan pada kelompok sasaran program, misalnya peserta program Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan program pemberdayaan masyarakat lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah “Apakah sebagian atau keseluruhan perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari program yang sedang dievaluasi - program IDT?” atau “Adakah program-

program lain yang ikut berperan dalam mendorong terjadinya perubahan pada kelompok sasaran?” atau “Mungkinkah perubahan terjadi dengan sendirinya?”. Bagi seorang evaluator yang kurang cermat, penarikan kesimpulan yang tidak benar dapat saja terjadi, terlebih lagi ketika orientasi “keberhasilan” mendominasi keinginan untuk melaksanakan evaluasi, guna meyakinkan sumber dana dan atau untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu. Penarikan kesimpulan yang tidak benar tidak saja berdampak negatif pada pelaksana program dan pihak sponsor -karena tidak mendapatkan masukan yang benar bagi revisi program dan penyusunan program berikutnya - tetapi juga pada kelompok sasaran (karena keberhasilan program tidak dapat diidentifikasi dengan baik).

Mengingat pentingnya arti penarikan kesimpulan yang “pas” dalam pelaksanaan suatu evaluasi, maka ada baiknya untuk diketahui adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perubahan - yang dikenal sebagai faktor bias - selain karena program atau intervensi yang sedang dievaluasi. Faktor-faktor tersebut adalah:

- (1) Faktor sejarah (Hystorical faktor)
- (2) Faktor pematangan (Maturity faktor)
- (3) Faktor pre-test (Pre-test faktor)
- (4) Faktor alat (Intrument faktor)
- (5) Faktor statistik (Statistical faktor)

### **1. Faktor sejarah (Hystorical faktor)**

Usaha untuk meningkatkan taraf hidup bagi ‘kelompok sasaran’, tidak saja dilaksanakan melalui program IDT, tetapi juga ada program-program lain yang hampir sama tujuan dan aktivitasnya, misalnya program P4K, TAKESRA, KUKESRA, UPPKS, dan lainnya. Program-program ini sangat boleh jadi mengikutkan ‘kelompok sasaran’ yang sama dengan peserta program IDT, dan karenanya akan terekspose oleh kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada diri kelompok sasaran. Misalnya, peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan ketrampilan atau



bahkan peningkatan produktivitas dan pendapatan. Dalam konteks evaluasi, perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya program atau kegiatan lain yang serupa dengan program yang sedang dievaluasi dikenal sebagai perubahan karena faktor sejarah dan bias yang ditimbulkannya disebut sebagai bias sejarah.

## **2. Faktor pematangan (Maturity faktor)**

Faktor kedua yang juga berpengaruh pada terjadinya perubahan pada diri atau kelompok sasaran adalah perubahan karena proses pematangan yang terjadi pada diri atau kelompok sasaran itu sendiri, terlebih lagi kalau rentang waktu pelaksanaan program yang sedang dievaluasi itu cukup panjang, misalnya tahunan. Seorang petani maju dikenal karena kemampuannya untuk selalu belajar dari pengalamannya ‘learning from experiences’, sifatnya yang selalu berusaha untuk mencoba dan mencoba ‘trial and error’, yang pada gilirannya menyebabkan dia berubah dalam pengetahuan, sikap, ketrampilan, produktivitas dan pendapatan. Perubahan-perubahan yang demikian dikenal sebagai perubahan karena faktor pematangan dan perlu dicermati dalam proses evaluasi. Bias atau penyimpangan karena tidak mencermati adanya perubahan karena faktor pematangan ini dikenal sebagai bias karena faktor pematangan (Maturity bias).

## **3. Faktor pre-test (Pre-test faktor)**

Sebelum suatu program disusun dan dilaksanakan, seringkali diawali oleh adanya usaha untuk mengidentifikasi kondisi awal ‘kelompok sasaran’ dengan sengaja melakukan penilaian awal atau evaluasi awal, atau juga dikenal dengan evaluasi awal atau analisa keadaan atau juga dikenal sebagai ‘benchmark evaluation’ atau ‘benchmark survey’. Usaha untuk mengetahui keadaan awal ini seringkali dilakukan dengan cara mewawancarai kelompok sasaran dengan menggunakan sejumlah daftar pertanyaan atau kuesioner. Diakui, dalam batas-batas tertentu, wawancara awal ini dapat mempengaruhi diri seseorang atau kelompok sasaran untuk melakukan perubahan dalam salah satu atau keseluruhan aspek perilakunya, katakanlah pengetahuan, sikap, ketrampilan, aspirasi, dan lainnya. Perubahan karena pengaruh

wawancara atau penilaian awal akan dapat lebih besar lagi kalau kepada kelompok sasaran diinformasikan bahwa mereka akan diwawancara lagi dalam kesempatan berikutnya, setelah program dilaksanakan. Hal ini akan mendorong kelompok sasaran untuk mempersiapkan jawaban yang lebih baik dari apa yang diberikannya dalam wawancara di kesempatan awal. Perubahan yang terjadi karena pengaruh penilaian awal ini dikenal sebagai perubahan karena faktor pre-test atau bias karena faktor pre-test.

#### **4. Faktor alat (Instrument faktor)**

Faktor alat atau instrumen juga dapat menyebabkan terjadinya bias dalam evaluasi. Alat pengumpulan data (seperti daftar pertanyaan atau kuesioner, pedoman wawancara, dan lainnya) dan analisa data yang berbeda digunakan dalam tahap awal/akhir - sebelum dan setelah program - dapat memberikan hasil yang berbeda. Perbedaan hasil karena berbedanya alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dapat menyesatkan dalam penarikan kesimpulan dalam evaluasi.

#### **5. Faktor statistik (Statistical faktor)**

Faktor lain yang dapat menyebabkan bias adalah adanya kesalahan dalam penarikan sampel, baik ditahap awal sebelum suatu program dilaksanakan atau pada tahap akhir setelah suatu program dilaksanakan. Sampel yang terlalu kecil, tidak mewakili atau representatif akan menyebabkan terjadinya bias dalam evaluasi. Penarikan sampel yang tidak dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah penarikan sampel yang benar, misalnya memilih responden yang sangat “pro pada program IDT” atau sebaliknya yang “anti pada program IDT”, “dekat pasar atau jauh dari pasar”, “berpendidikan rendah atau berpendidikan tinggi” akan dapat memberikan dua kesimpulan yang berbeda. Bias atau penyimpangan yang terjadi karena kesalahan dalam statistik seperti tersebut di atas dikenal sebagai bias karena faktor statistik.

Evaluasi suatu program dikatakan valid jika faktor-faktor penyebab bias tersebut dapat dicermati dan sedemikian rupa dieliminir, sehingga tersisa “perubahan perilaku” atau perubahan lainnya, yang benar-benar terjadi karena faktor intervensi, karena semata-mata pengaruh program yang sedang dievaluasi - katakanlah program IDT, dan bukan karena faktor lain seperti *faktor sejarah*, *faktor pematangan*, *faktor pre-test*, *faktor instrumen* dan *faktor statistik*.

Usaha ke arah menemukan “perubahan yang sebenarnya” - sebagai akibat dari program yang sedang dievaluasi - dapat dilakukan dengan menerapkan “*rancangan evaluasi*” yang sesuai, yang dapat mengelimir perubahan-perubahan karena faktor-faktor penyebab bias tersebut di atas (Phillips, 1991; Isaac & Michael, 1990). Topik “*rancangan evaluasi*” akan dibahas dalam bab berikut.

### **10.7.2. Rancangan Evaluasi**

Rancangan evaluasi adalah suatu usaha atau strategi untuk mendapatkan hasil evaluasi yang terhindar dari pengaruh kontaminasi faktor bias. Seperti telah dibahas dalam bab terdahulu, perubahan perilaku dalam penyuluhan atau program-program pembangunan lainnya dapat juga terjadi karena faktor lain di luar faktor intervensi atau karena program. Untuk mengelimir pengaruh faktor-faktor lain atau faktor bias tersebut, maka evaluasi perlu dirancang.

Sebagai suatu contoh hipotetik, dalam suatu evaluasi program penyuluhan diperoleh data yang menunjukkan skor rata-rata pengetahuan peserta penyuluhan sebesar 80. Dapatkah data atau angka ini digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan petani? Dapatkah angka atau skor itu dinyatakan sebagai suatu peningkatan pengetahuan? Akibat program penyuluhan atau intervensi?

Jika evaluasi awal yang dilakukan pada kelompok sasaran diperoleh skor rata-rata pengetahuan sebesar 20, dan setelah diadakan kegiatan penyuluhan dan dilakukan evaluasi atau pengukuran kembali, maka

diperoleh skor rata-rata pengetahuan sebesar 80. Kesimpulan yang mungkin dapat diambil dari angka-angka ini adalah bahwa telah terjadi perubahan atau peningkatan pengetahuan pada kelompok sasaran. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah “Apakah perbedaan skor 60 dalam tingkat pengetahuan ini sebagai akibat dari pengaruh faktor penyuluhan?” Pertanyaan ini menjadi lebih relevan lagi ketika selang waktu pelaksanaan evaluasi awal (T1) dan evaluasi akhir (T2) cukup besar, atau ketika pada kelompok sasaran yang sama teridentifikasi adanya sejumlah program-program lain yang dapat berpengaruh terhadap perubahan pengetahuan.

Dengan menyadari bahwa ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku kelompok sasaran, maka perubahan atau peningkatan skor sebesar 60 belum dapat dikatakan sebagai semata-mata karena pengaruh faktor penyuluhan., apa lagi ketika evaluasi dilakukan, pelaksana evaluasi tidak sempat berpikir tentang rancangan evaluasi. Rancangan evaluasi dapat membantu menjelaskan seberapa besar pengaruh faktor penyuluhan pada perubahan skor tersebut.

Ada beberapa rancangan pokok dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu:

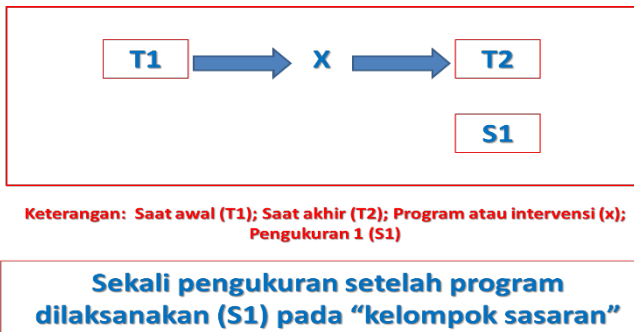
- (1) One shot case study design
- (2) Pre-test post-test one group case study design
- (3) Two group comparison design
- (4) Two group comparison, pre-test post test design
- (5) Four group Solomon design
- (6) Time series atau longitudinal evaluation design, dan lainnya

### **1. One shot case study design (sekali pengukuran)**

One shot case study design yaitu rancangan evaluasi yang paling sederhana yang dilakukan dengan hanya melakukan sekali pengukuran pada kelompok sasaran, yaitu setelah suatu program penyuluhan atau intervensi dilaksanakan. Kembali pada contoh hipotetis di atas, rancangan ini menunjuk pada skore rata-rata pengetahuan sebesar 80, sedangkan evaluasi awal tidak dilakukan. Seperti dibahas di atas, akan sulit untuk menyatakan seberapa efektif program penyuluhan jika

rancangan evaluasi seperti ini digunakan. Dalam kenyataan, juga tidak sedikit pelaksana evaluasi yang menggunakan rancangan ini. Evaluasi keberhasilan program IDT boleh jadi menggunakan rancangan yang ini dengan melihat misalnya besarnya pendapatan peserta setelah mengikuti program IDT, tentu dengan menggunakan asumsi bahwa pendapatan sebelum mengikuti program berada di bawah garis kemiskinan. Evaluasi akan lebih bermakna ketika kondisi awal kelompok sasaran juga diketahui, seperti pada rancangan evaluasi berikut.

### “ONE SHOT” case study design



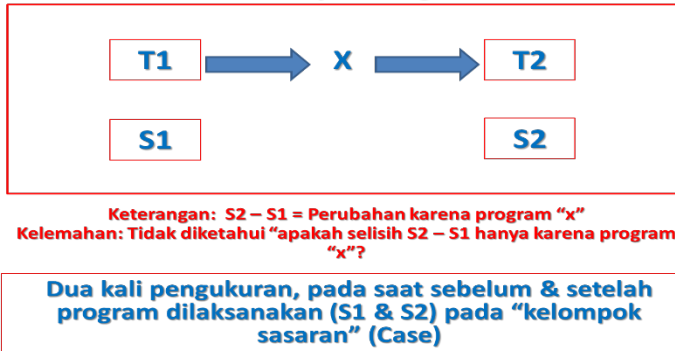
Gambar 11.3. Rancangan *One-shot Case Study*

## 2. Pre-test post-test one group case study design

Rancangan evaluasi pre-test post-test one group design menunjuk pada proses evaluasi dengan memperhitungkan dua keadaan dalam sebuah kelompok sasaran yang sama yang dikenai oleh program. Keadaan awal kelompok sasaran diidentifikasi atau diukur dengan melakukan tes atau evaluasi awal, katakanlah, diukur tingkat pengetahuannya, diukur pula tingkat ketrampilan, sikap, produktivitas, pendapatan, dan lain-lain. Keadaan awal ini menjadi patokan atau dasar berpijak untuk menarik kesimpulan apakah telah terjadi perubahan atau tidak setelah program atau intervensi dilaksanakan. Evaluasi kedua dilaksanakan

setelah program dilaksanakan, dan ini hanya dilakukan pada kelompok sasaran yang sama, yang dievaluasi pada saat awal. Skor pada dua keadaan kemudian dibandingkan untuk mengetahui perubahan. Ketika kelompok sasaran berada dalam kondisi terisolasi dari pengaruh-pengaruh faktor lain, (misalnya diketahui tidak ada program lain yang masuk ke kelompok sasaran dalam selang waktu T1 dan T2, mobilitas kelompok sasaran terbatas, akses terhadap sumber informasi atau media masa terbatas atau tidak ada, kondisi kelompok sasaran belum dinamis), maka perbedaan skor saat T1 dengan T2 atau sama dengan Y1, dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa perbedaan skor yang teridentifikasi adalah sebagai pengaruh faktor intervensi atau penyuluhan atau program pengembangan masyarakat. Dalam kenyataan, era informasi dan globalisasi sekarang ini menyebabkan kondisi 'terisolasi' seperti diilustrasikan seperti di atas menjadi tidak objektif, dan karena itu rancangan lain perlu diketahui dan diterapkan. Sangat boleh jadi suatu masyarakat memiliki tingkat mobilitas tinggi, akses terhadap informasi lebih tinggi, dan kemungkinan mendapatkan program-program pembangunan yang lebih banyak, dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya. Jika perbedaan dalam kelompok masyarakat seperti ini tidak diperhatikan, penggunaan evaluasi pre-test post-test one group design tidak dapat memberi makna banyak pada hasil evaluasi. Untuk itu maka digunakan rancangan yang menggunakan kelompok lain sebagai pembanding.

## “Pre-test post-test” one group case study design

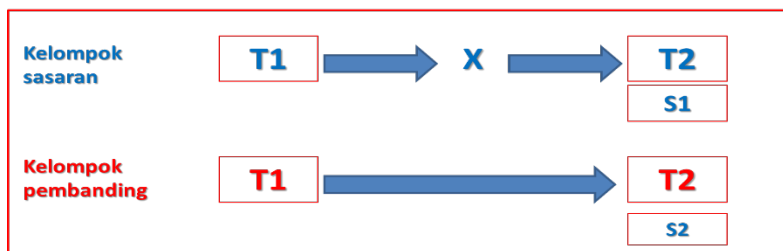


Gambar 11.4. Rancangan *Pre-test Post-Test One Group*

### 3. Two group comparison design

Yaitu melakukan penilaian atas dua kelompok yang berbeda dengan hanya melakukan sekali pengukuran, yaitu di akhir program atau intervensi. Rancangan ini ditujukan untuk melihat apakah ada perbedaan perilaku antara kedua kelompok - antara yang dikenai program dan yang tidak dikenai program. Perbedaan nilai atau skor pada kedua kelompok dianggap sebagai perbedaan karena pengaruh intervensi atau penyuluhan. Kelompok yang terkena program kemungkinan memiliki skor lebih tinggi dari kelompok pembandingan. Pertanyaan serupa dapat diajukan terhadap validitas rancangan ini. Benarkah perbedaan skor antara kedua kelompok yang dievaluasi hanya semata-mata karena pengaruh faktor intervensi atau penyuluhan?

## “Two group” comparison design



**Keterangan:**  $S2 - S1 =$  Perubahan karena program “x”  
**Kelemahan:** Tidak diketahui kondisi awal kedua kelompok!!!

**Sekali pengukuran, setelah program dilaksanakan pada “kelompok sasaran” (Case) & “kelompok pembanding” (Control group)**

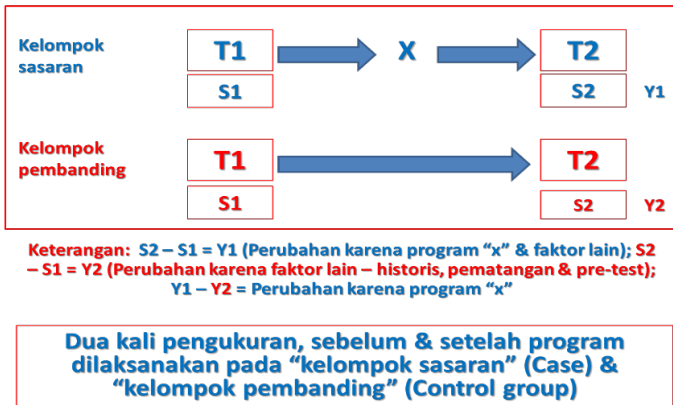
Gambar 11.5. Rancangan *Two Group Comparison*

#### 4. Two group comparison, pre-test post test design

Rancangan ini diajukan untuk mengatasi kelemahan dari rancangan sebelumnya, yaitu dengan melakukan dua kali pengukuran (pre-test dan post-test) pada dua kelompok yang berbeda (kelompok yang terkena program penyuluhan dan kelompok yang tidak terkena program). Rancangan ini menggunakan asumsi bahwa kelompok yang terkena program penyuluhan akan memiliki skor lebih tinggi pada saat T2, sedangkan perbedaan skor antara T1 dan T2 pada kelompok yang tidak terkena program -kalau pun terjadi - dapat membantu dalam mengeliminir pengaruh faktor lain seperti faktor pematangan dan faktor sejarah. Pengurangan selisih skor ( $T2-T1$ ) pada kelompok yang terkena penyuluhan dengan selisih skor ( $T2-T1$ ) pada kelompok yang tidak terkena program penyuluhan akan mencerminkan besarnya pengaruh faktor intervensi, yang dapat dinyatakan sebagai berikut:



**“Two group comparison, pre-test post test design”**



Gambar 11.6. Rancangan *Two Group Comparison Pre-test Post-test*

$Y =$  Skor (T1 - T2) kelompok 2 - Skor (T1 - T2) kelompok 1

Y: skor karena pengaruh faktor intervensi

Kelompok 2: kelompok yang terkena program

Kelompok 1: kelompok yang tidak terkena program

T1: saat awal

T2: saat akhir

Dapatkah perbedaan skor antara kedua kelompok tersebut (Y) mencerminkan perubahan yang semata-mata karena pengaruh faktor intervensi atau penyuluhan? Rancangan ini paling tidak dapat mengeliminir atau mengeluarkan pengaruh faktor pematangan dan faktor sejarah (dengan mengidentifikasi perubahan skor pada saat T1 dan T2 di kelompok yang tidak terkena program), tetapi belum mengeliminir pengaruh faktor pre-test. Oleh karena itu, diperlukan rancangan lain yang lebih tepat.

**5. Four group Solomon design**

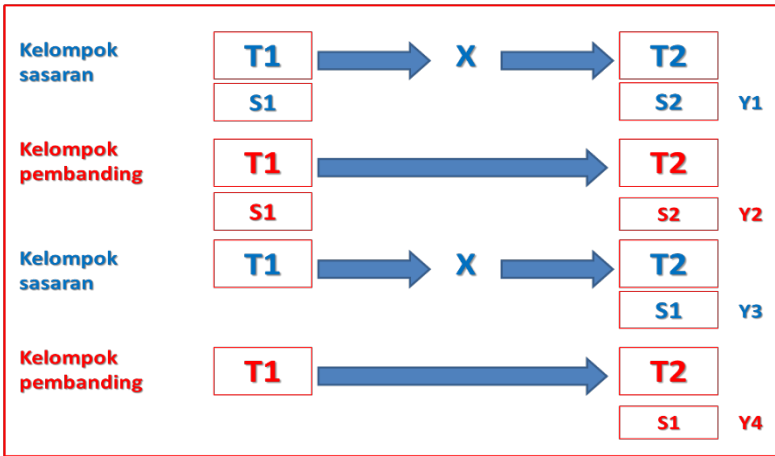
Rancangan evaluasi ini dikembangkan untuk mengatasi kritik terhadap kelemahan rancangan-rancangan sebelumnya, yaitu dengan cara mengurangi pengaruh faktor-faktor bias lainnya, seperti faktor sejarah,

pematangan, dan faktor pre-test. Sementara bias yang disebabkan oleh faktor statistik dan faktor instrumen atau alat dapat diatasi dengan mengikuti kaidah-kaidah penarikan sampel dan pengukuran yang tepat. Rancangan “four group Solomon design” melibatkan empat kelompok, yaitu dua kelompok yang mewakili kelompok yang terkena program dan dua kelompok lain sebagai pembanding sebagai kelompok yang tidak terkena program. Dalam rangka mengeliminir pengaruh faktor pre-test, salah satu kelompok pada kedua kategori (kelompok terkena program dan tidak terkena program) hanya dilakukan post-test saja, sementara pada kedua kelompok lainnya dilakukan evaluasi awal dan evaluasi akhir. Pengaruh faktor pre-test dapat dieliminir dengan menggunakan rancangan evaluasi jenis ini, yaitu dengan melihat perbedaan skor keempat kelompok yang dievaluasi.

Pengaruh faktor sejarah dan faktor pematangan dapat dieliminir dengan menggunakan rumus pada rancangan no.4, sedangkan pengaruh faktor pre-test dapat dihitung sebagai berikut:

- (1) Perbedaan skor akhir pada kedua kelompok yang tidak terkena pre-test sama sekali ‘bersih’ dari pengaruh faktor pre-test, tetapi di dalamnya kemungkinan ada pengaruh faktor pematangan dan faktor sejarah.
- (2) Skor akhir pada kedua kelompok yang terkena pre-test mengandung skor sebagai pengaruh faktor pre-test, selain juga pengaruh sejarah dan pematangan:

**“Four group Solomon design”**



Gambar 11.7. Rancangan *Four Group Comparison*

- Perbedaan skor pada kelompok yang terkena program:  
 $Y1 = S1 - S0 = x + h + m + ptes$   
*(Y: perbedaan skore, S0: skore awal, S1: skore akhir, x: skore karena program, h: skore karena sejara, m: skore karena pengaruh pematangan dan, ptes: skore karena pengaruh faktor pre-test)*
- Perbedaan skor pada kelompok yang tidak terkena program:  
 $Y2 = S1 - S0 = h + m + ptes$
- Skor pada kelompok yang terkena program dan tidak mengalami pre-test:  
 $Y3 = S1 = x + h + m$
- Skor pada kelompok yang tidak terkena program & tidak mengalami pre-test:  
 $Y4 = S1 = h + m$

- Dengan asumsi bahwa keempat kelompok yang dievaluasi mengalami pengaruh faktor sejarah dan faktor pematangan yang relatif sama (dikukuhkan dengan proses pemilihan sampel yang representatif), perbedaan selisih skor akhir sebagai akibat dari faktor pre-test dapat dieliminir atau dikeluarkan dengan cara atau pendekatan sebagai berikut:

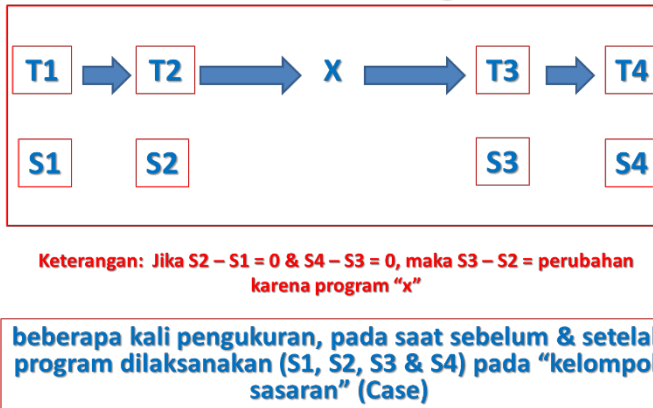
- $ptes = Y2 - Y4, \text{ atau } = Y1 - Y3$
- $h + m = Y4 = Y2 - ptes = Y3 - x = Y1 - x - ptes$
- $x = Y1 - Y2 \text{ atau } Y3 - Y4$

Untuk lebih jelas tentang proses ‘pembersihan’ faktor bias ini silakan lihat gambar!

## 6. Time series atau longitudinal evaluation design

Rancangan dengan pengukuran berkali-kali, baik dilakukan pada satu kelompok yang sama atau pada lebih dari satu kelompok juga dapat dilakukan untuk melihat konsistensi perubahan pada selang waktu tertentu. Boleh jadi tidak ada perubahan skor antara S0 dan S1, yang berarti kelompok tersebut aman dari faktor bias (pre-test, pematangan dan sejarah) dan ketika intervensi dilakukan, maka perbedaan skor yang terjadi setelah itu dapat dianggap sebagai pengaruh faktor intervensi semata. Validitas skor setelah intervensi masih dapat diuji dengan melakukan pengukuran sekali lagi (S3) setelah S2 (Lihat gambar). Berbagai kombinasi rancangan guna mengeliminir pengaruh faktor bias dapat dirancang sesuai dengan keperluan, dan pertimbangan dana, keberadaan dan peluang bekerjanya faktor-faktor bias pada kelompok sasaran.

## “Time series atau longitudinal evaluation design”



Gambar 11.8. Rancangan *Time Series*

### 11.8. Variabel, Indikator, dan Pengukuran dalam Evaluasi

Sejalan dengan jenis dan tujuan evaluasi, pelaksana evaluasi atau evaluator akan selalu sampai pada pemikiran dan pekerjaan untuk menentukan variabel, indikator dan pengukuran. Dalam mengevaluasi suatu program pengembangan masyarakat, program penyuluhan pertanian atau program apa pun, maka yang selalu menjadi perhatian dan pertanyaan pokok adalah:

- (1) Apakah program telah berhasil mencapai tujuan sebagaimana direncanakan?
- (2) Apa saja kah tujuan program yang telah ditetapkan dan dirumuskan?
- (3) Jika Ya, tujuan yang mana yang telah dicapai dan tujuan mana yang belum dicapai?
- (4) Jika Tidak, kenapa tujuan tidak tercapai?
- (5) Ketika tujuan suatu program terpilah menjadi tujuan langsung, tujuan antara dan tujuan akhir atau tujuan jangka panjang, maka pertanyaannya adalah tujuan yang mana yang dapat dicapai dan tujuan mana yang belum dapat dicapai? Tujuan mana yang hendak diukur?

- (6) Apa bukti atau petunjuk atau indikator bahwa tujuan telah tercapai atau tujuan belum tercapai?
- (7) Bagaimana mengukur bahwa tujuan telah tercapai atau tujuan belum tercapai?

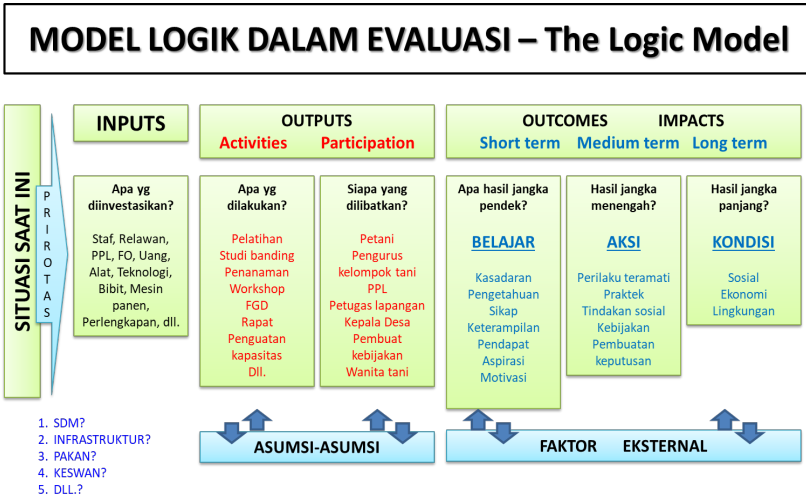
Semua pertanyaan di atas menunjukkan bahwa pelaksana evaluasi harus menentukan variabel dan indikator dalam melaksanakan evaluasi atas suatu program. Setelah itu akan menentukan bagaimana melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan suatu program. Mengukur efektivitas suatu program tentu dan sudah pasti akan menyentuh pertanyaan-pertanyaan pokok berikut ini:

- (1) Sejauh mana tujuan program telah tercapai?
- (2) Bagaimana proses-proses yang dilalui dalam pengembangan dan implementasi program?
- (3) Bagaimana keterlibatan para pihak dalam pengembangan dan implementasi program?
- (4) Bagaimana ketersediaan sumber daya atau input dalam menunjang pengembangan dan implementasi program?
- (5) Sejauh mana faktor-faktor lain di luar pelaksana program mendukung pencapaian tujuan program? Faktor dukungan kebijakan? Dukungan inovasi? Dukungan harga?

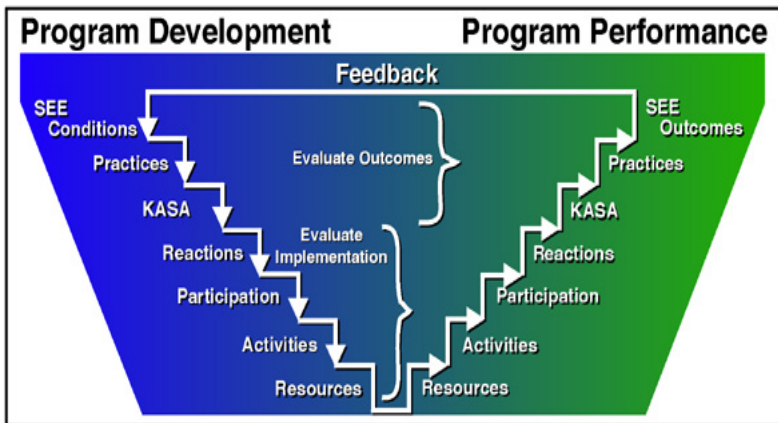
Sesuai dengan konsep hierarki TOP Model yang dikembangkan Bennet (1990), maka dalam pembahasan tentang variabel, indikator dan pengukuran perlu memperhatikan beberapa tingkatan berikut ini:

- (1) Sumber daya (*Resources* atau *Inputs*)
- (2) Kegiatan (*Activities*)
- (3) Partisipasi (*Participation*)
- (4) Reaksi (*Reaction*)
- (5) Pembelajaran (*Learning – changes of Knowledge, Attitudes, Skills and Aspiration*)
- (6) Praktik (*Practice – adoption of certain recommended practices*)
- (7) Hasil (*Results or outcomes*) - Evaluasi Hasil menilai Seberapa Baik Target-target Program dicapai!

Perhatikan Gambar Logic & TOP Model berikut ini!



Meningkatkan Kinerja Program dengan Logic Model – University of Wisconsin – Extension, Pebruari 2003



Keterangan:SEE; Social Economic and Environment; KASA (Knowledge, Attitudes, Skills, Aspiration)

Gambar 11.9. Logic Model & Targetted Outcomes Project (TOP) Model

## 6. Reaksi (Reaction)

Reaksi dimaksudkan sebagai tanggapan peserta program terhadap beberapa hal yang terkait dengan keseluruhan aspek atau komponen dari suatu program, yang antara lain meliputi materi atau substansi program, pihak pelaksana program atau pelatih atau penyuluh atau petugas lapangan, waktu, volume, dan lainnya. Beberapa pertanyaan berikut memberi ilustrasi tentang pengukuran terhadap variabel Reaksi dalam suatu program pengembangan masyarakat.

Tabel 11.2. Pengukuran Reaksi pada Program Penyuluhan

Aspek program	Tinggi			Rendah	
	5	4	3	2	1
(1) Bagaimana Anda menilai relevansi program terhadap kebutuhan Anda?					
(2) Tingkat ketrampilan petugas?					
(3) Dukungan fasilitas dalam pelaksanaan program?					
(4) Kesesuaian jadwal pelaksanaan program?					
(5) Apakah materi program disajikan secara menarik?					
(6) Tingkat partisipasi peserta selama pelaksanaan program?					

## 7. Pembelajaran (Learning)

Pada suatu kegiatan penguatan kapasitas, seperti pelatihan dan studi banding, ada empat hal yang dapat diajarkan, yaitu pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), ketrampilan (*skills*) dan aspirasi (*aspiration*) atau KASA. Oleh karena itu, pengukuran terhadap hasil pembelajaran berarti pula mengukur perubahan dalam hal pengetahuan (*knowledge*) – pengetahuan apa yang telah dipelajari?; sikap (*attitude*) – sikap apa yang telah berubah?; dan, ketrampilan (*skills*) – ketrampilan apa yang dipelajari?; dan aspirasi (*aspiration*) – apakah telah terjadi perubahan harapan, ambisi dan motivasi dari para peserta, dan dalam hal apa?

Mengukur perubahan pada keempat aspek ini adalah penting untuk mengetahui kecenderungan perubahan pada aspek praktik atau tindakan. Ketika suatu proses penguatan kapasitas berhasil dalam merubah KASA, maka besar kemungkinan bagi terjadinya perubahan tindakan atau praktik selama faktor lain mendukung. Jika pengamatan terhadap “tindakan” peserta



belajar menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, bukan berarti bahwa proses belajar tidak terjadi atau tidak terjadi perubahan KASA. Persoalan lain seperti kekurangan modal, tidak tersedianya bahan pendukung, perbedaan musim, tidak adanya inovasi, dan lainnya. Boleh jadi menjadi faktor pembatas kenapa perubahan pada aspek KASA tidak diikuti oleh perubahan tindakan atau praktik atau mengadopsi sesuatu.

Dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran, Kirkpatrick (1998) menyarankan sebagai berikut:

- (1) Gunakan kelompok pembandingan jika memungkinkan dan praktis
- (2) Nilai perubahan pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan aspirasi sebelum dan setelah kegiatan atau program
- (3) Gunakan tes tulis untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap
- (4) Gunakan tes praktik untuk mengukur perubahan ketrampilan
- (5) Usahakan untuk mendapatkan respons 100%, dan
- (6) Gunakan hasil evaluasi untuk menentukan tindakan berikutnya – memperbaiki kinerja program.

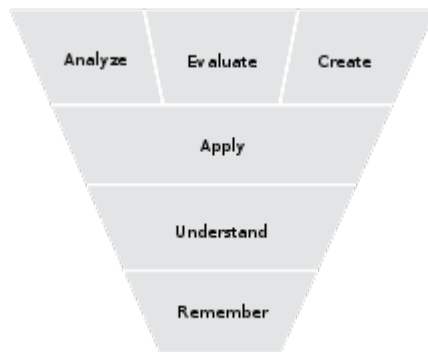
Tabel berikut ini memberikan ilustrasi tentang bagaimana mengukur perubahan pengetahuan dan sikap pada suatu kegiatan pelatihan bagi masyarakat pengelola hutan.

Tabel 11.3. Pengukuran Pembelajaran pada Program Penyuluhan

Contoh	Kelompok sasaran		Kelompok pembanding	
	Contoh 1	Pretest	45.5	46.7
Postest		55.4	48.2	
Kenaikan		+9.9	+1.5	
Kenaikan bersih (net gain)		$9.9 - 1.5 = 8.4$		Program berpengaruh cukup besar terhadap kelompok sasaran
	<i>Kelompok sasaran</i>		<i>Kelompok pembanding</i>	
Contoh 2	Pretest	45.5	46.7	
	Postest	55.4	54.4	
	Kenaikan	+9.9	+7.7	
	Kenaikan bersih (net gain)	$9.9 - 7.7 = 2.2$		Ada kemungkinan bahwa pada kelompok pembanding ada kegiatan lain yang juga menyebabkan terjadinya perubahan pengetahuan dan ketrampilan

## Pengukuran “Pengetahuan” (*Area Cognitive*) dalam Taksonomi Bloom

Gambar berikut menunjukkan tingkatan pengetahuan dalam Taksonomi Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk mengingat (*remember*), memahami (*understand*), menerapkan (*apply*) apa yang dipelajarinya, menganalisis (*analyze*), menilai (*evaluate*) dan menciptakan (*create*) – Gambar berikut.



Gambar 11.10. Tingkatan Pengetahuan -Taksonomi Bloom

Keenam tingkatan ini menunjukkan bahwa hasil pembelajaran dalam aspek “kognitif” (*cognitive domain*) dapat berarti perubahan pengetahuan dalam tingkatan yang paling rendah – yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam mengingat (*Remember*) apa yang dipelajarinya atau kemampuan untuk menjelaskan (*Understand*), dan pada tingkatan yang paling tinggi adalah kemampuan untuk menganalisis (*Analyze*), menilai (*Evaluate*) dan menciptakan (*Create*). Secara ringkas berikut ini diberikan ilustrasi apa yang dimaksud dengan keenam tingkatan area kognitif tersebut dan bagaimana mengukurnya.

**Pengetahuan (Mengingat):** Menunjukkan kemampuan untuk mengingat materi yang dipelajarinya dengan menyebutkan atau menuliskan kembali fakta, istilah, konsep dasar dan menjawab:

- (1) Pengetahuan khusus: Istilah, fakta spesifik
- (2) Pengetahuan tentang cara atau alat yang terkait dengan hal-hal khusus: Kecenderungan dan konsekuensi, klasifikasi dan kategori, kriteria, metodologi.
- (3) Pengetahuan yang universal dan abstraksi dalam suatu bidang: Prinsip-prinsip dan generalisasi, teori dan struktur.

Contoh pertanyaan: *Sebutkan lima tahapan dalam proses adopsi! Atau Apa yang Anda ketahui tentang tahapan proses adopsi?*

**Pemahaman (Comprehension):** Pemahaman terhadap suatu fakta dan gagasan yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam mengorganisir, membandingkan, menerjemahkan, menginterpretasi, mendeskripsikan, dan menyatakan ide-ide pokok.

Contoh pertanyaan: *Bandingkan antara konsep lama tahapan adopsi dengan konsep baru tahapan adopsi (teori keputusan inovasi)*

**Penerapan (Application):** Kemampuan menggunakan pengetahuan baru. Memecahkan permasalahan dalam situasi baru dengan menerapkan pengetahuan, fakta, teknik dan aturan yang baru diperoleh atau dipelajari dengan cara yang berbeda.

Contoh pertanyaan: *Teori adopsi mana yang terbaik untuk diterapkan di Lombok dan kenapa?*

**Analisis (Analysis):** Memeriksa dan mengurai informasi kedalam bagian-bagian terpisah dengan mengidentifikasi motif atau sebab-sebab. Membuat inferensi dan menemukan bukti-bukti untuk mendukung generalisasi atau kesimpulan umum. Hal ini meliputi analisis elemen atau komponen, analisis hubungan dan analisis prinsip-prinsip yang terkait dengan pengorganisasian (fakta dan atau gagasan).

Contoh pertanyaan: *Uraikan beberapa metode dalam melakukan kegiatan penyuluhan tentang program Sapi, Jagung dan Rumput Laut (PIJAR), dan jelaskan cara mana yang paling efektif. Tunjukkan acuan atau pustaka yang mendukung pernyataan Anda!*

**Sintesis (Synthesis):** Mengompilasi informasi dalam cara yang berbeda dengan menggabungkan komponen-komponen dalam pola baru atau mengajukan alternatif solusi. Produksi suatu komunikasi yang unik, produksi suatu rencana atau pengajuan suatu *standard operational procedures* (SOP), menerjemahkan atau menurunkan suatu set atau kumpulan hubungan yang bersifat abstrak.

Contoh pertanyaan: *Rubah cara penyuluhan dari cara penyuluhan yang tidak efektif menjadi penyuluhan yang lebih efektif dengan mengganti atau memasukkan komponen yang menurut Anda penting. Jelaskan apa keuntungan dari penggantian atau masuknya komponen baru dalam sistem penyuluhan dibanding dengan kondisi awal (saat penyuluhan tidak efektif).*

**Menilai (Evaluation):** Menyajikan dan mempertahankan pendapat melalui pembuatan keputusan tentang informasi, validitas gagasan atau kualitas kerja atas dasar suatu kumpulan kriteria. Keputusan atau penilaian atas dasar bukti internal atau keputusan (*judgments*) atas dasar bukti atau kriteria eksternal.

Contoh pertanyaan: Menurut Anda, apakah sistem penyuluhan yang digunakan untuk memasyarakatkan PIJAR juga akan efektif dalam memasyarakatkan program-program pembangunan lainnya di NTB? Jelaskan jika Ya dan jika Tidak!

### **Praktik (Practice)**

Perubahan KASA akan menentukan perubahan terhadap tingkah laku nyata (*Practice*) pada pihak yang ikut dalam program, misalnya petani atau kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran pembangunan. Dalam konteks teori adopsi, perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan adalah pra-syarat bagi berubahnya praktik atau terjadinya penerapan teknologi atau inovasi (Adopsi). Tetapi juga

perlu dicatat bahwa perubahan KASA juga bukan merupakan jaminan bagi terjadinya perubahan praktik atau adopsi. Sangat boleh jadi bahwa semua peserta program meningkat pengetahuannya, berubah sikapnya dan meningkat keterampilannya dalam suatu hal, misalnya “pembuatan dan pemanfaatan kompos”, tetapi tidak mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain karena tidak adanya modal untuk mengembangkan usaha pembuatan kompos, atau mungkin juga karena lingkungan yang tidak mendukung – misalnya masyarakat sekitar tidak setuju dengan dikembangkannya usaha pembuatan kompos karena akan menyebabkan bau atau polusi di lingkungan mereka.

### **Hasil Akhir (Socio Economic and Environment)**

Tujuan akhir dari suatu program pengembangan masyarakat adalah terwujudnya kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang lebih baik – masyarakat sejahtera dan lingkungan yang lestari (*Better socio economic and environmental conditions*).

Selain pengukuran terhadap “Reaksi” dan “Perubahan-perubahan” di atas, seorang pelaksana evaluasi juga perlu melakukan pengukuran terhadap aspek lain dari suatu program, yaitu aspek sumber, kegiatan, dan partisipasi. Pengukuran terhadap ketiga aspek atau komponen ini akan membantu menjelaskan kenapa “Reaksi”, “KASA”, “Praktik”, dan “SEE” tidak maksimal atau sebaliknya. Pengukuran terhadap sumber, kegiatan dan partisipasi akan memberi informasi tentang efektivitas pelaksanaan program (evaluasi proses).

### **Sumber (Sources or inputs)**

Sumber yang dimaksud dalam hal ini adalah mengacu kepada semua modal atau asset yang dibahas oleh Jule Pretty dalam konsepnya tentang “Asset-based sustainable development” (Pretty J., 2007), yaitu adanya 5 (lima) macam asset atau modal, yaitu modal sumber daya alam (*natural capital*), sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya keuangan (*financial capital*), sumber daya fisik atau ketersediaan

fasilitas, sarana dan prasarana (*physical capital*), dan sumber daya sosial (*social capital*).

Mengacu pada model “TOP” (Gambar 1), tingkat ketersediaan dan kualitas modal atau sumber akan sangat menentukan bagi terlaksananya semua kegiatan yang direncanakan dalam program pengembangan masyarakat. Suatu program dan kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan baik ketika semua sumber daya mendukung atau tersedia. Sumber daya alam harus tersedia atau mendukung (misalnya, ada lahan percobaan, petani memiliki lahan pengairan atau lahan tadah hujan) jika tujuan pembangunan, misalnya perbaikan kondisi ekonomi, hendak dicapai. Hal yang sama juga berlaku bagi sumber daya lainnya seperti jumlah dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan modal dan akses terhadap kredit dan lembaga keuangan, dan keberadaan kelompok, jaringan dan “percaya” (*trust*) sebagai modal sosial.

Dalam rangka keperluan evaluasi terhadap kinerja program, maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah “Apakah sumber atau input yang direncanakan dalam Rencana Operasional tersedia ketika suatu program dilaksanakan?” “Apakah jumlah dan kualitas input atau sumber daya sesuai dengan yang direncanakan?” “Apakah sumber daya tersedia pada waktu yang dan lokasi yang tepat”. Ketika sebagian atau semua input atau sumber daya tidak tersedia sesuai yang direncanakan, maka konsekuensinya adalah tidak dapat dilaksanakannya “kegiatan” sesuai dengan yang direncanakan. Ketika “kegiatan” tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak akan terjadi partisipasi dari semua atau banyak pihak (yang seharusnya terlibat dalam program). Konsekuensi berikutnya adalah tidak terjadinya perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan dan aspirasi (KASA), tidak terjadinya perubahan praktik, yang kemudian tidak akan berdampak pada perubahan produksi dan produktivitas. Ini berarti juga tidak akan terjadinya perubahan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan (*socio economic and environmental conditions*).

## **Kegiatan (Activity)**

Sejalan dengan konsep “Pengembangan program” yang digambarkan pada “TOP Model” – Gambar 1, perubahan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan (pendapatan dan kesejahteraan) akan terjadi ketika terjadi perubahan “praktik” (*practice*) atau “diadopsi teknologi atau inovasi yang direkomendasikan” (*adoption of social and technical innovations*). Perubahan praktik hanya akan terjadi ketika terjadi perubahan pada aspek KASA, dan ini pun akan terjadi ketika masyarakat sasaran berpartisipasi dalam kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan yang direncanakan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tersedia sumber daya yang cukup dan memadai.

Atas dasar uraian di atas, maka pertanyaannya adalah “Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Operasional jadi dilaksanakan pada saat suatu program dilaksanakan? Apakah volume atau frekuensinya sesuai dengan yang direncanakan? Apakah lokasi pelaksanaannya sesuai? Apakah waktu pelaksanaannya juga sesuai? Apakah jumlah peserta kegiatan juga sesuai dengan yang direncanakan?”

Ketika semua pertanyaan ini terjawab dan ternyata semua kegiatan yang direncanakan dilaksanakan sesuai dengan rencana, maka dapat diharapkan bahwa tujuan pengembangan masyarakat akan dapat dicapai dengan baik. Namun jika kegiatan yang dapat dilaksanakan sangat terbatas, maka tujuan juga tidak akan dapat dicapai sebagaimana mestinya.

## **Partisipasi (Participation)**

Partisipasi mengacu pada keterlibatan atau keikutsertaan pihak sasaran dalam semua program atau kegiatan yang direncanakan. Partisipasi dapat berupa kehadiran dalam semua kegiatan, memberikan gagasan atau pendapat atas suatu persoalan, atau dalam bentuk lainnya seperti menyediakan fasilitas dan dukungan lainnya. Dalam konteks implementasi program pengembangan masyarakat, yang menjadi harapan pokok adalah partisipasi dalam artian kehadiran dalam



program atau kegiatan yang sudah disepakati bersama. Keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi syarat bagi terjadinya peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan peningkatan ketrampilan. Petani atau kelompok masyarakat miskin tidak akan berubah pengetahuan, sikap dan keterampilannya jika tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Beberapa pertanyaan penting yang terkait dengan aspek “partisipasi” ini antara lain adalah sebagai berikut” “Siapa yang berpartisipasi pada saat suatu kegiatan dilaksanakan atau bahkan ketika suatu program direncanakan? Apakah partisipasi tinggi pada semua komponen program dan kegiatan? Apakah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan atau program terjadi secara sukarela atau karena ada insentif atau paksaan?

### **11.9. Contoh Instrumen Evaluasi Program Penyuluhan**

Berikut adalah contoh instrumen yang digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan perubahan praktik pada petani pengelola kayu yang dilakukan di 5 kabupaten pada 5 provinsi di Indonesia dalam rangka pengembangan dan komersialisasi usaha tani hutan berbasis masyarakat “*Community-based Commercial Forestry Project*” (Muktasam, Reid, & Race, 2017). Lebih rinci tentang proses dan hasil evaluasi dapat dilihat pada bab “Pendekatan MTG dalam Penyuluhan Hutan dan Agroforestry”.

Tabel 11.4. Pertanyaan Kunci FGD dan Wawancara Mendalam (CBCF, 2021)

<b>Pertanyaan Kunci FGD &amp; Wawancara Mendalam</b>
<p><b>I. Identitas Responden/Peserta:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama :</li> <li>2. Alamat :.....(Pati/Gunungkidul/Bulukumba)</li> <li>3. Jenis Kelamin :</li> </ol> <p><b>II. Partisipasi dalam Pelatihan MTG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Bapak mengikuti pelatihan MTG? Berapa banyak dari Bapak yang mengikuti Pelatihan MTG?</li> <li>2. Apakah Bapak ingat kapan itu?</li> <li>3. Berapa hari Bapak hadir?</li> </ol> <p><b>III. Aksi Individu atau Kolektif setelah Pelatihan MTG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudahkah Bapak menggunakan atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang Bapak pelajari dari pelatihan? Jika Ya , dapatkah Bapak menyebutkannya? Jika Tidak, yang mana dan mengapa?</li> <li>2. Apakah Bapak bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok untuk menerapkan pengetahuan &amp; keterampilan?</li> <li>3. Apa hasil penerapan pengetahuan dan keterampilan baru yang dipelajari dari pelatihan MTG?</li> </ol> <p><b>IV. Berbagi Pengetahuan, Keterampilan &amp; Pengalaman dengan Petani Lain</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudahkah Bapak berbagi apa yang Bapak pelajari dari pelatihan dengan orang lain? Jika Ya, dengan siapa? nama dan alamat mereka? berapa banyak?</li> <li>2. Bagaimana cara Bapak berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan mereka? Hanya cerita-cerita? Menunjukkan kepada mereka bagaimana melakukannya? Membawa mereka ke kebun Bapak? Cara lain yang Bapak gunakan?</li> <li>3. Apa hasil yang dipelajari para petani ini dari Bapak? Adakah perubahan pada cara Bertani atau kehidupan mereka?</li> </ol> <p><b>V. Persepsi tentang Proses dan Isi dari Pelatihan MTG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika Bapak ingat pelatihan MTG yang Bapak ikuti, apa pendapat Bapak tentang cara penyampaian pelatihan – metodenya ?</li> <li>2. Apa pendapat Bapak tentang <i>mata pelajaran</i> – seberapa relevan dengan kebutuhan Bapak?</li> <li>3. Apa pendapat Bapak tentang pelatihnya?</li> <li>4. Bisakah Bapak memberi tahu saya betapa bermanfaatnya pelatihan ini bagi Bapak atau bagi petani lain?</li> <li>5. Apakah ada pelatihan seperti ini yang pernah Bapak ikuti?</li> <li>6. Bisakah Bapak memberikan beberapa hal khusus dari pelatihan ini?</li> <li>7. Bisakah Bapak memberikan beberapa ide tentang bagaimana meningkatkan kualitas pelatihan di masa depan?</li> </ol> <p><b>VI. Perubahan Paling Signifikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adakah perubahan pada praktik pertanian/komunitas/lembaga Bapak setelah pelatihan?</li> <li>2. Jika Ya, apakah saja perubahan tersebut?</li> <li>3. Jika Tidak, mengapa?</li> <li>4. Bisakah Bapak memberi tahu saya perubahan signifikan lainnya yang terjadi pada petani lain karena pengamatan mereka terhadap praktik Bapak atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru?</li> </ol> <p><b>VII. Persepsi untuk Masa Depan Pelatihan MTG – Proses dan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai proses pelatihan MTG?</li> <li>2. Apa pendapat Bapak tentang isi/materi mata pelajaran MTG?</li> <li>3. Apa yang dibutuhkan oleh Bapak dan alumni MTG lainnya?</li> </ol>

4. Apakah menurut Bapak masuk ke dalam grup – seperti MTG atau The Master Group dan jaringan diperlukan?
5. Menurut Bapak, apakah kelompok tersebut dapat berkembang menjadi unit usaha? Jika Ya, dapatkah Bapak menjelaskannya?

### **11.10. Ringkasan**

Evaluasi dan pemantauan, atau biasa disingkat monev untuk monitoring dan evaluasi, adalah kegiatan yang biasa dilakukan dalam keseharian, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan tempat kerja atau dimana pun, baik dalam bentuk evaluasi yang sekilas tanpa menggunakan kaidah-kaidah ilmiah maupun evaluasi yang dilakukan secara serius melalui penggunaan kaidah-kaidah ilmiah atau metode penelitian. Kedua jenis atau bentuk evaluasi ini pada hakikatnya sama, yaitu hendak mengetahui apakah sesuatu yang dievaluasi telah berhasil mencapai tujuannya atau apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Bab ini telah menguraikan secara singkat definisi, jenis, dan tujuan evaluasi. Juga telah dijelaskan tentang pelaksana evaluasi dengan berbagai kelemahan dan kelebihan. Selain itu, pada bab ini juga sudah dibahas tentang bias dan rancangan evaluasi, variabel dan pengukuran variabel dalam pelaksanaan evaluasi.

Uraian ini cukup untuk menjadi bekal bagi siapa pun yang hendak melakukan kegiatan evaluasi penyuluhan atau program dan kegiatan yang serupa yang ditujukan untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

\*\*\*

## **12. KELEMBAGAAN PENYULUHAN DALAM SISTEM PENYULUHAN**

### **12.1. Pengantar**

Pelaksanaan penyuluhan pertanian di Indonesia saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*. Uraian dalam bab ini dibatasi pada 2 (dua) poin pokok, yaitu: (1) Sistem kerja penyuluhan, dan (2) Jenis, bentuk, dan fungsi kelembagaan penyuluhan. Selain mengacu pada Permentan ini, uraian dalam Bab ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/Ot.140/4/2012 tentang *Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan*, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang *Pembinaan Kelembagaan Petani*.

### **12.2. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian**

Bab 2 Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian* menjelaskan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian terintegrasi dengan program pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani yang dilaksanakan melalui pendekatan Kawasan pertanian. Kebijakan penyelenggaraan penyuluhan diarahkan untuk pelaksanaan fungsi sistem penyuluhan sebagai berikut:

- (1) Memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha - mengembangkan *kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap* Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang profesional;

- (2) Mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lain untuk mengembangkan usahanya;
- (3) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- (4) Membantu Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani menjadi KEP yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;
- (5) Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespons peluang dan tantangan yang dihadapi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengelola usaha;
- (6) Menumbuhkan kesadaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
- (7) Melembagakan nilai budaya pembangunan Pertanian yang maju dan modern bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha secara berkelanjutan.

**Program** Penyuluhan Pertanian - Pasal 6:

- (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijabarkan ke dalam program.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan kawasan Pertanian untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

**Kebijakan** penyelenggaraan penyuluhan meliputi – Pasal 7:

- (1) Pengembangan kemitraan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani, dan KEP;
- (2) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk Pertanian melalui keterpaduan sistem agribisnis hulu hilir, teknologi tepat guna, dan teknologi informasi;

- (3) Fasilitasi pengembangan kemandirian dan *profesionalisme Penyuluh Pertanian* melalui peningkatan kompetensi profesi, dan lembaga sertifikasi profesi; dan
- (4) Pemenuhan prasarana, sarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

**Strategi** penyelenggaraan penyuluhan meliputi – Pasal 8:

- (1) Penguatan fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian sebagai penggerak utama penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan;
- (2) Fasilitasi penguatan posisi tawar petani dalam sistem agribisnis hulu-hilir melalui penumbuhan dan pengembangan KEP, serta penguatan aksesibilitas informasi agribisnis berbasis teknologi informasi (*cyber extension*);
- (3) Pengembangan Kelembagaan Petani melalui peningkatan profesionalisme dalam berusaha tani untuk pembangunan Pertanian berkelanjutan;
- (4) Peningkatan peran serta pemerintah daerah dan swasta dalam pemenuhan dan pengembangan prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- (5) Peningkatan kualitas ketenagaan Penyuluhan Pertanian melalui penataan, penempatan, dan pelatihan peningkatan profesionalisme; dan
- (6) Peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian menjelaskan 5 (lima) strategi penguatan sistem penyuluhan, yaitu:*

- (1) *Penguatan Kelembagaan* Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swadaya, dan Swasta;
- (2) *Penguatan ketenagaan* Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swadaya, dan Swasta;

- (3) *Penguatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan;*
- (4) *Penguatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian; dan*
- (5) *Pengembangan Penyuluhan Pertanian melalui kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership).*

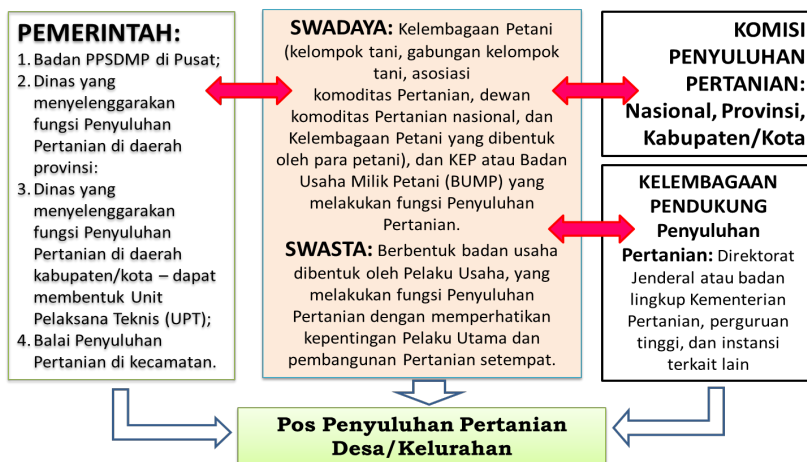
**Program Penyuluhan Pertanian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit meliputi:

- (1) *Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;*
- (2) *Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya, dan Swasta;*
- (3) *Pemberdayaan Kelembagaan Petani, yaitu kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan KEP;*
- (4) *Pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta;*
- (5) *Peningkatan sinergitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antar kelembagaan Penyuluhan Pertanian, antara kelembagaan Penyuluhan Pertanian dengan dinas teknis terkait, dan lembaga penelitian;*
- (6) *Peningkatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian melalui kerjasama kemitraan Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta;*
- (7) *Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Pertanian dan petani;*
- (8) *Penumbuhan dan pengembangan generasi muda Pertanian dalam upaya regenerasi petani berkelanjutan;*
- (9) *Penumbuhan dan pengembangan wirausahawan bidang Pertanian; dan*
- (10) *Peningkatan dukungan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian berbasis teknologi kekinian.*

### 12.3. Kelembagaan Penyuluhan menurut Peraturan dan Perundang-undangan

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*, “Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Penyuluhan Pertanian”. Pasal 11 Permentan Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018 menegaskan bahwa kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah terdiri atas: (1) Badan PPSDMP di Pusat; (2) Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi; (3) Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota; dan (4) Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan – Gambar 12.1.

#### KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN



Gambar 12.1. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian



Pasal 13 dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian* menjelaskan fungsi dari kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagai berikut:

- (1) Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berfungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian di daerah provinsi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang potensi komoditas pertaniannya dominan ditetapkan sebagai pengelola satuan administrasi pangkal (satmikal) penyuluhan pertanian.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
  - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
  - b. menyusun kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian nasional;
  - c. melakukan diseminasi inovasi dan penerapan teknologi pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
  - e. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya, Swasta dan Pemuda Tani Inovatif;
  - f. mengembangkan sistem manajemen informasi Penyuluhan Pertanian;
  - g. mengembangkan dan menguatkan KEP;
  - h. melaksanakan penyeliaan, pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Pertanian; dan

- i. fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya Penyuluhan Pertanian.

Sementara itu, pada Pasal 14 dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian* dijelaskan fungsi dari kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

- (1) Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berfungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang potensi komoditas pertaniannya dominan ditetapkan sebagai pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian.

Penjelasan tentang tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian disajikan pada Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian* sebagai berikut:

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 11 huruf d merupakan unit kerja non struktural dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha.
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pos simpul koordinasi (posko) pembangunan Pertanian berbasis kawasan. Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
  - a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota;
  - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;
  - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;

- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (posluhdes); dan
- h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.

**Sesuai dengan arahan pada Pasal 17, pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian dilakukan paling kurang melalui *perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan* - diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.**

Selain itu di dalam Permentan Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018, dalam pelaksanaan penyuluhan juga melibatkan kelembagaan penyuluhan swadaya dan swasta. *Kelembagaan Penyuluhan Swadaya* adalah kelembagaan penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama, baik perorangan maupun kelompok; dan *Kelembagaan Penyuluhan Swasta* adalah kelembagaan penyuluhan yang dibentuk oleh Pelaku Usaha dengan memperhatikan kepentingan Pelaku Utama serta pembangunan Pertanian setempat.

### **Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Pasal 22, *Pos Penyuluhan Pertanian*

*desa/kelurahan* berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk:

- (1) Menyusun programa Penyuluhan Pertanian;
- (2) Melaksanakan Penyuluhan Pertanian di *desa/kelurahan*;
- (3) Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
- (4) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- (5) Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- (6) Melaksanakan kegiatan rembug tani, pertemuan teknis, temu lapang, dan Metode Penyuluhan Pertanian lainnya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- (7) Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pelatihan bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha; dan
- (8) Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

### **Kelembagaan Petani dan Perannya dalam Penyuluhan dan Pembangunan Pertanian**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang *Pembinaan Kelembagaan Petani*, kelembagaan petani didefinisikan sebagai:

*“Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional”*

Kelembagaan petani meliputi: (1) kelompok tani; (2) gabungan kelompok tani; (3) asosiasi komoditas pertanian; dan (4) dewan komoditas pertanian nasional.

### **Peran Kelompok Tani dalam Penyuluhan**

Sebagai lembaga petani yang menjadi mitra kerja para penyuluh pertanian, kelompok tani dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai berikut:

- (1) **Kelas Belajar:** Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
- (2) **Wahana Kerja Sama:** Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan
- (3) **Unit Produksi:** Usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

### **12.4. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**

**Penyuluh Pertanian:** Pelaksana penyuluhan pertanian menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian meliputi: (1) *Penyuluh pertanian berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, (2) *Penyuluh Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu* penyuluhan pertanian atau dikenal sebagai penyuluh pertanian THL-TB atau juga THL-TBPP, (3) Penyuluh Pertanian Swadaya, dan (4) Penyuluh Pertanian Swasta.

## 12.5. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan penyuluhan pertanian diatur dalam Pasal 36 (1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian mengacu pada:

- (1) **Programa** - merupakan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; disusun secara berjenjang terdiri atas programa penyuluhan tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi & nasional; disusun oleh tim yang beranggotakan paling sedikit ketua pos penyuluhan desa/kelurahan, kepala urusan pembangunan desa/kelurahan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (Programa Penyuluhan Tingkat Desa/Kelurahan); disusun oleh tim yang beranggotakan paling sedikit pimpinan balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian, kepala seksi pembangunan kecamatan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (Tingkat Kecamatan – BPP); disusun oleh tim yang beranggotakan paling kurang pejabat struktural yang melaksanakan tugas di bidang program, evaluasi, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (Kabupaten).
- (2) **Materi** - disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan memperhatikan kemanfaatan, kelestarian sumber daya pertanian, dan pengembangan kawasan Pertanian; memuat unsur: (a). pengembangan sumber daya manusia; (b). peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan kelestarian lingkungan; dan (c). penguatan Kelembagaan Petani; disusun masing-masing oleh tim penyusun materi Penyuluhan Pertanian Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota – beranggotakan paling kurang pejabat struktural yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyuluhan dan Penyuluh Pertanian; dikemas dalam bentuk media sesuai dengan standar teknis media Penyuluhan

Pertanian - digunakan secara komunikatif dan efektif sesuai dengan karakteristik sasaran Penyuluh Pertanian;

- (3) *Metode* - disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; ditentukan oleh Penyuluh Pertanian dengan mengacu pada kegiatan dalam programa Penyuluhan Pertanian dan rencana kerja tahunan Penyuluh Pertanian.

## 12.6. Ringkasan

Kelembagaan penyuluhan yang ada saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*. Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 12.1., kelembagaan penyuluhan dapat dipilah menjadi dua kategori besar, yaitu kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, dan kelembagaan penyuluhan pertanian non-pemerintah. Kelembagaan penyuluhan pertanian non-pemerintah dapat dipilah lebih lanjut menjadi kelembagaan penyuluhan swadaya dan kelembagaan penyuluhan swasta, yang diharapkan dapat bekerja sama dengan kelembagaan pemerintah.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan penyuluhan, maka dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian pada semua tingkatan administrasi, dari nasional hingga kabupaten/kota, yang akan memberikan masukan pada pengembangan dan implementasi kebijakan dan program penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan di tingkat desa juga didorong untuk berperan, yaitu pos penyuluhan pertanian desa/kelurahan.

\*\*\*

## 13. KETRAMPILAN YANG DIBUTUHKAN OLEH PENYULUH

### 13.1. Pengantar

Efektif dan tidaknya suatu program penyuluhan sangat ditentukan oleh salah satunya adalah *proses* yang dilalui dalam keseluruhan kegiatan penyuluhan, dari tahapan *perencanaan atau pengembangan program, implementasi, pemantauan hingga evaluasi program penyuluhan*. Kegiatan-kegiatan *pengumpulan data, diskusi, pertemuan, workshop, perumusan tujuan, musyawarah, pelibatan para pihak, dan lainnya* yang dilakukan pada tahapan perencanaan atau pengembangan program mengharuskan seorang *penyuluh terlibat intensif dalam memfasilitasi prosesnya* sehingga menghasilkan sebuah rencana atau *program penyuluhan yang baik* – sesuai dengan kebutuhan petani atau masyarakat, dirasakan sebagai milik mereka, dan dengan rumusan tujuan serta strategi pencapaian tujuan yang *jelas, spesifik, terukur, realistis untuk waktu yang jelas*.

Peran penyuluh juga sangat strategis dan menentukan pada *tahapan implementasi atau pelaksanaan hingga pemantauan atau pengendalian dan evaluasi program*. Kemampuannya untuk memfasilitasi proses-proses dalam tahapan ini juga sangat menentukan efektivitas program penyuluhan.

Mengingat peran penyuluh dalam memfasilitasi keseluruhan proses tersebut – pengembangan dan implementasi program sangat menentukan, maka dibutuhkan keterampilan yang cukup agar seorang penyuluh dapat memfasilitasi proses secara efektif (Justice & Jamieson, 1999). Banyak cerita tentang kegagalan program-program pengembangan masyarakat, termasuk program dan kegiatan penyuluhan yang disebabkan oleh kegagalan dalam *memfasilitasi proses* pengembangan, implementasi dan evaluasi program – salah satu konsekuensi dari kegagalan dalam memfasilitasi proses ini adalah



*terbatasnya partisipasi petani atau para pihak* dalam keseluruhan tahapan pengembangan dan implementasi program.

Atas dasar pertimbangan ini, tentang posisi dan peran strategis penyuluh dalam keseluruhan proses, maka bab ini secara khusus membahas berbagai keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh pertanian. Bab ini memberikan uraian tentang beberapa keterampilan atau kemampuan khusus yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang penyuluh sebagai *fasilitator proses* agar suatu program dan kegiatan penyuluhan dapat efektif mencapai tujuannya - menjadi penyuluh atau fasilitator profesional.

### **13.2. Pengetahuan dan Keterampilan Merancang Proses**

Seorang penyuluh atau fasilitator harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam “merancang proses” agar tujuan kegiatan dapat dicapai dengan mudah dan baik. Umumnya *rancangan proses* ini dirumuskan dengan jelas dalam sebuah *Kerangka Acuan Kegiatan* (KAK) atau *Term of Reference* (TOR), dan beberapa poin berikut harus dimiliki oleh seorang penyuluh sebagai fasilitator:

- (1) Memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang teknik-teknik fasilitasi.
- (2) Memiliki ketrampilan dalam memfasilitasi kegiatan, dan
- (3) Mampu menerapkan teknik-teknik atau metode fasilitasi dalam kegiatan-kegiatan pengembangan, implementasi, dan evaluasi program.

Seorang penyuluh yang hendak memfasilitasi sebuah kegiatan penyuluhan, misalnya *Diskusi Kelompok* dalam memecahkan permasalahan terkait *Kelangkaan Pupuk*, sudah memikirkan lebih awal tentang *tujuan dari kegiatan diskusi, luaran yang diharapkan, para pihak yang perlu dihadirkan, lokasi kegiatan, lama pertemuan atau diskusi, bahan-bahan yang diperlukan, tindak lanjut yang mungkin untuk dilakukan, dan proses yang akan dilalui selama diskusi*, dari awal pembukaan hingga akhir atau penutupan. Semua poin ini

menjadi isi dalam struktur dokumen KAK atau TOR kegiatan, dan menjadi pegangan penyuluh dan pihak terkait, termasuk penyedia dana, sebagai acuan atau patokan dalam pelaksanaan kegiatan diskusi. Menghasilkan sebuah TOR yang baik memerlukan waktu dan tenaga untuk menyiapkannya, termasuk membahasnya dan menyepakatinya dengan pihak-pihak terkait.

Fasilitasi proses diskusi adalah keterampilan berikutnya setelah KAK atau TOR dapat diselesaikan. Seorang penyuluh yang akan berperan sebagai fasilitator dalam *Diskusi Kelompok* perlu menjelaskan di awal pertemuan tentang tujuan dari kegiatan *Diskusi Kelompok*, proses yang akan dilalui selama diskusi, dan luaran yang diharapkan dari diskusi. Hal ini dapat dilakukan melalui presentasi singkat dengan menggunakan “power point” atau “LCD” atau media visual lainnya, penjelasan tentang tujuan, proses, dan luaran, dari kegiatan diskusi.

Guna memastikan bahwa proses akan berlangsung efektif, seorang penyuluh atau fasilitator harus memastikan bahwa rancangan proses dapat dilaksanakan dengan efektif sesuai rencana. Oleh karena itu sehari atau beberapa saat sebelum kegiatan penyuluh sudah melihat dan memastikan bahwa lokasi kegiatan sudah siap sesuai dengan yang dipikirkan dalam rancangan proses, pengaturan tempat duduk, alat bantu kegiatan seperti pengeras suara, kertas plano dan papan flip-chart, dan lainnya.

Tingkat keseriusan dalam merancang proses akan lebih kompleks lagi ketika dalam kegiatan penyuluhan ada kegiatan workshop sehari atau beberapa hari atau kegiatan pelatihan bagi petani dalam pengelolaan kayu atau kebun. Seperti halnya persiapan dan pelaksanaan diskusi kelompok yang disajikan dalam ilustrasi di atas, seorang penyuluh yang akan berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan penyuluhan yang lebih kompleks harus mampu menyiapkan KAK atau TOR, dan memfasilitasi kegiatan workshop atau pelatihan petani ini dengan baik dan efektif. Pada kedua bentuk kegiatan ini seorang penyuluh bahkan perlu mengunjungi lokasi kegiatan di gedung dan lapangan atau kebun yang menjadi lokasi kegiatan. Ada hubungan antara rancangan

kegiatan dengan tujuan dan keluaran kegiatan. Pemilihan *kebun yang baik (lokasi petani sukses)* dengan *kebun yang buruk (lokasi petani yang tidak mengurus kebunnya dengan baik)* akan dilakukan untuk mencapai tujuan *peningkatan pengetahuan dan keterampilan*, dan merubah *sikap tidak mau menjadi tertarik dan mau*. Ketika persiapan ini pun, penyuluh sudah menjelaskan kepada pemilik kebun tentang tujuan kegiatan lapangan ini, dan apa-apa yang relevan dan cocok untuk dijelaskan oleh petani yang sukses dan tidak sukses ini.

### **13.3. Fasilitas Perkenalan**

Perkenalan adalah sebuah proses yang umum dilakukan dalam banyak kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan penyuluhan. Perkenalan tidak saja ditujukan agar (1) semua peserta dapat *saling mengenal satu sama lain*, tetapi juga untuk (2) mencairkan suasana "*kebekuan*" yang masih ada pada diri peserta kegiatan. Peserta dari sebuah kegiatan pada awalnya akan duduk atau mengambil tempat duduk dekat dengan orang-orang yang telah dikenalnya atau temannya yang berasal dari lembaga atau daerah yang sama. Perkenalan akan mencairkan suasana, menyebabkan setiap peserta dapat saling kenal, dan lebih dari itu akan (3) *muncul kemauan untuk mencari tahu informasi dan bertukar pengalaman*.

Fasilitas perkenalan dapat dilakukan dengan beberapa cara atau Teknik berikut:

- (1) Penyuluh atau fasilitator meminta setiap peserta untuk memperkenalkan dirinya dengan menyebut *nama, asalnya, pekerjaan*, dan *harapannya* terhadap kegiatan. Cara ini cocok untuk jumlah peserta yang tidak banyak, karena proses perkenalan akan lebih panjang dan memakan waktu jika jumlah peserta adalah banyak.
- (2) Penyuluh atau fasilitator memfasilitasi perkenalan dalam kelompok, kemudian setiap kelompok melaporkannya kepada peserta lain. Pembagian kelompok dapat dilakukan dengan meminta peserta untuk menyebut angka 1 sampai

dengan 5, dan peserta diminta untuk menemui dan berkumpul dengan peserta lain yang menyebut angka yang sama. Akan terbentuk 5 kelompok peserta, dan suasana mulai riuh dan rebut, dan pada saat bersamaan tawa canda akan muncul. Inilah tahap awal cairnya suasana. Pembagian kelompok juga dapat dilakukan dengan menggunakan gambar buah atau produk yang ada relevansinya dengan kegiatan, dan gambar atau tulisan tentang buah ini sudah ditempatkan pada tempat duduk peserta sebelum acara dimulai. Fasilitator pada waktunya tinggal menyebutkan “silakan periksa tempat duduknya dan temukan tulisan atau gambar buah. Silakan cari teman dengan gambar atau tulisan yang sama, dan silakan saling kenal dalam kelompoknya. Dalam nama, asal, profesi, dan harapan mereka, dan laporkan hasil perkenalan kepada forum”. Perkenalan dengan cara ini cocok untuk peserta yang berjumlah 25 – 35 orang.

- (3) Fasilitator memperkenalkan peserta dalam forum pleno, dan ini dapat dilakukan jika waktu terbatas, dan jumlah peserta cukup banyak, misalnya 40 hingga 50 orang. Jika waktu memang cukup tersedia, maka perkenalan dengan cara di atas dapat dilakukan. Fasilitator bertanya kepada peserta tentang asal atau profesi peserta, dan setiap peserta dapat mengangkat tangannya jika asal atau profesinya disebutkan, dan pada saat bersamaan mereka yang disebut menyebutkan namanya.
- (4) Cara lain yang juga dapat digunakan untuk perkenalan adalah dengan merancang dan membagikan “name tag” pada saat peserta tiba dan mendaftar pada panitia. Pada name tag dapat ditulis nama, profesi, asal atau informasi lainnya yang relevan. Cara ini cocok pada kegiatan-kegiatan tertentu dalam proses penyuluhan, misalnya pertemuan formal yang dilaksanakan di Gedung-gedung khusus, dan

waktu relatif terbatas untuk berinteraksi atau menggunakan cara perkenalan yang lain.

#### **13.4. Fasilitasi Penjelasan Tujuan, Proses dan Output**

Menjelaskan *proses dan output* adalah pekerjaan atau peran penting yang dimainkan oleh seorang fasilitator atau pelatih atau penyuluh. Proses ini dilakukan setelah usai kegiatan perkenalan peserta. Tujuan dari kegiatan “menjelaskan tujuan, proses dan output” adalah sebagai berikut:

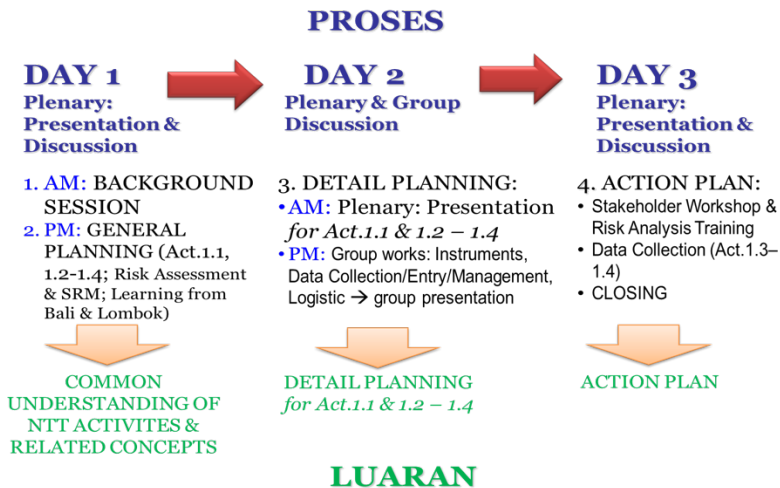
- (1) *Aga setiap peserta mengetahui dari awal tentang tujuan, proses dan output dari kegiatan.* Kegiatan penjelasan tujuan, proses, dan output ini menjadi sangat penting lagi untuk kegiatan yang dirancang selama satu hari penuh atau beberapa hari.
- (2) *Menjadi dasar untuk merangsang partisipasi dan komitmen peserta.* Boleh jadi setelah mengetahui tentang tujuan, proses dan luaran akan muncul dalam diri peserta ungkapan “wah menarik ini” atau “boleh juga nich untuk mengikuti kegiatan ini hingga akhir”, dan lainnya.
- (3) *Penjelasan tujuan, proses, dan luaran dapat menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan,* termasuk dalam menyepakati substansi, proses dan waktu, yang kemudian menjadi kontrak belajar.

Penjelasan *tujuan, proses, dan luaran* kegiatan biasanya dilakukan setelah acara pembukaan kegiatan – yang umumnya dihadiri oleh orang-orang penting atau tokoh. Usai break atau istirahat ngopi pagi, kegiatan dilanjutkan dengan perkenalan, penjelasan tujuan, proses, dan luaran. Biasanya kontrak belajar atau kesepakatan tentang substansi, proses, luaran dan waktu dilaksanakan setelah selesai penjelasan tujuan, proses dan luaran kegiatan. Ada beberapa Teknik yang dapat dilakukan oleh seorang fasilitator

atau penyuluh untuk menjelaskan tujuan, proses dan luaran ini, yaitu:

- (1) Presentasi dengan menggunakan slide ppt yang telah dipersiapkan – biasanya semalam sebelum acara atau waktu kegiatan.
- (2) Menjelaskan dengan cara presentasi visual atau berupa gambar-gambar atau kertas meta plan – disajikan secara urutan atau kronologis.
- (3) Menjelaskan dengan memegang hand-out jadwal dan menyebut atau menjelaskannya satu persatu.
- (4) Menjelaskannya secara lisan tanpa dukungan alat bantu visual – atau disampaikan dengan lisan di hadapan para peserta.

Contoh dari slide “Penjelasan Prose dan Luaran”



### 13.5. Fasilitasi Kontrak Belajar

Keahlian lain yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh sebagai fasilitator atau pelatih adalah kemampuan untuk membuat kesepakatan terhadap waktu dan aturan yang akan digunakan

selama kegiatan penyuluhan, pelatihan, workshop, dan lainnya. Sebuah proses belajar atau penyuluhan akan dapat mencapai tujuannya jika semua peserta sepakat dengan hal-hal yang menjamin bagi berlangsungnya sebuah proses yang efektif. Berikut adalah beberapa manfaat dari perlunya kontrak belajar dalam kegiatan penyuluhan:

- (1) Memastikan bahwa proses atau kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (2) Menjaga komitmen dan tanggung jawab dari setiap peserta untuk mencapai tujuan kegiatan.
- (3) Menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, tidak saja akan mengatur perilaku panitia atau penyuluh, tetapi juga mengatur perilaku peserta kegiatan.
- (4) Memastikan bahwa setiap peserta berada di tempat tepat pada waktunya.

Kontrak belajar biasanya dilakukan bersamaan atau setelah selesai kegiatan *penjelasan tujuan, proses, dan luaran*, dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- (1) Jumlah hari pelaksanaan kegiatan – sehari penuh atau beberapa hari.
- (2) Waktu atau jam pelaksanaan kegiatan – pagi dan sore atau pagi saja atau sore saja; atau jam memulai dan mengakhiri kegiatan atau waktu istirahat, shalat dan makan.
- (3) Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berlangsungnya kegiatan – berbicara atau rebut saat kegiatan atau terkait dengan penggunaan HP, dan lainnya.
- (4) Sanksi bagi yang melanggar kesepakatan – telat masuk atau hadir dalam kegiatan, atau membuat keributan selama kegiatan.

Kontrak belajar dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Fasilitator atau penyuluh membuat rumusan kontrak atau poin-poin yang perlu disepakati sebelum acara dimulai, dan tinggal menunjukkannya kepada peserta pada saat kontrak belajar.
- (2) Fasilitator dengan menggunakan kertas plano atau flip-chart meminta pendapat peserta tentang hal-hal yang perlu disepakati bersama peserta sebelum kegiatan dimulai. Semua pendapat peserta dicatat dan ditampung, kemudian disepakati dalam forum pleno. Hasil catatan dan kesepakatan tentang waktu, apa yang boleh dan tidak boleh kemudian ditempatkan di ruangan atau terpajang di tembok dan akan menjadi acuan selama pelaksanaan kegiatan.
- (3) Fasilitator hanya secara lisan membuat kesepakatan dengan peserta kegiatan tanpa dicatat dan dipajang di lokasi kegiatan.

Berikut contoh dari kontrak belajar:

#### **KONTRAK BELAJAR: PELATIHAN PENGOLAHAN HHBK**

- (1) Acara dimulai jam.....dan berakhir jam.....
- (2) Setiap peserta sudah harus berada di ruang acara .....menit sebelum acara dimulai.
- (3) Dilarang merokok di dalam ruang acara.
- (4) Hand Phone (HP) harus dimatikan atau disilent selama berada dalam ruang acara.
- (5) Setiap peserta wajib mengikuti acara sampai selesai.
- (6) Tidak diperkenankan untuk berbicara sendiri-sendiri ketika fasilitator atau peserta lainnya mendapat giliran untuk berbicara.



### **13.6. Fasilitasi Curah Pendapat**

Curah pendapat atau brainstorming adalah kegiatan penting dalam penyuluhan. Salah satu prinsip dalam penyuluhan adalah bahwa orang dewasa hadir dalam kegiatan penyuluhan dengan membawa banyak pengalaman dan ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, maka memfasilitasi proses curah pendapat yang efektif adalah penting dalam kegiatan penyuluhan. Lebih dari itu, curah pendapat tidak saja dalam konteks pembelajaran, tetapi juga dalam membuat keputusan terbaik atas dasar pendapat yang ada. Berikut beberapa alasan bagi perlunya kegiatan curah pendapat:

- (1) Mendapatkan ide dan pendapat sebanyak-banyaknya.
- (2) Bagian dari proses partisipasi dan pembelajaran.
- (3) Bagian dari proses menciptakan rasa memiliki, memunculkan komitmen dan tanggung jawab terhadap keputusan
- (4) Membangun kemampuan dalam memilah-milah atau mengelompokkan isu atau permasalahan. Umum setelah semua pendapat disampaikan dan dicatat, pendapat-pendapat yang mirip atau berada dalam kelompok atau kategori yang sama akan dikelompokkan dalam kelompok atau kategori yang sama. Ini juga membantu peserta kegiatan untuk berpikir sistematis dan terstruktur.

Beberapa Teknik yang dapat digunakan oleh penyuluh atau fasilitator dalam memfasilitasi curah pendapat adalah sebagai berikut:

- (1) Dilakukan dalam forum pleno dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada peserta. Ide atau pendapat yang muncul kemudian ditulis di papan tulis atau layer lap top.
- (2) Membagikan kertas meta plan kepada setiap peserta dan meminta peserta untuk menuliskan pendapatnya pada kertas yang dibagikan. Arahan yang perlu diberikan dalam menuliskan pendapatnya antara lain misalnya “Tuliskan

satu ide dalam 1 kertas” atau “Tuliskan paling banyak 2 ide dalam 1 kertas” atau “Tuliskan idenya hanya dengan menggunakan 2-3 katan, dan bukan paragraph”, atau “Tuliskan idenya dengan menggunakan HURUF BESAR agar dapat dibaca oleh peserta lainnya ketika ditempel di papan tulis”, dan lainnya. Semua tulisan peserta kemudian ditempel di depan ruangan pada tempat atau lokasi yang disediakan.

- (3) Meminta peserta untuk memikirkan sesuatu yang terkait dengan suatu isu, misalnya “faktor-faktor penyebab kemiskinan”. Maka setiap peserta sudah akan memikirkan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan, dan dengan menggunakan bola plastik atau bola karet atau bola kertas, penyuluh atau fasilitator melemparkan bola ke seorang peserta dan peserta ini akan menyebutkan 1 faktor. Bola kemudian dioper ke peserta lainnya hingga semua peserta kebagian bola. Bola akan berhenti berpindah setelah semua ide tercurahkan dan dicatat di papan tulis atau layer laptop.

Berikut beberapa aturan atau kisi-kisi dalam memfasilitasi proses curah pendapat atau brainstorming:

### **Aturan Curah Pendapat (Brainstorming)**

- (1) Jangan menilai atau mengevaluasi ide/gagasan
- (2) Jumlah (pendapat/ide/gagasan) adalah tujuan utama
- (3) Semakin “liar” semakin baik
- (4) Catat semua pendapat/ide/gagasan
- (5) Menggabungkan beberapa pendapat menjadi satu pendapat/ide/gagasan baru adalah OK

### **13.7. Fasilitasi dalam Memimpin Diskusi**

Keahlian lain yang harus dimiliki oleh penyuluh atau fasilitator adalah ketrampilan dalam memimpin diskusi atau rapat/pertemuan kelompok. Banyak kegiatan rapat atau pertemuan yang dilakukan tidak menghasilkan apa-apa yang bermakna bagi peserta rapat atau pertemuan. Belajar dari pengalaman tentang banyaknya kegiatan rapat yang tidak produktif dan menghabiskan waktu, maka ketrampilan penyuluh atau fasilitator dalam memimpin rapat atau pertemuan yang efektif diperlukan dengan tujuan sebagai berikut.

- (1) Rapat atau diskusi dapat membuahkan hasil yang ideal - memuaskan.
- (2) Tujuan rapat jelas dan proses rapat atau diskusi berlangsung efektif – penting untuk merumuskan dan menyepakati agenda rapat, dan pembatasan waktu rapat.
- (3) Memfasilitasi partisipasi dari semua peserta.
- (4) Keputusan rapat akan menjadi milik dan merasa dimiliki oleh semua peserta rapat.
- (5) Waktu dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.
- (6) Rapat berlangsung secara terstruktur dan terkendali sesuai dengan agenda rapat yang sudah disepakati, karena berpindah dari satu agenda ke agenda berikutnya.

Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh penyuluh atau fasilitator kegiatan rapat atau diskusi atau pertemuan adalah sebagai berikut:

- (1) Memastikan bahwa sebelum rapat atau pertemuan semua peserta sudah mengetahui agenda rapat.
- (2) Menyepakati agenda rapat atau agenda pertemuan atau rapat.
- (3) Memimpin rapat dengan efektif - berpindah dari agenda satu ke agenda berikutnya.
- (4) Mengendalikan rapat agar tidak ada dominasi seseorang.
- (5) Mengatur jalannya rapat dan membatasi pembicaraan yang menyimpang jauh dari agenda rapat

- (6) Mengelola waktu dengan baik – tidak bertele-tele dan membuang waktu.
- (7) Memfasilitasi pembuatan keputusan bersama; dan
- (8) Kemampuan untuk merumuskan langkah atau tindak lanjut.

### **13.8. Keterampilan Lain yang Relevan**

Selain yang telah diuraikan pada bagian di atas, berikut beberapa catatan dan keterampilan lain yang perlu dimiliki oleh seorang penyuluh atau fasilitator.

#### **Peran Penyuluh sebagai Pelatih atau Fasilitator dalam Penyuluhan**

Penyuluh atau Fasilitator dalam sebuah kegiatan penyuluhan dan pelatihan mempunyai **PERAN** sebagai berikut:

- (1) Memfasilitasi proses pelatihan – *Mengarahkan Proses*.
- (2) Mendengar pengalaman, masukkan dan permasalahan yang diungkapkan oleh petani.
- (3) Mendukung petani untuk berbagi pengalaman dan belajar diantara mereka sendiri.
- (4) Bukan orang yang bertanggung jawab atas substansi atau isi atau materi pelatihan.
- (5) Meyakinkan bahwa terjadi partisipasi yang merata dan terbangun pemahaman antara peserta pelatihan.
- (6) Memberikan informasi dalam rangka membantu petani meningkatkan ketrampilan dalam membuat keputusan.
- (7) Tidak bias dan tidak memaksakan ide atau gagasannya selama proses pelatihan – *netral terhadap isi*.
- (8) Mencegah untuk mengendalikan ”hasil” (*outcomes*) pelatihan.
- (9) Membangun konsensus diantara peserta pelatihan – *merancang dan melaksanakan pertemuan yang efektif*.

Oleh karena itu, seorang pelatih atau fasilitator harus memiliki ketrampilan dalam hal-hal berikut ini:

### **Keterampilan dasar**

- (1) Keterbukaan (*Openess*)
- (2) Sensitif (*Sensitivity*)
- (3) Empati (*Empathy*)
- (4) Minat (*Interest*)

### **Keterampilan Komunikasi**

- (1) Mengamati dan mendengar (*Observe & listen*): Ketika ***mengamati proses***, yang dilakukan adalah melihat apa yang terjadi tanpa menyimpulkan, memahami simbol-simbol non-verbal, dan memantau kerja kelompok secara objektif. Saat mengamati proses kelompok dalam fasilitasi atau pelatihan, maka yang diamati antara lain: SIAPA mengatakan APA? SIAPA melakukan APA? SIAPA melihat kepada SIAPA saat pembicaraan berlangsung? SIAPA menghindari pada SIAPA? SIAPA duduk di samping siapa, dan apakah selalu demikian? BAGAIMANA semangat para peserta? Bagaimana pemahaman dan ketertarikan peserta? Apakah mereka terus memperhatikan JAM DI TANGAN MEREKA? Apakah peserta KELUAR-MASUK? Ketika ***mendengarkan***, seorang fasilitator atau pelatih harus melakukan hal-hal berikut: tunjukkan ketertarikan, pengertian, empati, etc., dan sebaliknya JANGAN memotong pembicaraan, menantang, memaksa agar cepat menyelesaikan pembicaraan, menyimpulkan terlalu cepat, tidak terpengaruh oleh emosi pembicara!
- (2) Menanyakan dan menjawab pertanyaan (*Ask & answer questions*):
- (3) Pendalaman (*Probe*):
- (4) Meringkas (*Summarize*):
- (5) Memberikan dan menerima umpan balik (*Give and receive feedback*):

### **Keterampilan dalam mengelola kelompok**

- (1) Membangun kepercayaan dan kepercayaan diri (*Build trust & confidence*)
- (2) Mendorong partisipasi yang imbang (*Encourage equal participation*)
- (3) Membangun dinamika kelompok dan kerja team (*Build group dynamics & teamwork*)
- (4) Memantau peran dan tahapan perkembangan kelompok (*Monitor group roles & stages*)
- (5) Mendorong saling pengertian (*Promoting mutual understanding*)
- (6) Mendukung proses pembuatan keputusan secara partisipatif (*Support participatory decision making*)
- (7) Mendukung pemecahan masalah dan konflik (*Support problem & conflict solving*)

### **Keterampilan dalam perencanaan**

- (1) Mengidentifikasi dan memobilisasi kelompok-kelompok terkait
- (2) Memperkenalkan proses dan langkah-langkah dalam pelatihan atau fasilitasi
- (3) Menginisiasi dan mendukung implementasi kegiatan pelatihan
- (4) Mendukung proses eksperimen, refleksi dan analisis
- (5) Mengidentifikasi dan mengorganisir kesempatan pembelajaran
- (6) Mendukung terlaksananya kegiatan monev mandiri

### **Fasilitator berbeda dari GURU atau DOSEN karena GURU atau DOSEN umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:**

- (1) Haruslah seseorang yang ahli dan memiliki semua jawaban atas semua persoalan
- (2) Datang dengan suatu presentasi yang telah dipersiapkan
- (3) Tidak tertarik dengan pengetahuan dan pengalaman serta latar belakang petani
- (4) Lebih fokus pada teori
- (5) Mengendalikan semua proses dan isi
- (6) Menguasai pembicaraan
- (7) Hanya memperkenankan untuk bertanya pada waktu-waktu tertentu

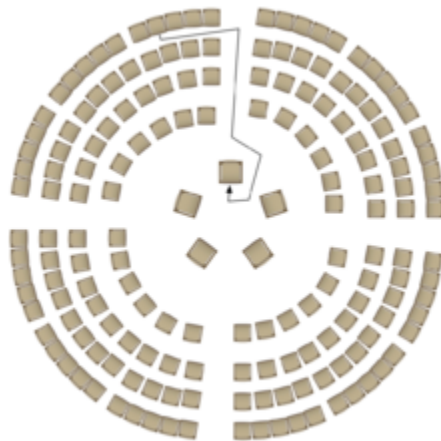
### **Teknik-atau Metode Pelatihan/Fasilitasi**

- (1) Pertanyaan-pertanyaan
- (2) Bagaimana melatih dalam lingkungan kerja “on the job”
- (3) Bagaimana menyiapkan dan memimpin diskusi
- (4) Bagaimana menyiapkan dan memberikan “kuliah”
- (5) Studi kasus dan ”bermain peran”

### **Metode Pelatihan/Fasilitasi**

- (1) Kuliah (*lecture*)
- (2) Diskusi terarah (*focus group discussion*)
- (3) Demonstrasi
- (4) Pelatihan terstruktur
- (5) *Brainstorming* (curah pendapat)
- (6) *Plenary Discussion* (diskusi pleno)
- (7) Diskusi kelompok kecil (*buzz group discussion*)
- (8) Kunjungan silang (*cross visit*)
- (9) Bermain peran (*role play*)
- (10) Penyemangat (*energizers*): Adalah kegiatan singkat yang dimaksudkan untuk meningkatkan energi di dalam kelompok dengan melibatkan mereka dalam kegiatan fisik, tertawa, atau cara lain yang melibatkan mereka secara kognitif (memecahkan persoalan). Metode ini dapat digunakan dalam berbagai ukuran kelompok pada suatu kegiatan pelatihan atau workshop. Contoh sederhana dari energizer adalah dengan “bermain”, “bernyanyi” yang dirancang sedemikian rupa sehingga menciptakan kegembiraan, rileks, dan suasana “bermain” pada diri peserta pelatihan atau workshop.
- (11) Percobaan mandiri
- (12) Belajar mandiri
- (13) *Fishbowl Discussion* (diskusi “mangkok ikan”): Adalah suatu metode diskusi yang digunakan untuk membahas topik-topik tertentu dalam suatu kelompok yang besar. Metode ini umumnya digunakan dalam mendorong dan memfasilitasi

partisipasi semua pihak atau peserta kegiatan (pelatihan). Kelebihan dari metode ini adalah memberi peluang kepada semua pihak atau peserta untuk berpartisipasi dalam diskusi. Metode diskusi *fishbowl* pada dasarnya membagi peserta pelatihan/workshop kedalam dua kelompok. Kelompok pertama, yang umumnya berukuran kecil (5 – 10 orang) akan berada pada lingkaran dalam dan aktif mendiskusikan topik yang dipilih untuk didiskusikan, dan kelompok kedua akan duduk melingkar di luar dari kelompok pertama dan bertindak sebagai pendengar setia. Dalam diskusi *fishbowl*, dipilih seorang moderator dan seorang pencatat hasil diskusi. Ada dua alternatif dalam “*fishbowl discussion*”, yaitu “*Open fishbowl*” dan “*close fishbowl*” *discussion*. Pada “*open fishbowl discussion*”, peserta dari kelompok dua (yang duduk di lingkaran luar) dapat berpartisipasi dalam diskusi dengan cara “masuk dan menempati” kursi atau tempat kosong yang disediakan pada kelompok satu yang sedang berdiskusi di lingkaran dalam. Ketika sudah selesai menyampaikan ide atau pendapatnya, peserta ini atau peserta lainnya bisa meninggalkan kursinya dan kembali ke tempat kosong yang berada pada kelompok dua (kelompok pendengar atau pengamat di lingkaran dua. Metode *fishbowl* dapat diilustrasikan melalui gambar berikut ini.



Pengaturan kursi dalam diskusi *fishbowl*. Gambar ini menunjukkan adanya empat lingkaran kursi yang mengelilingi sebuah kelompok kecil berukuran lima kursi dengan satu kursi dikosongkan. Tanda panah menunjukkan bagaimana setiap peserta diskusi yang berada di lingkaran luar dapat masuk dan ikut berdiskusi di lingkaran dalam.



Hubungan antara metode & teknik pelatihan dengan hasil yang diharapkan dan ukuran kelompok dapat disajikan sebagai berikut.

Metode atau Teknik	Sesuai untuk meningkatkan/merangsang/mendorong										
	Pengetahuan	Ketrampilan	Sikap	Kreatifitas	Berpikir	Diskusi	Ide & solusi	Semangat	Individu	Kelompok kecil	Kelompok besar
Kuliah											x
Ilustrative Talk											x
Pembiacara Tamu											x
Tanyajawab						x			x	x	x
Diskusi terarah						x				x	
Debat								x		x	
Fishbowl						x				x	
Diskusi panel						x					x
Diskusi kelompok										x	x
Curah pendapat				x	x					x	
Percobaan					x	x	x		x	x	
Demonstrasi	x	x	x							x	
Kunjungan Silang						x		x		x	
Bermain Peran		x	x					x		x	
Penyemangat (Energizers)								x		x	x

### 13.9. Ringkasan

Penyuluh sebagai sumber dalam proses komunikasi dalam penyuluhan menjadi salah satu unsur penentu efektivitas komunikasi, yang pada dirinya melekat antara lain faktor-faktor penentu efektivitas komunikasi – keterampilan komunikasi, pengetahuan, sikap, aspek sosial dan budaya.

Selain faktor-faktor tersebut, penyuluhan pertanian yang efektif dalam merubah perilaku dan tindakan petani akan dapat diwujudkan jika penyuluh memiliki *keterampilan dalam memfasilitasi proses-proses* dalam keseluruhan kegiatan penyuluhan, dari proses pengembangan dan implementasi program hingga proses pemantauan dan evaluasi. Proses-proses ini mengharuskan seorang penyuluh berperan dalam memfasilitasi kegiatan dan bukan menggarui kegiatan. Beberapa keterampilan fasilitasi yang dibutuhkan oleh seorang penyuluh antara lain keterampilan merancang dan merencanakan kegiatan, keterampilan perkenalan, keterampilan dalam menjelaskan proses dan luaran, fasilitasi kontrak belajar, curah pendapat, memimpin diskusi, dan keterampilan lainnya yang relevan.

\*\*\*

## BAGIAN III PENYULUHAN DALAM PRAKTIK

### 14. ANALISIS RANTAI NILAI: PENGEMBANGAN PROGRAM PENYULUHAN & AGRIBISNIS

#### 14.1. Pengantar

*Pengembangan agribisnis* seringkali menjadi alternatif dalam perbaikan penghidupan petani dan masyarakat pedesaan, dan pendekatan ini telah banyak dilakukan, tidak saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh banyak lembaga termasuk yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia, Department for International Development (DFID), AusAID dan Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR) melalui Proyek *AIPD-Rural* dan *Smallholder Agribusiness Development Initiative (SADI)*, Unram dan Massey University melalui Proyek *East Indonesia Innovative Farm Systems and Capability for Agribusiness Activity (IFSCA)*.

Namun demikian, berbagai upaya perbaikan penghidupan petani dan masyarakat pedesaan melalui pengembangan agribisnis tidak berjalan mulus dan sukses sebagaimana yang diharapkan. Banyak diantara program dan kegiatan yang dihajatkan untuk perbaikan penghidupan petani dan masyarakat pedesaan melalui pengembangan dan pendekatan agribisnis tersebut kurang berhasil dan bahkan berakhir dengan kegagalan. Banyak faktor yang ikut berpengaruh terhadap kegagalan pengembangan agribisnis, dan salah satunya adalah kegagalan para pembuat kebijakan dan pelaksana program dalam memahami secara utuh dan komprehensif sistem agribisnis yang ada.

Tulisan ini menawarkan “Analisis Rantai Nilai” (*Value Chain Analysis*) sebagai salah satu pendekatan dalam memahami sistem agribisnis secara komprehensif, yang kemudian dapat memberikan gambaran tentang kendala dan peluang bagi pengembangan bisnis di

bidang pertanian. Di bagian akhir tulisan ini disajikan hasil analisis rantai nilai kayu di Kabupaten Sumbawa guna memudahkan pemahaman bagaimana analisis rantai nilai menjadi dasar dalam pengembangan agribisnis bagi perbaikan penghidupan petani dan masyarakat pedesaan. Analisis ini juga memberi gambaran tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja program pengembangan agribisnis.

## 14.2. Konsep Rantai Nilai

Rantai nilai didefinisikan sebagai semua kegiatan yang dilakukan oleh semua aktor di sepanjang rantai dari sub-sistem input hingga ke konsumen akhir yang memberi sumbangan atau kontribusi terhadap nilai dari produk akhir – *“Value chain is defined as all activities carried out by all actors at the chain from input subsystem to the final customers that contribute to the value of the final products”* (M4P, 2011). Definisi lain dari rantai nilai diberikan oleh beberapa penulis sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut ini:

*“Kaplinsky dan Morris (2002) mendefinisikan rantai nilai sebagai sejumlah kegiatan yang diperlukan untuk membawa produk atau barang atau jasa dari tahapan konsepsi, melalui fase-fase berbeda dalam proses produksi, transformasi dan pengantarannya ke konsumen akhir, dan kemudian dibuang setelah digunakan”* – *“Kaplinsky and Morris (2002) define a value chain as the full range of activities which are required to bring a product or service from conception, through the different phases of production, transformation and delivery to final consumers, and eventual disposal after use”*. Dalam pandangan mereka, analisis rantai nilai dimaksudkan untuk mendalami bagaimana kegiatan-kegiatan dilakukan dan memahami bagaimana nilai diciptakan dan dishare atau dibagi diantara para pelaku di sepanjang rantai” (in Nang’ole EM, at. al., 2011).

*“Suatu rantai nilai adalah rantai dari kegiatan-kegiatan dari suatu perusahaan yang beroperasi dalam suatu industri khusus. Unit bisnis adalah tingkatan yang cocok bagi konstruksi suatu rantai nilai, dan bukan pada tingkatan divisi atau korporasi. Suatu produk melewati semua kegiatan di sepanjang rantai secara berurutan, dan pada setiap kegiatan produk tersebut mendapatkan nilai tambah. Rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut memberikan lebih banyak tambahan nilai terhadap produk ketimbang penjumlahan nilai yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang terpisah”* – “A

value chain is a chain of activities for a firm operating in a specific industry. The business unit is the appropriate level for construction of a value chain, not the divisional level or corporate level. Products pass through all activities of the chain in order, and at each activity the product gains some value. The chain of activities gives the products more added value than the sum of the independent activity's value". (Wikipedia and access June 2014).

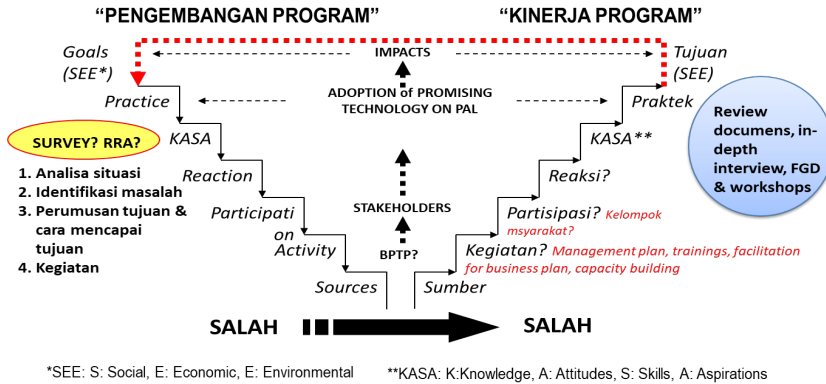
Atas dasar definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum suatu rantai nilai bermakna sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh setiap aktor atau pelaku di sepanjang rantai, dari sub-sistem input hingga konsumen akhir, yang memberikan tambahan nilai terhadap produk dan atau jasa akhir. Menjual produk segar seperti buah-buahan dan sayuran tanpa kegiatan penciptaan nilai tambah adalah lawan dari definisi ini atau ini juga menjadi hasil dari sebuah analisis rantai nilai yang menunjukkan tidak adanya kegiatan yang dilakukan untuk memberi nilai tambah terhadap produk tersebut (dikemas, dilabel, disortasi, dan lainnya.).

Analisis rantai nilai penting dalam memahami praktik atau kegiatan dari setiap aktor, dan ini juga akan merefleksikan tingkat *pengetahuan, ketrampilan, sikap dan aspirasi* (harapan, ambisi dan motivasi - expectations, ambition and motivation) *dari para pelaku pada rantai nilai*. Petani atau pedagang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menambah nilai terhadap produk yang mereka hasilkan atau diperdagangkan, dan oleh karena itu mereka tidak melakukan kegiatan tertentu untuk menambah nilai terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam kasus lain, boleh jadi mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang kegiatan yang perlu untuk dilakukan untuk menambah nilai terhadap produk yang dihasilkan, tetapi mereka tidak melakukannya karena budaya lokal atau modal yang tidak cukup untuk melakukannya.

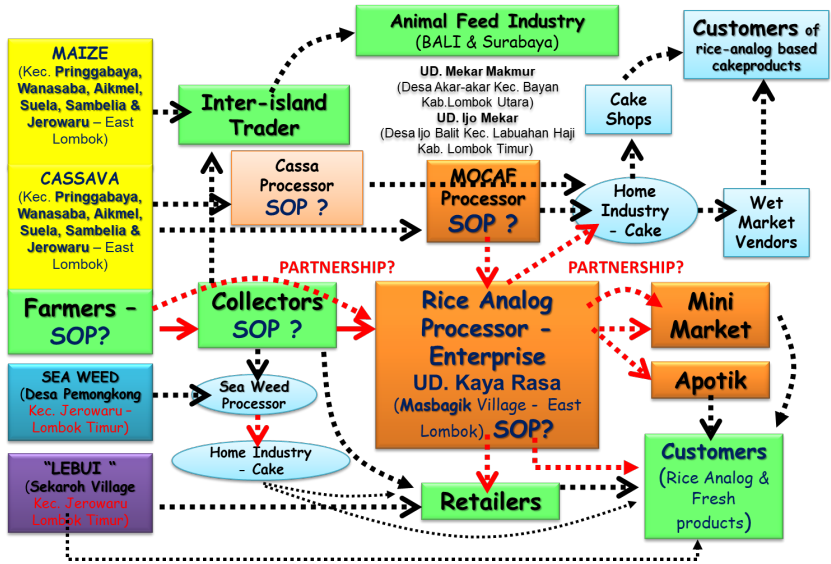
Atas dasar alasan ini, maka analisis rantai nilai penting untuk memahami kenapa pelaku pada rantai nilai *melakukan kegiatan atau tidak melakukan* kegiatan tertentu untuk menciptakan atau memberikan nilai lebih terhadap produk akhir.

Dalam konteks Model TOP dari Bennet (Gambar 14.1), istilah “kegiatan” yang dirumuskan dalam rantai nilai bermakna “praktik” atau “practices” (*observable behaviour*) atau “adopsi” dari suatu konsep, inovasi dan teknologi. Sebagaimana terlihat dari Bennet’s TOP Model, perubahan praktik adalah hasil dari perubahan pada aspek *pengetahuan, sikap, ketrampilan dan aspirasi (changes in peoples’ knowledge, attitudes, skills and aspirations - KASA)*, dan perubahan ini hanya akan terjadi ketika masyarakat *berpartisipasi* pada *program atau kegiatan* yang dilakukan khusus untuk itu. Pada sudut kiri paling bawah dari Bennet’s TOP model, terlihat bahwa ketersediaan *sumber daya atau modal seperti lahan, sumber daya manusia, dana, fasilitas dan kelompok* (masing-masing dikenal sebagai *natural, human, financial, physical dan social capitals*). Ketika sumber daya tidak tersedia atau tidak memadai, maka kegiatan tidak akan dapat dilakukan sebagaimana direncanakan, dan ini akan berimplikasi pada terbatasnya partisipasi, perubahan KASA, tidak terjadinya perubahan praktik, dan pada akhirnya tidak akan menyebabkan perubahan bermakna pada kondisi sosial ekonomi dan lingkungan (*social, economy and environment*).

### Bennet’s Targeting Outcomes of Programs (TOP) Model: A Conceptual Framework for program DEVELOPMENT, MONITORING & EVALUATION



\*SEE: S: Social, E: Economic, E: Environmental      \*\*KASA: K:Knowledge, A: Attitudes, S: Skills, A: Aspirations



Gambar 14.1. Model Konseptual & Analisis Rantai Nilai Beras Analog di Lombok Timur

Dalam perspektif ilmu penyuluhan (*extension science*), pemahaman terhadap kegiatan atau praktik dari semua aktor atau pelaku di sepanjang rantai nilai akan bermakna juga memahami tingkat

*pengetahuan, sikap, ketrampilan dan aspirasi, reaksi, partisipasi, kegiatan* yang dilakukan sebagai bagian dari program *serta tingkat ketersediaan sumber daya* (termasuk juga teknologi pengolahan – dalam konteks produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu). Melalui pemahaman yang komprehensif ini, maka akan dapat diidentifikasi alternatif intervensi dalam rangka meningkatkan kinerja rantai nilai. Dengan kata lain, perbaikan yang efektif terhadap rantai nilai hanya dapat dilakukan dengan baik melalui kegiatan analisa rantai nilai secara kritis.

### **14.3. Manfaat dan Kegunaan Analisis Rantai Nilai**

Menyimak uraian yang komprehensif tentang *Analisis Rantai Nilai* (M4P, 2008) dan penggunaannya pada berbagai jenis komoditas dalam rangka perbaikan penghidupan petani atau pengentasan kemiskinan (Waldron, et al., 2013) (Wandschneider, Baker, & Natawidjaja, 2013) (Flewelling, Fox, Puspadi, & Adar, 2013) (Cambon & Rachaputi, 2013), analisis rantai nilai dapat bermanfaat dalam hal-hal antara lain sebagai berikut:

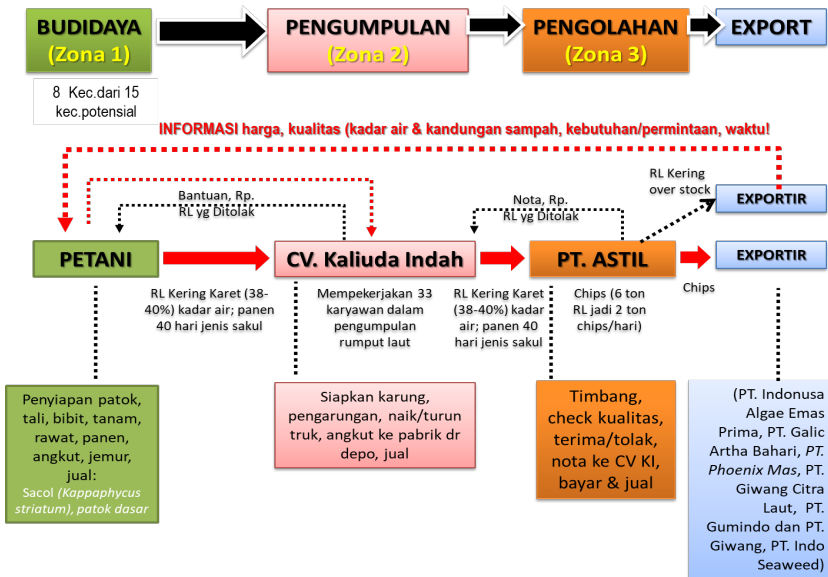
- (1) *Mengetahui proses-proses utama* yang terjadi atas suatu barang atau jasa, seperti misalnya yang terkait dengan rantai nilai kayu jati akan melibatkan proses penyediaan benih dan bibit, penjualan dan distribusi bibit, penanaman oleh petani di lahannya, dan ketika sudah waktunya hasilnya kemudian dijual atau diborongkan kepada pembeli kayu atau industri pengolahan kayu, dan setelah itu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, yang kemudian berakhir di konsumen produk olahan kayu jati (dalam bentuk meubelair dan atau bahan bangunan).
- (2) *Mengetahui siapa saja yang menjadi pelaku atau aktor* dari pergerakan atau pindahnya barang dan jasa dari produsen ke konsumen akhir, karena melalui analisis rantai nilai dilakukan proses pemetaan aktor atau pelaku rantai nilai.
- (3) *Mengetahui darimana suatu barang diproduksi dan kemana perginya* serta konsumen akhirnya dimana.



- (4) *Mengetahui praktik atau kegiatan-kegiatan* apa yang dilakukan oleh para aktor pada rantai nilai dalam rangka memindahkan dan atau menambah nilai terhadap barang dan jasa yang dikelolanya.
- (5) *Mengetahui perubahan nilai atas suatu barang dan jasa*, dari sejak diproduksi oleh produsen hingga sampai di tangan konsumen akhir. Simpul-simpul terjadinya proses penambahan nilai atas suatu barang dan jasa akan teridentifikasi dengan baik melalui analisis rantai nilai.
- (6) *Mengetahui constraints atau kendala-kendala* yang ada dan dihadapi oleh para pelaku pada sepanjang rantai nilai. Analisis rantai nilai akan memberikan gambaran tentang siapa yang melakukan kegiatan yang ideal dalam rangka menambah nilai terhadap suatu produk, dan siapa yang tidak melakukan kegiatan untuk menambah nilai terhadap suatu produk. Telaahan atas praktik atau kegiatan para aktor rantai nilai dapat dilakukan lebih dalam dengan memeriksa atau mengkaji lebih dalam tentang kondisi pengetahuan, sikap, keterampilan, aspirasi dan motivasi (Sumber daya Manusia), dan kondisi subervdaya-sumber daya lainnya (Sumber daya Alam, Sumber daya Keuangan, Sumber daya Fisik/Sarana-Prasarana/Fasilitas/Teknologi, dan Sumber daya Sosial).
- (7) *Mengetahui distribusi manfaat atau keuntungan pada berbagai aktor pada rantai nilai*. Rantai nilai yang kinerjanya kurang baik akan ditunjukkan oleh terjadinya distribusi manfaat atau keuntungan yang timpang dan tidak adil sedangkan pada sistem rantai nilai yang baik akan menunjukkan distribusi keuntungan dan manfaat yang adil dan proporsional.
- (8) *Mengetahui bagaimana tata laksana (governance), pengelolaan rantai nilai (management), dan pola hubungan antara aktor dalam rantai nilai* – komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan integrasi. Rantai nilai yang buruk akan menunjukkan bahwa ada aktor yang menyembunyikan informasi dari pelaku rantai nilai lainnya dan boleh jadi dengan cara seperti ini muncul perilaku

untuk mengeksploitasi aktor lainnya. Sistem rantai nilai seperti ini tidak akan berlanjut karena ada pihak yang merasa dieksploitasi dan ada pihak yang mengeksploitasi.

Gambar 14.2 berikut memberi ilustrasi bagaimana analisis rantai nilai diterapkan dalam pengembangan kebijakan dalam pengembangan rumput laut bagi peningkatan ekonomi petani.



Gambar 14.2. Rantai Nilai Rumput Laut di Sumba Timur

Atas dasar pengetahuan atau manfaat ini, maka analisis rantai nilai antara lain akan berguna dalam hal-hal sebagai berikut:

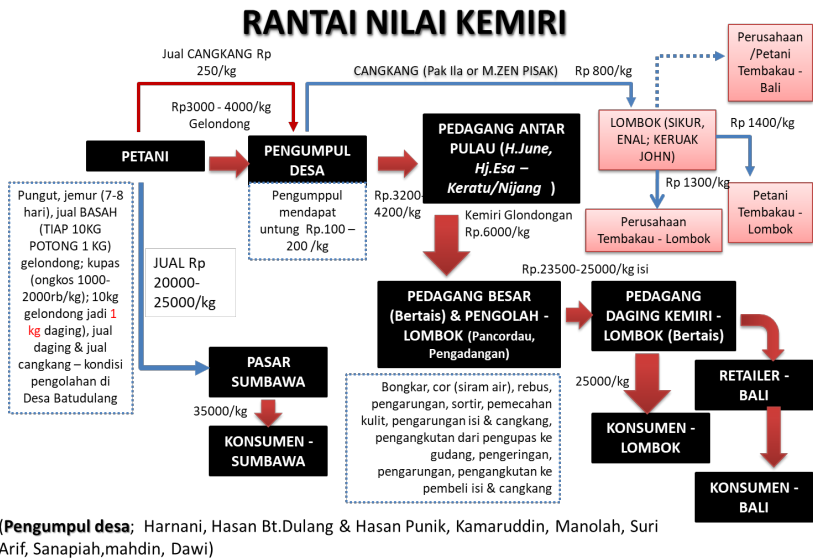
- (1) Membantu para pelaku dalam rantai nilai untuk **membuat keputusan terbaik** dalam bisnisnya, dan mampu **menyusun rencana bisnis** yang baik – yang menguntungkan melalui proses produksi yang lebih efisien dan biaya yang lebih rendah. Fakta menunjukkan bahwa banyak petani membuat keputusan untuk menanam sesuatu tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan permintaan pasar, dan mudah dimengerti

ketika saatnya panen petani seperti ini tidak dapat menjual produk yang dihasilkannya dengan harga yang layak, dan bahkan tidak dapat menjual produknya. Bagi setiap pelaku pada rantai nilai, hasil analisis rantai nilai akan berguna dalam paling tidak 5 (lima) hal, yaitu (i) logistik ke dalam – menyangkut fungsi-fungsi pengelolaan modal, (ii) operasional proses produksi misalnya dari penggunaan inputs atau faktor produksi hingga dihasilkannya suatu produk, (iii) logistik ke luar – menyangkut fungsi yang terkait dengan menyampaikan produk ke pihak berikutnya atau konsumen, (iv) pemasaran dan penjualan – yang menyangkut kegiatan-kegiatan yang memungkinkan produk atau barang yang dihasilkan dapat diketahui dan menyasar konsumen yang tepat melalui promosi, dan penetapan harga yang kompetitif, dan (v) pelayanan – terhadap konsumen akhir seperti misalnya perawatan produk, jaminan atas kerusakan, dan lainnya. Kelima hal ini akan mendukung para pelaku rantai nilai dalam melakukan kegiatan-kegiatan antara lain pengadaan bahan baku atau faktor produksi (*procurement*), pengembangan dan penerapan teknologi (*technological development and implementation*), pengelolaan SDM (*human resource management*), infrastruktur, dan pengelolaan usaha (*infrastructure and management*).

- (2) ***Memperbaiki kinerja rantai nilai*** dengan mengatasi konstrain atau kendala-kendala yang dihadapi oleh para aktor sehingga dapat melakukan kegiatan terbaik dan idealnya dalam mendukung proses peningkatan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan atau yang dikelolanya. Kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas, dan kegiatan lainnya dapat dilakukan guna mengatasi kendala yang ada.
- (3) *Selain kinerja rantai nilai dapat diperbaiki dan ditingkatkan* (dimana barang dan jasa yang dihasilkan mempunyai nilai lebih tinggi), ***sistem rantai nilai akan tertata dan terkelola*** dengan baik dimana para aktor merasa puas dengan hubungan kerjasama yang

ada dan akan berusaha untuk mempertahankannya – *governance, coordination, communication, and integration are applied.*

- (4) *Menjadi acuan bagi pemerintah dalam penyusunan dan implementasi kebijakan* yang akan mendukung perbaikan penghidupan para petani dan para pelaku rantai nilai lainnya, termasuk mendukung tercapainya kemauan konsumen akhir untuk mendapat produk atau barang yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga dan waktu yang sesuai.



Gambar 14.3. Rantai Nilai Kemiri

#### 14.4. Pengembangan Agribisnis

Konsep bisnis yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah bagaimana suatu kegiatan yang ada di sepanjang rantai nilai yang dilakukan oleh para pelaku kunci dalam produksi, pengumpulan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dikelola secara komersial dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan yang layak sesuai dengan kontribusinya terhadap nilai akhir produk. Atas dasar pengertian ini, maka sesungguhnya kegiatan bisnis atau usaha dapat

terjadi pada keseluruhan “proses utama” dari setiap rantai nilai kayu dan HHBK, yaitu dari sub-sistem penyediaan input produksi, proses produksi, proses pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran.

Sesuai dengan rumusan dalam proyek proposal, bahwa yang menjadi tujuan utama dari kegiatan pengkajian tentang produksi dan strategi pemasaran kayu dan HHBK ini adalah meningkatkan kondisi penghidupan petani kecil (*“improvement of smallholders’livelihoods in indonesia”*) yang terlibat dalam pengelolaan kayu dan HHBK, maka model bisnis yang dikembangkan adalah model bisnis yang menempatkan petani sebagai pelaku utama yang patut diperhitungkan (*inclusive business*).

Uraian berikut membahas beberapa alternatif bisnis yang mungkin untuk dikembangkan dalam pengelolaan produk kayu dan HHBK pada setiap subsistem rantai nilai, dari penyediaan input produksi, proses produksi, pengumpulan, pengolahan dan pemasaran. Dengan pemahaman ini, maka sesungguhnya lingkup bisnis yang dapat dikembangkan atau melibatkan petani adalah bisnis yang spesifik di masing-masing “proses utama” atau bisnis yang terintegrasi dengan cakupan beberapa atau keseluruhan proses utama di sepanjang rantai nilai. Selain itu, uraian berikut juga mencoba memetakan jenis usaha atau bisnis yang sudah ada saat ini, baik yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga maupun yang dilakukan oleh kelompok, koperasi, dan jaringan.

#### **14.4.1. Bidang Bisnis**

Sesuai dengan hasil analisis rantai nilai, maka beberapa alternatif bisnis atau usaha yang mungkin untuk dilakukan dalam hal pengelolaan produk kayu adalah sebagai berikut:

- (1) *Pengolahan hasil hutan kayu* melalui pengembangan industri primer dan sekunder, baik di tingkat desa maupun tingkat kecamatan dan kabupaten. Produk kayu tidak saja diolah menjadi bahan setengah jadi seperti balok, papan, ram, usuk dan reng, tetapi juga dapat diolah menjadi produk akhir yang memiliki nilai tinggi seperti produk-produk furniture, casing alat

musik, flooring, parket, dan decking. Kegiatan pengolahan ini tidak saja akan meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat desa melalui penambahan nilai terhadap produk akhir, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di tingkat desa telah ada kegiatan pengolahan kayu jati gelondongan menjadi balok, bahan bangunan (usuk, papan, dan ram), dan mengolahnya lagi menjadi kusen, daun pintu dan jendela, lemari, bufet, dan lainnya.

UD. Makassar Utama bahkan telah mengolah kayu jati menjadi produk yang bernilai tinggi seperti flooring, parket, dan decking, yang hasilnya diekspor ke Jawa Timur. Pengelolaan bisnis kayu sebagaimana yang dilakukan oleh UD. Makassar Utama akan lebih bermanfaat dan menciptakan efek ganda “multiplier effects” ketika perusahaan ini mengembangkan kemitraan dengan petani-petani pengelola kebun jati (hasil wawancara dengan pengelola UD. Makassar Utama menunjukkan bahwa Perusahaan ini telah merintis kemitraan dengan petani jati melalui kelompok tani jati dimana perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu petani dan disisi lain petani mendapatkan kepastian pasar atas produksinya –pada saat bersamaan perusahaan mendapat jaminan terhadap kepastian dan kualitas bahan baku<sup>10</sup>). Alternatif lain dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha pengolahan kayu adalah melalui pengembangan “industri kreatif” seperti kerajinan tangan/ukiran yang menghasilkan barang seni dan souvenir seperti “gantungan kunci”<sup>11</sup>. Industri

---

<sup>10</sup> Lihat persyaratan pengembangan industri primer kayu – Permenhut no.55 tahun ? Salah satu yang menjadi rencana kerja POKJA antara lain “Fasilitasi kemitraan pengusaha (buyers) dengan kelompok masyarakat yang mengelola hasil hutan kayu dan bukan kayu” (bagian dari Rencana Kerja No.2 dan 3 POKJA Kebijakan untuk tahun 2015, yaitu

<sup>11</sup> Pak Arif Gunawan, konsultan Industri Kreatif di Bappeda Kabupaten Sumbawa (memanfaatkan kayu lita untuk handy craft). ACIAR project dapat menelusuri kemungkinan kerjasama dengan Pak Arif tentang kemungkinan untuk fasilitasi penguatan kapasitas “kelompok masyarakat” dalam pengembangan industri kreatif! Pak A’an dari UD. Makasar Utama menawarkan kepada

seperti ini dapat dilakukan melalui kelompok usaha atau badan usaha milik desa atau bentuk organisasi bisnis lainnya<sup>12</sup>. Penguatan kapasitas petani atau pemuda yang akan mengelola usaha pengolahan kayu perlu dilakukan, tidak saja dalam hal teknis pengolahan kayu, tetapi juga dalam mengelola organisasi bisnis (mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi rencana bisnis)<sup>13</sup>.

- (2) *Pengembangan bisnis dalam penyediaan benih dan atau bibit kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti jati, mahoni, gamelina, sengon atau albasia, dan buah-buahan (antara lain durian, manggis, rambutan, kelengkeng, dan lainnya). Kegiatan busines di sektor ini dapat dilakukan oleh perorangan atau oleh kelompok (melalui kelompok usaha bersama atau KUB) atau juga melalui koperasi petani. Konsep Kebun Bibit Rakyat (KBR) atau Kebun Bibit Desa (KBD) yang pernah diperkenalkan di tempat lain oleh Dinas Kehutanan (melalui program Gerhan) dan Dinas Perkebunan dapat menjadi alternatif model bisnis di sektor perbenihan dan pembibitan. Usaha pembibitan yang dikelola secara profesional dan komersial dapat juga menjadi alternatif model pengembangan busines di sektor pembibitan atau “Nursery Industry”. Kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka merintis industri pembibitan antara lain, penguatan kapasitas petani atau kelompok masyarakat untuk mampu secara teknis*

---

POKJA agar ada kegiatan yang difasilitasi untuk memanfaatkan “limbah kayu jati” (papan, serbuk gergaji, dan lainnya) yang ada di UD. Makasar Utama, khususnya masyarakat Desa Semamung (sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan mendukung industri kreatif). Guna mendukung industri kreatif di Sumbawa (once we develope), tolong ada kebijakan yang memberi proteksi terhadap bahan baku sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang.

<sup>12</sup> Diskusi dengan kepala KPH Batulanteh – Sumbawa.

<sup>13</sup> Diskusi dengan POKJA Kebijakan di Kabupaten Sumbawa (tgl 29 Januari 2015) mengingatkan untuk hati-hati dalam mempromosi pengembangan usaha/bisnis pengolahan kayu, yang dikhawatirkan pada akhirnya kontraproduktif – perusakan hutan/illegal logging. Konsern ini muncul terkait dengan posisi Desa Batudulang yang berada di hulu dari DAS Sumbawa.

mengembangkan pembibitan (sudah ada warga masyarakat yang mengelola pembibitan kemiri, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk dijual), pengelolaan usaha pembibitan (analisis ekonomi dan kelayakan usaha), dan penguatan kapasitas pemasaran. Usaha atau bisnis pembibitan dapat bermitra dengan SKPD Pemerintah, yang kemudian akan menjadi mitra sebagai pemasok bibit pohon dan buah-buahan, yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mendukung program konservasi dan penghijauan, termasuk juga mendukung desa sebagai desa wisata berbasis produksi buah-buahan.

Analisis BC atau RC untuk bisnis penyediaan bibit kayu bernilai ekonomi tinggi dapat dilakukan.

- (3) *Pengembangan dan pengelolaan agroforestri secara komersial* dengan rencana bisnis yang dikembangkan dan dilaksanakan secara profesional, menerapkan teknik-teknik yang memadai dalam proses produksi, pemanenan, pengolahan dan pemasaran produk kayu dan non-kayu. Dengan pola ini, maka pengelolaan sistem agroforestry seharusnya dilakukan sesuai dengan informasi pasar (*yang terkait dengan jenis atau spesies produk yang dibutuhkan oleh pasar, jumlah, kualitas, waktu, tempat, dan harga*). Petani seharusnya membuat keputusan yang rasional dan disengaja untuk menanam dan mengembangkan produk kayu dan atau HHBK dalam usaha taninya. Melalui rencana bisnis yang jelas, petani dapat mengintegrasikan rencana produksi, pemanenan, pengolahan dan pemasaran produk-produk kayu dan HHBK, yang pada akhirnya memberikan jaminan pendapatan yang jelas bagi keluarganya. Contoh dari praktik pengelolaan agroforestry yang mendekati konsep ini telah ada di Desa Batudulang, yaitu yang dipraktikkan oleh Pak Bakri (Tim Peneliti pernah mengunjungi lokasinya dimana diamati adanya kombinasi antara tanaman penghasil kayu, buah, dan sayuran). Alternatif pengembangan usaha agroforestry ini sejalan dengan hasil survey yang dilakukan. Hasil survei pasar menunjukkan bahwa sebagian



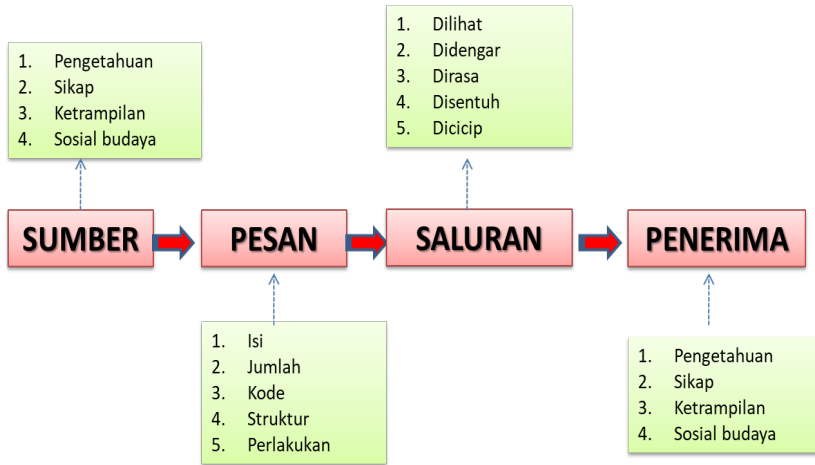
besar petani (Batudulang maupun Pelat) memiliki niat untuk mengembangkan usaha (kebunnya), khususnya melalui pengembangan tanaman HHBK.

Analisis BC pengembangan usaha tani agroforestry? Kondisi BC usaha tani saat ini? Model atau alternatif sistem agroforestry pada masing-masing bentang lahan – hulu, hilir, tengah?

Ketiga alternatif bidang usaha atau bisnis ini dapat ditumbuh kembangkan melalui beberapa alternatif organisasi bisnis, antara lain *usaha rumah tangga atau perorangan, usaha kelompok (seperti Kelompok Usaha Bersama), koperasi, jaringan, dan kemitraan (partnership)*.

#### **14.4.2. Model Bisnis**

Setiap orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas sesuatu objek, termasuk dalam hal persepsi terhadap kata model dalam konsep “Model Bisnis”. Ketika mendengar kata “Model”, maka yang terpikirkan oleh setiap orang yang mendengarkannya boleh jadi yang terpikirkan adalah seseorang dengan tampilan yang wah dan berjalan di atas *cat walk* atau seseorang yang dikaguminya (*role model*) dan diidolakannya. Bagi seseorang yang biasa mendalami matematika, maka model yang terpikirkan olehnya adalah suatu hubungan fungsional yang dilambangkan dengan simbol-simbol matematis seperti  $Y = F(x_1, x_2, x_3, \text{dst.})$ . Bagi orang lain yang biasa belajar tentang komunikasi, maka yang terbayangkan olehnya adalah hubungan sejumlah komponen dalam proses komunikasi, baik komunikasi intrapersonal, interpersonal dan komunikasi massa – Gambar 14.4.



Gambar 14.4. Model Komunikasi Interpersonal (Berlo's SMCR Model)

Atas dasar pandangan di atas, maka definisi yang digunakan dalam buku ini tentang model adalah upaya penyederhanaan suatu proses yang kompleks kedalam komponen-komponen yang saling berhubungan sehingga mampu untuk memahami keseluruhan sistem. Pemahaman ini akan bermanfaat dalam menciptakan pola hubungan dalam sistem yang kemudian akan dapat bekerja secara efektif. Dengan demikian, model bisnis yang dimaksud dalam dokumen ini adalah penyederhanaan dari suatu sistem bisnis dengan mengidentifikasi semua komponen yang ada dalam sistem bisnis kayu maupun HHBK.

Atas dasar temuan hasil penelitian dan definisi model bisnis sebagaimana diuraikan di atas, maka usaha atau bisnis hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dapat dirumuskan dalam beberapa Model Bisnis sebagai berikut:

- (1) ***Usaha atau bisnis perorangan*** dalam bentuk *usaha rumah tangga dan usaha dagang* (UD, CV, atau PT), seperti yang dilakukan oleh *Ibu Junaidi* di Desa Batudulang, dalam pengolahan kunyit, jahe, kopi dan madu; atau usaha yang dilakukan oleh sekitar 20% rumah tangga di Desa Batudulang

dalam mengolah kemiri; dan usaha yang dilakukan oleh *Ibu Nuraini* di Kelurahan Keratu - Sumbawa Besar melalui usaha "*Cahaya Robusta*" (bekerja sama dengan kelompok tani di Dusun Punik – Batudulang. Usaha atau bisnis perorangan ini tidak saja telah menciptakan nilai tambah di tingkat desa, tetapi juga telah menciptakan lapangan kerja dan tambahan pendapatan kepada pemilik dan pengolah kemiri dan produk HHBK lainnya. Pengelolaan usaha tani yang dilakukan oleh rumah tangga petani juga menjadi contoh dari model bisnis perorangan ini. Pengelolaan bisnis perorangan untuk produksi kayu dan HHBK masih dilakukan secara tradisional dengan "rencana bisnis" yang sering kali imajiner atau hanya ada dalam pikiran pengelola. Kelemahan mendasar dari model bisnis seperti ini adalah kesulitan dalam menilai kemajuan usaha secara baik dan sistematis.

- (2) ***Usaha bersama melalui kegiatan kelompok*** sebagaimana yang dilakukan dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pemasaran madu. Ketika kelompok mulai mengembangkan kegiatan pengolahan dan pemasaran secara mandiri, maka kelompok berproses menjadi unit bisnis baru yang memiliki kekuatan untuk membangun kemitraan atau kerjasama dengan pelaku lain di rantai nilai. Bentuk bisnis ini dapat berupa Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Studi di Desa Batudulang menunjukkan bahwa kelompok petani pengumpul madu masih bekerjasama atau bermitra dengan koperasi atau JMHS, dalam posisi sebagai pemasok – belum berperan sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada meraih keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukannya.
- (3) ***Unit bisnis koperasi*** seperti yang dilakukan oleh Koperasi Hutan Lestari dalam pemasaran kopi, kemiri dan madu. Koperasi bekerjasama dengan lembaga lain, termasuk dengan JMHS. Keberadaan dan peran koperasi dalam mendukung

peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat di Desa Batudulang masih dipertanyakan oleh sebagian warga.<sup>14</sup>

- (4) ***Jaringan*** seperti yang dilakukan oleh Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) dalam pemasaran madu. Melalui JMHS, madu yang dihasilkan oleh petani dari berbagai kawasan di Sumbawa dapat dipasarkan di Kota Sumbawa Besar, ke Lombok dan Bali (30% dari madu yang dipasarkan JMHS), dan bahkan ke Jakarta (70% dari total penjualan madu oleh JMHS).
- (5) ***Model kemitraan usaha antara kelompok masyarakat atau koperasi dengan industri besar*** pengolahan hasil hutan kayu dan HHBK yang berada di Surabaya dan Jakarta sebagaimana yang dilakukan oleh JMHS dalam pemasaran madu. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa telah pernah ada industri jamu yang menawarkan untuk kerjasama dan membeli produk empon-empon di Desa Batudulang, namun tidak berjalan karena ketidakmampuan masyarakat untuk merespons terhadap permintaan pasar (dibutuhkan volume besar dalam hitungan ton, dan kontinuitas supply).
- (6) ***Alternatif lain yang mungkin untuk dikembangkan adalah melalui pengembangan sentra produksi*** yang dikelola secara profesional dan mendapat dukungan dari pemerintah serta pihak-pihak lainnya. Pada saat penelitian ini dilakukan, telah muncul pemikiran untuk menjadikan Desa Batudulang sebagai sentra industri pengolahan madu di pulau Sumbawa.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan informan kunci pada saat pelaksanaan scoping study; kasus munculnya “kelompok usaha bersama” (KUB) sebagai sebuah alternatif entitas bisnis madu di Desa Batudulang juga menjadi salah satu pembenaran terhadap “belum maksimalnya peran koperasi”.

Model pengembangan usaha melalui fasilitasi pengembangan sentra produksi dan kemitraan dapat mengacu pada *Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 940/Kpts/Ot.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*, yang dapat dilakukan dengan pola-pola sebagai berikut:

- (1) ***Inti-Plasma*** merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.
- (2) ***Sub Kontrak*** merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- (3) ***Dagang Umum*** merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- (4) ***Keagenan*** merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
- (5) ***Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)*** merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Atas dasar berbagai pengalaman dalam banyak program pengembangan masyarakat (pengentasan kemiskinan), maka berbagai alternatif model usaha atau bisnis tersebut memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Berikut disajikan secara ringkas peluang dan tantangan dalam mengembangkan model usaha dari beberapa alternatif model yang ada.

Tabel 14.1. Tantangan & Peluang Implementasi Model Bisnis Kayu/HHBK di Sumbawa

<b>Model</b>	<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>	<b>Cocok Kayu/HHBK</b>
<b>1. Usaha Rumahtangga/Perorangan</b>	Manfaat terbatas; posisi tawar rendah; sulit berkembang tanpa jiwa entrepreneurship yang kuat	Terbatas; tetapi ada yang sukses seperti UD Warna Sari (Suranadi) & CV Amfoang (Kupang), Usaha yang dikelola Ibu Junaidi (Batudulang), dan Ibu Nuraini (Cahaya Robusta – Keratu, Batudulang & Punik)	Pengolahan kayu; Kemiri, empon-empon (kunyit, jahe), olahan buah-buahan
<b>2. Kelompok Usaha Bersama (Kub/Bumdes)</b>	Ok pada sistim produksi, tetapi bermasalah pada pengolahan dan pemasaran	Terbatas	Industri Kreatif Kayu Buah, umbi-umbian, madu
<b>3. Koperasi</b>	Image buruk	Terbatas	Semua HHBK
<b>4. Jaringan</b>	Peran “fasilitator eksternal” adalah penting & strategis	Keberhasilan JMM & JMHS memberi inspirasi bahwa model ini berpeluang berpeluang untuk diterapkan secara berhasil	Madu dan Empon-empon
<b>5. Sentra Produksi</b>	Kebijakan pemda hrs mendukung; produksi HHBK terbatas; infrastruktur terbatas	Memiliki peluang keberhasilan untuk pengelolaan bambu	Bambu, Madu
<b>6. Kemitraan</b>	Jumlah & kualitas HHBK terbatas; wawasan masyarakat & kebijakan pemerintah	Menjadi pemikiran banyak pihak untuk dikembangkan bagi pengelolaan HHBK (telah dilakukan oleh JMHS & JMM)	Empon-empon & madu

### 14.5. Rantai Nilai Hasil Hutan Kayu: Ilustrasi Kegunaan Analisis Rantai Nilai bagi Pengembangan Agribisnis

**Spesies Kayu Terpilih untuk Analisis Rantai Nilai:** Hasil studi pelingkupan (*scoping study*), survei rumah tangga, dan diskusi kelompok terfokus memberikan berbagai data dan informasi tentang spesies kayu yang ditanam, dipanen, digunakan dan atau dijual oleh petani kecil di lokasi studi - Desa Batudulang dan Pelat. Berdasarkan data ini, spesies kayu penting yang dijual untuk analisis rantai nilai lebih lanjut dibagi menjadi spesies kayu jati dan non-jati – lihat Tabel 14.2. Survei pasar lebih lanjut dilakukan untuk memahami praktik pemasaran dan rantai nilai spesies kayu jati dan non-jati seperti udu, suren dan binong.

Tabel 14.2. Jenis Kayu Penting yang Diidentifikasi untuk Desa Batudulang dan Pelat

Batudulang (Tean & Non-Jati)		Pelat (Kayu Jati & Kebun)	
Jenis*	Nilai (Skor x Timbang)	Jenis**	Nilai (Skor x Timbang)
(1) Jati (Jati)	769	(1) Jati (Jati)	1184
(2) Suren	767	(2) Mahagoni	970
(3) Udu	757	(3) Mangga (Mangga)	766
(4) Gamelina	654	(4) Kelapa (Kelapa)	766
(5) Binong	487	(5) Buah nangka (Nangka)	731
(6) Dadap	478	(6) Randu	675

Keterangan: \* 14 jenis pohon dibahas oleh peserta FGD; \*\* 21 spesies kayu dibahas oleh peserta FGD.

## Rantai Nilai Produk Kayu yang Ada

**Desa Batudulang - Kayu Non Jati:** Enam jenis kayu penting bagi masyarakat Batudulang adalah jati dan jenis kayu hutan lainnya seperti *suren*, *udu*, *binong* (*tetramales nudiflora*), *dadap* dan *gamelina* (nama latin untuk spesies ini!). Akan tetapi, spesies pohon ini tumbuh secara alami kecuali *gamelina* (spesies introduksi).

Pohon jati dan *gamelina* belum dipanen karena masih muda (baru tumbuh) sedangkan jenis kayu lainnya tidak dijual secara rutin karena tiga alasan, (1) jumlahnya terbatas dan cukup untuk kebutuhan dalam negeri, (2) harga murah, dan (3) kesulitan mendapatkan ijin penebangan - Ijin Penebangan Kayu Tanah Milik atau IPKTM.

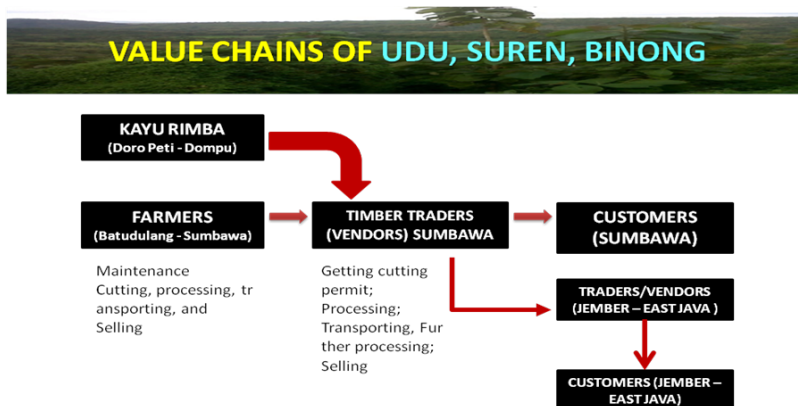
Secara umum, ditemukan bahwa kayu merupakan sumber pendapatan kedua bagi rumah tangga masyarakat setempat karena perekonomian lokal sebagian besar berasal dari produksi dan pemasaran hasil hutan non kayu seperti kayu putih, kopi dan madu (istilah botani). Oleh karena itu, studi ini menemukan bahwa masyarakat lokal belum menanam dan menjual kayu secara komersial untuk ekonomi dan mata pencaharian mereka. Selama 5 tahun terakhir (2008 - 2013), hanya sedikit petani yang berpengalaman menjual jenis kayu mereka seperti *udu*, *suren*, *binong* dan *dadap* (istilah botani) kepada pedagang kayu Sumbawa. Dua bentuk strategi pemasaran yang digunakan oleh para petani ini adalah:

- (1) *Menjual pohon di tingkat petani.* Melalui praktik pemasaran ini, para pembeli (pedagang dari Sumbawa) menanggung biaya perizinan, pemotongan, pengangkutan ke pinggir jalan dan ke Sumbawa, serta pengolahan. Harga jual pohon berkisar antara Rp.100.000 hingga Rp. 200.000 per pohon.
- (2) *Menjual kayu setengah jadi.* Harga jual kayu setengah jadi (siapa pakai untuk bahan bangunan) di tingkat desa berkisar antara Rp. 1,25 juta per m<sup>3</sup> (untuk *udu* dan *binong*) hingga Rp. 1,5 juta per m<sup>3</sup> untuk *suren* sedangkan harga *dadap* sekitar Rp.800.000 per m<sup>3</sup>. Harga jual di tingkat pelanggan dua kali lipat dari harga jual petani.



Ketika petani menjual kayu olahan, maka mereka menanggung biaya pengolahan dan transportasi. Biaya pengolahan untuk gergaji mesin Rp.500.000 / m<sup>3</sup>; transportasi 270.000 / m<sup>3</sup>; cruising 250.000 (jika memotong dan menjual melalui prosedur formal; mengikuti peraturan kabupaten yang disebut IPKTM; tetapi studi ini menegaskan bahwa “tidak ada yang tahu tentang peraturan penebangan - IPKTM; bahkan pemerintah desa baru saja mendengarnya”). Hasilnya, pendapatan bersih petani dapat berkisar antara Rp230.000 hingga Rp.500.000 per m<sup>3</sup> kayu yang mereka panen.

Rantai pasar kayu di Desa Batudulang disajikan pada Gambar 14.5. Gambar tersebut menunjukkan bahwa petani menjual udu, suren dan binong kepada pedagang Sumbawa dengan harga Rp.1.250.000, -, Rp.1.500.000, - dan Rp.1.250.000, - masing-masing per m<sup>3</sup>. Para pedagang menjualnya ke pengepul di Sumbawa dengan harga sekitar Rp. 2.500.000, -, Rp.3.000.000, -, dan Rp.2.500.000, - per m<sup>3</sup>. Harga dadap sekitar Rp. 800.000, - per m<sup>3</sup> karena digunakan untuk mendukung pekerjaan konstruksi (papan cor atau bagesting). Untuk menjual kelompok jenis kayu pertama, petani harus mendapatkan IPKT dari pemerintah kabupaten / kecamatan sedangkan untuk menjual dadap, petani hanya membutuhkan dokumen dari kepala desa. Kayu merah (kayu merah) dari Sumbawa juga dijual ke pulau lain seperti Lombok dan Jawa (Jember - Jawa Timur).



Gambar 14.5. Rantai Pemasaran Jenis Kayu yang Dijual di Sumbawa - Batudulang

Berdasarkan data yang dikumpulkan, pendapatan bersih dari penjualan kayu di Batudulang adalah sekitar Rp230.000, - per m3 (untuk udu dan binong) dan Rp. 480.000, - per m3 (untuk Suren). Nilai-nilai ini akan lebih rendah jika biaya produksi dihitung –Tabel 14.3.

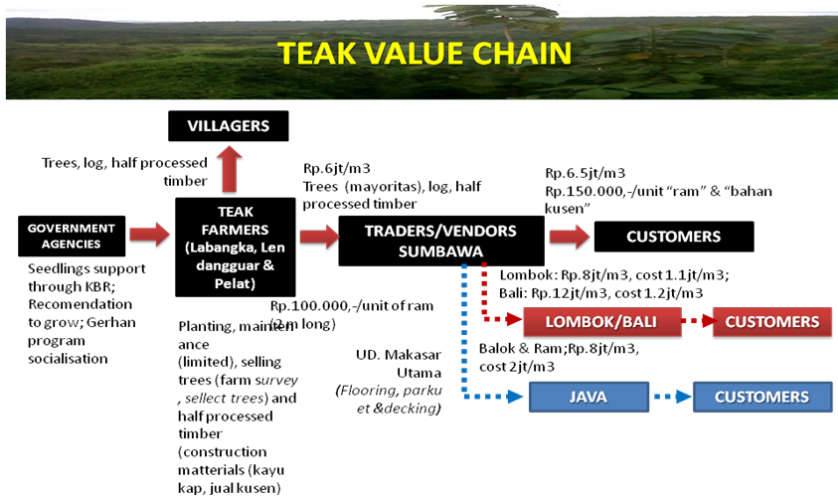
Tabel 14.3. Analisis Marjin Laba Kayu Bukan Jati di Batudulang - Sumbawa

Deskripsi	Udu		Suren		Binong	
	Rp./m3	%	Rp./m3	%	Rp./m3	%
<b>Petani</b>						
Biaya pemrosesan per m3 (potong & proses)	500000	20,00	500000	16,67	500000	20,00
Transportasi - per m3	270000	10,80	270000	9,00	270000	10,80
Jelajah per m3	250000	10,00	250000	8,33	250000	10,00
Total biaya per m3	<b>1020000</b>	<b>40,80</b>	<b>1020000</b>	<b>34,00</b>	<b>1020000</b>	<b>40,80</b>
Harga jual per m3	1250000	50,00	1500000	50,00	1250000	50,00
<i>Pendapatan bersih per m3</i>	<b>230000</b>	9,20	<b>480000</b>	16,00	<b>230000</b>	9,20
<b>Pedagang / Vendor Sumbawa</b>						
Harga beli per m3	1250000	50,00	1250000	41,67	1250000	50,00
Transportasi ke Sumbawa	312500	12,50	312500	10,42	312500	12,50
Biaya untuk mendapatkan izin (IPKTM)	150000	6,00	150000	5,00	150000	6,00
Harga jual di Sumbawa	2500000	100,00	3000000	100,00	2500000	100,00
Margin pemasaran (Rp./m3)	1250000	50	1750000	58,33	1250000	50
Pendapatan bersih (margin keuntungan; Rp./m3)	787500	<b>31,50</b>	1287500	42,92	787500	31,50

### Desa Pelat - Kayu Jati

Jenis kayu yang paling penting bagi mata pencaharian masyarakat Pelat adalah jati, mahagoni, mangga, kelapa, nangka, dan randu (istilah botani). Namun, spesies yang lebih komersial untuk tujuan pemasaran adalah jati dan mahagoni (tetapi tidak ada yang dijual sebagai pohon yang baru berumur beberapa tahun) sementara yang lain seperti mangga, nangka, kelapa, dan randu kebanyakan ditanam untuk buahnya dan dipanen begitu tidak. menghasilkan buah (cukup umur).

Hasil penelitian menemukan bahwa petani di Pelat mendapatkan bibit dari pemerintah seperti melalui program Rehabilitasi Pemerintah (Gerhan) dan Program Kesatuan Masyarakat (Kebun Bibit Rakyat atau KBR) - dengan pedoman / supervisi lapangan yang terbatas untuk aspek silvikultur. Para petani menjual kayu / pohonnya kepada penduduk desa dan atau kepada pedagang kayu dari Sumbawa. Para petani menjual jati dalam bentuk pohon di kebunnya, atau dalam bentuk kayu setengah jadi (siap digunakan sebagai bahan konstruksi - disebut balok dan ram) - Gambar 14.6.



Gambar 14.6. Rantai Pemasaran Jati di Pelat

Gambar tersebut menunjukkan beberapa saluran pasar jati di Sumbawa, yaitu:

- (1) Petani - pelanggan akhir di tingkat desa
- (2) Petani - pembuat furnitur (di tingkat desa)
- (3) Petani - pedagang kayu seperti Pak Satung (pedagang Sumbawa) - pelanggan
- (4) Petani - industri pengolahan kayu seperti UD. Makasar Utama - Penjual kayu (Surabaya)

Kayu gelondongan dari petani diangkut ke Sumbawa oleh pedagang / penjaja dan dijual ke pelanggan lokal yang kebanyakan menggunakan kayunya untuk pembangunan rumah. Pihak vendor mengolah log tersebut menjadi materi-materi konstruksi seperti ram, papan, dan balok. Biaya pengolahan kayu jati sekitar Rp.300.000, - per m<sup>3</sup>, dua kali lipat dari biaya pengolahan kayu bukan jati Rp.150.000, - per m<sup>3</sup>. Gergaji Mobil merupakan moda jasa pengolahan kayu jati dan non-jati yang dominan yang mempekerjakan 3 - 4 pekerja (jawa) yang berpindah dari satu vendor ke vendor lainnya. Harga kayu jati di Sumbawa sekitar Rp.6.500.000, - per m<sup>3</sup> sedangkan harga jati jika dijual ke Lombok dan Bali bisa Rp.8.000.000, - dan Rp.12.000.000, - per m<sup>3</sup> masing-masing. Para pedagang Sumbawa mengangkut kayu jati ke Lombok dan Bali dengan menggunakan truk kontainer dengan ongkos angkut sekitar Rp.1.100.000, - per m<sup>3</sup> (ke Lombok) dan Rp.1.200.000, -per m<sup>3</sup> (ke Bali). Jati Sumbawa juga dijual ke Jawa Timur (Surabaya) dalam bentuk produk olahan seperti flooring, parket dan decking oleh Perusahaan Makasar Utama - penyerahan pertama pada Oktober 2014. Analisis margin pemasaran menunjukkan bahwa usaha jati merupakan kegiatan yang menguntungkan, terutama bila kayu jati diolah menjadi material konstruksi dan furniture seperti cup-board, meja, pintu, dan lain-lain.

Tabel 14.4. Analisis Marjin Laba Jati - Kasus Pedagang Kayu di Sumbawa

Deskripsi	Rp./m3
Pemotongan biaya	200000
Transportasi dari Pelat ke Sumbawa	312500
Biaya pengolahan (dari “balok” hingga materi konstruksi seperti usuk, papa, dan lainnya)	300000
Harga jual di Sumbawa	6500000
Margin pemasaran	5833334
Total biaya pemasaran	1262500
<b>Margin keuntungan - menjual di Sumbawa</b>	<b>4570834</b>
Harga jual - di Lombok	8000000
Biaya transportasi ke Lombok	1100000
Margin pemasaran ke Lombok	1500000
<b>Margin keuntungan - menjual ke Lombok (keuntungan tambahan)</b>	<b>400000</b>
Harga jual - di Bali	12000000
Biaya transportasi ke Bali	1200000
Margin pemasaran ke Bali	5500000
<b>n keuntungan ke Bali</b>	<b>4300000</b>

Para petani tersesat ketika mereka menjual pohon jati di kebunnya tanpa aktivitas nilai tambah dan pengetahuan serta keterampilan yang terbatas untuk memperkirakan volume jati mereka seperti yang ditunjukkan oleh kutipan berikut:

*“Ada kasus petani menjual 30 batang pohon jati miliknya seharga Rp6000.000,00. Setelah ditebang dan diolah, pedagang tersebut mendapat sekitar 4 m3 kayu yang kemudian dijual seharga Rp. 24.000.000,00. Petani lokal tidak mau ribet dan ikuti proses untuk mendapatkan izin tebang” (hasil FGD Desa).*

*“Saya menjual jati karena ada kebutuhan kedekatan untuk biaya sekolah anak-anak yang sudah masuk SMA dan SMP, sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya menjual 4 kubik jati Rp. 17 juta kepada pelele dari Sumbawa. Umur jati itu sekitar 15 tahun. Pelele yang menguruskan sertifikat. Kata pelele, biaya membuat sertifikat Rp. 4 juta. Saya melayani menyediakan Rp. 3 juta dan sisanya Rp. 1 juta dibantu pelele. Saya minta tolong pelele (Pak S) tanggapan cepat keluar sertifikatnya karena butuh uang cepat” (Pengakuan J, seorang Petani Jati di Pelat) (Widodo, 2015).*

*“Telaah yang dilakukan terhadap kasus ini menemukan bahwa sebenarnya petani salah dalam memperkirakan volume kayu yang dijualnya, yaitu hanya 4 m3. Kayu jati yang dijual oleh petani “J” kepada pelele “Pak S” berdiameter antara 80 - 120 cm dengan panjang 5 - 12 meter. Setelah ditebang dan diolah menjadi balok, volume kayu sebenarnya adalah sekitar 19 m3, suatu perbedaan yang sangat besar dan signifikan. Jika dihitung, maka jelaskan bahwa pelele seperti “Pak S” mendapatkan keuntungan keuntungan yang sangat besar dan petani hanya mendapat keuntungan yang sangat kecil” (Widodo, 2015).*

Ketika petani memanen pohonnya sendiri, mereka harus mengeluarkan biaya pemrosesan seperti gergaji mesin sebesar Rp5.000 / m atau 10.000 untuk 2m (8cmx12cmx2m); Harga jual 70.000 / btg atau unit (sebelumnya) atau 100.000 / btg (sekarang dengan suplai terbatas dan permintaan tinggi). Bagi petani yang menjual jati di kebunnya, pembeli mengunjungi kebun dan menghitung stok berdiri, menandai, dan membayar.

Hasil analisis rantai nilai menunjukkan bahwa kegiatan nilai tambah banyak terjadi di pedagang / vendor maupun di industri pengolahan seperti perusahaan furnitur perorangan dan industri flooring seperti UD Maksar Utama di Desa Leseng - Kecamatan Moyo Hulu. Pada level ini, log diproses menjadi materi konstruksi serta furnitur.

Studi tersebut juga menemukan bahwa petani tidak memiliki akses ke informasi pasar seperti harga dan kualitas kayu. Petani juga tidak tahu tujuan kayu mereka. Petani tampak sibuk dengan masalah perizinan.

### **Kendala yang Diidentifikasi**

**Desa Batudulang:** Kendala berikut ini teridentifikasi dalam rantai nilai kayu di Batudulang:

- (1) Para petani menanam kayu di kebun mereka hanya untuk kebutuhan rumah tangga (menanam jati, mahagoni dan gamelina sambil merawat pohon non jati mereka) - sebagian besar rumah tangga mendapatkan penghasilan dari HHBK seperti cundlenut, kopi, madu, jahe, kunyit dan lain-lain. Akibatnya, petani melakukan intervensi terbatas pada lahan pertaniannya di mana hanya 34,6% petani atau penanam pohon (dari 52 petani yang diwawancarai untuk penelitian) yang melakukan penjarangan, dan hanya 19,2% yang melakukan pemangkasan, dan 100% tidak pernah melakukan “pola terubusan”. Intervensi yang terbatas ini menyebabkan kualitas kayu rendah (Reid dan Safi'i, 2015)
- (2) Harga kayu lokal sangat rendah sekitar Rp.100.000 - Rp. 200.000 per pohon atau sekitar Rp.1.000.000,00 - Rp.1.500.000,00 per m<sup>3</sup>

yang juga tergantung pada jenis pohonnya. Sebagian besar petani (lebih dari 90%) memiliki informasi pasar yang terbatas.

- (3) Sulitnya mendapatkan izin pemerintah seperti IPKTM karena faktornya tidak memenuhi persyaratan sertifikasi tanah, dan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tentang tata cara mendapatkan IPKTM.
- (4) Kurangnya informasi pasar dimana petani tidak mengetahui secara detail informasi jenis pohon, kualitas, harga, dan lain-lain.
- (5) Persepsi petani yang terbatas tentang menanam pohon sebagai sumber pendapatan rumah tangga kedua.

Meskipun studi ini menemukan kendala rantai nilai kayu, para petani dan pemangku kepentingan utama lainnya, termasuk pembuat kebijakan, tidak setuju untuk mempromosikan produksi kayu sebagai sumber pendapatan rumah tangga. Maklum, Desa Batudulang terletak di hulu DAS Sumbawa, di mana penebangan pohon di kawasan ini dapat menimbulkan masalah degradasi lahan dan pasokan air. Oleh karena itu, masyarakat setempat menyarankan agar HHBK menjadi sumber pendapatan utama masyarakat setempat. Petani di Batudulang mengungkapkan keinginan dan sikap positif mereka untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem pertanian dan wanatani yang ada. Hasil observasi lapangan menemukan beberapa tanaman hortikultura seperti durian, rambutan, manggis, klengkeng, alpukat, mangga, pisang, cabai, wortel, dan lainnya tumbuh subur di desa ini.

*“Saya mengusulkan perlunya fokus dan pengembangan hasil hutan non kayu seperti madu, buah-buahan (seperti durian, kelengkeng, manggis, apel dan rambutan), dan tanaman obat seperti jahe dan kunyit; Bagi saya, semua HHBK ini tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang bagus bahkan lebih bagus lagi seperti yang ada di kebun Pak Bakri. Jika pemerintah memberikan izin penebangan / pemanenan kayu, saya khawatir dengan masalah degradasi hutan (masyarakat) yang tentunya dapat menimbulkan masalah ketersediaan air - Batudulang sebagai daerah pemandian air untuk DAS Sumbawa atau Smegangan. Air pipa untuk rumah penduduk Sumbawa bersumber dari hulu seperti Batudulang. Pemanenan kayu untuk kebutuhan domestik akan baik-baik saja, tetapi tidak untuk tujuan komersial. Pemerintah dan pemangku*

*kepentingan utama lainnya dipersilakan untuk mendukung kami untuk HHBK - dukung kami dengan bibit buah ”(Informan kunci laki-laki, juga ketua Koperasi Petani; pernah ke Filipina dan Kamboja karena keberhasilannya dalam produksi madu melalui Jaringan Madu Hutan Sumbawa).*

**Desa Pelat:** Hambatan berikut telah diidentifikasi untuk rantai nilai jati di Pelat - Sumbawa:

- (1) Para petani menanam pohon dengan intervensi silvikultur terbatas seperti penjarangan dan pemangkasan. Dari survei rumah tangga ditemukan bahwa 66,7% petani (dari 90 petani) tidak melakukan pemangkasan, 96,6% tidak melakukan penjarangan, dan 97,8% tidak melakukan trubusan.
- (2) Petani sulit menjual pohonnya karena kesulitan mendapatkan izin penebangan (IPKTM). Kebanyakan petani tidak memiliki sertifikat tanah.
- (3) Kurangnya pengetahuan petani tentang pemasaran kayu jati - harga, kualitas, dan pembeli sebenarnya. Para petani mengklaim risiko terkait dalam menjual jati mereka meskipun jati tersebut dipanen dari properti / lahan mereka sendiri. Petani harus berhadapan tidak hanya dengan polisi dan aparat lainnya, tetapi juga kalah karena kayu mereka diambil “disita” oleh aparat. Ini mungkin membutuhkan waktu lama untuk ditangani.
- (4) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam memperkirakan volume kayu yang menyebabkan petani hilang dan pendapatan bersih rendah - lihat kutipan di atas! Studi analisis kebijakan juga menemukan kasus tersesatnya petani akibat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan menghitung volume kayu.
- (5) “Pengolah jati” di tingkat desa tidak memiliki legal standing untuk mengangkut dan menjual produk mereka. Akibatnya, mereka dapat mengatur untuk mendapatkan izin pedagang kota di mana sejumlah uang harus dibayarkan. Menurut pengolahnya, ini membantu mereka mengangkut produk mereka dengan aman ke tujuan akhir (baik di dalam maupun di luar Sumbawa).



Temuan ini sejalan dengan hasil studi tentang pemasaran kayu dari perspektif kebijakan (Widodo, 2015) dan studi tentang pasar kayu di Lampung (Tukan et.al, 2014) yang menemukan hal-hal sebagai berikut:

*Masalah pemasaran kayu serupa ditemukan di kedua desa tersebut seperti (1) lemahnya posisi tawar petani. Petani cenderung menjadi pengambil harga. Harga ditentukan oleh pedagang, pengolah atau penjual kayu - pengecer; (2) keterbatasan kemampuan petani untuk memperkirakan dan menghitung volume kayu yang menyebabkan petani kerugian – tidak memiliki gambaran tentang volume atau kubikasi kayunya, (3) minimnya pengetahuan petani dan akses informasi pasar. Akibatnya, petani menjual kayunya dengan harga murah sementara pedagang dan pembeli lainnya mendapat keuntungan yang lebih banyak dan tidak adil. Bahkan petani mengalami kerugian besar karena kurangnya keterampilan memperkirakan volume kayu, (4) petani cenderung menjual kayunya hanya pada saat membutuhkan uang, dan bukan karena alasan komersial dan profit oriented, dan (5) petani ' sikap seperti tidak ingin mengambil tindakan rumit (Widodo, 2015<sup>15</sup>).*

*“(1) kurangnya pengetahuan petani tentang pengelolaan pohon dan usaha tani seperti penanaman, pemanenan dan kegiatan pasca panen, (2) kurangnya informasi pasar - petani hanya mendapatkan informasi dari pedagang dan petani lain yang mengunjungi kebun atau kebun mereka” (Tukan et.al, 2014).*

### **Pendekatan Alternatif untuk Meningkatkan Pendapatan Petani**

**Desa Batudulang:** Sejalan dengan kendala yang teridentifikasi, intervensi berikut disarankan untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dan pendapatan petani kecil:

- (1) Meningkatkan perilaku petani (*pengetahuan, keterampilan dan sikap*) dalam mengelola pertanian atau sistem wanatani. Keputusan petani dalam pengelolaan usaha tani harus didasarkan pada informasi pasar dan permintaan pasar.

---

<sup>15</sup> Tujuan 3 dari ACIAR yang berjudul “Pengembangan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu dan Strategi Pasar untuk Peningkatan Mata Pencaharian Petani Kecil di Indonesia (Nomor Proyek FST / 2012/039).

- (2) Memulai industri pembibitan dan pembibitan di tingkat lokal untuk mendukung kebutuhan pertanian agroforestry, hortikultura dan atau pengembangan HHBK. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kebun bibit desa (Kebun Bibit Desa - KBD) dan pembibitan berbasis masyarakat (Kebun Bibit Rakyat - KBR).
- (3) Untuk mengatasi masalah harga rendah, ada kebutuhan untuk (i) mendorong kegiatan bernilai tambah di tingkat lokal melalui pengembangan industri pengolahan; (ii) mempromosikan pemasaran kolektif seperti melalui koperasi tani dan kegiatan usaha kelompok; dan (iii) memperkuat kapasitas petani untuk memperkirakan volume kayu dan mengadopsi pengelolaan pohon dan kebun yang lebih baik - meningkatkan kualitas kayu.
- (4) Untuk mengatasi masalah kesulitan petani dalam mendapatkan izin penebangan, diperlukan intervensi berikut (i) penguatan kapasitas petani dalam memahami semua peraturan dan kebijakan terkait produksi dan pemasaran kayu, tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka, tetapi juga untuk mengubah praktik mereka; (ii) mempromosikan proses sertifikasi yang lebih efektif dan berbiaya rendah bagi para penanam pohon seperti melalui prona - untuk mendukung produksi dan pemasaran kayu; dan (iii) penyederhanaan prosedur izin penebangan dan penebangan kayu melalui perubahan peraturan daerah yang ada (Perda No. 26 tahun 2006) dan implementasi peraturan baru (Peraturan Menteri Kehutanan No. 30 tahun 2012).
- (5) Meningkatkan akses petani ke informasi pasar untuk mendukung keputusan efektif mereka untuk pengelolaan pertanian mereka. Instansi pemerintah daerah seperti Dinas Kehutanan, Lembaga Penyuluhan (tingkat kabupaten dan kecamatan), Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi perlu mendukung akses informasi pasar yang lebih baik kepada petani. Para petani kemudian dapat membuat keputusan yang tepat untuk pertanian mereka seperti *apa yang akan diproduksi, kapan, dan bagaimana*.

Intervensi alternatif untuk meningkatkan kinerja rantai nilai kayu di Desa Batudulang dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 14.5. Hambatan dan Alternatif Intervensi untuk Meningkatkan Kinerja Rantai Nilai Kayu

Kendala	Intervensi Alternatif
(1) Menyuplai mode produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempromosikan sistem wanatani yang lebih komersial dengan memperkenalkan produk hortikultura seperti pohon buah-buahan - mengoptimalkan penggunaan ruang / lahan</li> <li>• Mempromosikan dan mengembangkan industri / bisnis pembibitan dan pembibitan untuk produk hortikultura</li> </ul>
(2) Harga kayu rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan industri pengolahan</li> <li>• Mempromosikan pemasaran kolektif melalui kelompok dan koperasi petani</li> <li>• Meningkatkan kapasitas petani dalam memperkirakan volume kayu dan mengelola pertanian mereka - mengadopsi praktik pengelolaan pohon terbaik</li> </ul>
(3) Sulit mendapatkan izin tebang / panen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat lokal tentang peraturan untuk produksi dan pemasaran kayu yang mendukung perubahan praktik</li> <li>• Mendukung sertifikasi tanah kolektif, dan lebih murah</li> <li>• Mempromosikan prosedur yang lebih sederhana melalui amandemen peraturan yang ada - Perda no. 26 tahun 2006, dan mulai menerapkan "P.30 tahun 2012"</li> </ul>
(4) Kurangnya akses ke informasi pasar dan pengetahuan yang terbatas tentang pemasaran kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan informasi pasar yang efektif oleh lembaga lokal</li> <li>• Mendorong keterbukaan para pelaku di rantai nilai tentang pentingnya mengkomunikasikan informasi "ekspektasi konsumen" kepada petani sehingga dapat menjadi dasar dalam pembuatan keputusan produksi dan pengelolaan usaha tani / agroforestry</li> </ul>
(5) Persepsi HHBK sebagai sumber utama pendapatan rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubah persepsi masyarakat lokal bahwa menanam pohon dapat menghasilkan buah dan HHBK lainnya - melalui penyuluhan yang efektif</li> </ul>

Studi ini menegaskan terbatasnya kegiatan penyuluhan untuk membantu petani meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan praktik produksi dan pemasaran kayu. Para petani dan penduduk desa mengaku belajar sendiri dalam menanam jati, gamelina (*Gmelina*

*arborea*) dan mahagoni (*Swietenia spp*) - hanya berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Beberapa petani mengatakan bahwa pemerintah hanya mendistribusikan bibit seperti yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Demikian pula, petani mengaku mendapatkan informasi tentang perda tentang izin penebangan kayu (Perda No 26 tahun 2006 tentang IPKTM) dari petani lain melalui komunikasi antarpribadi. Tidak ada kegiatan khusus dari petugas lapangan, penyuluh (BP4K dan BP3K) dan lain-lain untuk menginformasikan dan berbagi peraturan kayu di tingkat desa. Namun, dikatakan oleh kepala desa bahwa kepala desa dilatih untuk memahami proses dan prosedur pemanenan dan pemasaran kayu.

**Desa Pelat:** Karena kesamaan kendala rantai nilai antara desa Batudulang dan Pelat, intervensi alternatif untuk meningkatkan rantai nilai kayu yang ada serupa seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14.6. Kendala dan Alternatif Intervensi untuk Meningkatkan Rantai Nilai Kayu

Kendala	Intervensi Alternatif
(1) Petani sulit menjual jati karena sulitnya mendapatkan izin (IPKTM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas petani terhadap peraturan pemerintah dan bertindak melalui kegiatan penyuluhan, tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan mereka tetapi juga untuk mengubah sikap, keterampilan dan praktik mereka.</li> <li>• Memfasilitasi masyarakat atau petani setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah atas tanah jati mereka</li> <li>• Merevisi peraturan daerah yang ada tentang izin penebangan / penebangan (Perda no. 26 tahun 2006) dan mulai menerapkan P. 30 tahun 2012.</li> </ul>
(2) Kurangnya pemahaman petani tentang pemasaran kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengetahuan petani tentang pasar dan pemasaran kayu</li> </ul>
(3) Kurangnya akses petani ke informasi pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung dan memberi petani informasi pasar seperti harga kayu, kualitas, kuantitas, dan harapan pelanggan lainnya (oleh Dinas Kehutanan; Lembaga Penyuluhan, dan lain-lain)</li> <li>• Mendorong pelaku rantai nilai lainnya untuk berbagi pengetahuan dan harapan mereka dengan petani yang pada gilirannya dapat menghasilkan keputusan petani yang lebih baik tentang pengelolaan pertanian jati - keputusan yang tepat untuk sistem dan pengelolaan agroforestri petani.</li> </ul>

- 
- |   |  |
|---|--|
| (4) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan jati dan dalam memperkirakan volume kayu  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha tani jati seperti melalui penerapan praktik-praktik yang direkomendasikan (penjarangan dan pemangkasan, lain-lain) serta pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memperkirakan volume kayu.</li><li>• Mendorong petani untuk melakukan pengolahan jati mereka</li><li>• Pemasaran kolektif melalui usaha kelompok dan atau koperasi petani</li></ul> |
| (5) Pengolah kayu jati lokal (di tingkat desa) tidak memiliki legal standing untuk menjalankan usahanya, sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengangkut produknya. Alhasil, mereka “membayar” izin / surat dari pengolah / pedagang jati Sumbawa lainnya untuk mengangkut produknya dengan aman. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pengolah kayu lokal dalam mendapatkan legal standing untuk bisnis mereka.</li><li>• Memfasilitasi pengolah kayu lokal untuk mendapatkan ijin usahanya.</li></ul>  |
- 

Masalah penyuluhan serupa juga ditemukan di desa ini. Petani mengaku terbatas bahkan tidak adanya kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan usaha tani jati. Petani kebanyakan menanam pohon sesuai pengalaman dan pembelajaran dari petani lain. Namun, ada dua staf desa yang dilatih oleh pemerintah (Dinas Kehutanan) beberapa tahun yang lalu tentang pengelolaan usaha tani jati seperti cara penjarangan dan pemangkasan, namun staf tersebut tidak pernah memberi tahu petani lain tentang pelajaran yang mereka dapat. Pengalaman ini menyarankan perlunya melakukan penyuluhan langsung kepada petani jati, bukan melalui pimpinan formal desa atau ketua kelompok.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

**Kesimpulan:** Produksi dan pemasaran atau hasil kayu dari Desa Batudulang dan Pelat cukup berbeda dan belum banyak memberikan kontribusi bagi mata pencaharian masyarakat setempat. Bagi masyarakat Batudulang, hasil kayu dan kegiatan pemasaran bukan merupakan sumber utama pendapatan masyarakat setempat. Mereka menggunakan kayu seperti udu, salam, lita, dadap, suren, telutu, suir, dan sonokling (*Dalbergia latifolia* Roxb) untuk kebutuhan domestik mereka sendiri - pembangunan rumah. Menurut petani yang diwawancarai untuk penelitian ini, spesies kayu ini tumbuh secara alami di dalam properti, dan beberapa petani baru mulai tumbuh mahagoni, jati dan gamelina selama 5 tahun terakhir. Demikian pula di desa Pelat, produksi dan pemasaran jati dianggap sebagai sumber pendapatan sekunder rumah tangga petani. Petani sebagian besar bergantung pada produksi tanaman pangan seperti kacang tanah, jagung, dan ketela pohon. Kontribusi terbatas produksi kayu terhadap pendapatan masyarakat lokal juga disebabkan oleh terbatasnya jumlah pohon di kebun mereka (kasus Batudulang dimana pohon yang paling dominan adalah cundlenut dan kopi), masih muda, dan sulit untuk ditebang dan ditebang. izin panen.

Kendala utama rantai nilai kayu yang ada adalah (1) kesulitan petani untuk menjual kayunya karena sulitnya mendapatkan izin penebangan (IPKTM), dan karena tidak adanya sertifikat tanah petani; (2) kurangnya pemahaman petani tentang pemasaran kayu; (3) kurangnya akses petani ke informasi pasar; dan (4) kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan usaha tani kayu dan dalam memperkirakan volume kayu.

**Rekomendasi:** Saran-saran berikut dikembangkan dari studi ini untuk meningkatkan rantai nilai kayu yang ada yang pada gilirannya dapat mengarah pada peningkatan mata pencaharian petani kecil:

- (1) Meningkatkan kapasitas petani terhadap peraturan pemerintah dan bertindak melalui kegiatan penyuluhan, tidak hanya untuk

- meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga untuk mengubah sikap, keterampilan dan praktik mereka.
- (2) Memfasilitasi masyarakat atau petani lokal untuk mendapatkan sertifikat tanah untuk lahan pertaniannya. Ada juga kebutuhan untuk merevisi peraturan kabupaten yang ada tentang izin penebangan / penanaman (Perda no. 26 tahun 2006) dan mulai menerapkan P.30 tahun 2012.
  - (3) Meningkatkan pengetahuan petani tentang produksi dan pemasaran kayu melalui layanan penyuluhan yang efektif. Para petani kayu (petani jati dan non-jati) perlu meningkatkan pengetahuan mereka tentang pengelolaan pohon dan pertanian dengan mengadopsi praktik-praktik yang direkomendasikan seperti penjarangan dan pemangkasan. Kegiatan penyuluhan juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam memperkirakan volume kayu saat mereka menjual pohonnya. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani atau penanam pohon juga dapat dilakukan melalui kemitraan petani dengan pedagang / industri pengolahan kayu. Keterampilan teknis dapat diberikan oleh industri-industri tersebut yang pada akhirnya dapat menjamin kualitas kayu yang diperoleh dari petani.
  - (4) Ada kebutuhan untuk mendukung petani dalam mendapatkan informasi pasar seperti harga kayu, kualitas, kuantitas dan harapan pelanggan lainnya. Dinas Kehutanan Kabupaten; Organisasi Penyuluhan, dan Dinas Perdagangan, Industri, dan Koperasi adalah pemangku kepentingan utama untuk melakukan ini - membantu petani mendapatkan informasi pasar. Pemasaran kolektif melalui usaha kelompok dan atau koperasi petani juga bisa menjadi pilihan intervensi untuk mengatasi masalah pemasaran.
  - (5) Mendorong pelaku rantai nilai lainnya untuk berbagi pengetahuan dan harapan mereka dengan petani yang pada gilirannya dapat menghasilkan keputusan petani yang lebih baik tentang pengelolaan pertanian jati - keputusan yang tepat untuk sistem dan pengelolaan agroforestri petani.

- (6) Mendorong petani untuk melakukan pengolahan kayu seperti jati dan sonokling.
- (7) Meningkatkan pengetahuan pengolah kayu lokal dalam mendapatkan legal standing untuk bisnis mereka.
- (8) Memfasilitasi pengolah kayu lokal untuk mendapatkan ijin usahanya.
- (9) Kebijakan pendukung dan teknologi yang tepat juga diperlukan untuk mendukung produksi dan pemasaran kayu yang lebih efektif.

#### **14.6. Rencana Bisnis**

Pengelolaan usaha tani yang minim belum sejalan dengan arah pengembangan agribisnis bagi peningkatan ekonomi petani. Sesuai dengan uraian tentang manfaat analisis rantai nilai, penyusunan rencana bisnis diperlukan jika petani mau beralih dari pengelolaan usaha tani secara subsisten ke pengelolaan usaha tani secara komersial. Adalah menjadi tugas penyuluh untuk mendukung petani dalam mengembangkan rencana bisnis usaha taninya sesuai dengan informasi pasar. Kegiatan pada Proyek Kanoppi 1 dan 2 serta CBCF 1 di Sumbawa telah memfasilitasi petani untuk berkunjung ke industri pengolahan kayu. Pelajaran penting dari kunjungan ke industri pengolahan kayu ini adalah munculnya kesadaran bahwa hanya pohon dan kebun yang dikelola dengan baik yang akan menghasilkan kayu jati yang berkualitas dan dapat dihargai dengan harga yang layak.

Rencana bisnis dalam usaha tani dapat dikembangkan setelah melakukan analisis rantai nilai. Isi dari suatu rencana bisnis adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 14.7 berikut ini.



Tabel 14.7. Matriks Deskripsi Rencana Bisnis Usaha tani Kayu Jati

KOMPONEN	BUDIDAYA JATI
<b>Pengelola usaha</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Usaha budidaya: Perorangan/Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan model pengelolaan monokultur</li> <li>Kelompok Usaha Bersama (KUB)</li> </ol>
<b>Deskripsi produk</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jati dengan kualitas yang diminta pasar berupa log, dengan kualitas sesuai permintaan pasar</li> <li>KUB: Jasa Pemasaran Log dan Jasa pengelolaan kebun jati – pemangkasan/penjarangan/pemasaran</li> <li>KBR/KBD: bibit yang berkualitas</li> </ol>
<b>Analisis pasar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasar Log: Industri Pengolahan (Makassar Utama) dan Industri Rumah Tangga (Pengrajin Meubelair)</li> <li>Jasa KUB: Pemilik Kebun Jati</li> <li>Pasar Bibit: Pemilik/ Petani Jati</li> </ol>
<b>Daya saing</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas petani untuk melaksanakan budidaya yang sesuai dengan teknik silvikultur.</li> <li>Mengetahui estimasi volume tegakan</li> <li>Mengetahui cara dan teknik budidaya jati</li> <li>Pengetahuan petani dan kelompok untuk mengurus SKAU</li> </ol>
<b>Strategi produksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dukungan alat, bahan, modal dan kebijakan</li> <li>Memenuhi prasyarat kelayakan usaha tani: memenuhi skala usaha minimum dan berkelompok</li> <li>Pengembangan rencana bisnis dan operasionalisasi bisnis</li> </ol>
<b>Strategi pemasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bermitra dengan industri Pengolahan (Makassar Utama), Industri Rumah Tangga (Pengrajin Meubelair), instansi terkait (Dishutbun)</li> <li>Bermitra dengan kelompok tani pemilik jati</li> </ol>
<b>Analisis keuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Modal minimal yang dibutuhkan untuk memulai usaha pembibitan, KUB dan penanaman jati</li> <li>Analisis Biaya dan Kelayakan Usaha – lihat Tabel 14.8.</li> </ol>
<b>Dukungan Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penegakan pelaksanaan Regulasi SKAU.</li> <li>Regulasi larangan penjualan log ke luar Kabupaten Sumbawa.</li> <li>Fasilitasi oleh SKPD terkait.</li> </ol>
<b>Lampiran</b>	Analisa Kelayakan Usaha Tani, Data Potensi Jati di Kabupaten Sumbawa dan Data Pembeli Jati.

Sumber: Laporan Tahunan Kanoppi Proyek – Sumbawa (Muktasam A. , 2021).

Analisis kelayakan usaha tani kayu jati yang ditampilkan dalam Tabel 14.7 disajikan pada Tabel 14.8 berikut ini.

Tabel 14.8. Analisa Kelayakan Usaha Tanaman Jati

Jati	Hasil Perhitungan Baseline	Sensitivity Analysis (Pedoman Budidaya Ideal, FORDA, LITBANG)
<b>Total pengeluaran</b>	Rp 19,063,735	Rp 19,240,679
<b>Total pendapatan</b>	Rp 25,078,157	Rp 44,132,942
<b>NPV (per ha)</b>	Rp 6,014,421	Rp 24,892,263
<b>Internal Rate of Return (IRR)</b>	9.84%	12.68%
<b>Benefit Cost Ratio (BCR)</b>		
Total diskonto pendapatan	Rp 25,078,157	Rp 44,132,942
Total diskonto pengeluaran	Rp 19,063,735	Rp 19,240,679
Nilai BCR	<b>1.32</b>	<b>2.29</b>
<b>Return to labour</b>		
Total diskonto pendapatan	Rp 25,078,157	Rp 44,132,942
Total diskonto pengeluaran tenaga kerja untuk produksi	Rp 9,899,444	Rp 10,137,126
Nilai Return to labour	2.53	4.35

Catatan: Analisis ini berdasarkan Baseline Survei dan Analisis Sensitifitas dengan Daur Hidup 20 Tahun

## 14.7. Kemitraan Bisnis

Kemitraan atau *partnership* telah menjadi pilihan yang umum didiskusikan dan diambil dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi petani kecil dalam hal produksi dan pemasaran. Petani kecil yang identik dengan semua keterbatasan perlu dibantu untuk mengatasi kesulitan dalam proses produksi dan bahkan pemasaran. Diharapkan melalui kemitraan petani kecil dapat dibantu dalam memenuhi kebutuhannya akan sarana produksi seperti pupuk, obat-obatan, dan bantuan teknis lainnya termasuk teknologi, hingga pada dukungan bagi pemasaran atas produk yang dihasilkannya sehingga mendapatkan harga yang layak dan memberikan keuntungan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa kegagalan dalam memasarkan produk menyebabkan petani kecil kembali jatuh dalam kerugian dan kemiskinan. Atas dasar latar belakang ini, pilihan kemitraan menjadi

salah satu opsi untuk memberikan jaminan pemasaran bagi petani kecil.

Namun demikian, janji manis kemitraan tidak selamanya dapat dipenuhi, dan bahkan seringkali muncul dan berubah wajah menjadi hubungan eksploitatif dan pengisapan surplus ekonomi. Pembeli dengan niat untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya akan memanfaatkan kelemahan petani dalam hal informasi pasar dan modal, akan membeli produk petani dengan harga yang murah dan tidak lagi berpikir untuk hubungan kemitraan jangka panjang, yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Bab ini menyajikan konsep dasar dan prinsip-prinsip kemitraan, pola-pola kemitraan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai pada kemitraan yang ideal, yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak. Kajian teoritis ini kemudian akan digunakan untuk membahas dan menjelaskan fenomena kegagalan dalam merintis kemitraan dan atau mewujudkan kemitraan yang ideal, yang memberikan manfaat bagi petani kecil. Ada tahapan dan pra-kondisi yang harus dipahami oleh semua pihak yang akan bermitra (misalnya petani dan industri dan pemerintah) sebelum mereka sampai pada kesepakatan untuk bermitra, tidak saja dalam aspek teknis produksi, tetapi juga sumber daya manusia, sumber daya sosial, dan lingkungan kebijakan.

### **Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Kemitraan**

Kemitraan atau *partnership* atau kerjasama saling menguntungkan telah menjadi salah satu strategi kebijakan dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat – usaha kecil, baik di sektor pertanian maupun di luar sektor pertanian. Mengacu kepada Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menjadi landasan hukum pengembangan usaha kecil melalui kemitraan, kemitraan diartikan sebagai berikut:

“Kemitraan adalah *kerjasama* usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan

*memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.*<sup>16</sup>

Sebagai tindak lanjut dari UU. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, maka pada usaha kecil sektor pertanian pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/Ot.210/10/1997 tentang “*Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*,” dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/Ot.210/10/1997 tentang “*Pedoman Penetapan Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian*”.

Sejalan dengan dinamika dan perkembangan dunia usaha, maka lahir UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kemitraan pada Pasal 1 Ayat 13 dalam Undang-undang ini didefinisikan sebagai berikut:

*“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”*

Mengingat bahwa pelaksanaan kemitraan tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana direncanakan dengan prinsip *saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan*, maka pemerintah juga mengeluarkan kebijakan ditujukan untuk mendukung terlaksananya kemitraan yang efektif melalui misalnya “Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.1 tahun 2015 tentang *Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan*” yang menjadi panduan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia<sup>17</sup>.

Kedua definisi di atas sama-sama menegaskan bahwa kemitraan adalah hubungan kerjasama antara dua pihak-pihak atau lebih dengan

---

<sup>16</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<sup>17</sup> **Komisi Pengawas Persaingan Usaha** atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggungjawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang, diangkat oleh [Presiden Indonesia](#) berdasarkan hasil [Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia](#).

prinsip *saling mendukung, mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan*.

Mengacu kepada Pasal 2 Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, prinsip-prinsip kemitraan dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Kemitraan antara usaha mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
  - a. Saling membutuhkan;
  - b. Saling mempercayai;
  - c. Saling memperkuat, dan
  - d. Saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan antara usaha mikro, Usaha Kecil atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan kekuatan oleh Usaha Besar.
- (4) Dalam melaksanakan kemitraan antara usaha mikro, Usaha Kecil atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

### **Alternatif Pola Kemitraan**

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan kemitraan (Pemerintah Republik Indonesia, 1995; 2008; 2015), maka secara umum ada paling tidak 6 (enam) pola kemitraan yang dapat menjadi pilihan dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi petani dan atau peningkatan UMKM, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Inti-Plasma* merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

- (2) *Sub Kontrak* merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- (3) *Dagang Umum* merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- (4) *Waralaba* adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen;
- (5) *Keagenan* merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
- (6) *Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)* merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Selain keenam pola kemitraan yang umum ini, dalam Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No.01 Tahun 2015 dijelaskan 3 (tiga) pola lain dalam kerjasama kemitraan yaitu *pola bagi hasil* (profit sharing), *usaha patungan* (joint venture), dan *penyumberluaran* (outsourcing).

Pendalaman yang dilakukan terhadap PT. Sido Muncul, diketahui bahwa perusahaan ini menawarkan 5 alternatif pola kerjasama kemitraan, yaitu:

- (1) *Kemitraan langsung antar PT. Sido Muncul dengan petani secara perorangan* untuk memproduksi bahan baku yang

dibutuhkan oleh perusahaan (*head to head partnership* where the industry is working with individual farmers for specific medicinal plants).

- (2) *Kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah daerah dan petani* untuk memproduksi bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan – Tripartit.
- (3) *Perusahaan bekerjasama dengan sektor swasta sebagai pemasok atau suppliers dan para petani.*
- (4) *Kemitraan antara perusahaan dengan lembaga perwakilan dari petani seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), koperasi atau Bumdes.*
- (5) *Kemitraan melalui konsep klaster - “cluster concept”*

### **Tahapan Pengembangan Kemitraan**

Beberapa tahapan dan prakondisi penting yang harus dipenuhi dan dipersiapkan dalam rangka mewujudkan kerjasama bisnis atau kemitraan adalah sebagai berikut:

- (1) *Parapihak yang hendak bermitra memiliki pandangan dan visi yang sama tentang produk akhir yang akan dihasilkan.* Sesuai dengan hasil analisis rantai nilai, pesan dan atau informasi yang dikirim oleh konsumen akhir melalui pelaku lain dalam rantai nilai seharusnya menjadi dasar bagi produsen dan pelaku lain dalam rantai ini untuk membuat keputusan terbaik dalam proses produksi, sortasi, pengepakan, transportasi, dan lainnya. Hal ini terkait dengan jumlah yang diproduksi, spesifikasi dan kualitas produk, waktu dan harga yang layak untuk produk yang dihasilkan.
- (2) *Parapihak sudah berada pada kondisi siap untuk melakukan kerjasama kemitraan sesuai dengan persyaratan dan standard-standar kemitraan yang disepakati.* Kemitraan yang ideal menghendaki adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang

baik dan jelas bagi setiap pihak yang akan bermitra, dan semuanya tertulis dengan jelas dalam kesepakatan kemitraan. Kemitraan antara petani dengan PT. Sido Muncul misalnya, petani baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan jelas tentang jenis produk yang diminta oleh perusahaan, jumlah dan kualitasnya, waktu penyediaannya dan dalam bentuk yang seperti apa (Hidayat & Supartoko, 2017). Jika kemitraan akan dilakukan melalui kelembagaan petani, maka kelembagaan ini harus dipersiapkan hingga memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk menjalin dan menjalankan kerjasama kemitraan.

- (3) *Merintis, menjajaki, dan menyepakati kerjasama kemitraan termasuk pembagian peran dan tanggung jawab yang dinyatakan secara jelas dalam nota kesepakatan atau kontrak kerjasama kemitraan.*
- (4) *Pelaksanaan kemitraan antara parapihak sesuai kesepakatan. Masing-masing pihak melaksanakan perannya sesuai yang seharusnya dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam proses produksi barang dan jasa yang dikehendaki konsumen akhir. Proses pendampingan, supervisi, dan bentuk dukungan lainnya oleh perusahaan dilakukan sesuai kesepakatan (jika ada).*
- (5) *Memelihara dan memupuk kerjasama kemitraan sehingga kemitraan akan berjalan sesuai harapan, dimana masing-masing pihak merasa mendapatkan keuntungan dan manfaat yang sama dan adil. Seringkali kemitraan bisnis berakhir karena ada pihak yang merasa tidak adil, tereksplorasi, dan atau sengaja melanggar kesepakatan kemitraan karena tergiur oleh kondisi sesaat yang terjadi di sekitarnya (sebagai contoh, petani menganggap harga pasar jauh lebih tinggi dan menguntungkan dibanding dengan harga yang disepakati dengan perusahaan walau sering disadari bahwa harga ini sangat fluktuatif dan hanya sementara).*
- (6) *Lingkungan yang mendukung bagi berlangsungnya kerjasama sehingga tujuan kerjasama yang saling menguntungkan dapat*



*diwujudkan bersama* (“...an enabling environment needs to exist with adequate structures in place for both the governance<sup>18</sup> and management<sup>19</sup> of agri-PPPs; FAO, 2016, p.105).

- (7) *Peninjauan kembali kesepakatan kerjasama bisnis sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebijakan sehingga akan tetap memberikan kesempatan yang sama untuk setiap pihak yang terlibat dalam kemitraan untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang sama dan adil.* Proses ini dapat dilakukan tiap tahun atau setiap saat sesuai kebutuhan.

Data dan informasi dari PT. Sido Muncul memberi gambaran tentang beberapa persyaratan atau pra-kondisi bagi berlangsungnya suatu kemitraan, antara lain sebagai berikut:

- (1) *Petani memiliki komoditas yang potensial untuk diproduksi, dikembangkan dan dipasarkan* karena kondisi lahan dan iklim yang mendukung – kayu, HHBK, dan atau tanaman pertanian dan lainnya.
- (2) *Komoditi tersebut diproduksi dalam skala yang besar atau luas – dapat dilakukan melalui corporate farming atau oleh petani melalui organisasi Gabungan Kelompok Tani, dan atau melalui*

---

<sup>18</sup> Governance is essentially concerned with “*doing the right thing*”. According to FAO (2014b: 1), governance embraces “all the formal and informal rules, institutions and organizations and processes through which public and private actors articulate their interests; frame and prioritize issues; and make, implement, monitor, and enforce decisions”. Dalam konteks Kanoppi 2, termasuk dukungan kebijakan, kelembagaan dan organisasi. Beberapa prinsip umum dan isu-isu implementasi dari governance adalah: (1) promoting *sound institutional frameworks* that support agri-PPPs; (2) ensuring that good legislative and regulatory frameworks – *rule of law* – are in place and enforced, termasuk yang dilakukan oleh Tim Kanoppi Objective 4; (3) fostering *prudent and transparent selection and budgetary processes – kasus CV. Sahabat Forestry bisa dibahas dalam poin ini*; (4) guaranteeing the *affordability and value for money* of PPPs as the best option for achieving stated public-sector objectives; (5) designing adequate *exit and adjustment strategies*.

<sup>19</sup> Management is concerned with “*doing things in the right way(s)*” in the day-to-day operations of the PPP. Managerial decisions need to be aligned with the strategies, policies, processes and procedures that have been established in the PPP governance structure.

proses produksi dalam kawasan yang luas pada satu atau lingkat KPH<sup>20</sup>.

- (3) *Petani memiliki kelompok atau organisasi seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi petani, dan lainnya. Kemitraan akan dapat dilakukan jika kelompok atau organisasi petani ini sudah berfungsi dan operasional.*
- (4) *Petani memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga pendukung seperti koperasi, Bumdes, UD, CV, PT, dan lainnya.*
- (5) *Petani dapat memenuhi criteria yang ditentukan oleh industry – dalam hal jenis produk yang dikembangkan, kualitas, jumlah, dan keberlanjutannya.*
- (6) *Petani berkomitmen terhadap kesepakatan bersama atau MoU.*

Data hasil wawancara dengan bagian kerjasama dengan PT. Sido Muncul menunjukkan bahwa dalam rangka membangun kemitraan yang efektif diperlukan syarat dan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Dukungan Tim Kanoppi Objective 1 (Agroforestry options) dan Objective 3 (Extension) diperlukan untuk mencapai kondisi ini. Sesuai judul Proyek Kanoppi “*Developing and promoting market-based agroforestry options and integrated landscape management for smallholder forestry in Indonesia*”, pertanyaannya adalah “Apakah sudah ada rekomendasi pilihan agroforestry di Desa Pelat dan Batudulang dalam rangka perbaikan penghidupan petani kecil?” Rekomendasi opsi pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry di Pelat mungkin “Teak-based agroforestry system dengan jati sebagai tanaman utama dan jahe, kacang atau tanaman pertanian lainnya ditanam di antara jati”. Rekomendasi pilihan agroforestry ini tidak saja menyangkut pengenalan dan penambahan sepsis tanaman ke dalam sistem pertanian yang sekarang, tetapi juga sistim pengelolaannya, seperti antara lain silvicultural management practices dimana petani melakukan praktik-praktik pengelolaan pohon melalui pemangkasan (pruning) dan penjarangan (thinning). Pertanyaan yang sama dapat diajukan untuk Desa Batudulang. “Apakah sudah ada rekomendasi pola agroforestry di Batudulang dalam rangka peningkatan produksi dan penghidupan petani? Apakah ketak dan buah menjadi bagian dari pola atau model agroforestry yang akan dikembangkan di Desa Batudulang? Rekomendasi ini tentu terkait dengan penelitian dan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kanoppi Objective 1 yang telah melakukan penelitian tentang ketak dan pelatihan pengembangan bibit buah-buahan. Jika di kedua desa yang menjadi lokasi proyek Kanoppi tidak ada belum ada rekomendasi pilihan agroforestry, maka akan upaya sistimatis mendorong proses adopsi dan difusi model atau pola agroforestry, maka akan sulit bagi Tim Kanoppi objective 2 untuk mendorong dan memfasilitasi proses kea rah pengembangan kemitraan dalam skala yang besar. Kerjasama Tim Objective 1 dan 3 akan sangat strategis dalam memenuhi syarat atau pre-conditions for “large scale production”.

- (1) Petani memiliki atau tergabung dalam kelembagaan petani seperti kelompok tani, koperasi tani, asosiasi petani dan lainnya.
- (2) Petani dan kelembagaannya perlu memastikan bahwa lokasinya cocok untuk pengembangan komoditi yang diperlukan oleh PT. Sido Muncul. Perusahaan bahkan akan melakukan uji coba kecocokan lokasi bagi pengembangan salah satu produk atau tanaman yang menjadi bahan baku yang diperlukannya.
- (3) Tahap berikutnya adalah pengajuan usulan kerjasama antara petani dan kelembagaan petani dengan PT. Sido Muncul.
- (4) Evaluasi kelayakan kerjasama oleh PT. Sido Muncul yang kemudian akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu direkomendasikan untuk diteruskan, dan tidak direkomendasikan untuk diteruskan. Bagi usulan kerjasama yang direkomendasikan, maka tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi lapangan, koordinasi dengan calon mitra, ujicoba lapangan, dan pada akhirnya proses kesepakatan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Pengalaman dalam proyek ACIAR dan World Vegetable Center – Tanzania (Dent & Macharia, 2017) menunjukkan 7 (tujuh) tahapan dalam merintis kemitraan petani dengan pelaku pasar lainnya, yaitu:

- (1) Daftar semua pasar potensial yang mungkin
- (2) Identifikasi kelebihan dan kelemahan yang dimiliki petani
- (3) Bandingkan atau sandingkan antara potensi pasar dengan kelebihan dan kelemahan petani
- (4) Investigasi lebih lanjut daftar potensi pasar untuk mendapatkan informasi dan data lebih detail
- (5) Persilahkan petani untuk memutuskan
- (6) Lakukan pertemuan antara aktor rantai nilai – misalnya petani dengan hotel, rumah makan atau restoran
- (7) Kesepakatan dan pengembangan rencana aksi untuk implementasi kemitraan.

## 14.8. Ringkasan

Analisis rantai nilai (*value chain analysis*) menjadi salah satu pendekatan dalam memahami kondisi atau keadaan sistem agribisnis suatu komoditas. Hal ini dapat dimaklumi karena pada analisis rantai nilai dilakukan pemetaan *proses-proses utama* untuk suatu komoditi, *pelaku atau aktor* di sepanjang rantai nilai, *kegiatan-kegiatan atau praktik* yang dilakukan oleh setiap pelaku pada rantai nilai (melakukan atau tidak melakukan kegiatan ideal atau semestinya sesuai peran dan fungsinya dalam rantai nilai, guna menambah nilai terhadap produk akhir), analisis gap dalam hal *pengetahuan, keterampilan dan sikap* untuk menjelaskan *kegiatan-kegiatan atau praktik* yang ada. Selain itu, analisis rantai nilai juga melakukan pemetaan perubahan nilai produk, serapan tenaga kerja, kendala dan peluang bagi pengembangan rantai nilai.

Data yang diperoleh dari analisis rantai nilai ini akan dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kinerja rantai nilai, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan para aktor atau pelaku rantai nilai, khususnya bagi para petani dan keluarganya. Selain itu, hasil analisis akan dapat bermanfaat dalam penyusunan rencana bisnis usaha tani, dan rencana pengembangan kemitraan bisnis sesuai dengan pola yang disepakati.

\*\*\*

## 15. PENYULUHAN DALAM ERA PERUBAHAN IKLIM

### 15.1. Pengantar

Perubahan iklim menjadi tantangan bagi penyuluh dan dunia penyuluhan. Hal ini mengingat pengaruh perubahan iklim terhadap pertanian dan kehidupan petani. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim telah berpengaruh sangat nyata pada sektor pertanian dan kehidupan petani. Peristiwa kegagalan panen karena adanya iklim yang ekstrem – hujan berkepanjangan, panas yang tinggi, dan kekeringan adalah beberapa fenomena iklim yang telah menyebabkan rusaknya atau gagalnya produksi pertanian (Muktasam, Wayan, Puspadi, & Nuge, 2015).

Peran penyuluh dan lembaga penyuluhan sangat krusial dalam membantu petani menghadapi perubahan iklim sebagaimana rekomendasi Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional “*International Food Policy Research Institute*” (IFPRI), yang salah satu rekomendasinya adalah sebagai berikut: (1) *Merancang dan menerapkan program dan kebijakan yang lebih baik*; (2) *Meningkatkan investasi dalam peningkatan produktivitas pertanian*; (3) *Menguatkan kembali program-program penelitian dan penyuluhan*; (4) *Memperbaiki proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data global*; (5) *Menjadikan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai agenda penting dalam proses negosiasi perubahan iklim internasional*; (6) *Menyadari bahwa penguatan ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim adalah dua hal yang harus dilakukan secara Bersama*; (7) *Mendukung tindakan adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat*; dan (8) *Meningkatkan anggaran untuk program adaptasi perubahan iklim paling tidak dengan tambahan \$ 7 billion per year* – guna mendukung penelitian, investasi infrastruktur dan irigasi guna mengatasi dampak negatif perubahan iklim. Investasi berbeda untuk setiap wilayah, dan untuk Sub-Sahara Afrika investasi banyak pada infrastruktur jalan, Amerika

Latin investasi untuk penelitian pertanian, dan untuk Asia investasi untuk efisiensi irigasi (Nelson, et al., 2009).

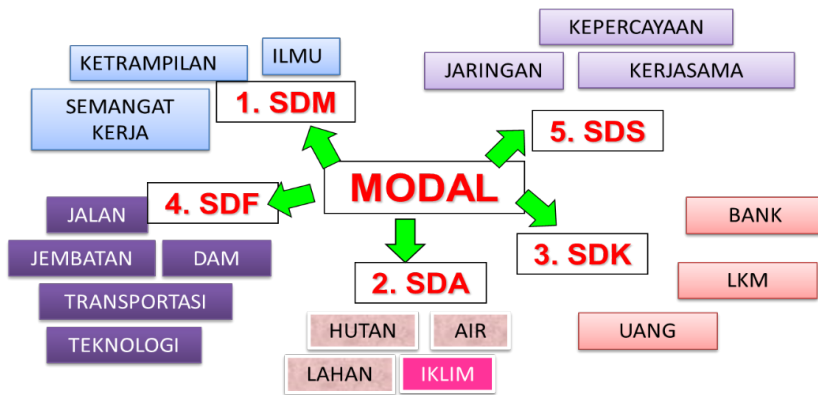
*“Penguatan program penelitian dan penyuluhan – dalam negara-negara, program penyuluhan dapat memainkan peran penting dalam penyebaran informasi secara efektif, transfer teknologi, fasilitasi interaksi, penguatan kapasitas petani, mendorong petani untuk membentuk jaringannya sendiri. Pelayanan khusus termasuk di dalamnya adalah penyebaran varietas tanaman local yang tahan terhadap kekeringan, mengajarkan sistem pengelolaan tanaman yang lebih baik, dan fasilitasi pengumpulan data guna memfasilitasi jaringan penelitian nasional. Organisasi petani dapat menjadi wadah efektif dalam mekanisme sharing informasi, dan memiliki potensi untuk memberikan hubungan yang efektif dan efisien antara usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dengan kegiatan petani”* – “Reinvigorate research and extension: ...within countries, effective dissemination of extension program can play importance roles in information charing by transferring technologies, facilitating interaction, building capacity among farmers, encouraging farmer to from their own network. Extension services that specifically address the issues of adaptation strategies include the dissemination of local cultivare drought-resistent crop varieties, teaching improve crop management systems, and gathering information collection to facilitate national research network. Farmer organization could be an effective information sharing mechanism and have the potential to provide cost-effective links between government efforts and famers’ activities” (Nelson, et al., 2009).

Uraian dalam Bab ini menyoroti fakta hasil penelitian, dan menawarkan opsi untuk penguatan peran penyuluhan dalam mendukung rekomendasi dari IFPRI. Beberapa hasil penelitian perubahan iklim yang pernah dilakukan di Pulau Lombok akan disajikan sebagai acuan dalam merancang pilihan kebijakan sebagai jalan keluar (Muktasam, Wayan, Puspadi, & Nuge, 2015; Muktasam, Sahidu, & Hayati, 2022).

## 15.2. Perubahan Iklim dan Pertanian

Modal sumber daya alam (*iklim dan perubahan iklim termasuk di dalamnya*) menjadi bagian penting dari sistem pengembangan masyarakat. Perubahan iklim telah menjadi perhatian penting di tingkat global karena telah dirasakan dampak negatifnya pada sektor pertanian seperti terjadinya kegagalan panen karena terjadinya iklim ekstrem. Apabila petani gagal dalam melakukan tindakan adaptasi terhadap terjadinya perubahan iklim, maka kondisi sosial ekonomi petani akan memburuk, termasuk ancaman terhadap kondisi ketahanan pangan (Nelson, et al., 2009) (Fischer, Shah, Tubiello, & Van Velhuizen, 2005), yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi perilaku mereka terhadap pengelolaan sumber daya alam, yang juga akan mempengaruhi stok atau ketersediaan modal sumber daya alam, baik dalam hal jumlah maupun kualitasnya (Pretty, 1999).

Ketika faktor perubahan iklim dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan, maka keberhasilan pembangunan pedesaan atau pengembangan masyarakat tidak hanya akan tergantung pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dinamika aspek lingkungan biofisiknya seperti perubahan iklim. Kebijakan dan praktik pengembangan masyarakat harus keluar dari paradigma lama dan menyentuh aspek perubahan iklim. Prediksi iklim yang tepat dan pasti seharusnya mendapat perhatian penting dan termasuk menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya ketika memikirkan faktor produksi lainnya. Kegiatan khusus perlu dirancang untuk dilakukan terkait dengan perubahan iklim ini dalam rangka membantu petani dan atau nelayan untuk membuat keputusan terbaik dalam melakukan tindakan adaptasinya. Petani dan nelayan harus berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan tersebut, dan sebagai hasilnya, mereka akan memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan persepsi, yang pada gilirannya akan menyebabkan mereka mengadopsi rekomendasi tindakan adaptasi yang sesuai dengan kondisi dan perubahan iklim – Gambar 15.1.



Gambar 15.1. Iklim menjadi bagian dari Modal Sumber daya Alam

Terkait dengan perubahan iklim, kutipan berikut menyajikan penjelasan ilmiah tentang perubahan iklim, asal mula dan penyebabnya:

“The basic science regarding climate change is very clear. Greenhouse gases, such as carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), methane (CH<sub>4</sub>) and nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), trap the heat from the sun as it is radiated back from earth, consequently causing global warming. This level of greenhouse gas emissions have been building up in the atmosphere ever since Industrial Revolution, when human induced emissions of greenhouse gases started to increase along with industrial development. Emissions have continued to grow over the last sixty years because of the ongoing development of energy intensive activities. These emissions have now reached a level where the atmosphere can no longer absorb the continuing growth emissions without consequences to the earth’s climate (Stern, 2009; Pittock, 2008)” (in WIDCORP, 2009, page 26).

Ada beberapa komponen dari perubahan iklim yang telah diidentifikasi mempengaruhi secara nyata sektor pertanian dan kelangsungan hidup umat manusia (Suadnya,2010a) sebagaimana diuraikan berikut ini.

- (1) Perubahan dalam hal pola dan intensitas curah hujan. Hasil penelitian yang dilakukan di Negara Bagian Victoria – Australia menunjukkan bahwa sebagian besar petani (88.1%) menyatakan



bahwa mereka mengamati bahwa curah hujan dan “runoff” telah berkurang dalam waktu 10 tahun belakangan, dan sekitar 66.4% petani mengklaim telah terjadi perubahan dalam hal musim tanam (WIDCORP, 2009).

- (2) Telah terjadi perubahan dan kenaikan suhu udara. Studi yang dilakukan di Australia menemukan bahwa ada hubungan antara kenaikan suhu udara dengan volume arus sebagaimana yang diuraikan pada kutipan berikut ini “*Research suggests that a one degree Celsius increase in maximum temperature results in a 15 per cent decrease in stream flow in the Murray-Darling system.*” “*Penelitian menunjukkan bahwa satu derajat kenaikan temperatur akan menghasilkan 15% penurunan aliran arus di sistem Murray – Darling, sebuah Daerah Aliran Sungai di negara bagian New South Wales dan Victoria – Australia*” (dalam WIDCORP, 2009, page 27).
- (3) Terjadi kenaikan permukaan laut secara tetap, dan
- (4) Meningkatnya jumlah kejadian iklim yang ekstrem.

Semua perubahan ini telah mempengaruhi dan berkontribusi pada sistem usaha tani dan pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam sistem produksi pertanian dan perikanan (Muktasam, Wayan, Puspadi, & Nuge, 2015).

### **15.3. Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian dan Pesisir**

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim telah membawa dampak negatif terhadap sektor pertanian dan kehidupan masyarakat secara umum, termasuk pada masyarakat pesisir. Ketika masyarakat petani gagal melakukan penyesuaian terhadap perubahan iklim ini, maka mereka akan gagal dalam melakukan penanaman dan tidak akan mendapatkan apa-apa dari usaha taninya. Perubahan iklim juga tampak dari adanya cuaca yang ekstrem dengan tingkat curah hujan yang tinggi (hujan sepanjang tahun) atau musim kering yang berkepanjangan. Kondisi cuaca yang seperti ini akan menyebabkan

kegagalan dalam sistem usaha tani yang pada gilirannya merugikan petani secara ekonomi (Suadnya, 2010b). Terhadap masyarakat pesisir, perubahan iklim seperti yang diuraikan di atas (hujan yang terus menerus atau panas yang berkepanjangan) dapat mempengaruhi aktivitas melaut, yang kemudian juga akan mempengaruhi kemampuan tangkap dan pendapatan. Dampak lain dari perubahan iklim pada masyarakat pesisir adalah meningkatnya suhu dan naiknya permukaan air laut. Perubahan ini kemudian menyebabkan terjadinya abrasi pantai dan masuknya air laut ke kawasan-kawasan pemukiman nelayan. Bibir pantai menjadi curam dan kawasan pantai menjadi terbatas, yang juga mempengaruhi “lokasi sandar dan kawasan parkir perahu” para nelayan.

#### **15.4. Informasi Iklim dan Tindakan Adaptasi**

Agar dapat melakukan tindakan penyesuaian atau adaptasi yang efektif, maka petani dan masyarakat pesisir memerlukan informasi perubahan iklim yang cukup, akurat dan jelas serta tersedia pada waktu yang tepat. Informasi ini akan membantu petani dan masyarakat pesisir dalam membuat keputusan yang benar dan tepat dalam mengelola usaha taninya dan melakukan aktivitas melautnya. Bagi petani, mereka akan mampu untuk memutuskan kapan harus mulai mengolah lahan, jenis tanaman apa yang harus ditanam, kapan mulai menanamnya, dan bagaimana pola tanam yang sesuai.

Memberikan informasi perubahan iklim kepada petani dan masyarakat pesisir adalah merupakan isu atau persoalan tersendiri. Beberapa pertanyaan kunci tentang ini adalah sebagai berikut: (i) **SIAPA** yang seharusnya memberikan informasi iklim kepada petani dan masyarakat pesisir? (ii) **APA** informasi iklim yang perlu disampaikan kepada petani dan masyarakat pesisir, dan seberapa banyak dan akurat? Berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa informasi iklim yang ada tidak selalu akurat, termasuk juga pengalaman di negara-negara maju. Kondisi ini telah menyebabkan ketidak mampuan petani dalam memutuskan “pola pengelolaan” usaha taninya secara tepat dan menjadikan tindakan

adaptasi juga berada dalam ketidak pastian – tindakan adaptasi yang dilakukan melalui “coba-coba” (in WIDCORP, 2009), (iii) **KAPAN** memberikan informasi iklim yang benar dan tepat kepada petani dan masyarakat pesisir? Dan (iv) **BAGAIMANA** informasi itu dikemas dan dikomunikasikan sehingga dapat diterima dengan baik oleh para petani dan masyarakat pesisir? Hasil penelitian di Australia tentang pengetahuan petani terhadap perubahan iklim merekomendasikan perlunya tindakan khusus dalam merancang dan mengkomunikasikan informasi iklim dan perubahan iklim kepada petani sehingga mereka mampu membangun pemahaman dan memutuskan tindakan adaptasi yang sesuai (in WIDCORP, 2009, page 107). Studi lain juga menyarankan perlunya penyampaian informasi tentang alternatif tindakan adaptasi yang lebih fleksibel sebagai akibat dari ketidak pastian dalam prediksi atau perkiraan iklim (Lloyd, 2008).

Memfasilitasi petani untuk membuat keputusan yang tepat atas dasar informasi iklim yang tersedia adalah persoalan berikutnya. Petani harus memahami dan memiliki alternatif tindakan adaptasi terhadap suatu fenomena perubahan iklim (a.l. perubahan dalam jumlah dan pola curah hujan). Petugas penyuluhan atau penyuluh pertanian lapangan memainkan peran yang strategis dan penting dalam membantu petani dalam membuat keputusan terbaik dalam pengelolaan usaha taninya.

### **15.5. Komunikasi dan Disseminasi Informasi Iklim**

Diseminasi informasi iklim dan perubahan iklim yang efektif dapat dibahas dengan menggunakan model komunikasi SMCR dari Berlo (1960). Menurut Berlo, efektivitas komunikasi, termasuk dalam mengkomunikasikan iklim, ditentukan oleh paling tidak 4 faktor utama, yaitu Sumber (*Sources*), Pesan (*Message*), Saluran (*Channel*), dan Penerima (*Receivers*). Dalam konteks perubahan iklim dan informasi iklim, sumber komunikasi adalah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan lembaga penyuluhan yang bekerja dan melayani petani dan masyarakat pedesaan, yang juga menjadi penerima dan pengguna informasi iklim – receivers. Pada

pihak sumber informasi, maka ada beberapa hal penting yang menentukan efektivitas komunikasi, yaitu tentang pengetahuan atau *knowledge* (pengetahuan tentang kondisi penerima, pengetahuan tentang isi pesan, pengetahuan tentang media, pengetahuan tentang dirinya), ketrampilan komunikasi, sikap, dan kondisi sosial budaya. Jika seorang penyuluh memiliki pengetahuan yang memadai tentang “iklim dan perubahan iklim”, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan memiliki sikap yang positif terhadap iklim dan petani serta memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi sosial budaya di lingkungan kerjanya (termasuk di lingkungan petani), maka akan ada jaminan bahwa komunikasi yang dilakukannya dalam menyampaikan informasi iklim akan dapat dilakukan secara efektif.

Komponen kedua dari model komunikasi yang dikembangkan oleh Berlo adalah *pesan* yang akan disampaikan oleh sumber. Komunikasi yang efektif dipengaruhi oleh sejauh mana pesan itu sesuai dengan kebutuhan penerima (isi pesan), bagaimana pesan itu diperlakukan (diulang-ulang; divisualisasikan; ditempatkan di halaman depan dari sebuah harian), seberapa banyak pesan yang disampaikan (volume pesan), dan bagaimana pesan itu disampaikan (pengorganisasian pesan). Informasi tentang iklim dan perubahan iklim tampaknya memiliki karakteristik khusus (karena abstrak) dan oleh karenanya perlu mendapat perhatian khusus, yang berbeda dengan ketika menyampaikan sesuatu pesan yang bersifat real seperti pupuk (lebih nyata).

Komponen lain dalam komunikasi adalah saluran atau *channel* yang digunakan dalam menyalurkan pesan kepada penerima. Saluran komunikasi ini dapat berupa saluran massa seperti program televisi, radio dan surat kabar, dan media lainnya seperti buku, brosur, poster, leaflets, dan lainnya. Perancangan, pengembangan dan penggunaan media menghendaki pemahaman yang baik tentang pesan, dan kondisi dan latar belakang sosial ekonomi dan lingkungan penerima. Media televisi tidak akan digunakan untuk mengkomunikasikan informasi iklim ketika sumber mengetahui bahwa secara sosial ekonomi tingkat kepemilikan televisi adalah terbatas.

Komponen terakhir dari proses komunikasi dalam model SMCR yang dikembangkan oleh Berlo adalah penerima atau *receivers*. Seperti halnya dalam hal sumber, ada paling tidak empat hal yang juga perlu diperhatikan ketika mempertimbangkan komponen penerima pesan, yaitu pengetahuan dasar yang telah dimiliki, sikap, ketrampilan komunikasi, dan latar belakang sosial budaya. Komunikasi akan efektif ketika penyuluh atau sumber melakukan komunikasi pada tempat-tempat yang memberikan suasana nyaman kepada setiap petani yang ikut dalam kegiatan penyuluhan.

### **15.6. Sistem Penyuluhan dan Perubahan Iklim**

Gambar 15.2 memperlihatkan bagaimana perubahan iklim (Sumber daya Alam – Iklim, Air, Lahan, dan lainnya.) yang menjadi salah satu komponen dalam subsistem inputs, juga akan mempengaruhi komponen-komponen lain dalam sistem agribisnis – proses produksi, pasca panen dan pemasaran. Penyuluh dalam pelaksanaan penyuluhan kepada petani menyampaikan pesan-pesan terkait dengan sistem agribisnis yang ada saat ini, termasuk juga tentang iklim dan dampaknya terhadap pertanian. Gambar 15.2 memperlihatkan dua komponen utama penyuluhan, yang meliputi (1) *petani dan kelompok tani* sebagai sasaran penyuluhan, (2) *Penyuluh Pertanian Lapangan* (PPL) sebagai agen dan lembaganya yang melaksanakan tugas dan fungsi komunikasi dan informasi – menyampaikan pesan-pesan komunikasi dan inovasi, termasuk tentang iklim, strategi adaptasi, dan lainnya kepada para petani melalui pendekatan individu, kelompok tani, dan massa.



Gambar 15.2. Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Ruang Perubahan Iklim

Sistem penyuluhan pertanian sebagaimana digambarkan di atas biasanya berfungsi normal pada saat normal atau sebelum terjadinya pandemi covid-19 dimana para penyuluh pertanian lapangan melakukan kunjungan rutin dan teratur kepada para petani binaannya, baik melalui pendekatan perorangan maupun melalui pendekatan kelompok. Kondisi ini tentu akan berbeda ketika terjadi pandemi covid-19 yang menerapkan secara ketat protokol kesehatan – yang mengharuskan adanya pembatasan interaksi dan pertemuan atau kumpul-kumpul, yang menjadi inti dari MODAL SOSIAL. Situasi ini menjadikan sistem penyuluhan bekerja di luar dari kondisi normalnya. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menjawab, sistem kerja penyuluhan seperti apa yang diharapkan oleh para petani dan kelompok tani? Apa yang harus dilakukan oleh penyuluh dan lembaga penyuluhan, dan bahkan oleh lembaga penelitian dan pengembangan?

### 15.7. Persepsi, Sikap, dan Tindakan Adaptasi Petani

Perubahan iklim yang dihadapi oleh masyarakat dunia telah dirasakan melalui perubahan-perubahan seperti naiknya suhu rata-rata, pergeseran musim, dan meningkatnya jumlah atau frekuensi cuaca ekstrem, dan kejadian-kejadian iklim lainnya. Semakin cepat perubahan-perubahan iklim ini terjadi, maka semakin lama usaha-usaha untuk melakukan tindakan-tindakan adaptasi yang efektif, dan konsekuensinya adalah semakin sulit dan semakin mahal. Atas dasar ini, maka penting untuk memahami bagaimana persepsi, sikap dan tindakan adaptasi dari petani dan masyarakat, termasuk masyarakat pesisir.

Konsep persepsi, sikap, dan tindakan adaptasi petani memiliki kesamaan karena ketiga konsep ini menyangkut reaksi internal pada diri seseorang terhadap suatu objek, yang dalam hal ini “Perubahan Iklim” sebagai objek dari ketiganya. **Persepsi** didefinisikan sebagai “suatu proses untuk memberi interpretasi atas suatu stimuli yang secara fisik dan psikologis diterima oleh seseorang” (*is the organization, identification, and interpretation of sensory information in order to represent and understand the presented information or environment*). **Sikap** didefinisikan sebagai “konstruksi psikologis yang ada dalam diri seseorang, suatu entitas mental dan emosi dan menjadi karakteristik dari seseorang” (*attitude is a psychological construct, a mental and emotional entity that inheres in, or characterizes a person*). Sementara itu **Tindakan Adaptasi** didefinisikan sebagai “suatu pernyataan internal dan aksi menyesuaikan diri dari seseorang terhadap suatu perubahan yang terjadi pada lingkungannya dalam rangka meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan atau manfaat (*“Adaptation refers to adjustments in ecological, social, or economic systems in response to actual or expected climatic stimuli and their effects or impacts. It refers to changes in processes, practices, and structures to moderate potential damages or to benefit from opportunities associated with climate change. In simple terms, countries and communities need to develop adaptation solution and implement action to respond to the impacts of climate change that are already happening, as well as prepare for future impacts”*) -

<https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/what-do-adaptation-to-climate-change-and-climate-resilience-mean>).

Tindakan adaptasi dapat beragam bentuk dan caranya, tergantung jenis dan lingkup kegiatannya. Bagi petani pengelola usaha tani tanaman pangan dan perkebunan boleh jadi beda dengan nelayan di pesisir. Petani dapat menanam tanaman yang tahan terhadap angin sehingga tidak mudah rebah, atau menanam tanaman yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, atau tidak melakukan penanaman tembakau karena kondisi hujan yang berlebih dan berkepanjangan. Bagi nelayan, pola dan intensitas melaut dapat diatur kembali sesuai dengan kondisi dan perubahan cuaca. Tidak ada satu tindakan adaptasi yang dapat digunakan untuk semua tempat atau ‘one-size-fits-all-solution’.

Keberhasilan tindakan adaptasi tidak saja ditentukan oleh kemampuan petani, tetapi juga oleh komponen lain seperti keterlibatan pemerintah dalam pemberi informasi, peran PPL dalam mendukung petani dengan inovasi dan teknologi, dan ketersediaan sumber daya lainnya – sarana prasarana, keuangan, dan teknologi. Oleh karena itu, tindakan adaptasi yang efektif seharusnya melibatkan para pihak yang terkait, dari tingkat lokal hingga tingkat yang lebih tinggi, baik horizontal maupun vertikal.

### **15.8. Ringkasan**

Penelitian ini melengkapi penelitian bidang penyuluhan pertanian, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan, dan lainnya yang pernah dilakukan dalam masa 20an tahun terakhir. Hasil penelitian ini *melengkapi dan mengisi celah yang masih ada* dari sebuah sistem pengkajian pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Jika hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti telah mampu menjawab tentang hubungan antara sistem nilai dengan pola interaksi masyarakat dengan sumber daya alam, peran kelembagaan lokal dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, proses adopsi dan difusi inovasi hortikultura dan dampaknya terhadap produksi dan pendapatan petani, dan penelitian perubahan



iklim pada lokasi dan masyarakat lain, maka penelitian dan hasil penelitian ini menjadi komponen lain dari sebuah *sistem pengkajian pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan*, yang memberi fokus pada bagaimana persepsi, sikap dan tindakan adaptasi petani terhadap perubahan iklim.

Perubahan iklim adalah nyata dan telah dialami oleh para petani dengan segala konsekuensinya. Adalah peran penyuluh dan lembaga penyuluhan untuk mendukung petani menghadapi persoalan iklim dan dampaknya agar cita-cita petani untuk hidup lebih sejahtera dapat terwujud. Pendampingan, pemberian informasi iklim, dan nasehat tentang tindakan adaptasi yang diperlukan dinanti dan dibutuhkan oleh petani, dan oleh karena itu materi tentang iklim menjadi cakupan lain dalam pesan-pesan penyuluhan.

\*\*\*

## 16. PENYULUHAN PERTANIAN DAN PENINGKATAN EKONOMI PETANI MELALUI AGRIBISNIS

### 16.1. Pengantar

Pertanian penting dan strategis bagi penghidupan dan ekonomi rumah tangga, daerah, dan nasional karena perannya dalam pemenuhan kebutuhan pangan, penyedia lapangan kerja, dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa kemampuan sektor pertanian dalam penyediaan pangan belum sebagaimana diharapkan karena produksi masih lebih rendah dibanding dengan kebutuhan. Impor pangan menjadi salah satu jalan keluar dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pangan ini, tidak saja dalam produk sereal, tetapi juga pangan protein seperti daging.

Walau dihadapkan dengan kemampuan produksi yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sektor pertanian pada saat yang sama dihadapkan dengan berbagai persoalan, antara lain degradasi sumber daya alam, konversi lahan pertanian ke penggunaan lain (seperti untuk pemukiman dan industri), penggunaan bahan kimia berlebih yang kemudian menyebabkan polusi dan terganggunya keseimbangan alam – penurunan keanekaragaman hayati, persoalan ketahanan dan keamanan pangan, perubahan iklim, dan regenerasi petani dan keberlanjutan pertanian. Semua persoalan ini memerlukan perhatian dan jalan keluar agar sektor pertanian menjadi lebih produktif dan tetap mampu memenuhi kecukupan pangan dan lapangan kerja bagi penduduk yang terus bertambah.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah, kabupaten, provinsi, dan Indonesia secara keseluruhan, selain persoalan sektor pertanian sebagaimana diuraikan di atas, *globalisasi* dan *persaingan internasional*, termasuk *kehadiran multinational corporations* yang kemudian menjadi pesaing dalam produksi dan pemasaran adalah menjadi tantangan tersendiri yang lebih serius.

Tulisan dalam bab ini diarahkan untuk memberi gambaran tentang berbagai inisiatif dalam rangka peningkatan ekonomi dan penghidupan petani (*livelihood improvement*) atau pengentasan kemiskinan melalui pengembangan agribisnis. Pembelajaran berharga dari berbagai inisiatif pengembangan agribisnis, dan posisi serta peran penyuluhan di dalamnya akan menjadi fokus kajian atau pembahasan dalam bab ini.

## **16.2. Beberapa Inisiatif Peningkatan Ekonomi Petani melalui Pengembangan Agribisnis**

Beberapa proyek riset-aksi kolaboratif yang pernah penulis ikut terlibat di dalamnya, baik yang dibiayai oleh lembaga-lembaga penelitian internasional maupun yang dibiayai oleh kementerian disajikan dalam bagian ini. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk mengambil pelajaran tentang upaya-upaya peningkatan ekonomi petani melalui pengembangan agribisnis, khususnya yang berkaitan dengan kendala dan peluang serta bagaimana peran penyuluhan di dalamnya. Proyek-proyek riset-aksi kolaboratif tersebut antara lain:

- (1) IFSCA Project - kerjasama Unram dengan Massey University – New Zealand, pengembangan agribisnis sapi di Dompu, dan agribisnis hortikultura di Lombok Utara (2017-2021) – model konseptual proyek ini disajikan pada Gambar 6.1 dan 6.2.
- (2) Proyek ACIAR Kanoppi<sup>21</sup> Fase 1 (2013-2016) dan Fase 2 (2017-2021). Proyek Kanoppi fase 1 berjudul “*Pengembangan Produksi dan Strategi Pemasaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu bagi Perbaikan Penghidupan Petani Kecil di Indonesia*” – “Development of Timber and Nontimber Forest Products’ Production and Market Strategies for Improvement of Smallholders’ Livelihoods in Indonesia (*project number FST/2012/039; 1 Jan. 2013 – 31 Dec.2016*); dan Proyek Kanoppi fase 2 berjudul “*Pengembangan dan Promosi Pilihan-pilihan*

---

<sup>21</sup> Kanoppi adalah akronim dari **K**Ayu, **N**On kayu **P**roduksi dan **P**emasaran **ter**Integrasi).

*Agroforestry-berbasis Pasar dan Pengelolaan Lanskap Hutan Petani Kecil di Indonesia*” – “Developing and Promoting Market-based Agroforestry Options and Integrated Landscape Management for Smallholder Forestry in Indonesia (project number: FST/2016/141, 01 April 2017 – 30 September 2021) - (Muktasam A. , 2021).

- (3) Proyek CBCF Fase 1 dan Fase 2 - Peningkatan ekonomi petani melalui pengembangan agribisnis hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Judul proyek ini adalah “*Penguatan Perhutanan Komersial Berbasis Masyarakat di Indonesia*” – “Enhancing community-based commercial forestry in Indonesia” (project number FST/2015/040) - (Muktasam A. , 2021).
- (4) Proyek *Australian Indonesia Partnership for Development (AIPD) - Rural - Proyek pengentasan kemiskinan di Indonesia Timur (Jawa Timur, NTB, NTT, dan Papua)* melalui pengembangan agribisnis yang dilakukan oleh AusAid dan dengan dukungan riset dari ACIAR (posisi penulis sebagai anggota Tim Pengarah atau Reference Group). Pelaksanaan proyek ini ditangani oleh lembaga bernama Prisma. Proyek ini dikenal juga dengan nama “*Eastern Indonesia Agribusiness Development Opportunities (EI-ADO)*”, EI-ADO (Analysing Agribusiness Development Opportunities in Eastern Indonesia) adalah rangkaian studi rantai nilai agribisnis yang dibiayai oleh the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) - Australia, dan dilaksanakan oleh the Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Tujuan dari studi adalah mengidentifikasi rantai nilai produk-produk pertanian, dan mengidentifikasi peluang pengembangan dan pelibatan sektor swasta dalam agribisnis, dengan tujuan peningkatan pendapatan petani miskin – laki-laki dan perempuan di Jawa Timur - East Java (EJ), Nusa Tenggara Barat - West Nusa Tenggara (NTB), dan Nusa Tenggara Timur - East Nusa Tenggara (NTT). Riset rantai nilai yang dilakukan EI-ADO

didasarkan pada metode penelitian yang dikembangkan dalam buku “Making Value Chains Work Better for the Poor (M4P)”. Luaran dari penelitian ini digunakan untuk memberikan masukan pada Program baru yang dikembangkan oleh DFAT: *Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Income through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA)*, dengan tujuan berkontribusi bagi peningkatan pendapatan 30% atau lebih pada pendapatan bersih dari 300.000 petani laki-laki dan perempuan di Indonesia bagian timur pada tahun 2017.

- (5) Proyek CaRED - Pemberdayaan petani melalui pengembangan agribisnis yang didukung oleh Pemerintah New Zealand – kerja sama Unram dengan UGM pada produksi beras analog fungsional di Lombok Timur. Proyek ini bagian dari CaRED Programme (*Community Resilience and Economic Development*) A Joint Programme between UGM and MFAT New Zealand. Judul proyek riset-aksi ini adalah “*Smallholder Livelihood Improvement through Small Scale Functional Analog Rice Food-Base Processing Enterprise: An Action-Research Approach to Smallholder Agribusiness and Food Processing Industrial Development in East Lombok – West Nusa Tenggara Province*”, 2016 – 2019.
- (6) Proyek *Smallholder Agribusiness Development Initiative SADI*<sup>22</sup> dan SMAR yang didukung AusAID dan ACIAR (Johns, Cargill, Patrick, Geong, & Johanis, 2009);

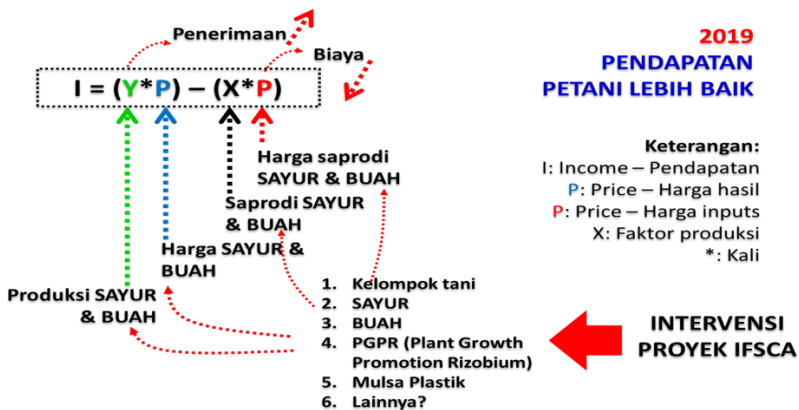
---

<sup>22</sup> Smallholder Agribusiness Development Initiative (SADI) aims to improve incomes and productivity for farmers and agribusiness, in response to market opportunities, in four eastern provinces—East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, South East Sulawesi and South Sulawesi. Support for Market Driven Adaptive Research (SMAR) which aims to improve access for farmers and agribusiness/SMEs to new knowledge underpinning the production and marketing of agricultural outputs at higher levels of productivity and quality. During research priority setting consultations for ACIAR-SADI in the 4 eastern Indonesian provinces in late 2006, high priority was given to identifying opportunities for better market integration and developing commercial pig production for smallholders in Nusa Tenggara Timur (NTT), which is the focus of this project.

(7) Proyek ACIAR - Proyek *Microfinance for Agricultural Development* (Muktasam, Suadnya, & Rosiady, 2003);

Guna memberikan ilustrasi bagaimana proyek-proyek tersebut menjadikan *pengembangan agribisnis* sebagai sebuah jalan untuk mengurangi kemiskinan atau meningkatkan ekonomi petani, berikut disajikan *model konseptual* hubungan antara *pengembangan agribisnis* dengan *pendapatan petani* – Gambar 16.1.

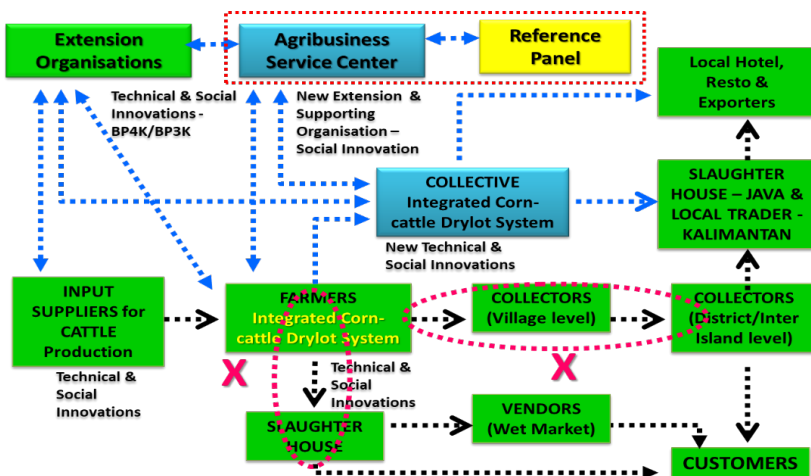
Intervensi pokok dalam pengembangan agribisnis adalah peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani di satu sisi, peningkatan nilai tambah, dan efisiensi produksi dan biaya di sisi lain. Intervensi-intervensi ini akan berhasil jika terjadi adopsi inovasi sosial dan teknis yang terkait dengan proses produksi dan proses nilai tambah. Rumus yang disajikan pada Gambar 6.1 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan (I: Income) dapat dilakukan dengan merubah 4 variabel pada persamaan tersebut, yaitu dengan *meningkatkan produksi dari komoditas pertanian strategis* (Y: Yield), *meningkatkan harga hasil produksi* (P: Price), *menurunkan atau efisiensi dan efektivitas penggunaan faktor produksi* (X: Inputs), dan *menurunkan harga sarana produksi* (P: Price of inputs).



Gambar 16.1. Fungsi Pendapatan dalam Agribisnis Sapi pada Proyek IFSCA di Dompu

Proyek IFSCA pada pengembangan agribisnis hortikultura di Kabupaten Lombok Utara melakukan intervensi melalui pengenalan sistem usaha tani hortikultura secara intensif dan komersial dengan memperkenalkan produk-produk hortikultura bernilai ekonomi tinggi, sistem budidaya yang lebih baik, dan sistem informasi pasar dan pemasaran yang lebih menguntungkan. Bersamaan dengan pengenalan inovasi teknis tersebut, juga diperkenalkan inovasi sosial kelembagaan seperti kelompok tani dan lembaga bernama Pusat Pelayanan Agribisnis.

Pengembangan sistem usaha peternakan sapi di Dompu dilakukan melalui pengenalan sistem pengandungan dan pemberian pakan lamtoro untuk kenaikan berat badan 0,5 kg per hari. Intervensi juga dilakukan melalui pembentukan dan atau penguatan kelompok ternak, peningkatan pemahaman tentang kesehatan dan reproduksi ternak. Proyek telah berhasil memperkenalkan *inovasi teknis* (teknologi pakan, pengandungan, dan penimbangan berat badan sapi) dan *inovasi sosial* (kerjasama kelompok dan peran lembaga bernama *Pusat Pelayanan Agribisnis (Agribusiness Service Center)* – Gambar 6.2, dan petani telah menerapkan atau mengadopsinya (pengandungan, penanaman tanaman pakan – lamtoro, penimbangan rutin)



Gambar 16.2. Model Konseptual Proyek Agribisnis Proyek IFSCA di Dompu

Walau inovasi sosial dan inovasi teknis telah diadopsi, proyek IFSCA belum mampu mewujudkan cita-cita secara maksimal karena masih adanya kendala dalam pemasaran. Proyek IFSCA telah mencoba menghubungkan para petani sayuran dengan pengepul dan hotel, dan menghubungkan petani ternak dengan pengelola *Rumah Potong Hewan* (RPH) atau *Slaughter House* dan pedagang antar-pulau, dengan harapan akan terbentuk dan terwujud kemitraan bisnis.

Upaya-upaya membangun kemitraan bisnis ini menemui jalan buntu karena ternyata untuk sebuah kemitraan dengan hotel dibutuhkan dana yang cukup bagi pengepul untuk memenuhi ketentuan yang disepakati (sistim tunda bayar, dan modal usaha yang terbatas), dan dalam kasus kemitraan usaha pemasaran sapi di Dompu dengan pengelola RPH tidak dapat berjalan mulus. Pengelola RPH tidak memiliki niat baik untuk membangun dan memelihara kemitraan yang sedang dirintis. Sapi-sapi milik petani yang diangkut oleh pengelola RPH tidak terbayar hingga Proyek IFSCA berakhir.

### **16.3. Pendekatan Analisis Rantai Nilai dalam Proyek Agribisnis**

Pendekatan analisis rantai nilai digunakan dalam mengidentifikasi kendala dan merancang alternatif intervensi pada hampir semua proyek pengembangan agribisnis bagi peningkatan ekonomi petani atau pemberdayaan masyarakat atau pengentasan kemiskinan, yaitu proyek-proyek yang diuraikan di atas, antara lain Proyek AIPD-Rural, Proyek IFSCA, Proyek ACIAR Kanoppi, Proyek ACIAR CBCF, dan Proyek CaRED UGM dan Unram.

Sebagai gambaran, penggunaan analisis rantai nilai pada proyek EI-ADO atau AIPD-Rural dimaksudkan untuk menentukan komoditas pertanian yang memiliki daya ungkit dalam peningkatan ekonomi atau pengentasan kemiskinan, dan sebagai hasilnya adalah teridentifikasinya sejumlah komoditas pertanian yang masuk dalam tier atau lapisan ke 1 dan tier atau lapisan 2, yaitu masing-masing *sapi*, *jagung*, *mangga*, *legums – kacang tanah*, *kedelai* dan *kacang hijo*, dan



*sayuran*, sedangkan komoditas yang masuk dalam tier 2 yaitu *jambu mete, singkong, kambing, kopi, ikan laut, babi, rumput laut, dan cacao*. Kegiatan kedua setelah penentuan komoditas lapis pertama dan lapis kedua adalah melakukan *analisis rantai nilai* terhadap semua komoditas terpilih, khususnya untuk semua komoditas lapis pertama karena akan menjadi intervensi pertama dalam rangka pengentasan kemiskinan. Semua analisis yang dilakukan terhadap semua komoditas terpilih teridentifikasi “constraints” (kendala), dan “opportunities” (peluang) bagi intervensi untuk peningkatan kinerja rantai nilai (Muktasam, Kusumo, Dipokusumo, & Suhendro, 2004; Muktasam A. , 2004; Muktasam A. , 2009; Waldron, et al., 2013; Wandschneider T. , 2013; Flewelling J. , 2013; Muktasam, Suadnya, & Ambarwati, 2011; Muktasam, 2016; Muktasam A. , 2021).

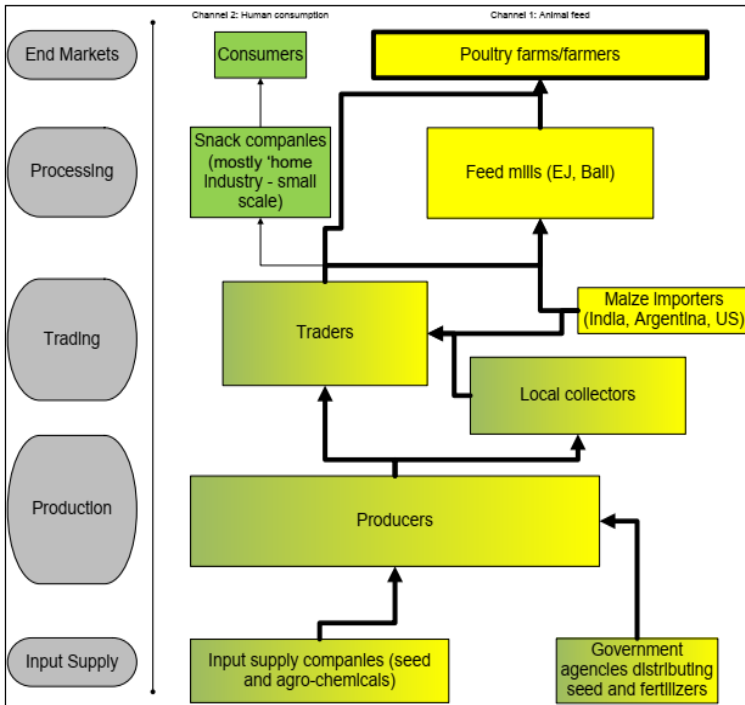
Sebagai bahan ilustrasi bagaimana analisis rantai nilai digunakan untuk menentukan intervensi, berikut disajikan salah satu bagian dari hasil analisis rantai nilai jagung yang pernah dilakukan dalam Proyek AIPD-Rural, dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan intervensi guna peningkatan kinerja rantai nilai dan pada akhirnya akan meningkatkan penghidupan petani yang terlibat di dalamnya.

Gambar 16.3 memperlihatkan proses-proses dan pelaku utama dalam rantai agribisnis jagung di NTB dan Jawa Timur, yang menunjukkan lima proses utama, yaitu penyediaan input produksi, proses produksi, pemasaran, pengolahan, dan pergerakan produk ke konsumen. Pendalaman yang dilakukan oleh Tim Peneliti ACIAR menemukan kendala-kendala dalam sistem atau rantai nilai jagung, yang pada umumnya ditemukan di tingkat petani (Tabel 16.1). Kendala-kendala ini antara lain:

- (1) *Rendahnya pengetahuan petani dalam sistim budidaya jagung, dari penanaman jagung hingga ke penggunaan secara efektif bahan-bahan kimia seperti pupuk dan obat-obatan, penanganan pasca-panen, sehingga hasilnya kurang dan pendapatannya rendah* – “Farmers lack technical knowledge, from planting to

effective use of agrochemicals and post harvest handling, thereby limiting their yields and income”.

- (2) *Sebagian besar petani, khususnya yang berada di wilayah-wilayah terpencil, memiliki akses yang terbatas terhadap benih jagung varietas unggul - “The majority of farmers in the target areas, especially in more remote areas, lack access to or are not well informed about improved maize seed varieties”.*
- (3) *Petani mengalami kesulitan mendapat kredit untuk sarana produksi seperti untuk benih, pupuk, herbisida, dan lainnya. Sebagai konsekuensinya, penerimaan dari usaha tani per hektar tidak optimal dan pendapatan petani rendah – “Farmers lack input credit for seed, fertilizer, herbicide, etc. As a result, the economic returns per hectare are not optimized and income from maize is limited”.*
- (4) *Kebanyakan petani, pengepul, dan pedagang mengalami keterbatasan dalam peralatan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk pengeringan jagung. Mereka juga memiliki alat yang terbatas untuk mengukur kadar air jagung – “Most farmers, collectors and traders lack equipment and facilities to effectively dry maize grain. They also lack effective tools and methods for testing the moisture content of their maize”.*



Gambar 16.3. Rantai Nilai Jagung di NTB dan Jawa Timur

Sesuai dengan kendala-kendala ini, maka alternatif intervensi atau solusi dalam rangka perbaikan sistem agribisnis dan perbaikan rantai nilai jagung adalah melalui intervensi-intervensi dan pelibatan para pihak sebagaimana disajikan pada kolom 2 dan kolom 3 pada Tabel 16.1.

Tabel 16.1. Kendala dan Solusi pada Rantai Nilai Jagung di NTB & Jawa Timur

Constraints	Market-Based Solution (MBS)	Existing/ Potential MBS Providers	Potential to increase growth and competitiveness of the value chain	No. of MSMEs impacted
All provinces				
Farmers lack technical knowledge, from planting to effective use of agro-chemicals and post-harvest handling, thereby limiting their yields and income.	1. Provision of technical information to farmers on production and post-harvest handling to increase yields and income.	<i>Input supply manufacturers, wholesalers, and retailers</i>	High	High
The majority of farmers in the target areas, especially in more remote areas, lack access to or are not well informed about improved maize seed varieties	2. Access to improved seed varieties for farmers, such as varieties with resistance to downy mildew	<i>Seed companies</i>	Medium/High	High
Farmers lack input credit for seed, fertilizer, herbicide, etc. As a result, the economic returns per hectare are not optimized and income from maize is limited.	3. Access to input credit for farmers	<i>Wholesalers, feed mills, financial institutions</i>	Medium	High
Most farmers, collectors and traders lack equipment and facilities to effectively dry maize grain. They also lack effective tools and methods for testing the moisture content of their maize.	4. Access to: a) appropriate and affordable crop drying technologies, and; b) tools and methods for maize moisture measurement.	<i>Agricultural equipment suppliers</i>	High	Low/ Medium

Sumber: AI-EDO Report (Consulting, Flewelling, Fox, Puspadi, & Adar, 2013)

#### 16.4. Posisi dan Peran Penyuluhan dalam Sistem Agribisnis

Sistem agribisnis adalah sistem yang terdiri dari subsistems yang saling berhubungan dari subsistem *inputs* (yang terdiri dari 5 aset yaitu SDA, SDM, SDS, SDF & SDF), subsistem *produksi primer* atau *on-farm*, subsistem *pasca panen* dan *pengolahan (produksi sekunder)*, dan subsistem *pemasaran*.

Mengacu pada definisi penyuluhan sebagai proses *pendidikan nonformal, komunikasi & pembelajaran*, maka penyuluhan berada dan penting pada keseluruhan subsistem agribisnis tersebut. Pada sistem inputs, penyuluhan penting dalam penyiapan SDM & SDS berkualitas, SDM yang memiliki *pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi serta semangat tinggi* bagi proses produksi pertanian. Sedangkan dalam konteks SDS penyuluhan penting dalam memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kerjasama yang efektif dalam *kelompok/organisasi/asosiasi/forum/jaringan*, yang bagi Francis Fukuyama (2002) dan Jule Prety (2003) dipandang sebagai modal sosial - yang di dalamnya ada nilai-nilai, norma atau aturan, interaksi atau jaringan, dan hubungan saling percaya atau trust.

Posisi dan peran penyuluhan dalam pengembangan SDM & SDS ini juga strategis dalam mendukung SDK melalui kemampuannya dalam mobilisasi saving dan kredit atau simpan pinjam. Keberadaan lembaga keuangan seperti *Koperasi Tani (Koptan), Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*, dan sejenisnya menunjukkan adanya ruang dan sekaligus peran *Ilmu dan Kegiatan Penyuluhan* dalam subsistem inputs pada sistem agribisnis.

Pada subsistem *produksi*, penyuluhan pertanian memiliki posisi dan peran penting dalam proses *adopsi & difusi inovasi* - bahwa proses produksi yang optimal dapat dilakukan ketika petani menerapkan inovasi teknis dan inovasi sosial serta paket-paket teknologi sebagaimana mestinya. Tidak saja pada tataran individu, tetapi dalam tataran kelompok, hamparan dan kawasan. Kemunculan *korporasi usaha tani* dan *kemitraan bisnis pertanian* menghendaki terciptanya *economic of scale (skala usaha yang menguntungkan)*, dan ini menunjukkan posisi dan peran penyuluhan pertanian di dalamnya. Kemitraan bisnis menjadi salah satu opsi atau tawaran pada konsep "*Public-private-partnership*", dimana melalui kemitraan bisnis dengan industry persoalan modal usaha, teknologi, dan pemasaran dapat diatasi dengan baik – karena pola kerjasama yang saling menguntungkan. Perjalanan dalam rangka mewujudkan kemitraan

bisnis bukanlah perjalanan yang mudah karena syarat dan ketentuan yang ketat diperlakukan.

Pengalaman dalam memfasilitasi kemitraan bisnis antara para petani pengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK) khususnya untuk tanaman obat dengan perusahaan jamu PT. Sido Muncul menunjukkan bahwa untuk sebuah kemitraan bisnis, petani calon mitra harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut (Muktasam A. , 2021):

- (1) *Memiliki produk yang potensial (Have potential products)* – untuk produk HHBK yang dibutuhkan oleh PT. Sido Muncul antara lain laos, kunyit, lengkuas, temulawak, dan lainnya – *inovasi teknis.*
- (2) *Produk yang sesuai diproduksi dalam skala yang luas (The products are produced in a large scale via Corporate Farming)* – diproduksi melalui kelompok tani/gabungan kelompok tani atau asosiasi atau jaringan atau bekerjasama dengan KPH - Farmer Groups/Association/Forest Management Units or KPH – *inovasi sosial.*
- (3) *Ada kelompok tani atau gapoktan atau asosiasi petani yang kuat (Have groups and association)* – Exist, Running & Strong – *inovasi sosial.*
- (4) *Memiliki hubungan bisnis dengan lembaga bisnis (Have link to business agencies)* – koperasi petani atau Bumdes - Farmer Cooperatives/Bumdes – *inovasi sosial.*
- (5) *Dapat memenuhi kriteria (Able to meet the criteria)* – Species, Quantity, Quality, dan Continuity – *inovasi teknis dan inovasi sosial.*
- (6) *Memiliki komitmen yang kuat dan baik (Have good and strong commitment)* – yang disepakati melalui MoU.

Jika semua kriteria ini dicermati dengan baik, maka dapat dipahami bahwa perjalanan menuju terwujudnya sebuah kemitraan bisnis yang saling menguntungkan dan berlanjut memerlukan usaha dan kerja keras. Usaha-usaha ini antara lain untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan



dan perintangnya - perilaku merusak sumber daya alam dengan merusak hutan, penggunaan bahan kimia berlebih, polusi darat laut dan udara, dan lainnya. Penyuluhan sebagai ilmu memiliki posisi dan peran strategis dalam menghadapi semua yang dirisaukan ini. Oleh karena itu, dapat difahami ketika Michael Cernea menulis "*Putting People First: Sociological Variable in Rural Development*", Robert Chambers menulis "*Putting the Last First: Rural Development*", dan "*Whose Realities Counts*".

### **16.5. Kasus Gagal Pengembangan Agribisnis bagi Peningkatan Ekonomi Petani**

Program dan kegiatan atau inisiatif lain yang menjadi pembelajaran berharga tentang pengembangan agribisnis bagi peningkatan ekonomi petani adalah antara lain pengembangan beras analog fungsional yang dilakukan di Lombok Timur; pengembangan agribisnis mangga di Pulau Lombok yang diprakarsa melalui program riset-aksi SADI dan SMART, program kemitraan petani kacang dengan PT. Bumi Mekar Tani (BMT) anak perusahaan Kacang Garuda; dan kemitraan bisnis antara petani dan CV. Sahabat Forestry dalam pengembangan sengon dan porang di Empang – Plampang Kabupaten Sumbawa.

Belajar dari semua program peningkatan ekonomi petani dan masyarakat pedesaan melalui pengembangan agribisnis yang pernah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi sumber dari sejumlah kegagalan dalam mencapai tahap operasionalisasi kemitraan yang efektif – dapat disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari faktor-faktor berikut:

- (1) *Tidak terpenuhinya kelayakan teknis dari inovasi teknis yang diandalkan.* Perusahaan atau industri menghendaki adanya lahan yang cukup yang akan digunakan sebagai lahan inti untuk mendukung dan menunjang proses produksi yang dilakukan oleh petani sebagai plasma (dalam kasus PT. BMT) karena pemerintah gagal menyediakan lahan. Kasus kemitraan dalam pengembangan tanaman sengon Solomon oleh CV. Sahabat



Forestry juga memberi indikasi bahwa tanaman sengon kurang cocok dikembangkan di daerah dengan curah hujan rendah, plus fokus bisnis masyarakat lebih kepada hasil jagung. Konsekuensinya adalah tertutupnya peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan sengon – bagi hasil antara petani dengan CV. Sahabat Forestry.

- (2) *Kegagalan dalam memfasilitasi peningkatan skala usaha dalam produksi produk pertanian yang diandalkan.* Kasus kemitraan dengan PT. Sido Muncul dengan para petani tidak dapat diwujudkan karena tidak ada tindak lanjut dalam perluasan skala produksi, dan proses produksi dengan melibatkan kerjasama antar kelompok, gapoktan, dan bahkan lintas KPH.
- (3) *Kesamaan visi, kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antar aktor dalam rantai nilai tidak terjadi.* Kasus-kasus kegagalan dan pengembangan agribisnis ini menunjukkan tidak adanya mekanisme kerjasama yang dirintis dengan baik dan sistematis dalam mendukung terwujudnya efektivitas bisnis pertanian. Harus ada kesamaan visi, koordinasi, tata kelola, kerjasama, dan komunikasi antara semua aktor dalam rantai nilai;
- (4) *Pendekatan program yang parsial dan tidak terintegrasi –* dalam kasus pengembangan beras analog fungsional di Kabupaten Lombok Timur, kegiatan hanya fokus pada instalasi mesin pengolah dan produksi beras analog, dan tidak pada keseluruhan komponen di dalam sistem agribisnis, dari subsistem inputs, proses, pasca produksi dan pemasaran. Hal yang sama ditemukan dalam kebijakan pengembangan rumput laut, yang program atau kegiatan utamanya adalah instalasi mesin pengolah rumput laut menjadi chips, dan tidak pada keseluruhan subsistem agribisnis. Mesin tidak pernah beroperasi dalam skala bisnis sejak semua mesin dipasang.
- (5) *Tidak ada rencana bisnis yang tertulis dan jelas dalam pengembangan agribisnis.*
- (6) *Tidak ada Standar Operational Procedures (SOP) untuk semua aktor dalam sistem rantai nilai.* Riset-aski diperlukan guna

menghasilkan standar perilaku dari para aktor rantai nilai, khususnya yang melibatkan petani dan usaha kecil mikro sebagaimana yang dialami dalam pengembangan beras analog fungsional. Kasus gagal produksi pada *beras analog fungsional* disebabkan oleh banyak hal antara lain (i) ***ide bisnis datang dari luar atau dari atas*** (*top-down - Kementerian Pertanian ataukah Industri Mesin?*); (ii) ***konsekuensinya tidak ada rencana bisnis*** (*spesifikasi produk, teknik dan strategi produksi, analisis kelayakan, strategi pemasaran, rancang-bangun pabrik, standar SDM, dan lain-lain*); (iii) ***tidak ada standar operational procedures (SOP) pada setiap proses dan pelaku utama*** dalam rantai nilai (*input usaha tani, proses produksi dan panen jagung/rumput laut/singkong/lembi, pengangkutan dan penyimpanan, dan lainnya*); (iv) *rancang-bangun pabrik dan gedung yang tidak sesuai dan memenuhi standar-standar industri pengolahan dan produksi beras analog fungsional – tidak ada ruangan khusus untuk penyimpanan bahan baku dan hasil produksi agar terjaga kualitasnya*; (v) *tidak jelas rencana kemitraan bisnis antara para pelaku rantai nilai*; dan (vi) *tidak ada program dan kegiatan yang serius dari dinas terkait dan pemerintah daerah untuk mendukung tercapainya tujuan produksi beras analog fungsional/*. Hubungan antara para aktor rantai nilai, permasalahan, dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kinerja rantai nilai yang ideal disajikan pada Gambar 16.5. Gambar ini menunjukkan bahwa *kualifikasi produk yang jelas* – dengan kandungan Glisemik Indeks tertentu hanya akan dihasilkan dari proses produksi yang standar dengan bahan baku yang juga memenuhi syarat atau dengan standar tertentu.

- (7) *Pendekatan partisipasi dalam pengembangan agribisnis – contoh keberhasilan pengembangan agroforestry INPEng dan Pred.Nai Community Mangrove Forest.*



## 16.6. Ringkasan

Uraian tentang beberapa proyek peningkatan ekonomi petani kecil yang disampaikan dalam bab ini cukup untuk menunjukkan tentang pentingnya kerjasama parapihak atau stakeholders dalam mendukung keberhasilan program. Analisis rantai nilai (*Value chain analysis*) yang digunakan tidak saja bermanfaat dalam menentukan jenis-jenis komoditas yang penting dan strategis dalam peningkatan ekonomi petani atau pengentasan kemiskinan, tetapi juga penting dalam memahami kendala atau constraints dan peluang atau opportunities bagi pengembangan agribisnis.

Fakta dan pembahasan dalam bab ini juga telah menggaris bawahi beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengembangkan sistem agribisnis yang efektif dalam peningkatan ekonomi petani, antara lain tentang pentingnya pelibatan atau partisipasi para pihak dalam proses-proses pengembangan agribisnis, baik pihak internal sistem rantai nilai (para aktor utama rantai nilai komoditas) dan pihak eksternal yang mampu memberikan dukungan bagi efektivitas sistem agribisnis (termasuk kebijakan dan kelembagaan yang mendukung – *anabling policies and institutions*).

Uraian dalam bab ini juga telah menunjukkan tentang posisi dan peran penyuluhan sebagai ilmu dan pendekatan dalam mengatasi kendala-kendala dalam rantai nilai produk-produk pertanian. Penyuluhan tidak saja berperan dalam mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap, tetapi juga mendorong perubahan praktik pada para aktor rantai nilai, khususnya para petani dan keluarganya.

\*\*\*

## **17. PENDEKATAN MASTER TREEGROWER DALAM PENYULUHAN KEHUTANAN**

### **17.1. Pengantar**

Pendekatan penyuluhan dengan nama “Master TreeGrower” atau disingkat “MTG Approach” telah dikenalkan oleh Rowan Reid sebagai salah satu pendekatan penyuluhan yang efektif pada sektor kehutanan dan agroforestry di Australia. Pendekatan ini berkembang di Australia sejak tahun 1996 di Universitas Melbourne dalam rangka penyuluhan agroforestry (Reid, 2017). Sejak tahun 2014 hingga tahun 2021 pendekatan penyuluhan ini telah juga diperkenalkan di tujuh provinsi di Indonesia dengan dukungan pendanaan dari the Australian Center of International Agricultural Research (ACIAR) pada proyek Community-Based Commercial Forestry atau lebih dikenal sebagai Proyek CBCF ACIAR (Muktasam, et al., 2019). Uji coba pendekatan MTG telah dilakukan di tujuh provinsi di Indonesia (Muktasam, Reid, & Race, 2021), yaitu di Sulawesi Selatan (Bulukumba), Sulawesi Tenggara (Konawe), Nusa Tenggara Barat (Sumbawa), Jawa Tengah (Pati), Daerah Istimewa Yogyakarta (Gunungkidul), Gorontalo (Boalemo), dan Lampung (Lampung Selatan).

Uraian berikut ini memberi gambaran tentang konsep dari pendekatan MTG dalam penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan dengan pendekatan MTG, dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dengan pendekatan MTG di Indonesia. Pelajaran yang dapat dipetik dari pendekatan penyuluhan dengan metode MTG ini adalah bahwa pendekatan ini dapat diterapkan juga untuk kegiatan penyuluhan pada subsektor pertanian lainnya, yaitu tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Esensi dari pendekatan MTG adalah “Market First”, “Participatory”, “Seeing is Believing”, dan “Learning by Doing”. Jika pada penyuluhan kehutanan atau agroforestry, petani diajak untuk berkunjung dan melihat “Pasar Kayu” guna mendapatkan gambaran tentang jenis, kualitas, dan harga kayu yang diminta oleh pasar, maka pada

penyuluhan di subsektor tanaman pangan atau peternakan sesungguhnya petani dapat diajak untuk mengunjungi pasar-pasar tanaman pangan dan peternakan sehingga petani sebagai sasaran penyuluhan dapat memahami apa produk pangan dan peternakan yang diminta pasar, jumlah dan kualitasnya, dan informasi lainnya.

Pelajaran lain yang dapat dipetik dari Bab ini adalah aplikasi dari Teknik-teknik evaluasi penyuluhan yang telah dibahas dalam bab terdahulu – Evaluasi Penyuluhan. Beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi diuraikan dan dijelaskan dalam Bab ini, yaitu jenis evaluasi yang dilakukan, teknik pelaksanaannya, instrumen pengukuran, dan Teknik pengolahan dan penyajian data evaluasi.

## **17.2. Pendekatan Master TreeGrower: Pengertian, Model Konseptual, & Pelaksanaannya**

### **Pengertian**

Pendekatan MTG diperkenalkan di Indonesia melalui proyek ACIAR Nomor FST/2008/030, untuk bidang penelitian (Research Task #4) berjudul *“Merancang, melaksanakan dan mengevaluasi alternatif pembelajaran petani dalam rangka peningkatan kapasitas petani kecil guna berpartisipasi pada Perhutanan Komersial Berbasis Masyarakat di Indonesia”* (*“Design, delivery and evaluation of an alternatif farmer learning approach to enhancing the capacity of smallholders to participate in Community Based Commercial Forestry in Indonesia”*). Pendekatan ini adalah suatu pendekatan *“Pembelajaran yang partisipatif dan fleksibel bagi petani yang dilaksanakan dalam bentuk workshop atau pelatihan singkat bagi sekelompok petani”* - *“Flexible participatory learning model that could be presented as a short course for a group of farmers”*. Pendekatan MTG yang dilakukan di Indonesia adalah pendekatan partisipatif dimana petani mengambil posisi penting dan berperan aktif menentukan waktu, tempat dan prosesnya. *“Filosofi dasar dari program MTG adalah bahwa pengembangan agroforestry dan kehutanan harus diarahkan oleh petani. Proses pembelajaran harus dipandang dan dirasakan bahwa pembelajaran kehutanan dan*

agroforestry adalah dari petani untuk petani, harus mencerminkan keragaman kepentingan, sumber daya, dan aspirasi dari petani secara perorangan maupun kelompok”.

**Model Konseptual Pelatihan MTG Periode 2018-2020**

Pelatihan MTG yang dilakukan di 5 kabupaten pada 5 provinsi dalam periode 2018-2020 dilaksanakan dengan rancangan kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 17.1 berikut ini.

Tabel 17.1. Rancangan Isi dan Kegiatan Pelatihan MTG

Hari dan Isi	Proses dan pendekatan
<p><b>Hari 1: Menguasai seni dan ilmu menanam pohon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentingnya pengambilan keputusan petani dan rancangan yang tepat.</li> <li>• Identifikasi masalah dan aspirasi 'petani' (jangka pendek, menengah, panjang).</li> <li>• Peran dan prospek CBCF di kawasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabungkan sesi kelas dan kunjungan ke lahan usaha tani (lokasi kebun untuk kunjungan harus dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran). Ini dapat mencakup praktik silvikultur yang “terbaik” dan “buruk”.</li> <li>• Tempat duduk harus diatur sedemikian rupa untuk mengurangi tingkat formalitas (akan ada perbedaan tingkat formalitas antara TOT dan pelatihan untuk petani).</li> <li>• Pembukaan yang kurang formal.</li> <li>• Presentasi Power Point tidak boleh bertele-tele.</li> <li>• Lagu MTG (Oleh Bugi dan Ahmad – lihat Lampiran 2.) dapat digunakan sebagai pemecah kebekuan atau penyemangat selama pelatihan berlangsung. Lirik ini dimaksudkan untuk mengingatkan para petani betapa pentingnya menjaga pohon mereka (misalnya dengan melakukan pemangkasan dan penjarangan). Dengan demikian, petani meningkatkan kualitas kayu mereka untuk mendapatkan harga yang lebih baik – untuk keuntungan petani. Saya merasa lagu ini cukup efektif untuk menjadi kegiatan tambahan dalam pelatihan MTG dan dengan ini saya ingin mengusulkan lagu ini untuk dimasukkan secara luas dalam pelatihan MTG di tempat lain” (saran Bugi)</li> </ul>
<p><b>Hari 2: Pasar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kembangkan hubungan antara petani dan mereka yang terlibat dalam pasar kayu dan HHBK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesi kelas dan kunjungan industri (kunjungan harus dipersiapkan dan diatur dengan baik sebelumnya; tujuan pembelajaran harus dikomunikasikan dengan industri dan narasumber)</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesifikasi produk, opsi pemasaran, peraturan, dan lainnya.</li> <li>• Pengolahan dan kunjungan pemasaran.</li> <li>• Pasar sekunder dan on-farm untuk hasil hutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunjungan industri harus menjadi opsi pertama jika anggaran tersedia; jika kunjungan lapangan tidak memungkinkan, orang-orang industri dapat diundang ke pelatihan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, tetapi harus membawa “alat bantu” mereka untuk menunjukkan kualitas produk yang diminta oleh industri.</li> </ul>
<p><b>Hari 3: Pengukuran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian pohon dan tegakan relatif terhadap spesifikasi produk dan kebutuhan serta aspirasi pemilik lahan.</li> <li>• Distribusi dan pelatihan penggunaan Pita Diameter MTG.</li> <li>• Mendokumentasikan pertumbuhan hutan untuk kayu, karbon dan nilai lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesi kelas dan pekerjaan/praktik pertanian</li> <li>• Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk mempraktikkan teknik pengukuran pohon.</li> <li>• Hindari penggunaan istilah yang terlalu teknis dan/atau terjemahkan istilah bahasa Inggris ke dalam istilah yang lebih mudah dipahami</li> <li>• Perlu lebih banyak waktu dan atau metode yang tepat untuk menyampaikan mata pelajaran</li> <li>• Pertahankan subjek aslinya, tetapi tambahkan "tabel volume"</li> </ul>
<p><b>Hari 4: Manajemen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan pohon dan hutan, pilihan silvikultur (pemangkasan, penjarangan dan lainnya.).</li> <li>• Contoh petani yang menerapkan metode silvikultur.</li> <li>• Topik tambahan berdasarkan kebutuhan lokal: HHBK, pengelolaan hama &amp; penyakit, peran &amp; pengelolaan kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menekankan kembali keterkaitan antara “kualitas produk” yang diamati dan dipelajari pada Hari ke-2 dengan praktik silvikultur.</li> <li>• Tambahkan topik yang relevan secara lokal seperti Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) atau pengelolaan hama dan penyakit yang sesuai untuk wilayah tersebut.</li> </ul>
<p><b>Hari 5: Kunjungan pertanian, kelulusan dan masa depan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain yang tepat, penilaian risiko, evaluasi opsi, dan lainnya.</li> <li>• Peran kelompok tani dan jaringan informasi</li> <li>• Penyerahan sertifikat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi tentang manfaat, biaya, dan risiko yang terkait dengan CBCF</li> <li>• Diskusi tentang peran kelompok tani dan dukungan berkelanjutan membutuhkan “Kemana dari sini?”</li> <li>• Lakukan refleksi dan evaluasi</li> <li>• Mengembangkan rencana aksi</li> </ul>



**Saran umum tentang proses pelatihan MTG:**

- Lakukan Penilaian Kebutuhan Pelatihan khusus untuk mengidentifikasi topik yang relevan, penyaji lokal yang sesuai, konten, kunjungan industri, dan lokasi lapangan – lokasi tertentu menggunakan pendekatan partisipatif seperti diskusi kelompok terarah, sebelum menyelesaikan pelatihan MTG.
- Tempatnya harus dekat dengan rumah peserta.
- Ikuti budaya setempat dalam hal jadwal kegiatan, dan jangan paksa peserta untuk mengikuti ide dan rencana orang luar. Memfasilitasi kesepakatan tentang waktu terbaik (hari, jam) untuk melakukan pelatihan. Bersikaplah terbuka terhadap pilihan seperti melakukan pelatihan MTG dalam beberapa hari berturut-turut atau selama beberapa hari tidak berturut-turut (misalnya seminggu sekali atau pilihan lain)
- Hindari jenis presentasi kelas formal – kuliah, tata letak tempat duduk, sesi pembukaan formal.
- Berikan lebih banyak waktu untuk diskusi di antara para peserta.
- Biarkan semua orang mencoba semua praktik yang diusulkan - baik selama pelatihan maupun di rumah (mungkin mudah bagi mereka untuk berlatih di kebun atau pohon mereka, dan kemudian mereka dapat melaporkannya di hari berikutnya).
- Miliki dan kembangkan kegiatan tindak lanjut – selama (setiap hari selama pelatihan) dan setelah pelatihan selesai.
- Mengundang pers atau awak media untuk meliput kegiatan di hari pertama pelatihan MTG. Publisitas kegiatan ini mungkin berguna untuk menjangkau petani dan pemangku kepentingan lainnya.

Catatan: Meskipun menyetujui model MTG, ada empat pendekatan berbeda yang diambil oleh tim proyek dalam melaksanakan pelatihan MTG, (1) *Mengikuti pelatihan 5 hari berturut-turut* seperti yang dilakukan oleh Tim Pk Sugeng di Gorontalo dan Lampung (Rumbia dan Limbatihu Desa di Boalemo – Gorontalo; Desa Budi Lestari dan Srikaton di Lampung Selatan – Lampung), (2) *Empat hari berturut-turut* (di Desa Malelleng dan Benjala – Bulukumba), (3) *Empat hari tetapi dalam dua minggu* – selama akhir pekan (di Gunungkidul), dan (4) *Satu atau dua hari di kelas dan beberapa hari di lapangan* seperti yang dilakukan Tim T4T di Pati – Jawa Tengah.

**Gambaran Umum Pelatihan MTG pada Periode 2018 – 2020**

Pelatihan MTG pada periode 2018-2020 dilaksanakan di 15 lokasi dengan melibatkan sekitar 298 peserta – Tabel 17.2. Tehnis pelaksanaan pelatihan MTG pada 15 desa yang menjadi lokasi pelatihan MTG dapat diringkas sebagai berikut:

- (1) *Pelatihan MTG empat hari yang dilaksanakan selama dua minggu* dilaksanakan oleh Tim UGM di desa Jepitu, Katongan, Dengok dan Komplek Wanagama (Gunungkidul) – Tim UGM membuat kesepakatan dengan peserta untuk pelaksanaan di setiap akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu. Pelatihan MTG terakhir

yang dilakukan di wilayah Pati oleh T4T disampaikan di Desa Sinomwidodo dan mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Tim UGM di Gunungkidul.

- (2) *Pelatihan MTG yang berlangsung selama empat hari berturut-turut* dilakukan oleh Tim FOERDIA Makassar di Benjalla (dua kali) dan desa Malleleng (Bulukumba). Pelaksanaan empat hari berturut-turut dimungkinkan karena Tim FOERDIA menginap di Bulukumba, dan cukup melakukan sekali perjalanan dari Makassar ke Bulukumba, jarak 164 km yang ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 5 – 6 jam.
- (3) *Pelatihan MTG yang terdiri dari program satu hari penuh di kelas* dilakukan oleh Tim T4T di desa Sidomulyo, Giling dan Duren Sawit (Pati). Dalam setiap kasus, hari pertama melibatkan presentasi kelas tentang semua topik pembelajaran. Sesi praktik kemudian dilakukan di setiap desa dan dihadiri oleh beberapa petani sekitar dan atau anggota kelompok tani masing-masing. Tim T4T bertempat tinggal di Pati.
- (4) *Pelatihan MTG yang berlangsung selama lima hari berturut-turut* dilaksanakan oleh Tim FOERDIA Bogor di Desa Rumbia, Budi Lestari dan Srikaton. Tim FOERDIA Bogor harus menempuh perjalanan dengan pesawat dari Jakarta ke Lampung dan Gorontalo, dan setiap kali perjalanan diupayakan pelaksanaan paket pelatihan MTG dapat diselesaikan.

Tabel 17.2. Lokasi dan Jumlah Peserta Pelatihan MTG Periode 2018-2020

Lokasi Pelatihan MTG (Desa)	Tim	Tanggal & Deskripsi	Peserta			Peserta		
			Pria	Perempuan	Total	Petani	Bukan Petani*	Total
(1) Jepitu - Gunungkidul	UGM	3,10, 17 & 18 Maret 2018	6	6	12	11	1	12
(2) Benjara - Bulukumba	FOERDI A Makassar	4 - 7 April 2018	15	5	20	9	11	20
(3) Sidomulyo - Pati	T4T	10 April hingga 11 Mei 2018	16	1	17	12	5	17
(4) Rumbia - Buolemo	FOERDI A Bogor	2 - 6 Oktober 2018	15	4	19	12	7	19
(5) Malleleng - Bulukumba	FOERDI A Makassar	10-13 Oktober 2018	12	7	19	7	12	19
(6) Budi Lestari - Lampung	FOERDI A Bogor	26-30 Oktober 2018	14	6	20	15	5	20
(7) Katongan - Gunungkidul	UGM	20 & 21 Okt, & 27-28 Okt 2018	10	11	21	19	2	21
(8) Dengok - Gunungkidul	UGM	24 & 25 November, & 1 & 2 Desember 2018	4	11	15	14	1	15
(9) Giling - Pati	T4T	7 April - 29 April 2019 ; 2 hari	20	2	22	22	0	22
(10) Duren Sawit - Pati	T4T	1 & 2 Oktober 2019	17	5	22	22	0	22
(11) Limbathu - Buolemo	FOERDI A Bogor	30 - 31 Oktober, 1-3 November 2019	17	3	20	15	5	20
(12) Wanagama -	UGM	3, 9, 17 & 18	20	11	31 <sup>#</sup>	30	1	31

	Gunungkidul		November 2019						
(13)	Srikton - Lampung	FOERDIA Bogor	26-30 November 2019	18	2	20	14	6	20
(14)	Benjala 2 - Bulukumba	FOERDIA Makassar	22-26 September 2020	19	6	25	15	10	25
(15)	Sinomwido - Pati	T4T	28-29 Oktober & 4 & 5 November 2020	9	6	15	6	9	15
Jumlah (N)				212	86	298	223	75	298
Jumlah (%)				71	29	100	75	25	100

\*Non petani meliputi penyuluh, aparat desa, ibu rumah tangga, pedagang atau pekerja swasta # 35 pada hari terakhir seperti yang terlihat pada post-test (31 untuk pre-test).

Catatan: (1) Tim UGM: Silvi, Dwiko, Wiyono, Harsoyo; (2) Tim FOERDIA Bogor: Sugeng, Kuncoro, Aneka, dan Bugi Sumirat; (3) Tim FOERDIA Makassar: Ahmad Bahjoe, Abdul Kadir, Nurhaeda, Amri, Frans, Nurhayati, Rachim, Arifin; (4) Tim T4T: Darisman, Kafi, dan Kemal.

**Isi pelatihan:** Secara umum, semua pelatihan, selain di Pati, mengikuti proses standar yang tercantum dalam rencana dan rancangan pelatihan MTG (Tabel 17.1). Tim melakukan *penilaian kebutuhan pelatihan* sebelum pelaksanaan pelatihan, kemudian menyampaikan materi pelatihan di dalam kelas dan lapangan yang diadakan setiap hari. Penyampaian materi pelatihan MTG di Pati dilakukan dengan cara yang berbeda: Hari pertama pelatihan digunakan untuk menyampaikan seluruh topik atau materi MTG, yaitu (1) pengenalan MTG, (2) pengukuran, dan (3) pengelolaan pohon. Kemudian, di penghujung hari pertama ini, tim menyusun rencana aksi untuk melakukan sesi praktik lapangan di setiap desa asal peserta. Alhasil, tim pelatihan sepakat untuk menambah 11 hari untuk menyampaikan sesi praktik di 12 desa dengan peserta hanya menghadiri sesi praktik lapangan di desa mereka sendiri. Sesi kedua di kelas dilakukan pada hari terakhir pelatihan Pati untuk melakukan evaluasi.

Walau ada variasi dalam pelaksanaan pelatihan MTG di lokasi-lokasi pelaksanaan MTG, setiap pelatihan menyediakan sesi tentang “Pengenalan MTG”, “Mengapa Petani Menanam Pohon?”, “Pasar

Kayu”, “Pengukuran”, “Manajemen Pohon dan Kebun”, dan “Manajemen Risiko”. Pelatihan MTG di Rumbia, Budi Lestari, Benjala, dan Malleleng menambahkan sesi tentang “Kelompok Tani Hutan”, “Hasil Hutan Bukan Kayu – HHBK”, “Praktik Agroforestri”, dan “Pengelolaan Hama dan Penyakit”.

**Peserta Pelatihan:** Total peserta dari 15 pelatihan MTG adalah 298 orang, terdiri dari 73% laki-laki dan 27% perempuan. Menurut pekerjaannya, 66 (62%) peserta pelatihan MTG adalah petani dan 41 (38%) adalah non-petani seperti ibu rumah tangga, staf desa, swasta, dan PNS atau PNS (dari staf KPH, Agen Penyuluh Lapangan). Peserta MTG sebagian besar berada dalam usia produktif; berkisar antara 15 sampai 64 tahun (Tabel 17.2). Dua peserta di Jepitu merupakan alumni pelatihan MTG sebelumnya yang diselenggarakan oleh Tim UGM di Wanagama – pada CBCF fase 1 (tahun 2014).

Tabel 17.3. Usia Peserta Pelatihan MTG – Rata-rata dan Kisaran Umur

No.	Lokasi	Usia (Rata-Rata)	Kisaran
1	Jepitu	44	32 - 64
2	Benjala	45	31 - 60
3	Sidomulyo	63	21 - 55
4	Rumbia	42	23 - 57
5	Budi Lestari	43	22 - 62
6	Maleleng	36	22 - 53
7	Katongan	52	32 - 69
8	Dengok	53	39 - 68
9	Giling	-	-
10	Duren Sawit	46	31 - 70
11	Lambatihu	43	24 - 63
12	Wanagama	46	23 - 74
13	Srikaton	45	23 - 62
14	Benjala	50	30 - 70
15	Sinomwidodo	44	24 - 66

**Logistik pelatihan:** Setiap peserta dalam pelatihan MTG menerima beberapa perlengkapan atau alat pelatihan termasuk seragam, pita

diameter, pengukur pemangkasan dan manual MTG untuk petani (atau manual MTG untuk fasilitator yang sesuai).

### **17.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Master TreeGrower**

**Pengembangan program:** Pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi program penyuluhan dengan pendekatan MTG dilakukan melalui proses yang partisipatif. Keterlibatan petani dalam keseluruhan tahapan program MTG menjadi sesuatu yang penting dalam mewujudkan penyuluhan yang efektif. Penggunaan metode atau Teknik-teknik pengumpulan data dalam perencanaan program MTG dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan atau Teknik partisipatif diantaranya melalui diskusi kelompok terarah atau FGD, workshop, pemetaan partisipatif, kalender musim, diagram ven, wawancara mendalam, observasi, dan lainnya. Hasil dari proses perencanaan partisipatif dalam merumuskan substansi dan proses adalah adanya materi pelatihan, jadwal pelaksanaan kegiatan, peserta pelatihan, dan lainnya yang relevan. Pelatihan MTG dapat dilakukan antara 4 atau 5 hari dan pelaksanaannya sedapat mungkin di lokasi yang dekat dengan lokasi tempat tinggal peserta, dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan keluangan waktu peserta dan kebiasaan yang ada pada masyarakat yang menjadi sasaran pelatihan.

**Persyaratan peserta:** Peserta pelatihan MTG adalah mereka-mereka yang *ikut dalam kelompok tani*, dan *memiliki usaha tani* yang sesuai dengan topik pelatihan MTG. Persyaratan ini penting dijadikan sebagai acuan dengan harapan agar setiap peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan MTG dapat menjadi “penyuluh swadaya” bagi petani lainnya yang ada di sekitar tempat tinggalnya atau bahkan bagi keluarga dan anggota lain dari kelompoknya. Kedua persyaratan ini penting sebagai dasar dalam penentuan peserta, karna pada hari terakhir pelaksanaan pelatihan MTG dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut atau rencana aksi, dan 2 diantaranya adalah menyampaikan ilmu dan pengalaman kepada anggota kelompok lainnya yang tidak hadir dalam pelatihan MTG, atau juga kepada keluarganya; dan dapat

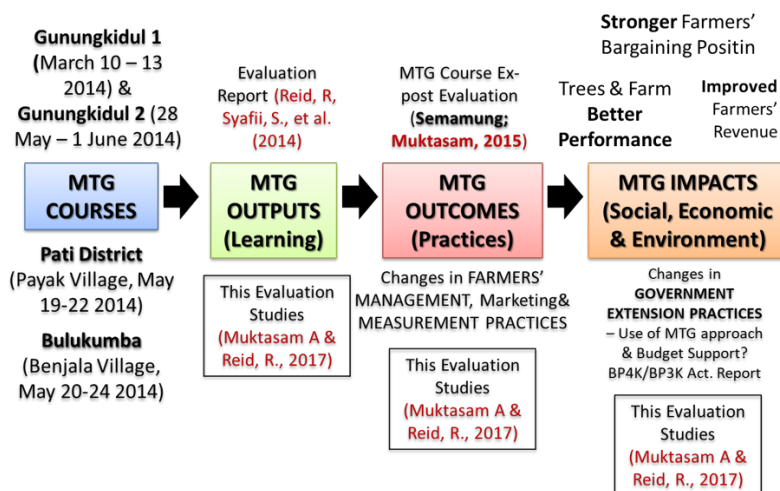
mempraktikkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan pelatihan MTG pada usaha taninya. Selain itu, diharapkan bahwa setiap peserta yang kembali ke kampungnya akan menjadi contoh bagi petani lainnya yang tidak ikut dalam pelatihan MTG – karena mempraktikkan pengetahuan dan keterampilannya, dan ini menjadi lahan demonstrasi cara dan demonstrasi hasil, yang dapat menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan MTG telah membuahkan hasil, yaitu terjadinya perubahan praktik.

**Pelaksanaan pelatihan:** Pelatihan MTG dilaksanakan dengan proses partisipatif, *learning by doing*, *seeing is believing*. Atas dasar prinsip ini, maka pelaksanaan pelatihan MTG dilakukan di dalam kelas, dan juga di lokasi usaha tani. Selain materi berupa teori, pelatihan MTG juga melibatkan praktik-praktik sesuai dengan materi yang dilatihkan. Kegiatan di hari pertama atau kedua, para peserta difasilitasi untuk berkunjung ke lahan usaha tani untuk identifikasi permasalahan dan aspirasi petani, dan mengetahui tentang pasar bagi produk-produk yang dihasilkan petani. Kegiatan di hari ketiga dan keempat juga gabungan antara kegiatan di ruangan dan di lahan usaha tani atau kebun peserta untuk mempraktikkan pengukuran dan pengelolaan pohon dan kebun. Penentuan lokasi untuk praktik dilakukan sedemikian rupa sehingga proses pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara efektif – penting bagi peserta pada saat perencanaan menyepakati, memutuskan dan mempersiapkan lokasi pelatihan dan praktik yang sesuai.

**Logistik pendukung:** Beberapa kebutuhan pelatihan yang disediakan dalam pelatihan MTG antara lain modul atau materi pelatihan yang dapat berupa buku atau hand-out, pita ukur, alat pangkas dan penjarangan, block notes, topi, alat tulis, pruning gauge, dan lainnya. Semua kebutuhan dan alat penunjang kegiatan pelatihan ini harus disiapkan sehingga dapat dibagikan pada jam awal di hari pertama kegiatan pelatihan.

## 17.4. Hasil Evaluasi Pendekatan MTG di Indonesia

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan MTG di 5 kabupaten pada 5 provinsi di Indonesia dilakukan secara terencana, dan mengikuti model pelaksanaan pelatihan yang pernah dilakukan pada fase 1 Proyek CBCF sebagaimana digambarkan pada Gambar 17.1. Evaluasi pelaksanaan pelatihan MTG dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu evaluasi pembelajaran yang mengukur perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi. Evaluasi ini dilakukan pada hari terakhir dari kegiatan pelatihan MTG (Reid, R., dan Syafii, S., et.al, 2014), dan didalami lagi pada saat bersamaan dengan *evaluasi perubahan praktik* dan *evaluasi dampak* yang dilakukan beberapa bulan setelah pelatihan MTG.



Gambar 17.1. Model Pelaksanaan Evaluasi MTG

Hasil evaluasi terhadap 15 kegiatan pelatihan MTG menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hutan dan agroforestry dengan pendekatan MTG ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sekitar 298 orang petani dan non-petani yang ikut serta dalam kegiatan pelatihan MTG di 5 provinsi tersebut. Tidak itu saja,



pelatihan MTG sebagai model atau teknik penyuluhan kehutanan, juga telah mendorong perubahan praktik dalam pengelolaan hutan dan agroforestry di lokasi-lokasi kegiatan MTGs, yaitu Pati – Jawa Tengah, Gunungkidul – Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung Selatan – Lampung, Bulukumba – Sulawesi Selatan, dan Boalemo – Gorontalo (Muktasam, Reid, & Race, 2021).

### ***Peningkatan pemahaman peserta pelatihan MTG***

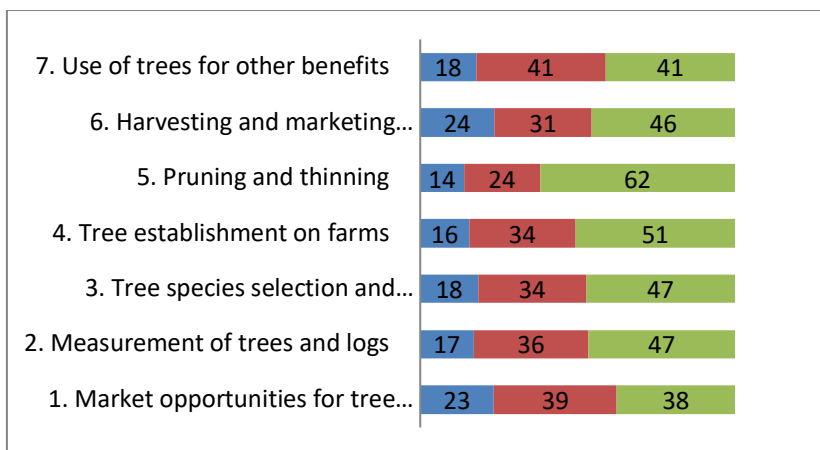
Hasil dari 15 lokasi pelatihan MTG mengungkapkan bahwa hampir semua peserta menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri tentang aspek-aspek utama pengelolaan pohon dan kebun telah meningkat (*“banyak dan sangat banyak”*) karena partisipasi mereka dalam pelatihan (Tabel 17.4 dan Gambar 17.2). Gambar 18.2 hingga 18.9 menyajikan hasil dari setiap topik pembelajaran di lima wilayah tersebut.

Hasil ini jelas menunjukkan bahwa peserta MTG merasa telah belajar banyak untuk berbagai topik yang disampaikan dalam pelatihan. Sebagian besar peserta pelatihan MTG di 14 lokasi memilih skala 3 sampai 5 (pada skala Likert 1 sd 5) yang berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman mereka tentang topik sekarang *lebih baik, jauh lebih baik*, atau *sangat jauh lebih baik*.

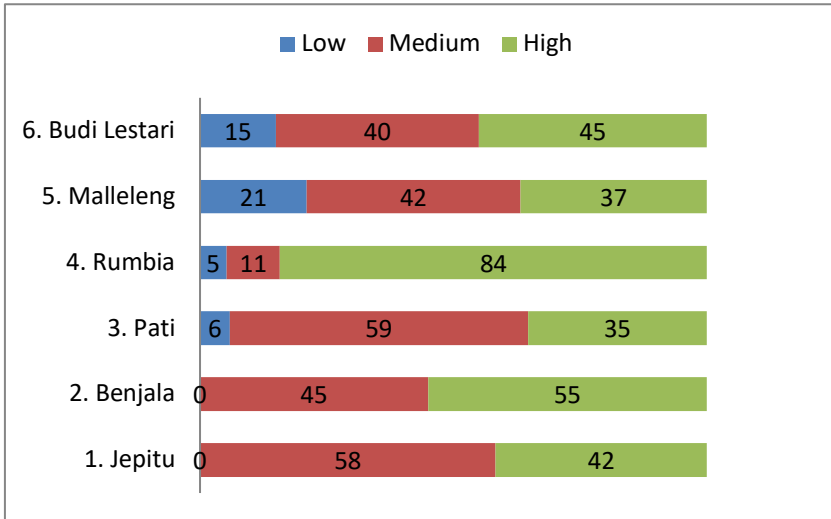
Tabel 17.4. Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan karena Pelatihan MTG (%)

Topik	Mean	Modulus	Pengetahuan dan pemahaman saya adalah					%
			Tidak lebih baik--Sedikit lebih baik--Lebih baik--Jauh lebih baik--Sangat jauh lebih baik					
			1	2	3	4	5	
(1) Peluang pasar untuk produk pohon	3.6	4	5	18	39	24	14	100
(2) Pengukuran pohon dan batang kayu	3.6	4	3	14	36	30	16	100
(3) Seleksi spesies pohon dan kualitas genetik	3.8	3	5	13	34	29	18	100
(4) Penanaman pohon di perkebunan	3.6	3	5	11	34	34	17	100
(5) Pemangkasan dan penjarangan	4.1	5	3	11	24	36	26	100
(6) Pemanenan dan pemasaran kayu	3.5	3	4	19	31	31	14	100
(7) Pemanfaatan pohon untuk manfaat lainnya	3.5	5	3	14	41	21	20	100

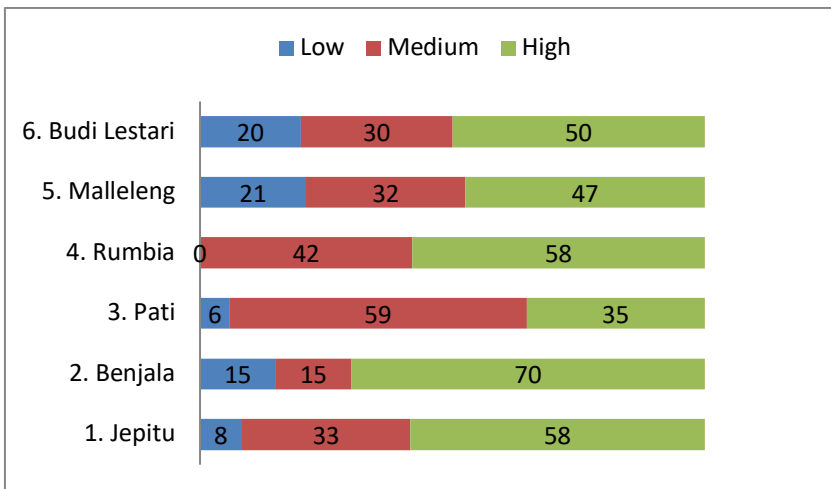
**Catatan:** \* 1 (tidak lebih baik), 2 (sedikit lebih baik), 3 (Lebih baik), 4 (Jauh lebih baik), 5 (Sangat jauh lebih baik); Sebanyak 298 peserta untuk semua 15 pelatihan MTG. Gambar berikut adalah grafik hasil pelatihan setelah 5 skala dirubah menjadi skala 3 poin dengan menggabungkan hasil rendah dan tinggi yang disajikan pada Tabel 18.4



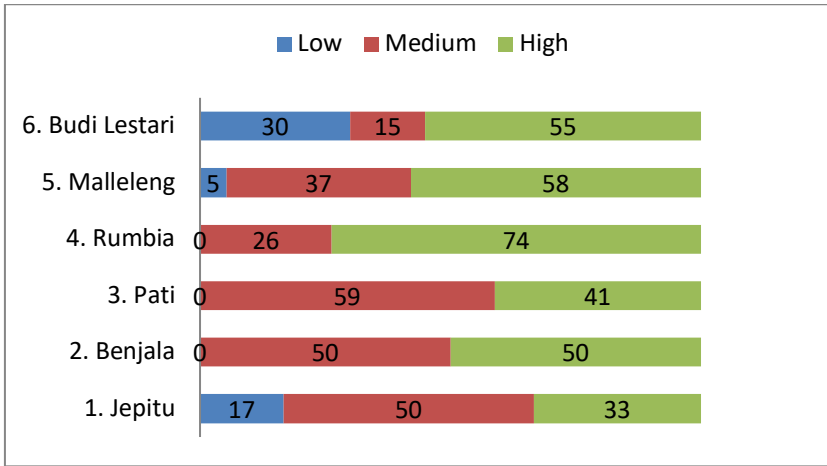
Gambar 17.2. Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan



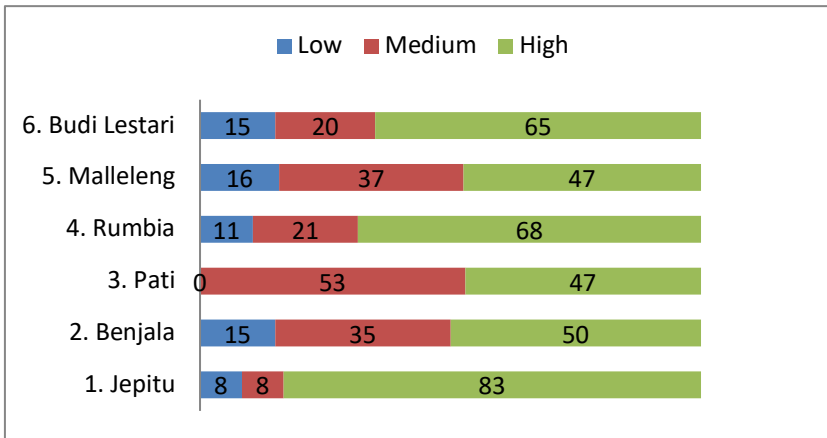
Gambar 17.3. Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan - Peluang Pasar



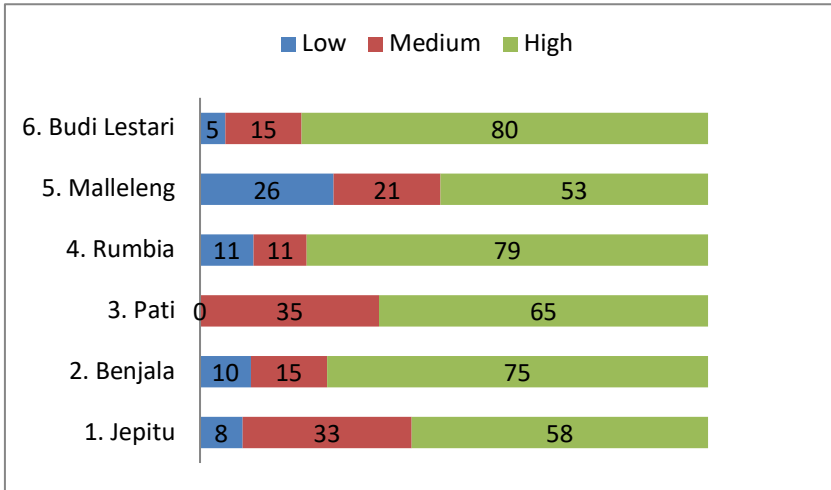
Gambar 17.4. Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan - Pengukuran Pohon



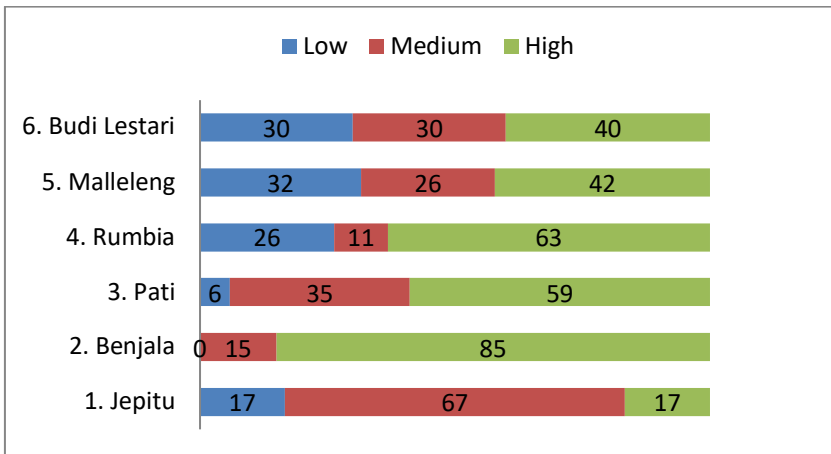
Gambar 17.5. Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan - Pemilihan Jenis Pohon



Gambar 17.6. Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan - Penanaman Pohon



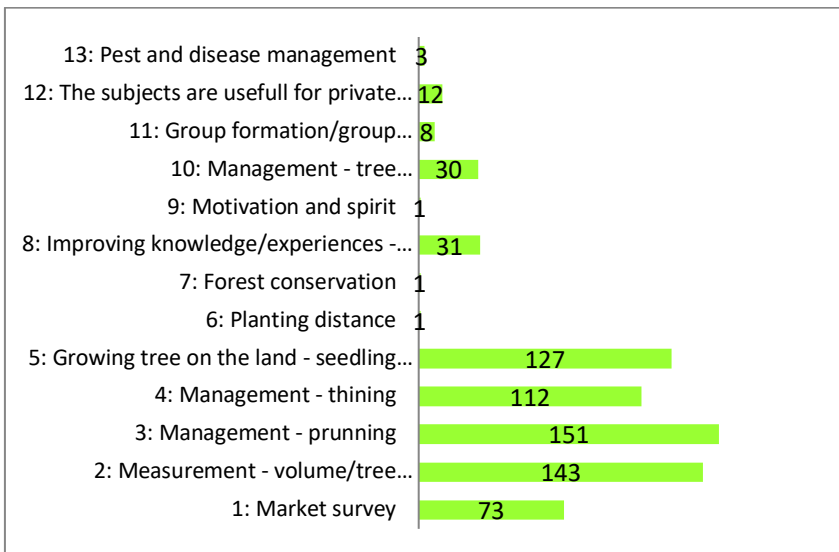
Gambar 17.7. Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan - Pengelolaan Pohon



Gambar 17.8. Persepsi Peserta terhadap Peningkatan Pengetahuan – Pemanenan/Pemasaran

### ***Beberapa Kemungkinan Perubahan pada Praktik Pengelolaan Hutan yang Ada***

Menanggapi pertanyaan “*Apakah Anda akan mengubah praktik pertanian yang ada sebagai hasil dari pelatihan MTG?*”, data mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta di setiap lokasi menyatakan keinginan untuk mengubah praktik pengelolaan pertanian yang ada. Empat perubahan besar yang dijanjikan peserta MTG adalah (1) *Pemangkasan Pohon* (54%), (2) *Pengukuran* (51%), (3) *Penanaman Pohon di Lahan* (46%), dan (4) *Penjarangan* (40%). Beberapa kemungkinan perubahan lain yang diungkapkan oleh peserta MTG adalah kesediaan mereka untuk menanam (lebih banyak) pohon, berbagi topik pembelajaran dengan petani lain, dan mendorong petani lain untuk bekerja dalam kelompok. Evaluasi ini menemukan peserta terbatas di Desa Rumbia (Boalemo – Gorontalo) dan Desa Budi Lestari (Lampung) menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan pemangkasan dan penjarangan karena mereka belum menanam pohon di kebun mereka. Sebagian besar peserta di lokasi ini ingin mulai menanam pohon –Gambar 17.9.



Gambar 17.9. Perubahan Praktik yang Akan Dilakukan setelah Pelatihan MTG

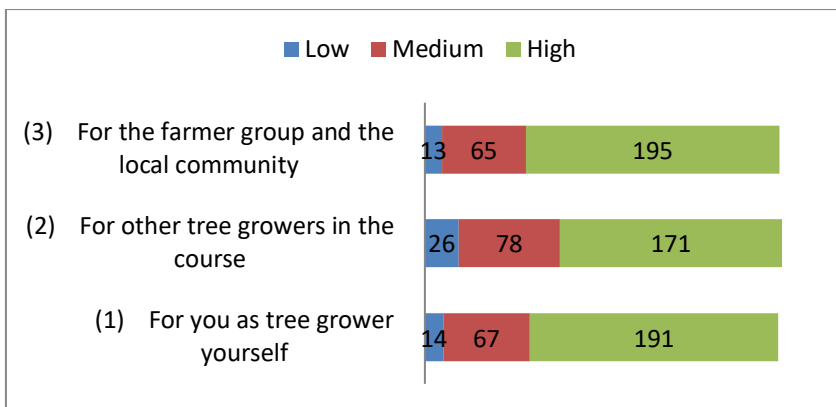
**Persepsi Peserta terhadap Nilai Pelatihan MTG**

Peserta diminta untuk menilai nilai pelatihan untuk diri mereka sendiri, rekan peserta mereka dan kelompok tani atau komunitas lokal mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta merasakan nilai tinggi dari pelatihan MTG di semua kategori (rata-rata lebih besar dari 3,5), terutama untuk diri mereka sendiri dan komunitas mereka (Tabel 17.5 dan Gambar 17.10 hingga 17.13).

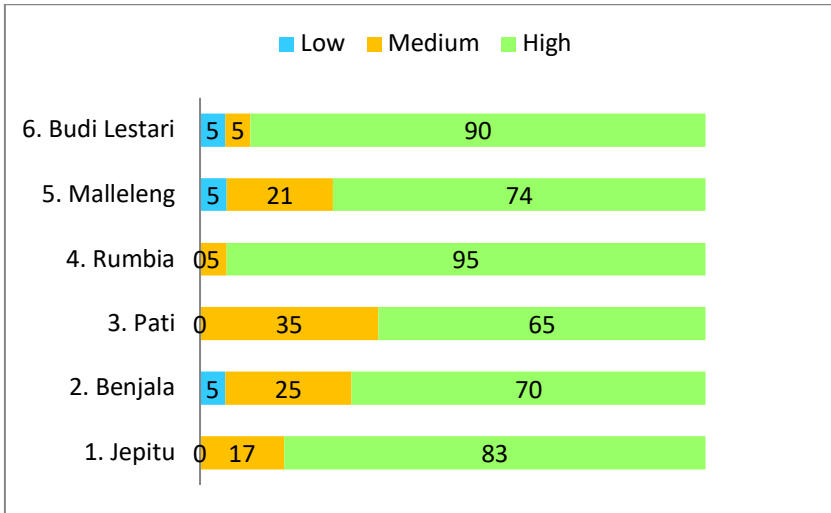
Tabel 17.5. Persepsi Peserta tentang Nilai Pelatihan MTG (N=298)

Nilai pelatihan MTG	Mean	Modus	1	2	3	4	5	Total
(1) Untuk Anda sendiri sebagai penanam pohon	4.2	5	4	10	67	63	128	272
(2) Untuk penanam pohon lain dalam pelatihan	3.8	4	7	19	78	89	82	275
(3) Untuk kelompok tani dan masyarakat setempat	4.0	5	5	8	65	76	119	273

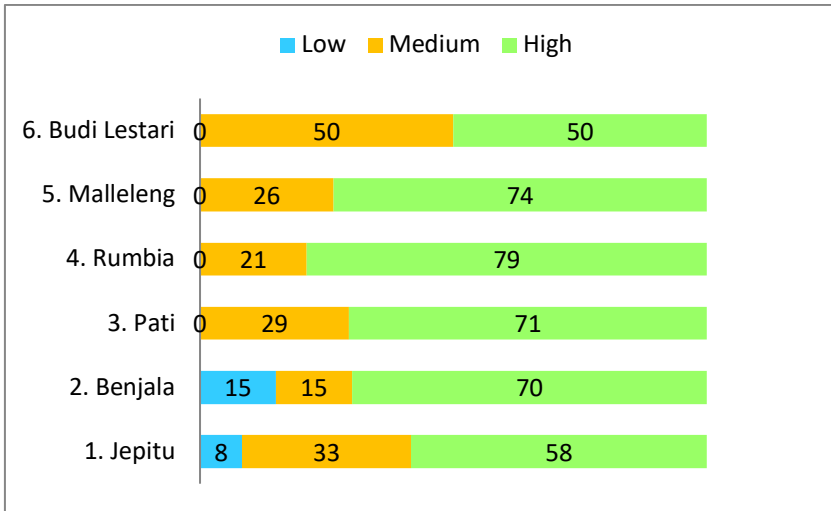
Keterangan: 1 (tidak bernilai), 2 (bernilai tertentu), 3 (Berharga), 4 (Bernilai banyak), 5 (Bernilai sangat banyak)



Gambar 17.10. Persepsi Peserta terhadap Nilai Pelatihan MTG di Semua Lokasi

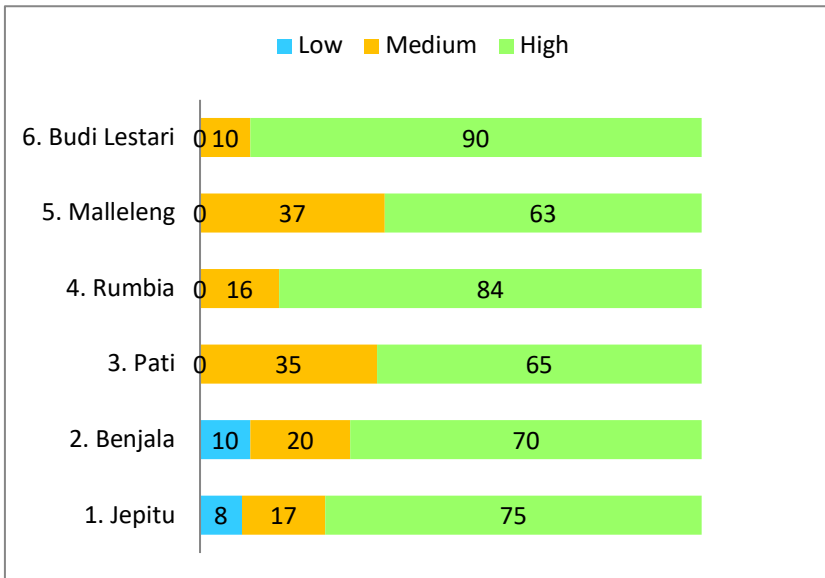


Gambar 17.11. Persepsi Peserta tentang Nilai Pelatihan MTG untuk Diri Mereka Sendiri



Gambar 17.12. Persepsi Peserta tentang Nilai Pelatihan MTG bagi Peserta Lain





Gambar 17.13. Persepsi Peserta tentang Nilai Pelatihan MTG bagi Masyarakat Lain

### ***Perubahan Praktik Pengelolaan Kebun oleh Peserta MTG***

Sekitar 50% alumni pelatihan MTG di Desa Benjala, Malleleng, dan Budi Lestari telah mengimplementasikan sebagian ilmu dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan tersebut, terutama dalam menanam pohon, melakukan pemangkasan, pengukuran, dan pemasaran. Hanya satu peserta di Desa Rumbia yang telah melakukan praktik pemangkasan. (Tabel 17.6). Data juga mengungkapkan bahwa ada 4 petani nonpeserta yang terkena dampak peserta MTG di Benjala dan Malleleng. Menurut peserta MTG, mereka mungkin telah mempengaruhi petani lain karena mereka telah berbagi pengalaman belajar dengan orang lain di kelompok tani masing-masing serta membantu beberapa melakukan praktik silvikultur. Alternatifnya, petani lain mungkin hanya mengamati perubahan yang dilakukan oleh peserta pelatihan MTG. Rincian masing-masing situs disajikan secara singkat di bagian berikut.

Tabel 17.6. Perubahan *Praktik Usaha tani* Peserta & Non-peserta Pelatihan MTG

Lokasi/Desa	Peserta MTG			Petani lain yang terkena dampak	Area perubahan & dampak
	Di pelatihan	Mengubah praktik mereka	Dikunjungi setelah FGD		
(1) Jepitu	12	3	3	1	Pemangkasan & penjarangan
(2) Benjala	20	8	7	2	Penanaman pohon, pemangkasan, penjarangan, perdagangan kayu
(3) Mallele ng	19	9	4	2	Menanam lebih banyak pohon, memangkas & penjarangan
(4) Rumbia	19	6	1	0	Menanam lebih banyak pohon, melakukan pengukuran, bercocok tanam, dan memangkas
(5) Sidomulyo	17	6	5	-	Pemangkasan & penjarangan
(6) Budi Lestari	20	11	4	1	Penanaman pohon, pengukuran, pemasaran, dan pemangkasan

**Jepitu:** Kunjungan lapangan ke Jepitu dilakukan pada Februari 2019 untuk bertemu dengan para peserta pelatihan MTG dan mempelajari bagaimana mereka menerapkan hasil pembelajaran dan pengalaman mereka. Sebagai panduan untuk memahami perubahan aktual dalam praktik manajemen pertanian peserta, niat mereka seperti yang diungkapkan dalam dokumen post-test pelatihan MTG digunakan sebagai penguat niat mereka (Tabel 17.7).

FGD dilakukan di rumah Peserta MTG No. 11, dan hasilnya disajikan pada Tabel 17.7. Dari 12 peserta pelatihan MTG, 6 orang mengikuti diskusi. Menurut para peserta, mereka berbagi ilmu yang diperoleh

dari pelatihan dengan mitra dan buruh tani mereka, dan juga melakukan pemangkasan dan penjarangan sendiri.

Tabel 17.7. Perubahan *Praktik Usaha tani* Peserta Pelatihan MTG – Jepitu

Peserta MTG no.	Niat diungkapkan pada pelatihan MTG?	Tindakan setelah MTG
1	Akan belajar lebih banyak tentang cara merawat pohon dengan lebih baik	Tidak tahu bagaimana bapak menerapkan pengalaman belajarnya
2	Lakukan hal-hal nyata seperti pemangkasan dan penjarangan	-
7	Akan melakukan pemangkasan dan penjarangan	Berbagi ilmu dan keterampilan dari pelatihan MTG dengan suami dan tenaga kerja; melakukan pemangkasan dan penjarangan
8	Akan melakukan hal-hal nyata di lapangan	Melakukan beberapa pemangkasan; memberikan arahan kepada suami; dan sang suami kesulitan melakukan pemangkasan yang tepat begitu dekat dengan batang utama. Pemangkasan dilakukan agak jauh dari batang utama
10	Akan mengubah praktiknya dalam pengelolaan peternakan yang diwarisi dari kakek neneknya	Dia memiliki beberapa petak, dan telah melakukan beberapa pemangkasan pada pohon jatinya. Kakak ipar juga mengikutinya dalam memangkas pohon.
11	Akan mengubah praktik saya - sebagai hasil dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Tidak ada kegiatan dalam praktik silvikultur -



Peserta no. 10 dan 11 Menampilkan tempat yang direncanakan untuk lokasi pembibitan yang tidak berfungsi



Ladang Peserta No. 10 tempat Ia mempraktikkan pemangkasan hasil pelatihan MTG. Kakak iparnya juga mengikutinya



Kebun Besar yang dikelola oleh Peserta No. 7. Sebagai staf pemerintah desa, suaminya mengelola “Tanah Milik Pemerintah” ini (disebut Tanah Bengkok” yang diberikan kepada staf desa sebagai pengganti gaji), dan menanam pohon seperti jabon, sengon, jati dan akasia Auri.

**Benjala:** Pelatihan pelatihan MTG di Benjala dilakukan pada April 2018, dan kunjungan lapangan dilakukan pada Maret 2019, setahun setelah pelatihan. Dua diskusi kelompok terarah dilakukan di Kantor Pk Basyir dan HIPKI yang berjarak sekitar 25 km dari Desa Benjala. Tim juga melakukan wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk mendapatkan data tentang bagaimana para peserta MTG menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka atau mengubah praktik pengelolaan kebun mereka. Evaluasi pelatihan desain ulang MTG juga dilakukan secara paralel dengan evaluasi uji coba F2FM yang dijalankan secara lokal. Berdasarkan dua diskusi kelompok terarah (di Kantor Pk Basyir dan HIPKI), wawancara mendalam, dan observasi lapangan, beberapa peserta yang benar-benar menerapkan

pengetahuan dan keterampilannya disajikan pada Tabel 17.8 beserta maksud yang mereka ungkapkan di akhir MTG pelatihan.

Tabel 17.8. Perubahan *Praktik Usaha tani* Peserta Pelatihan MTG – Benjala.

Peserta No	Niat diungkapkan pada penyelesaian pelatihan MTG?	Tindakan setelah MTG
3	Ya, melakukan pengelolaan pohon dan kebun yang lebih baik dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru	Dia telah melakukan beberapa pemangkasan dan penjarangan, tetapi tidak semuanya karena tidak cukup tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan itu. Dia punya dua anak tapi tinggal di bagian lain Bulukumba.
10	Ya, dengan pelatihan ini maka saya jadi lebih tahu	Baru melakukan pengelolaan pada beberapa pohon miliknya karena berada di lahan terjal dan jauh dari rumah;
15	Ya, mengikuti pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan	Melakukan pemangkasan untuk pohon-pohon yang cabangnya lebih rendah, tetapi tidak terlalu intensif; ingin melihat hasil dan perubahannya terlebih dahulu sebelum melakukan pruning dan penjarangan lagi . Dia memiliki gamelina, bitti dan jati lokal di pagar tanaman pangannya
16	Ya, dengan ilmu dan keterampilan yang didapat dari pelatihan ini, bagaimana cara menghasilkan kayu dengan kualitas yang baik	Melakukan pengelolaan pohon dan kebunnya sendiri dan telah mempengaruhi 2 petani lain di sekitarnya.
17	Ya, manajemen pohon dan pertanian yang lebih baik	Menjalankan usaha sebagai pedagang kayu. Jual beli kayu jati.
18	Ya, untuk pertanian yang lebih produktif	Tidak bisa berbuat apa-apa karena pohonnya dijual oleh putranya seharga 7 juta sementara pohon lain tumbuh dengan buruk dan dikelola di tanah berbatu.
19	Ya, akan diterapkan pemangkasan, dan jarak tanam	Apakah beberapa pemangkasan untuk gamelina nya
20	Ya, ingin mendorong petani untuk bekerja secara berkelompok	Dia menerapkan pengetahuan dan keterampilan, dan bahkan berbagi dengan anggota keluarganya

**Sidomulyo dan Duren Sawit:** Evaluasi ex-post redesign MTG Pati telah dilakukan pada April 2019, dan diikuti oleh 8 peserta pelatihan. Tiga di antaranya telah dikunjungi pada pertemuan sebelumnya. Peserta lain (Peserta No. 1) dari Duren Sawit tidak mengikuti pertemuan pada tanggal 29 April, tetapi dikunjungi oleh tim secara terpisah karena jarak yang jauh (dia tinggal di Pati bagian Selatan). Dia mengelola kayu jati dan sengon dan telah bekerja dengan PT. Perum Perhutani sejak lama.

Evaluasi ex-post ini menemukan bahwa beberapa peserta, Peserta No. 1, 5, 7, 8 dan 16, telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan MTG, meskipun tidak semua pohon mereka dipangkas dan dijaring (Tabel 17.9). Mereka mengklaim bahwa mereka ingin melihat hasil dari praktik terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan melakukan hal yang sama jika praktik tersebut meningkatkan kinerja pohon dan kebun mereka.

Hampir semua peserta telah berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan petani lain di kelompok tani masing-masing, seperti Peserta No. 7, 16, 1, dan 5. Seperti yang dijelaskan oleh Peserta No. 1, beberapa petani di sekitarnya juga mengikutinya. dalam memangkas dan menipiskan pohon mereka.

Tabel 17.9. Perubahan *Praktik Usaha tani* Peserta Pelatihan MTG - Sidomulyo & Duren Sawit

Nomor peserta	Apakah Anda akan mengubah praktik karena pelatihan MTG?	Jika Ya, Apa?					Perubahan dalam praktik manajemen usaha tani
		Pemangkasan	Penjarangan	Pemupukan	Menanam	Ukuran	
	1: Ya; 2: Tidak						
1	1	1	1	0	0	0	<p>Terapkan pelajaran yang dipelajari di pelatihan MTG seperti pemangkasan dan penjarangan. Sekitar 25-50% dari kebunnya – tidak semua pohon berada pada waktu terbaik untuk melakukan penjarangan; berbagi pelajaran dengan 80 petani lain dalam kelompok dan komunitasnya; beberapa petani mungkin telah mengubah praktik pertanian mereka; dia memiliki pohon jati dan sengon.</p>
5	1	0	1	0	0	0	<p>Ia mengimplementasikan pelajaran yang didapat melalui pelatihan pelatihan MTG seperti menanam lebih banyak pohon, melakukan pemangkasan dan penjarangan sekitar 25-50% dari kebunnya; Berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan 11 petani lainnya; mengelola lahan 1 ha dan ditanami sengon</p>
6	1	1	1	1	0	0	<p>Dikunjungi sebelum evaluasi – berpengalaman untuk 2 pelatihan MTG</p>
7	1	0	1	1	0	0	<p>Peserta ini menanam sengon (650 pohon), jati, jengkol, mahoni, kapulaga, jahe, kencur – di lahan agroforestri; berbagi ilmu dengan 5 petani lainnya. Petani itu telah menjual pohon sengon miliknya seharga 180 juta dan membeli sebuah mobil untuk putrinya.</p>
8	1	0	1	0	0	0	<p>Dia melakukan pemangkasan dan penjarangan, tetapi berdasarkan “pengetahuan tradisional” di mana dia memotong dahan untuk pakan kambing,</p>

							dan menebang pohon ketika kinerja pohonnya buruk – tidak begitu baik
9	1	0	1	0	0	0	Menanam sengon lagi di kebun jeruknya, tetapi keputusan untuk menanam sengon salah karena merusak jeruk
16	1	1	1	0	0	0	Kebun Peserta No. 16, kebun agroforestri kopi yang menggabungkan jenis pohon seperti sengon (dengan kopi), jati (pagar 40 pohon), jengkol, randu, durian, manggostan, pete, kopi, ketak, pisang, dan lain-lain; menghasilkan 900 kg kopi per tahun dari lahan agroforestrinya; berbagi pengetahuan dengan anggota kelompok lainnya



Peserta No. 7 memiliki 750 Pohon Sengon dengan beberapa Jati; melakukan pemangkasan dan penjarangan terbatas; belum berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan orang lain



Peserta No. 5 memiliki Pelatihan dan Kebun Percontohan; dalam satu hektar tumbuh 500 pohon sengon; berlatih pemangkasan dan penjarangan; berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan 5 petani lainnya





Kunjungan ke Farm Peserta No. 7 – 29 April 2019:



Peserta ini menanam sengon (650 pohon), jati, jengkol, mahoni, kapulaga, jahe, kencur – di lahan agroforestri; berbagi ilmu dengan 5 petani lainnya



Kunjungan ke Farm Peserta No. 16 – 29 April 2019:



Kebun Peserta No. 16, kebun agroforestri kopi yang menggabungkan jenis pohon seperti sengon (dengan kopi), jati (pagar 40 pohon), jengkol, randu, durian, manggostan, pete, kopi, ketak, pisang, dan lain-lain; menghasilkan 900 kg kopi per tahun dari lahan agroforestri miliknya; berbagi pengetahuan dengan anggota kelompok lainnya



Kunjungan ke Farm Peserta No. 1 di Desa Duren Sawit, Pati – 29 April 2019:



Visiting Peserta No.1; Dia berbagi ilmu dengan sekitar 80 petani; berlatih pemangkasan dan penjarangan



**Desa Rumbia:** FGD evaluasi ex-post pelatihan redesain MTG dilaksanakan pada bulan Maret 2019 di Desa Rumbia dan dihadiri oleh 17 orang, dimana hanya 6 orang peserta pelatihan MTG (Tabel 17.10).

Tabel 17.10. Perubahan *Praktik Usaha tani* Peserta Pelatihan MTG - Rumbia

Jumlah Peserta MTG	Niat diungkapkan pada penyelesaian pelatihan MTG?	Tindakan setelah MTG
5	Menanam pohon di lahan yang tidak ada pohonnya	Dapat 16 pohon dari PT.KTG dan ditanam, dan hanya 9 yang bertahan
7	Melakukan pemangkasan dan penjarangan di lahannya sendiri	Belum melakukan apapun seperti pemangkasan dan penjarangan
11	Tumbuh pohon	Mendapat 135 bibit jaban dari pemerintah pada tahun 2015, dan ditanam di kebun, hanya tersisa 40 pohon. Dia memang memangkas pohon 4 tahunnya
13	Mempraktikkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini	Dapat 15 bibit dari PT.KTG, semua ditanam, tapi hanya 6 yang bertahan
16	Berencana menanam pohon di masa depan	16 bibit yang didapatnya dari PT. KTG mati di polybag dan gagal tanam di lahannya.
18	Berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan petani dan kelompok lain	Ia menggunakan ilmu menanam pohon dalam kegiatan penyuluhannya

Berikut pertanyaan yang diajukan kepada peserta FGD Rumbia: (1) *Apa yang Anda pelajari selama pelatihan MTG pada Oktober 2018 tahun lalu?* (2) *Pengetahuan dan keterampilan apa yang telah Anda praktikkan dan apa hasilnya?* (3) *Jika Anda belum menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut, dapatkah Anda menjelaskan alasannya?* (4) *Apa yang harus kita lakukan untuk MTG mendatang atau untuk kelompok pendukung?* Tanggapan dari peserta ditunjukkan pada Tabel 17.11.

Tabel 17.11. Perubahan *Praktik Usaha tani* Peserta Pelatihan MTG – Rumbia Boalemo

Pengetahuan/Keterampilan aktif	Jumlah peserta	Alasan tidak dilaksanakan
	Menerapkan	
(1) Tumbuh pohon	3 ( <i>Peserta</i> no.13 mendapat 15 bibit jabon dari KTG, dan ditanam, tetapi 6 bibit tumbuh dengan baik; <i>Peserta no.11</i> mendapat 135 bibit dari pemerintah pada tahun 2015, dan 40 pohon bertahan – dia melakukan pemangkasan untuk jabon merah tetapi tidak untuk jabon putih jabon; <i>Peserta no.5</i> Mendapat 16 pohon dari PT.KTG dan ditanam, dan hanya 9 yang bertahan)	Tidak ada bibit; Bibit mati di polybag; Tidak ada pengawasan; Polybag terlalu besar dan terlalu berat untuk dibawa ke darat
(2) Pasar	0	Tidak ada pohon untuk dijual; Namun telah ada link dengan PT. KTG
(3) Pengukuran	2	Tidak ada pohon; Tidak perlu dilakukan karena tidak ada niat untuk menjual; Peserta no. 16 dan 19 melakukan pengukuran untuk membeli atau menaksir volume kayu
(4) Pengelolaan pohon dan hutan		
• Pemangkasan	1	Tidak ada pohon; Pohon sudah begitu tinggi untuk dipangkas
• Penjarangan	0	Tidak ada pohon; Jabon ditanam dengan jarak yang cukup jauh
(5) Lainnya (Kelompok tani, manajemen risiko & hama dan penyakit)		Pertemuan Kelompok Kayu Katingan; Memiliki rencana aksi dengan KPH



*Peserta No. 11 merupakan satu-satunya peserta FGD Desa Rumbia yang telah melakukan pemangkasan. Yang lain menyatakan bahwa pohon mereka masih terlalu kecil atau tidak ada niat untuk menjual kayunya.*

**Malleleng:** Diskusi kelompok terarah dihadiri oleh sembilan peserta (Tabel 17.12) pada Maret 2019. Setelah diskusi para peserta sepakat untuk mengunjungi peternakan peserta pelatihan MTG no. 2, 8, 16, 9, 15, dan lainnya.

Tabel 17.12. Perubahan *Praktik Usaha tani* Peserta Pelatihan MTG – Malleleng.

Peserta Pelatihan MTG	Hasil FGD, Wawancara dan Observasi
2	Telah mengelola kebun seluas 700 m2 dengan beberapa gamelina di batas kebun (lebih dari 10 tahun), juga memiliki pohon jati dan sedang tumbuh pohon karet. Dia tidak memangkas. Berbagi pengetahuan dengan orang lain; kakak beradik
4	Mengelola lahan 0,5 ha; berbagi ilmu dengan suami; melakukan pemangkasan;
6	Diamati bahwa ia memiliki sekitar 7-8 pohon gamelina yang berumur sekitar 7 sampai 10 tahun dan total 40 pohon yang berumur 5 tahun; biti 5 pohon; sudah tinggi dan sulit untuk dipangkas. Ia mengirimkan 20 batang pohon gamelina untuk sekitar 3 batang penjemputan dengan harga Rp350.000 per penjemputan (total 1.050.000); berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan 3 kerabat; melakukan pemangkasan dan penjarangan serta pengukuran saat dia menjual kayunya
8	Memiliki beberapa gamelina di perbatasan taman, dan pohon karet yang tumbuh. 20 mahagoni, 30 gmelina & 10 biti pada lahan 0,25 ha; melakukan pemangkasan; berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan 2 petani lainnya
9	Memiliki beberapa gamelina di batas taman seluas 0,25 ha (20 pohon), dan pohon karet yang tumbuh. Dia melakukan pemangkasan dan penjarangan; berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan 2-3 petani lainnya
15	Mengelola kebun pohon seluas 120 mx 20 m (2400 m2) dan menanam gmelina dan jati, total 36 pohon; Melakukan pemangkasan dan pemeliharaan (pemupukan); ruang terbatas untuk menanam lebih banyak pohon;
16	Memiliki beberapa gamelina di perbatasan taman, dan pohon karet yang tumbuh. Dia tidak memangkas; gagal menumbuhkan gmelina karena ternak bebas; melakukan penanaman pohon; tidak berbagi pengetahuan dengan orang lain; terlalu sibuk untuk mengelola pohon secara efektif
17	Mengelola lahan 0,5 ha; tumbuh gmelina di perbatasan dengan cengek – 5 pohon gmelina; melakukan pemangkasan pada semua pohonnya; tidak ada lagi ruang untuk menumbuhkan lebih banyak pohon;
18	Mengelola 1,0 ha pohon kelapa; 1,0 ha merica; juga 10 pohon gmelina di perbatasan; berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan 3 petani lainnya;

**Budi Lestari:** FGD di Desa Budi Lestari yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019 diikuti oleh 19 peserta, 13 diantaranya merupakan alumni MTG. Pada hari terakhir pelatihan, setiap peserta mengungkapkan niatnya untuk menanam lebih banyak pohon dan berbagi pengalaman dengan petani lainnya.

Hasil FGD yang disajikan pada Tabel 17.13 mengungkapkan jumlah peserta pelatihan MTG yang telah mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari keikutsertaannya dalam pelatihan MTG. Kebanyakan mengaku lebih banyak menanam pohon, seperti sengon dan pohon buah-buahan. Beberapa peserta lain telah melakukan praktik pengukuran, pemasaran dan pemangkasan, sementara tidak ada yang melakukan penjarangan.

Peserta No. 15 telah memanen akasiannya yang berumur 8 tahun, mengolahnya menjadi bahan bangunan, dan menjual kayu tersebut kepada mertuanya. Ia kemudian menanam lagi akasia yang baru berumur beberapa bulan. Selain itu, dengan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengukur, ia tidak lagi menjual pohon atau kayu gelondongan, melainkan mengolahnya menjadi bahan bangunan untuk dijual. Peserta No. 9 juga menjual pohon akasia miliknya sekitar 3,2 juta rupiah, kemudian ditanam lagi dengan waru gunung.

Tabel 17.13. Perubahan *Praktik Usaha tani* Peserta pelatihan MTG– Desa Budi Lestari.

Topik pembelajaran	Jumlah petani yang diadopsi	Hasil	Alasan
Tumbuh pohon	11	Semua orang menanam pohon, tapi hasilnya tidak begitu bagus	Sengon, bibit terlalu tua;
Pasar	2	Baik untuk Peserta No. 15 & 9, tetapi tidak untuk yang lain karena mereka tidak memiliki pohon dan tidak ada waktu untuk menjual	Peserta No. 15 bagus untuk mentor
Pengukuran	2	Hanya diameter pohon yang dikerjakan oleh peserta no 15 dan 16; Para pedagang yang biasanya menghitung volume; para pedagang biasanya melakukan panen, dan mengangkut ke penggergajian.	
Pemangkasan	4	Peserta No. 4, 9, 15, dan 17	
Penjarangan	1	Peserta No.17	
Manajemen risiko	11	Dengan menanam pohon dan buah-buahan seperti <u>durian, alpokat, jengkol, jeruk, cengkeh, jahe, jekfruit, sereh, kencur, kunyit, bayur, dan lain-lain</u> ; Hasil tidak begitu baik karena masalah seperti bibit buruk, curah hujan kurang, transportasi bibit – tidak ada tanah yang tersisa di polibag,; bibit diberikan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan tetapi dari Dinas Kehutanan Provinsi.	
Institusi FG	0	Tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang MTG, namun ada kegiatan pengambilan bibit dan penanaman pohon di kebun, namun dilakukan secara individual	

Kunjungan lapangan dilakukan ke peternakan Peserta No. 17, 9, 4 dan 15. Tim juga mengunjungi peternakan non-peserta yang telah belajar dari Peserta No.9:

- (1) **Peserta No. 17:** Dia sangat aktif mempromosikan pertanian pohon di desanya – Budi Lestari. Dia mempraktikkan manajemen pohon dan pertanian, dan pada tahun lalu dia menanam beberapa pohon lagi di perkebunan kayu dan buahnya. Ia menanam jeruk, jati, waru dan akasia. Dia mendemonstrasikan bagaimana dia melakukan pemangkasan dan penjarangan tambahan setelah pelatihan MTG.



- (2) **Peserta No. 9:** Dia menanam lebih banyak pohon setelah pelatihan MTG, seperti waru gunung, akasia, dan lain-lain. Ia telah menanam beberapa jenis pohon di petak pertama lahannya seperti jeruk, pepaya, waru, salak sebagai pagar, mahagoni, dan sengon.





- (3) **Non peserta MTG:** Petani ini punya mempelajari praktik lapangan MTG dari Peserta No. 9.



- (4) **Peserta No. 4:** Dia memiliki kebun campuran di mana beberapa spesies pohon ditanam di sebidang tanah yang sama termasuk jati, mahagoni, akasia, karet, dan lainnya. Dia tidak melakukan pengelolaan pohon dan kebun apa pun sampai dia mengikuti pelatihan MTG di Budi Desa Lestari.



- (5) **Peserta No. 15:** Dia lebih banyak menanam pohon seperti akasia; menjual pohon akasia dengan “harga bagus” setelah belajar pengukuran dan pemasaran melalui pelatihan MTG. Ia menjual

pohonnya kepada mertuanya yang merupakan produsen mebel di Lampung Selatan – Tanjung Bintan.

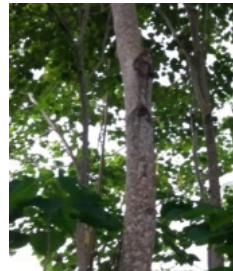
***Dampak pelatihan MTG terhadap petani yang tidak berpartisipasi***

Evaluasi ex-post dari pelatihan MTG terpilih menemukan bahwa beberapa peserta pelatihan telah mengubah praktik manajemen pertanian petani lain di komunitas mereka. Misalnya, empat petani non-peserta di Bulukumba baru pertama kali melakukan pemangkasan dan penjarangan. Contoh lainnya dilaporkan di Benjara (Peserta No. 16), Malleleng (Peserta No. 15), Jepitu (Peserta No. 10), dan Lampung (Peserta No. 15).

**Petani Non-MTG 1 :** Pengaruh Peserta No. 15, melakukan pemangkasan pada jati lokalnya (menggunakan gergaji dan pisau untuk memotong dahan).



**Petani Non-MTG 2 :** Dipengaruhi oleh Peserta No. 16 dan melakukan pemangkasan pohon gamelina miliknya



Perubahan perilaku pengetahuan, sikap, keterampilan, aspirasi, praktik tidak saja terjadi pada peserta pelatihan MTG, tetapi juga pada anggota kelompok atau masyarakat lain yang berada di sekitar petani peserta pelatihan MTG. Perubahan ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu pertama alumni pelatihan MTG berbagi pengalaman dengan petani yang ada di kelompok tani, dan atau petani lain yang ada di sekitar memperhatikan

apa yang dilakukan oleh petani peserta MTG (Muktasam, Reid, & Race, 2017; Muktasam, Reid, & Race, 2021).

### **17.5. Adopsi Pendekatan MTG oleh Sektor Lainnya**

Pendekatan penyuluhan kehutanan dengan metode pelatihan MTG telah diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagaimana dilaporkan dalam hasil evaluasi pelatihan MTG di tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan MTG diluar dari yang dilakukan oleh Proyek CBCF (Muktasam, Reid, & Race, 2021).

Mengingat kelebihan-kelebihan dari pendekatan pelatihan MTG sebagai sebuah alternatif dalam penyuluhan kehutanan dan agroforestry, diharapkan agar pendekatan ini dapat diadopsi secara luas, dan bahkan tidak saja dalam penyuluhan kehutanan dan agroforestry, tetapi pada subsektor pertanian lainnya seperti sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, hortikultura, dan perkebunan. Pendekatan “market first” yang dilakukan memberi peluang kepada petani peserta untuk mengerti tentang jenis dan kualitas produk yang diminta pasar, dan harga yang layak untuk produk-produk yang dihasilkan petani. Atas dasar pengetahuan ini, maka petani akan terdorong untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan usaha taninya, dan membuat keputusan terbaik dalam rencana bisnis usaha taninya (Muktasam A. , 2017).

### **17.6. Pendekatan Farmers to Farmers Mentoring: Komplementer**

Konsep *petani belajar pada petani (Farmers to Famers Mentoring)* diperkenalkan dan melengkapi pendekatan MTG yang difasilitasi dana proyek CBCF ini. Sebagai catatan, petani peserta pelatihan MTG adalah pengurus atau petani maju yang mewakili kelompok taninya. Posisi ini memungkinkannya untuk secara otomatis berbagi

pengalaman dan hasil pembelajaran kepada petani lain di kelompoknya, atau kepada keluarganya, atau kepada petani lain yang ada di sekitar kebun atau tempat tinggalnya. Evaluasi terhadap hasil pelatihan MTG yang dilakukan dalam periode 2018 – 2020 menunjukkan adanya petani-petani peserta pelatihan MTG yang sudah mempraktikkan ilmu dan keterampilannya, dan bahkan telah juga berbagi ilmu dan pengalaman kepada petani lain yang ada di sekitarnya. Ini lah esensi dari petani belajar kepada petani, yang dalam Proyek CBCF dikenal sebagai *Farmers to Farmers Mentoring* (F2FM).

Konsep F2FM sebenarnya sejalan dan sesuai dengan konsep “*penyuluhan swadaya masyarakat*” atau “*penyuluh kehutanan swadaya masyarakat*” (PKSM) pada sektor kehutanan. Perbedaan kedua konsep ini adalah bahwa keikutsertaan pada pelatihan MTG menjadi syarat bagi diakuinya petani sebagai mentor karena telah memiliki ilmu dan keterampilan, sedangkan pada PKSM, hasil penelitian menunjukkan bahwa petani yang mendapat posisi sebagai PKSM tidak dilengkapi dengan ilmu dan keterampilan yang seharusnya dimilikinya. Para PKSM menyatakan dalam suatu pertemuan di Sumbawa bahwa mereka “tidak percaya diri untuk menjadi penyuluh”. Selain penguasaan terhadap substansi penyuluhan, penyuluh swadaya atau PKSM atau mentor harus juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam hal keterampilan komunikasi, memiliki dan mengelola usaha tani sendiri, dan mampu memberi contoh kepada petani lainnya, dan menjadi bagian dari masyarakat dibinanya (Muktasam, Reid, & Race, 2021).

### 17.7. Pelajaran yang Dipetik dari Pendekatan MTG dan F2FM

Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan dengan pendekatan MTG dan F2FM, maka pelajaran penting dari kedua pendekatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 17.14. Pembelajaran dari Pendekatan MTG dan F2FM

Pelatihan MTG	F2FM
(1) Partisipatif – dari identifikasi permasalahan, perumusan tujuan hingga pelaksanaan dan evaluasi pelatihan	(1) Konsep Farmers to Farmer mentoring adalah bagian komplementer dari pendekatan MTG. Konsep ini sesuai atau sejalan dengan konsep PKSM – penyuluh kehutanan swadaya masyarakat
(2) Farmers first, seeing is believing & Learning by doing – adanya kegiatan kunjungan industry menjadi forum bagi petani peserta untuk melihat langsung hasil kayu yang dibeli oleh industry, dan mendapatkan ilmu tentang hubungan antara tindakan silviculture dengan kualitas kayu yang dihasilkan.	(2) Petani yang menjadi mentor adalah petani alumni MTG. Partisipasi petani dalam MTG memberikannya bekal yang cukup untuk dapat dan percaya diri dalam bertindak dan berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan pohon dan kebun serta pengetahuan tentang pemasaran, dan lainnya.
(3) Belajar pengetahuan, keterampilan, dan merubah sikap dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan kombinasi pendekatan, dari pendekatan klasikal, praktik pengukuran dan pengelolaan, dan kunjungan usaha tani dan industry	(3) Perubahan pratek para alumni MTG menjadi contoh bagi petani lain yang ada di sekitarnya, dan ini bermakna bahwa alumni MTG telah berperan dalam menyebarkan ilmu dan keterampilan yang diperolehnya.
(4) Sesuai dengan falsafah – memberikan kemandirian kepada petani peserta MTG melalui ilmu, keterampilan, dan pengalaman yang diperolehnya. Bahkan dengan ilmu dan keterampilan yang diperolehnya, seorang alumni MTG sdh dapat menjadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan kayu, pohon dan atau kebun – dan ini dapat dijual sebagai jasa.	(4) Petani yang menjadi mentor dapat lebih percaya diri karena telah mendapat bekal dalam pelatihan MTG.

## **17.8. Ringkasan**

Uraian dalam bab ini memberi gambaran tentang pendekatan lain dalam penyuluhan pertanian, khususnya dalam penyuluhan subsektor kehutanan. Pengalaman dan hasil penelitian selama ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan relatif lebih intensif dan terlaksana dengan baik pada sektor pertanian tanaman pangan dan tidak pada sektor kehutanan dan perkebunan.

Bab ini menawarkan satu pendekatan baru tentang teknik atau metode penyuluhan dalam pelaksanaan penyuluhan yang terkait dengan pengelolaan kebun dan hutan. Walau selama ini sudah ada kebijakan tentang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), fakta menunjukkan bahwa petani-petani yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai PKSM belum dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan. Salah satu faktor yang menjadi pembatas dari belum berfungsinya PKSM adalah ketiadaan ilmu dan keterampilan dalam pengelolaan pohon dan kebun – Teknik silvikultur, dan ini yang menyebabkan para PKSM tidak percaya diri. Pelatihan MTG memberi bekal kepada petani seperti PKSM untuk kemudian menjadi modal dalam mendukung atau membantu petani lain di sekitarnya.

Pendekatan MTG menempatkan penyuluh pertanian sebagai fasilitator dan bukan sebagai guru. Pekerjaan penyuluh adalah memfasilitasi kegiatan pelatihan MTG dengan menghadirkan narasumber dan para petani peserta. Keterampilan fasilitasi diperlukan oleh seorang penyuluh agar dapat memfasilitasi proses dengan baik dan efektif, sebagaimana yang dilakukan dalam pelatihan MTG ini.

\*\*\*

## 18. JALAN MENUJU PROFESIONALISASI PENYULUHAN PERTANIAN<sup>23</sup>

### 18.1. Pengantar

Keseluruhan uraian yang telah disajikan dalam buku ini, dari Bab 1 hingga Bab 17 menunjukkan dengan jelas dan gamblang tentang posisi dan peran strategis penyuluhan sebagai ilmu “*Extension Science*” dan penyuluhan sebagai pendekatan “*Extension Practices and Approach*” dalam pemberdayaan, peningkatan ekonomi, dan pengembangan masyarakat. Uraian pada *bagian awal* buku telah menunjukkan tentang adanya gap atau distorsi antara “*Fakta*” yang ada dalam masyarakat sebagai buah pembangunan yang tidak dikehendaki dengan “*Kondisi Ideal*” yang menjadi cita-cita dan mimpi pembangunan – dan terwujud di tempat lain seperti Jepang, Australia & New Zealand. Semua kalangan yang pernah melihat tampilan visual dari kedua kondisi tersebut – baik di kampus maupun di luar kampus, menyatakan bahwa kondisi yang ideal itulah yang ada dalam benak mereka sebagai cita-cita dan impian yang seharusnya dituju dan diwujudkan dalam pembangunan. Uraian dalam bagian awal ini mengantar pembaca kepada pertanyaan kritis “*Kenapa Gap antara Fakta dan Kondisi Ideal*”

---

*1 Versi awal dari tulisan ini pernah disampaikan dalam beberapa kesempatan dalam rangka membahas Penyuluhan Pertanian di NTB, yaitu dalam pertemuan dengan para penyuluh di Lombok Timur, Lombok Tengah (“Mencari Format Kelembagaan Penyuluhan Pertanian” di Dinas Pertanian & Peternakan Lombok Tengah, Praya, 5 Agustus 2003), Bima dan di Lombok Barat. Makalah dipersiapkan kembali dengan judul “Penyuluhan Pertanian di Persimpangan Jalan dan Menuju Profesionalisme Penyuluhan” dan disampaikan pada “Rapat Koordinasi Forum Penyuluhan Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006”, Dinas Pertanian Propinsi NTB, Mataram 7 – 9 Agustus 2006. Pemikiran penulis tentang Penyuluhan dan Profesionalisme Penyuluhan sebagaimana yang disajikan dalam tulisan di bab ini juga disampaikan kepada para penyuluh di Kota Mataram dalam posisi penulis sebagai bagian dari Komisi Penyuluhan Pertanian – Kota Mataram, dan dalam kegiatan-kegiatan penguatan peran penyuluhan pada proyek-proyek penelitian aksi yang penulis lakukan dalam 10 tahun belakangan – antara lain Proyek CBCF, Kanoppi Fase 1 dan 2 yang didukung oleh ACIAR; Proyek CaRED dan IFSCA yang didukung oleh New Zealand, dan proyek-proyek penelitian-aksi yang didukung oleh dana PNBP – LPPM Universitas Mataram.*

*terjadi?”*, dan *“Apa yang seharusnya dapat dilakukan agar gap menjadi kecil dan bahkan tidak ada?”*.

Jawaban atas kedua pertanyaan ini dijelaskan pada *Bagian kedua* dari buku ini, yaitu berupa konsep dan teori-teori penyuluhan, yang diawali dengan definisi atau pengertian, ruang lingkup, prinsip pendidikan orang dewasa, komunikasi, adopsi dan difusi inovasi hingga pengembangan dan evaluasi program penyuluhan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh penyuluh sebagai fasilitator dan agen pembangunan.

*Bagian ketiga* dari buku ini telah menunjukkan bagaimana konsep dan teori-teori penyuluhan *seharusnya diposisikan* dan *diperankan* dalam mengatasi persoalan riil pembangunan dan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Kasus-kasus yang disajikan dalam bagian ini kembali menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan disebabkan kegagalan dalam memahami keterhubungan antara komponen di dalam sistem, dan termasuk salah satunya adalah posisi dan peran strategis penyuluhan pertanian. Peran penyuluhan sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan agribisnis, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan produksi serta pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu – pada Program MTG atau CBCF.

Uraian dalam bab ini mengajak pembaca kepada pemikiran tentang profesionalitas dan profesionalisme penyuluhan guna menghadapi persoalan-persoalan dan tantangan dunia pertanian, penyuluhan dan pengembangan masyarakat yang begitu kompleks. Penulis berpendapat bahwa seharusnya terjadi pergeseran *pola pikir atau paradigma* bahwa penyuluhan menjadi salah satu solusi atas berbagai persoalan yang ada karena tujuan utamanya *meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, merubah sikap, dan merubah praktik kearah yang lebih baik*, hingga akhirnya petani dan masyarakat hidup dalam kesejahteraannya. Inilah yang penulis rumuskan dengan judul menjadikan penyuluhan sebagai lembaga dan kerja profesional.



## 18.2. Dinamika Sistem Penyuluhan

Napak tilas atas kiprah penyuluhan dalam pembangunan pertanian Indonesia, membawa kita pada rentang waktu 80an tahun terakhir sistem dan praktik penyuluhan dalam dinamika pembangunan pertanian Indonesia. Cerita sukses Revolusi Hijau di tahun 1960an hingga pencapaian swasembada pangan di tahun 1980an menyiratkan adanya peran-peran strategis yang dimainkan penyuluh dan lembaga penyuluhan melalui sistem dan tata kelola penyuluhan. Sistem penyuluhan yang pernah mengemuka dalam mendukung pembangunan pertanian Indonesia antara lain penyuluhan dengan pendekatan massal seperti *Bimbingan Massal* (BIMAS) pada tahun 1964, dan *Instruksi Massal* (INMAS) pada periode 1967 – 1973. Pendekatan penyuluhan dalam sistem Bimas dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui penerapan teknologi pancausaha yang mencakup *penggunaan bibit unggul, ketetapan penggunaan pupuk, cara bercocok tanam yang baik, penggunaan obat pemberantas hama dan perbaikan sistem pengairan*. Pendekatan Inmas merupakan penyempurnaan dari Bimas melalui pemberian kredit kepada petani.

Sistem kerja penyuluhan disempurnakan lagi melalui pelaksanaan *Intensifikasi Umum* (INMUM) dan *Intensifikasi Khusus* (INSUS<sup>24</sup>) pada periode 1973-1987. Perbaikan sistem penyuluhan terus dilakukan hingga di tahun 1987-1988 diperkenalkan pendekatan *Super*

---

<sup>24</sup> Insus adalah Pelaksanaan program Bimas oleh petani sehamparan secara berkelompok guna memanfaatkan potensi lahan sawah, teknologi, daya dan dana secara optimal. Kegiatan kelompok tani secara keseluruhan diprakarsai oleh kelompok inti dalam merumuskan rencana kerja, mencari dan menyebarkan informasi, memimpin dan mengawasi kegiatan anggota, melakukan usaha-usaha dan hubungan kerjasama anggota, melakukan usaha-usaha dan hubungan kerjasama dengan pihak luar kelompok serta menghadiri forum-forum komunikasi dengan para pemuka masyarakat di desanya (<http://repository.ipb.ac.id>).

Untuk mensukseskan program ini ditetapkan penyaluran pupuk melalui KUD. Dalam rangka pembinaan KUD, pemerintah memberi kesempatan kepada KUD untuk membeli pupuk langsung dari Lini III dengan jumlah terbatas (5-10 ton) secara tunai. Pengamanan pertanaman diupayakan dengan pengadaan kredit sprayer. Permasalahan yang dihadapi antara lain masalah tunggakan kredit Bimas (<http://repository.ipb.ac.id>).

*Intensifikasi Khusus* (SUPRA INSUS) yang memberi perhatian pada aspek *rekayasa teknologi, sosial, dan ekonomi*, dan pengenalan model *Kredit Usaha Tani* (KUT) sebagai pengganti model kredit Bimas.

Peningkatan sistim penyuluhan berlanjut dengan diperkenalkannya pendekatan partisipasi melalui program *Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit* (SLPHT), SLPTT dan lainnya, hingga lahirnya UU No.6 Tahun 2006 tentang Sistim dan Tata Kelola Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Kiprah penyuluhan terasa kembali ke titik awal ketika kemudian UU Otonomi Daerah hadir dan meleburkan semua kelembagaan penyuluhan yang ada, dan penyuluhan kembali kepada kondisi semula dengan beragam pandangan dan ekspresi “putus harapan” – Gambar 18.1.

**BIMAS (Bimbingan Massal, 1965)** kegiatan penyuluhan secara massal dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara menetapkan pancausaha tani (penggunaan bibit unggul, ketetapan penggunaan pupuk, cara bercocok tanam yang baik, penggunaan obat pemberantas hama dan perbaikan sistem pengairan). Penyuluhan tersebut merupakan bimbingan bersama dari berbagai instansi dan lembaga pemerintah/swasta ke arah swadaya masyarakat petani yang sekaligus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya (Suyatno, 2007).

**SLPHT (1986)** Konsep ini kemudian mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1986 & Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang berhasil dalam menerapkan PHT pada lahan pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan, ekosistem, dan sistem sosial masyarakat.

**Sekolah Lapang – Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)** - bentuk sekolah yang seluruh proses belajar-mengajarnya dilakukan di lapangan, yang dilaksanakan di lahan petani peserta PTT dalam upaya peningkatan produksi padi nasional.

### MASA ORDE BARU

### ORDE REFORMASI

#### BIMAS – INMAS – INSUS – SUPRA INSUS

#### SLPTT – SLPHT - SLI

**INMAS (Instruksi Massal, 1965)** - Suatu Program Intensifikasi yang dilaksanakan melalui pemberian program kredit usaha bagi petani sebagai langkah lanjutan bagi para peserta Bimas (<http://army-as.web.id>).

**SUPRA INSUS (1987)** - Suatu program rekayasa sosial dan ekonomi dalam penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar kelompok tani pelaksana Insus pada satu WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan) (<http://repository.ipb.ac.id>).

**INSUS (Intensifikasi Khusus)** - Pelaksanaan program Bimas oleh petani sehamparan secara berkelompok guna memanfaatkan potensi lahan sawah, teknologi, daya dan dana secara optimal. Kegiatan kelompok tani secara keseluruhan diprakarsai oleh kelompok inti dalam merumuskan rencana kerja, mencari dan menyebarkan informasi, memimpin dan mengawasi kegiatan anggota, (<http://repository.ipb.ac.id>).

**SISTEM KERJA LAKU** yaitu pendekatan penyuluhan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya, yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani / kelompok tani (POKTAN) yang dilakukan secara terjadwal. Sistem kerja ini didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior secara terjadwal dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan.

Gambar 18.1. Dinamika Sistim Penyuluhan di Indonesia

### **18.3. Penyuluhan di Persimpangan Jalan**

Bagi para pemikir dan praktisi penyuluhan, dalam satu dekade terakhir ini “dunia penyuluhan” berada di persimpangan jalan – pasca berlakunya UU No.23 Tahun 2014 dan tidak berlakunya UU No, 6 Tahun 2006. Mereka berada dalam kebingungan dan tidak mengerti “penyuluhan harus dibawa kemana”. Melangkah maju tidak jelas, berbelok pun kabur dan bahkan berhenti di persimpangan pun tidak mungkin. Berbagai pernyataan dan sindiran menyatakan secara jelas bahwa penyuluhan “tidak bertenaga”, “tidak jelas apa yang mau dilakukan”, “penyuluhan tidak dibutuhkan lagi”, “penyuluhan tidak berfungsi”, “petani tidak belajar dari penyuluh”, “petani belajar dari Youtube”, “Petani berkonsultasi dengan Mbah Google”, “penyuluhan tidak mendukung bagi peningkatan PAD”, dan bahkan ada yang menyatakan “penyuluhan stagnan”. Semua pernyataan ini adalah fakta yang sedang dihadapi oleh siapa pun yang hidup di dalam “dunia penyuluhan”. Oleh karena itu, adalah benar bahwa “Penyuluhan berada di persimpangan jalan”!

Fakta bahwa “penyuluhan berada di persimpangan jalan” adalah sebuah ironi! Betapa tidak, ketika di dunia barat dan beberapa Negara lain di Timur mengandalkan “penyuluhan” sebagai organisasi penggerak utama pembangunan pertanian dan pengembangan masyarakat, dan bahkan seorang pakar penyuluhan menganggap bahwa “penyuluhan” menjadi “organisasi masa depan” (Patton, 1993) atau “Indonesia menjadi contoh dari gerakan penyuluhan partisipatif” (Van den Ban, 2000). Ironis ketika di Indonesia “penyuluhan” dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting, atau bahkan “orang dalam sekalipun” tidak memiliki tenaga untuk menempatkan “penyuluhan pada posisi strategis” dalam konstelasi pembangunan nasional dan regional, dan khususnya pembangunan pertanian, termasuk kegagalan dalam memahami hubungan antara penyuluhan dan 17 poin Tujuan Pembangunan Global atau Sustainable Development Goals (SDGs). Kegagalan dalam menempatkan “organisasi dan lembaga penyuluhan” sebagai sesuatu yang strategis

juga dapat ditelusuri dalam dokumen-dokumen pembangunan yang dikembangkan oleh hampir semua kabupaten kota yang ada di NTB. Analisis isi terhadap semua “*Rencana Strategis Pembangunan Daerah*” (Renstrada), dan atau “*Rencana Pembangunan Jangka Panjang*” dan “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah*” (RPJM) menunjukkan konsistensi akan lemahnya artikulasi peran penyuluhan dalam proses pembangunan. Dari lima dokumen Renstra dan RPJM/RPJP yang dikaji, hanya satu Kabupaten yang secara jelas menganggap bahwa “penyuluhan pertanian” adalah penting, yaitu Kabupaten Lombok Timur. (Lihat Lampiran 1).

Tulisan ini mencoba untuk mengungkap apa yang seharusnya dilakukan untuk kembali menempatkan “penyuluhan” sebagai sebuah organisasi masa depan, yang memainkan peran strategis dalam pembangunan, tidak saja dalam konteks pembangunan pertanian, tetapi juga dalam pembangunan yang lebih luas. Pada bagian pertama tulisan akan diuraikan dengan jelas tentang tantangan yang sedang dihadapi dunia pertanian, yang sekaligus menjadi tantangan dunia penyuluhan. Kemudian di bagian berikutnya diuraikan secara singkat permasalahan yang terjadi dan dialami para praktisi penyuluhan, yang merupakan hasil evaluasi serta refleksi atas pengalaman pelaksanaan penyuluhan selama ini. Tantangan dan hasil refleksi ini kemudian menjadi dasar bagi pengembangan model dan alternatif strategis bagi arah kebijakan penyuluhan ke depan.

#### **18.4. Tantangan Pembangunan Pertanian dan Refleksi Dunia Penyuluhan**

Berbagai dokumen dan analisis tentang pembangunan pertanian menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan dan ke depan, pembangunan pertanian dan ekonomi tengah berhadapan dengan sejumlah tantangan, yang juga sekaligus menjadi peluang. Tantangan dan peluang ini antara lain adalah proses Globalisasi informasi dan ekonomi, proses otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah, proses perubahan sosial yang berlangsung cepat, dan dinamika perubahan kebijakan yang menyertainya. Dalam Naskah Akademik

yang dikembangkan sebagai dasar pengembangan “Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian”, tantangan ini diungkapkan sebagai perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi pengembangan penyuluhan pertanian, yang meliputi (1) globalisasi; (2) berlakunya otonomi daerah; (3) kebijaksanaan pembangunan pertanian; (4) perkembangan kondisi petani; dan (5) pergeseran paradigma pembangunan pertanian<sup>25</sup>:

(1) **Globalisasi** ternyata telah membawa pengaruh besar bagi terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di sektor pertanian dan penyuluhan pertanian. Seorang pakar penyuluhan menyatakan bahwa perubahan akibat Globalisasi telah memunculkan paling tidak tiga isu penting di bidang pertanian (Miller, 1993), yaitu:

- Isu tentang *penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan* - bagaimana agar sumber daya alam, lahan, air, hutan dan lainnya. dapat digunakan sedemikian rupa sehingga menjamin bagi keberlanjutan sektor pertanian untuk masa yang akan datang. Kenyataan menunjukkan betapa petani berusaha menggunakan teknologi apa pun demi meningkatkan produksi dan mengabaikan berbagai risiko seperti degradasi lahan, polusi air dan udara, dan dampak negatif lainnya.
- Isu tentang *kompetisi internasional* - telah terjadi persaingan yang sengit di pasar lokal maupun pasar internasional untuk produk-produk pertanian. Produk-produk pertanian luar negeri dan luar daerah seperti bawang putih, jeruk, apel, beras, dan lainnya bersama hasil olahannya (buah dan sayuran kaleng, dan juga dalam bentuk tepung, dan jeli), kini hadir di pasar-pasar lokal di NTB, dan ini menjadi pesaing bagi produk yang dihasilkan oleh petani di daerah ini. Di luar negeri para eksportir

---

<sup>25</sup> DPR RI(2005).“Naskah Akademik Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian ”.

produk pertanian juga bersaing dengan eksportir produk pertanian dari negara lain yang sukses menghasilkan komoditi-komoditi pertanian dengan biaya murah dan sehat. Kita dapat mengamati betapa orang mulai beralih pada produk-produk organik, tidak menggunakan bahan-bahan kimia dalam porsi yang berlebihan. Termasuk juga dalam isu persaingan internasional ini adalah berlakunya skema *common effective preferential tariff* (CEPT) bagi kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area - AFTA)<sup>26</sup>.

- Isu tentang *perubahan dalam proses-proses sosial* - petani kini memperoleh informasi dari mana saja dengan menggunakan perangkat terbaru di bidang teknologi informasi seperti antena parabola, komputer dan lain sebagainya. Mobilitas petani juga cukup tinggi, termasuk juga di Lombok Selatan dan Lombok Timur, tidak saja antar daerah, tetapi juga antara negara. Dalam kondisi demikian terjadi perubahan dalam hal akses terhadap informasi dan sumber-sumber informasi.

Globalisasi sebenarnya dapat membuka peluang ekonomi, dan bahkan mendukung pembangunan seluruh aspek pembangunan suatu negara atau masyarakat, tetapi fakta pada sebagian besar negara berkembang menunjukkan bahwa janji-janji manis globalisasi tidak dapat dipenuhi. Globalisasi menjadi arena eksploitasi pengelolaan sumber daya alam, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya sosial oleh negara-negara maju atas negara berkembang. Globalisasi gagal membawa kesejahteraan masyarakat negara berkembang (Stiglitz, 2002). Kegagalan ini memunculkan pemikiran tentang bagaimana menyiasati agar globalisasi juga memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang (Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*, 2006).

---

<sup>26</sup> Pengurangan tarif/bea masuk untuk sejumlah produk hingga 0-5%.

- (2) **Otonomi Daerah** ternyata juga membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek pembangunan di daerah, termasuk sektor pertanian (dalam arti luas) serta penyuluhan. Usaha untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah melahirkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang sebagian besar bertujuan “menarik retribusi”. Lemahnya koordinasi dan kuatnya ambisi untuk meningkatkan PAD ternyata telah membebani masyarakat dan lembaga terkait, yang pada akhirnya mengurangi daya saing sejumlah produk. Lebih ironis, kesalahan pemahaman akan esensi Otonomi Daerah dengan berbagai konsekuensinya telah menyebabkan munculnya gagasan untuk melebur dan membubarkan sejumlah lembaga yang tidak memiliki kemampuan memberi kontribusi pada perolehan PAD, dan salah satu yang menjadi korban adalah “Lembaga Penyuluhan Pertanian”.
- (3) **Kebijakan Pembangunan Pertanian** telah mengalami pergeseran dari “pembangunan pertanian” ke “pembangunan sistem dan usaha agribisnis”, yang mencakup Program Agribisnis dan Program Ketahanan Pangan. Perubahan ini membawa konsekuensi pada perlunya perubahan pendekatan, lingkup, sasaran, materi dan metode penyuluhan.

Hasil penelitian dan analisis atas beberapa dokumen, termasuk dokumen Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dari Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa sektor pertanian Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan berikut:

- (1) Rendahnya tingkat kesejahteraan dan tingginya tingkat kemiskinan petani nelayan
- (2) Produktivitas usaha tani rendah atau mengalami kejenuhan
- (3) Terus berkurangnya lahan pertanian produktif sebagai akibat dari proses konversi lahan ke penggunaan-penggunaan lain yang lebih ekonomis atau menguntungkan
- (4) Rendahnya SDM dan terbatasnya akses petani terhadap sumber daya produktif, khususnya akses terhadap sumber permodalan
- (5) Penguasaan teknologi masih rendah

- (6) Terbatasnya “dinamika teknologi dan inovasi pertanian” dalam sistim produksi dan industri pengolahan
- (7) Terbatasnya akses pemasaran dan teknologi, dan
- (8) Lemah kelembagaan dan posisi tawar petani

Selain tantangan-tantangan dan permasalahan tersebut di atas, pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan dan pertanian (termasuk pendekatan dalam penyuluhan pertanian) menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan mendasar yang menyebabkan kurang berhasilnya program atau bahkan gagalnya sejumlah program pembangunan pertanian dan pedesaan (Burkey, 1993; Hammer, 1994; Rouse, 1994; Muktasam, 2000; Muktasam, et.al, 2003). Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

- (1) Pendekatan dalam pembangunan lebih bersifat “top-down” (sentralistik)
- (2) Lebih kepada pencapaian “target” yang tidak realistis, baik dalam hal waktu (realisasi, implementasi) dan jumlah
- (3) Pendekatan “proyek”
- (4) Tidak berkelanjutan
- (5) Kurang partisipatif
- (6) Bias “out-siders” - ilusi investasi dan “turis pembangunan”
- (7) Pendekatan paralel, disintegratif dan tidak terkoordinasi dengan baik.

### **18.5. Permasalahan Penyuluhan**

Hasil kajian atas kinerja sistem penyuluhan di 14 provinsi menunjukkan satu fenomena umum tentang kurang berfungsinya sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Hal ini terkait dengan ketidak jelasan kelembagaan dan mekanisme kerja penyuluhan pertanian. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi penyuluhan pertanian dapat disajikan secara rinci pada Tabel berikut ini.



Tabel 18.1. Permasalahan Penyuluhan Pertanian

<b>Petani dan Kelembagaannya</b>	
<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>	<p>Berdasarkan data Sensus Pertanian tahun 2003, jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) meningkat 2,2 % per tahun dari 20,8 juta pada tahun 1993 menjadi 25,4 juta pada tahun 2003.</p> <p>Petani Gurem meningkat 2,6 % per tahun dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 2003. Prosentase RTP Gurem dibanding RTP pengguna lahan naik dari 52,7 % pada tahun 1993 menjadi 56,5 % pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan kemiskinan petani meningkat selama dekade 1993-2003.</p> <p>Kelembagaan petani ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai unit ekonomi, sehingga kedepan harus diarahkan untuk lebih berorientasi pasar, berbasis pada sumber daya lokal dan kompetensi petani untuk mendapatkan berbagai kemudahan akses terhadap permodalan, teknologi, pemasaran, dan sarana produksi.</p>
<b>Kelembagaan Penyuluhan Pertanian</b>	
<p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>(6)</p> <p>(7)</p> <p>(8)</p> <p>(9)</p> <p>(10)</p> <p>(11)</p>	<p>Fungsi penyuluhan pertanian di Provinsi belum berjalan optimal karena mandat untuk melaksanakan penyuluhan pertanian tidak tegas.</p> <p>Beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota (7 bentuk) menggambarkan beragamnya persepsi Kabupaten/Kota tentang posisi dan peran strategis kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota. Kondisi ini menyebabkan:</p> <p>Kelembagaan penyuluhan pertanian yang berbentuk Kantor/Balai/Subdin/Seksi/Kelompok Jabfung/UPTD, sulit mengkoordinasikan instansi terkait karena eselonnya lebih rendah dari instansi yang akan dikoordinasikan;</p> <p>Kelembagaan penyuluhan pertanian yang berbentuk Subdin/Seksi/Kelompok Jabfung/UPTD, fungsi penyuluhan masih bercampur dengan fungsi pengaturan dan pengendalian. Hal ini menyebabkan berkurangnya independensi penyuluh pertanian.</p> <p>Intervensi Pemerintah untuk mengatur bentuk dan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota tidak memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Belum semua Kecamatan memiliki BPP. Adapun BPP yang ada sekarang ini kurang difungsikan dengan baik oleh Kabupaten/Kota, bahkan di beberapa Kabupaten/Kota dialihfungsikan untuk kegiatan lain.</p> <p>Kurang difungsikannya BPP mengakibatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian kurang terencana dan tidak diprogramkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kondisi ini juga menyebabkan kurang atau tidak tersedianya biaya operasional penyuluhan pertanian di Kecamatan/Desa.</p> <p>Dengan diserahkannya personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen (P3D) dari Pemerintah ke Provinsi/Kabupaten/Kota, maka kepemilikan aset kelembagaan penyuluhan pertanian beralih ke Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam kenyataannya penggunaan aset ini tidak sesuai dengan keperluan untuk menyelenggarakan</p>

<p>penyuluhan pertanian. Akibatnya penyuluh pertanian tidak mendapatkan dukungan sarana penyuluhan pertanian yang memadai sehingga kinerjanya menurun.</p> <p>(12) Pimpinan/pengelola kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota banyak yang tidak mempunyai latar belakang penyuluhan pertanian. Hal ini menyebabkan pengelolaan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian, karena pimpinan/pengelola kelembagaan penyuluhan pertanian kurang memahami arti dan peran strategis penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian di wilayah kerjanya.</p> <p>(13) Sistem penyuluhan pertanian yang disepakati bersama belum ada. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya hubungan antara kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sehingga struktur dan mekanisme pembinaan dan tata hubungan kerja juga menjadi tidak jelas.</p> <p>(14) Kabupaten/Kota belum sepenuhnya menjalankan kewenangan wajib dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum menyusun program penyuluhan pertanian, belum melakukan pembinaan terhadap penyuluh pertanian dan minimnya biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota.</p> <p>(15) Kelembagaan penyuluhan pertanian yang dimiliki dan dioperasionalkan baik oleh petani maupun oleh swasta, belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah sebagai mitra kerja sejajar untuk melayani petani.</p>
<p><b>Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b></p>
<p>(16) Kondisi tenaga penyuluh pertanian pada saat ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(17) Penyebaran dan kompetensi tenaga penyuluh pertanian masih bias kepada sub sektor pangan, khususnya padi. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya pelayanan penyuluhan pertanian kepada petani yang mengusahakan komoditas non pangan.</p> <p>(18) Banyak alih tugas penyuluh pertanian ke jabatan lain yang tidak sesuai dengan kompetensi penyuluh pertanian. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten/Kota tersebut yang mengakibatkan tidak sebandingnya jumlah tenaga penyuluh pertanian dengan jumlah petani/ kelompok tani yang harus dilayani. Kondisi ini juga menyebabkan banyak penyuluh pertanian yang frustrasi karena ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>(19) Pada beberapa Kabupaten/Kota, pengukuhan kembali penyuluh pertanian sebagai pejabat fungsional belum dilakukan sehingga penyuluh pertanian tidak diakui eksistensinya dan tunjangan fungsionalnya banyak yang tidak dibayarkan atau dibayarkan tidak sebesar seperti seharusnya. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya motivasi penyuluh pertanian untuk bekerja lebih baik.</p> <p>(20) Kenaikan pangkat sering terlambat dan pola karir tidak jelas sehingga kondisi ini juga mengurangi motivasi dan kinerja para penyuluh pertanian untuk bekerja lebih baik dan seringkali menyebabkan frustrasi.</p> <p>(21) Rekrutmen dan pembinaan karier penyuluh pertanian belum sepenuhnya berpedoman pada SK MenkowsabangPAN No.19/1999 dan ketentuan usia pensiun bagi penyuluh pertanian belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>(22) Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian, terutama melalui Diklat, sudah jarang dilakukan. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan dan kinerja penyuluh</p>

<p>pertanian dalam menjalankan tugasnya dan menurunnya kredibilitas mereka di mata petani.</p> <p>(23) Penyetaraan penyuluh pertanian dari pendidikan SLTA ke DIII belum terselesaikan. Kondisi ini menyebabkan mereka dapat diberhentikan sebagai pejabat fungsional.</p> <p>(24) Usia penyuluh pertanian sebagian besar di atas 50 tahun. Kondisi ini menyebabkan 10 tahun yang akan datang jumlah penyuluh pertanian menjadi sangat berkurang karena memasuki usia pensiun.</p> <p>(25) Penyuluh Pertanian Swakarsa dan Swasta belum berkembang dengan baik, karena pembinaannya belum terprogram dan belum didukung oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya peran serta petani dan swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.</p> <p>(26) Biaya operasional untuk penyuluh pertanian yang disediakan oleh Kabupaten/Kota tidak memadai. Hal ini menyebabkan frekuensi dan intensitas kunjungan penyuluh pertanian ke petani sangat kurang.</p>
<p>Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian</p>
<p>(27) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip penyuluhan partisipatif dan belum dilaksanakan secara terpadu sebagai bagian dari suatu sistem pemberdayaan petani. Hal ini menyebabkan kurangnya peran serta petani dan terputusnya jaringan kerjasama antara penyuluhan pertanian dengan kegiatan pemberdayaan petani lainnya (penelitian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran).</p> <p>(28) Penyusunan program penyuluhan pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan serta belum didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunannya. Kondisi ini menyebabkan program yang disusun tidak realistis dan belum mencerminkan kebutuhan petani.</p> <p>(29) Belum mendorong kemitraan dengan petani, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keadaan ini menyebabkan keterlibatan dan penumbuhan penyuluh pertanian swakarsa dan swasta, sebagai bagian dari jaringan penyuluhan pertanian, kurang berjalan dengan baik.</p> <p>(30) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian masih berorientasi keproyekan dan kegiatannya masih bersifat parsial serta belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan penyuluhan pertanian pada keberadaan proyek.</p> <p>(31) Materi dan metode penyuluhan pertanian belum sepenuhnya mendukung pengembangan agribisnis komoditas unggulan di daerah, karena kurangnya dukungan informasi dan keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menyebabkan dinas-dinas lingkup pertanian merasa tidak mendapatkan dukungan kegiatan penyuluhan pertanian.</p>

### Sumber daya Penyuluhan Pertanian

- (32) Sulitnya mendapatkan informasi dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik lokalita karena terbatasnya kemampuan penyuluh pertanian untuk mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi. Kondisi ini menyebabkan kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan penyuluh pertanian untuk menyediakan materi penyuluhan yang dibutuhkan petani.
- (33) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kondisi ini menyebabkan rendahnya mobilitas penyuluh pertanian dan kurang optimalnya pelayanan terhadap petani.
- (34) Pembiayaan penyuluhan pertanian yang bersumber dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota baik melalui dana dekonsentrasi, dana alokasi umum (DAU), dan APBD maupun kontribusi dari petani dan swasta masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak optimal, yang pada gilirannya akan menghambat pelaksanaan program pembangunan pertanian.

**Sumber:** DPR RI(2005).“Naskah Akademik Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian”.

Beberapa penelitian terbaru dalam rentang 10 tahun terakhir juga menunjukkan konsistensi lemahnya peran penyuluhan dalam mendukung petani dan pembangunan pertanian (Muktasam, Suadnya, & Rosiady, 2003; Muktasam, Kusumo, Dipokusumo, & Suhendro, 2004; Widodo, 2015; Muktasam, 2016; Muktasam A. , 2017; Muktasam, et al., 2019; Muktasam, Sahidu, & Hayati, 2022).

## 18.6. Menuju Profesionalisme Penyuluhan

Perubahan-perubahan tersebut di atas (sebagai akibat dari globalisasi) bersama dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, secara nyata menuntut perubahan-perubahan dalam pendekatan pembangunan, khususnya di sektor pertanian. Bagi dunia penyuluhan, perubahan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana agar;

- (1) Petani mampu menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan mampu mengembangkan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable agriculture*).

- (2) Petani menghasilkan produk-produk pertanian yang mampu bersaing di pasar lokal maupun pasar internasional.
- (3) Penyuluh dan petani mampu mengelola “proses sosial” secara lebih profesional dalam rangka pemberdayaan petani dan sektor pertanian.

Implikasi langsung dari tantangan dunia pertanian tersebut adalah perlunya perubahan dalam sistem penyuluhan pertanian, dan ini memerlukan perubahan dalam *kelembagaan penyuluhan pertanian*, *kelembagaan petani* dan *beserta mekanisme kerja penyuluhan*. Perubahan juga diperlukan dalam *sumber daya manusia pertanian*, baik aparat maupun petaninya agar beralih dari pertanian sekedar “menjalankan tugas” ke arah “profesionalisme kerja dan usaha”. Perubahan-perubahan ini diperlukan agar:

*Petani tidak menjadi buruh di lahannya sendiri  
Menjadi gelandangan di kampung sendiri*

Mengingat strategisnya posisi dan peran lembaga penyuluhan di masa kini dan yang akan datang, seorang pakar penyuluhan dari Amerika menyatakan bahwa “penyuluhan merupakan organisasi masa depan” - *“extension is the future organisation”* (Patton, 1993). Bagaimana pertanian di masa kini dan di masa yang akan datang akan sangat ditentukan oleh bagaimana penyuluhan pertanian kini dan yang akan datang.

Kasus yang dihadapi petani tembakau dalam dua tahun terakhir, juga yang dihadapi oleh petani-petani lain di pulau Lombok seperti Sembalun, menjadi cermin adanya titik-titik lemah pelaksanaan pembangunan pertanian dan penyuluhan yang dilakukan. Untuk itu, penyuluhan pertanian perlu beralih.

- (1) dari *“transfer of technology”* kepada *“pemberdayaan”*, *“pengelolaan isu”* dan *“penggunaan teknologi dalam penyuluhan*. Dengan pandangan ini, para penyuluh tidak lagi berpikir bahwa penyuluhan adalah semata-mata proses transfer informasi dan teknologi satu arah dari lembaga penelitian kepada petani.

Informasi, teknologi dan inovasi dapat tersedia dimana saja (termasuk di lingkungan petani) dan adalah peran penyuluh untuk memfasilitasi agar semua itu dapat tersedia dan diikuti oleh petani lain. Fakta membuktikan bahwa sesungguhnya banyak di antara petani maju dan Kontak Tani Andalan (KTNA) telah mampu melakukan “penelitian” dalam “dunianya” sehingga menghasilkan pengetahuan dan inovasi lokal yang lebih unggul.

- (2) dari “*pendekatan disiplin*” kepada pendekatan “*interdisiplin*”, para penyuluh perlu memahami bahwa usaha tani adalah suatu sistem, yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berinteraksi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama lintas disiplin - team atau komisi penyuluhan.
- (3) dari “*pemisahan antara penelitian & penyuluhan*” ke arah “*penggabungan penelitian dan penyuluhan*”, kedua kegiatan ini, penelitian dan penyuluhan seharusnya ada dalam suatu wadah/organisasi.
- (4) dari “*pendekatan paralel/disintegrasi*” ke arah “*kemitraan, networking dan kolaborasi*”, yang diperlukan dalam rangka proses konvergensi (sinergy) dan divergensi sumber daya, mengatasi antagonisme pendekatan, yang terkadang kontra produktif dan anti-partisipasi.
- (5) dari “*menggurui dan mengajar*” petani kearah “*pembelajaran petani dan organisasi*” (*community and organisational learning*), para penyuluh perlu menyadari bahwa petani sekarang berbeda dengan petani dulu. Akses petani terhadap informasi sudah lebih luas, tingkat pendidikan rata-rata sudah lebih baik, mobilitas sosial juga lebih intens, dan bahkan petani mampu mengembangkan inovasi-inovasi lokal yang lebih unggul.
- (6) dari pendekatan “*linier reduksionist*” ke arah “*pendekatan holistik dan sistem*”, penyuluhan hendaknya dilakukan dalam konteks pendekatan sistem dan lintas disiplin - ini mengisyaratkan

pentingnya kebersamaan antar penyuluh dari berbagai disiplin/instansi.

Pergeseran paradigma penyuluhan pertanian tersebut di atas mengisyaratkan perlunya perubahan dalam organisasi dan manajemen penyuluhan. *Oganisasi dan manajemen penyuluhan* di era global, otonomi daerah, media sosial, and industri 4.0 seharusnya diarahkan agar memiliki kemampuan-kemampuan/ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Peka dan mampu memberikan respons yang cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
- (2) Mengembangkan proses penyuluhan yang profesional dan lebih produktif.
- (3) Mampu mengangkat harkat hidup petani sekaligus penyuluhnya.
- (4) Mampu memberikan kepuasan kerja bagi para penyuluh dan siapa saja yang terlibat di dalam aktivitas penyuluhan.
- (5) Lembaga penyuluhan menjadi organisasi yang memiliki posisi dan peran strategis dalam keseluruhan sistem agribisnis (subsistem input, produksi dan output) – learning organisation.
- (6) Penyuluhan dapat berfungsi dalam melayani kepentingan umum petani tanpa harus dibayar (penyuluhan sebagai “*public goods*” - tidak laku untuk dijual) dan atau kepentingan petani secara perorangan/petani komersial dan harus dibayar (penyuluhan menjadi “*private goods*” - laku untuk dijual).
- (7) Kelembagaan penyuluhan yang bersama-sama dengan petani mampu memberdayakan petani menggapai hari esok yang lebih baik.

### **18.7. Ringkasan**

Gap antara *fakta* hasil pembangunan dengan *kondisi ideal* atau *cita-cita* pembangunan menjadi petunjuk dari adanya *permasalahan* dalam pelaksanaan pembangunan atau pengembangan masyarakat yang dilakukan selama ini. Refleksi dan peninjauan kembali terhadap langkah-langkah *pengembangan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan* harus dilakukan dengan serius dalam rangka

*mengurangi dan bahkan menghilangkan gap antara fakta dan kondisi ideal masyarakat – sosial ekonomi dan lingkungan.*

*Penyuluhan sebagai ilmu dan sekaligus sebagai pendekatan dalam merubah perilaku – pengetahuan, sikap dan keterampilan serta tindakan memiliki posisi dan peran strategis dalam mengatasi persoalan gap tersebut. Kesadaran tentang posisi dan peran strategis ini menjadi dasar bagi ilmuwan dan praktisi penyuluhan untuk meningkatkan kualitas diri menuju profesionalisme penyuluhan. Penyuluhan bukan lagi sebagai sebuah proses pengajaran, tetapi proses fasilitasi dengan lembaga penyuluhan yang berpredikat *learning organisation* – lembaga yang selalu meningkatkan diri melalui proses *aksi-refleksi*. Jika tidak, maka sindiran orang tentang lembaga penyuluhan tidak lagi relevan dan tidak dibutuhkan akan menjadi kenyataan. Bab ini sudah mengingatkan peserius dan komitmen untuk mendukung pergeseran paradigma penyuluhan.*

\*\*\*



## 19. PENUTUP

Penyuluhan adalah proses Pendidikan informal atau pembelajaran atau proses komunikasi yang ditujukan untuk merubah perilaku petani dan keluarganya, yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. Output atau hasil langsung dari kegiatan penyuluhan ini akan menjadi dasar atau syarat bagi terjadinya perubahan praktik yang dalam konsep penyuluhan dikenal sebagai adopsi – diterapkannya inovasi oleh seseorang atau anggota sistem sosial. Perubahan praktik ini pada akhirnya akan menjadi syarat bagi terjadinya peningkatan produksi dan pendapatan, dan inilah yang menjadi tujuan akhir dari kegiatan penyuluhan, tentu bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang dirancang untuk pengembangan masyarakat atau pembangunan. Tulisan dalam buku ini telah memberi perhatian pada peran penyuluhan dalam penguatan kapasitas SDM dan SDS, yang kemudian akan berkontribusi pada sumber daya alam, sumber daya keuangan dan sumber daya fisik.

Sejalan dengan definisi ini, maka sesungguhnya penyuluhan diperlukan pada semua bidang kehidupan, namun buku ini memberi fokus pada peran penyuluhan dalam sektor pertanian dalam arti luas. Beberapa konsep atau teori pokok tentang penyuluhan telah disajikan dan dibahas dengan singkat dan mendalam pada bab-bab dalam buku ini, dan sudah cukup sebagai bekal dalam memahami, menganalisis, dan menerapkannya dalam program-program pengembangan masyarakat, khususnya petani dan pertanian. Konsep penyuluhan pertanian, lingkup dan falsafah penyuluhan, prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, teori komunikasi, adopsi dan difusi inovasi, penyusunan dan evaluasi program sudah cukup memadai diuraikan dalam bab-bab buku ini.

Penyajian hasil-hasil penelitian pada bab-bab berikutnya, dari Bab 9 hingga Bab 12 memperkuat pemahaman tentang penyuluhan dalam konteks pembangunan. Posisi strategis dan peran penyuluhan sebagai ilmu dan pendekatan dalam pembangunan, dan khususnya dalam

rangka peningkatan penghidupan petani ditunjukkan dalam tulisan-tulisan di bab-bab ini seperti penyuluhan dan rantai nilai, peran penyuluhan dalam pengembangan agribisnis bagi pengentasan kemiskinan, dan pelaksanaan penyuluhan melalui pendekatan pelatihan MTG dan Famers to Farmers Mentoring atau F2FM.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Anandajayasekeram, P. (2008). *Concepts and practices in agricultural extension in developing countries: A source book*. ILRI (aka ILCA and ILRAD).
- Applbaum, R., Anatol, K., Hays, E., Jenson, O., Porter, R., & Mandel, J. (1973). *Fundamental Concept in Human Communication*. New York: Canfield Press, San Francisco - A Department of Harper & Row, Publisher, Inc.
- BAPPEDA Dompu. (2022). *Road Map Program Pengembangan Jagung, Porang, Padi, Sapi, dan Ikan Kabupaten Dompu*. Dompu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dompu.
- Barraclough, S. L., & Ghimire, K. B. (2013). *Agricultural expansion and tropical deforestation: International trade, poverty and land use*. Routledge.
- Bennett, C. (1975). Up the hierarchy. *Journal of Extension.*, [On-line], 13(2).
- Berlo, D. (1960). *The Process of Communication*. New York: Holt, Rinehart.
- Burkey, S. (1993). *People First: A Guide to Self-reliance Participatory Rural Development*. London: Zet Books Ltd.
- Burns, R. (1998). *The Adult Learner at Work*. New South Wales : Business & Professional Publishing.
- Cambon, S., & Rachaputi, R. (2013). *Eastern Indonesia agribusiness development opportunities (EI-ADO)– analysis of legume value chains*. Canberra: ACIAR.
- Cernea, M. (. (1991). *Putting People First: Sociological Variables in Rural Development*. . New York: Oxford University Press.

- Chamala, S. (1995). Group Effectiveness: From Group Extension Methods to Participative Community Landcare Groups. In S. S. Chamala, & K. (. Keith, *Participative Approaches for Landcare: Perspective, Policies, Program* (pp. 73 - 92). Brisbane: Australian Ac.
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Harlow - England: Longman Scientific & Technical.
- Consulting, C. H., Flewelling, J., Fox, P., Puspadi, K., & Adar, D. (2013). *Eastern Indonesia agribusiness development opportunities (EI-ADO) –analysis of maize value chains*. Canberra: ACIAR.
- Dent, B., & Macharia, J. (2017). *7 Steps to Connecting Farmers*. Arusha, Tanzania: World Vegetable Center.
- Diederer, P., Van Meijl, H., & Wolters, A. (2003). Modernisation in agriculture: what makes a farmer adopt an innovation? (No. 1225-2016-98650).
- Dodd, C., & Lewis, M. (1989). *Human Communication: Emphasizing Positive Life Values*. Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
- Fan, L., Ge, Y., & Niu, H. (2022). Effects of agricultural extension system on promoting conservation agriculture in Shaanxi Plain, China. *Journal of Cleaner Production*, 380, 134896.
- FAO. (2019). *Agricultural Extension Manual*, by Khalid, S.M.N. & Sherzad, S. (eds). Apia. Food and Agricultural Organization.
- FAO. (2022). *Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2022*. Rome - <https://doi.org/10.4060/cc1403en>: FAO.
- Feder, G., & Umali, D. L. (1993). The adoption of agricultural innovations: a review. . *Technological forecasting and social change*, 43(3-4), 215-239.

- Feder, G., Just, R. E., & Zilberman, D. (1985). Adoption of agricultural innovations in developing countries: A survey. *Economic development and cultural change*, 33(2), 255-298.
- Fischer, G., Shah, M., Tubiello, F., & Van Velhuizen, H. (2005). Socio-economic and climate change impacts on agriculture: an integrated assessment, 1990–2080. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360 (1463), 2067-2083.
- Flewelling, J. (2013). *Eastern Indonesia agribusiness development opportunities - analysis of maize value chains. A report prepared by Collins Higgins Consulting Group Pty Ltd for the Australian Centre for International Agricultural Research for ACIAR Project AGB-2012-007*. Canberra: ACIAR.
- Flewelling, J., Fox, P., Puspadi, K., & Adar, D. (2013). *Eastern Indonesia agribusiness development opportunities (EI-ADO) – analysis of maize value chains*. Canberra: ACIAR.
- Fukuyama, F. (2002). Social capital and development. *SAIS Review (1989-2003)*, 22(1), 23-37.
- Hammer, M. (1994). "Why Project Fail". *Ceres 145 (January - February)*, 32 - 35.
- Hawkins, H., Dunn, A., & Cary, J. (1982). *Agricultural and Livestock Extension, Vol.2, The Extension Process*. Canberra: The Australian Universities' International Development Program (AUIDP).
- Hidayat, I., & Supartoko, B. (2017). AGRIBISNIS TANAMAN OBAT DAN PENERAPAN GOOD AGRICULTURAL PRACTICE DI PT. SIDO MUNCUL. *Prosiding Seminar Nasional 2017 Fak. Pertanian UMJ "Pertanian dan Tanaman Herbal Berkelanjutan di Indonesia"* (pp. 22-29). Jakarta: Universitas Muahammadiyah Jakarta.

- Ife, J. (1995). *Community Development : Creating community alternatives - vision, analysis and practice*. Melbourne: : Longman.
- Isaac, S., & Michael, W. (1990). *Handbook in Research and Evaluation*. Sandiago - California: EdITS Publishers.
- IST: Instructional Technology*. (2023, January 04). Retrieved from IST Instructional Technology: <http://ecoursesonline.iasri.res.in/mod/page/view.php?id=80665>
- Johns, C., Cargill, C., Patrick, I., Geong, M., & Johanis, L. (2009). *Smallholder commercial pig production in East Nusa Tenggara - opportunities for better market integration SADI-ACIAR research report*. Canberra: ACIAR.
- Justice, T., & Jamienson, D. W. (1999). *The Facilitator's Fieldbook*. . New York: AMACOM.
- Justice, T., & Jamieson, D. (1999). *The Facilitator's Field Book*. New York: AMACOM.
- Kamal, A. B., Sheikh, M. K., Azhar, B., Munir, M., Baig, M. B., & Reed, M. R. (2022). Role of Agriculture Extension in Ensuring Food Security in the Context of Climate Change: State of the Art and Prospects for Reforms in Pakistan. *Food Security and Climate-Smart Food Systems*, 189-218.
- Kementerian Pertanian Republik. (2023, January 05). *JDIH BPK RI*. Retrieved from JDIH Database peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160156/permentan-no-26permentanot14042012-tahun-2012>
- Kirkpatrick, D. (1998). *Evaluating the Training Programs: The four levels*. San Francisco - USA: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Klatt, B. (2000). *The Ultimate Training Workshop Handbook*. Sydney: McGraw-Hill.

- Knowles, M. (1978). *The Adult Learner: A Neglected Species*. Houston: Gulf Publishing.
- Leagans, J. P. (1961). *Characteristics of Teaching and Learning in Extension Education - in Extension Education in Community Development*. New Delhi: Directorate of Extension, Ministry of Food and Agriculture, Government of India.
- M4P. (2008). *Making Value Chains Work Better for the Poor: A Toolbook of Praticioners of Value Chain Analysis, Version 3*. Phnom Phen Cambodia: Agricultural Development International.
- Madan, S., & Maredia, K. (2021). Global Experiences in Agricultural Extension, Community Outreach & Advisory Services. Case Studies of Global Experiences in Agricultural Extension Training & Visit Model of Extension in Developing Counties. In innovations . *Innovations in Agricultural Extension*, 1-16.
- Miller, J. (1993). "Extension in Queensland: Leading of Following Change?" dalam . *Australia Pacific Extension Conference Proceeding Vol.1 (Surfer Paradise, 12 - 14 October)* (pp. 5-13). Queensland: Department of Primary Industries.
- Muktasam. (2016). *Development of timber and nontimber forest products' production and market strategies for improvement of smallholders' livelihoods in Indonesia*. Mataram: LPPM Universitas Mataram.
- Muktasam, A. (2000). *A Longitudinal Study of Group Roles in Indonesian Rural Development: An Analysis of Policy Formulation, Implementation and Learning Outcomes (Ph. D Thesis)*. Queensland: The University of Queensland.
- Muktasam, A. (2004). *A Study of Rural Development in Two Asian Countries: A Benchmarking Process for Best Practices*. Tokyo: API Fellowship The Nippon Foundation.

- Muktasam, A. (2009). *Socio-economic assessment of farmer profitability from growing peanut under local practices vs improved practices and farmer capacity to adopt improved practices to achieve higher yields*. Canberra: ACIAR.
- Muktasam, A. (2015). *Analisis Rantai Nilai bagi Pengembangan Agribisnis Beras Analog Fungsional di Kabupaten Lombok Timur*. Mataram: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) - Universitas Mataram.
- Muktasam, A. (2017). *Analisis Rantai Nilai Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Sumbawa*. Mataram: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) - Universitas Mataram.
- Muktasam, A. (2021). *Enhancing Community-Based Commercial Forestry in Indonesia*. Canberra: ACIAR.
- Muktasam, A. (2021). *Objective 2 Project Final Report - Submitter for Final Project Review*. Mataram: LPPM - Universitas Mataram.
- Muktasam, A., & Chamala, S. (1998). Group Approach in Indonesian Rural Development: Why It Fails? . *Learning Communities, Regional Sustainability and the Learning Society Conference Proceedings. Vo.2.* (pp. 254-262). Launceston, Tasmania: : Learning Communities, Regional Sustainability and the Learning Society.
- Muktasam, A., & Chamala, S. (1999). A Group Action Learning Model for Sustainable Rural Community Development: Reflections on an Indonesian Case. *The Dead Centre: Regional Australia in Crisis*. Tasmania - Australia.
- Muktasam, A., & Chamala, S. (2000). Rural Development Approaches in Developing Countries: An Indonesian Case Study of People Participation through Groups. In R. (. Samanta, *New Vista in Rural Development: Strategies & Approaches*. New Delhi -



- India: Van den Ban, A. W. (2000). Changing farming systems to realise new opportunities in tBR Publishing Corporation.
- Muktasam, A., & Nonong Parta Tanaya, I. (2021). *Analisis Rantai Nilai Sapi di Kabupaten Dompu*. Mataram: IFSCA Project.
- Muktasam, A., Kusumo, B. H., Dipokusumo, B., & Suhendro, G. (2004). *Implementation of Agroforestry and Integrated Farming System Through Involving Community Participation in The Forest Boundary and Steep Dry Land Area (Multi-stakeholders Forestry Program)*. Mataram: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) - Universitas Mataram.
- Muktasam, A., Reid, R., & Race, D. (2017). *MTG Evaluation Report - Phase I of CBCF*. Canberra: ACIAR.
- Muktasam, A., Reid, R., & Race, D. (2021). *An Evaluation of MTG Training Course Conducted in the Community-based Commercial Forestry in Indonesia*. Canberra: ACIAR.
- Muktasam, A., Reid, R., Race, D., Wakka, A. K., Oktalina, S. N., & Agusman, .. &. (2019). Enhancing the knowledge and skills of smallholders to adopt market-oriented tree management practices: lessons from Master TreeGrower training courses TreeGrower training courses in Indonesia. *Australian Forestry*, 82(sup1). *Australian Forestry*, 4-13.
- Muktasam, A., Sahidu, A., & Hayati. (2022). *Perspesi, Sikap, dan Tindakan Adaptasi Petani terhadap Perubahan Iklim di Lombok Timur*. Mataram: Lwmbaga Penelitian dan Pengabdian - Universitas Mataram.
- Muktasam, A., Suadnya, I. W., & Rosiady, S. (2003). *Microfinance for Agricultural Producers in West Nusa Tenggara (WNT) Province, Indonesia: Issues and Opportunities for a Sustainable Financial Intermediary System*. Mataram: P3P Unram.

- Muktasam, A., Suadnya, I., & Ambarwati, A. (2011). *Livestock Movement and Managing Disease in Eastern Indonesia and Eastern Australia*. Mataram: P3P Unram.
- Muktasam, A., Suadnya, I., Aluh, N., Rosmilawati, & Mursal, G. (2013). *Permusan dan Implementasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Rumput Laut di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur - NTB*. Mataram: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan.
- Muktasam, A., Wayan, I., Puspadi, K., & Nuge, W. (2015). *Pengetahuam, Sikap dan Persepsi Petani terhadap Perubahan Iklim di Pulau Lombok*. Mataram: LPPM Universitas Mataram.
- Nelson, G., Rosegrant, M., Koo, J., Robertson, R., Sulser, T., Zhu, T., . . . Lee, D. (2009). *CLIMATE CHANGES: Impacts on Agriculture and Cost of Adaptation*. New York: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Oakley, P. (1994). Bottom-up Versus Top-Down: Extension at The Crossroads. *Ceres 145 (January - February)*, 16-20.
- Oakley, P. (1994). Bottom-up Versus Top-Down: Extension at The Crossroads. *Ceres 145 (January - February)*, 16-20.
- Owen, J. M. (1993). *Program Evaluation: Forms and Approaches*. New South Wales (NSW) - Australia: Allen & Unwin.
- Ozkan, B., Dube, A. K., & Reed, M. R. (2022). Role of Agricultural Extension in Building Climate Resilience of Food Security in Ethiopia. *Food Security and Climate-Smart Food Systems*, 219-239.
- Patton, M. (1993). Future Direction of Extension. *Australia Pacific Extension Conference Proceeding Vol.1 (Surfer Paradise, 12 - 14 October)* (pp. 3-4). Queensland - Australia: Queensland: Department of Primary Industries.

- Phillips, J. (1991). *Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods - second Edition*. Houston - Texas: Gulf Publishing Company.
- Pretty, J. (2003). Social Capital and the Collective Management of Resources. *SCIENCE VOL 302 12 DECEMBER*.
- Pretty, J. (2007). Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence. *Philosophical Transaction of Royal Society B (Phil. Trans. R. Soc. B)*, 1-20.
- Pretty, J. N., & Vodouhê, S. D. (1997). Using rapid or participatory rural appraisal. *Improving Agricultural Extension*, 47-55.
- Reid, R. (2017). Developing farmer and community capacity in Agroforestry: is the Australian Master TreeGrower program transferable to other countries? *Agroforest Syst 91*, <https://doi.org/10.1007/s10457-016-0039-4>, 847–865 .
- Rivera, W. M., & Schram, S. G. (2022). *Agricultural extension worldwide: Issues, practices and emerging priorities*. Routledge.
- Rogers, E. (1983). *Diffusion of Innovations*. London: Free Press.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations - Third Edition*. New York: The Free Press.
- Rogers, E. M., & Shoemaker, F. (1987). *Memasyarakatkan Ide-ide Baru (Disarikan oleh Drs. Abdillah Hanafi (Cetakan ke IV tahun 1987)*. Surabaya: Usaha Nasional - Surabaya.
- Rossi, P. H., & Freeman, H. E. (1989). *Evaluation: A Systematic Approach*. Newbury Park - California: SAGE Publications, Inc.
- Rouse. (1994). Experiment with Democracy. *Ceres 145 (January - February)*, 21 - 25.
- Rouse, J. (1994). Experiment with Democracy. *Ceres 145 (January - February)*: , 21-25.

- Rouse, J. (1995). Farmer Participation in Extension Through Small Groups: Recent FAO Experience . In M. Libercier, & H. Scheneider, *Participatory Development from Advocacy to Action* (pp. 91-100). Paris: OECD.
- Shanmuka, A., Lenin, V., Sangeetha, V., Muralikrishnan, L., Ramasubramanian, V., & Arora, A. (2022). Analysis of Factors Affecting Social Media Utilization of Extension Agents. . *Indian Journal of Extension Education*, 58(2), 110-114.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. Great Britain: Penguin Books.
- Stiglitz, J. E. (2006). *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Bandung: Mizan.
- Van den Ban, A. W., & Hawkins, H. S. (1996). *Agricultural Extesnion - Second edition*. Victoria - Australia: Blackwell Science Ltd.
- Van den Ban, A., & Samanta, R. (2006). Agricultural Extension in Asian Nations: Why it Needs Change? In A. Van den Ban, & R. Samanta, *Chaning Roles of Agricultural Extension in Asian Nations* (pp. 1-20). Delhi - India: B.R. Publishing Corporation.
- Viana, C. M., Freire, D., Abrantes, P., Rocha, J., & Pereira, P. (2022). Agricultural land systems importance for supporting food security and sustainable development goals: A systematic review. *Science of The Total Environment*, 806, 150718.
- Waldron, S., Dahlanuddin, Mayberry, D., Mulik., M., Quigley, S., & Poppi, D. (2013). *Eastern Indonesia agribusiness development opportunities - analysis of beef value chains. A report prepared by Collins Higgins Consulting Group Pty Ltd for the Australian Centre for International Agricultural Research for ACIAR Project AGB-2012-005*. Canberra: ACIAR.
- Waldron, S., Mayberry, D., Dahlanuddin, Mulik, M., Quigley, S., & Poppi, D. (2013). *Eastern Indonesia agribusiness development*

*opportunities - analysis of beef value chains*. Canberra ACT 2601: ACIAR.

Wandschneider, T. (2013). *Eastern Indonesia agribusiness development opportunities - analysis of mango value chains. A report prepared by Collins Higgins Consulting Group Pty Ltd for the Australian Centre for International Agricultural Research for ACIAR Project AGB-2012-006*. Canberra: ACIAR.

Wandschneider, T., Baker, I., & Natawidjaja, R. (2013). *Eastern Indonesia Agribusiness Development Opportunities - Mango Value Chain*. Canberra: ACIAR.

Whitla, M., & Bruce, D. (. (1993). *Community-Based Approaches to Rural Development: Principles and Practices*. Canada: Rural and Small Town Research and Studies Program.

Widodo, D. (2015). *Analisis Kebijakan dalam Mendukung Produksi, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat*. Mataram: WWF - Arga Puji Press.

Wiriadinata, W. (April 2012). Kehutanan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi, Ekosistem Dan Hukum (Forests In Indonesia In Perspective Economic, Legal And Ecosystem). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 9 No. 1*, 151-162.

Wittenberg, E., Ragan, S. L., & Ferrell, B. (2017). Exploring nurse communication about spirituality. *American Journal of Hospice and Palliative Medicine®*, 34(6), 566-571.

Yembise, F. K., Cabuy, R. L., & Wanma, A. O. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Kerusakan Kawasan Hutan Alam pada Hutan Pendidikan Anggori Manokwari. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 6(2), 206-216.

\*\*\*

## INDEKS

- ACIAR, viii, xiii, xiv, xvi, xvii, xviii, 64, 287, 298, 317, 335, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 369, 370, 411, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 440, 441, 445, 446
- adopsi*, v, vi, x, xi, xv, 57, 59, 130, 132, 133, 134, 136, 139, 143, 147, 153, 154, 156, 157, 163, 164, 173, 174, 175, 193, 207, 208, 220, 247, 248, 290, 334, 348, 354, 361, 367, 412, 429, 447
- Adopsi, viii, xi, xviii, xxi, xxiii, xxvii, 71, 132, 134, 143, 151, 152, 164, 173, 175, 248, 407
- Adopter*, xxi, xxvii, 138, 139, 140, 164
- affective*, 56, 196, 207, 218
- AFTA, 24, 418
- Agricultural component*, 148
- andragogi, 75
- an-sich*, xiii
- aspiration*, 86, 196, 207, 208, 224, 243
- better farming*, 61, 71
- BIMAS, 413
- Bimbingan Massal*, 413
- biosecurity*, xiii
- BMKG, 343
- bullet, 123
- Capacity, 5, 15, 16
- CEPT, 24, 418
- Channel, ix, 117, 343
- cognitive domain*, 56, 246
- Communication, 5, 15, 16, 105, 112, 431, 432
- decode, 120
- DFAT, 352
- difusi*, v, vi, x, xi, xv, 130, 132, 133, 140, 141, 142, 143, 146, 157, 163, 208, 334, 348, 361, 367, 412, 429, 447
- disempowerment**, 33
- EI-ADO, viii, 352, 356, 431, 432, 433
- Empathy, 279
- empowerment, 29, 30, 184
- encode, 120
- entertainment*
- communication*, 110
- extension methods, 166
- extension science*, v, 291
- Falsafah Demokrasi*, 67
- FAO, xxv, 1, 26, 50, 108, 205, 206, 333, 432, 440
- Financial Capital, viii, 39, 447
- fishbowl, 282, 283

- Forestry component*, 148  
**formative evaluation**, 216  
 Gerhan, 299, 311  
 Grameen Bank, 134  
 HHBK, xiii, xvii, xxv, xxvii,  
 186, 188, 189, 275, 297,  
 300, 302, 303, 304, 305,  
 306, 314, 315, 318, 319,  
 333, 362, 371, 372, 377, 446  
 HHK, xiii  
 Hog Colera, xiii  
 Human Capital, viii, 38, 447  
 Hystorical, 227  
 Ideology, 5, 15, 17  
 IDT, 28, 178, 180, 181, 218,  
 226, 227, 229, 230, 232  
 IFSCA, viii, xv, xvii, xviii,  
 xxviii, 287, 351, 354, 355,  
 356, 411, 437  
*informative communication*,  
 109  
 INMAS, 413  
*Instruksi Massal*, 413  
*Intensifikasi Khusus*, 413  
*Intensifikasi Umum*, 413  
 Interest, 5, 15, 17, 135, 279  
**interpersonal**, 105, 112, 116,  
 119, 120, 121, 125, 128,  
 130, 131, 141, 301  
**intrapersonal**, 73, 111, 114,  
 115, 116, 128, 131, 301  
 IPKTM, 308, 309, 310, 315,  
 316, 320, 322  
 KAK, 268, 269  
 KASA, ix, 156, 196, 197, 207,  
 208, 224, 225, 242, 243,  
 248, 249, 250, 251, 290  
 KBD, 299, 318, 325  
 KBR, 299, 311, 318, 325  
**KOA**, 305, 330  
 kompatibilitas, 146, 155  
**Komunikasi lintas budaya**,  
 113  
 LAKU, ix, 144, 146  
*legislative approaches*, 16, 18  
*linier reduksionist*, 426  
*multiyears*, xiii  
*Natural Capital*, ix, 36, 447  
 observabilitas, 146, 155  
 Openess, 279  
*opion leaders*, xi  
 Opportunity, 4, 15, 16  
 outcomes, 29, 199, 241, 279  
 P3A, 41, 178, 180, 181  
 P4K, 28, 178, 227  
 PAD, 25, 415, 419  
*Pendekatan insentif*, 35, 183  
*penyuluh pertanian*, 69, 72,  
 167, 264, 268, 343, 346,  
 367, 410, 421, 422, 423, 424  
*persuasive communication*,  
 109  
 PIJAR, 28, 247, 248  
 Pohon Masalah, xxvii, 199,  
 200, 201, 225  
 PPL, ix, 198, 345, 348  
 practice, 51, 57, 86, 155, 208,  
 215, 250, 434

Process, xv, xvi, 5, 15, 17, 157,  
214, 431, 433, 435  
***psicomotoric domain***, 56  
public-goods, 2  
Reaction, 241, 243  
*Reasoned Action*, 89  
*Receiver*, ix, 105, 117  
ROCCIPI, 4, 9, 15, 16, 17  
Rules, 4, 15  
SDGs, 4, 415  
SEE, ix, 156, 207, 223, 225,  
242, 249  
self-concept, 76, 126  
Sensitivity, 279, 326  
*sistem agribisnis*, xi, 59, 63,  
71, 256, 257, 287, 336, 345,  
359, 361, 363, 365, 368, 427  
***stimuli eksternal***, 116  
***stimuli internal***, 116  
**summative evaluation**, 216  
TOP, ix, xxii, xxvii, xxviii,  
206, 208, 218, 219, 223,  
226, 241, 242, 249, 250, 290  
TOR, 268, 269  
TOT, ix, 8, 144, 371  
triabilitas, 146, 155



## TENTANG PENULIS



**MUKTASAM ABDURRAHMAN** lahir di Bima, sebuah kota kabupaten di ujung timur pulau Sumbawa – NTB – INDONESIA. Dia anak keempat dari tujuh bersaudara yang mendapatkan pendidikan Penyuluhan Pertanian di Institut Pertanian Bogor (Program S1, tamat tahun 1985), Universitas Melbourne (Program S2, tamat tahun 1993), dan Universitas Queensland (Program S3, tamat tahun 2000).

Setelah menyelesaikan pendidikan S3, dia dipercaya untuk memimpin Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) – Universitas Mataram dari tahun 2003 hingga 2011. Selain menjadi Kepala Pusat di P3P, dia juga menjadi pengajar tetap di Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian – Fakultas Pertanian Universitas Mataram sejak tahun 1987 hingga sekarang.

Berbagai kerjasama dan kegiatan penelitian telah dilakukannya, baik dengan dan atas dukungan lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional (DP2M – Dikti, Balitbang Departemen Pertanian, The Nippon Foundation, ACIAR, MFP-DFID, dan AusAID). Hasil penelitiannya dalam bentuk paper telah disampaikan di forum seminar nasional dan internasional (antara alain di Australia, Malaysia, Thailand, Jepang, Dakar/Senegal, dan Inggris).

Selain telah menulis paper, artikel, dan poster yang disampaikan di forum seminar dan konferensi di tingkat nasional maupun internasional (Australia, Thailand, India, Jepang, Inggris, Prancis, Senegal dan lainnya), Muktasam juga telah menulis beberapa buku yang terkait dengan penguatan kapasitas petani dan tenaga penyuluh, antara

lain buku berjudul “*Social capital and cattle marketing chains in Bali and Lombok, Indonesia* (No. 74). Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) – ditulis bersama I. W., Marshall, G. R., dan Ambarawati, I. G. A. A.(2010); “*Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Secara Berkelanjutan di Nusa Tenggara: Modul Pelatihan – Pegangan bagi Fasilitator*” (Muktasam, 2014), dan “*Penguatan Kapasitas Kelompok dalam Mendukung Terwujudnya Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Modul Pelatihan Kelompok*” (Muktasam, 2015). Bersama dengan Dr. Dede Rohadi dan Ibu Dr.Tuti Herawati menulis buku “Modul Pelatihan Fasilitator Master TreeGrower” dalam Proyek Penelitian Bersama yang didukung oleh Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR) – Australia. Buku “Manajemen Pelatihan” yang ditulisnya Bersama Prof. Dr. Ir. Arifuddin Sahidu, M.Si., dan Ir. Siti Nurjannah, M.Si. (2021).

Anda dapat mengakses dan menikmati tulisan-tulisannya melalui akses on-line dengan penelusuran pada “Google” dengan mengetik “Muktasam”, atau dengan menghubunginya melalui [muktasam03@yahoo.com](mailto:muktasam03@yahoo.com) atau bersurat kepadanya dengan alamat: **IR. MUKTASAM, M.Agr.Sc. Ph.D.**, Fakultas Pertanian - Universitas Mataram, Jln. Maja Pahit No. 62 – Mataram 83127, Lombok – NTB, INDONESIA.

\*\*\*

## SINOPSIS

**Penyuluhan** menjadi kata dan kegiatan yang populer dan akrab di telinga dan keseharian para petani dan masyarakat pedesaan, termasuk mereka yang bergerak dalam upaya-upaya pembangunan pertanian, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan petani. Sebagai sebuah kegiatan dan ilmu, penyuluhan diyakini menjadi salah satu jalan keluar dalam rangka peningkatan *pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tindakan*, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang mendukung peningkatan kondisi *sosial, ekonomi dan lingkungan*. Penyuluhan pertanian menjadi salah satu pendekatan penting dan strategis dalam mendukung peningkatan kompetensi *Sumberdaya Manusia* (Human Capital) dan *Sumber daya Sosial* (Social Capital), yang secara bersama-sama berperan dalam pembangunan bersama *Sumber daya Alam* (Natural Capital), *Sumber daya Keuangan* (Financial Capital), dan *Sumber daya Fisik* (Physical Capital).

Buku **Penyuluhan Pertanian** ini hadir dalam rangka mendukung para *mahasiswa, pengajar dan praktisi dalam bidang Ilmu Penyuluhan Pertanian*. *Bagian awal* buku ini menyajikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang tidak memuaskan, posisi serta peran strategis penyuluhan dalam memperbaiki situasi. *Bagian kedua* dari buku ini menyajikan konsep dan teori-teori pokok penyuluhan antara lain definisi, ruang lingkup, prinsip pendidikan orang dewasa, komunikasi, adopsi dan difusi inovasi, metode penyuluhan, penyusunan dan evaluasi program penyuluhan. *Bagian ketiga* dari buku ini berisi tentang aplikasi konsep dan teori-teori penyuluhan dalam pengembangan masyarakat atau pembangunan. Wawasan para pembaca dibuka dengan penyajian hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik-topik yang telah dibahas dalam bagian awal dan bagian kedua isi buku. Penggunaan hasil-hasil penelitian dan proyek sebagai ilustrasi dan sekaligus contoh bagaimana konsep atau teori penyuluhan diterapkan dalam kegiatan riil pemberdayaan petani dan masyarakat

pada umumnya. Oleh karena itu buku ini patut menjadi pegangan bagi mahasiswa yang mengambil minat Penyuluhan Pertanian, dan para pegiat atau praktisi pembangunan pedesaan, atau pengembangan masyarakat.

\*\*\*

# PENYULUHAN PERTANIAN

FAKTA, TEORI DAN APLIKASINYA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Penyuluhan** menjadi kata dan kegiatan yang populer dan akrab di telinga dan keseharian para petani dan masyarakat pedesaan, termasuk mereka yang bergerak dalam upaya-upaya pembangunan pertanian, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan petani. Sebagai sebuah kegiatan dan ilmu, penyuluhan diyakini menjadi salah satu jalan keluar dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tindakan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang mendukung peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penyuluhan pertanian menjadi salah satu pendekatan penting dan strategis dalam mendukung peningkatan kompetensi Sumber daya Manusia (*Human Capital*) dan Sumber daya Sosial (*Social Capital*), yang secara bersama-sama berperan dalam pembangunan bersama Sumber daya Alam (*Natural Capital*), Sumber daya Keuangan (*Financial Capital*), dan Sumber daya Fisik (*Physical Capital*).

Buku **Penyuluhan Pertanian** ini hadir dalam rangka mendukung para mahasiswa, pengajar dan praktisi dalam bidang Ilmu Penyuluhan Pertanian, dan Agribisnis. Bagian awal buku ini menyajikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang tidak memuaskan, posisi serta peran strategis penyuluhan dalam memperbaiki situasi. Bagian kedua dari buku ini menyajikan konsep dan teori-teori pokok penyuluhan antara lain definisi, ruang lingkup, prinsip pendidikan orang dewasa, komunikasi, adopsi dan difusi inovasi, metode penyuluhan, penyusunan dan evaluasi program penyuluhan. Bagian ketiga dari buku ini berisi tentang aplikasi konsep dan teori-teori penyuluhan dalam pengembangan masyarakat atau pembangunan. Wawasan para pembaca dibuka dengan penyajian hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik-topik yang telah dibahas dalam bagian awal dan bagian kedua isi buku. Penggunaan hasil-hasil penelitian pada beberapa Proyek Pengembangan Agribisnis sebagai ilustrasi dan sekaligus contoh bagaimana konsep atau teori penyuluhan diterapkan dalam kegiatan riil pemberdayaan petani dan masyarakat pada umumnya, menjadi kelebihan lain dari buku ini. Oleh karena itu buku ini patut menjadi pegangan dan bacaan bagi para mahasiswa, dosen, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi bidang penyuluhan pertanian, agribisnis, pembangunan pedesaan, dan pemberdayaan masyarakat.



ISBN 978-623-427-083-9 (PDF)



9 786234 270839